Peraturan Wali Kota Pekalongan
Nomor : 52
Tanggal : 11 Juli 2023

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024



RKPD 2024

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Pekalongan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan berisi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai hasil kegiatan.
17. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2024.

(3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan :

a. Renja PD Kota Pekalongan Tahun 2024;

b. Rancangan KUA serta PPAS, dan Rancangan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

(4) Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas narasi RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Narasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

   Memuat latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

   Memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

   Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

   Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan tahun 2024, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

   Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

   Memuat indikator kinerja tahun 2024.

g. BAB VII PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

(1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja PD dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran sub kegiatan, hasil kegiatan dan *outcome* masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.

BAB V
PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

d. pergeseran pagu, penghapusan dan/atau penambahan kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan dan/atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/sub kegiatan.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 Juli 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 11 Juli 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH

ANITA HERU KUSUMORINI

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ***ii***

DAFTAR TABEL ***v***

DAFTAR GAMBAR ***xvi***

BAB I PENDAHULUAN ***1***

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Hubungan Antar Dokumen 4

1.3.1 RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 5

1.3.2 RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 7

1.3.3 RKPD Kota Pekalongan dengan RKP Tahun 2024 8

1.3.4 RKPD Kota Pekalongan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 9

1.3.5 RKPD Kota Pekalongan dengan KUA PPAS dan APBD 9

1.3.6 RKPD Kota Pekalongan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 10

1.3.7 RKPD Kota Pekalongan dengan Sustainable Development Goals (SDG's) 12

1.3.8 RKPD Kota Pekalongan dengan Reformasi Birokrasi 12

1.4 Maksud Dan Tujuan 13

1.4.1 Maksud 13

1.4.2 Tujuan 13

1.5 Sistematika RKPD Tahun 2024 14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ***17***

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 19

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi 19

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 41

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 78

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 191

2.2 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022 209

2.2.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2022 209

2.2.2 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2022 221

2.2.3 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 283
2.2.4 Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2022 292
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 324
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 324
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 326
2.4 Isu Strategis 332
2.4.1 Tata Kelola Pemerintahan 333
2.4.2 Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup 335
2.4.3 Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman 337
2.4.4 Peningkatan Derajat Kesehatan 339
2.4.5 Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran 342
2.4.6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 344
2.4.7 Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal 345
2.4.8 Pelestarian Budaya Lokal 348
2.4.9 Kondusivitas Wilayah 349
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 351
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 351
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah 352
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 358
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 361
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 362
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 363
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 371
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 371
4.1.1 Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026 371
4.1.2 Misi 375
4.1.3 Tujuan Dan Sasaran 379
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 390
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional 390
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 400
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan 404
4.2.4 Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional 419

4.2.5 Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah 434
4.2.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD 451
4.3 Inovasi Kebijakan Pembangunan 452
4.4 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas 454
4.4.1 Teknokratik 454
4.4.2 Partisipatif 463
4.4.3 Politis 464
4.4.4 Atas-bawah dan bawah-atas 474
4.5 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial 475
4.5.1. Holistik-tematik 475
4.5.2. Integratif 476
4.5.3. Spasial 485
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 487
5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran 487
5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 504
5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 504
5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 508
5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 515
5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 518
5.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 519
5.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 520
5.2.7 Unsur Kewilayahan 521
5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum 522
5.2.9 Non Urusan 522
5.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2024 955
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 957
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024 957
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 958
BAB VII PENUTUP 967
DAFTAR PUSTAKA 969

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 5
Tabel 1.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 7
Tabel 1.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 8
Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan..... 21
Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2022 26
Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 27
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 37
Tabel 2.5 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2018-2022 39
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2022 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) 40
Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (persen) 43
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 48
Tabel 2.9 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 51
Tabel 2.10 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2022 52
Tabel 2.11 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022..... 53
Tabel 2.12 Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022..... 54
Tabel 2.13 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan, Daerah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022..... 55
Tabel 2.14 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 64
Tabel 2.15 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2018–2022 65
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 69
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2022..... 69
Tabel 2.18 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019..... 70
Tabel 2.19 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2022..... 70
Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 71

Tabel 2.21 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2022 71
Tabel 2.22 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 72
Tabel 2.23 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 73
Tabel 2.24 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 74
Tabel 2.25 Prevalensi Balita Stunting Kota PekalonganTahun 2018-2022 74
Tabel 2.26 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 77
Tabel 2.27 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 77
Tabel 2.28 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 78
Tabel 2.29 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 78
Tabel 2.30 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 79
Tabel 2.31 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 80
Tabel 2.32 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 80
Tabel 2.33 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 81
Tabel 2.34 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 81
Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 81
Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 82
Tabel 2.37 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 82
Tabel 2.38 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 83
Tabel 2.39 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2018 – 2022 83
Tabel 2.40 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2018 – 2022 84
Tabel 2.41 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI danSMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 84
Tabel 2.42 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 84
Tabel 2.43 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022 85
Tabel 2.44 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 85
Tabel 2.45 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 85

Tabel 2.46 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 86
Tabel 2.47 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 87
Tabel 2.48 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 87
Tabel 2.49 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2018 - 2022 88
Tabel 2.50 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 88
Tabel 2.51 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 89
Tabel 2.52 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 – 2022 89
Tabel 2.53 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2018 – 2022 90
Tabel 2.54 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 91
Tabel 2.55 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 91
Tabel 2.56 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 92
Tabel 2.57 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2018 – 2022 92
Tabel 2.58 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2018 - 2022..... 93
Tabel 2.59 Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 94
Tabel 2.60 Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 95
Tabel 2.61 Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022..... 95
Tabel 2.62 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2018–2022 96
Tabel 2.63 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022..... 96
Tabel 2.64 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022..... 97
Tabel 2.65 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 97
Tabel 2.66 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022..... 97
Tabel 2.67 Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota PekalonganTahun 2022 98
Tabel 2.68 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022..... 98
Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022..... 101
Tabel 2.70 Perkembangan Jasa Konstruksi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 102

Tabel 2.71 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029 102
Tabel 2.72 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 103
Tabel 2.73 Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 104
Tabel 2.74 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 104
Tabel 2.75 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 105
Tabel 2.76 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2022 106
Tabel 2.77 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2018 – 2022 107
Tabel 2.78 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 107
Tabel 2.79 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 108
Tabel 2.80 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 108
Tabel 2.81 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 109
Tabel 2.82 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 109
Tabel 2.83 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 110
Tabel 2.84 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2022 111
Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2018–2022 111
Tabel 2.86 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 113
Tabel 2.87 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018 – 2022 113
Tabel 2.88 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 115
Tabel 2.89 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 115
Tabel 2.90 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 118
Tabel 2.91 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 118
Tabel 2.92 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 119
Tabel 2.93 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 119
Tabel 2.94 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 122

Tabel 2.95 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 124
Tabel 2.96 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 124
Tabel 2.97 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 126
Tabel 2.98 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 128
Tabel 2.99 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 129
Tabel 2.100 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 130
Tabel 2.101 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 131
Tabel 2.102 Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 132
Tabel 2.103 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 132
Tabel 2.104 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 133
Tabel 2.105 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 133
Tabel 2.106 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 134
Tabel 2.107 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 135
Tabel 2.108 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan 136
Tabel 2.109 Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan 138
Tabel 2.110 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 141
Tabel 2.111 Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 142
Tabel 2.112 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 143
Tabel 2.113 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 143
Tabel 2.114 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 144
Tabel 2.115 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2018 – 2022 144
Tabel 2.116 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2018 – 2022 145
Tabel 2.117 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 145
Tabel 2.118 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2018 – 2022 146
Tabel 2.119 Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 147
Tabel 2.120 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 148

Tabel 2.121 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 148
Tabel 2.122 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2022 148
Tabel 2.123 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2018 - 2022 149
Tabel 2.124 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 150
Tabel 2.125 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2018-2022 150
Tabel 2.126 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 151
Tabel 2.127 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2018-2022 151
Tabel 2.128 Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2021 152
Tabel 2.129 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 152
Tabel 2.130 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 153
Tabel 2.131 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 154
Tabel 2.132 Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 154
Tabel 2.133 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 155
Tabel 2.134 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 156
Tabel 2.135 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 158
Tabel 2.136 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 20218 - 2022 158
Tabel 2.137 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2019-2022 158
Tabel 2.138 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 159
Tabel 2.139 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 160
Tabel 2.140 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 160
Tabel 2.141 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2018-2022 161
Tabel 2.142 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2018 - 2022 162
Tabel 2.143 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 (kg) 162
Tabel 2.144 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (kg/kapita/tahun) 163
Tabel 2.145 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 164
Tabel 2.146 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 164

Tabel 2.147 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 165
Tabel 2.148 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2019-2021 165
Tabel 2.149 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 166
Tabel 2.150 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 166
Tabel 2.151 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 167
Tabel 2.152 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 167
Tabel 2.153 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 169
Tabel 2.154 Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2022 169
Tabel 2.155 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 170
Tabel 2.156 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 172
Tabel 2.157 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 172
Tabel 2.158 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 172
Tabel 2.159 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 173
Tabel 2.160 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 173
Tabel 2.161 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 174
Tabel 2.162 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 174
Tabel 2.163 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2021 175
Tabel 2.164 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2022 175
Tabel 2.165 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2022 175
Tabel 2.166 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 178
Tabel 2.167 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2022 178
Tabel 2.168 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2022 181
Tabel 2.169 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2022 182
Tabel 2.170 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 183
Tabel 2.171 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 184
Tabel 2.172 Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 185
Tabel 2.173 Riset Bersama Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 186
Tabel 2.174 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 189

Tabel 2.175 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 189
Tabel 2.176 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 189
Tabel 2.177 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 190
Tabel 2.178 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 190
Tabel 2.179 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2018 – 2022 190
Tabel 2.180 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 192
Tabel 2.181 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 194
Tabel 2.182 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 195
Tabel 2.183 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2022..... 196
Tabel 2.184 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha 196
Tabel 2.185 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2018 - 2022 200
Tabel 2.186 Inovasi Daerah Bidang Kesehatan 204
Tabel 2.187 Inovasi Daerah Lainnya..... 207
Tabel 2.188 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan 209
Tabel 2.189 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan 209
Tabel 2.190 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2022 211
Tabel 2.191 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2022 221
Tabel 2.192 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2022 222
Tabel 2.193 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2022..... 224
Tabel 2.194 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2022 226
Tabel 2.195 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2022..... 227
Tabel 2.196 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2022..... 228
Tabel 2.197 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2022 229
Tabel 2.198 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2022 230
Tabel 2.199 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2022 232
Tabel 2.200 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2022 233
Tabel 2.201 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 233

Tabel 2.202 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022 236
Tabel 2.203 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2022 237
Tabel 2.204 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022 238
Tabel 2.205 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2022 239
Tabel 2.206 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2022 240
Tabel 2.207 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2022 240
Tabel 2.208 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2022 242
Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2022 243
Tabel 2.210 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2022 244
Tabel 2.211 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2022 244
Tabel 2.212 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2022 246
Tabel 2.213 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2022 247
Tabel 2.214 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2022 247
Tabel 2.215 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2022 248
Tabel 2.216 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2022 250
Tabel 2.217 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2022 251
Tabel 2.218 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2022 252
Tabel 2.219 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2022 254
Tabel 2.220 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 255
Tabel 2.221 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2022 256
Tabel 2.222 Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2022 256
Tabel 2.223 Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2022 257
Tabel 2.224 Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2022 258
Tabel 2.225 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekalongan Tahun 2022 259
Tabel 2.226 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2022 260

Tabel 2.227 Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2022 260
Tabel 2.228 Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2022..... 261
Tabel 2.229 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2022 267
Tabel 2.230 Capaian Indikator Non Urusan Kota Pekalongan Tahun 2022..... 268
Tabel 2.231 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022..... 285
Tabel 2.232 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 287
Tabel 2.233 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022..... 287
Tabel 2.234 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022..... 288
Tabel 2.235 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 290
Tabel 2.236 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022 292
Tabel 2.237 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2022 293
Tabel 2.238 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2022 306
Tabel 2.239 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2022 313
Tabel 2.240 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2022 320
Tabel 2.241 Permasalahan Pembangunan Daerah..... 325
Tabel 2.242 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... 326
Tabel 2.243 Isu Strategis 332
Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (persen) 353
Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022..... 354
Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 357
Tabel 3.4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2022 357
Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan 360
Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan 360
Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan 360
Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan 361
Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan 361

Tabel 3.10 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan 361
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2025 365
Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2025 367
Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2025 369
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026 Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius” 381
Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 385
Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 389
Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 406
Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 409
Tabel 4.6 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional 420
Tabel 4.7 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah 435
Tabel 4.8 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Pendekatan Teknokratik 454
Tabel 4.9 Penyusun RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif 463
Tabel 4.10 Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD 464
Tabel 4.11 Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan 473
Tabel 4.12 Konsep Holistik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan 475
Tabel 4.13 Konsep Integratif Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan 476
Tabel 5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2024 487
Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 524
Tabel 5.3 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2024 955
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalonggan Tahun 2024 957
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 958

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 5
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan 20
Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan 21
Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan 22
Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan 24
Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal 24
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan 28
Gambar 2.7 Peta Rencana Struktur Ruang 30
Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang 30
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 38
Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 39
Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2022 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 40
Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 41
Gambar 2.13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022 42
Gambar 2.14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022 50
Gambar 2.15 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022 50
Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 56
Gambar 2.17 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 (000 jiwa) 57
Gambar 2.18 Perbandiangan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 58
Gambar 2.19 Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 58
Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 59
Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 60
Gambar 2.22 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 60
Gambar 2.23 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 61

Gambar 2.24 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 63
Gambar 2.25 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 63
Gambar 2.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022 65
Gambar 2.27 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 66
Gambar 2.28 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 66
Gambar 2.29 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 67
Gambar 2.30 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2018-2022 68
Gambar 2.31 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2018-2022 72
Gambar 2.32 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 75
Gambar 2.33 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 76
Gambar 2.34 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2018 - 2022 90
Gambar 2.35 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 112
Gambar 2.36 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2018- 2022 114
Gambar 2.37 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 116
Gambar 2.38 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 116
Gambar 2.39 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 117
Gambar 2.40 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 122
Gambar 2.41 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2018 – 2022 123
Gambar 2.42 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 125
Gambar 2.43 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 126
Gambar 2.44 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 130
Gambar 2.45 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 131
Gambar 2.46 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 134
Gambar 2.47 Cakupan Unmet Need KB di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 136

Gambar 2.48 Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan 137
Gambar 2.49 Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 161
Gambar 2.50 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 171
Gambar 2.51 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2018-2022 191
Gambar 2.52 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 192
Gambar 2.53 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 193
Gambar 2.54 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 194
Gambar 2.55 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 195
Gambar 2.56 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 197
Gambar 2.57 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 198
Gambar 2.58 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 199
Gambar 2.59 Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi 200
Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 352
Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022 353
Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022 355
Gambar 3.4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022 356
Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi 378
Gambar 4.2 Konsep Tematik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan 475

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran rencana pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahun ketiga atas RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2024 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, dimulai pada minggu pertama bulan Desember, 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan program strategis nasional. Selain itu, juga memperhatikan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2022, permasalahan kota, serta isu strategis dan potensi daerah.

Sebagai upaya meningkatkan potensi daerah melalui peningkatan daya tarik pengunjung ke Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menata alun-alun pada tahun 2022 dan terus berlanjut pada tahun 2023. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan prasarana pendukung lain agar menambah kenyamanan pengunjung ke Kota Pekalongan.

Sejalan dengan penataan tersebut, tahun 2024 adalah kesempatan untuk segera menata kembali lapangan Sorogenen. Para pedagang Pasar Banjarsari yang menempati pasar darurat diperkirakan akan dapat kembali menempati Pasar Banjarsari karena pada tahun 2023, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR akan membangun kembali Pasar Banjarsari. Dengan demikian, Lapangan Sorogenen dan juga kawasan di sekitar Jalan Pati Unus akan dapat ditata kembali agar semakin menambah kenyamanan dan keindahan Kota Pekalongan.

Peluang lain yang juga diharapkan akan menambah keindahan Kota Pekalongan adalah bangunan pengendali banjir dan rob oleh BBWS Pemali Juana, dimana bangunan tersebut tidak hanya berbentuk bangunan masif, tetapi juga akan ditambahkan taman yang akan menambah daya tarik wisata di Kota Pekalongan.

Beberapa isu strategis dan juga penambahan potensi pembangunan tersebut nantinya diharapkan akan ikut mendukung upaya percepatan pencapaian target pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026. Hal ini perlu dilakukan karena kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak akan berdampak pada berkurangnya periode RPJMD.

Dalam kondisi tanpa Pilkada Serentak, Pemerintah Kota Pekalongan akan menyusun kembali RPJMD pada tahun 2026. Namun dengan adanya Pilkada Serentak tahun 2024, maka akan berdampak pada pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil

Pilkada Serentak pada tahun 2025. Dan sesuai ketentuan, pada tahun 2025, Pemerintah Kota Pekalongan harus menyusun dan memiliki RPJMD baru pada tahun 2025.

Dokumen RKPD Tahun 2024 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 meliputi:

1) Persiapan penyusunan;
2) Penyusunan Rancangan Awal;
3) Penyusunan Rancangan;
4) Pelaksanaan Musrenbang;
5) Perumusan Rancangan Akhir; dan
6) Penetapan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;

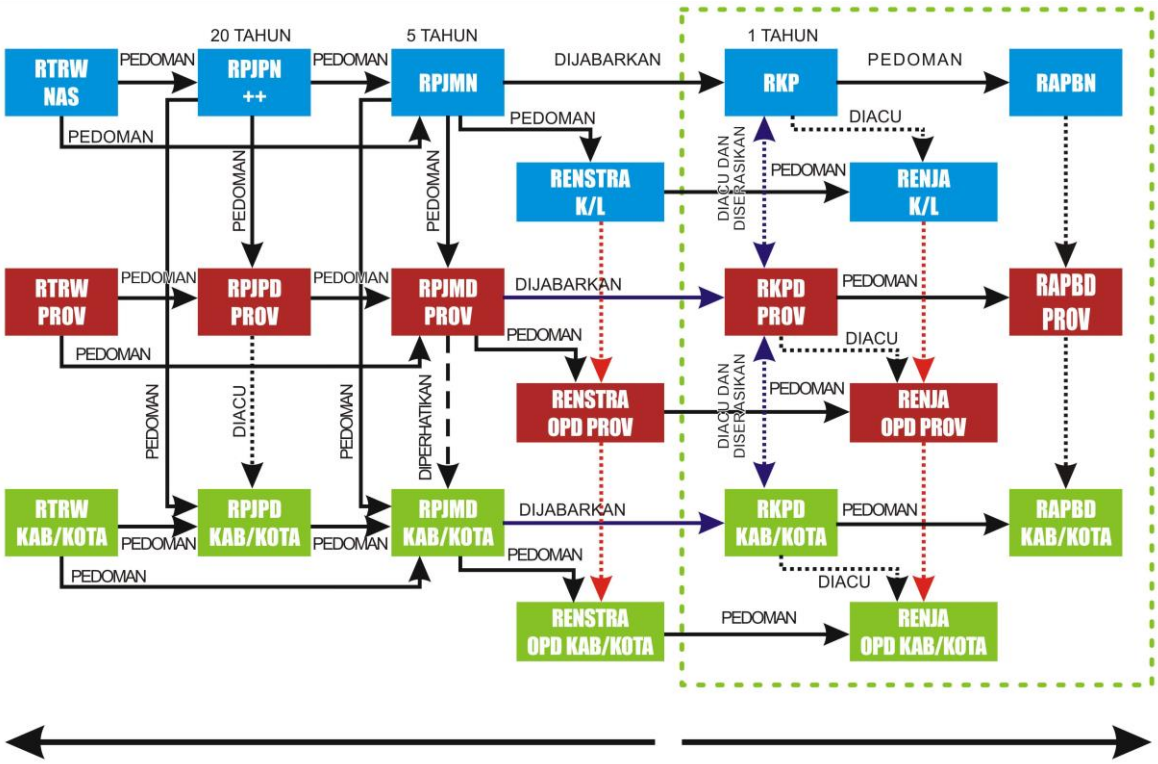
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Bagan hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

1.3.1 RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 yang dituangkan di dalam RKPD tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan tahun 2024 pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024
Tema	*Evaluasi Dan Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian*	*Tema*	*Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian*
1	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	1	Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024
2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2023

1.3.2 RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sinergitas rencana pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 disinergikan dengan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 melalui penyelarasan prioritas dan fokus pembangunan. Penyelarasan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud, disajikan dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
		9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
		3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak
		10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
3	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
	dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
		12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

1.3.3 RKPD Kota Pekalongan dengan RKP Tahun 2024

Rencana pembangunan Kota Pekalongan juga diselaraskan dengan rencana pembangunan Pemerintah Pusat, yaitu antara RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2024. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai prioritas nasional. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan prioritas nasional disajikan dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	**PRIORITAS**	**NO.**	**PRIORITAS**
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
		2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
		3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	**PRIORITAS**	**NO.**	**PRIORITAS**
			karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10	10Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
		12	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

1.3.4 RKPD Kota Pekalongan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2023. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.5 RKPD Kota Pekalongan dengan KUA PPAS dan APBD

RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas dan disepakati bersama DPRD. Selanjutnya, masuk ke tahapan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah

(APBD), yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1.3.6 RKPD Kota Pekalongan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat 5 (lima) urusan yang selanjutnya dikaitkan dengan program pada RKPD, yaitu:

1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Ketiga pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiancy Virus*).

Pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ajenis

pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik, dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana.

6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota, dilaksanakan melalui Program Penanganan Bencana.

1.3.7 RKPD Kota Pekalongan dengan Sustainable Development Goals (SDG's)

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

1. Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 30 target dan 106 indikator.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 *goals* 54 target dan 72 indikator.

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 6 *goals* 29 target dan 64 indikator.

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 *goals* 8 target dan 32 indikator.

1.3.8 RKPD Kota Pekalongan dengan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu:

1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.
2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7) Penataan peraturan perundang-undangan, dimana produk hukum Pemerintah Kota Pekalongan dapat diakses melalui alamat https://jdih.pekalongankota.go.id.
8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu: 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) ISO 9001:2015 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta; 7) ISO 9001:2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 yaitu:

a. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; dan
b. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2024.

1.5 Sistematika RKPD Tahun 2024

Sistematika RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RPJMD sampai tahun 2022, hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022, hasil evaluasi SDG's tahun 2022, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

1. Kondisi Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2022 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, SPM, SDG's dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
3. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan IKU tahun 2024 dan memperhatikan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program, SPM dan SDG's tahun 2022.
4. Isu strategis yang dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai tahun 2022 dan perkiraan tahun 2024, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2024, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pekalongan, pokok-pokok pikiran DPRD serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program pembangunan daerah tahun 2024 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan dokumen rencana pembangunan lainnya yang relevan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan yang ditargetkan di tahun 2024.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan arah kebijakan, prioritas dan fokus RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 yang telah sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api.

Dengan telah beroperasinya jalan tol trans Jawa sejak Desember 2018, seluruh wilayah yang dilewati jalur jalan tol trans Jawa memiliki posisi yang relatif sama. Posisi strategis wilayah sangat ditentukan oleh seberapa besar daya tarik dan peran suatu daerah tersebut. Oleh karena itu, masing-masing daerah berkompetisi, meningkatkan daya tarik dan perannya, agar tetap dan semakin menarik kunjungan dari willayah lainnya. Kota Pekalongan, dengan segala potensi dan permasalahan yang dimilikinya, harus terus meningkatkan daya tarik dan perannya, sehingga dapat lebih mendorong laju pertumbuhan ekonominya, dan pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan disebabkan kombinasi dari penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dan dinamika air laut (*pasang surut, kenaikan muka air laut dan gelombang el nino serta la nina*). Para ilmuwan telah mengamati perubahan-perubahan pada indikator-indikator iklim di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, dan secara bersamaan membuat proyeksi menggunakan model AR-4 IPCC untuk menilai perubahan-perubahan masa depan dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Kenaikan suhu permukaan rata-rata akan mencapai 0,8 ° C-1 ° C hingga tahun 2020-2050 dibandingkan dengan periode iklim akhir pada abad ke-20.
- Peningkatan suhu permukaan laut akan mencapai 1-1,2 ° C pada 2050 dibandingkan pada 2000.
- Pada periode 2001-2100, akan terjadi perubahan-perubahan yang berarti (terutama pada periode 2080-an) dengan kecenderungan meningkatnya curah hujan pada musim hujan dan penurunan pada bulan pancaroba.
- Kenaikan permukaan laut (SLR) diproyeksikan mencapai 35 - 40 cm pada 2050 dibandingkan dengan pada 2000. SLR maksimum dapat mencapai 175 cm pada 2100.

Dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai tertinggi sebagai kota percontohan RAN-API dengan nilai 5. Kota Pekalongan masuk dalam wilayah rentan terhadap perubahan iklim dalam RAN-API meliputi banjir, rob, air bersih, sanitasi, dan kekeringan.

Genangan akibat banjir rob terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta *stakeholder* lain untuk menangani permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2019, antara lain:

- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Loji / Pekalongan / Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN),
- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN),
- Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN),
- Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN),
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong sistem Kali Boyo untuk melayani Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan kapasitas rencana sebesar 450 liter / detik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir melaksankan Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Sungai di Kota Pekalongan. Selain itu Desain atas sungai yang melintasi Kota Pekalongan juga telah selesai disusun oleh Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Revisi *Masterplan* Drainase Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penataan sistem drainase kota yang lebih terarah. Pihak lain non pemerintah seperti akademisi di antaranya Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor banyak terlibat dalam berbagai kajian/studi. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir melibatkan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) dari Amerika Serikat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut terlibat dalam penanganan banjir rob di Kota Pekalongan di antaranya adalah LSM Bintari melalui Kajian *Loss and Damage* Banjir Rob Pekalongan Raya (2016) serta pembuatan *pilot project* MCK adaptif (2020). *Mercy Corps* Indonesia turut membantu dalam berbagai kajian melalui program *flood resilience city* untuk Kota Pekalongan di antaranya dengan membuat kajian kerentanan (2020) dan saat ini masih berjalan dengan kajian-kajian terkait, dengan melibatkan berbagai *stakeholder* mulai dari akademisi hingga kementerian maupun pihak lain. LSM Kemitraan juga turut membantu Kota Pekalongan melalui Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dengan pendekatan 3S yaitu *Safekeeping – Surviving – Sustaining* (Melindungi – Mempertahankan – Melestarikan). Selain itu *Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard* (HHSK) Belanda melalui *Witteven Bos* juga telah membuat kajian tentang *Pekalongan Coastal Zone, Coastal Erotion and Flooding in the city of Pekalongan* yang dibiayai oleh HHSK Belanda tahun 2016.

Selain gambaran di atas, Kota Pekalongan tetap menyimpan berbagai potensi yang relatif besar dengan sejarah perkembangan yang relatif panjang. Potensi tersebut adalah berupa kerajinan batik dan perikanan.

Seperti diketahui bersama, batik sudah sangat melekat dan identik dengan Kota Pekalongan. Bahkan UNESCO telah mengakuinya dengan memasukkan Kota Pekalongan sebagai salah satu Kota Kreatif Dunia untuk kategori *Craft and Folk Art* (Kerajinan dan Kesenian Rakyat). Kerajinan yang diakui tidak lain adalah kerajinan batik. Potensi yang besar ini telah mewarnai hampir sebagian besar dinamika ekonomi penduduk Kota Pekalongan.

Potensi kedua adalah perikanan yang saat ini masih sangat terpuruk sebagai dampak meningkatnya frekuensi kejadian rob. Namun demikian, semangat untuk mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan masih terus dijaga sampai dengan sekarang ini. Pemerintah Kota Pekalongan sendiri masih terus berupaya untuk terus mengajukan permohonan demi terwujudnya Pelabuhan Perikanan *Onshore* di Kota Pekalongan.

Kedua potensi tersebut harus terus dikembangkan agar dapat semakin mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, yaitu dengan semakin memperkuat sektor sekunder dan sektor tersier Kota Pekalongan. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki Kota Pekalongan selama ini, ke depan harus dapat bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50’ 42" s.d. 6 55’ 44” Lintang Selatan dan 109 37’ 55” s.d. 109 42’ 19” Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 km^2. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km^2. Perubahan ini dikarenakan adanya:

a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi;
c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Informasi Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi: sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

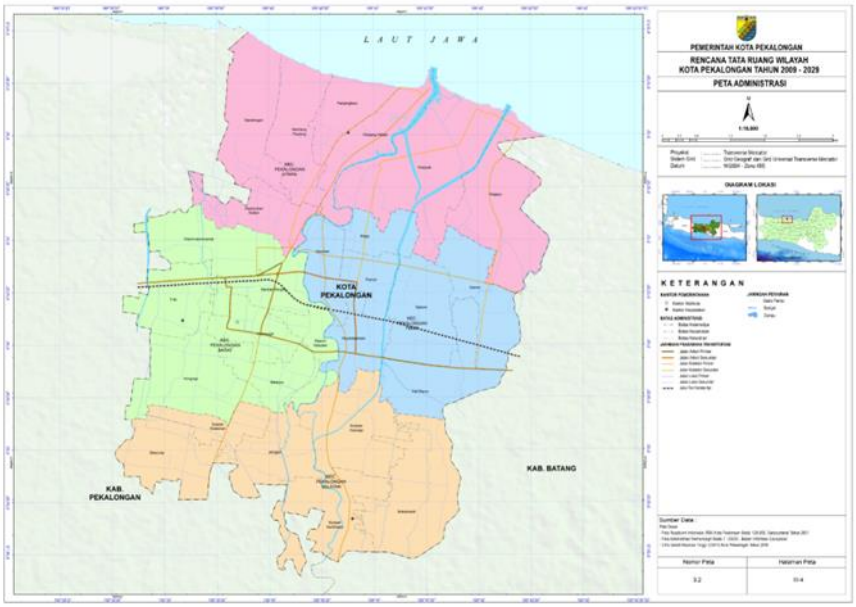
Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase Luas (persen)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	TOTAL	46,42	100

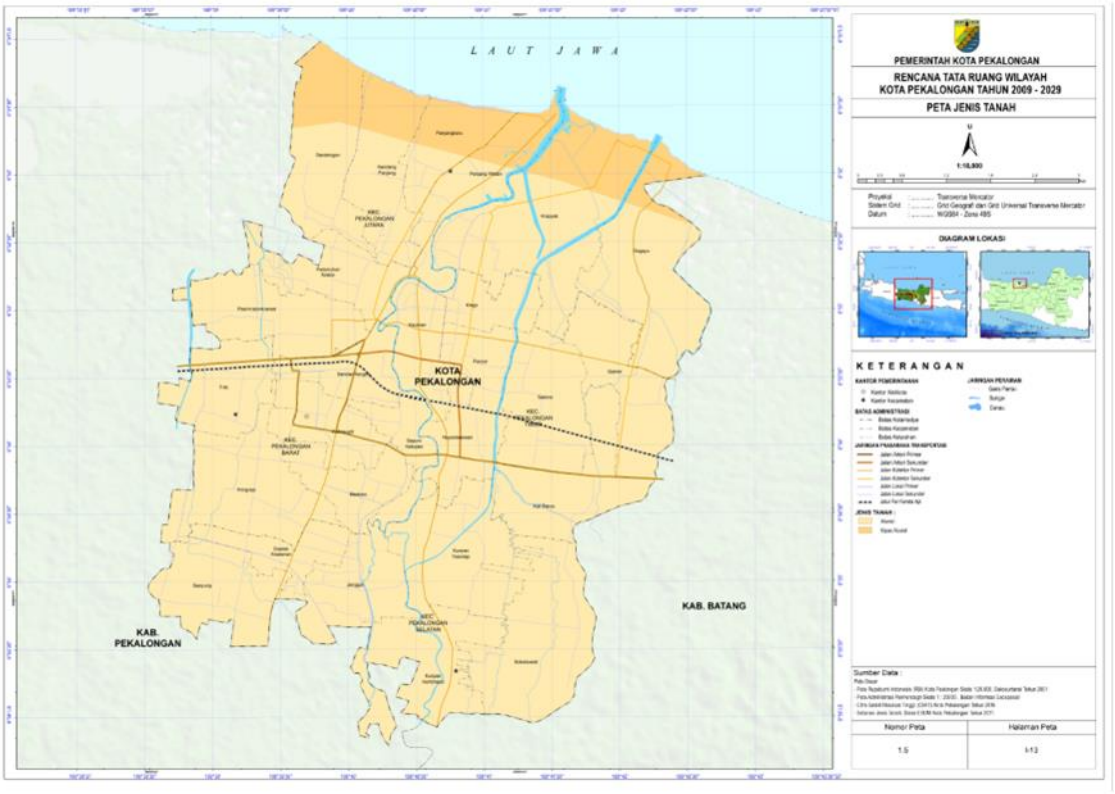
Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 km^2 atau 33 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan.

2.1.1.2 Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis, wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan pada sebagian wilayah terletak antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 persen. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi

yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara siginifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulanginya.



Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Dengan kondisi wilayah yang sangat datar dan terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk

pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

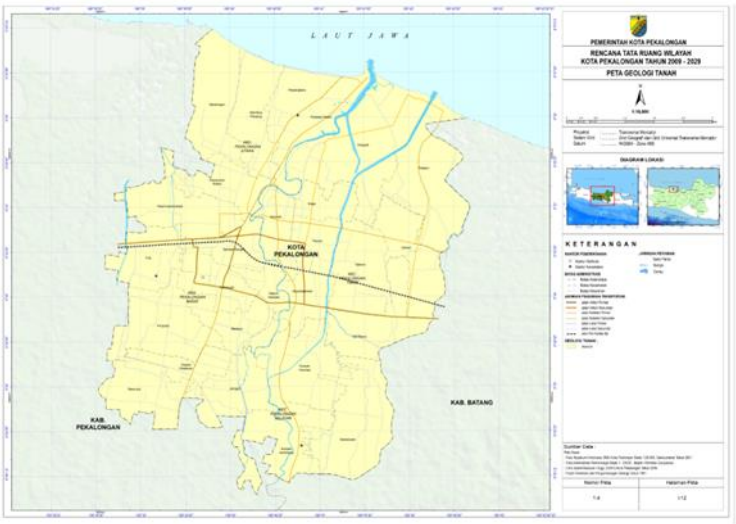
Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.1.3 Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 meter yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

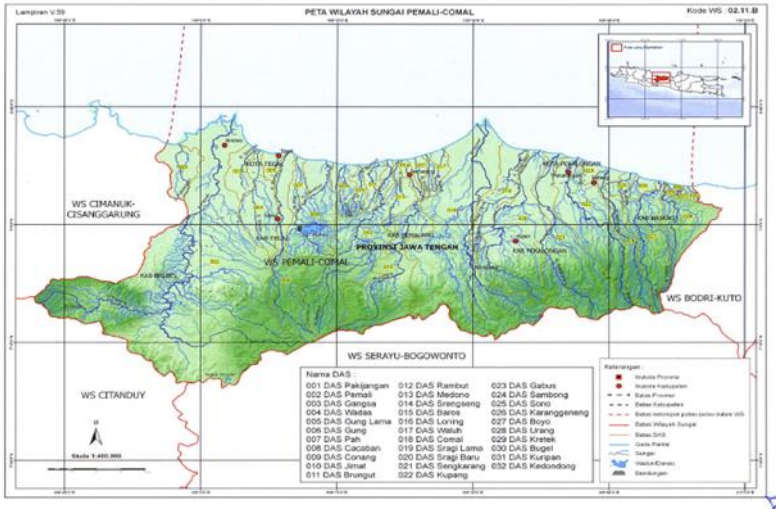


Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

2.1.1.4 Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.



Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sumber: Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai

Daerah Irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 mdpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu

deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan meningkat karena terjadinya proses produksi industri yang meningkat. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18’ 45,31” - 1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi: a) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; b) sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh *al gluvium* dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30 persen dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai ± 24 meter. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat

menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2020 melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Pada tahun 2020 telah dipasang patok tetap penurunan tahan di Stadion Hoegeng dan Kecamatan Pekalongan Selatan, dilanjutkan pemasangan patok tetap penurunan tanah di Tirto, Kandang Panjang, Degayu dan Setono pada tahun 2021. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera didapatkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.1.5 Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 3.303 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 124 hari. Sedangkan Curah hujan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 1.710 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 93 hari. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	19	371
2	Februari	15	309
3	Maret	14	309
4	April	7	152
5	Mei	10	167
6	Juni	5	56
7	Juli	9	162
8	Agustus	2	40
9	September	11	155
10	Oktober	12	239
11	Nopember	13	182
12	Desember	9	223
TOTAL		126	2.365
Tahun 2021		124	3.303
Tahun 2020		116	2.896
Tahun 2019		80	1.831
Tahun 2018		93	1.710

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson bahwa tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100 persen) bernilai antara 14,3-33,3 persen.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya berkurang setiap tahun, namun sebaliknya, tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Pada tahun 2022 tanah sawah seluas 832 Ha, berkurang sekitar 6,09 persen dari luas 886 Ha pada tahun 2021. Begitu juga dengan tanah kering, meningkat menjadi 3.810 Ha, ada penambahan sekitar 1,44 persen dari luas 3.756 Ha pada tahun 2021.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	64,00	935,70	999,70
2	Pekalongan Timur	264,00	699,37	963,37
3	Pekalongan Selatan	414,00	733,38	1.147,38
4	Pekalongan Utara	90,00	1.441,50	1.531,50
TOTAL		832,00	3.810,00 (pembulatan)	4.642,00 (pembulatan)
Tahun 2021		886,00	3.756,00	4.642,00
Tahun 2020		886,00	3.756,00	4.642,00
Tahun 2019		925,00	3.600,00	4.525,00
Tahun 2018		969,00	3.556,00	4.525,00

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

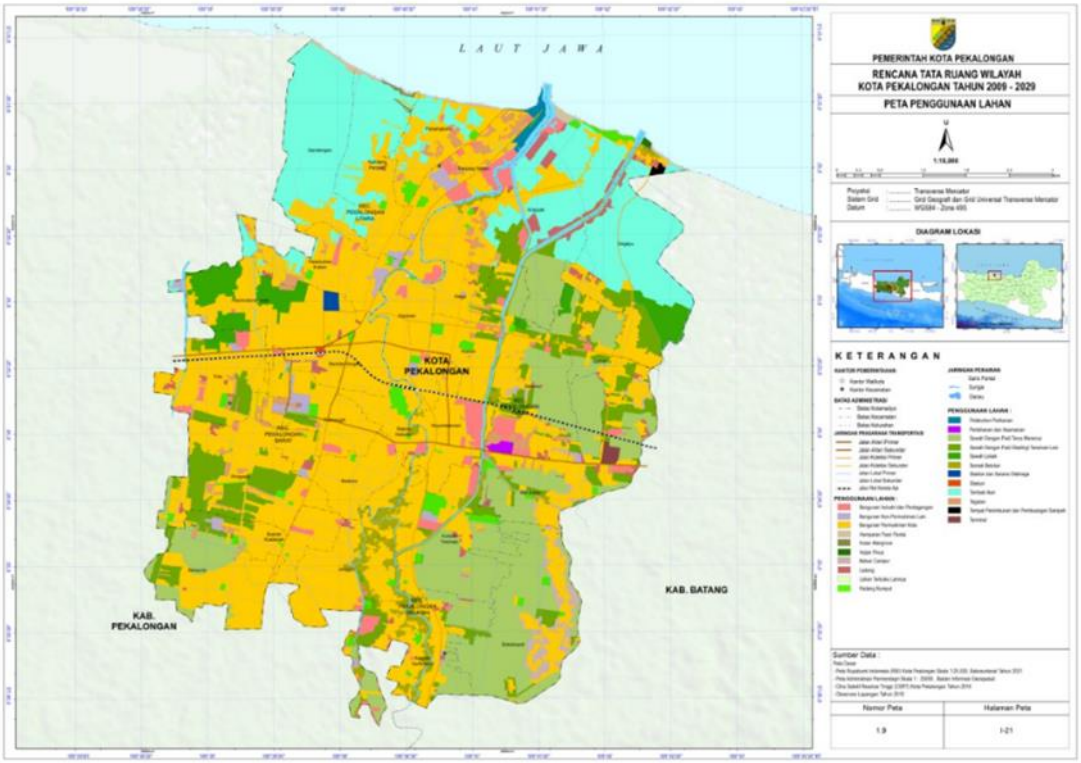
Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan menggunakan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2022 adalah seluas 832 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 64 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 264 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 414 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 90 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2018 seluas 969 Ha, tahun 2019 seluas 925 Ha dan tahun 2020 seluas 886 Ha, tahun 2021 tidak ada perubahan sementara pada tahun 2022 luasan tanah sawah mengalami penurunan menjadi 832 Ha.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan

proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 521 Ha atau berkurang dari luasan sebelumnya yaitu seluas 737 Ha. Perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan permukiman, sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009–2029, diusulkan perubahan luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Usulan tersebut adalah penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.



Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2022

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan

tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

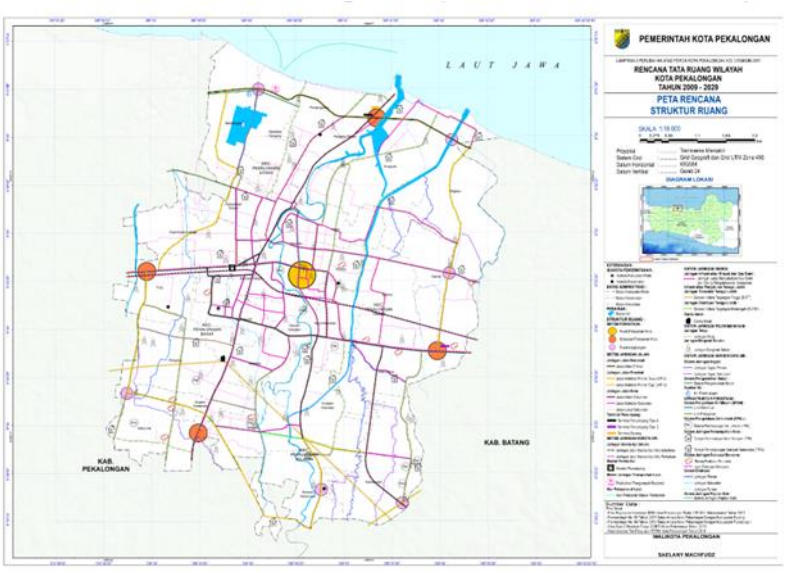
Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung Perdagangan dan Jasa, Industri, dan Perikanan, yang Nyaman, Aman, Produktif, serta Berkelanjutan”.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana. Pusat Kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional di Kelurahan Kauman dan kawasan Stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Gamer dan Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

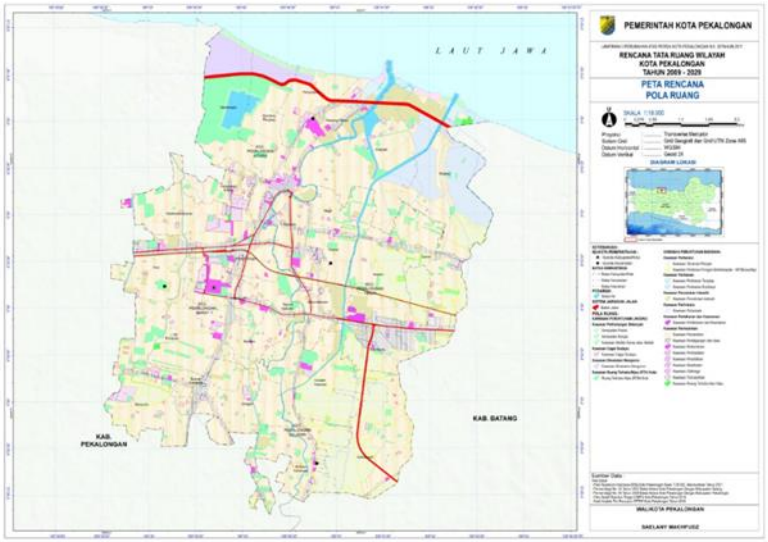
Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Untuk rata-rata ketercapaian infrastruktur dasar perkotaan di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 mencapai 91,41 persen yang terdiri dari sektor air minum, sanitasi dan persampahan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.



Gambar 2.7 Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2021

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.



Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 pada Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Lindung

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas ± 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas ± 26 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas ± 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Sungai Banger, Sungai Gabus, Sungai Meduri dan Sungai Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Bandengan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

2) Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Terdiri dari RTH publik seluas 338 Ha (atau sekitar 13,16 persen dari luas wilayah terbangun Kota Pekalongan) RTH Publik terdiri dari taman, lapangan dan Pemakaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

4) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 88 (delapan puluh delapan) hektar.

2. Kawasan budidaya

1) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

2) Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi:

a. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.

b. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Dengan luas sebagai berikut:

a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) hektar.
b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hektar.
c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar.
d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) hektar.
f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar.
h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
i. Kawasan ruang terbuka non hijau, yang terdiri atas TPA dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, Kolam Renang dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar dan Lapangan Olahraga dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar.
j. Kawasan sektor informal.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah. Seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar berada di:

a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
    1. Kelurahan Banyurip;
    2. Kelurahan Buaran Kradenan;
    3. Kelurahan Jenggot;
    4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
    5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.
b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
    1. Kelurahan Bandengan;
    2. Kelurahan Krapyak;
    3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
    4. Kelurahan Panjang Wetan;
    5. Kelurahan Kandang Panjang; dan
    6. Kelurahan Panjangbaru.

c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
   1. Kelurahan Gamer;
   2. Kelurahan Kali Baros;
   3. Kelurahan Klego;
   4. Kelurahan Noyontaansari;
   5. Kelurahan Poncol; dan
   6. Kelurahan Setono.
d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
   1. Kelurahan Bendan Kergon;
   2. Kelurahan Medono;
   3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
   4. Kelurahan Pringrejo;
   5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
   6. Kelurahan Tirto.

5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono, Bendan Kergon, Poncol, Kali Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat.

6. Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor eks Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat; Kantor Koramil dan Kantor Polsekta di seluruh wilayah kecamatan.

7. Sinergi Kota Pekalongan Dengan Daerah Tetangga Berkaitan Dengan Aspek Tata Ruang

Terkait aspek perencanaan tata ruang dalam revisi Perda RTRW Kota Pekalongan telah direncanakan beberapa hal yang dapat bersinergi dengan Perda RTRW Kabupaten Pekalongan dan Perda RTRW Kabupaten Batang, sebagai berikut:

1) Struktur Ruang
   a. Telah direncanakan Jalan Lingkar Utara Petanglong, yang akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) – Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) – Rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) – jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan

strategis tersebut, sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalur Pantura, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.

b. Telah direncanakan jalur transportasi masal (BRT) yang menghubungkan dari Kota Batang – Kota Pekalongan – Kota Kajen. Diharapkan dengan disediakannya fasilitas transportasi masal (BRT) yang nyaman ini, akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu-lintas pada jalur-jalur yang menghubungkan 3 daerah tersebut.

2) Pola Ruang

Perencanaan Pola Ruang untuk wilayah-wilayah perbatasan telah melalui proses padu serasi dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, sehingga sudah ada sinkronisasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga perkembangan potensi kebencanaan di masa mendatang yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, yang menjadikan perlu dipikirkan dan disepakati bersama antara dua daerah yang berbatasan, rencana Pola Ruang yang lebih feasible.

Pada wilayah-wilayah yang dekat pantai, “pergerakan kawasan yang terdampak rob dengan probabilitas tinggi bergeser dari tahun 2025 hingga 2030 pada kawasan tambak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tambak merupakan lahan yang memiliki probabilitas paling tinggi terdampak dan berubah menjadi kawasan rob. Hingga pada akhir tahun 2035, rob mulai masuk pada kawasan persawahan untuk menjadi kawasan rob. Hal ini tentu menggambarkan dampak yang yang diberikan pada risiko bencana banjir, mengancam aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi kajian, khususnya aktivitas perikanan dan pertanian” (Laporan *Loss and Damage Assesment in Pekalongan City* dan *Pekalongan Regency Under Zurich Flood Resilience Alliance Program*, Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021).

3) Batas Wilayah administratif

Telah dilakukan kegiatan survey dan perapatan patok batas wilayah di 3 daerah tersebut, yang melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Lurah / Kepala Desa yang berbatasan dan BPN. Yang outputnya akan menghasilkan batas wilayah yang lebih detail deliniasinya. Untuk melegal formalkan out put kegiatan ini perlu dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan di tingkat kepala daerah, kemudian dimintakan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri.

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landskap pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan

memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (*slum area*) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Berdasarkan gambaran potensi kebencanaan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota (Pasal 5) dan strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana (Pasal

13A) melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029, yaitu:

1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:
   a. Pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan;
   b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
   c. Pengaturan kegiatan industri;
   d. Peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
   e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
   f. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
   g. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
   h. Peningakatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
   i. Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
   j. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
2) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana, meliputi:
   a. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
   b. Mengembangkan RTH di sekitar DAS dan pada kawasan rawan bencana risiko tinggi;
   c. Meningkatkan mitigasi bencana risiko tinggi;
   d. Mewujudkan arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan
   e. Mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

Pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 disebutkan adanya Sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur evakuasi bencana menuju ruang evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana terdiri dari:

a. Jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, meliputi Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
b. Jalur evakuasi terhadap bencana rob, meliputi Jalan Samudera Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Kandang Panjang, Jalan Samudera Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
c. Jalur evakuasi terhadap bencana banjir terdapat di:
   - Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan;
   - Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan Kergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat;

- Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratman dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton.

d. Jalur evakuasi terhadap bencana angin topan, terdapat di Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer.

Sedangkan Ruang evakuasi bencana, antara lain:

- Lapangan;
- Stadion;
- Taman publik;
- Bangunan rumah;
- Bangunan kantor pemerintah;
- Bangunan fasilitas sosial;
- Bangunan fasilitas umum, dan
- Ruang/bangunan Lainnya.

2.1.1.9 Aspek Demografi

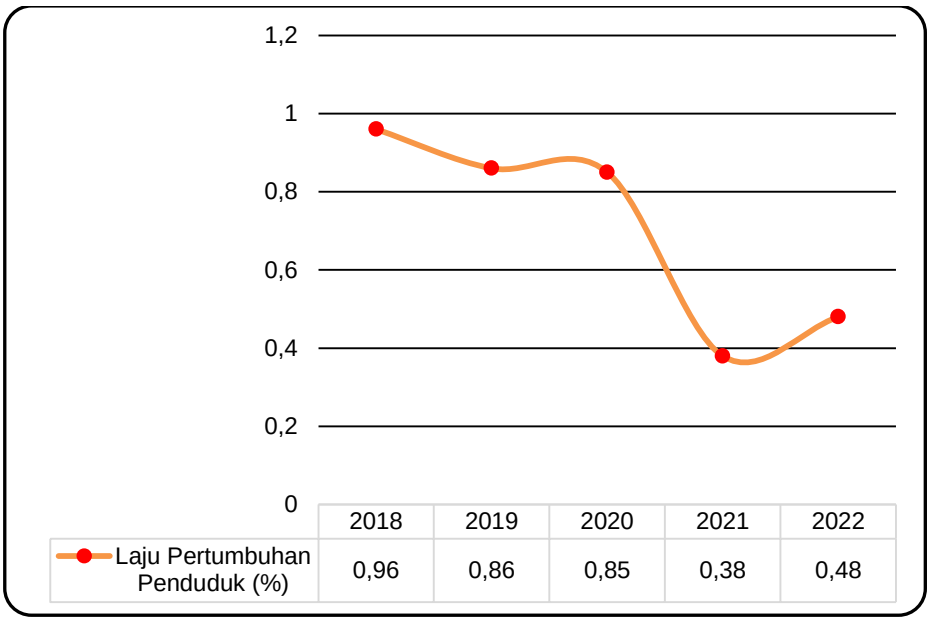
Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2022 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 309.742 jiwa, terdiri dari 156.391 jiwa laki-laki dan 153.351 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 102,38 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.778	153.319	307.097
2020	155.145	152.005	307.150
2021	155.701	152.609	308.310
2022	156.391	153.351	309.742

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan jumlah penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sekitar 3.833 jiwa. Pada tahun 2022 bertambah 1.432 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,48 persen.



	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,96	0,86	0,85	0,38	0,48

Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

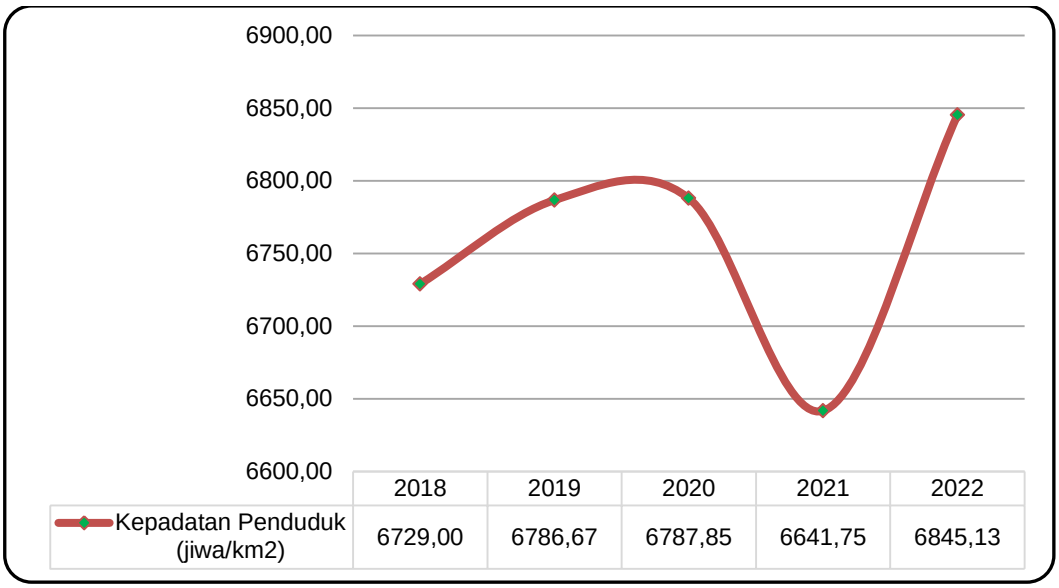
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Gambar 2.9 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2018-2022. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,38 persen. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan cenderung menurun.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan lebih kecil dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia maupun Provinsi Jawa Tengah. Fenomena laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil dan cenderung menurun tersebut, juga dialami kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan pelaksanaan program keluarga berencana membawa dampak yang cukup signifikan. Namun demikian, dalam kerangka pengembangan wilayah, laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan proses urbanisasi yang telah mengalami perlambatan. Kondisi ini merupakan fenomena wajar karena proses urbanisasi pada tahapan tertentu akan mengalami perlambatan dan bahkan pada saat tertentu akan stagnan.

Proses urbanisasi yang mengalami perlambatan dapat dilihat dari pertambahan penduduk secara alami dan migrasi. Dengan asumsi pertambahan penduduk alami terjadi secara konstan maka perlambatan tersebut diakibatkan daya tarik Kota Pekalongan yang menurun, sehingga semakin menurunnya migrasi masuk ke Kota Pekalongan. Dapat dimaknai juga semakin banyaknya migrasi keluar dari Kota Pekalongan ke wilayah lain karena berbagai pertimbangan. Fenomena pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan yang cenderung menurun, secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu kondisi, dimana daya tarik Kota Pekalongan yang mulai menurun.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Namun demikian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 146,1 jiwa dibandingkan dengan tahun 2020. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022 disajikan dalam Gambar 2.10 berikut.



Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2022, pendidikan SD ke bawah sebanyak 50.573 jiwa (31,32 persen), diikuti SMP sebanyak 35.349 jiwa (21,89 persen) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 75.548 jiwa (46,79 persen) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2022 berjumlah 161.470 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2018, struktur pekerja yang lulusan SD ke bawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) ke atas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namum tidak signifikan. Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						
	≤SD		SLTP		≥SM		Jumlah
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2018	61.358	40,47	31.072	20,50	59.167	39,03	151.597
2019	56.934	35,89	35.203	22,19	66.498	41,92	158.635
2020	52.326	35,79	29.357	20,08	64.536	44,13	146.219
2021	58.085	34,43	34.121	20,22	56.191	33,30	168.725
2022	50.573	31,32	35.349	21,89	75.548	46,79	161.470

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 (diolah), 2023

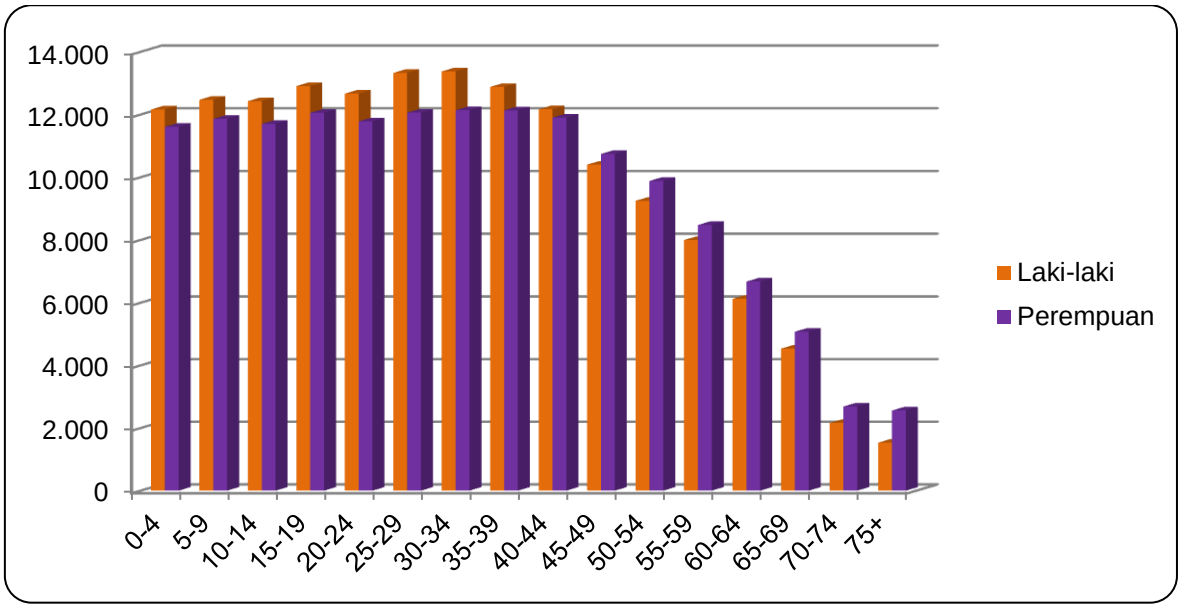
Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2022 paling banyak berada pada rentang usia 30-34 tahun yaitu sebanyak 25.512 jiwa, diikuti rentang usia 25-29 tahun sebanyak 25.386 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 75 tahun sebanyak 4.092 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2022 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2022 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.160	11.608	23.768
5-9	12.472	11.862	24.334
10-14	12.427	11.701	24.128
15-19	12.909	12.056	24.965
20-24	12.667	11.783	24.450
25-29	13.326	12.060	25.386
30-34	13.374	12.138	25.512
35-39	12.881	12.135	25.016
40-44	12.168	11.901	24.069
45-49	10.403	10.743	21.146
50-54	9.251	9.884	19.135
55-59	7.999	8.478	16.477
60-64	6.124	6.676	12.800
65-69	4.538	5.079	9.617
70-74	2.160	2.687	4.847
75+	1.532	2.560	4.092
Jumlah	156.391	153.351	309.742

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Penduduk Kota Pekalongan tahun 2022 menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam bentuk diagram batang seperti berikut.



Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2022 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 (diolah), 2023

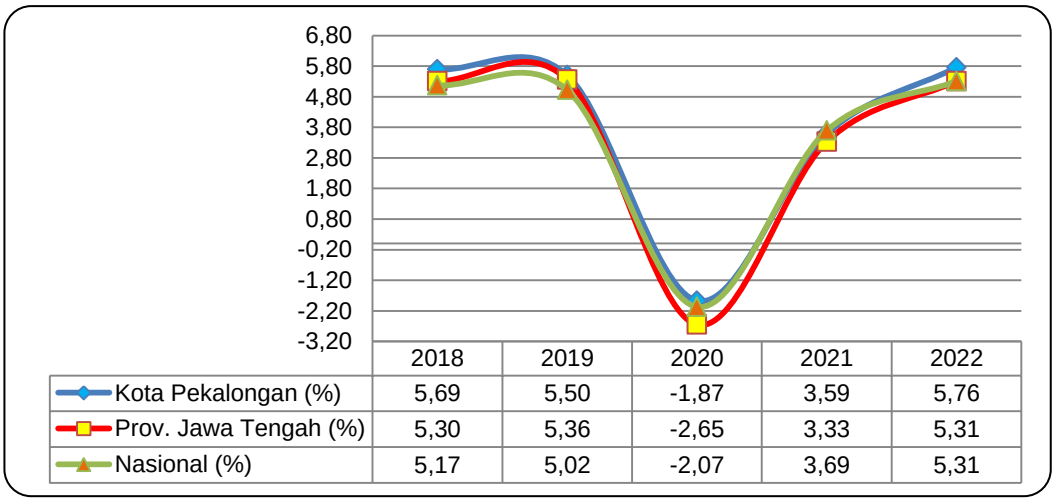
Dari data jumlah penduduk berdasarkan struktur umur tersebut, dapat diketahui bahwa Kota Pekalongan memiliki bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif, yaitu rentang usia 15 hingga 64 tahun. Jumlah penduduk usia produktif Kota Pekalongan adalah 218.956 jiwa atau sebesar 70,69% dari jumlah penduduk seluruhnya.

Fenomena yang cukup jarang terjadi ini tentu akan memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu daerah. Tidak selalu menguntungkan, jika fenomena tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang maka justeru dapat menjadi ancaman bagi suatu daerah. Pemerintah Kota Pekalongan harus melakukan upaya terintegrasi untuk memanfaatkan bonus demografi ini menjadi keuntungan bagi Kota Pekalongan. Salah satunya, fenomena ini menjadi peluang besar bagi Kota Pekalongan untuk meningkatkan kinerja perekonomian, terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, serta sektor lainnya yang menjadi sektor unggulan di Kota Pekalongan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, tetapi masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respons kebijakan yang ditempuh.

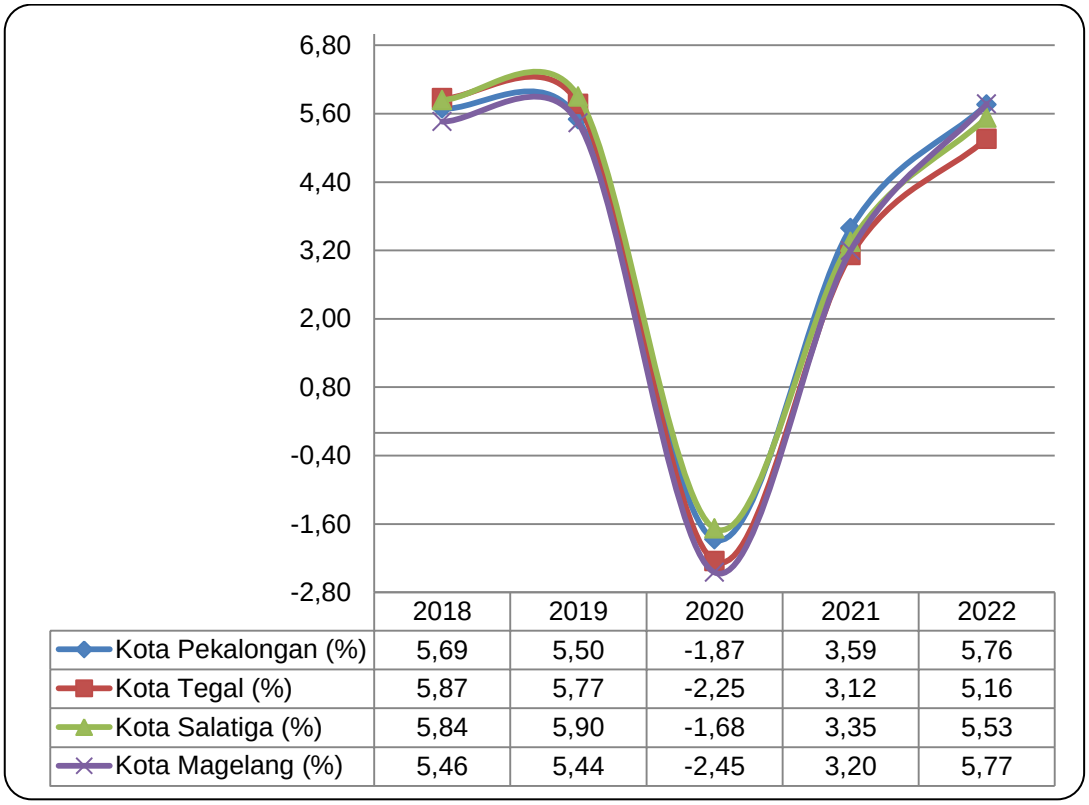


	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	5,69	5,50	-1,87	3,59	5,76
Prov. Jawa Tengah (%)	5,30	5,36	-2,65	3,33	5,31
Nasional (%)	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 (diolah), 2023

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Sementara pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.13 berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	5,69	5,50	-1,87	3,59	5,76
Kota Tegal (%)	5,87	5,77	-2,25	3,12	5,16
Kota Salatiga (%)	5,84	5,90	-1,68	3,35	5,53
Kota Magelang (%)	5,46	5,44	-2,45	3,20	5,77

Gambar 2.13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan masih berfluktuasi, belum menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rangka pemulihan dan percepatan peningkatan kesejahateraan masyarakat, sebagai dampak pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi menjadi salah faktor pendorongnya. Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dapat memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kesejahteraan masyarakat terus semakin meningkat.

PDRB Kota Pekalongan Tahun 2021 menurut pengeluaran, menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 66,16% merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sebesar 39,14% merupakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), sebesar 8,94% merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sebesar 1,3% merupakan pengeluaran konsumsi LNPRT, sebear 0,26% merupakan perubahan inventori, serta sebesar -15,8% merupakan net ekspor barang dan jasa. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan

bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan persediaan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cara mengetahui informasi tentang PMTB dan persediaan, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan suatu wilayah atau negara dari tahun ke tahun. Bergeraknya perekonomian suatu wilayah atau negara ditentukan oleh faktor kapital dan tenaga kerja. Kedua faktor tersebut merupakan penggerak utama suatu perekonomian yang mengubah input menjadi output berupa barang dan jasa. Investasi diperlukan sebagai suatu bagian penting dalam suatu perkonomian, serta mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan output, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Berdasarkan data satu dekade ini, dengan menggunakan analisis korelasi, dapat diidentifikasi bahwa keempat aspek tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan (Indeks Gini), pengentasan kemiskinan (angka kemiskinan), dan kesempatan kerja (TPT, tingkat pengangguaran terbuka), memiliki korelasi yang tidak signifikan. Artinya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama ini, tidak berkorelasi atau tidak mempengaruhi terhadap pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.

2.1.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2018-2022. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2022, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,08 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,79 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,10 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,67	4,66	5,09	4,79	4,71
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,94	20,85	21,34	21,15	20,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,12	0,12	0,11
F	Konstruksi	14,60	14,64	14,54	15,46	15,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,76	21,80	21,38	21,59	21,08
H	Transportasi dan Pergudangan	6,28	6,40	5,02	5,06	7,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,44	5,31	5,36	5,67
J	Informasi dan Komunikasi	4,21	4,36	5,13	5,07	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,27	6,13	6,21	6,22	6,14
L	Real Estat	2,71	2,71	2,73	2,66	2,58
M,N	Jasa Perusahaan	0,42	0,44	0,43	0,42	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,58	4,47	4,49	4,17	3,93
P	Jasa Pendidikan	4,75	4,65	4,72	4,54	4,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,29	1,44	1,40	1,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,87	1,90	1,90	1,83	1,82
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2022, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4,71 persen. Peranan kategori ini mengalami fluktuasi. Tahun 2018, peranan kategori ini sebesar 4,67 persen, kemudian melemah tahun 2019 sebesar 4,66 persen, dan meningkat 5,09 persen di tahun 2020, dan kembali melemah di Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 4,79 dan 4,71.

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan relatif stagnan dikarenakan Kota Pekalongan berkembang dalam pelayanan ke wilayah sekitarnya dan kecenderungan perkembangan perkotaan bahwa sektor primer tidak dapat berkembang optimal, terutama sub sektor pertanian, diakibatkan keterbatasan lahan pertanian karena untuk penggunaan kegiatan yang dianggap lebih produktif dan sebagian wilayah Kota Pekalongan terdampak rob. Nilai produksi sub sektor perikanan jika dibandingan dengan masa kejayaan perikanan Kota Pekalongan yang lalu, cukup kecil dan belum berkembang

sesuai harapan, terutama produksi perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan kendala teknis sedimentasi termasuk pengelolaannya sehingga semakin sedikit kapal perikanan yang membongkar hasil tangkapannya di Kota Pekalongan. Dengan kondisi tersebut maka lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai produksi barang dan jasa yang relatif stagnan.

Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Industri Pengolahan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 20,79 persen pada tahun 2022.

Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 20,94 persen, kemudian melemah menjadi 20,85 persen pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 meningkat menjadi 21,34 persen dan melemah menjadi 21,15 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 peranannya kembali melemah menjadi 20,79 persen.

Tahun 2018-2022, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kecenderungan yang menurun, saat terjadi dampak pandemi *COVID-19*. Bahkan pada tahun 2020, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki peranan terbesar dibandingkan lapangan usaha lain. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha ini cukup tangguh terhadap adanya dampak pandemi *COVID-19* di Kota Pekalongan. Ketika perekonomian nasional dan daerah tumbuh kembali pada tahun 2021, maka peranan lapangan usaha Industri Pengolahan kembali melemah, hal ini terjadi karena lapangan usaha yang lain telah menguat kembali.

Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,14 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2022, menurun dibanding tahun 2021 yaitu 0,15 persen. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cenderung menurun dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan fluktuatif selama 2018-2022 yaitu sebesar 0,11 persen pada tahun 2018 dan menurun 0,10 persen pada tahun 2019, kemudian meningkat 0,12 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021 dan Kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 0,11 persen.

Konstruksi

Secara umum, peranan lapangan usaha Konstruksi terhadap perekonomian Kota Pekalongan berfluktuaktif. Peranan lapangan usaha ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2018 sebesar 14,60 persen, tahun 2019 meningkat menjadi

sebesar 14,64 persen dan tahun 2020 menurun menjadi sebesar 14,54 persen dan meningkat sangat tajam menjadi 15,46 persen pada tahun 2021. Namun Kembali menurun pada tahun 2022 yaitu sebesar 15,10 persen.

Peranan lapangan usaha Konstrusi sangat tergantung dengan implementasi pekerjaan konstruksi. Pada tahun 2021, peranan lapangan usaha ini meningkat cukup tajam, karena pada tahun 2021 pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kota Pekalongan jumlahnya sangat meningkat. Dengan demikian, semakin banyak pekerjaan konstruksi maka peranan lapangan usaha ini dapat semakin meningkat.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya, terhadap PDRB Kota Pekalongan. Peranan lapangan usaha ini selalu lebih dari 20 persen.

Secara umum peranan lapangan usaha ini selalu berfluktuasi. Pada tahun 2018 peranannya sebesar 21,76 persen, meningkat menjadi 21,80 persen pada tahun 2019, dan semakin menurun menjadi 21,38 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, peranan lapangan usaha ini menguat menjadi 21,59 persen dan pada tahun 2022 melemah menjadi 21,08 persen. Tahun 2018-2019, lapangan usaha ini memiliki kecenderungan yang menurun, namun menguat kembali pada tahun 2020, saat terjadi dampak pandemi *COVID-19*. Hal ini menyiratkan tanda bahwa lapangan usaha ini lebih tangguh terhadap adanya dampak pandemi *COVID-19*. Ketika perekonomian nasional dan daerah tumbuh kembali pada tahun 2021, maka peranan lapangan usaha ini kembali melemah, hal ini terjadi karena lapangan usaha yang lain telah menguat kembali.

Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kota Pekalongan memiliki posisi strategis dalam kerangka lalu lintas Pulau Jawa sehingga lapangan usaha ini merupakan salah satu sektor yang strategis.

Lapangan usaha ini memiliki peranan yang cukup stabil pada tahun 2018-2022 yaitu berturut-turut sebesar 6,28 persen dan menguat menjadi 6,40 persen. Namun pada tahun 2020 dan 2021 peranan lapangan usaha ini turun menjadi 5,02 persen dan 5,06 persen. Pada tahun 2020, peranan lapangan usaha ini turun drastis sebagai dampak pandemi *COVID-19* karena sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang cukup terkena dampak pandemi. Namun pada tahun 2022 peranan lapangan usaha ini meningkat tajam menjadi sebesar 7,27 persen.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Perkembangan lapangan usaha ini selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Peranan tahun 2018 sebesar 5,42 persen, tahun 2019 sebesar 5,44 persen dan tahun 2020 sebesar 5,31 persen. Peranan tahun 2018-2020 memiliki kecenderungan yang sedikit demi sedikit melemah. Namun pada tahun 2021 dan 2022 peranannya meningkat menjadi 5,36 persen dan 5,67 persen. Dari perkembangan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa lapangan usaha ini menunjukkan peranannya yang menguat, namun sangat terdampak pandemi *COVID-19* pada tahun 2020, akibat sektor ini global sangat terpengaruh. Lapangan usaha ini kembali menguat pada tahun 2021 akibat sudah mulai berkembangnya perekonomian global, nasional dan lokal.

Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang perekonomian. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi.

Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan secara umum meningkat dari tahun 2018-2020. Tahun 2018 peranan lapangan usaha ini sebesar 4,21 persen, tahun 2019 sebesar 4,36 persen dan tahun 2020 sebesar 5,13 persen. Selama tiga tahun tersebut menunjukkan perkembangan dan terjadi peningkatan yang tajam pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi, dimana lapangan usaha ini tetap berkembang, sementara lapangan usaha lainnya mengalami penurunan. Setelah menguatnya lapangan usaha lainnya maka perananan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 menurun menjadi 5,07 persen dan 4,74 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Secara umum, selama lima tahun terakhir peranan lapangan usaha ini pada perekonomian Kota Pekalongan berfluktuatif. Peranan lapangan usaha ini, tahun 2018 sebesar 6,27 persen, tahun 2019 melemah sebesar 6,13 persen, dan tahun 2020-2021 meningkat kembali menjadi sebesar 6,21 persen dan 6,22 persen. Peranan lapangan usaha ini tahun 2022 melemah kembali menjadi 6,14 persen.

Real Estate

Lapangan usaha Real Estate memiliki peranan yang masih berfluktuatif terhadap PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir. Peranan lapangan usaha ini pada tahun 2018-2019 sebesar 2,71 persen, meningkat menjadi 2,73 persen. Pada tahun 2021-2022 semakin melemah menjadi 2,66 persen dan 2,58 persen.

Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peranan dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan, lapangan usaha Jasa Perusahaan berfluktuatf. Peranan lapangan usaha ini tahun 2018 sebesar 0,42 persen, tahun 2019 sebesar 0,44 persen, tahun 2020 menurun sebesar 0,43 persen dan tahun 2021-2022 kembali turun menjadi 0,42 persen. Dibandingkan lapangan usaha lainnya, lapangan usaha ini memiliki peranan yang paling kecil dari tahun ke tahun.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2018-2022 peranan lapangan usaha menunjukkan kecenderungan yang menurun. Perananan pada tahun 2018 sebesar 4,58 persen, tahun 2019 menurun menjadi sebesar 4,47 persen, dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 4,49 persen. Kemudian menurun tajam di tahun 2021-2022 masing-masing menjadi sebesar sebesar 4,17 persen dan 3,93 persen. Menguatnya peranan lapangan usaha ini pada tahun 2020 dimungkinkan karena menurunnya peranan lapangan usaha lain sebagai dampak pendemi *COVID-19*. Setelah perekonomian meningkat kembali pada tahun 2021 maka peranan lapangan usaha ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan.

Jasa Pendidikan

Secara umum peranan lapangan usaha Jasa Pendidikan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, belum menunjukkan pola kecenderungan tertentu. Pada tahun 2018, peranan lapangan usaha ini sebesar 4,75 persen dan di tahun 2019 menurun menjadi sebesar 4,65 persen. Tahun 2020 peranannya meningkat menjadi sebesar 4,72 persen

dan menurun kembali menjadi sebesar 4,54 persen pada tahun 2021 dan 4,16 persen di tahun 2022.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Dalam periode tahun 2018-2020 peranan lapangan usaha ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Namun demikian, pada tahun 2022 peranannya menurun menjadi 1,32 persen. Kecenderungan yang meningkat tersebut menunjukkan bahwa nilai penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial semakin meningkat. Apalagi di tahun 2020, sebagai dampak pandemi *COVID-19*, nilai tersebut semakin meningkat, terutama terkait dengan jasa kesehatan penanganan *COVID-19*.

Jasa lainnya

Peranan lapangan usaha Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Peranan lapangan usaha ini tahun 2018 sebesar 1,87 persen, tahun 2019-2020 sebesar 1,90 persen, dan tahun 2021-2022 menurun sebesar 1,83 persen dan 1,82 persen.

2.1.2.3 Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu tahun 2018-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan bertumbuh antara 5,50 persen sampai dengan 5,69 persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan sebesar -1,87 persen, tumbuh sebesar 3,59 persen di tahun 2021 dan kembali tumbuh di tahun 2022 sebesar 5,76 persen. Pada tahun 2018, pertumbuhan tiga besar yakni Informasi dan Komunikasi sebesar 10,43 persen, Jasa Lainnya sebesar 9,02 persen, dan Jasa Perusahaan sebesar 7,95 persen. Pada tahun 2022, lapangan usaha yang mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi, tiga besar diantaranya adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 48,53 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 12,43 persen dan Jasa lainnya sebesar 5,75 persen.

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang pernah mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak pandemi *COVID-19* tahun 2020, yaitu mengalami kontraksi dengan nilai -24,25 persen. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar, bahkan pada tahun 2020 pun memiliki pertumbuhan terbesar. Terdapat empat lapangan usaha yang konsisten memiliki pertumbuhan positif yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,03	4,63	6,36	-3,21	3,41
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,46	4,84	-0,48	2,38	4,26

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,29	3,72	-0,26	2,91	4,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,16	4,21	6,91	6,34	2,38
F	Konstruksi	5,59	4,71	-1,25	8,64	1,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	5,47	-4,68	5,46	3,29
H	Transportasi dan Pergudangan	7,07	7,53	-24,25	3,00	48,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,88	6,76	-3,78	4,78	12,43
J	Informasi dan Komunikasi	10,43	10,57	17,20	4,23	2,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,12	3,76	0,93	1,35	0,55
L	Real Estat	5,97	5,62	-0,08	1,89	4,89
M,N	Jasa Perusahaan	7,95	8,31	-4,32	2,22	5,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,99	3,82	-1,00	-0,85	1,20
P	Jasa Pendidikan	7,59	2,63	-0,56	0,50	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,93	7,84	8,35	1,76	2,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,02	8,47	-1,19	0,87	5,75
Produk Domestik Regional Bruto		5,69	5,50	-1,87	3,59	5,76

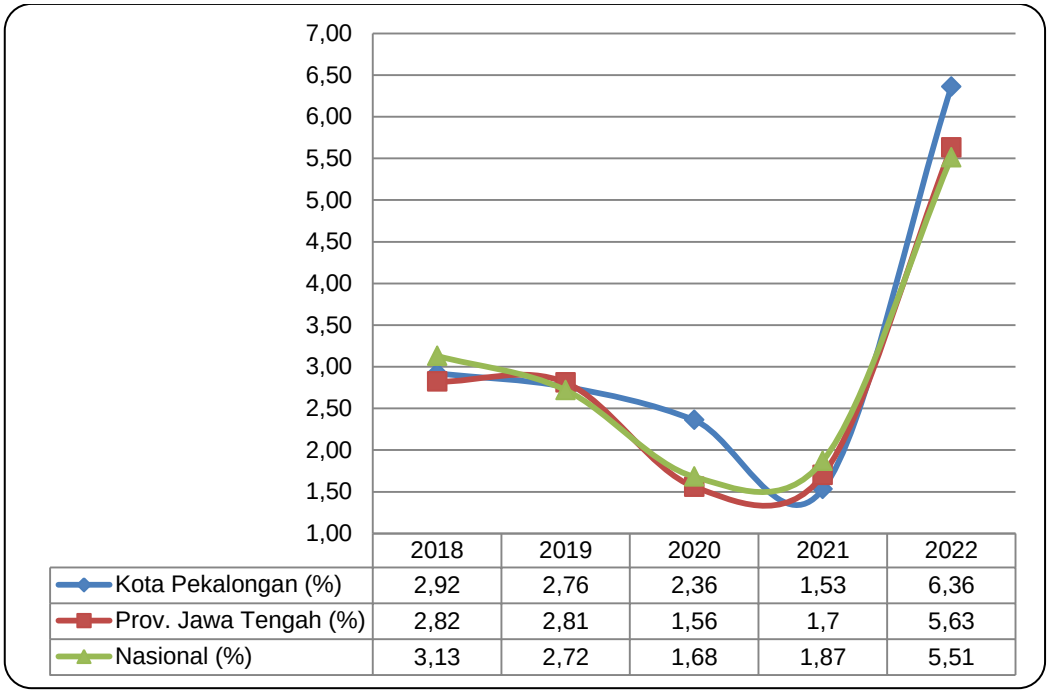
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018-2022 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2022 mayoritas adalah sektor Transportasi dan Pergudangan.

2.1.2.4 Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2018 – 2022, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 2.14 berikut.

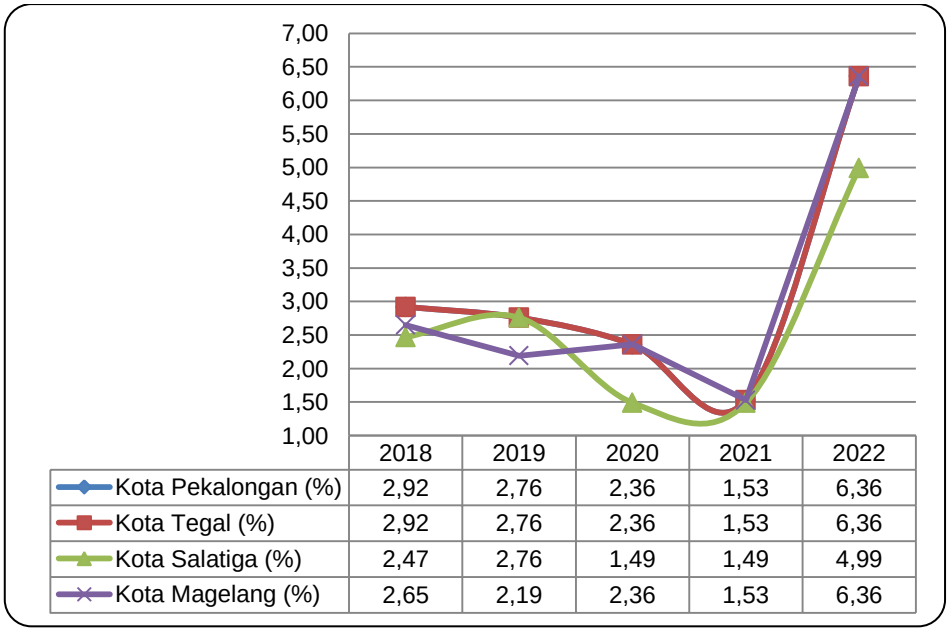


	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	2,92	2,76	2,36	1,53	6,36
Prov. Jawa Tengah (%)	2,82	2,81	1,56	1,7	5,63
Nasional (%)	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Gambar 2.14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Sumber: www.bps.go.id, 2023

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	2,92	2,76	2,36	1,53	6,36
Kota Tegal (%)	2,92	2,76	2,36	1,53	6,36
Kota Salatiga (%)	2,47	2,76	1,49	1,49	4,99
Kota Magelang (%)	2,65	2,19	2,36	1,53	6,36

Gambar 2.15 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2023

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun tahun 2018 sama dengan Kota Tegal, berada di urutan tertinggi yaitu 2,92%. Urutan selanjutnya yaitu Kota Magelang dengan laju inflasi sebesar 2,65%, dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 2,47%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%.

Kenaikan inflasi yang sangat signifikan pada tahun 2022 tersebut, bukan merupakan permasalahan Kota Pekalongan saja, tetapi merupakan permasalahan dunia, permasalahan nasional, maupun Provinsi Jawa Tengah. Kondisi laju inflasi menunjukkan tren meningkat tajam disebabkan karena sisi penawaran seiring dengan keanikan harga-harga komoditas dunia dan juga ada gangguan pasokan di domestik. Dapat disimpulkan bahwa gangguan rantai pasok hingga kenaikan harga komoditas global menyebabkan tren inflasi merangkak naik tajam.

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan pada tahun 2022 adalah kelompok Transportasi, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Makanan, Minuman dan Tembakau. Transportasi merupakan penyumbang inflasi terbesar karena mulai aktifnya pergerakan orang dan barang/jasa pasca pandemi Covid-19 sehingga memicu terjadinya inflasi. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya merupakan penyumbang inflasi terbesar kedua juga sangat dipengaruhi pasca Covid-19 yang menyebabkan sebagian masyarakat menganggap perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan bagian dari kebutuhan hidup sehingga memicu terjadinya inflasi. Makanan, Minuman dan Tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar ketiga karena secara umum terjadinya peningkatan inflasi disebabkan terganggunya rantai pasokan barang/jasa sebagai dampak permasalahan dunia. Di samping itu, Kota Pekalongan merupakan kawasan perkotaan, dimana pasokan bahan makanan didominasi pasokan dari luar daerah, sehingga jika terjadi gangguan pada rantai pasokan, maka akan berdampak terhadap terjadinya inflasi makanan, minuman dan tembakau. Upaya yang dilakukan untuk menekan laju inflasi antara lain dengan melakukan pemantauan harga bahan pokok secara berkala dan dipublikasikan melalui SIPOKMAS (Sistem Informasi Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat), operasi pasar dan rapat koordinasi secara rutin oleh TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).

Mulai tahun 2020 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi, sehingga tabel inflasi menurut kelompok pengeluaran dijadikan dua, yaitu tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2022. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.9 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Umum	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,66	8,00
Makanan Jadi	3,05	1,60
Perumahan	3,47	0,40
Sandang	2,51	3,31
Kesehatan	0,54	4,75
Pendidikan	1,33	3,74
Transport	2,43	0,31

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Perlengkapan	-	-
Infokom	-	-
Rekreasi	-	-
Restoran	-	-
Perawatan Pribadi	-	-

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah 2023

Tabel 2.10 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2022

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89
Kesehatan	2,87	0,55	2,50
Transportasi	1,36	1,01	16,42
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64
Umum	2,32	1,53	6,31

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah, 2023

2.1.2.5 PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2017 hingga 2022 berfluktuasi. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 33,14 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 sebesar 35,32 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,17 juta rupiah pada tahun 2021 dan 40,68 juta rupiah pada tahun 2022. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.11 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.089,25	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.599,93
- ADHK (Miliar Rp)	7.087,92	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	33,14	35,41	35,32	37,17	40,68
- ADHK (Juta Rp)	23,28	24,35	23,89	24,66	25,96
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	7,86	6,86	-0,25	5,24	9,43
- ADHK (persen)	4,79	4,60	-1,88	3,20	5,27

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2023

PDRB per kapita yang sempat sedikit melemah pada tahun 2020, disebabkan dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan pada tahun 2020 PDRB berkontraksi, yaitu tumbuh secara negatif. Hal ini menyebabkan PDRB per kapita sedikit melemah. Kondisi ini merupakan fenomena umum yang juga terjadi di daerah lain, termasuk Provinsi Jawa tengah maupun nasional. Dengan kembali pulihnya perekonomian pasca pandemi, maka perekonomian bertumbuh kembali sehingga pada tahun 2021 dan 2022, PDRB per kapita kembali meningkat.

Data PDRB per kapita ini merupakan data yang belum menggambarkan kondisi sesungguhnya pendapatan per kapita masyarakat. Dalam beberapa kasus, PDRB per kapita ini digunakan karena data pendapatan per kapita yang telah beberapa tahun ini tidak tersedia. Oleh karena itu, untuk menggambarkan tingkat kesejahateraan masyarakat, seringkali digunakan data PDRB per kapita ini.

2.1.2.6 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2018 sebesar 0,336 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,69 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,69 persen sehingga menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,305. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 1,87%. Meskipun demikian, indeks gini masih meningkat menjadi 0,314. Pada tahun 2021 , perekonomi kembali berkembang yaitu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59 persen dan Indeks Gini pun juga meningkat sangat tajam menjadi 0,357. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi semakin menguat yaitu dengan angka 5,76 persen, tetapi Indeks Gini kembali menurun menjadi 0,373. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12 Indeks Gini Kota Pekalongan
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Indeks Gini
2018	0,336
2019	0,305
2020	0,314
2021	0,357
2022	0,373

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2023

Dari data tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa indeks gini Kota Pekalongan masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2018 lebih tinggi, menunjukkan indeks gini yang meningkat. Tantangan ke depan adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi yang didorong terus kenaikannya dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat luas. Masyarakat luas yang dapat meningkat kesejahteraannya, diharapkan dapat menurunkan indeks gini ke depannya.

Pembangunan inklusif yang dapat dilaksanakan antara lain terus mendorong pengembangan sektor unggulan, yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian serta sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor tersebut. Upaya lain yang harus terus dilakukan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga perekonomian dapat terus tumbuh serta revitalisasi kawasan terdampak rob dan banjir. Upaya-upaya tersebut telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

2.1.2.7 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021, terdiri dari:

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, yang meliputi:
   a. Bantuan pangan;
   b. Bantuan kesehatan;
   c. Bantuan pendidikan; dan
   d. Bantuan perumahan.
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   a. Pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
   b. Bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
   c. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
   d. Fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan,
   e. Fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;

f. Fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat.

3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, meliputi:
   a. Peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
   b. Perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
   c. Peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
   d. Peningkatan sarana dan prasarana usaha.
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
   a. Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
   b. Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
   c. Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.1.2.7.1 Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

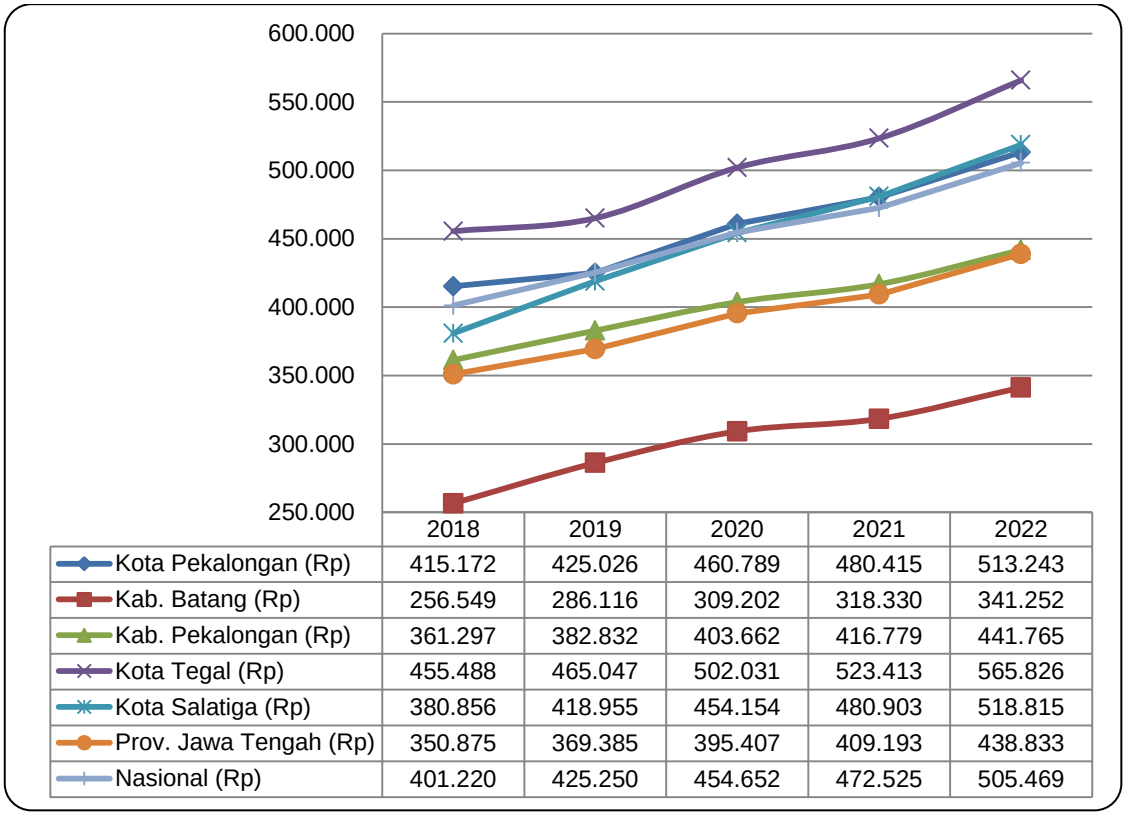
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada Desember 2022, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp. 513.243/kapita/bulan. Angka ini dibawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp. 513.517 dan diatas Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 438.833,00.

Tabel 2.13 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan, Daerah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GK Provinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2018	415.172	256.549	361.297	455.488	380.856	350.875	401.220
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250
2020	460.789	309.202	403.662	502.031	454.154	395.407	454.652
2021	480.415	318.330	416.779	523.413	480.903	409.193	472.525
2022	513.243	341.252	441.765	565.826	518.815	438.833	513.517

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2023

Untuk memberikan gambaran perbandingan garis kemiskinan antara Kota Pekalongan, daerah setara, Provinsi Jawa Tengah dan nasional, disajikan dalam grafik berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (Rp)	415.172	425.026	460.789	480.415	513.243
Kab. Batang (Rp)	256.549	286.116	309.202	318.330	341.252
Kab. Pekalongan (Rp)	361.297	382.832	403.662	416.779	441.765
Kota Tegal (Rp)	455.488	465.047	502.031	523.413	565.826
Kota Salatiga (Rp)	380.856	418.955	454.154	480.903	518.815
Prov. Jawa Tengah (Rp)	350.875	369.385	395.407	409.193	438.833
Nasional (Rp)	401.220	425.250	454.652	472.525	505.469

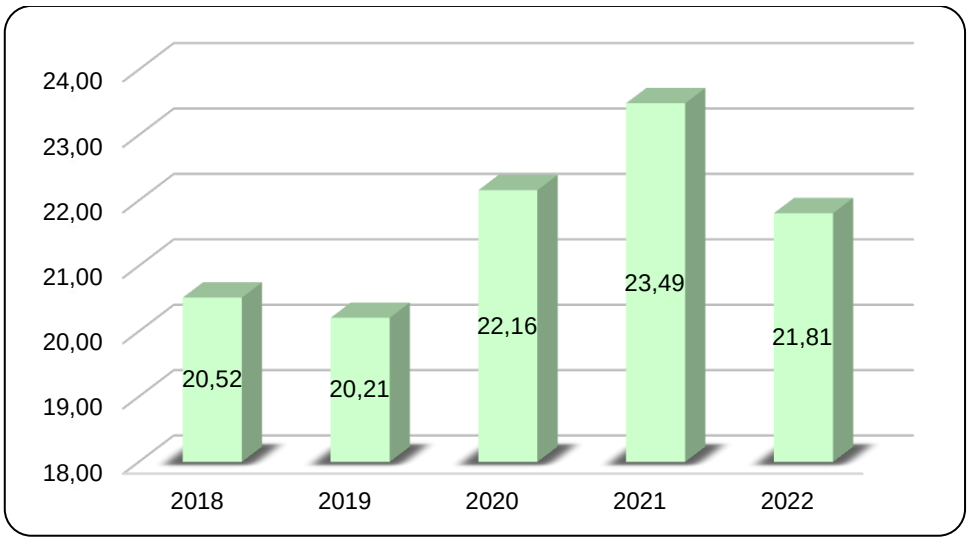
Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2023

2.1.2.7.2 Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan bantuan tunai yang bersumber dari DBHCHT. Di sektor kesehatan, juga disediakannya jaminan kesehatan bagi sebagian masyarakat akan sangat membantu menekan pengeluaran masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat juga dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja untuk industri dan mendorong lahirya wirausaha baru.



Gambar 2.17 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 (000 jiwa)

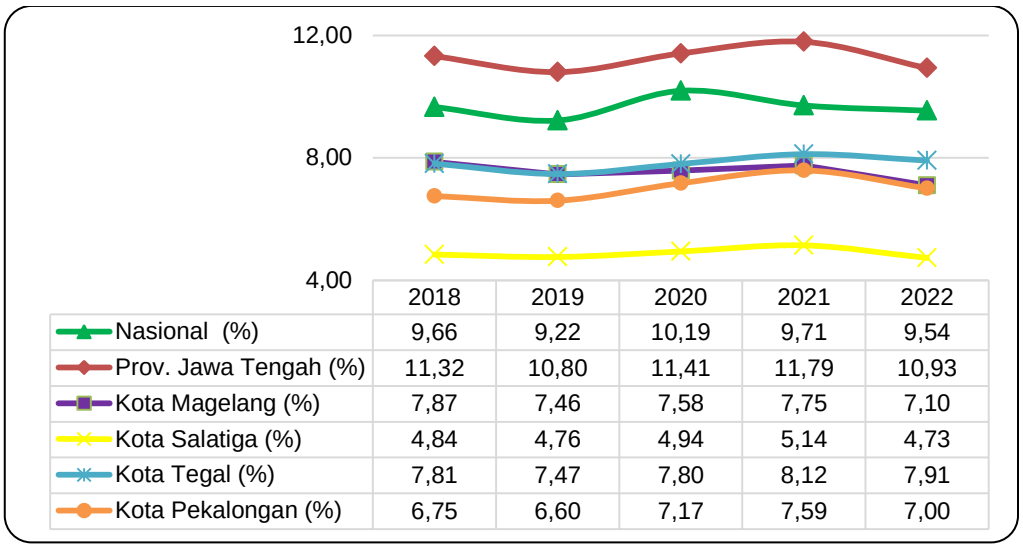
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Konsistensi strategi pengentasan kemiskinan harus terus dijaga dan ditingkatkan sehingga jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan dapat menurun signifikan. Beberapa strategi tersebut adalah dengan mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi mengurangi beban pengeluaran warga miskin yaitu melalui pemberian bantuan sembako dan BLT (bantuan langsung tunai). Dalam hal meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, Pemerintah Kota melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan-pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), Dindagkop UKM, maupun kelurahan. Sedangkan dalam hal mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota mensinergikan kebijakan bantuan tunai yang bersumber dari DBHCHT dengan mempersyarakatkan penerima bantuan adalah warga miskin dari DTKS yang belum menerima bantuan apapun.

Selama kurun waktu 2018 hingga tahun 2022, tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional namun bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan berada pada angka 6,75 persen atau sebanyak 20,50 ribu jiwa menurun di tahun 2019 menjadi 6,6 persen atau sebanyak 20,21 ribu jiwa. Namun mulai terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan berada pada puncak tertinggi di tahun 2021 sepanjang 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 7,59 persen atau sebanyak 23,49 ribu jiwa. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020-2021 terjadi pandemi *COVID-19* berkepanjangan yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk Kota Pekalongan.

Kemudian tingkat kemiskinan mulai menurun di tahun 2022 menjadi 7,00 persen atau sebanyak 21,81 ribu jiwa sebagai dampak dilaksanakannya upaya percepatan Vaksinasi *COVID-19* dan upaya pemulihan ekonomi penduduk Kota Pekalongan pasca COVID-19. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut:

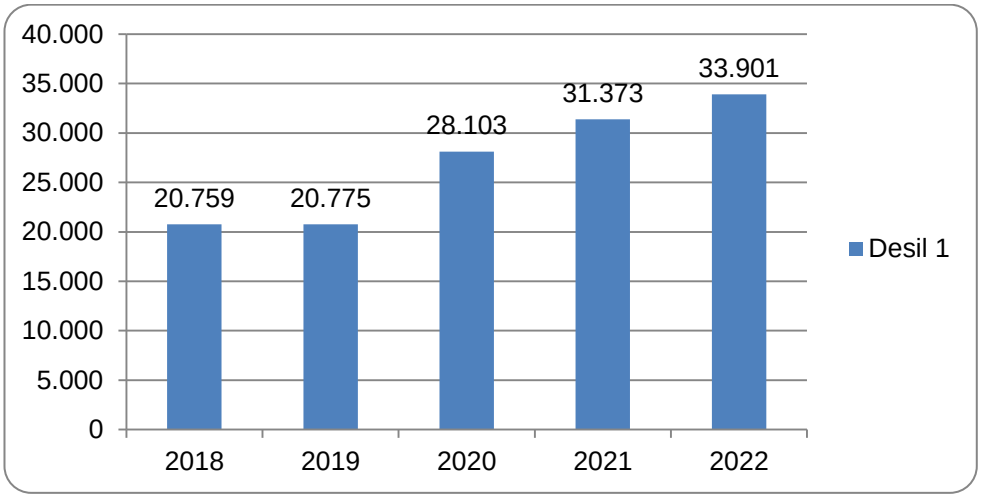


	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional (%)	9,66	9,22	10,19	9,71	9,54
Prov. Jawa Tengah (%)	11,32	10,80	11,41	11,79	10,93
Kota Magelang (%)	7,87	7,46	7,58	7,75	7,10
Kota Salatiga (%)	4,84	4,76	4,94	5,14	4,73
Kota Tegal (%)	7,81	7,47	7,80	8,12	7,91
Kota Pekalongan (%)	6,75	6,60	7,17	7,59	7,00

Gambar 2.18 Perbandiangan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2022

Mulai Tahun 2021, upaya penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem saat ini sudah tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan bahwa kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya kini memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga dari BKKBN beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraannya. Adapun jumlah individu yang tergolong ke dalam kategori penduduk sangat miskin berdasarkan data yang telah ditetapkan (desil 1) adalah sebagai berikut:



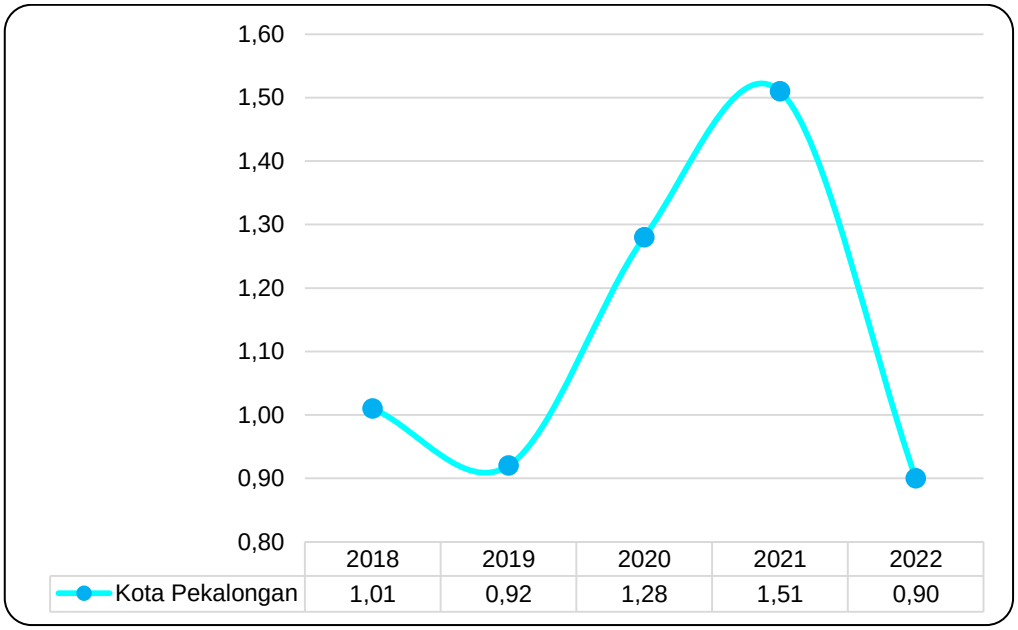
Gambar 2.19 Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: DTKS 2018 – 2020 (diolah), Data P3KE 2021-2022

2.1.2.7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

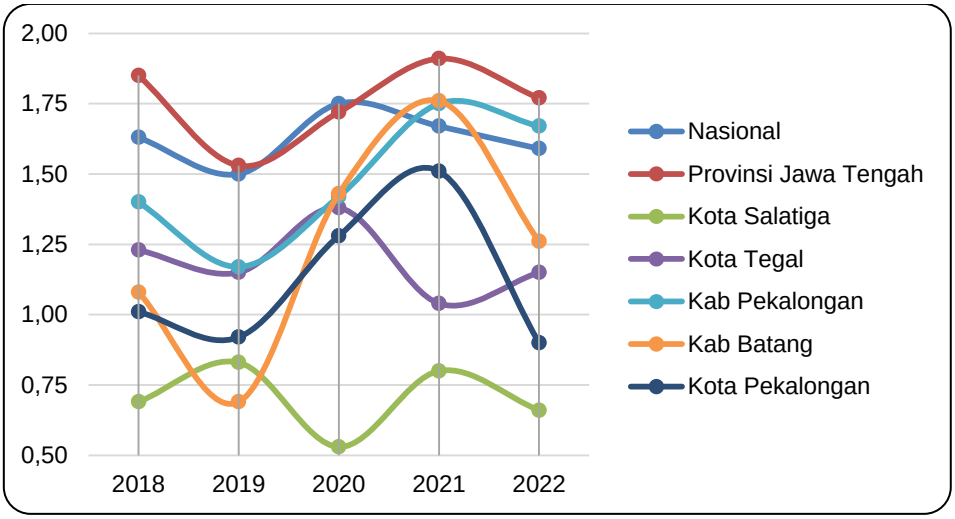
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun waktu 2018-2022 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 1,01, menurun 0,09 menjadi 0,92 di tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 meningkat di angka 1,28 dan 1,51. Pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 0,90. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 disajikan dalam Gambar 2.20 berikut.



Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/ dan https://jateng.bps.go.id/ (diolah), 2022

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Tegal, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Salatiga, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih tinggi. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.21 berikut.



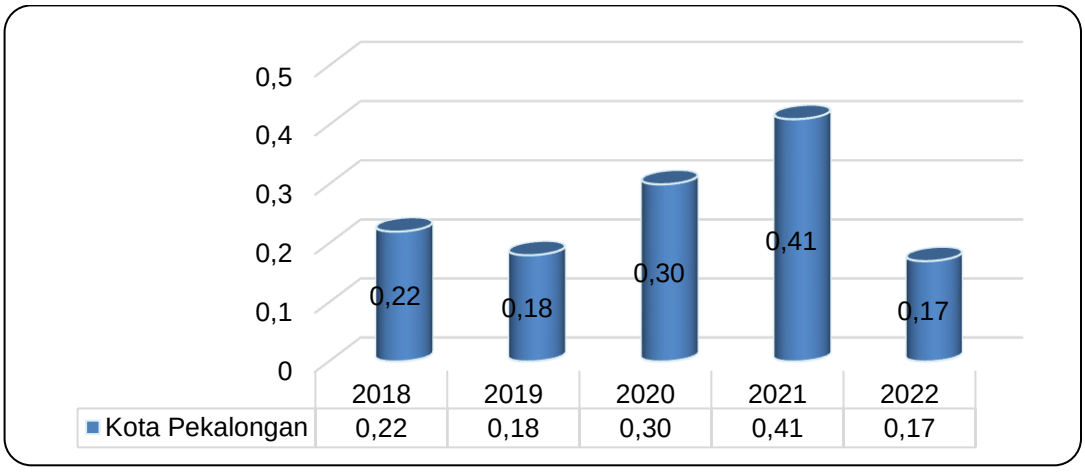
Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2022

2.1.2.7.4 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2018 sebesar 0,22 persen. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019 indeks ini mengalami penurunan menjadi 0,18, yang berarti kondisi mebaik. Kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 0,30 yang artinya ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2020 semakin bertambah dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan kembali meningkat menjadi 0,41 dan kembali mengalami penurunan menjadi 0,17 pada tahun 2022.

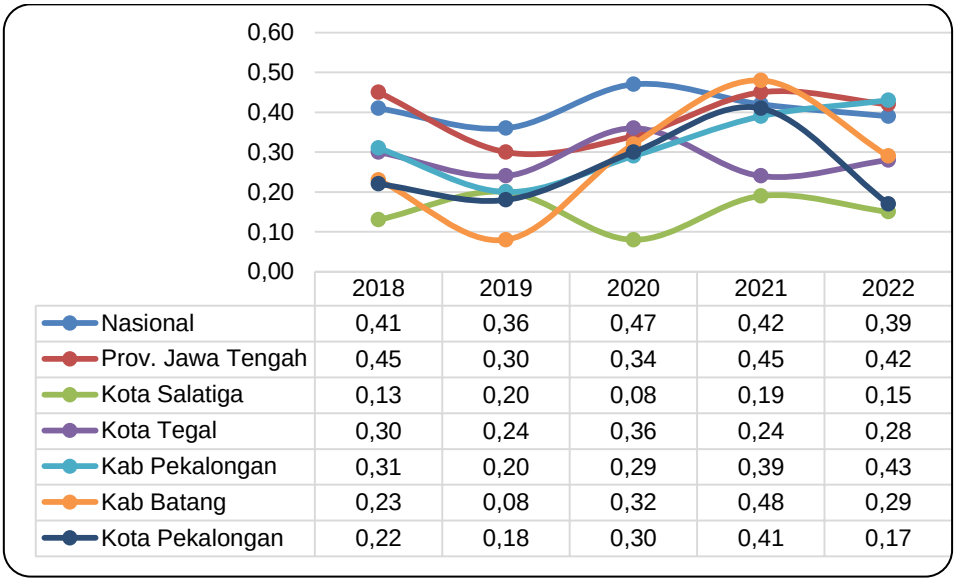


Gambar 2.22 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/ dan https://jateng.bps.go.id/ (diolah), 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dibandingkan dengan Kota Tegal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2022 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Salatiga, pada tahun 2022 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih tinggi.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.



	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	0,41	0,36	0,47	0,42	0,39
Prov. Jawa Tengah	0,45	0,30	0,34	0,45	0,42
Kota Salatiga	0,13	0,20	0,08	0,19	0,15
Kota Tegal	0,30	0,24	0,36	0,24	0,28
Kab Pekalongan	0,31	0,20	0,29	0,39	0,43
Kab Batang	0,23	0,08	0,32	0,48	0,29
Kota Pekalongan	0,22	0,18	0,30	0,41	0,17

Gambar 2.23 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2022

Pasca pandemi *COVID-19*, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi *COVID-19*. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan.

Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di Kota Pekalongan. Perkembangan menggembirakan bahwa pada tahun 2022, angka kemiskinan mulai menunjukkan penurunan kembali. Kondisi ini tentunya merupakan dampak dari perbaikan kinerja perekonomian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tentunya akan terus dilakukan terus-menerus, agar angka kemiskinan dapat semakin menurun.

Upaya terintegrasi telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan bersama para pemangku kepentingan, dalam rangka untuk terus menurunkan angka kemiskinan.

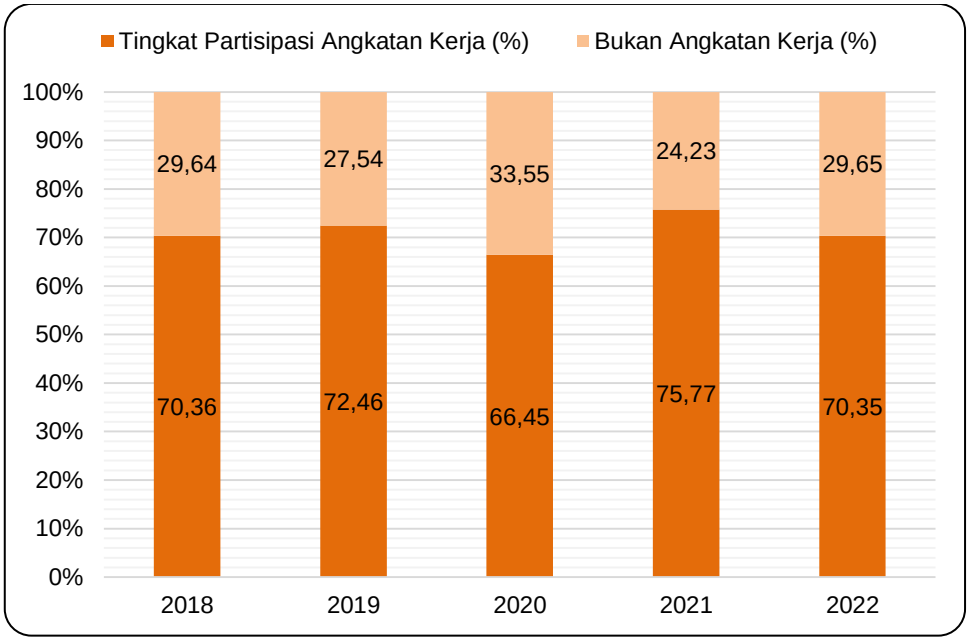
Namun demikian, karena angka kemiskinan telah mencapai angka satu dijit, maka penurunan angka kemiskinan telah mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan yang harus dientaskan adalah kemiskinan struktural. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan lebih terintegrasi antar pemangku kepentingan pembangunan Kota Pekalongan dan dilakukan secara kontinyu.

Salah satu cara pandang dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan adalah dengan mencermati data angka kemiskinan selama 1 (satu) dekade ini, dengan dibandingkan indikator yang lain, terutama indikator kinerja makro kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan berbagai perkembangan data berbagai indikator selama 1 (satu) dekade ini (tahun 2013-2022) bahwa angka kemiskinan memiliki korelasi kuat dan signifikan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan PDRB Per Kapita. Angka kemiskinan memiliki korelasi yang lemah dan tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Indeks Gini, dan Inflasi.

Korelasi angka kemiskinan dengan IPM dan PDRB per kapita adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi IPM dan pendapatan per kapita maka angka kemiskinan akan semakin rendah. Oleh karena itu, upaya terintegrasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus dipadukan dengan upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk terus meningkatkan IPM maupun PDRB atau PDRB per kapita. Di sisi yang lain, indikator pertumbuhan ekonomi dan TPT belum memiliki korelasi yang signifikan dengan angka kemiskinan. Upaya penurunan TPT harus dapat berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang harus diwujudkan pun adalah pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.1.2.8 Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

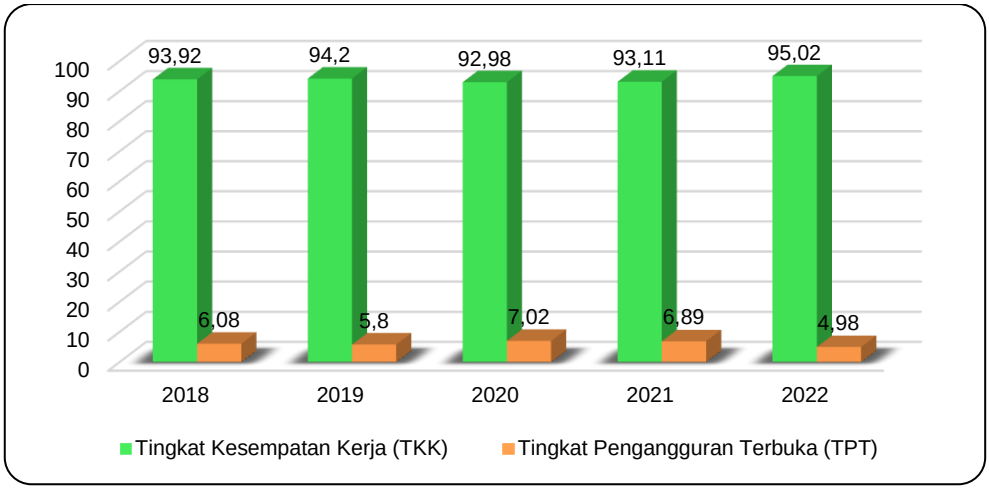
Penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua, yang disebut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut *International Labour Organization* (ILO), penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur 15 tahun atau lebih. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Pekalongan Tahun 2022 tercatat sebanyak 241.572 orang. Dari jumlah tersebut, yang termasuk Angkatan Kerja (penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran) sebesar 70,35 persen pada tahun 2022, turun 5,42 persen dari tahun 2021. Sisanya, yaitu 29,65 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bersekolah/kuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Kenaikan TPAK pada tahun 2018-2022 seiring dengan kenaikan jumlah penduduk usia kerja.



Gambar 2.24 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2023

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2022 mencapai 95,02 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,98 persen atau menurun 1,91 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 5 orang yang benar-benar menganggur.



Gambar 2.25 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2023

Nilai TPT secara persentase mengalami penurunan dari 6,89 persen menjadi 4,98 persen, dan secara jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 12.485 orang di tahun 2021 menjadi 8.470 orang pada tahun 2022 yang disebabkan beberapa faktor yang mendorong pulihnya ekonomi sehingga dapat membuka lapangan kerja dan menjadikan angka pengangguran semakin menurun.

Semua sektor diharapkan terus berpacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka mampu menyerap tenaga kerja dan membuka peluang kerja lebih tinggi.

2.1.2.9 Angka Kriminalitas yang Ditangani

Angka kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung menurun. Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana pada tahun 2018 berada di angka 3,78 dan meningkat di angka 4,59 pada tahun 2019. Di tahun-tahun selanjutnya, angka kriminalitas yang tertangani selalu menurun, mulai dari 3,91 di tahun 2020, 2,60 di tahun 2021 dan 1,47 di tahun 2022.

Tabel 2.14 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Angka Kriminalitas
2018	3,78
2019	4,59
2020	3,91
2021	3,60
2022	1,47

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2023

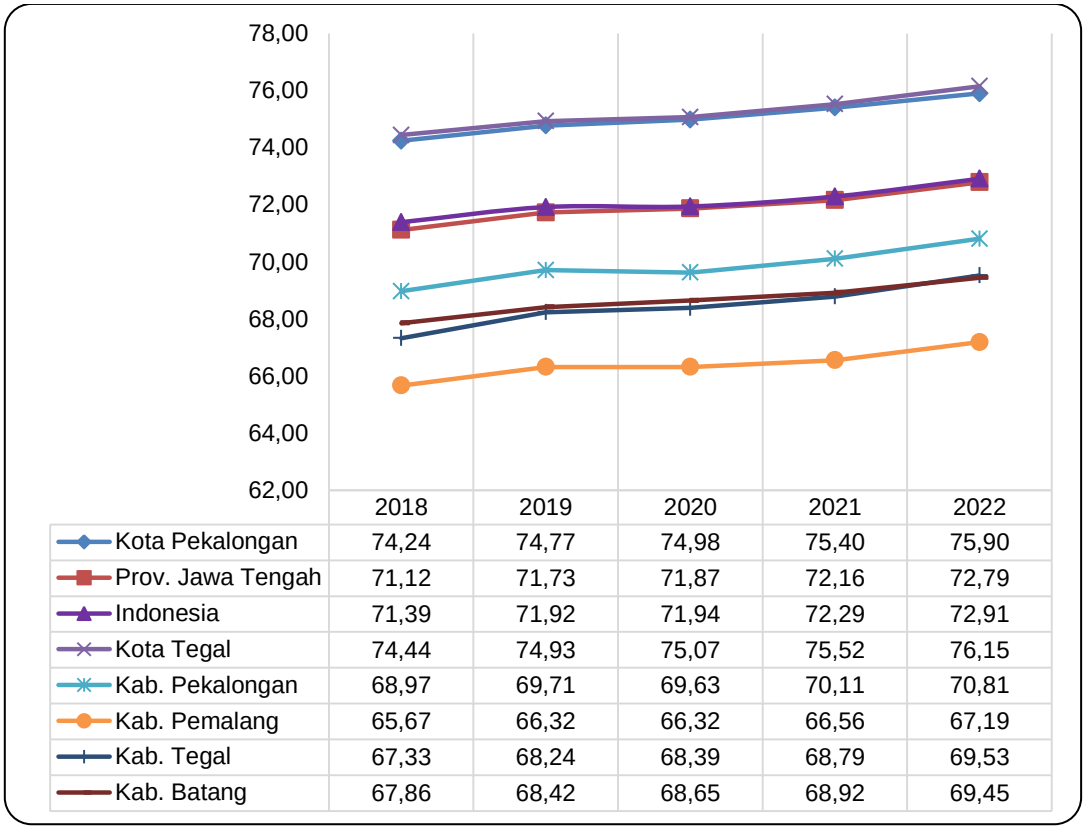
Berdasarkan data tersebut, angka kriminalitas cenderung menurun. Angka ini belum secara langsung berdampak terhadap kondusivitas wilayah karena belum adanya laporan maupun penelitian terkait korelasi antara angka kriminalitas dan kondusivitas wilayah. Data angka kriminalitas dari Kesbangpol Kota Pekalongan bersumber dari Polres Pekalongan Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Data dari dua sumber tersebut belum tentu memiliki metode pengambilan data yang sama.

Berdasarkan kecenderungan angka kriminalitas tersebut, salah satu tantangan untuk mewujudkan kondusivitas wilayah, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Faktor-faktor eksternal yang harus diperhatikan dalam rangka penciptaan kondusvitas wilayah dan menekan angka kriminalitas adalah perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2.10 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2018 yaitu 74,24 menjadi 75,90 di tahun 2022. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se-eks Karisidenan Pekalongan dari tahun 2018 sampai 2022, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di setelah Kota Tegal.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan	74,24	74,77	74,98	75,40	75,90
Prov. Jawa Tengah	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79
Indonesia	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91
Kota Tegal	74,44	74,93	75,07	75,52	76,15
Kab. Pekalongan	68,97	69,71	69,63	70,11	70,81
Kab. Pemalang	65,67	66,32	66,32	66,56	67,19
Kab. Tegal	67,33	68,24	68,39	68,79	69,53
Kab. Batang	67,86	68,42	68,65	68,92	69,45

Gambar 2.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2022

Secara lengkap, Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 disajikan dalam Tabel 2.15 berikut.

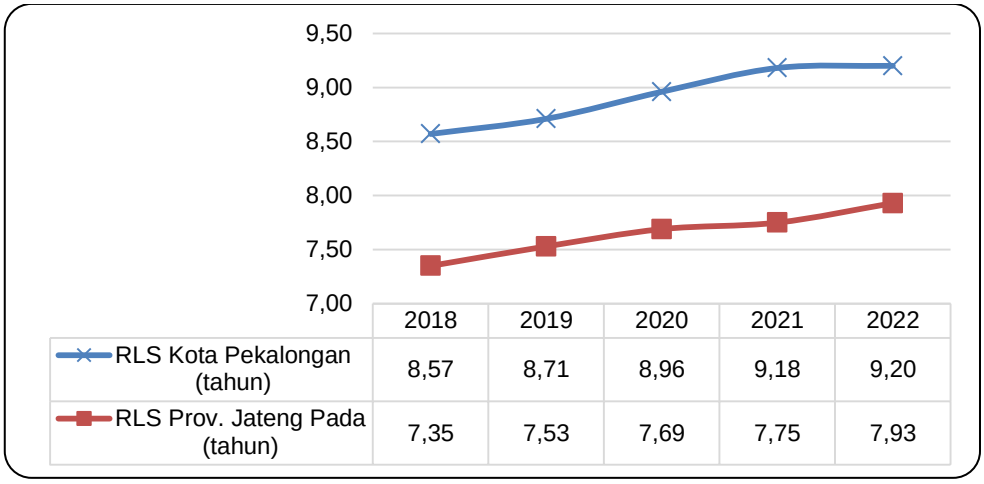
Tabel 2.15 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2018–2022

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2018	8,57	12,79	74,25	12.312,00	74,24
2019	8,71	12,83	74,28	12.680,00	74,77
2020	8,96	12,84	74,38	12.467,00	74,98
2021	9,18	12,85	74,44	12.598,00	75,40
2022	9,20	12,86	74.51	13.158.00	75,90

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

2.1.2.11 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tigkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan secara moderat. RLS tahun 2018 sebesar 8,57 tahun, terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, menjadi 9,20 tahun pada tahun 2022. RLS Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di atas RLS Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.27 berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
RLS Kota Pekalongan (tahun)	8,57	8,71	8,96	9,18	9,20
RLS Prov. Jateng Pada (tahun)	7,35	7,53	7,69	7,75	7,93

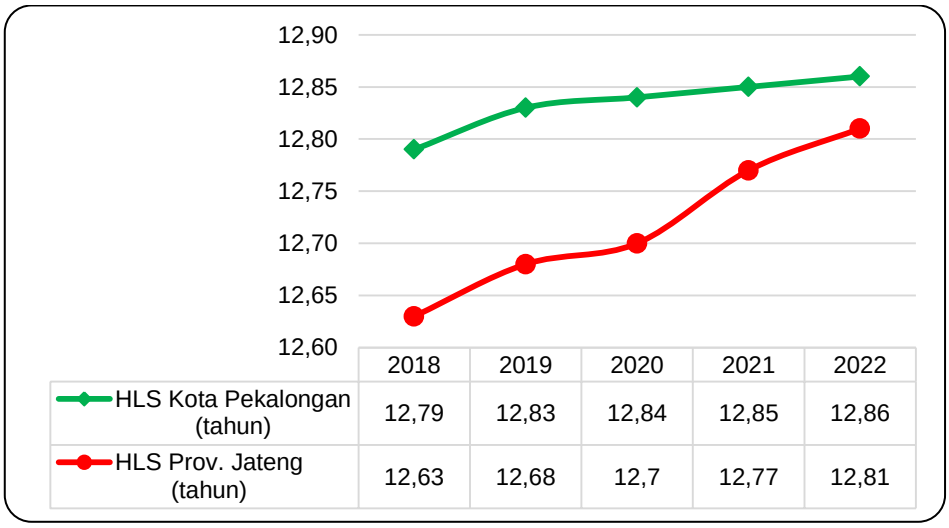
Gambar 2.27 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2022

2.1.2.12 Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Seiring dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, HLS Kota Pekalongan berada di atas HLS Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di atas RLS Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.28 berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
HLS Kota Pekalongan (tahun)	12,79	12,83	12,84	12,85	12,86
HLS Prov. Jateng (tahun)	12,63	12,68	12,7	12,77	12,81

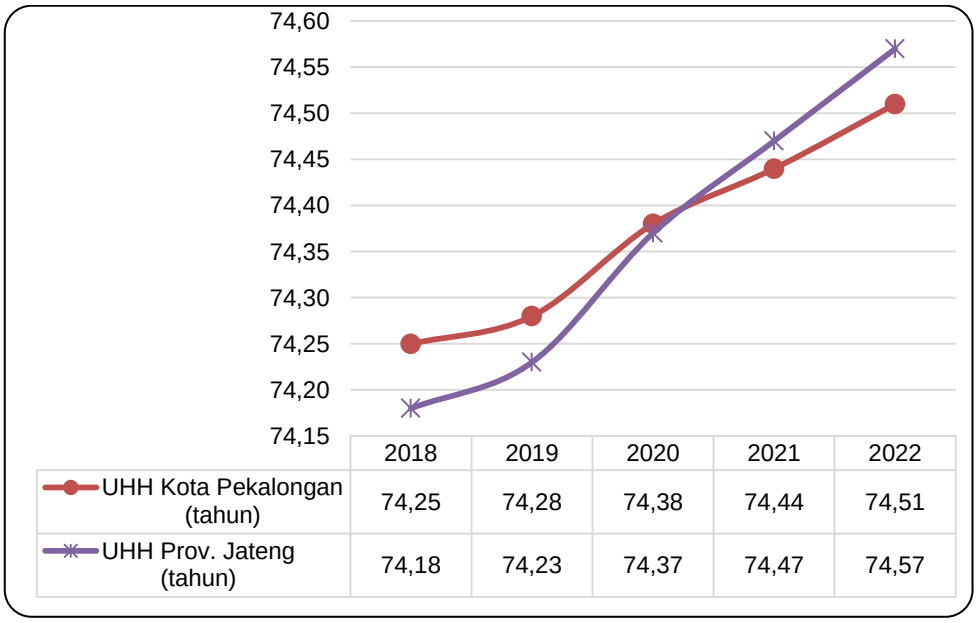
Gambar 2.28 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

Pada tahun 2022 angka HLS Kota Pekalongan sebesar 12,86 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

2.1.2.13 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2018 - 2022, UHH di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,25 pada tahun 2018 menjadi 74,51 di tahun 2022. Artinya, secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, UHH Kota Pekalongan tahun 2021 dan 2022 berada di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.29 berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
UHH Kota Pekalongan (tahun)	74,25	74,28	74,38	74,44	74,51
UHH Prov. Jateng (tahun)	74,18	74,23	74,37	74,47	74,57

Gambar 2.29 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

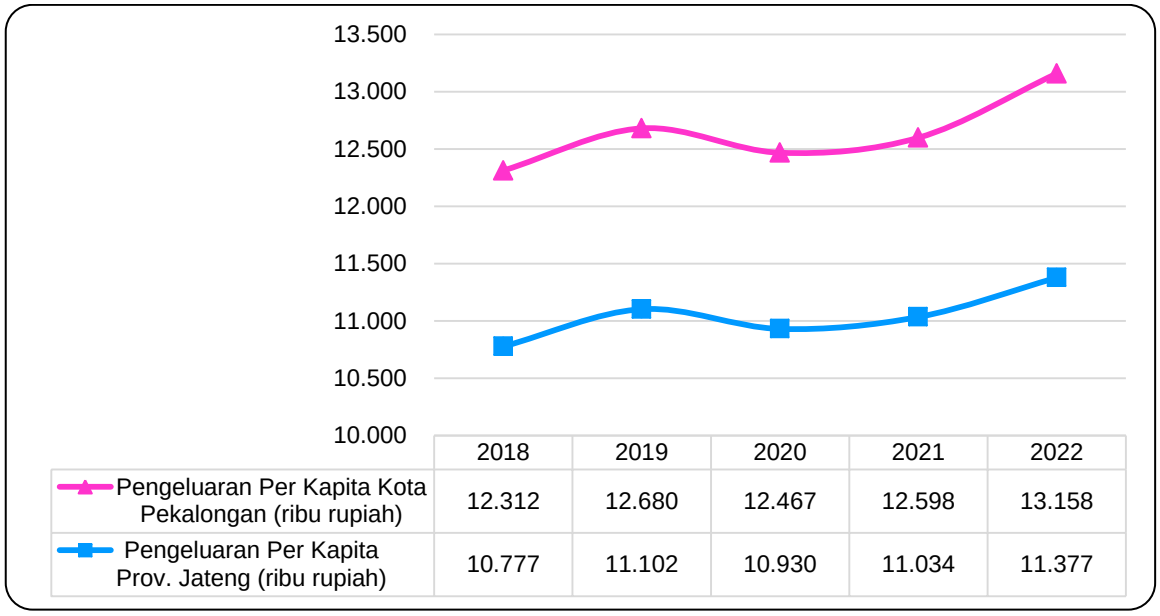
Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

2.1.2.14 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2018-2022. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita sebesar Rp.12.312.000, kemudian meningkat menjadi Rp.12.680.000 pada tahun 2019. Di tahun 2020 turun menjadi Rp. 12.467.000, dan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp.12.598.000. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita Kota Pekalongan meningkat menjadi sebesar Rp.13.158.000. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.30 berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan (ribu rupiah)	12.312	12.680	12.467	12.598	13.158
Pengeluaran Per Kapita Prov. Jateng (ribu rupiah)	10.777	11.102	10.930	11.034	11.377

Gambar 2.30 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2018-2022

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

2.1.2.15 Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Pekalongan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2018	110,86	108,18	74,54	91,96	74,41	84,15
2019	112,45	107,74	75,91	91,70	74,92	86,76
2020	110,98	106,32	79,36	93,21	78,66	86,83
2021	111,96	106,40	80,69	94,00	76,12	86,65
2022	102,91	106,19	102,90	94,05	N/A	86,83

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2023 dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

Pada tahun 2018, APK jenjang SD/MI/sederajat sebesar 110,86 persen, pada tahun 2019 naik menjadi 112,45 persen, kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 110,98 persen dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 yaitu 111,96 persen. Akan tetapi kembali mengalami penurunan menjadi 102,91 di tahun 2022. Tidak seperti APK di jenjang SD/MI yang mengalamai fluktuasi, APK di jenjang SMP/MTs terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2018 sebesar 74,54 persen, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 75,91 persen, meningkat kembali di tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu sebesar 79,36 persen dan 80,69 persen, kemudian menjadi 102,90 di tahun 2022. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK cenderung menurun dari awal periode (tahun 2018) hingga di tahun 2021 menurun menjadi 76,12 persen.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APK jenjang SD/MI berada di atas 100 persen selama periode tahun 2018-2022, namun cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2022, yaitu sebesar 106,19 persen. APK jenjang SMP/MTs berada di atas 91 persen, dan APK jenjang SMA/MA/SMK berada di kisaran 84-86 persen. Secara umum, APK jenjang SD/MI Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi Jawa tengah, namun APK jenjang SMP/MTs dan APK jenjang SMA/MA/SMK Kota Pekalongan lebih rendah dibanding APK Provinsi Jawa Tengah.

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di Kota Pekalongan bervariasi. Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih di dominasi laki-laki dengan nilai 103,70. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/setara lebih didominasi kaum perempuan dengan nilai 105,21. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2022

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar	SD/Setara (persen)	103,70	102,13
	SMP/Setara (persen)	100,60	105,21
	SMA/Setara (persen)	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

2.1.2.16 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017-2019, persentase pada jenjang pendidikan SD/sederajat berada di posisi tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Pada tahun 2017 dan 2018, persentase pendidikan yang ditamatkan jenjang

SMA/sederajat lebih tinggi daripada SMP/sederajat. Namun di tahun 2019 posisi tersebut berubah, dimana pada jenjang SMP/sederajat lebih tinggi daripada jenjang SMA/sederajat. Sementara untuk jenjang Diploma IV/S1/S2 persentasenya lebih tinggi dari jenjang Diploma I/II/III/Sarjana Muda dalam kurun waktu 2017-2019. Untuk kategori Tidak/Belum Tamat SD/sederajat berada di kisaran angka 15-19 persen, dan untuk kategori Tidak/Belum Pernah Sekolah berada di kisaran angka ± 1 persen.

Tabel 2.18 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II/III/Sarjana Muda	Diploma IV/S1/ S2
2017	1,87	15,86	28,04	21,42	26,73	1,35	4,74
2018	1,53	18,41	27,96	20,61	25,32	1,79	4,37
2019	0,87	15,78	27,51	25,82	22,66	1,81	5,55

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, 2022

Selanjutnya, mulai tahun 2020 BPS menghitung pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan usia 15 tahun keatas. Angka tertinggi berada pada jenjang SMA/sederajat, yaitu diatas 30 persen. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2022

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
2020	0,98	9,04	27,19	24,36	30,28	8,15
2021	0,69	7,6	22,55	25,62	31,68	11,86
2022	n/a	n/a	31,21	21,30	34,68	12,80

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023, 2023

2.1.2.17 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2018-2021 jenjang SD/MI berada di kisaran 98 persen sampai dengan 100 persen, akan tetapi turun menjadi 92,05 persen di tahun 2022. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan tahun 2021. Sedangkan APM pada jenjang SM/MA/SMK pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maka APM SD/MI/Sederajat Kota Pekalongan mayoritas lebih tinggi, hanya pada tahun 2022 saja yang nilainya lebih rendah. Tetapi APM SMP/MTs/Sederajat Kota Pekalongan lebih rendah. Sedangkan APM SMA/MA/SMK/Sederajat Kota Pekalongan jika dilihat dari tahun 2018-2021 hanya pada tahun 2018 saja Kota Pekalongan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA disajikan dalam Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2018	100,00	97,75	74,54	79,31	74,41	59,31
2019	99,52	97,77	71,85	79,84	54,81	59,35
2020	99,48	98,00	74,55	81,00	55,58	59,74
2021	99,11	98,22	75,97	80,99	55,04	60,46
2022	92,05	98,39	74,96	81,02	N/A	61,17

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2023 dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan pada tahun 2022, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP/setara, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2022

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Murni	SD/Setara	92,79	91,31
	SMP/Setara	73,66	76,27
	SMA/Setara	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

2.1.2.18 Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal yang merupakan masalah dan kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan *congenital*. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan status kesehatan ibu selama hamil dan melahirkan yang dipengaruhi beberapa faktor seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 11,99 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2020 sebesar 8,81 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka tren Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2018 sampai 2022 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun 2019 dengan angka 988,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka 991,19 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), *asfiksia*, kelainan *kongenital*, kelainan saluran pencernaan, *pnemonia*, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

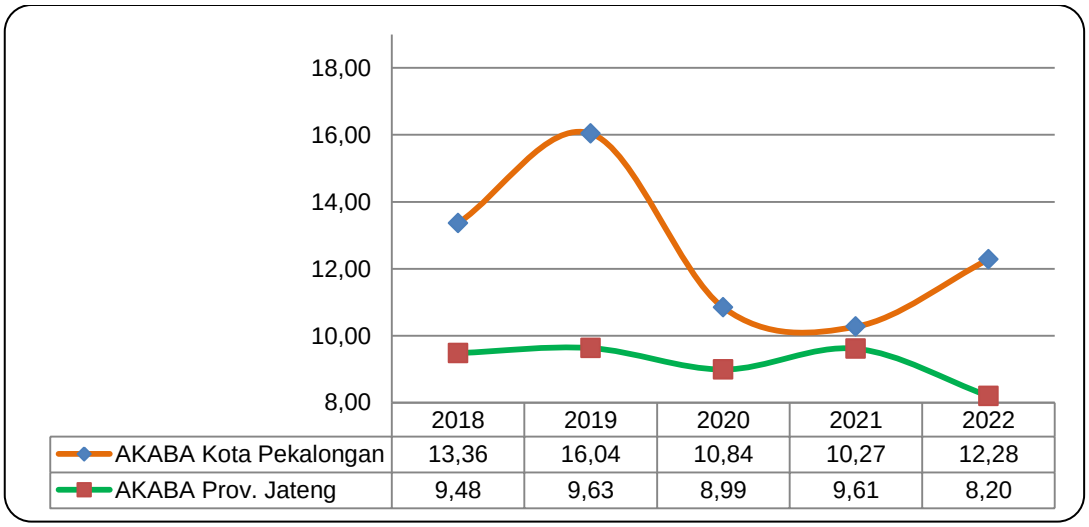
Tabel 2.22 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2018	10,99	989,01
2019	11,99	988,01
2020	8,81	991,19
2021	8,90	991,10
2022	9,96	990,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

2.1.2.19 Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.



Gambar 2.31 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2022 dan Buku Saku Kinerja Program Kesehatan 2022 Dinkes Jawa Tengah, 2023

Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 cenderung berfluktuasi. AKABA tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 16,04 per 1.000 KH kemudian menurun menjadi 10,84 per 1.000 KH pada Tahun 2020 , 10,27 per 1.000 KH di tahun 2021 dan meningkat signifikan menjadi 12,28 per 1.000 KH di tahun 2022. Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit. Sementara itu AKABA di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 – 2022 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun

2018, AKABA sebesar 9,48 per 1.000 KH, kemudian naik ditahun 2019 menjadi 9,63 per 1.000 KH, turun menjadi 8,99 per 1.000 KH pada tahun 2020, meningkat menjadi 9,61 per 1.000 KH di tahun 2021, dan kembali menurun 8,20 per 1.000 KH di tahun 2022.

2.1.2.20 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Tabel 2.23 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 kelahiran hidup
2018	7	5911	118,42
2019	6	5923	101,30
2020	9	5905	152,41
2021	11	5844	188,23
2022	7	5621	124,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2022, 2023

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2022 jika dibandingkan AKI tahun 2021 mengalami penurunan secara signifikan sebesar 63,70 persen. Kasus kematian ibu di Kota Pekalongan disebabkan beberapa faktor diantaranya keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan adanya komplikasi selama masa kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, emboli air ketuban, jantung, diabetes).

2.1.2.21 Angka Kesakitan

Angka kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Angka kesakitan di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, angka kesakitan berada di angka 13,07 persen. Angka tersebut meningkat di tahun 2019 dan mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 16,68 persen. Di tahun 2020 dan tahun 2021 menurun menjadi 12,89 persen dan 8,38 persen, kemudian meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 11,71 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Angka Kesakitan (persen)
2018	13,07
2019	16,68
2020	12,89
2021	8,38
2022	11,71

Sumber: jateng.bps.go.id dan pekalongankota.bps.go.id, 2023

2.1.2.22 Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan dibadingkan umur berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Menurut WHO stunting atau pertumbuhan yang terhambat mencerminkan proses kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier sebagai akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang kurang optimal. Berdasarkan populasi, tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko sering dan awal terpapar dengan kondisi buruk seperti penyakit atau praktik pemberian makan yang tidak tepat.

Gambaran prevalensi angka stunting Kota Pekalongan dari tahun 2018 – 2022 disajikan dalam Tabel 2.25 berikut.

Tabel 2.25 Prevalensi Balita Stunting Kota PekalonganTahun 2018-2022

Tahun	Prevalensi Stunting (%)
2018	6,99
2019	6,87
2020	9,42
2021	7,82
2022	6,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

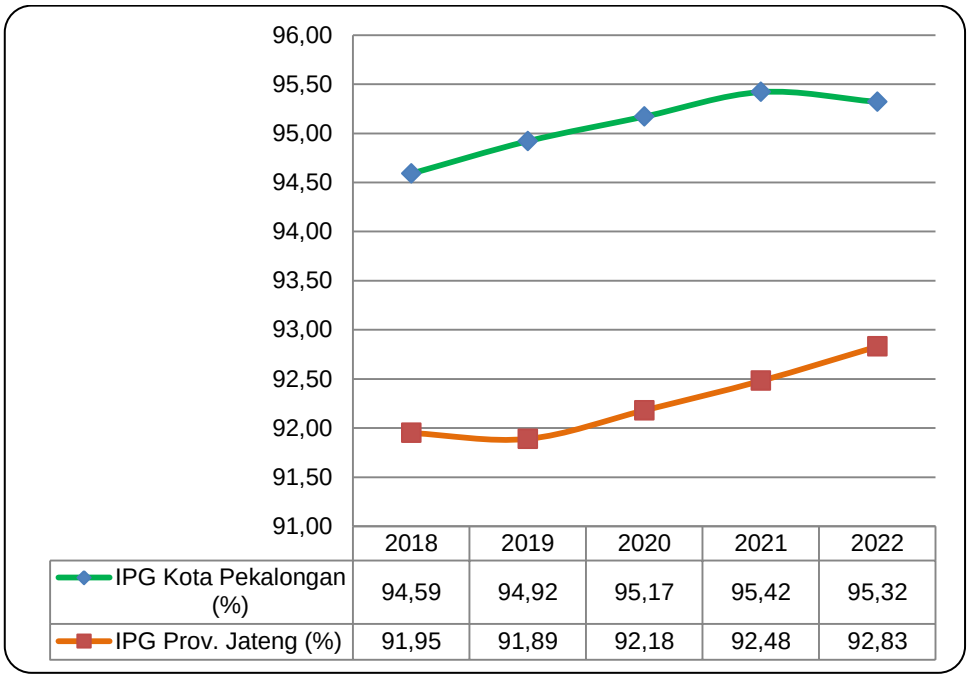
Dari Tabel 2.25 dapat dilihat bahwa prevalensi Balita Stunting di Kota Pekalongan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan dari 6,99 persen di tahun 2018 menjadi 6,87 persen di tahun 2019 namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 9,42 persen namun kembali menurun di tahun 2021 sebesar 7,82 persen dan menurun kembali di tahun 2022 sebesar 6,80 persen.

2.1.2.23 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2018-2021 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, IPG Kota

Pekalongan sebesar 95,32 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.



	2018	2019	2020	2021	2022
IPG Kota Pekalongan (%)	94,59	94,92	95,17	95,42	95,32
IPG Prov. Jateng (%)	91,95	91,89	92,18	92,48	92,83

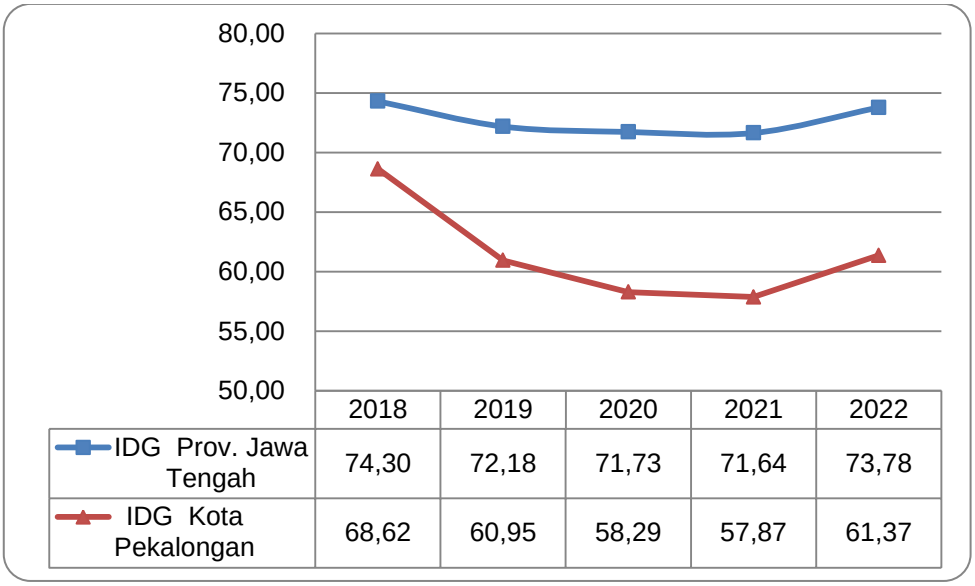
Gambar 2.32 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

2.1.2.24 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2021, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2018, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 68,82, kemudian terus menurun sampai tahun 2021 menjadi 57,87. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat hingga di angka 61,37.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2018-2022, nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.33. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.



	2018	2019	2020	2021	2022
IDG Prov. Jawa Tengah	74,30	72,18	71,73	71,64	73,78
IDG Kota Pekalongan	68,62	60,95	58,29	57,87	61,37

Gambar 2.33 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

2.1.2.25 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir, dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain: Simtuduror, Sheik Rebana, Kendang Pencak dan Nyadranan. Kegiatan tersebut masuk dalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari-hari besar di Kota Pekalongan.

Perkembangan jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.26 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit penurunan jika dibanding tahun 2018. Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai hampir dua kali lipatnya menjadi 232 kelompok, tetapi kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2022 menjadi 144 kelompok. Sementara itu gedung kesenian jumlahnya tetap yaitu 4, antara lain Warung Apresiasi, GOR Jetayu, Sanggar Laras Wisata, Sanggar Cahyo Kedaton.

Tabel 2.26 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kelompok Kesenian	164	162	162	232	144
Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok (persen)	2,44	2,47	2,47	1,72	2,78

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

Jumlah kelompok kesenian yang dapat difasilitasi dan disediakan sarana masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan jumlah kelompok seni budaya yang jumlahnya cenderung bertambah sedangkan ketersediaan sarana yang akan diberikan terbatas. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat berkumpul pada tahun 2022 masih belum optimal pelaksanaannya.

2.1.2.26 Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2017 jumlah organisasi pemuda yaitu 9 organisasi. Jumlahnya relatif tetap pada tahun 2018. Tahun 2019 meningkat cukup signifikan menjadi 26 organisasi pemuda. Namun pada tahun 2022 - 2021 jumlahnya menurun menjadi 24 organisasi dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 16 organisasi pemuda. Sementara itu jumlah kegiatan kepemudaan yang semula 8 kegiatan pada tahun 2017 sampai tahun 2020, mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 menjadi 10 kegiatan dan 16 kegiatan di tahun 2022.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2017-2022 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Pemuda	9	26	24	24	16
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	8	8	10	16

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

Selain organisasi kepemudaan, Dinparbudpora juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap klub-klub olahraga yang ada di Kota Pekalongan. Dari tahun 2017 jumlah klub olahraga bertambah menjadi 20 klub pada tahun 2018 dan jumlah ini tidak berubah sampai tahun 2020. Di tahun 2021 bertambah 15 klub sehingga menjadi 35 klub. Sementara itu gedung olahraga yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 2 gedung.

Tabel 2.28 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Klub Olahraga	20	20	20	35	50
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2018 berjumlah 30 organisasi. Terdapat penambahan 1 (satu) organisasi olahraga di tahun 2019 sehingga menjadi 31 organisasi olahraga, jumlah ini tidak bertambah sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 bertambah 3 organisasi sehingga menjadi 34 organisasi olahraga. Begitu pula dengan gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlahnya tetap dari tahun 2018 sampai tahun 2022 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadion Hoegeng dan Warung Apresiasi. Untuk lapangan olahraga bisa dikatakan cukup banyak, yaitu berjumlah 55 lapangan pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan lapangan olahraga milik sekolah turut diperhitungkan. Kegiatan olahraga sebanyak 10 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olahraga Wilayah Dulongmas, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2018 dan 2019 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, pusat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.

Tabel 2.29 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Olahraga	30	31	31	34	34
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
Lapangan olahraga	55	55	55	55	55
Jumlah kegiatan olahraga	7	8	8	10	15

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) PAUD

PAUD sebagai salah satu tempat untuk membina anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan yang ditargetkan dalam pembangunan Kota Pekalongan. Setiap anak usia dini mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan guna membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56B Tahun 2020 telah mewajibkan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk mendapatkan pelayanan PAUD minimal selama 1 tahun sebelum masuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa PAUD/TK/RA di Kota Pekalongan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah siswa meningkat 1019 siswa jika dibandingkan tjumlah siswa di tahun 2018. sebanyak Jumlahnya meningkat pada tahun 2017 dan 2019, namun di tahun 2021 sedikit menurun, semula 7.485 siswa menjadi 7.077 siswa. Namun meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 7.721 siswa. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah siswa TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2018	8.000	16.180	49,44
2019	9.019	16.625	54,25
2020	7.485	15.710	47,64
2021	7.077	15.440	45,84
2022	7.721	15.346	50,31

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

2) Pendidikan Dasar

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2018-2022 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung bervariasi, dari 106,97 di tahun 2018 menjadi 101,74 di tahun 2022. Sementara itu capaian APS jenjang SMP/MTs cenderung menurun dari 104,67 di tahun 2018 menjadi 103,29 di tahun 2022. Dalam perjalanannya, di tahun 2019 capaian APS jenjang SD/MI dan SMP/MTS tidak mencapai target seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 100 persen. Penurunan APS juga terjadi di tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini karena adanya kebijakan zonasi yang mulai diterapkan di tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada ketentuan yang berlaku juga menjadi faktor penurunan target ini.

Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
APS SD/MI	106,97	98,67	103,79	101,86	101,74
APS SMP/MTs	104,67	97,69	103,67	102,56	103,29

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

3) Usia 5-15 tahun

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator APS untuk mencapai sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan di Kota Pekalongan pada tingkat TK, SD, SMP, Paket A, Paket B, RA, MI, MTs.

Secara series, Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun		Jml. Siswa Usia Sekolah TK s.d SMP	Jml. Penduduk Usia 5 – 15 Tahun	APS (persen)	
2018	L	28.202	29.456	95,74	98,65
	P	28.051	27.569	101,75	
2019	L	29.622	29.585	100,13	100,77
	P	28.028	27.625	101,46	
2020	L	28.348	29.524	96,02	96,75
	P	27.019	27.703	97,53	
2021	L	29.319	29.610	99,02	101,38
	P	28.911	27.830	103,88	
2022	L	29.567	29.598	99,90	101,96
	P	28.889	27.737	104,15	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2018-2022, ketersedian jumlah SD/MI cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 sebanyak 149 sekolah dan di tahun 2022 sebanyak 147 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung stagnan yaitu 38 sekolah. Untuk jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, secara umum cenderung fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah SD/MI	149	149	146	147	147
Jumlah SMP/MTs	38	38	38	38	40
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	30.524	32.855	31.581	31.724	31.694
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	15.330	15.385	15.067	15.109	15.425

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan data diatas maka rasio ketersediaan sekolah untuk usia sekolah pendidikan dasar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2018	40,78
2019	38,76
2020	39,44
2021	39,50
2022	39,69

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2018-2022, rasio ketersedian guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 rasio sebesar 564,52, kemudian mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 menjadi 598,15 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.887	1.840	1.841	1.787	1.818
	Jumlah Murid	32.210	32.092	31.752	31.007	31.069
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	993	933	932	936	936
	Jumlah Murid	15.905	15.759	15.539	14.973	14.973
Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)		2.726	2.880	2.773	2.773	2.754
Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)		48.289	48.115	47.851	47.291	46.042
Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk		564,52	598,57	579,51	586,37	598,15

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.36, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2018-2022, dan berakhir naik di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2018	2.880	1.689	1,71	48.115	0,354
2019	2.773	1.778	1,56	47.843	0,326
2020	2.801	1.770	1,58	47.882	0,330
2021	2.723	1.773	1,54	46.320	0,332
2022	2.754	1.775	1,55	46.042	0,337

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

*) data pertengahan tahun ajaran

Sementara itu rasio guru dan murid jenjang SD/MI di Kota Pekalongan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 juga mengalami fluktuasi. Mulai dari 0,48 di tahun 2018, mengalami naik turun sampai tahun 2022 dengan kondisi terakhir di angka 0,46 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Karakteristik	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Guru SD/MI*)	1.887	1.840	1.856	1.787	1.818
Rombongan Kelas*)	1.215	1.173	1.265	1.274	1.277
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)	1,55	1,57	1,47	1,40	1,42
Murid SD/MI*)	32.210	32.855	31.995	31.007	31.069
Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	0,48	0,48	0,46	0,45	0,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

*) data pertengahan tahun ajaran

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2018-2022. Selama lima tahun terakhir, rasio tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 berada di angka 1,14, kemudian naik di tahun 2019. Namun kembali turun di tahun 2020 di angka 1,18 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 1,22. Terakhir naik di tahun 2022 menjadi 1,26. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Karakteristik	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Guru SMP/MTs*)	933	933	945	936	936
Rombongan Kelas*)	516	481	505	499	498
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)	1,81	1,94	1,87	1,88	1,88
Murid SMP/MTs*)	15.905	15.385	15.887	15.313	14.973
Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,14	1,26	1,18	1,22	1,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

*) data pertengahan tahun ajaran

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu 2018-2022, kondisi bangunan SD/setara dan SMP/setara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018-2019 kondisi bangunan SD/setara meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan meningkat lagi berturut-turut di 2021 dan 2022 di angka 72,50 persen dan 95,91 persen. Hal serupa juga terjadi pada kondisi bangunan SMP/setara, dimana pada tahun 2018 sebesar 88,86 persen dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 94,13 persen, namun menurun pada tahun 2019 yaitu sebesar 68,95 persen dan meningkat di tahun 2021 mejadi 79,36 persen, kemudian terakhir naik menjadi 94,71 di tahun 2022. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2018 – 2022

Jenjang	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI (persen)	95,01	92,72	73,30	72,50	95,91
SMP/MTs (persen)	88,86	94,13	68,95	79,36	94,71

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 0,07 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 0,10 persen, kemudian meningkat lagi di tahun 2020 sebesar 0,29 persen dan terakhir turun secara berturut-turut di tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,10 dan 0,09. Sama halnya dengan jenjang SD/MI, jenjang

SMP/MTs juga fluktuatif. Tetapi angka putus sekolah jenjang SMP/MTs lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenjang SD/MI. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2018 – 2022

Jenjang	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI (persen)	0,07	0,10	0,29	0,10	0,09
SMP/MTs (persen)	0,15	0,46	0,97	0,26	0,10

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

g. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2018-2022 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100 persen. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/sederajat selama kurun waktu 2018-2022 juga dapat mencapai 100 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI danSMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Jenjang	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

Dari nilai ujian akhir nasional, jenjang SD/MI cenderung fluktuatif. Begitu pula dengan jenjang SMP/MTs. Pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 dikarenakan adanya pandemi *COVID-19* tidak diselenggarakan Ujian Akhir Nasional. Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs disajikan dalam Tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD MI	7,26	69,69	0,00	0,00	0,00
2	SMP MTs	5,74	59,02	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara dalam kurun waktu tahun 2018-2020 telah di atas 100 persen, meskipun dalam perjalanannya cenderung fluktuatif dan pada tahun 2021 dan 2022 turun menjadi 97,82 dan

98,79. Sementara itu untuk angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SMP/setara ke SMA/setara sepanjang tahun 2018-2022 cenderung menurun dan sempat berada di bawah 100 persen di tahun 2018 dan 2021. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022

Jenjang	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	102,44	104,78	102,79	97,82	98,79
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,00	101,25	102,44	96,45	101,20

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Meskipun pada kenyataannya selalu mengalami fluktuasi seperti yang disajikan dalam Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Jenjang	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV	92,42	92,80	93,53	93,73	94,17
Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV	93,96	94,96	95,66	94,87	95,30

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

j. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Pada jenjang TK/RA persentase sekolah terakreditasi A cenderung meningkat. Tahun 2018 hanya 7,34 menjadi 22,12 pada tahun 2022 walaupun pada tahun 2019-2020 persentasenya tetap, yaitu 16,36. Sedangkan jenjang SD/MI dan SMP/MTs persentase sekolah terkreditasi A cenderung fluktuatif. Secara menyeluruh persentase sekolah terakreditasi A pada jenjang TK-SMP dari tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Tabel 2.45 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.

Tabel 2.45 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jenjang TK/RA					
- Sekolah Terakreditasi A	8	18	18	38	25
- Jumlah Sekolah	109	110	110	111	113
- Persen	7,34	16,36	16,36	34,23	22,12

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jenjang SD/MI					
- Sekolah Terakreditasi A	95	102	99	99	99
- Jumlah Sekolah	149	149	146	147	147
- Persen	63,76	68,46	67,81	67,35	67,35
Jenjang SMP/MTs					
- Sekolah Terakreditasi A	23	26	26	24	24
- Jumlah Sekolah	38	38	38	38	40
- Persen	60,53	68,42	68,42	63,16	60
Jenjang TK-SMP					
- Sekolah Terakreditasi A	126	146	143	161	148
- Jumlah Sekolah	296	297	294	296	300
- Persen	42,56	49,16	48,64	54,39	49,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

k. Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP). Sedangkan pendidikan karakter diukur berdasarkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13).

Tabel 2.46 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan		Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter		Rata-rata
	Jumlah	Persen	Jumla2h	Persen	
2018	296	100	142	47,97	73,98
2019	297	100	200	67,34	83,67
2020	294	100	294	100	100
2021	296	100	296	100	100
2022	300	100	300	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel 2.47 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2018	409	23.269	17,58
2019	411	23.173	17,74
2020	414	23.008	17,99
2021	413	21.584	19,13
2022	414	21.354	19,39
Rata-rata			18,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

Jumlah Posyandu dari tahun 2018 – 2022 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan Rasio Posyandu per 1000 balita tidak terlalu banyak mengalami perubahan, dengan asumsi pertambahan Posyandu jumlahnya hampir sama dengan jumlah per 1000 Balita. Rata-rata Rasio pos pelayanan terpadu per 1000 Balita selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 – 2022 adalah 18,37 yang berarti setiap seribu balita yang ada dilayani oleh 18 posyandu atau setiap posyandu melayani sebanyak 55 balita yang ada di wilayah tersebut.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 berdasarkan data pada Tabel 2.48, secara aggregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu tidak mengalami perubahan jumlah. Sedangkan untuk Rumah Sakit, dengan berkurang 1 (satu) Rumah Sakit Bhakti Waluyo yang dialih fungsikan menjadi klinik, maka ada perubahan rasio. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel 2.48 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun		Puskesmas		Pustu		Poliklinik		Rumah Sakit	
	Jumlah Penduduk	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
2018	304.477	14	0,046	27	0,089	13	0,043	9	0,030
2019	307.097	14	0,046	27	0,088	12	0,039	9	0,029
2020	307.150	14	0,046	26	0.085	11	0.036	9	0.029
2021	316.216	14	0,044	27	0,085	12	0,038	9	0,028
2022	309.742	14	0,044	22	0,071	25	0,081	8	0,026

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

b. Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Akreditasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap manajemen RS karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Data rumah sakit di Kota Pekalongan yang telah terakreditasi secara rinci disajikan dalam Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2018 - 2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	8	9	9	9	8
Jumlah seluruh rumah sakit	9	9	9	9	8
Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	88,89	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2018 – 2022, rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Menurut Standar Target Rasio Kebutuhan SDMK Tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2025 dalam Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013, rasio dokter spesialis sudah mencapai target sebesar 57 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target rasio Kebutuhan SDMK yaitu 62 dokter per 100.000 penduduk. Untuk Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah untuk tahun 2022 sudah mencapai target rasio Kebutuhan SDMK yaitu 10 dokter gigi per 100.000 penduduk. Secara umum rasio dokter per satuan penduduk sedikit menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022. Data perkembangan rasio dokter disajikan dalam Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter Spesialis	0,53	0,39	0,42	0,41	0,57
Dokter Umum	0,91	0,60	0,66	0,76	0,62
Dokter Gigi	0,16	0,11	0,12	0,13	0,10
Rasio Dokter per satuan penduduk	1,60	1,1	1,2	1,3	1,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga para medis.

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis

(perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2018 – 2022 semakin membaik. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Perawat	2,58	2,63	2,71	2,71	2,56
Rasio Bidan	1,20	1,08	1,09	1,15	0,99
Rasio Farmasi	1,18	0,84	0,90	1,01	0,59
Perawat	804	827	832	857	810
Bidan	375	339	335	365	313
Tenaga Farmasi	348	265	276	320	188

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

d. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tenaga kesehatan harus mempunyai ijin, kecuali tenaga kesehatan masyarakat. Tujuan dari perijinan ini selain melindungi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga melindungi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Mulai Tahun 2019 DPMPTSP Kota Pekalongan telah mengeluarkan izin bagi tenaga kesehatan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.52 berikut.

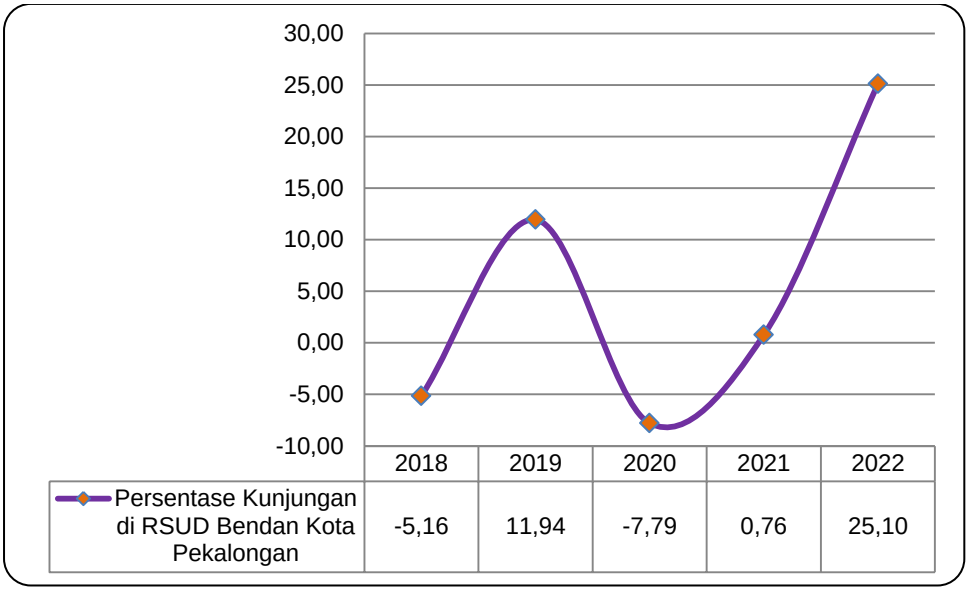
Tabel 2.52 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 – 2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (yang dikeluarkan DPMPTSP)	544	698	863	2504
Jumlah tenaga kesehatan yang berkewajiban memiliki Surat Ijin Praktek	2.348	2.498	2.472	2844
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	23,17	27,94	34,91	88,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

e. Jumlah Kunjungan di RSUD Bendan

Pandemi *COVID-19* telah memengaruhi operasional rumah sakit. Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *COVID-19*. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Rasio Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2020 yaitu sebesar -7,79 persen. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,76 persen dan 25,10 persen di tahun 2022. Secara rinci disajikan dalam Gambar 2.34 berikut.



Gambar 2.34 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2018 - 2022

Sumber: RSUD Bendan, 2023

Jumlah Kunjungan pasien pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan secara signifikan disebabkan adanya pengembangan pelayanan di RSUD Bendan. Namun sejak terjadinya Pandemi *COVID-19* secara global termasuk Kota Pekalongan mulai bulan Maret 2020 mengakibatkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *COVID-19* secara signifikan.

f. Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Secara rinci sarana farmasi di Kota Pekalongan yang telah memenuhi standar disajikan dalam Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2018 – 2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Sarana Farmasi yang memenuhi standar	161	102	61	64	75
Sarana Farmasi yang dilakukan pengawasan	208	115	68	71	75
Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar	77,40	88,70	89,71	90,14	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

g. Persentase Balita Usia <6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Pemberian makanan bayi yang terbaik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif (usia 0-6 bulan), dengan ASI Eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 24 bulan. Sedangkan makanan pendamping ASI dapat diberikan sejak usia bayi 6 bulan. ASI, yang sangat bermanfaat bagi bayi, merupakan

makanan yang sempurna dan terbaik karena mengandung unsur-unsur yang bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, pada tahun 2022 presentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif adalah 58,05 persen meningkat 3,19% dibandingkan tahun 2021. Untuk terus meningkatkan persentase ini maka dilakukan sosialisasi dan kampanye pemberian ASI eksklusif di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu. Presentase Balita (usia 0 – 6 bulan) yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 5 tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.54 berikut.

Tabel 2.54 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif	Cakupan (persen)
2018	5.176	2.668	51,55
2019	5.136	2.938	57,20
2020	4.524	2.416	53,40
2021	4.448	2.440	54,86
2022	4513	2.620	58.05

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

h. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase balita gizi buruk di Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan, mulai 0,08% pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,28% di akhir tahun 2022. Secara umum jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun juga mengalami peningkatan walaupun sempat menurun angkanya di tahun 2019 sebesar 0,28%. Meski ada penurunan jumlah balita gizi buruk pada tahun 2019 sebanyak 12 kasus, tetapi jumlah balita gizi buruk sampai dengan tahun 2022 terus mengalami kenaikan menjadi 59 kasus. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk
2018	19	22.666	0,08
2019	12	23.050	0,05
2020	35	22.506	0,16
2021	38	21.584	0,18
2022	59	21.354	0,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

i. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Berikut kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2018 - 2022) disajikan dalam Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (persen)	CFR TB per 100.000 penduduk	CNR TB per 100.000 penduduk	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2018	11,24	8,57	4,17	260,67	68	29
2019	18,19	1,75	4,78	249,71	57	40
2020	26,89	7,06	1,27	171,14	118	1
2021	12,33	2,56	3,14	170,45	112	27
2022	40	1,58	1,82	259,89	65	55

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

j. Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Upaya Dinas Kesehatan dalam pengawasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan sampling terhadap produk olahan pangan industry rumah tangga. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2018 – 2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sample produk pangan olahan industry rumah tangga yang bebas dari cemaran (mikro biologi, fisika, kimia)	161	2.008	648	396	40
Jumlah sample produk pangan olahan produk rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan	208	2.104	654	447	40
Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	77,40	95,44	99,08	88,59	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

k. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) terdiri dari rumah makan / restoran, jasa boga / catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka upaya preventif dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan pembinaan dan pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan untuk menjaga keamanan makanan yang beredar di masyarakat. Data rinci Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat disajikan dalam Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2018 - 2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	770	606	609	639	662
Seluruh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	849	658	664	662	662
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	90,69	92,10	91,72	96,53	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

l. Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Jamkesmas / Jamkesda

Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Namun kembali melonjak pada tahun 2020 sebanyak 22.160 orang dan 2021 sebanyak 23.490 orang dan kembali menurun pada tahun 2022 sebanyak 21.810 orang.

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2022 adalah PBI APBN sebanyak 119.751 jiwa, meningkat 11,10 persen jika dibandingkan dengan jumlah PBI APBN tahun 2021. Begitu juga dengan jumlah penerima Jamkesda tahun 2022 sebanyak 47.813 jiwa, menurun 4,79 persen dibandingkan jumlah penerima Jamkesda tahun 2021. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2018 - 2022) disajikan dalam Tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59 Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Jamkesmas	Persentase Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	Persentase Penerima Jamkesda
2018	304.477	20.520	77.415	25,43	65.946	21,66
2019	307.097	20.268	79.933	26,03	70.931	23,10
2020	307.150	22.160	88.685	28,87	70.307	22,89
2021	308.310	23.490	84.966	27,56	62.375	20,23
2022	309.742	21.810	119.751	38,66	47.813	15,44

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

m. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Program Indonesia Sehat dilakukan melalui pendekatan keluarga, yang ditujukan untuk pencapaian keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat. Ada 12 Indikator Keluarga Sehat Menurut Kemenkes RI, yaitu:

1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan Program Percepatan Indikator Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Dari hasil pendataan tahun 2018 sampai tahun 2021menunjukkan bahwa angka IKS Kota Pekalongan masih sangat rendah. Angka IKS 2018 baru mencapai 0,14 persen mengalami sedikit peningkatan hingga tahun 2021 dengan angka IKS sebesar 0,18 persen. Rata-rata peningkatan angka IKS per tahun hanya sebesar 0,013 persen. Sedangkan angka ideal IKS sebesar 0,8 persen dari jumlah data. Secara rinci capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam Tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60 Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan
Tahun 2018-2022

Tahun	Indeks Keluarga Sehat
2018	0,14
2019	0,16
2020	0,17
2021	0,18
2022	0,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

n. Rumah Tangga Sehat

Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, terdiri dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI Eksklusif, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari serta tidak merokok di dalam rumah. Penerapan 10 indikator PHBS di tingkat rumah tangga sangat tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sebab upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan.

Cakupan rumah tangga sehat di Kota Pekalongan tahun 2022 meningkat cukup signifikan. Dari target 75,40 persen di tahun 2018, terealisasi 96,34 persen, namun pada tahun 2019 menurun 94,60 persen dan meningkat kembali ditahun 2020 dengan realisasi 96,78 persen, namun kembali turun di tahun 2021 menjadi 95,75. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.61 berikut.

Tabel 2.61 Cakupan Rumah Tangga Sehat
di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Cakupan Rumah Tangga Sehat (persen)
2018	96,34
2019	94,60
2020	96,78
2021	95,75
2022	98,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.

a. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2018-2022, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sepanjang 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen. Di tahun 2021, penjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 96,42 persen,

kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 3,58 persen dan pada tahun 2022 penjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 100,00 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 0,00 persen.

Tabel 2.62 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2018–2022

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2018	9,420	7,250	2,170	0	76,96	23,03	0
2019	9,420	3,433	4,359	1,642	36,49	46,32	17,45
2020	9,420	6,350	1,900	1,170	67,40	20,16	12,42
2021	10,240	9,874	0	0,366	96,42	0	3,58
2022	10,240	10,240	0	0	100,00	0	0

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DIY, 2023

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2018 sampai 2021 tidak terdapat perubahan maupun penambahan ruas panjang jalan kota yaitu 153,41 km. Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan Nomor 620/0031 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 620/101 Tahun 2017 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dan Jembatan Di Kota Pekalongan, Panjang jalan kota di Kota Pekalongan yaitu 153,61 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2022 sepanjang 105,35 km. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2018	153,41	96,04	21,97	35,41	62,60	14,32	23,08
2019	153,41	110,23	12,15	29,35	71,85	7,92	20,22
2020	153,41	104,71	18,27	30,43	68,25	11,90	19,83
2021	153,41	96,37	27,25	29,79	62,82	17,77	19,42
2022	153,61	105,35	24,11	24,15	68,58	15,70	15,72

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2023

b. Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2018-2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 26,58 persen. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.64 berikut.

Tabel 2.64 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Jaringan Irigasi (persen)	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2023

Senada dengan rasio jaringan irigasi, luas irigasi yang tercatat dalam kondisi baik juga tidak mengalami perubahan dalam dua tahun (tahun 2017 sampai dengan tahun 2018). Pada tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik tercatat 76,43 persen, tahun 2019 menurun menjadi 70,43 persen dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 66,14 persen. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 79,62 persen sebagimana disajikan dalam Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Luas irigasi kota dalam kondisi baik (persen)	76,43	70,43	66,14	79.,62	79.,62

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2023

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selama periode 2018-2022, pemanfaatan sempadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 25 persen. Perkembangan kondisi sempadan sungai yang dipakai bangunan liar disajikan dalam Tabel 2.66 berikut.

Tabel 2.66 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (persen)	25	25	25	25	25

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2023

c. Drainase

Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase terdiri dari 8 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub sistem Bandengan, Sub sistem Pabean, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut: Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur. Secara keseluruhan, terdapat 53 saluran drainase yang terletak di jalan utama

Kota dengan konstruksi batu belah dan saluran tanah, jenis saluran terbuka, tertutup dan gorong-gorong, dengan kondisi baik sepanjang 57.688,42 meter, kondisi sedang sepanjang 17.898,56 meter dan kondisi rusak sepanjang 24.890,70 meter.

Tabel 2.67 Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota PekalonganTahun 2022

Kondisi	Panjang (meter)	Persentase
Baik	57.688,42	57,41 %
Sedang	17.898,56	17,81 %
Rusak	24.890,70	24,77 %
Total	100.477,68	100 %

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2023

d. Pengendalian Banjir

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-8 persen. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan saluran drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.68 berikut.

Tabel 2.68 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Wilayah Kota Pekalongan (Ha)	Luas Genangan (Ha)	Persentase
2018	4.525	1.391	30,75
2019	4.525	1.057	23,35
2020	4.525	1.892,88	41,83
2021	4.642	1.730	37.27
2022	4.642	980.13	21.11

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2023

Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut:

- Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
- Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5 persen
- Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa
- Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga
- Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul revetment yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain berupa penguatan revetment pantai yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2015. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan peninggian serta perkuatan.

Selain oleh Pemerintah Kota Pekalongan, peninggian dan perkuatan revetment juga dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, saat ini sedang mengerjakan pembangunan tanggul pantai di sisi timur Kali Loji sampai dengan muara Kali Gabus. Upaya yang masih belum sempurna sebagai akibat adanya industri docking dan galangan tersebut, nantinya diharapkan akan mengatasi banjir dan rob di wilayah Panjang Wetan, Krapyak, dan Degayu. Selain itu, BBWS Pemali Juana juga sedang meninggikan tanggul di utara Bandengan. Tanggul yang selesai pada tahun 2019 tersebut saat ini sudah mulai limpas pada saat terjadi pasang naik tinggi. Dengan adanya peninggian tersebut, diharapkan akan mengurangi dampak rob di area Pabean, Bandengan, dan Kandang Panjang.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas PUSDATARU juga melakukan peninggian dan perkuatan revetment pantai di sisi barat Muara Sungai Loji sampai dengan Krematorium serta perkuatan parapet di Jl. Kunti Utara. Upaya ini, khususnya perkuatan parapet di Jl. Kunti Utara masih menyisakan kekosongan sekitara 100 meter antara pintu gerbang PIM (Pusat Informasi Mangrove) sampai dengan krematorium. Area ini rawan menjadi limpasan air laut pada saat terjadi pasang naik yang tinggi.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan tersebut, maka pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan mempunyai pekerjaan bersama yang harus dilakukan di waktu-waktu yang akan datang, yaitu:

1. Menghitung kembali kebutuhan pompa dan kolam-kolam retensi ataupun area *storage* (cadangan penempatan air) yang lebih memadahi.
2. Memelihara tanggul secara bersama-sama, antara lain:
    a. Masyarakat harus menghindari dan mencegah aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak tanggul;
    b. Masyarakat ikut aktiv melaporkan kepada Pemerintah jika terjadi hal-hal yang berpotensi terhadap terjadinya kerusakan badan tanggul;
    c. Pemerintah Kota Pekalongan harus mempunyai alokasi sumber daya yang cukup untuk operasional dan pemeliharaan tanggul;
3. Membangun stasiun pompa secara lebih memadahi karena ketinggian sebagian wilayah sudah berada di bawah level permukaan air laut.
4. Membangun, memperbaiki dan memelihara sistem drainase agar berfungsi optimal dengan menghubungkan ke drainase-drainase primer ataupun *long storage* yang ada.
5. Masyarakat ikut menjaga dan memelihara kebersihan drainase dari sampah yang akan mengganggu aliran air ataupun potensi mengganggu operasionalisasi pompa.
6. Melanjutkan bangunan pengaman pantai di sebelah barat krematorium untuk melindungi kawasan konservasi mangrove.

e. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Sehingga dalam pentaan ruang terkandung proses perencanaa, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara , termasuk ruang dibawah bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan pemelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah melakukan revisi melalui Perda Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi:

a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;
b) Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
d) Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
e) Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
f) Pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
g) Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
h) Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, rencana pola ruang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, yang terdiri dari Kawasan lindung setempat; Kawasan cagar budaya; ruang terbuka hijau RTH kota dan kawasan ekosistem mangrove, serta

kawasan budidaya, yang terdiri dari Kawasan pertanian; Kawasan permukiman; Kawasan peruntukan industri; Kawasan pariwisata dan Kawasan pertahanan keamanan. Pengawasan perlu dilakukan sejak ijin pemanfaatan ruang sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang telah direncanakan dalam RTRW serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mendukung operasional RTRW Kota dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, Kota Pekalongan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada tahun 2014 Kota Pekalongan telah Menyusun RDTR untuk 4 (empat) kecamatan dan sudah mendapat persetujuan dari DPRD namun saat mengajukan persetujuan substansi ke Provinsi bersamaan dengan mulai direvisinya RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029. Sehingga proses penyusunan RDTR dihentikan, menunggu hasil revisi RTRW. Pada tahun 2020 telah tersusun revisi RTRW Kota Pekalongan yang disahkan dalam Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Setelah adanya revisi RTRW, maka Dokumen RDTR disusun mulai tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, yaitu RDTR untuk 4 kecamatan di Kota Pekalongan. Pada tahun 2022 dilanjutkan penyusunan dokumen dan diharapkan selesai dah disahkan menjadi Peraturan Walikota pada tahun 2023.

Capaian indikator kinerja Urusan Penataan Ruang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2018-2022) disajikan dalam Tabel 2.69.

Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen)	0,16	0,17	0,17	1,97	n/a
2.	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	-	-	-	-	16,95
3.	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	98	98	98	99	99

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2023

Capaian indikator kinerja urusan Penataan Ruang terdiri dari 3 (tiga) indikator, sebagai berikut: Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan nilai fluktuatif sepanjang tahun 2018-2021 dari 0,16 pada tahun 2018 menjadi 1,97 pada tahun 2021. Capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan yang menandakan makin besarnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan bangunan Gedung dan pengurusan perijinan, terutama dalah izin mendirikan bangunan/IMB serta peningkatan dalam pengawasan bangunan Gedung oleh perangkat daerah terkait. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka telah dilakukan update pendataan bangunan yang wajib ber PBG dengan hasil capaian, bangunan yang ber-PBG sampai tahun 2022 sejumlah 15.095 sedangkan untuk jumlah keseluruhan bangunan sejumlah 89.669. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2018-2022, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan meningkatnya pengawasan dari Perangkat Daerah terkait dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal pembinaan pengembangan jasa kontruksi, telah dilaksanakan beberapa pelatihan dan sertifikasi ketrampilan teknis bagi tenaga konstruksi. Adapun jumlah penyedia jasa konstruksi di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi sebagai berikut:

Tabel 2.70 Perkembangan Jasa Konstruksi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Konstruksi	106	83	147	175	161

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

Selanjutnya untuk kesesuaian pemanfaatan ruang disajikan dalam Tabel 2.71 berikut.

Tabel 2.71 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 9/2020 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
A	**Kawasan Lindung**			
1.	Kawasan Perlindungan Setempat			
	a. Sempadan Sungai	±24 Ha		v
	b. Sempadan Pantai	±26 Ha		v
	c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	±15 Ha		v
2.	Kawasan Cagar Budaya	9 Ha		v
3.	RTH Kota (Publik)	335 Ha		v
4.	Kawasan Ekosistem Mangrove	88 Ha		v
B	**Kawasan Budidaya**			
1.	Kawasan Pertanian	521 Ha		v
2.	Kawasan Perikanan			
	a. Kawasan Perikanan Tangkap	38 Ha		v
	b. Kawasan Perikanan Budidaya	173 Ha		v
3.	Kawasan Perumahan	2.430 Ha		v
4.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	386 Ha		v
5.	Kawasan Perkantoran	51 Ha		v
6.	Kawasan Peribadatan	10 Ha		v
7.	Kawasan Pendidikan	94 Ha		v
8.	Kawasan Kesehatan	16 Ha		v
9.	Kawasan Olah raga	6 Ha		v
10.	Kawasan Transportasi	9 Ha		v

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 9/2020 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
11.	Kawasan Peruntukan Industri	189 Ha		v
12.	Kawasan Pariwisata Alam	11 Ha		v
13.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	7 Ha		v
	Luas Total (Ha)	**4.438**		

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2022

f. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun 2018 sebesar 87,18 persen dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman terus bertambah dalam tiga tahun terakhir dimana pada akhir tahun 2020 mencapai 86,06 persen dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 86,89 persen. Hal tersebut disebabkan karena sebagian kecil penduduk berhenti berlangganan PDAM maupun PAMSIMAS.

Tabel 2.72 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih (jiwa)	265.430	272.090	264.330	267.880	207.245
Jumlah Penduduk (jiwa)	304.477	307.097	307.150	308.310	309.742
Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	87,18	88,60	86,06	86,89	66,90

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2023

Sementara itu berdasarkan KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Nilai Daya Dukung Air Kota Pekalongan Tahun 2020 sebesar 0,81 yang berarti daya dukung airnya berada dalam kategori Daya Dukung Air Terlampaui atau Buruk. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan jumlah pekerja industri. Sedangkan di sisi lain tidak ada peningkatan jumlah ketersediaan air. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.

Saat ini terdapat SPAM Regional sistem Jambangan dengan rincian sebagai berikut: kapasitas: 150lt/dt, termanfaatkan: 90 lt/dt, idle capacity: 60 lt/dt, jumlah SR: 6838 SR. disamping itu terdapat SPAM Regional Sistem Kaliboyo sebanyak 200 lt/dt.

Adapun layanan penyediaan air minum saat ini selain oleh PDAM juga terdapat layanan non perpipaan yang dikelola masyarakat, baik yang berasal dari program Pamsimas maupun DAK Air Minum. Pemerintah mendorong pengurangan pemanfaatan ABT (air bawah tanah).

g. Jamban Layak (Sanitasi Dasar)

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Dinas Kesehatan bersama OPD terkait melakukan pendataan sanitasi dasar yaitu fasilitas sanitasi yang digunakan dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah penggunaan jenis kloset leher angsa.

Tabel 2.73 Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Jamban Layak	58.832	59.143	59.129	68.276	64.489
Jumlah Rumah yang didata	59.551	59.551	59.551	68.489	64.489
Rasio Rumah Bersanitasi Dasar	98,79	99,31	99,29	99,69	100,00

Sumber: Dinkes Kota Pekalongan, 2023

Jika dilihat pada tabel tersebut, perkembangan sanitasi dasar di Kota Pekalongan sudah sangat baik, yaitu 100 persen.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah Layak Huni (RLH), salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2017 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 6,88 persen, setara dengan 5.159 unit rumah. Tahun 2018-2022 rasio rumah tidak layak huni semakin menurun yaitu dari 4,53 persen menjadi 2,10 persen. Hal tersebut berarti bahwa perkembangan RLH di Kota Pekalongan semakin membaik atau bertambah seiring dengan berkurangnya RTLH. Pada tahun. Perkembangan RTLH dan RLH di Kota Pekalongan pada tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2018	75.618	3.428	4,53	72.190	95,47
2019	76.269	2.369	3,11	73.900	96,89

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2020	76.603	1.966	2,57	74.637	97,43
2021	73.357	1.585	2,17	71.772	97,83
2022	60.815	1.280	2,10	59.535	97,90

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2023

Selain data tentang Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni, pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu mempertimbangkan kebutuhan rumah di Kota Pekalongan. Untuk menghitung *backlog* kepemilikan dan *backlog* penghunian rumah tahun 2022 diperlukan data jumlah KK dan kepemilikan rumah di Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah KK di Pekalongan Tahun 2022 yaitu 77.940 KK, *backlog* kepemilikan tahun 2022 sejumlah 22.699 KK dan *backlog* penghunian sejumlah 20.508 KK.

b. Pengguna Listrik

Pelanggan listrik di Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Persentase pengguna listrik mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 sebesar 118,60 persen, dan angka tersebut terus meningkat menjadi 121,44 persen pada tahun 2019. Namun persentase pengguna listrik menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 113,07 persen, meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 113,29 persen dan menurun kembali menjadi 113,25 persen di tahun 2022. Persentase pengguna listrik yang mencapai di atas 100 persen disebabkan adanya rumah tangga yang memiliki sambungan listrik lebih dari 1 sambungan listrik.

Tabel 2.75 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	86.121	113,29
2022	99.388	87.758	113,25

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023 (diolah), 2023

c. Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh yang dimaksud dalam indikator ini adalah perbandingan antara sisa kawasan kumuh berdasarkan luas kawasan kumuh dalam SK Wali Kota Pekalongan Tahun 2014 (yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017) dibandingkan dengan luas kota Pekalongan.

Berdasarkan penetapan SK Wali Kota Tahun 2014 dan verifikasi di Tahun 2017, Luas kawasan kumuh adalah sebesar 195,59 hektar. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan melalui berbagai program dan kegiatan telah menangani kekumuhan pada kawasan tersebut. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 204,11 hektar.

Merujuk data tersebut, maka sisa luasan kawasan kumuh pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 6,89 hektar. Berikut rincian penanganan kawasan kumuh sejak tahun 2020-2022.

Tabel 2.76 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2022

No	Nama Kelurahan	Luas Kumuh (%)	Luas Pengurangan Kumuh (persen)			Total Penanganan Sd 2022 (%)	Sisa Kumuh Sd 2022 (%)
			2020	2021	2022		
1	Medono	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
2	Podosugih	12,21	0,00	2,70	0,00	2,70	9,51
3	Tirto	33,98	0,00	16,99	3,44	20,43	13,55
4	Pringrejo	52,40	0,00	30,78	3,80	34,58	17,82
5	Bendan Kergon	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
6	Pasirkratonkramat	85,98	0,00	2,71	11,19	13,90	72,08
7	Sapuro Kebulen	10,01	0,00	2,51	2,66	5,17	4,84
8	Jenggot	11,18	0,00	5,48	1,52	7,00	4,18
9	Kuripan Yosorejo	9,85	0,00	3,17	0,00	3,17	6,68
10	Sokoduwet	5,49	0,00	1,37	0,00	1,37	4,12
11	Kuripan Kertoharjo	4,64	0,00	1,42	1,56	2,98	1,66
12	Buaran Kradenan	4,54	0,00	1,30	0,00	1,30	3,24
13	Banyurip	11,56	0,00	3,35	1,86	5,21	6,35
14	Klego	9,61	0,00	0,00	3,39	3,39	6,22
15	Poncol	18,64	0,00	1,79	1,62	3,41	15,23
16	Gamer	3,05	0,00	0,00	1,29	1,29	1,76
17	Kauman	13,73	0,00	0,00	2,96	2,96	10,77
18	Noyontaansari	7,36	0,00	0,00	0,64	0,64	6,72
19	Kali Baros	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
20	Setono	3,03	0,00	0,00	1,86	1,86	1,17
21	Bandengan	29,16	0,00	9,03	3,39	12,42	16,74
22	Degayu	27,44	0,00	2,25	5,12	7,37	20,07
23	Kandangpanjang	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
24	Panjang Wetan	59,69	1,69	25,73	3,34	30,76	28,93
25	Panjang Baru	34,65	0,00	10,31	12,19	22,50	12,15
26	Padukuhan Kraton	24,22	0,00	0,70	3,52	4,22	20,00
27	Krapyak	15,48	0,45	15,03	0,00	15,48	0,00
		498,77	***2,14***	***136,62***	***65,35***	***204,11***	***294,66***

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2023

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2017-2022 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun

2018 dengan rasio sebesar 1,31 atau 40 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio menjadi 0,91 atau 28 personel untuk setiap 10.000 penduduk di tahun 2019. Sampai dengan tahun 2022, rasio Polisi Pamong Praja (PNS) terus meningkat menjadi 0,97 atau 30 personil untuk setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Banpol Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Pada tahun 2018, rasio sebesar 3,58 atau 109 personil untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3,45 atau 106 personil setiap 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2020 rasio mengalami kenaikan menjadi 3,91 atau 130 personil dan pada tahun 2021 rasio mengalami kenaikan menjadi 3,99 atau 123 personil setiap 10.000 penduduk. Sementara itu pada tahun 2022 rasio mengalami penurunan yaitu 3,97 atau 123 personil setiap 10.000 penduduk.

Jika Polisi PP PNS dan Banpol Non PNS dijumlahkan, maka rasio pada tahun 2018 sebesar 4,89 atau 149 personil per 10.000 penduduk. Pada tahun 2019 menurun jumlahnya dibandingkan tahun 2018 yaitu 134 personil. Pada tahun 2020 rasio naik menjadi 4,79, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2021 dan 2022 menjadi 4,83 dan 4,94.

Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP dan Banpol dalam kurun waktu 2018-2022.

Tabel 2.77 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Polisi PP (PNS)	Persentase Jumlah Polisi PP (PNS)	Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (PNS dan Banpol Non PNS)	Jumlah Penduduk
2018	40	1,31	109	3,58	149	4,89	304.477
2019	28	0,91	106	3,45	134	4,36	307.097
2020	27	0,88	130	3,91	147	4,79	307.150
2021	26	0,84	123	3,99	149	4,83	308.310
2022	30	0,97	123	3,97	153	4,94	309.742

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2023.

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung naik. Pada tahun 2018, pelanggaran Perda sebanyak 1.552 kasus, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 1.382 kasus. Namun sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah pelanggaran Perda semakin meningkat menjadi 2.410 kasus. Meskipun demikian, Satpol P3KP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Perda yang berada diatas 90 persen mulai tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 2.78 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2018	1.552	1.475	95,04
2019	1.382	1.363	98,63
2020	1.782	1.759	98,71

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2021	3.586	3.586	100,00
2022	2.410	2.410	100,00

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2023

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk (Ton Inti) menunjukkan rasio yang fluktuatif, dimana rasio pada tahun 2018 adalah 46,54 atau 1.417 personil dan pada tahun 2022 naik menjadi 67,86 atau 2.102 personil.

Untuk jumlah Linmas Kecamatan dan Kelurahan tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dengan rasio sebesar 1,15 atau 35 personil. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan rasio sebesar 1,13 atau 35 personil per 10.000 penduduk.

Tabel 2.79 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Linmas (Ton Inti)	Rasio	Jumlah Penduduk	Jumlah Linmas (Kec. dan Kel.)	Rasio
2018	1.417	46,54	304.477	35	1,15
2019	1.708	55,62	307.097	35	1,14
2020	1.452	47,27	307.150	35	1,14
2021	2.102	68,17	308.310	35	1,14
2022	2.102	67,86	309.742	35	1,13

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2023, 2023

Sementara itu jumlah pos siskamling bisa dikatakan cenderung menurun. Pada tahun 2018 berjumlah 514 pos siskamling, menurun menjadi 308 pada tahun 2022.

Tabel 2.80 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jml Pos Siskamling	Jml Kelurahan	Rasio
2018	514	27	19
2019	441	27	16
2020	441	27	16
2021	275	27	10,19
2022	308	27	11,40

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2023

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan termasuk pelanggaran terhadap Perda dan Perwal, Satpol P3KP Kota Pekalongan dibantu oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak

pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sampai dengan tahun 2022 ini Kota Pekalongan telah memiliki 3 orang PNS yang telah bersertifikat sebagai PPNS.

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya dikaitkan dengan panti asuhan. Kepemilikan panti ini dapat oleh pemerintah daerah maupun swasta. Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2022 sebanyak 23 panti meningkat dibanding jumlah panti asuhan di tahun 2021. Sedangkan jumlah anak yang diasuh menurun dibandingkan tahun 2021. Secara lengkap jumlah Panti Asuhan dan jumlah anak yang diasuh selama 5 tahun terakhir (2018-2022) disajikan dalam Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Anak yang Diasuh
2018	7	545
2019	8	354
2020	20	1.052
2021	15	1.037
2022	23	251

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2023

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Pada tahun 2022 jumlah PMKS adalah 24.922 jiwa, dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin sebesar 22.672 jiwa. Data selengkapnya selama 5 tahun terakhir (tahun 2018-2022) disajikan dalam Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra	-	-	-	-	-
Keluarga Penyandang Sosial	-	-	-	-	-

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Psikologi					
Anak Terlantar/Gelandangan	12	3	-	158	1
Usia Lanjut/Jompo/Terlantar	21	164	145	140	135
Wanita Rawan Sosial	827	-	8	9	15
Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak	-	-	-	-	-
Anak Nakal	50	0	98	158	-
Korban Penyalahgunaan Narkoba	6	2	-	-	1
Penyandang Cacat:	343	535	1.354	481	638
- Tubuh	110	357	234	267	214
- Netra	58	103	107	112	109
- Mental	132	0	429	365	216
- Ganda	12	0	484	457	-
- Wicara	31	75	100	102	99
Bekas Penyandang Penyakit Kronis	-	-	-	-	-
Gelandangan	-	-	3	3	3
Tuna Susila	-	-	-	-	-
Waria	-	-	-	-	-
Bekas Narapidana	30	3	1	1	-
Bencana Alam	2.623	-	3107	14.000	834
Fakir Miskin	63.829	24.116	22.683	184.235	22.672
Jumlah	67.741	24.823	27.499	200.488	24.937

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2023

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2022, untuk perintis/pejuang kemerdekaan berjumlah 235 orang, karang taruna berjumlah 32 organisasi, WKKS (Wanita Kader Kepemimpinan Sosial) sebanyak 5 orang dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 63 orang. Selanjutnya disajikan dalam Tabel 2.83 berikut.

Tabel 2.83 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Perintis / Pejuang Kemerdekaan	9	6	0	0	235
Wanita Kader Kepemimpinan Sosial	5	5	5	5	5
Pekerja Sosial Masyarakat	88	53	63	63	63
Karang Taruna	91	32	32	32	32
Organisasi Sosial	7	9	20	0	0

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2023

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan *up to date*. Untuk mendapatkan data yang *up to date* tersebut, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementrian Sosial dengan didukung oleh Pemerintah

Daerah mendapatkan mandat untuk merumuskan kebijakan tentang verifikasi, validasi data dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis teknologi informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation* (SIKS-NG). Selanjutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan dalam menjalankan program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini memuat informasi status sosial ekonomi rumah tangga 40 persen terendah, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset dan kepesertaan program bantuan sosial/subsidi.

Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekalongan selama Tahun 2019-2022.

Tabel 2.84 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2022

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2019	29.618	112.613
2020	29.282	108.436
2021	61.421	184.247
2022	61.330	188.455

Sumber: Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan, 2023

Dari Tabel 2.84 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 91 RTS jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan jumlah Anggota Rumah Tangga Sasaran Tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 4.208 jiwa dibandingkan jumlah Anggota Rumah Tangga Sasaran tahun 2021. Peningkatan ini terjadi dikarenakan semakin banyaknya penerima bantuan sosial akibat dampak pandemic *COVID-19*.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Jumlah Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2018 s.d. 2022 disajikan dalam Tabel 2.85 berikut.

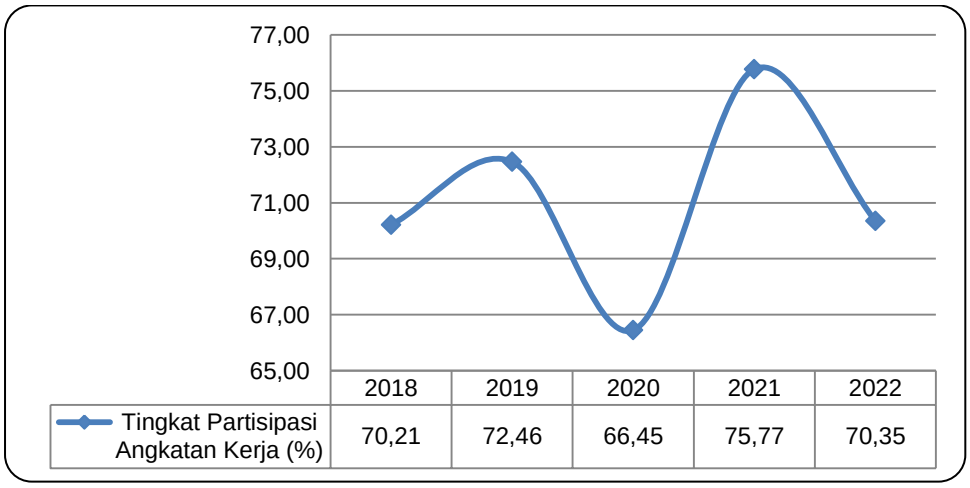
Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2018–2022

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
1	2018	161.502	70,21
2	2019	168.339	72,46
3	2020	157.260	66,45
4	2021	181.210	75,77

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
5	2022	169.940	70,35

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2023 dan www.jateng.bps.go.id, 2023

Pada tahun 2018 sampai tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan berfluktuasi dari 70,21 persen di tahun 2018 menjadi 72,46 persen di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 66,45 persen, meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 75,77 persen dan kembali menurun menjadi 70,35 persen di tahun 2022. Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2022 tercatat sekitar 237.512 orang. Persentase angkatan kerja 2022 menurun 5,42 poin dari tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) mengalami peningkatan.



Gambar 2.35 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2022

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sepanjang lima tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja tergolong tidak banyak, masih di bawah 30 (tiga puluh) kasus dari sekitar 300-500 perusahaan. Meskipun jumlah dan persentase sengketa masih berfluktuasi untuk itu persengketaan ini harus tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase Sengketa
2018	13	385	3,38
2019	11	369	2,98
2020	28	484	5,79
2021	11	484	2,27
2022	8	484	1,65

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan dan Evaluasi RKPD TW. IV tahun 2022, 2023

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana pada tahun 2022 sebesar 70,35 persen. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk AKAD dan AKAN cenderung menurun daru tahun 2018 sampai 2022. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2018	180	21	103
2019	184	4	111
2020	3	0	24
2021	164	0	13
2022	179	0	146

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2023

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

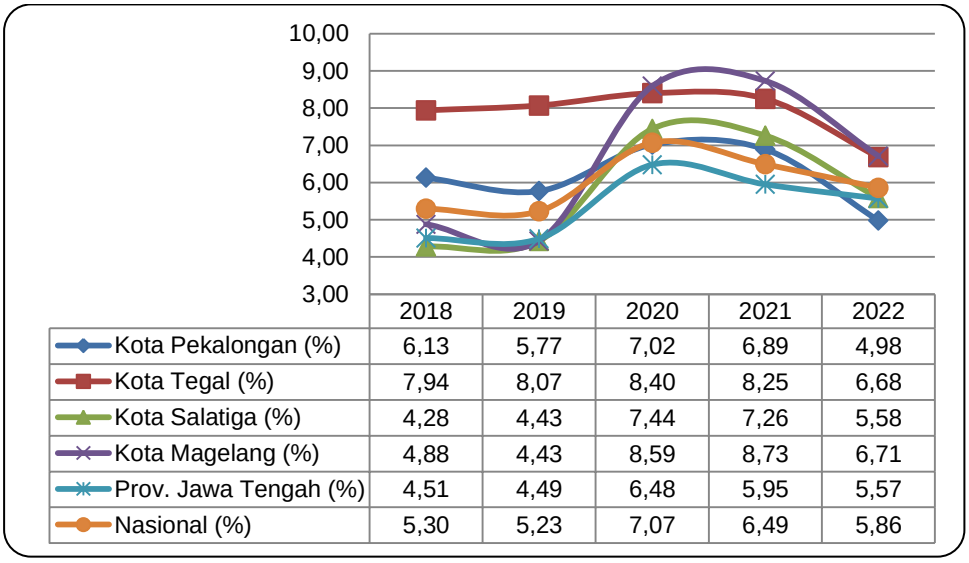
Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan tahun 2022 sebesar 4,98 persen atau menurun 1,91 poin dari tahun 2021, artinya, pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 5 orang yang benar-benar menganggur.

Faktor yang menyebabkan TPT tidak bisa turun signifikan antara lain beberapa musibah seperti kebakaran pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Pada tahun 2022 TPT Kota Pekalongan berada di bawah TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Artinya, jumlah pengangguran di Kota Pekalongan lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan Kota lain di Jawa Tengah, TPT Kota Pekalongan paling rendah.

Tantangan ke depan adalah bagaimana upaya terintegrasi untuk menurunkan TPT secara optimal. Meskipun dibandingkan daerah lain setara, TPT Kota Pekalongan lebih bagus, namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa

Tengah, Kota Pekalongan harus berupaya lebih keras lagi untuk mengoptimalkan capaian TPT-nya.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	6,13	5,77	7,02	6,89	4,98
Kota Tegal (%)	7,94	8,07	8,40	8,25	6,68
Kota Salatiga (%)	4,28	4,43	7,44	7,26	5,58
Kota Magelang (%)	4,88	4,43	8,59	8,73	6,71
Prov. Jawa Tengah (%)	4,51	4,49	6,48	5,95	5,57
Nasional (%)	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86

Gambar 2.36 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2018- 2022

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2023

Salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah pelatihan tenaga kerja. Berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan antara data jumlah pelatihan yang dilaksanakan dengan TPT tahun 2011-2020 maka korelasi antara kedua varibel tersebut sangat lemah atau tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan belum berdampak signifikan bagi penurunan TPT. Strategi pelaksanaan pelatihan harus dilakukan penyesuaian, termasuk pemilihan peserta pelatihan, sehingga diharapkan pelatihan dapat tepat sasaran, meningkatkan kesempatan dan peluang kerja, dan pada akhirnya dapat berdampak bagi penurunan TPT. Upaya bersama yang harus dilakukan adalah integrasi kebijakan berbagai sektor sehingga dapat saling mendukung atau melengkapi sehingga berdampak bagi penurunan TPT secara optimal.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 cenderung fluktuatif. Namun dari sisi persentase cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 sebesar 96,47 persen, terus menurun sampai tahun 2020 sebesar 74,38 persen. Namun di tahun 2021 semua perusahaan telah menerapkan K3 di lingkungan kerjanya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2018	410	425	96,47
2019	319	369	86,45
2020	360	484	74,38
2021	484	484	100,00
2022	484	484	100,00

Sumber: Diperinaker Kota Pekalongan, 2023

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah ASN perempuan Pemerintah Kota Pekalongan tahun N dengan seluruh pekerja perempuan (ASN perempuan dan pekerja perempuan di perusahaan formal) Tahun N. Tahun 2022 ASN perempuan di Pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 1.695 orang, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 67.496 orang.

Tabel 2.89 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

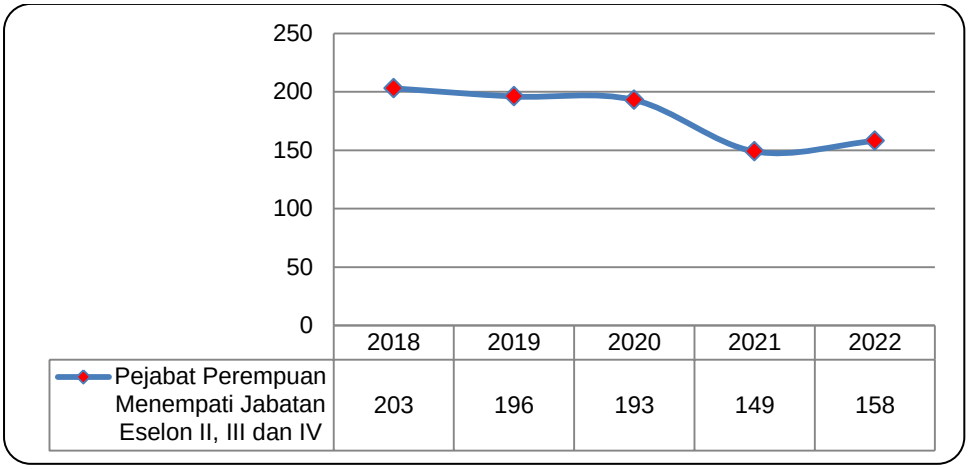
URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	1.540	2.322	1.616	1.564	1.695
Jumlah pekerja perempuan (orang)	9.870	45.571	66.690	77.848	67.496
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	15,60	5,10	2,42	2,01	2,51

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023 (diolah), 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah bertambah, semula 1.564 orang pada tahun 2021 menjadi 1.695 orang pada tahun 2022.

b. Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2018-2021 terus menurun. Pada tahun 2018 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 203 orang. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada jumlah 149 orang di tahun 2021 dan baru meningkat lagi pada tahun 2022 yaitu sebesar 158 orang. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.37 berikut.

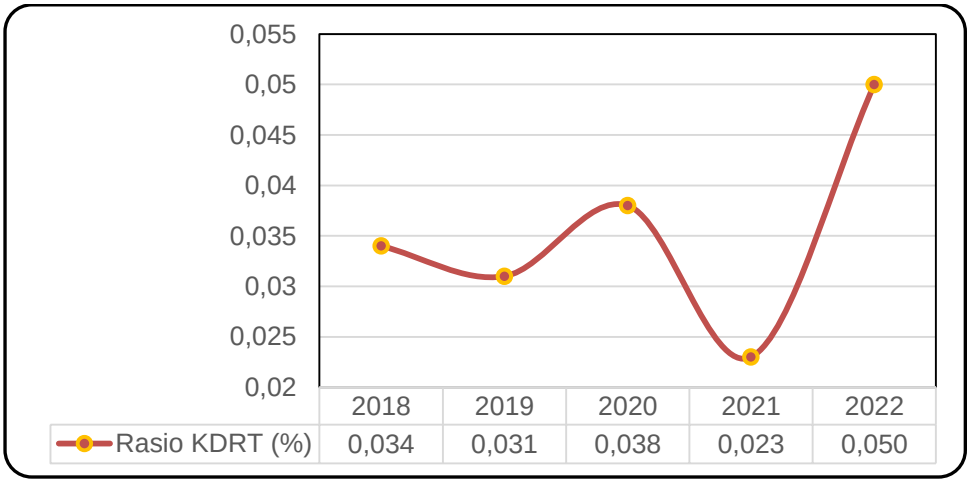


Gambar 2.37 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 (diolah), 2023

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2017-2021 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin kecil rasio KRDT menunjukan indikasi yang semakin baik. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2021 dengan angka rasio 0,023 persen.

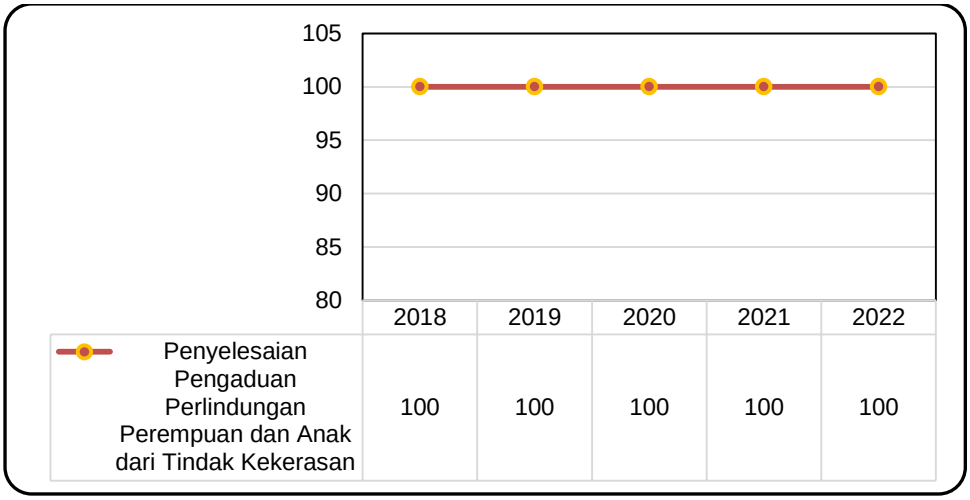


Gambar 2.38 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2023

d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan prestasi yang baik. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 seluruh kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dapat diselesaikan. Salah satu faktor keberhasilan atas prestasi tersebut dikarenakan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA).



Gambar 2.39 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2023

e. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) didefnisikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada 24 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kluster, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Pada tahun 2020, Kota Pekalongan meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya. Upaya terus ditingkatkan, salah satunya adalah fokus pada sarana dan prasarana mengenai informasi layak anak seperti baliho, dan sebagainya. Upaya lain juga dilakukan untuk memenuhi indikator dan klaster KLA. Hasilnya, pada tahun 2022 Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya dengan nilai 637,6.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan berupaya serius untuk mengejar peringkat Nindya sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat nasional. Komitmen ini dibuktikan dengan dibukanya layanan Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP PKSAI) yang akan bertugas melakukan penjangkauan kepada anak-anak rentan di Kota Pekalongan. Dengan berdirinya UP PKSAI ini diharapkan dapat semakin memudahkan pemerintah membangun mekanisme layanan terpadu bagi anak di tingkat masyarakat.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam ketahanan pangan yang merupakan suatu sistem, mencakup empat sub sistem yaitu: (a) ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan

pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Di Kota Pekalongan ketersediaan pangan dalam kurun 5 (lima) tahun (2018-2022) disajikan dalam Tabel 2.90. Dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2018-2020 penurunan terjadi namun tidak sebanyak tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan dari tahun 2020, menjadi 5.738.290 dari sebelumnya 4.769.190dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 5.179.300. Rasio ketersediaan pangan secara otomatis juga sebanding dengan fluktuasi ketersediaan pangan.

Tabel 2.90 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Rasio
2018	5.860.781	304.477	19,25
2019	5.400.416	307.097	17,59
2020	4.769.190	307.150	15,53
2021	5.738.290	308.310	18,61
2022	5.179.300	309.742	16,72

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari tahun 2018-2020 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi.

Skor PPH selama lima tahun terakhir (tahun 2018-2022) disajikan dalam tabel 2.91. Terdapat peningkatan skor PPH dari tahun 2018 sampai dengan 2020, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 92,01 pada tahun 2020 menjadi 87,10 di tahun 2021 dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 81,20.

Tabel 2.91 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2018	90,42
2019	91,31
2020	92,01
2021	87,10
2022	81,20

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan antara lain dengan: penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya; penyediaan cadangan pangan daerah; penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta

ketahanan dan kerentanan pangan; meningkatkan ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar.

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, secara umum dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) jenis kelompok pangan. Pada tabel 2.92. disajikan capaian kelompok konsumsi pangan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu 110,9 kg per kapita/tahun dari tahun 2021 sebesar 114,0 kg per kapita/tahun. Kelompok pangan yang juga dapat dikatakan cukup tinggi dalam konsumsi dibanding yang lain adalah sayur dan buah yaitu 63,7 kg per kapita/tahun. Walaupun tiap tahunnya mengalami fluktuasi naik turun. Konsumsi kelompok pangan selanjutnya adalah kelompok lain-lain yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019 (2,3 kg per kapita/tahun) menjadi 44,1 kg per kapita/tahun pada tahun 2020 dan menurun kembali pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 37,9 kg per kapita/tahun dan 33,4 kg per kapita/tahun. Konsumsi pangan hewani berada di urutan selanjutnya (37 kg/kapita/tahun tahun 2022) diikuti dengan umbi-umbian, gula, kacang-kacangan, minyak dan lemak, serta buah/biji berminyak. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.92 berikut.

Tabel 2.92 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Padi-padian	Kg/Kap/th	98,8	102,0	108,7	114,0	110,9
Umbi-umbian	Kg/Kap/th	16,5	18,8	7,9	12,4	8,8
Pangan Hewani	Kg/Kap/th	47,0	45,0	36,8	35,0	37,0
Minyak dan Lemak	Kg/Kap/th	11,8	5,7	6,6	6,7	7,6
Buah/biji berminyak	Kg/Kap/th	2,8	2,3	0,8	0,8	0,9
Kacang-kacangan	Kg/Kap/th	18,0	23,5	8,4	7,7	7,7
Gula	Kg/Kap/th	9,5	5,9	7,7	8,1	8,1
Sayur & Buah	Kg/Kap/th	73,8	82,2	70,0	64,6	63,7
lain-lain	Kg/Kap/th	1,4	2,3	44,1	37,9	33,4

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

Dari segi konsumsi energi yang diukur dari kilo kalori (kkal) per kapita/tahun. Konsumsi beras selalu menempati posisi pertama dan secara umum cenderung meningkat tiap tahunnya, dengan jumlah 1.251,5 kkal/kapita/tahun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 1.275,9 kkal/kapita/tahun pada tahun 2021, walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.270 kkal/kapita/tahun. Urutan berikutnya adalah kelopok pangan hewani, yang pada tahun 2022 meningkat menjadi 274,6 kkal/kapita/tahun dari tahun 2021 sebesar 258,9 kkal/kapita/tahun . Selanjutnya urutan kelompok pangan selalu berubah jenisnya. Pada tahun 2022, setelah padi-padian dan pangan hewani, kelompok pangan selanjutnya adalah minyak dan lemak (186,1 kkal/kapita/tahun), sayur dan buah (84,6 kkal/kapita/tahun) dan kelompok pangan lainnya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Padi-padian	Kkal/Kg/Kap/th	974,9	1.006,1	1251,5	1275,9	1.270,4
Umbi-umbian	Kkal/Kg/Kap/th	49,6	56,3	24,7	39,8	26,8

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Pangan Hewani	Kkal/Kg/Kap/th	266,7	255,4	272,5	258,9	274,6
Minyak dan Lemak	Kkal/Kg/Kap/th	280,1	136,8	160,7	164,5	186,1
Buah/biji berminyak	Kkal/Kg/Kap/th	49,1	40,6	12,7	12,7	13,4
Kacang-kacangan	Kkal/Kg/Kap/th	163,4	213,2	53,8	49,5	49,4
Gula	Kkal/Kg/Kap/th	94,7	58,7	77,5	81,6	81,4
Sayur dan Buah	Kkal/Kg/Kap/th	104,9	116,8	97,3	87,5	84,6
Lain-lain	Kkal/Kg/Kap/th	11,1	18,5	56,1	50,0	50,4

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

Secara umum, selama lima tahun terakhir, PPH Kota Pekalongan cenderung menurun. Capaian konsumsi kelompok pangan karbohidrat cenderung meningkat, sementara kelompok pangan yang lain cenderung menurun. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, sebagai hal yang harus diwaspadai bersama.

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi tiap kelompok pangan dari suatu pola ketersediaan dan konsumsi pangan. Pola pangan harapan ini dapat dipahami sebagai komposisi keseimbangan pangan dan kecukupan gizi yang dijadikan sebuah angka penilaian sebuah daya serap komponen-komponen makanan di suatu wilayah sudah mencukupi atau belum. Pola pangan harapan ini harus memenuhi dalam segi kuantitas, kualitas, keragamannya serta memperhatikan aspek sosial budaya, daya terima masyarakat, ekonomi, agama, citarasa, daya cerna, kecukupan gizi dan keseimbangan gizi.

Setiap individu membutuhkan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Energi tersebut bisa kita dapatkan dari makanan yang dikonsumsi. Setiap produk pangan memiliki berbagai komponen gizi yang terkandung di dalamnya. Komponen gizi tersebut dibutuhkan oleh tubuh setiap individu dalam jumlah tertentu. Karena kebutuhan tubuh setiap individu akan komponen gizi berbeda, maka sekarang kita mengenal istilah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pangan beragam dan bergizi artinya terdapat lebih dari satu macam jenis pangan dalam piring sekali makan sehingga dapat memenuhi komponen gizi secara lengkap. Seimbang artinya pangan mengandung komponen-komponen yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral) yang diperlukan tubuh. Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi. Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu produk pangan. Konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman juga memiliki kelebihan yakni implementasinya dapat memanfaatkan potensi produk pangan yang dihasilkan oleh daerah. Misalnya jika suatu daerah merupakan sentra penghasil jagung, maka jagung tersebut dapat menggantikan beras sebagai bahan pangan sumber karbohidrat.

Kota Pekalongan sangat segera membutuhkan pangan B2SA bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini didasarkan fakta bahwa stunting, AKI, AKB dan AKABA merupakan wujud dari permasalahan kesehatan, di samping permasalahan kesehatan lainnya. Dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa asupan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan dan konsumsi terhadap pangan B2SA sangat mendesak dibutuhkan Kota

Pekalongan, terutama untuk mewujudkan generasi Kota Pekalongan yang lebih unggul di masa mendatang. Upaya untuk membumikan penyediaan dan konsumsi pangan B2SA, adalah dengan mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi seluruh pemangku kepentingan. Kampanye pentingnya pangan B2SA harus terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami bahwa pangan B2SA sangat dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat, termasuk janin di dalam kandungan, agar terwujud generasi masa depan yang lebih sehat dan unggul.

Strategi agar skor pola pangan harapan (PPH) dapat mengalami kenaikan di tengah pandemi seperti ini ialah kemudahan masyarakat mengakses pangan yang tersedia beragam. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar kondisi tersebut dapat diwujudkan.

4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam pelaksanaan reforma agraria yang merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia,dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu Perencanaan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pada tahun 2021 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan menyelesaikan 95 % target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kantor Pertanahan Kota Pekalongan mendapat target dari BPN Pusat untuk mensertipikat 3.145 bidang tanah. Saat ini BPN Kota Pekalongan sudah terealisasi 95 persen dari target dan sertipikatnya akan diserahkan secara bertahap. Jumlah realisasi adalah 2.104 sertifikat yang terdiri dari 650 aset pemkot, wakaf 6 bidang, dan milik warga masyarakat (perorangan) sebanyak 1.448.

Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2018 – 2019. Pada tahun 2020 terjadi perubahan/koreksi luasan wilayah kota Pekalongan, yang semula 4.525 ha terkoreksi menjadi 4.642 ha. Adanya perubahan luasan wilayah mengakibatkan persentase lahan bersertifikat mengalami perubahan. Pada tahun 2020 menjadi 91,33 persen

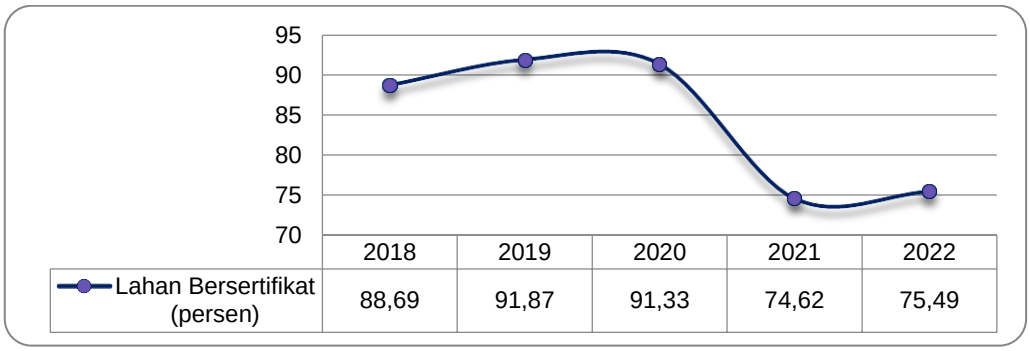
dengan luasan seluas 4.239,02, menjadi menurun persentasenya bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih menggunakan luas total wilayah lama (4.525 ha). Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir 2017-2021, disajikan dalam Tabel 2.94 berikut.

Tabel 2.94 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas wilayah	4.525	4.525	4.642	4.642	4.642,00
Luas tanah bersertifikat	4.013,28	4.157,29	4.239,50	3.463,64	3.504,19
Hak Milik	3.192,36	3.320,74	3.360,02	2.590,47	2.549,51
HGB	305,94	13,21	322,95	212,77	198,64
Hak Guna Usaha	6,76	6,76	6,76	12,11	11,28
Hak Pakai	444,70	451,53	481,01	596,26	635,70
Hak Pengelolaan	4,00	4,00	5,00	31,82	31,82
Hak Wakaf	60,5396	62,06	63,76	20,22	32,23
Lahan Bersertifikat (persen)	88,69	91,87	91,33	74,62	75,49

Sumber: BPN Kota Pekalongan (diolah), 2022

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 luas lahan bersertifikat adalah 88,69 persen, sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, semakin meningkatnya persentase tersebut menjadi salah satu indikasi kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan. namun pada tahun 2020 jumlah lahan di Kota Pekalongan yang sudah bersertifikat menurun menjadi 91,33, dan tahun 2021 semakin menurun menjadi 74,62 persen. Hal ini dikarenakan adanya koreksi total luas lahan Kota Pekalongan.

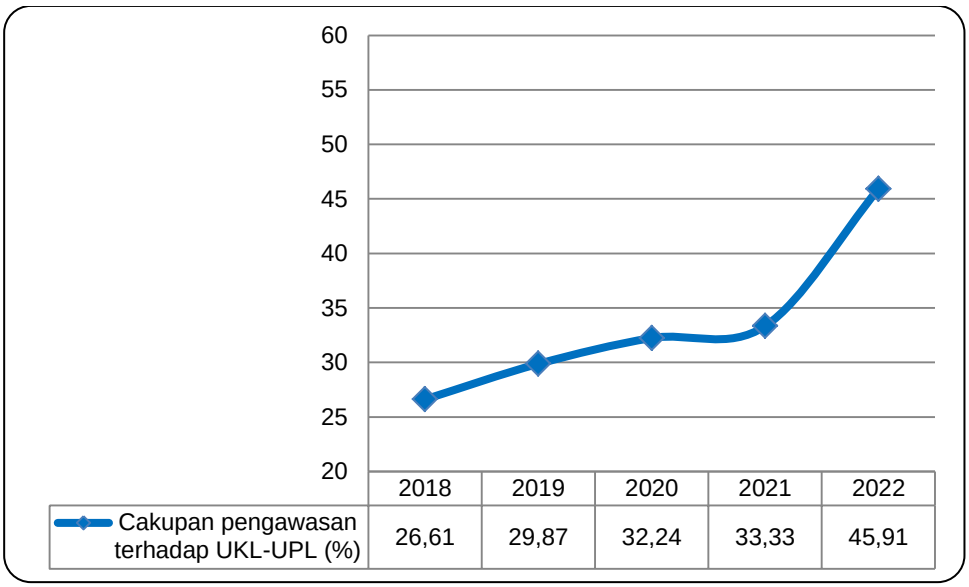


Gambar 2.40 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: BPN Kota Pekalongan (diolah), 2023

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.



Gambar 2.41 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2018 – 2022

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2018-2022, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL terus mengalami peningkatan sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.41.

Pada tahun 2018 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 26,61 persen. Pada tahun 2019 samapi dengan 2022, cakupan pengawasan pelaksanaan UKP – UPL mengalami peningkatan bertahap yaitu 29,87 persen pada tahun 2019, 32,24 persen pada tahun 2020, 33,33 persen pada tahun 2021 dan 45,91 persen pada tahun 2022.

Terdapat peningkatan jumlah pemilik dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) seiring dengan peningkatan jumlah usaha di Kota Pekalongan. Peningkatan ini juga didorong oleh perijinan usaha yang mempersyaratkan disusunnya dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa UKL/UPL maupun amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tingkat pelaporan monitoring UKL/UPL dan amdal juga cenderung meningkat, hal ini menunjukkan naiknya tingkat kesadaran pengusaha dalam pengelolaan lingkungan. Perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran pelaporan diantaranya dengan melakukan pengawasan dan pemberian insentif /disinsentif bagi usaha dan/atau kegiatan yang menaati tertib hukum lingkungan.

Peningkatan persentase tertib hukum lingkungan hidup pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan. Terutama pada tahun 2021, terdapat peningkatan yang signifikan hampir mencapai 40%, baik pada jumlah yang usaha melaporkan UKL-UPL/AMDAL maupun jumlah UKP-UPL/AMDAL. Pada tahun 2020 jumlah yang usaha melaporkan UKL-UPL/AMDAL sebanyak 12 sedangkan tahun 2021 sebanyak 23, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 41, sedangkan jumlah UKL-UPL/AMDAL tahun 2020 sebanyak 158 dan tahun 2021 sebanyak 201 dan turun menjadi 159 di tahun 2022. Persentase tertib hukum lingkungan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Tertib Hukum Lingkungan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Usaha yang melaporkan UKL-UPL/AMDAL	6	8	12	23	41
Jumlah UKL-UPL/AMDAL	124	154	158	201	159
Persentase Tertib Hukum Lingkungan	4,84	5,19	7,59	11,44	25,81

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

Usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki rekomendasi persetujuan teknis dan persetujuan teknis PPLH di Kota Pekalongan tidaklah terlalu banyak, hal ini karena jumlah kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki persetujuan teknis tersebut ditujukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan AMDAL, sedangkan di Kota Pekalongan mayoritas hanya wajib SPPL.

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2018-2022 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal di Kota Pekalongan tiap tahunnya mengalami penambahan, baik dalam jumlah industry maupun jumlah limbah yang dihasilkan. Namun untuk IPAL Jenggot dan IPAL Industri Besar mengalami penurunan. Pada IPAL Jenggot dengan jumlah industri yang sama pada tahun 2019 dan 2020 (80 industri) jumlah limbah yang dihasilkan menurun dari 700m3 menjadi 600m3. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 tetap sama dengan 2020. Pada IPAL industri besar, dengan berkurangnya jumlah industri pada tahun 2020 (3 industri) maka jumlah limbah berkurang menjadi 500m3. Jumlah ini sama dengan jumlah di tahun 2021 dan 2022. Beberapa usaha yang belum memiliki pengolahan limbah B3 pada umumnya adalah industri kecil. Untuk IPAL Biogas ternak, sejak tahun 2020 sudah tidak ada limbah karena sudah tidak ada industri yang menghasilkan limbah tersebut. Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal disajikan dalam Tabel 2.96 berikut.

Namun demikian masih terdapat daerah yang merupakan sentra industri kecil yang menghasilkan limbah dan belum terdapat layanan IPAL komunal, yaitu: Pringlangu, Bendan Kergon, Pasir Kraton Kramat, Krapyak, Kelgo, Medono, Kuripan Kertoharjo, sebagian wilayah Jenggot dan sebagian wilayah Banyurip.

Tabel 2.96 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

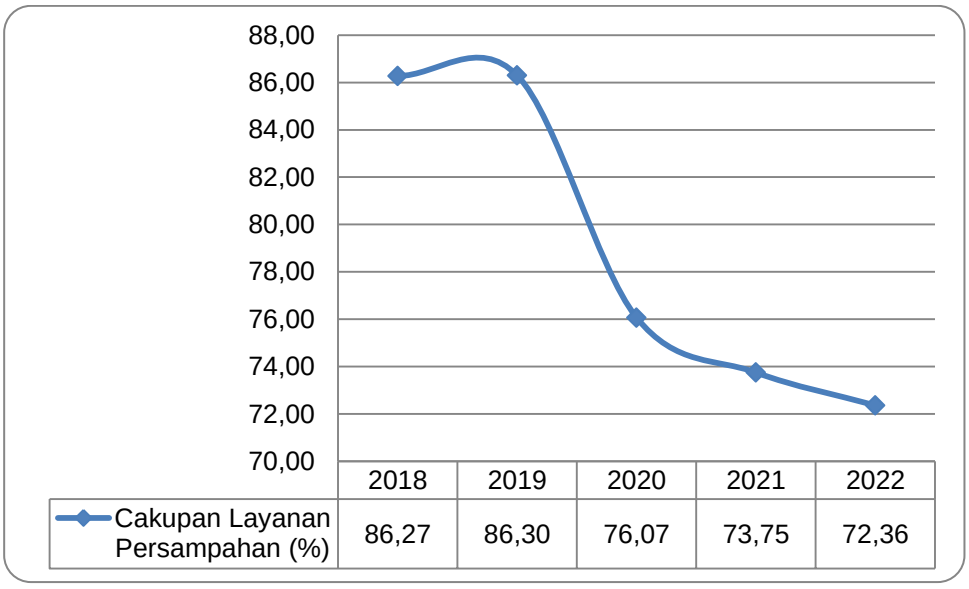
IPAL	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)
Kauman	29	120	20	150	20	125	20	150	19	150
Jenggot	102	700	80	700	80	600	80	600	80	600
Industri Kecil	83	426	83	426	73	426	75	430	75	430
IPAL Bersama	3	500	3	500	2	700	2	700	2	700

IPAL	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)
Industri Besar	5	700	5	900	3	500	3	500	3	500
IPAL Biogas Duwet	125	120	125	120	30	70	30	70	30	70
IPAL Biogas Ternak	7	210	7	75	-	-	-	-	-	-
IPAL Pringrejo	70	180	20	50	25	60	25	75	-	-
IPAL Banyurip	-	-	69	150	55	125	60	150	60	150
JUMLAH	424	2.956	412	3.071	288	2.606	295	2.675	269	2.600

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

Dari sejumlah kawasan tersebut, masih ada kawasan yang belum terlayani IPAL komunal yaitu

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung turun seperti disajikan dalam Gambar 2.42.



Gambar 2.42 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

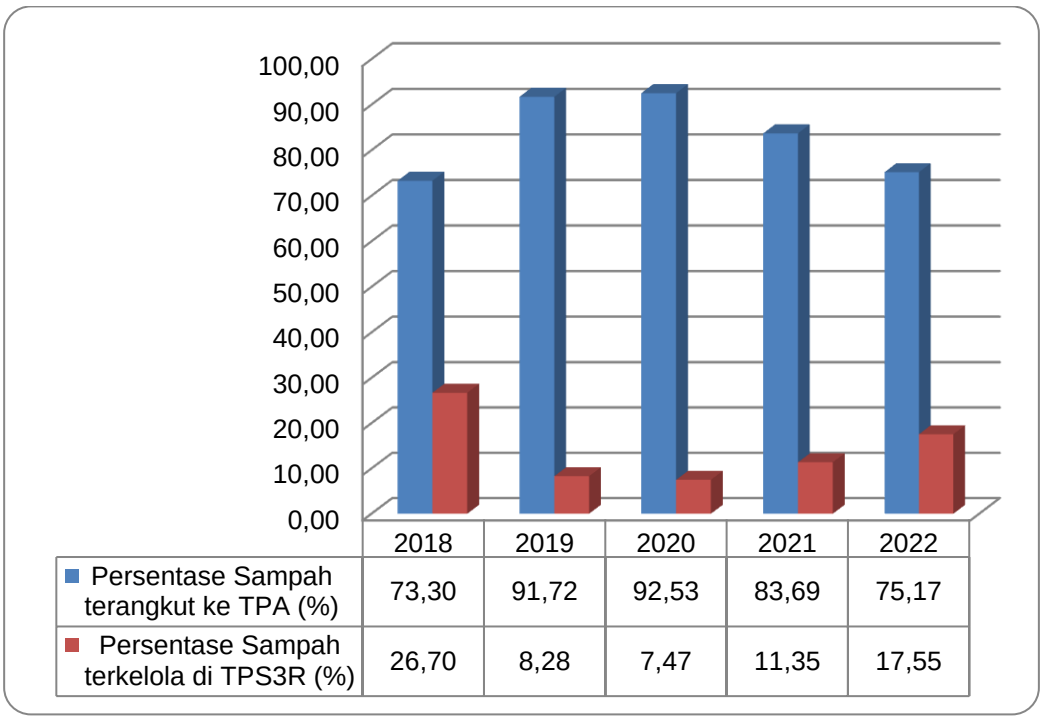
Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2018 - 2022 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R selama tahun 2018-2021 pengelolaannya setiap hari semakin menurun, namun pada tahun 2022 mulai membaik. Sedangkan jumlah sampah yang terangkut ke TPA mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebanyak 271,87 m^3, bertambah di tahun 2021 sebanyak 382,59 m^3 dan menurun di tahun 2022 menjadi sebanyak 370,03 m^3. Penanganan sampah di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 disajikan dalam tabel 2.97 berikut.

Tabel 2.97 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan
Tahun 2018 - 2022

Data Sampah per Hari	2018		2019		2020		2021		2022	
	%	(m^3)	%	(m^3)	%	(m^3)	%	(m^3)	%	(m^3)
Timbulan sampah								657,07		492,26
Sampah terangkut ke TPA	73,30	353,93	91,72	79,12	73,30	271,87	58,23	382,59	75,17	370,03
Sampah terkelola di TPS3R, bank sampah dan sodaqoh sampah	26,70	31,97	8,28	20,88	26,70	99	11,35	74,55	17,55	86,41
Jml Sampah tertangani (m3)	54,48	385,91	86,30	100	54,48	370,87	69,57	457,14	92,72	456,43

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2018–2021 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah. Baik yang terolah di TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah maupun yang terangkut ke TPA. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah semakin menurun disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.



Gambar 2.43 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Pengoperasian TPA Degayu tersebut merupakan control *landfill*. Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.

Permasalahan sampah di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun seperti tidak ada habisnya. Pemerintah Kota Pekalongan tidak dapat menggantungkan sepenuhnya pembuangan sampah ke TPA Degayu. Potensi timbunan sampah di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun juga selalu meningkat. TPA Degayu juga diperkirakan tidak bisa lagi menjadi tempat penampung sampah untuk jangka waktu panjang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R antara lain dengan mengembangkan TPS3R di kelurahan yang belum terjangkau pengolahan sampah secara bertahap dan mengaktifkan kembali TPS3R yang tidak beroperasi dengan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, merevitalisasi TPS3R yang rusak berat dan mengoperasikan kembali TPS3R yang selama ini tidak beroperasi dan merencanakan kebutuhan dan pemenuhan secara bertahap atas sarana prasarana pengumpulan sampah dengan memperhatikan keterjangkauan, volume sampah, jumlah penduduk, dan lokasi TPS. Serta melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya, antara lain DLH telah memiliki perencanaan dalam mencanangkan program OOPS MAMI sebagai strategi pengelolaan persampahan berbasis ekonomi berkelanjutan di Kota Pekalongan dalam pengolahan sampah di kawasan permukiman melalui unit TPS3R. Program OOPS MAMI tersebut digambarkan melalui sistem pengolahan sampah berbasis ekonomi kemasyarakatan secara berkelanjutan dimulai dari proses pemilahan sampah menggunakan mesin yang berfungsi sebagai pemilah sampah non-organik/plastik sekaligus penghancur sampah organik menjadi bubur sampah yang akan diolah menjadi media budidaya untuk larva/maggot BSF (Black Soldier Fly) dan dari proses biokonversi kemudian menghasilkan kasgot yang bernilai jual tinggi sebagai pupuk organik.

Penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat dilakukan yang dalam rangka mengatasi persoalan sampah tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi diperlukan sinergitas yang berkelanjutan antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi kian penting mengingat masyarakat merupakan salah satu pelaku aktif penyumbang sampah. Dengan melibatkan masyarakat akan menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan secara langsung. Sehingga demikian penanganan sampah di Kota Pekalongan semakin efektif dan efesien.

Kesadaran akan pentingnya pengentasan masalah sampah di benak masyarakat tidak akan muncul begitu saja. Diperlukan adanya pendekatan terukur berupa pemberian pemahaman atau pengetahuan akan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, perlu penekanan akan pentingnya literasi sampah di masyarakat. Sampai saat ini, kita belum melihat penekanan literatur yang spesifik terhadap pengolahan sampah.

Belum ada gerakan literasi khusus yang dilakukan dengan serius. Penguatan literasi sampah di Kota Pekalongan, dimulai dengan literatur yang paling

sederhana baik di dunia pendidikan maupun kepada masyarakat umum secara langsung. Dimulai dari penguatan slogan atau tagline seputar sampah. Misalnya, mengubah tagline yang selama ini kita kenal “buanglah sampah pada tempatnya” menjadi “sampahmu tanggung jawabmu”, atau “sampahmu cerminan dirimu”. Dengan meningkatkan literasi sampah, masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan melakukan tindakan yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil IKLH Kota Pekalongan pada tahun 2018-2022 yang disajikan dalam Tabel 2.98 berikut.

Tabel 2.98 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2018	46,00	98,82	23,50	52,85
2019	46,00	99,05	23,50	52,92
2020	35,33	79,96	23,60	50,84
2021	45,00	80,21	22,40	54,31
2022	45,33	79,29	23,77	54,36

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami tren naik setiap tahunnya. Jika dilihat masing-masing komponen maka IKU merupakan komponen yang berkontribusi baik terhadap IKLH, sementara dua komponen lainnya yaitu IKA dan IKTL nilainya masih sangat rendah. Sedangkan IKLH di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,84. Pada tahun 2022 IKLH mengalami peningkatan menjadi 54,36, kondisi ini dikarenakan terjadinya peningkatan pada komposisi IKA dan IKU.

Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan Fecal Coliform. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrien bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Metode perhitungan IKTL yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami Sementara itu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022 masih sama, dengan nilai IKTL yang kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota

Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman/kawasan terbangun, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

Kualitas tutupan lahan dapat diukur dengan berbagai parameter seperti keragaman jenis vegetasi, kepadatan vegetasi, keberadaan dan kondisi habitat satwa liar, serta kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh tutupan lahan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan kota, seperti menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati dan menyerap polusi udara. Oleh karena itu, RTH menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan.

Persentase tersedianya luasan RTH publik di Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,89 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,6 persen. Hal ini disebabkan adanya revisi RTRW pada tahun 2020 sehingga dilakukan pendataan ulang untuk luasan RTH serta adanya perubahan perhitungan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Persentase luasan RTH tersebut stagnan di angka 2,89 persen pada tahun 2022, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.99 berikut.

Tabel 2.99 Ruang Terbuka Hijau (RTH)
di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik (persen)	18,60	18,60	18,60	2,89	2,89

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2023

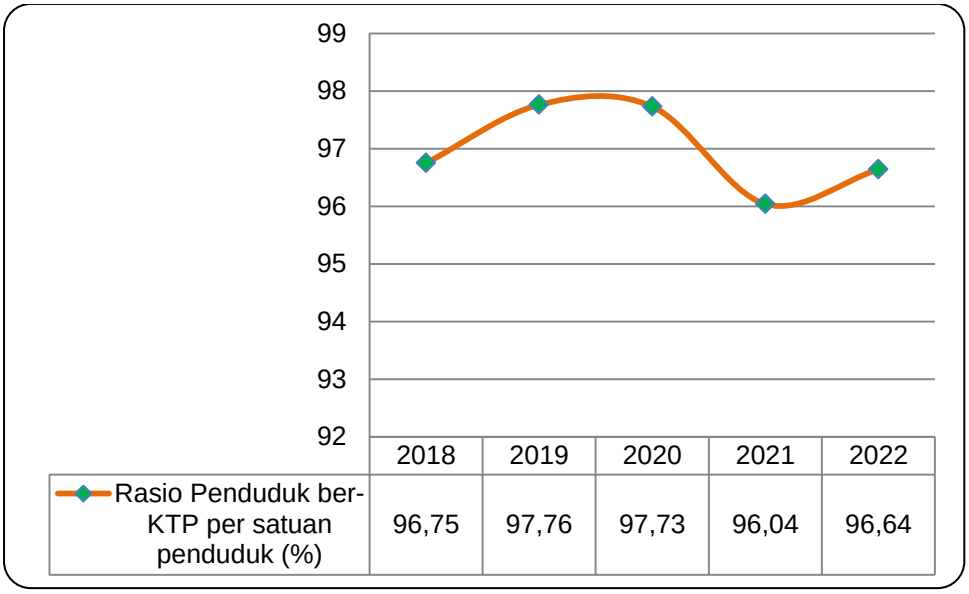
Kegiatan edukasi peduli Lingkungan hidup dilakukan melalui media sosial dan media elektronik yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat dan komunitas secara luas. Pengaduan masyarakat terkait kasus lingkungan ditindaklanjuti dengan cara mediasi antara pihak pengadu dan pihak yang diadukan, akan tetapi ketik kemudian rekomendasi yang didapatkan tidak dilaksanakan oleh pihak yang diadukan maka terkesan tidak ada tindaklanjut dari pemerintah. Tetapi pengaduan yang sifatnya permohonan pemotongan pohon tetap kita hubungi pengadu tetapi kita kaji dahulu apakah perlu dipotong atau tidak.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pada tahun 2022 mencatat kepemilikan KTP-el sebanyak 96,64 persen. Angka tersebut lebih besar 0,60 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu 96,04 persen.



Gambar 2.44 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2023

b. Persentase Penduduk ber-NIK

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2018-2022), semua penduduk di Kota Pekalongan telah memiliki NIK sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.100 berikut.

Tabel 2.100 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100

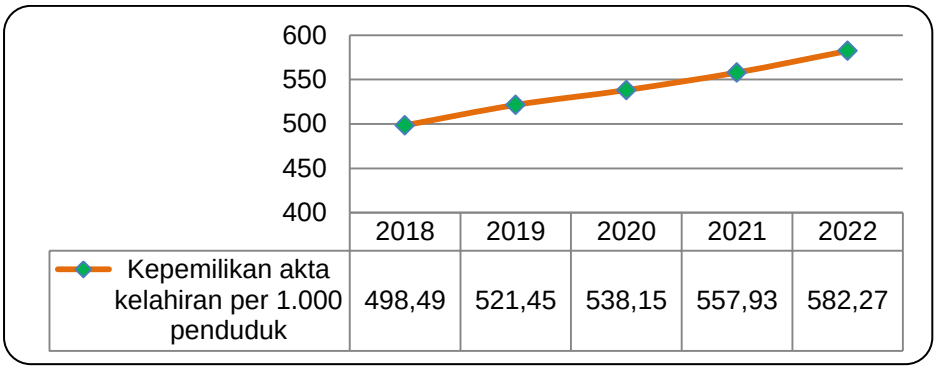
Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2023

c. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Semula sebanyak 498,49 per 1.000 penduduk di tahun 2018, menjadi 582,27 per 1.000 penduduk di tahun 2022. Secara lengkap, data kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam Gambar 2.45 berikut.



Gambar 2.45 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan (diolah), 2023

d. Penerbitan Akta kematian

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian.

Dalam lima tahun terkahir, penerbitan akta kematian terus meningkat. Pada tahun 2018 telah diterbitkan sebanyak 2.691 akta, pada tahun 2019 diterbitkan sebanyak 2.797 akta. Setiap tahun terus bertambah hingga pada tahun 2021 diterbitkan sebanyak 3.970 akta sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.101 berikut.

Tabel 2.101 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Akta Kematian
2018	2.691
2019	2.797
2020	3.220
2021	3.970
2022	3.020

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2022 (diolah) dan evaluasi RKPD TW. IV tahun 2022, 2023

e. Penerbitan Akta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Di Kota Pekalongan, akta nikah hanya diterbitkan bagi penduduk non Islam. Sepanjang lima tahun terakhir, akta nikah yang diterbitkan tidak banyak, sekitar 50-60 lembar per tahunnya.

Tabel 2.102 Penerbitan Akta Nikah
di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Akta Nikah
2018	60
2019	46
2020	45
2021	50
2022	52

Sumber: Dindukcapil, Kota Pekalongan dalam Angka 2022 (diolah) dan Evaluasi RKPD TW. IV tahun 2022, 2023

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. Jenis LKK paling sedikit meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada tahun pertama dari periode 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini berkurang menjadi 27 LPM pada tahun 2014 hingga sekarang, seiring dengan penggabungan kelurahan dari 47 menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.103 berikut.

Tabel 2.103 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah LPM
2018	27
2019	27
2020	27
2021	27
2022	27

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2023

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah dalam memberdayakan peran ibu-ibu di Kota Pekalongan. Jumlah PKK aktif tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 32 PKK, terdiri dari 27 PKK kelurahan, 4 PKK kecamatan dan 1 PKK tingkat kota.

Tabel 2.104 PKK Aktif
di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2018	32
2019	32
2020	32
2021	32
2022	32

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2023

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu tahun 2018-2022 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2019-2021 jumlah Posyandu aktif sebesar 413 (termasuk data dari Dinkes tahun 2019), per Januari tahun 2022 data posyandu aktif bertambah 1. Angka tersebut lebih banyak dari jumlah posyandu aktif pada tahun 2018. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.105 berikut.

Tabel 2.105 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
2018	409
2019	413
2020	413
2021	413
2022	414

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan & BPS Kota Pekalongan, 2023

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2018 - 2020 terus mengalami peningkatan. Artinya, jumlah akseptor KB semakin bertambah. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 68,47 dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 64,27. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 2.106 berikut.

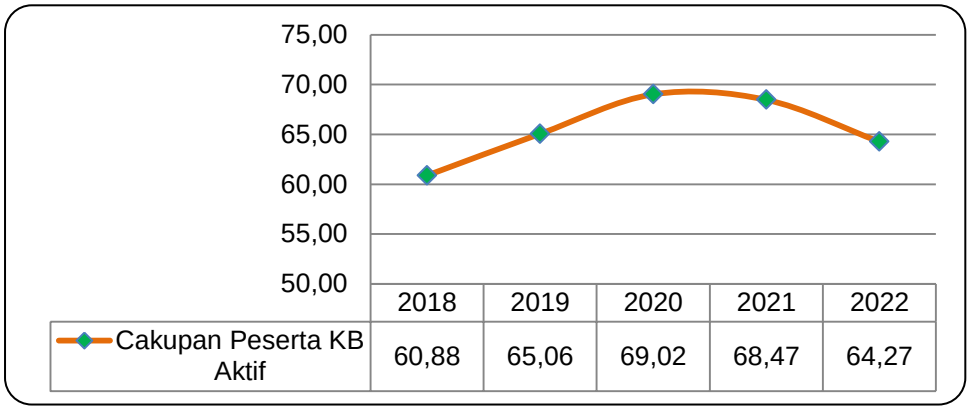
Tabel 2.106 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio
2018	44.851	27.306	60,88
2019	46.652	30.352	65,06
2020	45.836	31.636	69,02
2021	47.444	32.483	68,47
2022	27.868	43.359	64,27

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Cakupan peserta KB Aktif dalam kurun waktu tahun 2017 sampai 2021 cenderung meningkat sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.46 berikut.



Gambar 2.46 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Cakupan keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dibandingkan Jumlah Kepala Keluarga adalah 47,70 persen, menurun dari tahun 2019 sebesar 4,29 persen. Pada tahun 2021, secara persentase menurun, namun secara jumlah bertambah menjadi 41.170 keluarga. Pada tahun 2022 Menteri Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Keputusan terkait acuan dalam penentuan kriteria fakir miskin di Indonesia. Surat bernomor 262/HUK/2022 itu ditandatangani pada 31/12/2022 lalu dan memuat beberapa hal yakni:

1. menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin;
2. kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari;
3. dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka langsung dikategorikan sebagai fakir miskin;

4. dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
   a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
   b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
   c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
   d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
   e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
   f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
   g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
   h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 VA atau bukan listrik.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa dengan terbitnya surat keputusan ini maka surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga mulai tahun 2022 tidak ada lagi pendataan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.107 berikut.

Tabel 2.107 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persentase
1	2017	77.575	46.478	59,91
2	2018	77.817	44.487	57,71
3	2019	80.653	41.938	51,99
4	2020	80.840	38.563	47,70
5	2021	100.947	41.170	40,78

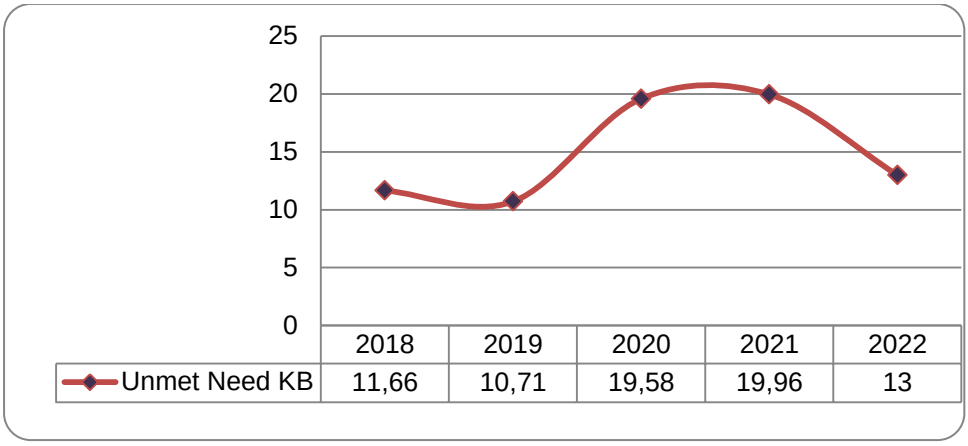
Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2022

d. Cakupan Unmet Need KB

Unmet need KB didefinisikan sebagai persentase perempuan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan namun tidak menggunakan kontrasepsi seperti IUD, PIL, suntik, implant, obat vaginal, dan kontrasepsi mantap untuk dirinya atau untuk suaminya atau wanita yang sedang hamil dan terjadinya kehamilan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang dikehendaki dan sebelum hamil tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Cakupan Unmet Need KB Kota Pekalongan dari Tahun 2018 sampai dengan 2021 cenderung mengalami peningkatan, terutama pada saat terjadinya pandemi pada tahun 2020 – 2021 yaitu sebesar 19,5 di tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi 19,96 di tahun 2021. Hal ini disebabkan pada masa pandemi kegiatan pelayanan KB tidak dilaksanakan. Namun menjelang akhir tahun 2021 kegiatan pelayanan KB mulai dilaksanakan dengan menerapkan protokoler kesehatan secara ketat sehinga cakupan Unmet Need bisa diturunkan menjadi 13 persen pada tahun 2022.

Cakupan Unmet Need KB dapat dilihat pada Gambar 2.47 sebagai berikut.



Gambar 2.47 Cakupan Unmet Need KB di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

9. Perhubungan

a. Kepadatan Lalu Lintas

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur sektor perhubungan. Lokasinya yang strategis juga digunakan sebagai tempat istirahat maupun sekedar transit untuk melanjutkan perjalanan ke daerah atau tempat selanjutnya. Saat ini terdapat dua jalur yang dapat dilalui kendaraan untuk melintasi Kota Pekalongan yaitu perlintasan Pantai Utara (Pantura) dan perlintasan Jalan Tol Transjawa yang semenjak tahun 2018 telah difungsikan. Dua jalur ini membagi kepadatan yang sebelumnya dibebankan pada satu jalur yaitu Jalur Pantura sehingga saat ini kepadatan yang terjadi akibat kendaraan besar yaitu truk dan bus berkurang.

Pada tahun 2020, pandemi *COVID-19* yang terjadi diseluruh dunia berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan, salah satunya yaitu adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan adanya kebijakan ini, arus lalu lintas menurun drastis yang mengakibatkan penurunan VC ratio menjadi 0,36. Meskipun demikian, mobilitas darat tetap dapat dilakukan. Pada tahun 2021, sudah masuk era *new normal* dimana PPKM sudah mulai longgar dan pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali dan bermunculan yang baru. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjunginya sehingga mobilitas di perkotaan cenderung ramai kembali. Pada tahun 2021 VC ratio meningkat menjadi 0,49. Dan pada tahun 2022 VC Ratio menurun menjadi 0,39. Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin merata pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio menurun, dimana artinya tidak terdapat kemacetan kendaraan pada ruas jalan-jalan kota.

Range nilai VC ratio ditakegorikan ke dalam 6 (enam) tingkat pelayanan jalan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

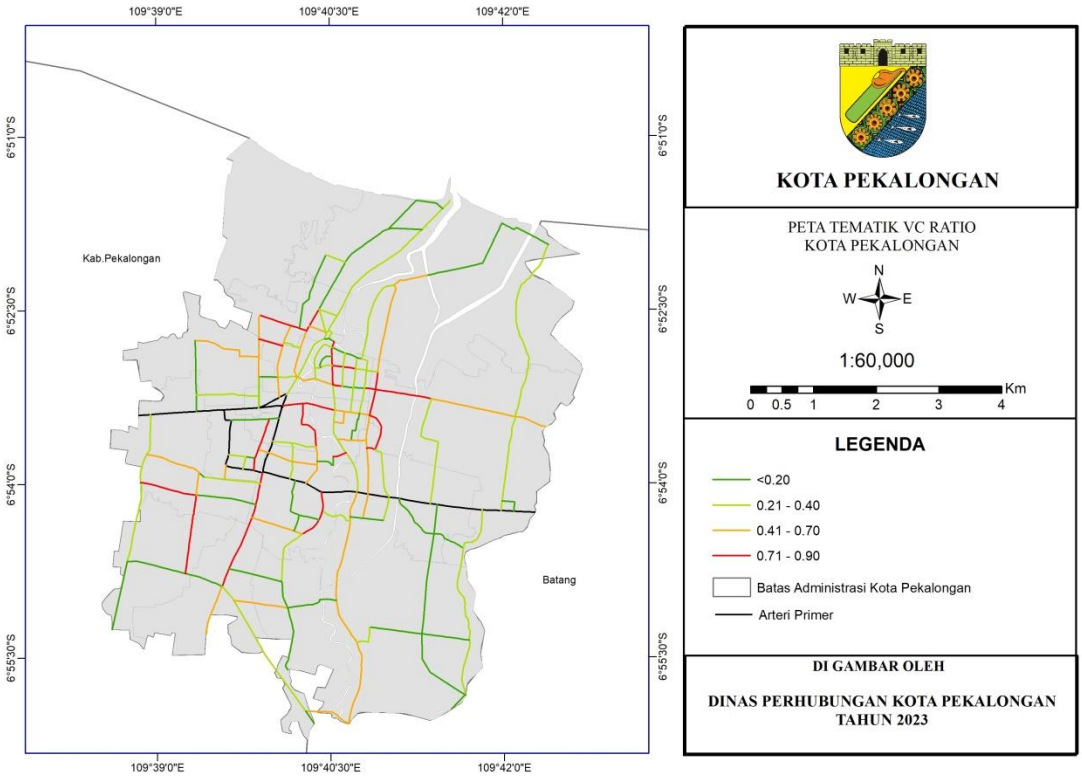
Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
A	0,0 - 0,20
B	0,21 - 0,44
C	0,45 - 0,74

Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
D	0,75 - 0,84
E	0,85 - 1, 00
F	>1, 00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Dari tabel Tingkat Pelayanan diatas, jalan – jalan yang memiliki tingkat pelayanan A, pada ruas tersebut kendaraan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan B, kendaraan dapat memilih kecepatannya namun kecepatan tersebut sedikit terbatas oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan C kecepatannya dibatasi oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan D arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas ruas jalan yang ada. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan E, kecepatannya rendah volume sudah hampir sama dengan kapasitas yang ada, pada tingkat pelayanan ini ruas jalan bisa dikatan mengalami kemacetan. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan F, arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Peta V/C Ratio ruas jalan di Kota Pekalongan disajikan dalam Gambar 2.48 berikut.



Gambar 2.48 Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat peta kinerja ruas jalan di Kota Pekalongan. Persebaran lalu lintas yang tidak merata terjadi di Kota Pekalongan, hal itu terjadi karena pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas (seperti pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, acara khusus, objek pariwisata, dan

lainnya) di Kota Pekalongan tidak merata pula. Sehingga terjadi kemacetan pada beberapa titik ruas di Kota Pekalongan kerena pada lokasi terdapat pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas, sehingga pola pergerakan lalu lintas warga kota pekalongan hanya pada ruas – ruas jalan di sekitar lokasi tersebut.

Oleh karena itu pengembangan Kawasan Pekalongan Baru sebagai pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas yang baru dapat mengurangi kemacetan kendaraan serta pola pergerakan lalu lintas di kota pekalongan akan menjadi merata sehingga kemacetan akan berkurang.

Pengembangan Kawasan Pekalongan Baru dapat menjadikan persebaran lalu lintas yang merata. Serta dalam pengembangannya akan menimbulkan akses jalan baru guna kelancaan lalu lintas di Kawasan Pekalongan Baru.

Kajian Lalu Lintas Kawasan Pekalongan Baru diperlukan untuk dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang efektif dalam penentuan kebijakan penataan Manajemen Lalu Lintas di Kawasan Pekalongan Baru.

Tingkat pelayanan disajikan dalam Tabel 2.109 berikut.

Tabel 2.109 Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D	Tingkat Pelayanan E
Jl. Indragiri	Jl. Kurinci	Jl. Teratai	Jl. Sultan Agung	Jl. KH. Mas Mansyur
Jl. Merak	Jl. Untung Suropati	Jl. Dharma Bhakti	Jl. Hayam Wuruk	-
Jl. Ahmad Yani	Jl. Merpati / Parkit	Jl. HOS Cokroaminoto	Jl. Seruni	-
Jl. Jawa	Jl. Patriot	Jl. Ki Mangun Sarkoro	Jl. Bandung	-
Jl. Otto Iskandar Dinata	Jl. H. Agus Salim	Jl. Tentara Pelajar	Jl. Urip Sumoharjo	-
Jl. Pattimura	Jl. Semarang	Jl. Nusantara	Jl. Dr. Cipto	-
Jl. Raden Saleh	Jl. Truntum	Jl. Gatot Subroto	-	-
Jl. Tritura	Jl. Jlamprang	Jl. Karya Bhakti	-	-
Jl. Majapahit	Jl. Parang Garuda Raya	Jl. Manggis	-	-
Jl. Trikora	Jl. Progo	Jl. Sulawesi	-	-
Jl. Bahagia	Jl. Tembus Hos Cokro - Dharma Bakti	Jl. Pintas Sapuro	-	-
Jl. KH. Hasyim Ashari	Jl. Wachid Hasyim	Jl. Dr. Kusuma Atmaja	-	-
Jl. Kutilang	Jl. Cenderawasih	Jl. Dr. Wahidin	-	-
Jl. Samudera Pasai	Jl. Ki Hajar Dewantara	Jl. Tondano	-	-
Jl. Surabaya	Jl. Sumatera	Jl. Manunggal	-	-

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D	Tingkat Pelayanan E
Jl. Asem Binatur	Jl. Argopuro	Jl. Salak	-	-
Jl. Cempaka	Jl. Belimbing	Jl. Pemuda	-	-
Jl. Labuan	Jl. Hasanudin	Jl. Merdeka	-	-
Jl. Melati	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Jl. Dr. Setia Budi	-	-
Jl. Kenanga	Jl. Maninjau	Jl. Gajah Mada	-	-
-	Jl. Pelita III	Jl. Jend. Sudirman	-	-
-	Jl. Diponegoro	Jl. D. Sutomo	-	-
-	Jl. P. Kemerdekaan		-	-
-	Jl. Sunan Ampel	-	-	-
-	Jl. Kemakmuran	-	-	-
-	Jl. R.A Kartini	-	-	-
-	Jl. Supriyadi	-	-	-
-	Jl. Angkatan 45	-	-	-
-	Jl. Jetayu	-	-	-
-	Jl. Letjen Suprapto	-	-	-
-	Jl. Pramuka	-	-	-
-	Jl. WR. Supratman	-	-	-
-	Jl. Imam Bonjol	-	-	-
-	Jl. Irian	-	-	-
-	Jl. Interchange Duwet	-	-	-
-	Jl. Veteran	-	-	-
-	Jl. Mataram	-	-	-
-	Jl. Kalimantan	-	-	-
-	Jl. Angkatan 66	-	-	-
-	Jl. Jeruk	-	-	-
-	Jl. Slamet	-	-	-
-	Jl. Sriwijaya	-	-	-
-	Jl. Wilis	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

Hingga saat ini selain persebaran pola pergerakan kendaraan yang tidak merata, kepadatan lalu lintas dipengaruhi oleh lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang

(AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa.

Kepadatan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekalongan saat ini bercampur antara arus lalu lintas menerus dan arus lalu lintas lokal. Hal itu menyebabkan bercampurnya kendaraan-kendaraan angkutan barang yang bermuatan berat dan kendaraan penumpang dengan kendaraan-kendaraan warga lokal Kota Pekalongan sehingga menyebabkan kemacetan. Terutama pada ruas Jl. KH Mas Mansyur yang merupakan Jalur Pantura yang berpotongan dengan perlintasan kereta api double track. Pada saat kereta melintas maka akan terjadi antrian dan tundaan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun, jika selanjutnya terdapat Jalan Lingkar Petanglong, maka arus lalu lintas akan terurai, jadi arus lalu lintas dapat terbagi menjadi 3 yaitu Perlintasan Pantura, Jalan Tol Trans Jawa dan Jalur Lingkar Petanglong.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan terbatasnya luas wilayah serta kawasan perdagangan dan jasa, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesulitan dalam mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di lokasi lain. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya pengembangan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya Jalan Lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah. Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan Kawasan Perkotaan Petanglong pada umumnya.

Diperlukan kajian Lalu Lintas terkait pembangunan jalan lingkar Petanglong dan sekaligus menjadi tanggul rob. Kajian Lalu Lintas pembangunan Jalan Lingkar Petanglong tersebut juga dapat menjadi acuan/ dasar untuk pengambilan kebijakan - Kebijakan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan serta manajemen lalu lintas seperti contohnya pembatasan kendaraan angkutan barang, peningkatan sistem transportasi umum, penerapan teknologi lalu lintas yang cerdas, dan lainnya.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul

penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

b. Angkutan Umum

Izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2018 sampai 2020 dengan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan adalah 73 izin sehingga Rasio Izin Trayek sebesar 0,00024. Hal ini memiliki makna 2,4 izin angkutan umum per 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 mengalami penurunan di angka 0,00012 dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat sementara jumlah izin trayek masih 73 izin trayek. Pada tahun 2022 mengalami penurunan izin trayek menjadi 30 izin trayek, sehingga rasio izin trayek di angka 0,00009. Penurunan izin trayek yang dikeluarkan dari 73 izin trayek (2018 - 2021) menjadi 30 izin trayek (2022) yaitu disebabkan penurunan minat Masyarakat terhadap angkutan umum menyebabkan penurunan jumlah armada yang beroperasi sehingga rasio jumlah izin trayek yang dikeluarkan menurun.

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2017 sebesar 0,00032. Hal ini memiliki makna 3,2 izin angkutan umum per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 dan 2019 berubah menjadi sebesar 0,00024. Pada tahun 2020 sedikit menurun di angka 0,00021, tahun 2021 mengalami penurunan di angka 0,00014 dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,00009.

Tabel 2.110 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2018	73	304.477	0,00024
2019	73	307.097	0,00024
2020	73	307.150	0,00024
2021	73	308.310	0,00012
2022	30	309.742	0,00009

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta angkutan regional, Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) terminal tipe A yaitu Terminal Bus Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo, dimana tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.

Berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No: SK.687/AJ/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur Faktor muat (*Load Factor*) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1993, untuk nilai *Load Factor* antara 70 persen - 110 persen. Jika nilai *Load Factor* lebih dari 110 persen maka penumpang akan merasakan kurang nyaman dalam menggunakan angkutan umum tersebut, jika nilai *Load Factor* kurang dari 70 persen menggambarkan bahwa angkutan umum tersebut kurang optimal dalam melayani pergerakan penumpang. Sedangkan

standar nilai *Load Factor* yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 adalah sebesar 70 persen. Di Kota Pekalongan *Load Factor* angkutan kota yang berkapasitas kurang lebih 12 penumpang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berada dikisaran 35 persen sampai dengan 41 persen. Kurang optimalnya angkutan kota dalam melayani pergerakan penumpang dikarenakan masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi terlebih lagi adanya angkutan *online*, sehingga load faktor angkutan kota kurang dari 70 persen.

Penurunan Load Factor angkutan tahun 2021-2022 dari 41% (2021) menjadi 37% (2022) juga disebabkan oleh penurunan minat Masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, Adapun langkah strategis yaitu dengan memperbaiki prasarana angkutan umum sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum sehingga diharapkan minat Masyarakat dapat meningkat dengan meningkatnya minat Masyarakat dalam menggunakan angkutan umum maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya load factor angkutan umum.

Tabel 2.111 Faktor Muat (*Load Factor*) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Faktor Muat (*Load Factor*) (persen)	35	37	41	41	37

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pembangunan terminal penumpang Tipe C direncanakan akan dibangun secara bertahap mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Adapun lokasi yang akan dibangun terminal penumpang Tipe C berada di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Untuk saat ini belum terlealisasinya Implementasi konkrit realisasi pembangunan Terminal Tipe C disebabkan lokasi yang direncakanan sebagai terminal Tipe C masih digunakan sebagai pasar darurat.

Dari tahun 2018 sampai dengan 2022, jumlah penumpang yang melalui terminal pada tahun 2018 sejumlah 1.938.614 orang. Pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan yaitu, dari 1.876.174 orang di tahun 2019 menjadi 771.497 orang di tahun 2020 dan menurun sebanyak 482.290 orang di tahun 2021. Penurunan ini selain karena banyaknya masyarakat yang memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi, juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi *COVID-19*. Namun pada tahun 2022 jumlah penumpang yang melalui terminal meningkat signifikan sebanyak 916.888 orang. Sedangkan otobis AKAP dan AKDP mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2021. Hal tersebut berarti bahwa dapat dikatakan persentase AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan mengalami naik turun, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.112 berikut ini.

Tabel 2.112 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP
Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Otobis AKAP AKDP	339.637	294.470	125.162	73.150	130.090
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	1.938.614	1.876.174	771.497	482.290	916.888
Persentase Angkutan Darat	17,6	15,7	16,2	15,1	14,1

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

c. Kendaraan Laik Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 140 kendaraan, kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 138 kendaraan. Tahun 2020 menurun menjadi 107 kendaraan, dan meningkat menjadi 115 kendaraan di tahun 2021. Di tahun 2022, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 126 kendaraan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 788 kendaraan, kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 829 kendaraan. Tahun 2020 menurun menjadi 817 kendaraan, dan menurun lagi menjadi 747 kendaraan di tahun 2021. Di tahun 2022, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 809 kendaraan.

Tabel 2.113 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	140	138	107	115	126
Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang melakukan Uji Kir	788	829	844	617	806
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	17,76	16,64	12,67	13,62	15,63

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendaraan ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi

pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (Smoke Tester) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan Pit Lift dan Play Detector; uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; dan speedometer tester. Dalam proses pelayanan uji kelayakan kendaraan terdapat beberapa jenis pelayanan seperti uji pertama, uji berkala, numpang uji masuk, numpang uji keluar, mutasi masuk, maupun mutasi keluar. Dan masing-masing proses pelayanan uji kelayakan kendaraan tersebut terdapat persyaratan yang harus dilampirkan ketika pelaksanaan begitu juga dengan lamanya proses uji kelayakan kendaraan umum disajikan dalam Tabel 2.114 berikut.

Tabel 2.114 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lama Pengujian (Menit)	20	30	30	30	30

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR kendaraan bermotor. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama 2017-2019 yaitu Rp 40.000,00 dan mengalami kenaikan berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 sebesar Rp 75.000,00.

Tabel 2.115 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	40.000	40.000	75.000	75.000	75.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

d. Perparkiran

Dishub Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di Kota Pekalongan yang didominasi di Jalan Urip Sumoharjo dimana setiap titik parkir disesuaikan berdasarkan surat tugas oleh juru parkir yang ditunjuk yang difasilitasi dengan perlengkapan seperti rompi petugas, peluit, bendera dan sebagainya. Adapun titik parkir yang berpotensi penarikan retribusi terbesar di Kota Pekalongan yang mampu mendongkrak capaian retribusi parkir diantaranya berada di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hasanudin, Jalan Sultan Agung, Kawasan Sorogenen, serta Alun-Alun yang mampu menyumbang hingga 60 persen. selain mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum (*on street*), Dishub Kota Pekalongan juga melakukan penarikan retribusi parkir *off street* (di luar badan jalan) seperti di Jalan Veteran depan RSUD Kraton dan trayek terminal serta parkir insidentil (biasanya saat digelar sebuah *event* kegiatan). Dalam mencapai target yang ditetapkan, Dishub Kota Pekalongan telah membentuk tim pembinaan dan pengawasan parkir yang terdiri dari unsur Subdenpom, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Data penyelenggaraan parkir di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah parkir yang berizin	361	418	419	381	376
Jumlah potensi parkir yang belum berizin	14	16	15	13	12
Jumlah seluruh parkir	375	434	434	394	388
Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin	96,27	96,31	96,54	96,70	96,91

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

e. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan. Pemenuhan kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan terakit dengan banyaknya kerusakan fasilitas lalu lintas di lapangan serta banyaknya permintaan dari warga terkait permintaan fasilitas lalu lintas sehingga diperlukan penggantian fasilitas lalu lintas dilaksanakan secara bertahap degan memperhatikan kebutuhan prioritas, kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kasus *COVID-19* yang berdampak pada *refocusing* anggaran.

Tabel 2.117 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pemasangan Rambu lalu lintas Pada Tahun n	141	2	33	16	10
Jumlah Rambu lalu lintas yang Seharusnya Tersedia	290	150	100	30	22
Persentase Pemasangan Rambu lalu lintas	48,62	1,33	33,00	53,33	45,45
Jumlah Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) Pada Tahun n	5	0	0	0	0
Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) yang Seharusnya Tersedia	15	10	10	10	0
Persentase Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pada Tahun n	1	2	0	0	0
Jumlah Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang Seharusnya Tersedia	5	4	2	1	0
Persentase Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan guardrail Pada Tahun n	4	0	0	0	0
Jumlah guardrail yang Seharusnya Tersedia	14	10	10	0	0
Persentase Pemasangan guardrail	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan marka jalan Pada Tahun n	25 lokasi	13 lokasi	12 lokasi	10 lokasi	8 lokasi
Jumlah marka jalan yang Seharusnya Tersedia	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan
Persentase Pemasangan marka jalan	16,67	8,67	8,00	6,67	5,33

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

f. Perkeretaapian

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.118 mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2019 merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan yaitu sejumlah 863.851 penumpang. Perkembangan dari tahun 2017-2019 menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Namun terjadi penurunan drastis jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa layanan kereta api pada tahun 2020 menjadi 271.920 orang, dan meningkat di tahun 2021 menjadi 335.956 orang. Hal tersebut karena karena pandemi *COVID-19* membuat adanya larangan bepergian ke luar daerah di tahun 2020 dan era new normal yang membolehkannya kembali bepergian ke luar daerah dengan batasan-batasan tertentu.

Tabel 2.118 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2018	821.085
2019	863.851
2020	271.920

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2021	335.956
2022	420.786

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan Dalam Angka tahun 2023, 2023

Kota Pekalongan berada dibawah daerah operasi PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang. Panjang jalur operasional kereta api DAOP 4 Semarang adalah sepanjang 656 km, dimana jalur kereta sepanjang 6,85 km berada di wilayah Kota Pekalongan, dengan jumlah perlintasan sebindang sebanyak 10 perlintasan.

Kota Pekalongan memiliki 10 Perlintasan Sebidang Kereta Api yang semua lokasinya sudah tersedia palang pintu kereta api. Pengelolaan Palang pintu kereta api Kota Pekalongan yaitu oleh Dinas perhubungan kota Pekalongan dan PT. Kereta Api Indonesia, Disnas Perhubungan Kota Pekalongan mengelola 4 pos perlintasan sebidang dimana 4 titik perlintasan sebidang tersebut sudah memiliki pos petugas jalur lintasan kereta api dan palang pintu. Yang terdiri dari Pos Gamer, Pos Dekoro, Pos Pusri dan Pos Polisi Militer. Untuk 6 pos perlintasan sebidang selanjutnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia. Terdiri dari Pos Tirto, Pos Bendan, Pos Sapuro, Pos Keputran, Pos Noyotaan dan Tondano. Dimana 6 titik sudah memiliki palang pintu, dan 5 titik sudah terdapat Pos petugas jalur lintasan kereta api.

Tabel 2.119 Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Rel Kereta Api	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km
Jumlah Perlintasan Rel dengan jalan	10	10	10	10	10
Perlintasan Sebidang	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Sebidang	-	-	-	-	-
Perlintasan Resmi	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Resmi	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

g. Keselamatan Lalu Lintas

Angka kecelakaan secara umum menggambarkan kecelakaan total yang terjadi. Di dalam angka kecelakaan terdapat angka kematian yang menggambarkan kecelakaan yang korbannya sampai meninggal dunia. Meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya perkembangan kota, meningkatnya aktivitas masyarakat baik, ekonomi, sosial dan budaya, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya jumlah kendaraan pada sistem lalu lintas jalan tak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan yang terjadi di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.120 berikut.

Tabel 2.120 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan	155,44	155,44	153,41	153,41	152,60
Jumlah Kejadian Kecelakaan	91	122	116	93	119
Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun	0,59	0,78	0,76	0,61	0,77

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan tabel diatas frekuensi atau rata-rata kejadian kecelakaan per kilometer di Kota Pekalongan adalah 1 kejadian per tahunnya.

Tabel 2.121 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Korban Kecelakaan	116	149	142	111	163
Luka-luka	84	114	117	93	130
Meninggal Dunia	32	35	25	18	33
Jumlah Penduduk	304.477	307.097	307.150	315.997	309.742
Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk	10,51	11,4	8,14	5,7	10,65

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2022

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	RSUD BENDAN	91,35	Informatif
2	DPUPR	88,69	Menuju Informatif
3	BKPSDM	82,45	Menuju Informatif
4	INSPEKTORAT	81,83	Menuju Informatif
5	DPMPTSP	75,34	Cukup Informatif
6	BAPPEDA	73,70	Cukup Informatif

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
7	DKP	72,99	Cukup Informatif
8	BPKAD	71,78	Cukup Informatif
9	DINDUKCAPIL	70,37	Cukup Informatif
10	KEC. PEKALONGAN SELATAN	68,93	Cukup Informatif
11	SEKRETARIAT DPRD	66,59	Cukup Informatif
12	DINDAGKOP UKM	66,49	Cukup Informatif
13	DINPERPA	65,37	Cukup Informatif
14	DINPERINAKER	65,30	Cukup Informatif
15	DINARPUS	64,74	Cukup Informatif
16	BPBD	61,57	Cukup Informatif
17	DPMPPA	61,06	Cukup Informatif
18	SATPOL P3KP	61,01	Cukup Informatif
19	DINPERKIM	60,82	Cukup Informatif
20	DINSOS P2KB	56,95	Kurang Informatif
21	DINKES	56,12	Kurang Informatif
22	DINPARBUDPORA	55,26	Kurang Informatif
23	DLH	54,58	Kurang Informatif
24	KEC. PEKALONGAN TIMUR	52,77	Kurang Informatif
25	DINDIK	50,44	Kurang Informatif
26	KEC. PEKALONGAN BARAT	50,40	Kurang Informatif
27	SETDA	50,19	Kurang Informatif
28	DINHUB	49,30	Kurang Informatif
29	KEC. PEKALONGAN UTARA	48,33	Kurang Informatif
30	BAKESBANGPOL	45,06	Kurang Informatif

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2023

Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki web dengan portal http://pekalongankota.go.id. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2018 - 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah SIM	76	92	107	179	199

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2023

Setiap tahun Dinas Kominfo membangun dan mengembangkan SIM/aplikasi, baik yang digunakan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun masyarakat. Salah satu SIM/aplikasi yang dibangun adalah SIM/aplikasi satu data terpadu yang diberi nama PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Batik) dengan alamat http://pusaka.pekalongankota.go.id. SIM/aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data yang bersifat *single data* sehingga dapat dijadikan pedoman.

Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas BKR, Wirausaha/Pelaku Usaha, KNPI, BKM, LPM, Guru TIK/BTIK/SMP/MTs, Blogger, Pecinta Internet Hebat, Animator, Vlog Kota PKL, Robotik, Puskomas, Pengelola Web Sekolah, Karang Taruna, Anti Hoax, Film, Himpaudi, Telecenter, MGMP Multipedia, Explore Pekalongan, Relawan TIK, KIM, dan Dewan TIK.

Dalam hal infrastruktur, dibutuhkan jaringan komunikasi sebagai media penyebar luasan data dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Adapun jaringan telepon genggam antara lain Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2022 di Kota Pekalongan sebanyak 100 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan disajikan dalam Tabel 2.124 berikut.

Tabel 2.124 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jaringan telepon genggam	12	7	7	7	7
Stasioner	80	80	80	84	100
Rasio jaringan komunikasi	0,15	0,09	0,09	0,08	0,07

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2023

Keterangan: jaringan telepon genggam terdiri dari Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G.

Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Wawasan, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.125 berikut.

Tabel 2.125 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Surat Kabar	15	15	15	15	12

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan

spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Tegal dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi disajikan dalam Tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyiaran Radio	14	17	8	7	7
Jumlah Penyiaran TV	16	20	20	3	6

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2023

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Kota Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2018-2022 cenderung naik. Pada tahun 2018, jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15.096 pelanggan. Jumlah tersebut cenderung meningkat sampai tahun 2022 dengan jumlah pelanggan sebanyak 18.505 pelanggan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.127 berikut.

Tabel 2.127 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2018-2022

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (persen)
2018	15.096	75.618	19,96
2019	10.531	76.269	13,81
2020	11.254	84.296	13,35
2021	11.532	100.947	11.42
2022	18.503	87.758	21,08

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2021 dan Dinas Kominfo Kota Pekalongan , 2023

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi: Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Pada tahun 2019, Kota Pekalongan dapat mencapai indeks SPBE sebesar 3,14 (predikat Baik) dengan 3 domain yang dinilai yaitu Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola dan Domain Layanan. Pada tahun 2020 Kota Pekalongan tidak menjadi lokus survei dari Kemenpan RB sehingga tidak dilakukan penilaian. Pada tahun 2021 kembali dilakukan penilaian dan mencapai indeks SPBE sebesar 2,82 (predikat Baik).

Indeks tersebut turun dikarenakan adanya tambahan Domain Manajemen sebagai komponen penilaian. Pada tahun 2022 Kemenpan RB tidak melakukan penilaian SPBE Kota Pekalongan dikarenakan nilai 2,82 sudah masuk kategori “baik”, dan Kemenpan RB melakukan penilaian pada Daerah lain yang indeksnya masih kurang baik.

Hasil penilaian SPBE tahun 2021 secara detil pada setiap domain disajikan dalam Tabel 2.128 berikut.

Tabel 2.128 Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Domain SPBE	2021
1	Kebijakan	2,80
2	Tata Kelola	2,10
3	Layanan	3,75
4	Manajemen	1,36
Indeks SPBE		2,82

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2023

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Sebagai upaya untuk meningkatkan peran Koperasi dan UMKM, pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif agar menjadi aktif kembali, pelatihan terhadap sumberdaya koperasi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terus gencar dilaksanakan. Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi yang dilaksanakan terhadap koperasi diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan yang kerap timbul dalam pengurus internal koperasi, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia yang berazaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Tabel 2.129 menunjukkan data koperasi di Kota Pekalongan tahun 2018 - 2022. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah seluruh koperasi di Kota Pekalongan mengalami kenaikan sejumlah 5 Koperasi. Selanjutnya jumlah koperasi aktif di Kota Pekalongan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021,sebanyak 7 Koperasi dimana 5 diantaranya merupakan koperasi yang baru berdiri dan 2 yang lain adalah koperasi yang dulunya tidak aktif menjadi koperasi aktif. Peningkatan jumlah koperasi aktif dan penambahan jumlah koperasi di Kota Pekalongan tersebut merupakan hasil dari adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi serta penerapan peraturan Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tabel 2.129 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah seluruh Koperasi	Persentase koperasi aktif
2018	236	281	83,93
2019	237	281	84,34
2020	272	303	89,77
2021	141	277	50,90
2022	148	282	52,48

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2023

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Tabel 2.130 merupakan tabel jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2018-2022. Berdasarkan data tersebut jumlah UMKM di Kota Pekalongan terus mengalami kenaikan. Jumlah Pedagang Pasar mengalami kenaikan dikarenakan telah diresmikannya Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras yang dulunya merupakan Pasar Sugihwaras. Jumlah industri kecil dan menengah juga mengalami kenaikan, hal ini menggambarkan adanya peningkatan sekono dari sektor UMKM di Kota Pekalongan.

Tabel 2.130 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Komponen UMKM				Jumlah
	Perdagangan (SIUP)	Industri Kecil Menengah	Pedagang Pasar	Pedagang Kaki Lima	
2018	9.115	5.476	6.400	914	21.905
2019	9.314	6.152	6.600	914	22.980
2020	9.115	6.594	6.610	914	23.233
2021	9.916	6.215	6.610	914	23.655
2022	9.900	6.235	6.700	975	23.810

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2023

12. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Jumlah investasi mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Apalagi pada tahun 2018-2022, nilai investasi mengalami kecenderungan yang meningkat. Namun demikian, akibat pandemi COVID-19 maka nilai investasi tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nilai investasi tahun 2022 kembali meningkat, sehingga pada dasarnya nilai investasi memiliki kecenderungan yang meningkat pada tahun 2018-2022.

Sepanjang tahun 2018-2022, investasi terbesar terjadi pada tahun 2019, dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.228,66 Milyar, dengan jumlah investor sebanyak 745 investor, jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 8.377 orang dan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 11,24. Berdasarkan kecenderungan yang terjadi maka nilai investasi sepanjang lima tahun terakhir berkecenderungan meningkat, terutama tahun 2018-2022. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan sehingga nilai investasi tahun 2020 menurun tajam di angka Rp. 193,116 Milyar dan meningkat kembali pada tahun 2021, menjadi sebesar Rp. 390,348 Milyar. Pandemi yang berangsur pulih berdampak positif pada investasi. Sebanyak 2002 investor masuk di Kota Pekalongan dan jumlah nilai investasi naik sebesar Rp. 3.188,411 Milyar dengan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 17.714 orang. Jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama 5 (lima) tahun disajikan dalam Tabel 2.131 berikut.

Tabel 2.131 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Investor	202	745	181	181	2002
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar)	175,150	3.228,660	193,116	390,348	3.188,411
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan	1.274	8.377	2.349	2.044	17.714
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	6,31	11,24	12,98	11,29	8.84

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2023

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Pekalongan tahun 2018-2022 dapat dikatakan fluktuatif tiap tahunnya. Realisasi PMDN tertinggi tercapai di tahun 2019 sebesar Rp.3.228,66 milyar dan mengalami penurunan signifikan di tahun 2020 menjadi Rp.193,12 Milyar. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi PMDN menjadi sebesar Rp.390,35 Milyar. Peningkatan realisasi PMDN tercatat kembali di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3078,505 Milyar.

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp. 109,905 Milyar setelah lima tahun lampau tidak ada realisasi PMA. Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 2.132 berikut.

Tabel 2.132 Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)	175,150	3.228,660	193,116	390,348	3.078,505
Realisasi PMA Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)	0	0	0	0	109,905

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2023

Tantangan penanaman modal di Kota Pekalongan ke depan, terutama terkait dengan kondisi geografis wilayah yaitu keterbatasan lahan. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km2. Dari data genangan banjir dan rob tahun 2021, luas wilayah yang terkena dampak banjir dan rob adalah sebesar 1.730 Ha atau 37,27%. Selain itu, luas lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) adalah 521 hektar. Lahan yang dialokasikan untuk kawasan perdagangan dan jasa seluas 386 Ha serta kawasan peruntukan industri adalah seluas 189 Ha. Berdasarkan data tersebut maka luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman modal semakin terbatas, karena kecenderungan penanaman modal di wilayah Kota Pekalongan terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa, sektor industri pengolahan, sektor perumahan dan kawasan permukiman, sektor perikanan, serta sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Salah satu upaya yang dilakukan dan akan terus diperkuat untuk menarik penanaman modal adalah optimalisasi kemudahan perizinan dan non perizinan di wilayah Kota Pekalongan. Apalagi, seluruh daerah telah berlomba untuk menarik investor untuk menanamkan modal di daerahnya.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan PLTU Batang harus dimanfaatkan wilayah Kota Pekalongan sebagai peluang untuk melakukan sinergi agar Kota Pekalongan dapat menerima manfaat dari pengembangan kawasan di wilayah Kabupaten Batang. Termasuk juga kerjasama dengan wilayah sekitar yaitu Kabupaten Pekalongan harus diperkuat karena interaksi ekonomi yang kuat selama ini dalam berbagai bidang.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu 2018-2022 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat. Semula berjumlah 42 *event* pada tahun 2018, menjadi 57 *event* di tahun 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan *event* tersebut. Namun dikarenakan adanya pandemi *COVID-19,* penyelenggaraan festival seni dan budaya menurun menjadi hanya ada 6 *event* di tahun 2020 dan 4 *event* di tahun 2021 dan 2022. *Event* yang diselenggarakan di tahun 2022 antara lain Carnaval Batik, Pekalongan Art Festival, Pekan Seni dan Pekalongan Music Festival.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Meskipun merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti disajikan dalam Tabel 2.133 berikut.

Tabel 2.133 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Kepemudaan	9	26	24	24	16
Jumlah kegiatan Kepemudaan	8	8	8	10	16
Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk 30 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Pada tahun 2019-2020, jumlah organisasi olahraga menjadi 31 organisasi termasuk organisasi utama olahraga yakni KONI. Ada penambahan jumlah organisasi olahraga pada tahun 2021 hingga tahun 2022 menjadi 34 organisasi. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 7 sampai 15 kegiatan. Sedangkan jumlah lapangan olahraga masih tetap 55 lapangan selama tahun 2018-2022 dan perlu ditingkatkan.

Tabel 2.134 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Olahraga	30	31	31	34	34
Jumlah kegiatan Olahraga	7	8	8	10	15
Jumlah Lapangan Olahraga	55	55	55	55	55

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

14. Statistik

Kebutuhan akan menentukan keputusan merupakan hal yang sangat penting dengan harapan sajian data terkumpul, terkelola dan termanfaatkan secara akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah terakses dan dibagipakaikan. Akan tetapi kondisi yang ada saat penyajian data sendiri-sendiri sehingga akan menjadi data tidak sempurna dan bias dalam memutuskan karena tidak saling terintegrasi. Mengintegrasikan data-data yang sudah adapun sangat sulit karena penyajiannya yang berbeda menjadi tumpang tindih yang sulit dipadukan dan merasa punya data dan saling menutup sendiri. maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang mendasari perubahan-perubahan dalam pengelolaan penyajian

Perubahan melalui pasal 37 ayat 6 disebutkan bahwa akses data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata selaku pengguna data pada instansi pusat dan daerah. Dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar instansi pusat dan daerah.

Di masa transisi saat ini penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah selain rutinitas cetakan masih berkelanjutan menjadi kegiatan tersendiri juga sudah mengelola data terpadu dalam bentuk PDA (Pekalongan Dalam Angka) juga menyajikan data sektoral beralamatkan pusaka.pekalongankota.go.id yang masih proses dengan berpedoman pada pasal 37 ayat 6 tentang Admin data (pejabat pengelola informasi yang bertanggungjawab) dan Walidata selaku pengguna data.

kedepan isian oleh OPD yang menyajikan sebagai admin dan data akan disajikan sesuai kebutuhan.

15. Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Persandian merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yakni Urusan Wajib Pemerintah Daerah ,dalam kelompok Non Pelayanan Dasar. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan Persandian satu rumpun bersama dengan urusan Komunikasi dan Informatika dan urusan Statistik. Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada bagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga mempunyai menyangkut keamanan informasi.

Arah Perubahan Paradigma Penyelenggaraan Persandian di Daerah:

- Melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian;

- Layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi;
- Penyediaan layanan keamanan e-government;
- Tidak hanya dilakukan oleh Sandiman;
- Secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Tidak hanya sekedar kirim terima berita;
- Tidak hanya melayani Kepala Daerah, namun juga perangkat daerah termasuk staf;
- Tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah, pelaksanaan persandian di Daerah meliputi 2 (dua) ruang lingkup, yakni:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota melalui:
   a. Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
   b. Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
   c. Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik;
   d. Penyediaan layanan Keamanan Informasi.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten / kota.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu 2017-2021 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat. Semula berjumlah 42 *event* pada tahun 2018, menjadi 57 *event* di tahun 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan *event* tersebut. Namun dikarenakan adanya pandemi *COVID-19,* penyelenggaraan festival seni dan budaya menurun menjadi hanya ada 6 *event* di tahun 2020 dan 4 *event* di tahun 2021. *Event* yang diselenggarakan di tahun 2021 antara lain Pentas Seni Virtual Pekan Batik Nusantara, Launching Saroeng Batik Kauman, Launching Saroeng Batik Pesindon dan Pentas Seni Virtual.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Meskipun merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti disajikan dalam Tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	42	57	6	4	4
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4
Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	282	282	282	282	282

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan *brand image* Kota Pekalongan sebagai *world city of batik* dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Pada tahun 2020, dikarenakan pandemi *COVID-19* Pemerintah Kota Pekalongan hanya menyelenggarakan beberapa even seni dan budaya dengan total 6 *event.* Bahkan pada tahun 2021 tidak ada penyelenggaraan festival/pentas seni/*event.* Tahun 2022 kembali diadakan event seni dan budaya sebanyak 4 *event* sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.136 berikut.

Tabel 2.136 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ *Event* di Kota Pekalongan Tahun 20218 - 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelenggaraan	42	57	6	0	4

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat berupaya melestarikan semua seni budaya yang ada dengan cara melakukan pembinanan, fasilitasi dan penyelenggaraan event seni budaya. Pada tahun 2019 dan 2020 dikelompokkan terdapat 17 jenis seni budaya, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 12 jenis seni budaya. dikarenakan selama masa pandemi banyak event seni budaya yang tidak diselenggarakan dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebanyak 19 jenis seni budaya.

Tabel 2.137 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2019-2022

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Simtuduror	Simtuduror	Seni Lukis	Simtuduror
2	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik
3	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Ketoprak
4	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari
5	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Sintren
6	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan
7	Perfilman	Perfilman	Perfilman	Rampak
8	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Band
9	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)
10	Samroh	Samroh	Dekorasi	Samroh
11	Terbang	Terbang	Sastra	Terbang/Genjring/Ja

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Genjring/Jawan	Genjring/Jawan		wan
12	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong
13	Reklame	Reklame		Gendukan
14	Dekorasi	Dekorasi		Wayang
15	Seni Lukis	Seni Lukis		Seni Lukis
16	Kerajinan	Kerajinan		Kerajinan
17	Sastra	Sastra		Reog
18				Kuntulan
19				Barongan

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan, jumlah pengunjung perpustakaan terbilang cukup tinggi meskipun angkanya fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 89.682 orang, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 83.068 pengunjung. Pada tahun 2019 jumlahnya meningkat lagi menjadi 90.150, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Hal itu terjadi karena kondisi pandemi COVID-19 maka jumlah kunjungan menurun drastis menjadi 39.885. Pada tahun 2021 dengan diakannya berbagai macam kegiatan, jumlah pengunjung perpustakaan mulai meningkat dengan jumlah 64.527 orang kemudian pada 2022 terdapat kenaikan juga dengan jumlah kunjungan 66.204 orang. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan mulai tahun 2018 sampai tahun 2022.

Tabel 2.138 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2018	83.068	261.944	0,32
2019	90.150	261.944	0,34
2020	39.885	258.543	0,16
2021	64.527	268.780	0,24
2022	66.204	265.152	0.25

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2023

Sementara itu jumlah perpustakaan di Kota Pekalongan relatif tetap. Hanya jumlah perpustakaan RW yang berkurang, dari 105 perpustakaan di tahun 2018 - 2022, berkurang menjadi 94 di tahun 2019, di tahun 2020 dan 2021 kembali berkurang menjadi 90 dan pada tahun 2022 berkurang lagi menjadi 86. Hal ini disebabkan banyak perpustakaan RW yang tidak aktif karena berbagai faktor, diantaranya terkena dampak rob di wilayah utara dan di wilayah lain juga pengelola perpustakaan yang tidak aktif. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Uraian Data	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perpustakaan Umum Kota Pekalongan	1	1	1	1	1
Perpustakaan Keliling	3	3	4	4	4
Perpustakaan RW	105	94	90	90	86
Perpustakaan SD/MI	77	77	77	77	77
Perpustakaan SLTP	34	34	34	34	34
Perpustakaan SLTA	23	23	23	23	23
Perpustakaan Perguruan Tinggi	6	6	6	6	6

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2023

18. Kearsipan

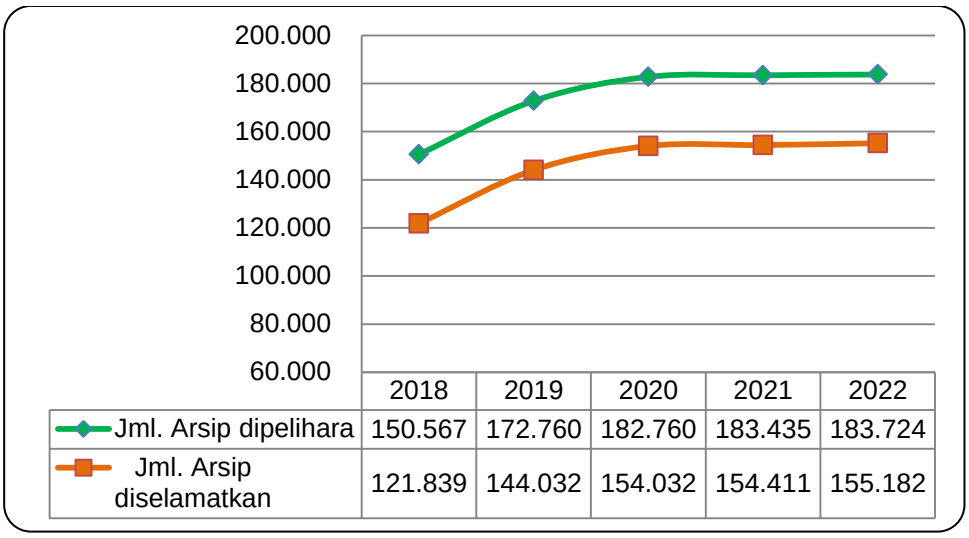
Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2017 - 2022 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Pada tahun 2017 hanya ada 22 PD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku. Namun pada tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupaya melakukan percepatan, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PD sehingga dapat meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dari 22 PD menjadi 49 PD. Sampai tahun 2021 masih stagnan pada angka 49 PD yang mengelola arsip secara baku serta 24 PD pada tahun 2022 seperti disajikan dalam Tabel 2.140. Adanya perubahan jumlah Perangkat Daerah dari 66 PD menjadi 30 PD didasari pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota ekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pekalongan. Dimana terdapat 3 tipe Perangkat Daerah, yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C.

Tabel 2.140 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
2018	66	49	74,24
2019	66	49	74,24
2020	66	49	74,24
2021	66	49	74,24
2022	30	24	80,00

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2023

Selain pengelolaan, penyelamatan arsip juga sama pentingnya. Tindakan ini dilakukan untuk menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Jumlah arsip yang dipelihara dan diselamatkan disajikan dalam Gambar 2.49 berikut.



Gambar 2.49 Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2023

Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Grafik diatas menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2018-2022 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

Salah satu jenis arsip yang dikelola yaitu arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi tetapi arsip tetap harus disimpan dan dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan nilai guna arsip. Tidak banyak orang yang memanfaatkan arsip statis. Pada tahun 2018, jumlah orang yang memanfaatkan arsip statis sebanyak 28 orang, pada tahun 2019 meningkat sebanyak 48 orang. Pada tahun 2020 meningkat meningkat menjadi 50 orang. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 66 orang yang memanfaatkan arsip statis dan tahun 2022 sebanyak 23 orang.

Tabel 2.141 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Pengguna Arsip (orang)			Total (Orang)
	Masyarakat	Mahasiswa/Pelajar	Peneliti	
2018	7	20	1	28
2019	10	36	2	48
2020	7	42	1	50
2021	19	46	1	66
2022	2	10	11	23

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2023

Dalam mengelola arsip, dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan yang memiliki nilai kelayakan dan kualitas dalam profesionalisme dan kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Seiring dengan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan jumlah arsiparis untuk

mengelola kearsipan. Tercatat di tahun 2018 terdapat 3 orang arsiparis, dan bertambah 4 orang sehingga total sampai tahun 2022 adalah 7 orang. Dari ketujuh orang arsiparis tersebut, 1 orang tidak perlu uji kompetensi karena masih menggunakan aturan lama, 1 orang tidak dapat mengikuti uji kompetensi karena berpendidikan SMA (untuk dapat mengikuti uji kompetensi, minimal berpendidikan D3), dan 5 orang belum memiliki sertifikat.

Tabel 2.142 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Arsiparis (orang)	Sertifikasi Kompetensi	Persentase
2018	3	0	0
2019	3	0	0
2020	7	0	0
2021	7	0	0
2022	7	0	0

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2023

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kota Pekalongan memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif.

Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 jauh dari target yang diharapkan yaitu sebesar 65,58 persen dari target sebesar 15.300 ton, dengan realisasi 10.033 ton. Pencapain target budidaya ikan payau sebesar 1.200 ton juga tidak terpenuhi, dengan realisasi sebesar 541,02 ton (45,09 persen). Pencapaian produksi ikan air tawar meningkat pada tahun 2022 sebesar 93,1 ton dari target sebesar 83 ton, atau tercapai 86,31 persen. Perkembangan produksi ikan tangkap, budidaya air payau dan budidaya air tawar mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021.

Secara lengkap Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun (tahun 2017-2021) disajikan dalam Tabel 2.143 berikut.

Tabel 2.143 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 (kg)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ikan Tangkap					
a. Jumlah Produksi Ikan	10.980	14.992	13.887	9.234	10.033
b. Target Daerah	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Persentase Produksi	71,76	97,99	90,76	60,35	65,58
Ikan Budidaya Air Payau					
a. Jumlah Produksi Ikan	1.698,30	1.746,20	717,31	541,02	409,36
b. Target Daerah	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Persentase Produksi	141,53	145,52	59,78	45,09	34,11
Ikan Budidaya Air Tawar					
a. Jumlah Produksi Ikan	46,9	11,3	91,70	71,64	93,1
b. Target Daerah	83	83	83	83	83

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Produksi	56,51	13,61	110,48	86,31	112.17
Jumlah Produksi (ton)	12.725	16.750	14.696	9.847	10.535
Target Produksi	16.583	16.583	16.583	16.583	16.583

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2023

Berbagai permasalahan perikanan tangkap di Kota Pekalongan antara lain sedimentasi yang tinggi di muara yang menyebabkan kapal ikan besar > 30 GT tidak bisa masuk, TPI yang terendam banjir saat terjadi air laut pasang, keterbatasan fasilitas *docking* (antrian *docking* sampai dengan 3 bulan), padahal umumnya kapal sekaligus akan melakukan *docking* setelah bongkar/lelang setahun sekali. Pemerintah Kota pekalongan juga belum memiliki TPI hingga saat ini masih menyewa pada Perum Perindo. Selain itu banyak instansi yang memiliki kewenangan di lokasi Pelabuhan Perikanan di Kota Pekalongan yaitu fungsi pokok Pelabuhan dibawah kewenangan PPNP, alur pelabuhan (muara Kali Loji) dibawah kewenangan Provinsi Jawa tengah dan fasilitas komersial (TPI, lahan, perkantoran) dibawah kewenangan Perum Perindo. Ke depan, akan dibangun pelabuhan perikanan *on shore* yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan JICA, sebagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 secara kuantitas per kapita cenderung meningkat. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 konsumsi ikan mencapai target yang ditentukan. Kenaikan persentase konsumsi ikan terus meningkat sejak tahun 2018 sebesar 105,33 % hingga 2020 sebesar 108,80 %. Namun demikian terjadi penurunan persentase konsumsi ikan yang terjadi di tahun 2021 yaitu 105,87 % meskipun telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 31 kg/perkapita/tahun. Kemudian di tahun 2022 persentase konsumsi ikan mengalami kenaikan menjadi 108,71 %. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.144 berikut.

Tabel 2.144 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (kg/kapita/tahun)

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
2018	31,6	30	105,33
2019	32,12	30	107,07
2020	32,64	30	108,80
2021	32,82	31	105,87
2022	33,7	31	108,71

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2023

Saat ini terdapat 6 (enam) kelompok nelayan yang telah berbadan hukum, yang kemudian pada tahun 2017 ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa pemberian bantuan/hibah. Namun demikian pemberian bantuan/hibah harus mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6), dimana hibah diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah Pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa memberikan bantuan kepada kelompok nelayan sejak tahun 2018 sampai tahun 2019. Namun di tahun 2020 terdapat 4 kelompok nelayan yang diberikan bantuan, dan tahun 2021 sebanyak 2 kelompok, dan bertambah menjadi 5 kelompok pada tahun 2022.

Tabel 2.145 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	Jumlah Kelompok Nelayan	Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)
2018	0	35	0,00
2019	0	35	0,00
2020	4	36	11,11
2021	2	38	5,3
2022	5	40	12,5

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2023

Di sisi produksi perikanan, mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 terus meningkat, yaitu dari 10.980 ton menjadi 13.887 ton. Namun pada tahun 2021 menurun cukup signifikan menjadi 9.924 ton. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 10.033 ton. Sementara itu jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan mengalami penurunan, dari 145,96 ton di tahun 2018 menjadi 108,83 ton di tahun 2019. Penurunan di tahun 2019 dikarenakan beberapa kapal milik kelompok nelayan, seperti kapal Inka Mina, tidak melakukan operasional penangkapan ikan karena kapal sudah tidak layak jalan/operasional. Selain itu ada rencana untuk mengalihfungsikan kapal menjadi kapal pengangkut. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 155,62 ton dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi 128,96 ton dan tahun 2022 menjadi 119,39 ton. Secara lengkap data Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 2.146 berikut.

Tabel 2.146 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi hasil Kelompok Nelayan (ton)	Jumlah Produksi Ikan di Daerah (ton)	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
2018	145,96	10.980	1,33
2019	108,83	14.991	0,73
2020	155,62	13.887	1,12
2021	128,96	9.924	1,30
2022	119,39	10.033	1,19

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2023

Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan (Gemari) yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat.

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Jumlah hotel di wilayah Kota Pekalongan pada Tahun 2018 berjumlah 30 hotel. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 2 hotel yang direnovasi sehingga jumlahnya menjadi 28 hotel. Pada tahun 2020, kedua hotel tersebut dibuka kembali sehingga jumlahnya menjadi

30 hotel dan bertambah 5 hotel menjadi 30 hotel di tahun 2022. Kelas hotel di Kota Pekalongan pun beragam, mulai dari kelas melati, bintang 1 sampai bintang 4.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner. Kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan makanan nasional juga menyediakan makanan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan dan perekonomian di Kota Pekalongan. Jumlah restoran yang semula hanya 138 di tahun 2018, sekarang telah berkembang menjadi 178 restoran di tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisata mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2021 kunjungan wisata sudah mulai meningkat seiring dengan meredanya pandemi Covid 19 di Kota Pekalongan sehingga masyarakat sudah mulai berkunjung ke tempat-tempat wisata. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata mengalami mencapai angka tertinggi selama periode 2018 hingga 2022. Hal ini dikarenakan sudah mulai beroperasinya wisata Pantai Pasir Kencana.

Tabel 2.147 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2018	30	138	784.254
2019	28	152	720.816
2020	30	150	283.882
2021	30	178	316.440
2022	35	234	1.038.509

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

Perkembangan pariwisata juga dapat dilihat dari tingkat okupansi hotel, dimana tahun 2019 hingga 2021 tingkat okupansinya tidak siginifikan. Untuk hotel kelas melati mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 26,23 persen menjadi 27,91 persen di tahun 2020 dan menurun menjadi 25,65 persen di tahun 2021. Rata-rata okupansi hotel bintang 1 hingga hotel bintang 3 tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu dikisaran 24 persen hingga 26 persen untuk hotel bintang 1, kisaran 30 persen untuk hotel bintang 2, serta sebesar 54 persen hingga 64 persen untuk hotel bintang 3. Pada tahun 2022 tidak tersedia data dikarenakan BPS Kota Pekalongan tidak melakukan perhitungan tingkat okupansi hotel. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.148 berikut.

Tabel 2.148 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2019-2021

Tahun / Kelas Hotel	2019			2020			2021		
	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata-Rata Okupansi (%)	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata-Rata Okupansi (%)	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata-Rata Okupansi (%)
Non Bintang/Melati	25	518	26,23	15	524	27,91	25	504	25,65
Bintang 1	1	65	24,22	1	56	26,11	1	56	45,57
Bintang 2	1	47	32,14	1	46	31,71	1	46	49,92
Bintang 3	8	738	64,30	8	741	54,36	8	748	61,22
Jml	35	1.368		35	1.367		35	1.354	

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2023

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya disajikan dalam Tabel 2.149 berikut.

Tabel 2.149 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelenggaraan	42	57	6	0	4

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

Daya tarik lain yang ditawarkan Kota Pekalongan adalah obyek wisata. Meskipun tidak memiliki banyak obyek wisata, namun cukup banyak pengunjung yang berwisata di Kota Pekalongan. Obyek wisata yang ada di Kota Pekalongan antara lain pantai Slamaran Indah, Museum Batik, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon, Kampung Canting Landungsari, wisata belanja Pasar Batik Grosir Setono, Gapura Nusantara serta menata kawasan Alun-alun untuk menambah daya tarik wisata. Obyek wisata terbaru yang telah dibangun pada tahun 2021 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 2022 yaitu Taman Wisata Laut Pasir Kencana.

Jumlah kunjungan di Museum Batik walaupun menurun, namun wisatawan dari mancanegara masih ada yang berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap budaya batik Pekalongan masih cukup tinggi. Tetapi tidak demikian dengan kolam renang Tirta Sari, sejak tahun 2016 resmi ditutup karena tidak layak operasional.

Tabel 2.150 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

No	Objek Wisata	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasir Kencana					
	Pengunjung					
	1). Wisman	6	2	0	0	0
	2). Wisnus	69.184	69.057	7.429	0	243.084
	B. Pendapatan (Rp.)	360.360.250	355.370.750	39.449.750	0	4.529.926.500
2	Slamaran Indah					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	7.641	11.283	10.426	13.628	15.980
	B. Pendapatan (Rp.)	32.826.750	44.572.750	33.759.750	38.038.500	84.010.500
3	Museum Batik					
	Pengunjung					
	1). Wisman	454	286	138	0	85
	2). Wisnus	25.154	28.312	9.982	6.194	24.612
	B. Pendapatan (Rp.)	96.861.000	100.530.000	31.447.000	25.734.000	116.084.000
4	Kolam Renang Tirta Sari					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0

No	Objek Wisata	2018	2019	2020	2021	2022
	2). Wisnus	0	0	0	0	0
	B. Pendapatan (Rp.)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

Selain daya tarik wisata dan penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata, keberadaan SDM berperanan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (*employment*). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,36 ton per hektar. Kemudian menurun cukup drastis di tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 3,16 ton per hektar di tahun 2019 dan tahun 2020 menurun lagi pada posisi 2,92 ton per hektar. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 5,01 ton per hektar, serta tahun 2022 menjadi 5,69 ton per hektar. Produktivitas padi di Kota Pekalongan disajikan secara lengkap dalam Tabel 2.151 berikut.

Tabel 2.151 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi tanaman padi (ton)	10.077,00	5.131,09	4.769,19	7.151,00	7.684,00
Luas areal tanaman padi (Ha)	1.584	1.618,74	1.631,53	1.428,00	1.351,00
Produktifitas padi per hektar (ton/Ha)	6,36	3,16	2,92	5,01	5,69

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Untuk meningkatkan produksi pertanian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dari Pemkot meningkat di tahun 2019, dari 80 kelompok tani pada tahun 2018 menjadi 87 kelompok tani di tahun 2019, 88 kelompok tani di tahun 2020 hingga tahun 2022. Kelompok tani ini terdiri dari KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), kelompok tani dan kelompok ternak.

Tabel 2.152 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kelompok tani mendapat bantuan Pemda	28	40	40	18	8
Jumlah kelompok tani	80	87	88	88	88
Cakupan bina kelompok petani (persen)	35,00	45,98	45,45	20,45	9,09

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

Dengan mencermati data tersebut di atas, ternyata jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani tidak berdampak langsung atau tidak memiliki korelasi yang nyata dengan produktivitas padi per hektar. Jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani yang meningkat tidak diikuti peningkatan produktivitas padi per hektar secara langsung, justru produktivitas padi per hektar cenderung menurun. Produktivitas padi per hektar yang meningkat kembali tahun 2022, diharapkan merupakan dampak dari meningkatnya jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani tahun-tahun sebelumnya.

Aspek lain yang sangat berdampak terhadap produktivitas padi per hektar adalah semakin meluasnya banjir dan rob di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan luas wilayah terdampak banjir dan rob, serta frekuensi dan lama terjadi banjir dan rob, tentunya berimplikasi terhadap produktivitas padi per hektar pada kawasan terdampak. Banjir dan rob berimplikasi terhadap kondisi tanah atau unsur hara sehingga akan berdampak terhadap produktivitas padi per hektar. Atas hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan menyusun kajian mitigasi dampak banjir dan rob terhadap lahan pertanian sebagai upaya untuk mengantisipasi penurunan produksi sektor pertanian di masa yang akan datang.

Selain itu, permasalahan irigasi juga menjadi penyebab menurunnya produktivitas padi per hektar. Kondisi geografis wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar, berimplikasi terhadap sedimentasi yang cukup tinggi. Sedimentasi yang tinggi tersebut, menyebabkan aliran air irigasi seringkali mengalami kendala. Di samping itu, luas lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) dalam RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 adalah 521 hektar. Perkembangan kawasan terbangun (*built-up area*) yang cukup tinggi, seperti untuk perumahan dan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan serta alokasi luas lahan yang menurun menyebabkan beberapa saluran irigasi tidak berfungsi. Kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap menurunnya produktivitas padi per hektar.

Dalam hal upaya menambah nilai produk pertanian, dilakukan pendampingan pengembangan Kampung Tempe di Kertoharjo dan Kampung Tahu di Sokoduwet.

4. Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti disajikan dalam Tabel 2.153 berikut.

Tabel 2.153 Jenis Pasar dan Toko
di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

JenisPasar / Toko	2018	2019	2020	2021	2022
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
PasarTradisional	11	11	11	10	11
- Toko	74	74	74	74	74
- Kios	555	555	555	555	555
Toko diluar Pasar Tradisonal	2.726	2.726	2.726	2.757	4.729
Toko Modern:					
- Minimarket	42	43	53	77	64
- Supermarket	3	3	5	4	4
- Department store	3	3	4	2	2
- Hypermarket	1	1	1	1	1
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2023

Aktivitas perdagangan juga mencakup pedagang/usaha informal yang tidak kalah banyak dengan usaha formal. Pada tahun 2022, pedagang/usaha informal sebanyak 975 pedagang yang tersebar di titik-titik strategis di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.154 berikut.

Tabel 2.154 Jumlah Pedagang/Usaha Informal
di Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Lokasi	Jumlah
1	Jl. Sultan Agung	30
2	Jl. Hasanudin	6
3	Jl. Urip Sumoharjo	57
4	Jl. Gatot Subroto	43
5	Jl. Kurinci	21
6	Jl. Kusuma Bangsa	52
7	Jl. Merak *	-
8	Jl. WR. Supratman	14
9	Jl. Progo	11
10	Jl. Merpati	16
11	Jl. Mawar	18
12	Jl. Melati	38
13	Jl. Kepodang	16
14	Jl. Mataram	50
15	Alun-alun timur	22
16	Alun-alun utara	30
17	Alun-alun konveksi	209
18	SKLP	82
19	Tentara Pelajar	18
20	Jl. Veteran	50
21	Jl. Angkatan 45	6

No.	Lokasi	Jumlah
22	Resimen	7
23	Gajah Mada	10
24	Jl. Ahmad Dahlan	15
25	JL. HOS cokroaminoto	52
26	Jl. RA Kartini	24
27	Jl. Wahid Hasyim	15
28	Jl. Agus Salim	11
29	Jl. Dr. Wahidin	16
30	Jl. Cendrawasih	36
31	JL. Rajawali *	-
	Total	975

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan (diolah), 2023

Dari sisi perdagangan, kontribusi di sektor perdagangan atas harga berlaku terus meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2018 sebesar Rp.2,195 triliun dan terus naik sampai di angka Rp.2,370 triliun di tahun 2019. Begitu pula dengan kontribusi sektor perdagangan atas harga konstan yang terus naik, mulai dari Rp.1,570 triliun di tahun 2018 menjadi Rp.1,655 triliun di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan atas harga berlaku dan atas harga konstan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, masing-masing menjadi sebesar Rp. 2.289 triliun dan Rp. 1.578 triliun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 maupun tahun 2020, masing-masing menjadi 2,423 triliun dan 1,664 triliun dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.656 triliun dan Rp. 1.719 triliun. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.155 berikut.

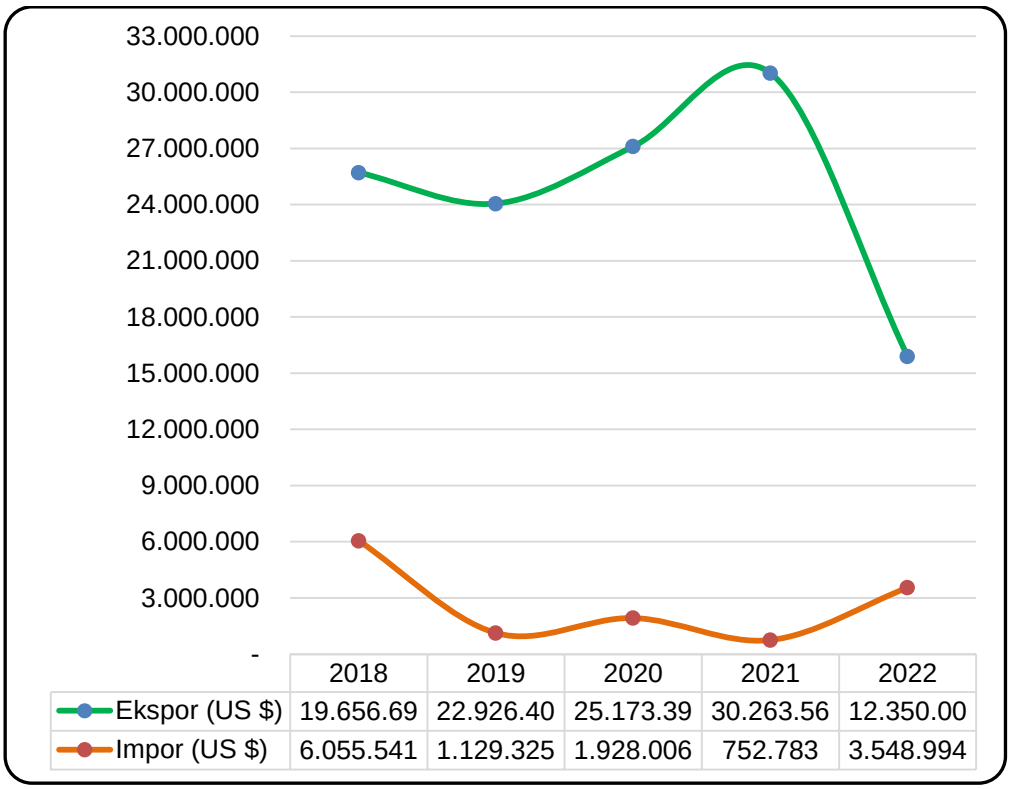
Tabel 2.155 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

No	Keterangan		2018	2019	2020	2021	2022
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	10.089.284,87	10.873.976,04	10.848.872,87	11.460.582,99	12.599.933,42
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	2.195.304,05	2.370.293,83	2.289.121,10	2.442.479,79	2.656.275,92
		Kontribusi	21,76	21,80	21,10	21,31	21,08
2	ADHK 2010	PDRB Total	7.087.915,58	7.477.425,04	7.337.833,89	7.601.486,23	8.039.459,94
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.570.073,03	1.655.883,36	1.578.463,62	1.664.625,66	1.719.403,05
		Kontribusi	22,15	22,15	21,51	21,90	21,39

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Nilai ekspor tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan keadaan perdagangan luar negeri yang mengalami penurunan, dimana nilai ekspor perdagangan mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor perdagangan ini salah satunya disebabkan oleh terjadinya resesi global di tahun 2023. Adanya resesi global di tahun 2023 ini terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi dan kondisi perekonomian yang mulai lesu.

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami kenaikan cukup signifikan pasca pandemi, dinilai cukup kuat untuk bertahan menghadapi ancaman terjadinya resesi global. Namun perlu untuk diwaspadai bahwa resesi ekonomi global yang terjadi terdapat ancaman yang akan berdampak salah satunya yaitu, permintaan ekspor untuk produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan akan menurun terutama dari Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok. Dimana komoditas utama yang dihasilkan oleh Kota Pekalongan untuk di ekspor adalah tekstil dan kerajinan serta negara tujuan yang di tuju adalah Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok dan negara lainnya. Dengan demikian, adanya perkiraan resesi global ini ternyata sudah mulai terjadi dan berdampak nyata pada nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan yang mulai mengalami penurunan. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.50 berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (US $)	19.656.69	22.926.40	25.173.39	30.263.56	12.350.00
Impor (US $)	6.055.541	1.129.325	1.928.006	752.783	3.548.994

Gambar 2.50 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2023

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2018 terdapat 14 unit industri, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 89 unit. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8 unit, di tahun 2021 meingkat kembali menjadi 58 unit, dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 353 unit. Klasifikasi industri di Kota Pekalongan dari tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.156 berikut.

Tabel 2.156 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Klasifikasi Industri	Jumlah Unit Industri				
	2018	2019	2020	2021	2022
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	8	14	4	8	26
Industri Aneka (IA)	6	47	3	45	326
Industri Hasil Pertanian (IHP)	0	6	1	5	1
JUMLAH	**14**	**89**	**8**	**58**	**353**

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2023

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti disajikan dalam Tabel 2.157 berikut.

Tabel 2.157 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

KLASIFIKASI INDUSTRI	INVESTASI (Rp Juta)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	933,00	9.412,03	955,00	3.108,90	6.275,31
Industri Aneka (IA)	11.682,00	69.483,30	7.184,00	11.271,27	44.579,27
Industri Hasil Pertanian (IHP)	0	2.721,41	1.450,00	740,00	100,00
JUMLAH	12.615	81.616,74	9.589,00	15.120,17	50.954,58

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2023

b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Untuk kegiatan Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya sepanjang tahun 2018-2022 jumlah industrinya cenderung stagnan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

Tabel 2.158 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Jenis industri	2018	2019	2020	2021	2022
Batik	770	781	1.457	1.882	1.832
Pakaian jadi dari tekstil	913	953	941	1.067	1.146
Pembekuan ikan	NA	NA	NA	NA	NA
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	1	1	1	1	1
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	22	23	26	45	77
Penggaraman/Pengeringan Ikan	5	9	38	102	51
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	7	8	88	87	82
Pengolahan Teh dan Kopi	8	11	31	36	38
Pertenunan	31	34	33	46	47

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2023

Tabel 2.159 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Jenis industri	2018	2019	2020	2021	2022
Batik	5.197	5.278	7.964	11.263	11.358
Pakaian jadi dari tekstil	5.849	6.047	6.600	7.958	8.650
Pembekuan ikan	NA	NA	NA	NA	NA
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	477	477	583	317	575
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	56	59	52	62	154
Penggaraman/Pengeringan Ikan	71	75	190	228	136
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	58	58	227	664	606
Pengolahan Teh dan Kopi	1.066	1.174	1.834	2.531	2.774
Pertenunan	595	595	466	407	425

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2023

Tabel 2.160 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Jenis industri	2018	2019	2020	2021	2022
Batik	n/a	n/a	10.041	17.610	1.786
Pakaian jadi dari tekstil	n/a	12.573	2.098	524	13.514
Pembekuan ikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	n/a	n/a	14,2	7,5	n/a
Penggaraman/Pengeringan Ikan	n/a	n/a	135	16,8	n/a
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	n/a	n/a	72.15	80,4	n/a
Pengolahan Teh dan Kopi	n/a	n/a	3.550	n/a	n/a
Pertenunan	n/a	n/a	n/a	n/a	648

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2023

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2018-2022 terus meningkat baik berdasarkan ADHB. Pada tahun 2018 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sebesar 29,81 persen dari total PDRB. Kondisi tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 32,58 persen dari total PDRB. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB disajikan dalam Tabel 2.161 berikut.

Tabel 2.161 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Keterangan		2018	2019	2020	2021	2022
ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	7.087.915,58	7.477.425,04	7.337.833,89	7.601.486,23	8.039.459,94
	PDRB Perindustrian (Rp. Juta)	2.112.720,60	2.267.063,33	2.315.371,70	2.423.908,81	2.619.109,41
	Kontribusi	29,81	30,32	31,55	31,89	32,58
ADHK (2010)	PDRB Total	10.089.284,87	10.873.976,04	10.848.872,87	11.460.582,99	12.599.933,42
	PDRB Perindustrian	1.478.741,06	1.550.360,71	1.542.947,72	1.579.669,99	1.646.996,75
	Kontribusi	14,66	14,26	14,22	13,78	13,07

Sumber: Kota Pekalongan Dalam AngkaTahun 2023, 2023

2.1.3.4 Unsur Penunjang

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unit yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dengan unit kerja di bawahnya maupun dengan instansi lain sesuai tugasnya dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP Kota, Nilai SAKIP OPD dan Persentase Capaian Kinerja Pembangunan.

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.162 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	150	136	93	68	70

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda, 2023

b. Reformasi Birokrasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari CC menjadi BB.

Pada Tahun 2022 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 73,31 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel 2.163 berikut.

Tabel 2.163 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	**30**	24,42	24,53	24,70	24,32
2	Pengukuran Kinerja	**25**	17,07	17,54	17,92	18,18
3	Pelaporan Kinerja	**15**	10,46	11,09	11,17	11,45
4	Evaluasi Internal	**10**	7,24	7,29	7,39	7,44
5	Capaian Kinerja	**20**	11,69	12,14	11,89	11,77
	Nilai SAKIP	**100**	**70,88**	**72,59**	**73,07**	**73,16**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**C**	**CC**	**BB**	**BB**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2022

Hasil Evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Tabel 2.164 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	**30**	24,38
2	Pengukuran Kinerja	**30**	19,50
3	Pelaporan Kinerja	**15**	11,48
4	Evaluasi Internal	**25**	17,95
	Nilai SAKIP	**100**	**73,31**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2023

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP). Survei Kepuasan Masyarakat adalah penggukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pada Tahun 2022 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Pekalongan mendapat nilai 90,44 dengan kategori Baik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.165 berikut.

Tabel 2.165 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2022

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	87,55	Baik
2	Dinas Kesehatan	87,25	Baik

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	88,30	Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	88,22	Baik
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	89,44	Sangat Baik
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan	90,87	Sangat Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,55	Baik
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	91,90	Sangat Baik
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan KB	88,63	Sangat Baik
10	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	93,95	Sangat Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak	89,43	Sangat Baik
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	89,38	Sangat Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup	87,85	Baik
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	88,30	Baik
15	Dinas Perhubungan	83,25	Baik
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	99,08	Sangat Baik
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	92,92	Sangat Baik
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	89,52	Sangat Baik
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	84,24	Baik
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	91,01	Sangat Baik
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	90,60	Sangat Baik
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	90,70	Sangat Baik
23	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	88,52	Sangat Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	91,59	Sangat Baik
25	Sekretariat DPRD	77,37	Baik
26	Inspektorat	92,17	Sangat Baik
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	80,66	Baik
28	Bagian Protokol dan Kompim Setda	98,11	Sangat Baik
29	Bagian Organisasi Setda	89,76	Sangat Baik
30	Bagian Umum Setda	89,07	Sangat Baik
31	Bagian Hukum Setda	94,69	Sangat Baik
32	Bagian PBJ dan Minbang Setda	89,17	Sangat Baik
33	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	92,07	Sangat Baik
34	Bagian Pemerintahan Setda	91,18	Sangat Baik
35	Kecamatan Pekalongan Utara	98,64	Sangat Baik
36	Kelurahan Kandang Panjang	93,31	Sangat Baik
37	Kelurahan Panjang Wetan	99,23	Sangat Baik
38	Kelurahan Panjang Baru	99,31	Sangat Baik
39	Kelurahan Krapyak	93,87	Sangat Baik

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
40	Kelurahan Padukuhan Kraton	91,80	Sangat Baik
41	Kelurahan Degayu	85,78	Baik
42	Kelurahan Bandengan	98,80	Sangat Baik
43	Kecamatan Pekalongan Selatan	94,41	Sangat Baik
44	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	98,93	Sangat Baik
45	Kelurahan Kuripan Yosorejo	91,37	Sangat Baik
46	Kelurahan Jenggot	99,52	Sangat Baik
47	Kelurahan Buaran Kradenan	90,29	Sangat Baik
48	Kelurahan Banyurip	87,73	Baik
49	Kelurahan Soko Duwet	85,80	Baik
50	Kecamatan Pekalongan Barat	99,03	Sangat Baik
51	Kelurahan Medono	92,80	Sangat Baik
52	Kelurahan Podosugih	85,14	Baik
53	Kelurahan Pasirkratonkramat	98,61	Sangat Baik
54	Kelurahan Tirto	93,92	Sangat Baik
55	Kelurahan Sapuro Kebulen	95,04	Sangat Baik
56	Kelurahan Bendan Kergon	85,40	Baik
57	Kelurahan Pringrejo	98,81	Sangat Baik
58	Kecamatan Pekalongan Timur	90,60	Sangat Baik
59	Kelurahan Kauman	97,80	Sangat Baik
60	Kelurahan Poncol	98,08	Sangat Baik
61	Kelurahan Klego	98,17	Sangat Baik
62	Kelurahan Gamer	84,69	Baik
63	Kelurahan Noyontaansari	88,16	Baik
64	Kelurahan Setono	99,79	Sangat Baik
65	Kelurahan Kalibaros	94,78	Sangat Baik
66	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	93,41	Sangat Baik
67	UPT Puskesmas Tondano	93,10	Sangat Baik
68	UPT Puskesmas Tirto	86,53	Baik
69	UPT Puskesmas Buaran	86,40	Baik
70	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	86,33	Baik
71	UPT Puskesmas Medono	86,11	Baik
72	UPT Puskesmas Klego	85,76	Baik
73	UPT Puskesmas Noyontaan	84,10	Baik
74	UPT Puskesmas Sokorejo	83,99	Baik
75	UPT Puskesmas Kramatsari	83,96	Baik
76	UPT Puskesmas Bendan	83,93	Baik
77	UPT Puskesmas Jenggot	82,43	Baik
78	UPT Puskesmas Dukuh	80,95	Baik
79	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	79,92	Baik
	Rata-rata IKM Kota Pekalongan	90,44	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2022

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2019, indeks reformasi birokrasi Kota Pekalongan yang dicapai adalah 68,97 dengan predikat “B”. Dengan nilai tersebut, Kota Pekalongan berada pada peringkat kedua se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Adapun rincian komponen penilaian tersebut disajikan dalam Tabel 2.166 berikut.

Tabel 2.166 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,33	2,47
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	1,62
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	3,47
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,84	2,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,11	10,52
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,08	5,07
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,15	5,62
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,63	3,65
	Total Komponen pengungkit (A)	**60,00**	**36,11**	**35,32**
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,80	9,92
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,72	4,99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,16	6,74
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,65	9,00
	Total Komponen Hasil (B)	**40,00**	**30,33**	**33,65**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	**100,00**	**66,44**	**68,97**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ada perubahan dalam komponen penilaian. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks Reformasi Birokrasi di Pemkot Kota Pekalongan tahun 2022 adalah 71,04 dengan kategori “BB” dengan rincian hasil evaluasi disajikan dalam Tabel 2.167 berikut.

Tabel 2.167 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A	**Komponen Pengungkit**			
	I. Pemenuhan	20,00	11,39	12,79
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,03	6,81
	III. Reform	30,00	18,86	19,13

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**36,28**	**38,73**
B	**Komponen Hasil**			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,11	8,13
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,36	7,69
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,20	8,09
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,71	8,40
Total Komponen Hasil		**40,00**	**33,38**	**32,31**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**69,66**	**71,04**

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, 2023

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2022, terdapat 12 Peraturan daerah yang ditetapkan, dengan status 10 Perda sudah aktif dan 2 Perda Masih dalam proses evaluasi dan permohonan nomor registrasi di provinsi, yaitu:

a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
f. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
g. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing;
h. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;
j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
k. Raperda Kota Pekalongan tentang Garis Sempadan;
l. Raperda Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.1.3.5 Unsur Pendukung

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Periode RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017. Sementara itu, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD IV atas RPJPD Kota Pekalongan. Selanjutnya, dokumen RKPD sebagai perencanaan pembangunan tahunan disusun berdasarkan RPJMD.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Pekalongan selalu berupaya tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan selalu berupaya melakukan percepatan-percepatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk sinergitas dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan RPJP, RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RKPD Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung

peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil, dimana pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kab/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Jumlah ASN pada Pemerintah Kota Pekalongan mengalami penambahan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 3.057 orang, dari tahun 2021 sebanyak 2.952. Penambahan ini antara lain adalah karena adanya penerimaan ASN baru pada tahun 2022, walaupun juga ada pengurangan dari ASN yang purna tugas dan meninggal dunia, namun secara keseluruhan terdapat penambahan sebanyak 105 orang.

Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.168 berikut.

Tabel 2.168 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2022

Jabatan	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	21	3	24	25	3	28
Eselon III	72	39	111	66	42	108
Eselon IV	125	107	232	130	113	243
Fungsional Umum	561	398	959	561	528	1.089
Fungsional Tertentu	609	1.017	1.626	580	1.009	1.589
Jumlah Total	**1.388**	**1.564**	**2.952**	**1.362**	**1.695**	**3.057**

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023, 2023

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.169 berikut.

Tabel 2.169 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2022

Jabatan	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	53	-	53	44	-	44
SMP/Sederajat	87	8	95	81	7	88
SMA/Sederajat	313	150	463	269	128	397
Diploma I,II/Akta I,II	17	8	25	12	4	16
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	142	233	375	160	301	461
Diploma IV	776	1.165	1.941	26	53	79
Sarjana S1				655	1.123	1.778
Sarjana S2				112	79	191
Sarjana S3				3	-	3
Jumlah Total	**1.388**	**1.564**	**2.952**	**1.362**	**1.695**	**3.057**

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2023, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ASN Pemerintah Kota Pekalongan atau sekitar 67,09 persen berpendidikan sarjana (Strata 1 sampai dengan Strata 3/doktor). Hal ini menunjukkan SDM yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Hal ini dapat mendukung bila nantinya dilakukan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit.

Dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari Sistem Merit antara lain:

a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN tiap tahunnya dengan 9 (Sembilan) indikator seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. Adapun nilai dan kategori dalam Indeks Sistem Merit adalah: nilai 100-174 kategori Buruk, 175-249 Kategori Kurang, 250-324 kategori Baik dan 325-400 kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2020, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan mencapai nilai 204 dengan metode penilaian mandiri (self assessment), namun belum dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN. Sedangkan untuk tahun 2021 Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan telah dinilai oleh KASN dengan hasil nilai 178,5 atau kategori Kurang. Untuk Provinsi Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota nilai Indeks Sistem Merit kategori Baik untuk 5 Kab/kota (Kab. MAgelang, Kab. Purworejo, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri dan kota Surakarta), kategori Sedang untuk 5 Kab/kota (kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Rembang, Kota Pekalongan dan Kota Semarang) sedangkan sisanya 24 Kab/Kota masuk kategori Buruk.

Kota Pekalongan melalui BKPSDM telah melaksanakan semua indikator yang ada dalam penilaian Indeks Sistem Merit sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, namun beberapa dokumen belum diupload dalam sistem dan beberapa pelaksanaan belum terdokumentasikan. Selain itu peraturan terkait kepegawaian juga belum dimiliki dalam bentuk Peraturan Walikota, yang merupakan turunan dari Peraturan Perundangan Kepegawaian diatasnya.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail disajikan dalam Tabel 2.170 berikut.

Tabel 2.170 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Diklat	2018	2019	2020	2021	2022
Teknis	350	366	151	172	472
Fungsional	285	166	75	13	21
Kepemimpinan	52	8	1	3	2
Prajabatan	3	251	0	200	319
Orientasi PPPK	-	-	-	-	190

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan diklat di Kota Pekalongan sangat fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Diklat Tenik, Fungsional dan Kepemimpinan pada tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan porsi / kuota yang disediakan penyelenggara Diklat.

Sehingga jumlah peserta diklat tiap tahunnya tidak dapat dipresiksi jumlahnya, walaupun BKPSDM secara teratur selalu mengajukan calon peserta diklat baik ke Pemprov Jateng maupun Lembaga/instansi/ kemeterian terkait. Selain itu BKPSDM juga selalu mengisi pengajuan peserta diklat melalui Aplikasi SI JARI ON AKD milik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangan untuk diklat prajabatan pada tahun 2022 dilaksanakan untuk 319 orang CPNS dan orientasi PPPK untuk 190 orang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Dengan persiapan pensiun yang sebaik-baiknya diharapkan aparatur keseluruhan dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap aparatur yang akan pensiun tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (*general check-up*) serta diklat persiapan pensiun/purna tugas. Hal ini didasarkan pada Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Pekalongan tidak mengirimkan peserta diklat pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Hal ini dikarenakan kondisi yang masih belum kondusif karena Covid 19, sehingga membatasi dalam pengiriman peserta diklat yang pelaksanaannya di luar daerah.

Jumlah ASN yang melakukan *general check-up* jumlahnya fluktuatif, berdasarkan jumlah ASN yang memerlukan cek Kesehatan (mengalami sakit) ataupun adanya CPNS baru yang memerlukan general check up. Pada tahun 2022 terdapat 16 orang yang mengikuti General Check Up.

Jumlah Aparatur yang melakukan general check up dan mengikuti Diklat purna tugas pada tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 2.171 berikut.

Tabel 2.171 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Jenis Pembinaan Memasuki Masa Pensiun	2018	2019	2020	2021	2022
General *Check-Up*	53	343	11	206	16
Diklat Purna Tugas	90	60	60	0	0

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, 2023

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting sebagai problem solving permasalahan yang ada di daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian.

Tabel 2.172 Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2018 - 2022

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
1	2018	Coklat Mangrove Sebagai Usaha Peningkatan Ekonomi Kreatif Masyarakat Pesisir Kota Pekalongan	-
2	2018	Kemasan Makanan Kuliner Tradisional "Megono" sebagai Upaya Memperpanjang Waktu Simpan dan Daya Saing Produk	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan
3	2018	Pengembangan Bahan Ajar Matematika SMP dengan Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) berbasis Budaya Lokal untuk Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Pekalongan	Universitas Pekalongan
4	2018	Pencegahan dan Edukasi Masyarakat dalam Penanganan Endemik Penyakit Menular berbasis Web untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan
5	2019	Model Akselerasi Pencapaian Open Defecation Free (ODF) Kota Pekalongan melalui Penguatan Kelurahan (Sebuah Strategi Percepatan Pembangunan Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Universitas Pekalongan
6	2019	Kampung Batik Digital Berbasis Virtual Tour sebagai Wadah Promosi Batik Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan
7	2019	Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di Pasar Grosir Setono	STMIK Widya Pratama Pekalongan
8	2019	Penggunaan Kembali Limbah Cair Batik Menjadi Air Bersih Menggunakan Metode Teknologi Membran	Universitas NU Purwokerto
9	2019	Adopsi Inovasi Media Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) untuk Menguatkan Industri Kreatif Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan
10	2020	Studi Potensi dan Penentuan Sumur Resapan sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis	Universitas Diponegoro
11	2020	Strategi Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan *COVID-19*: Optimalisasi Peran Pentahelix di Kota Pekalongan Berdasar Pendekatan Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah	Universitas Pekalongan
12	2020	Meningkatkan Peranan Aparatur Pemerintah Tingkat RT dan RW dalam Dashboard Eksekutif untuk Memudahkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mengkoordinasi dan Memonitoring	STMIK Widya Pratama Pekalongan

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
13	2020	Desain Pendidikan Agama dalam Keluarga guna Membangun Kemampuan Problem Solving Anak	Universitas Selamat Sri
14	2020	Edukasi dan Mitigasi Bencana Banjir untuk Siaga Bencana di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan
15	2021	Efektivitas Aplikasi Deteksi Risiko Kehamilan (ADRK) Mandiri Berbasis Android di Kota Pekalongan Tahun 2021	UMPP
16	2021	Video Teaser Batik Edu-Tourism sebagai Primadona Inovasi Daya Saing Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
17	2021	Implementasi Penguatan Destinasi Pariwisata Daerah Kota Pekalongan Melalui Analisis Strata Produk Unggulan dan Analisis Pesaing	Balitbang Kota Magelang
18	2022	Pemetaan Jaringan Drainase Berbasis Spasial di Kota Pekalongan	Institut Teknologi Bandung
19	2022	Studi Penanganan Genangan dan Banjir di Wilayah Kota Pekalongan Barat	Universitas Semarang
20	2022	Studi Penyusunan Zona Risiko Kerentanan Air Tanah terhadap Pencemaran Menggunakan Metode *Groundwater, Occurance, Overlaying Lithology Depth of Groundwater (GOD)* sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan	Universitas Diponegoro
21	2022	Pengolahan Limbah Batik Menggunakan Bakteri *Indigenous* sebagai Upaya Pemulihan Indeks Kualitas Air di Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
22	2022	Penerapan Konsep *Water Sensitive Urban Design* untuk Mewujudkan Permukiman Pesisir Kota Pekalongan yang Tangguh	Universitas Diponegoro

Sumber: jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2023

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.173 Riset Bersama Kota Pekalongan
Tahun 2018 - 2022

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
1	2018	Model Pengelolaan Wisata Pasir Kencana Kota Pekalongan	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
2	2018	Pra Revitalisasi Pasar Berorientasi pada Kesejahteraan, Kenyamanan, dan Keindahan (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan)	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
3	2018	Kajian Rencana Induk Kelitbangan Kota Pekalongan 2018-2021	Universitas Diponegoro
4	2018	Kajian Muara Sungai Pekalongan	PT. Indotama Mahesa Karya
5	2018	Kajian Hidrogeologi Cekungan Air Tanah di Kecamatan Pekalongan Utara	PT. Citra Pamungkas Mandiri
6	2019	Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan	Tim Peneliti Poltekkes
7	2019	Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru	CV. Monalisa Art
8	2019	Road Map Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan	CV. Tunas
9	2019	Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa	CV. Pijar Mulya Wasesa
10	2019	Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Exit Jalan Tol	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
11	2019	Strategi Penurunan Angka Pengangguran	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
12	2020	Analisis Strategi Recovery Kepariwisataan Kota Pekalongan pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru	DRD Kota Pekalongan
13	2020	Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Kasus Kota Pekalongan	DRD Kota Pekalongan
14	2021	Efektivitas Penanganan *COVID-19* di Kota Pekalongan	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
15	2021	Pengembangan Dashboard Eksekutif untuk Sistem Monitoring Filariasis Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan
16	2022	Mitigasi Dampak Banjir dan Rob terhadap Lahan Pertanian di Kota Pekalongan	Universitas Gadjah Mada

Sumber: jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2023

Dalam pelaksanaan riset unggulan tidak terdapat kendala yang berarti, namun demikian perlu dilakukan pemetaan kebutuhan riset yang sistematis serta publikasi yang lebih luas untuk mendapatkan penelitian yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Bappeda dengan Perguruan Tinggi di sekitar Kota Pekalongan, Perguruan Tinggi Nasional ataupun dengan Badan Riset Inovasi Nasional.

RUD dan Riset Bersama yang dilakukan dalam kerangka menjembatani penelitian terhadap kebijakan (*bridging knowledge to policy*) di wilayah Kota Pekalongan. Tema RUD dan Riset Bersama yang dilakukan didasarkan atas isu strategis pembangunan, yaitu isu strategis RKPD Kota Pekalongan. Seleksi pelaksana RUD dan Riset Bersama didasarkan atas inovasi yang akan dikembangkan oleh pelaksana terhadap isu strategis pembangunan. RUD dan Riset Bersama memiliki sasaran merumuskan kebijakan pembangunan, sebagai inovasi pembangunan, dalam kerangka pembangunan Kota Pekalongan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pemangku kepentingan pembangunan serta memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Di sisi lain, tantangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah bagaimana terus meningkatkan peran perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan

untuk semakin besar berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan lebih memahami permasalahan maupun isu strategis pembangunan, sehingga diharapkan memiliki penguasaan permasalahan yang lebih baik, dalam pengembangan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah:

(1) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
(2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
(3) Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap tugas dan fungsi organisasi.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Dalam Maturitas SPIP terkandung unsur Manajemen Resiko Indeks/MRI, yaitu Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sasaran Program terkait Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko yaitu Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021 Kota Pekalongan telah melakukan penilaian terhadap MRI.

Tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan dari tahun 2018 sampai 2022 terus meningkat, diawali dari level 3 dengan catatan sampai level 3 penuh, namun turun di tahun 2021 menjadi level 2,812 dengan target kinerja akhir maturitas 5. Penurunan tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan antara lain adanya perubahan dalam Uraian Indikator Karakteristik Pengendalian dan belum optimalnya penerapan SPIP. Penguatan APIP diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. 3 (tiga) area penguatan pengawasan APIP Inspektorat Kota Pekalongan adalah: Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP; Aspek Sumber Daya (Sumber daya anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan Sumber daya

manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis) dan Aspek Tata Kelola (Pelaporan pengawasan berindikasi KKN, Standar Pengawasan, dan Penjaminan Mutu).

Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.174 berikut.

Tabel 2.174 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tingkat Maturitas SPIP	2018	2019	2020	2021	2022
Level	Level 3 dengan catatan	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 2,812	Level 3,022

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2023

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2018 – 2022 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib. Pada tahun 2022 masih terjadi gangguan keamanan antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Jumlah kasus yang naik yaitu penganiayaan, pencurian dan penipuan, sedangkan jumlah kasus yang menurun yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.175 berikut.

Tabel 2.175 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Tindak Kejahatan	2018	2019	2020	2021	2022
Pembunuhan	1	0	2	0	0
Pemerkosaan	2	0	0	2	0
Penganiayaan	6	7	3	2	13
Pencurian	45	71	33	59	81
Penipuan	11	19	18	2	31
Penadahan	0	0	0	0	0
Narkotika dan Psikotropika	50	44	64	46	39

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2023

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel 2.176 menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2018-2022.

Tabel 2.176 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus Konflik Sosial	2	1	1	2	0

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2023

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial. Pengelolaan potensi konflik sosial dilakukan melalui Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, antara lain dengan kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa, Pembinaan Karakter Dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda, Pengawasan Orang Asing,

Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, dan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah.

2. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik dilakukan setiap akan diselenggarakan pemilihan umum.

Tabel 2.177 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Kegiatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kegiatan pembinaan Politik Daerah	32	32	38	36	34

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2023

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pamilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wali Kota) dan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2020 telah diadakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasi di Kota Pekalongan sebesar 79,35 persen.

Tabel 2.178 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

JENIS PEMILIHAN UMUM	2018	2019	2020	2021	2022
Pemilu Kepala Daerah (Wali Kota) (persen)	-	-	79,35	-	-
Pemilu Kepala Daerah (Gubernur) (persen)	64,00	-	-	-	-
Pemilu Presiden (persen)	-	85,88	-	-	-
Pemilu Legislatif (persen)	-	85,51	-	-	-

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2023

3. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2017-2021 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut diupayakan terus meningkat, dimana pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 1 kali, tahun 2020 sebanyak 3 kali, tahun 2021 sebanyak 7 kali dan tahun 2022 sebanyak 2 kali.

Tabel 2.179 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2018 – 2022

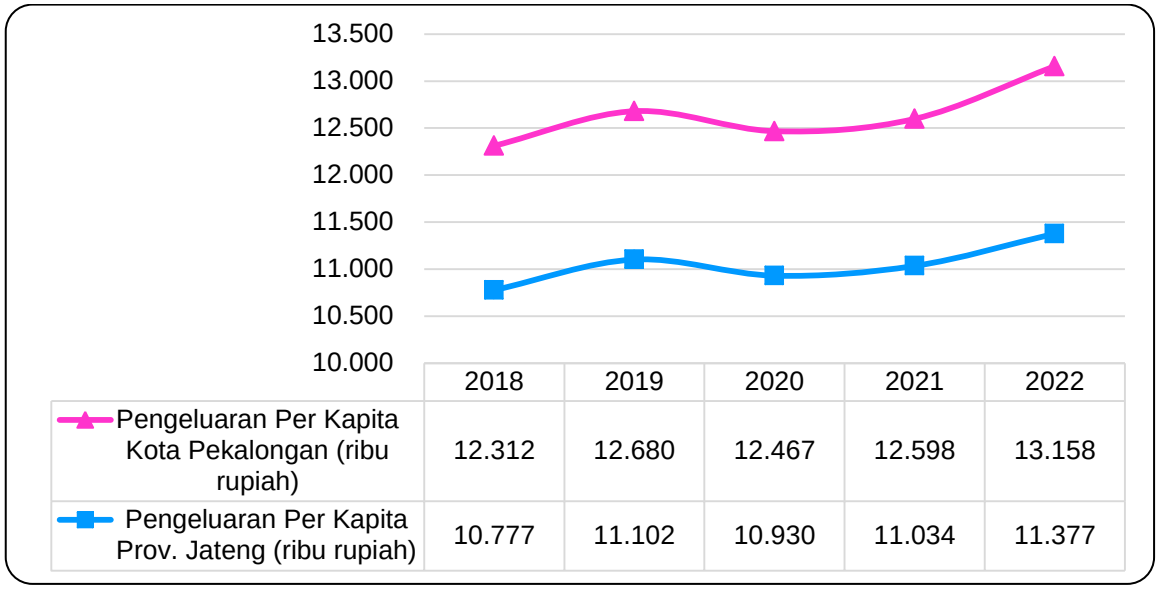
Kegiatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	3	7	2

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.



	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan (ribu rupiah)	12.312	12.680	12.467	12.598	13.158
Pengeluaran Per Kapita Prov. Jateng (ribu rupiah)	10.777	11.102	10.930	11.034	11.377

Gambar 2.51 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2018-2022

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2022

Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2018-2022. Hal ini terlihat dari pengeluaran riil per kapita per tahun (disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Pada 2018 berada di angka Rp.12.312.000, dan di tahun 2019 naik hingga Rp.12.680.000. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan menurun menjadi Rp.12.467.000 dan meningkat sebesar Rp. 12.598.000 di tahun 2021, kemudian meningkat kembali di angka Rp. 13.158.000 pada tahun 2022. Gambar 2.51 menjelaskan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan. Kondisi transportasi di Kota Pekalongan menunjukkan jumlah kendaraan cukup fluktuatif (baik kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat/lebih), dimana sepanjang tahun 2018 sampai 2021 jumlahnya naik turun. Adapun penambahan panjang jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Namun demikian rasionya tidak berubah signifikan. Pada tahun 2022 mengalami perubahan secara signifikan menjadi 0,0003. Kondisi selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.180.

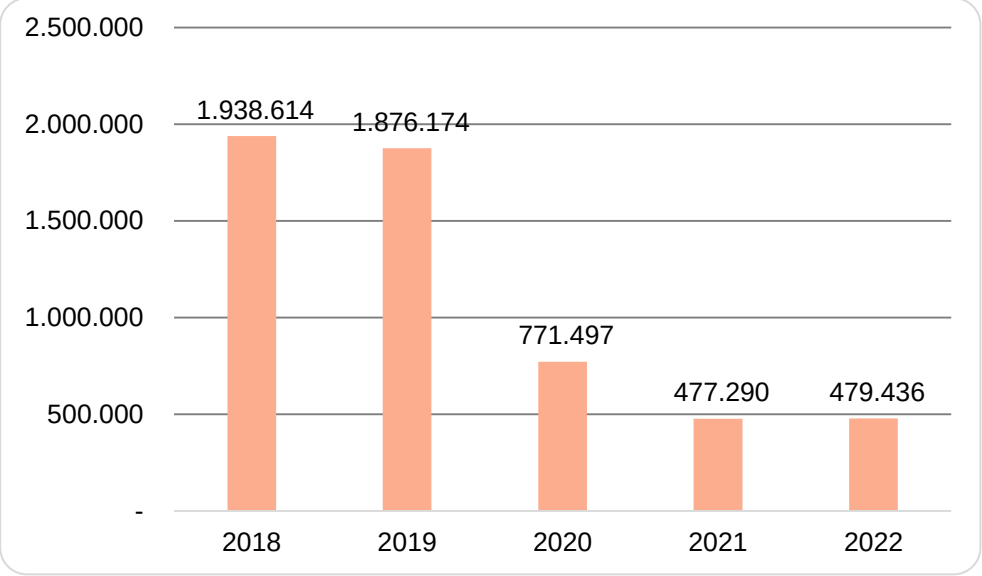
Tabel 2.180 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2018	155,44	157.332	0,0009
2019	155,44	163.989	0,0009
2020	153,41	173.114	0,0009
2021	153,41	122.590	0,0013
2022	153,41	572.435	0,0003

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2023, 2023

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Terminal tipe A terdapat di Kota Pekalongan yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2019, yaitu dari 1.938.614 penumpang menjadi 1.876.174 penumpang. Penurunan jumlah penumpang yang cukup drastis terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 771.497 penumpang dan 477.290 penumpang. Di tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan penumpang menjadi 479.436 penumpang. Adapun perkembangannya disajikan dalam Gambar 2.52 berikut.



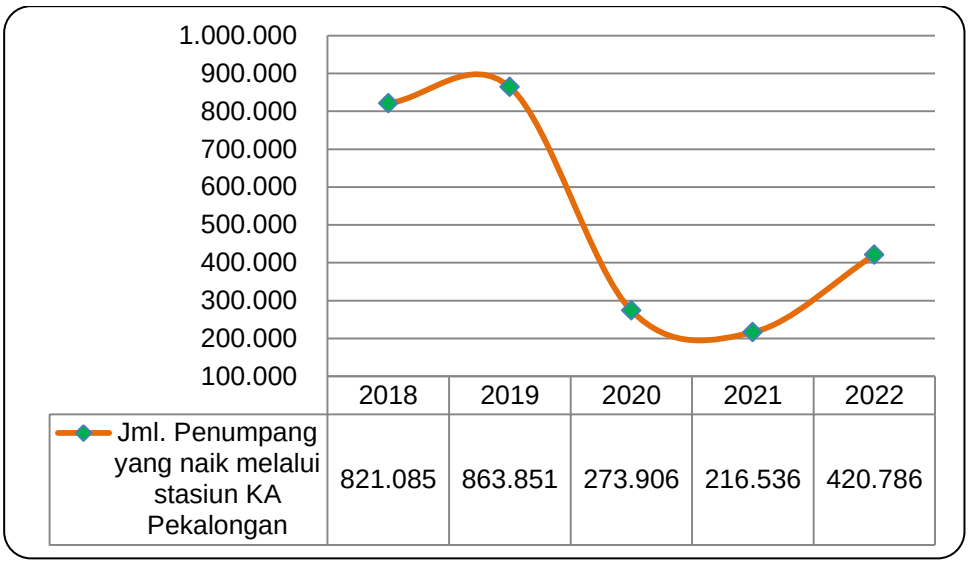
Gambar 2.52 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022 dan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2023

3. Jumlah Penumpang yang Naik Melalui Stasiun Kereta Api

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan

memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.



	2018	2019	2020	2021	2022
Jml. Penumpang yang naik melalui stasiun KA Pekalongan	821.085	863.851	273.906	216.536	420.786

Gambar 2.53 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

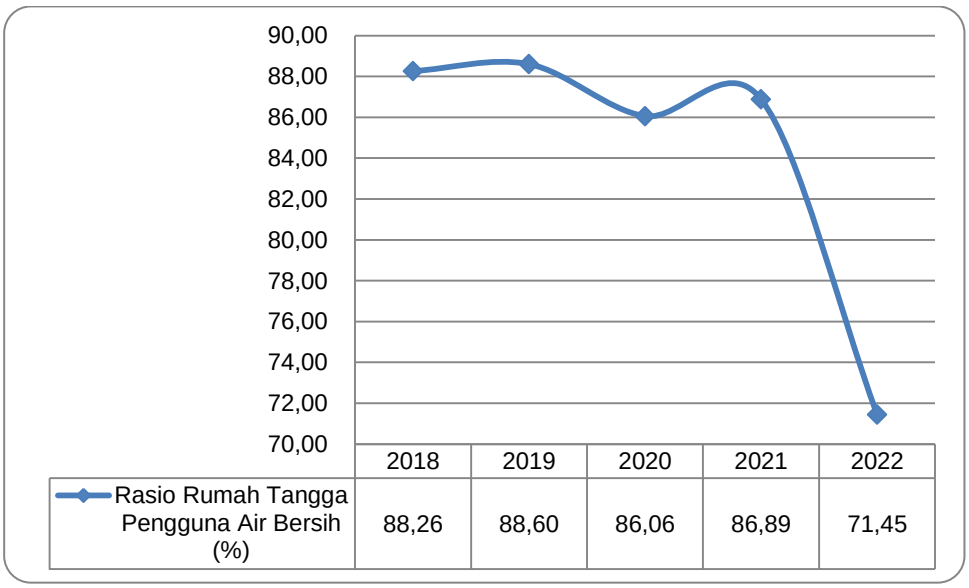
Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan sangat fluktuatif setiap tahunnya seperti yang disajikan dalam Gambar 2.53. Tahun 2018 jumlah orang yang naik melalui stasiun sebanyak 821.085 penumpang. Dalam kurun waktu 2018-2019 terus mengalami peningkatan sehingga jumlah penumpang yang naik melalui stasiun pada tahun 2018 sebanyak 863.851 penumpang. Namun jumlah penumpang menurun drastis mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 sebanyak 273.906 dan 216.536 penumpang. Hal ini disebabkan adanya larangan bepergian keluar daerah karena adanya pandemi *COVID-19*. Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan meningkat kembali di tahun 2022 sebanyak 420.786.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang akan menuju maupun dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bus. Pengembangan moda transportasi bus agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bus, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kota Pekalongan dilayani melalui PDAM (oleh Perumda Tirtayasa) dan melalui PAMSIMAS (oleh masyarakat). Secara umum, jumlah layanan air minum (Sambungan Rumah/ SR) oleh PDAM cenderung meningkat sejak tahun 2018-2022. Sebaliknya, jumlah layanan air minum (Sambungan Rumah/ SR) oleh PAMSIMAS cenderung menurun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menambah pasokan air minum yang bersumber dari air permukaan di banding dengan air bawah tanah. Meskipun demikian, secara keseluruhan (PDAM dan PAMSIMAS), jika dilihat

secara persentase capaian layanan air minum sejak 2018 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sebagaimana Gambar 2.54.



Gambar 2.54 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: DPUPR, Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan (diolah), 2023

Menurunnya rasio rumah tangga pengguna air bersih yang terjadi pada tahun 2022 dikarenakan perbedaan cara menghitung dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, diasumsikan 1 SR melayani 4,03 jiwa sebagaimana hasil audit BPKP atas kinerja Perumda Tirtayasa tahun 2023 (mengacu pada data BPS yang diperoleh dari pembagian jumlah penduduk dengan jumlah Kartu Keluarga (KK)). Sementara itu, cara menghitung pada tahun-tahun sebelumnya diasumsikan 1 SR melayani 5 jiwa. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.181 berikut.

Tabel 2.181 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

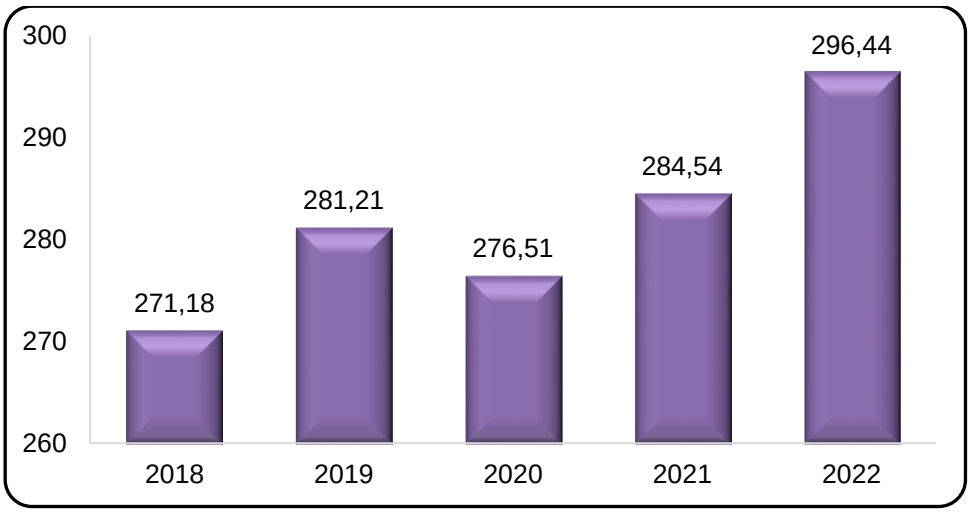
Tahun	PDAM					PAMSIMAS & DAK (Sumur)		TOTAL		Persentase	
	SR (Sambungan Rumah)		HU (Hidran Umum)								
	Jumlah	Jiwa	Jumlah HU	Jumlah Rumah Tangga	Jiwa	Jumlah	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa
2018	27.017	135.085	240	4.800	24.000	21.712	108.560	53.529	267.645	88,26	88,26
2019	27.565	137.825	246	4.920	24.600	21.933	109.665	54.418	272.090	88,60	88,60
2020	26.923	134.615	214	4.280	21.400	21.663	108.315	52.866	264.330	86,06	86,06
2021	27.193	135.965	214	4.280	21.400	22.103	110.515	53.576	267.880	86,89	86,89
2022	27.538	110.978	251	6.228	25.100	21.150	85.235	54.916	221.313	71,45	71,45

Sumber: DPUPR, Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan (diolah), 2023

5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun berfluktuasi.

Konsumsi listrik selama tiga tahun terus meningkat. Pemakaian listrik tahun 2018 sebesar 271,18 MWh, maka pada akhir tahun 2021 sebesar 296,44 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022.



Gambar 2.55 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

6. Persentase Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2018-2022 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah pengguna listrik berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan bertambahnya jumlah pelanggan PLN, terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan non rumah tangga seperti kantor, badan usaha atau pelanggan lain. Persentase jumlah pelanggan PLN pada tahun 2018 sebesar 118,60 persen. Jumlah tersebut terus naik hingga mencapai 121,44 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 101,50 persen dan meningkat kembali di tahun 2022 mencapai 113,25. Secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.182 berikut.

Tabel 2.182 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Pengguna Listrik	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	96.121	101,50
2022	99.388	87.758	113,25

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023, 2023

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi tahun 2019 sebesar 75 persen, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018-2022 jumlah hotel berbintang, baik bintang 1, 2,dan 3 sebanyak 10 (sepuluh) hotel. Sedangkan hotel melati berjumlah 20 (dua puluh) hotel pada tahun

2018 sampai 2019 dan 25 (dua puluh lima) hotel pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Hal yang menjadi tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang memadahi salah satunya yakni hotel.

Tabel 2.183 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Akomodasi	2018	2019	2020	2021	2022
Hotel Berbintang	10	10	10	10	10
Hotel Non Berbintang	20	20	25	25	25

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2023, 2023

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

1. Lama Proses Perijinan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan pemberian izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Sampai dengan tahun 2022, telah dibuka layanan perijinan untuk 67 jenis ijin, dimana lama proses perijinan bervariasi antara rentang waktu 2-30 hari. Dengan adanya SOP lamanya proses perijinan, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan jaminan kepastian waktu proses perijinan.

2. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 18 Perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.184 berikut.

Tabel 2.184 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

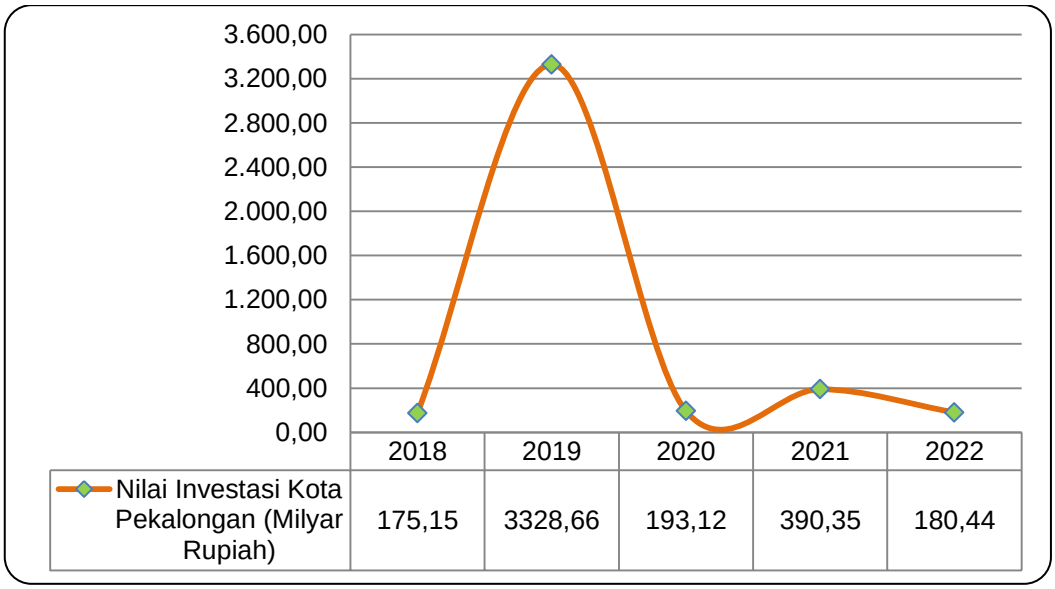
No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
1	3	2009	Bangunan Gedung
2	12	2011	Pajak Reklame
3	30	2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
4	28	2011	Rumah Pemotongan Hewan Dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
5	10	2011	Pajak Sarang Burung Walet
6	13	2012	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
7	20	2012	Perizinan Dan Sertifikat Bidang Kesehatan
8	8	2012	Penanaman Modal
9	15	2015	Penyelenggaraan Rumah Kos
10	13	2015	Penyelenggaraan Perhubungan
11	16	2015	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet
12	11	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
13	13	2018	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	1	2018	Izin Usaha Industri
15	7	2018	Penyelenggaraan Pendidikan
16	19	2019	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
17	1	2020	Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040
18	9	2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2022

3. Nilai Investasi

Pemerintah Kota Pekalongan terus mendukung upaya pencapaian realisasi investasi dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan dan aturan. Dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Kota Pekalongan juga berusaha menciptakan kondisi daerah yang pro investasi yaitu dengan menguatkan perekonomian di sektor jasa dan perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Pekalongan. Dan berikut disajikan data perkembangan investasi di Kota Pekalongan.

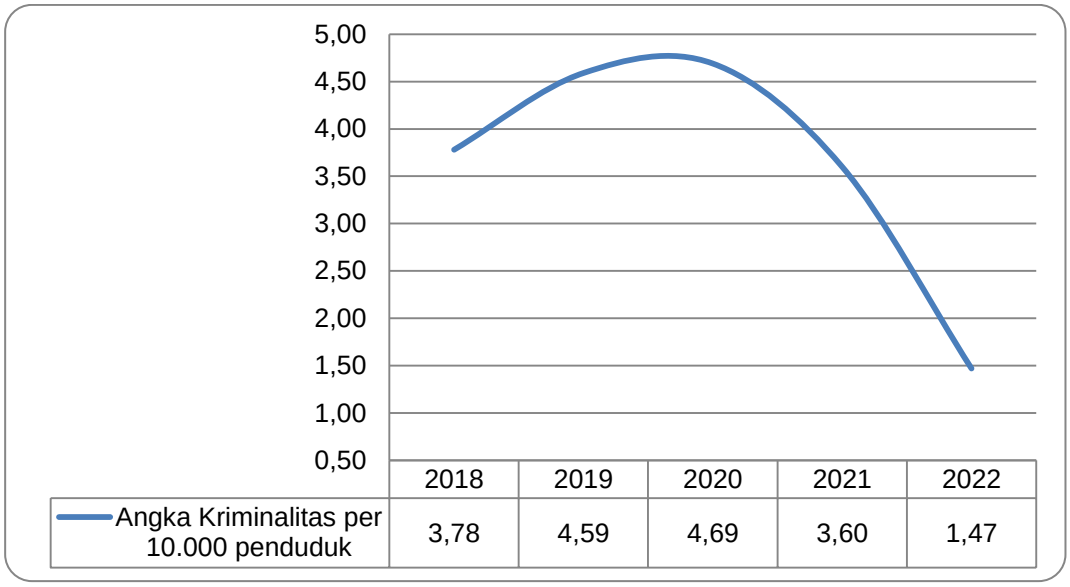


Gambar 2.56 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2023

4. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana secara garis besar angka kriminalitas di Kota Pekalongan bersifat fluktuatif, mengalami naik turun sepanjang lima tahun terakhir seperti yang disajikan dalam Gambar 2.57 berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	3,78	4,59	4,69	3,60	1,47

Gambar 2.57 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2023

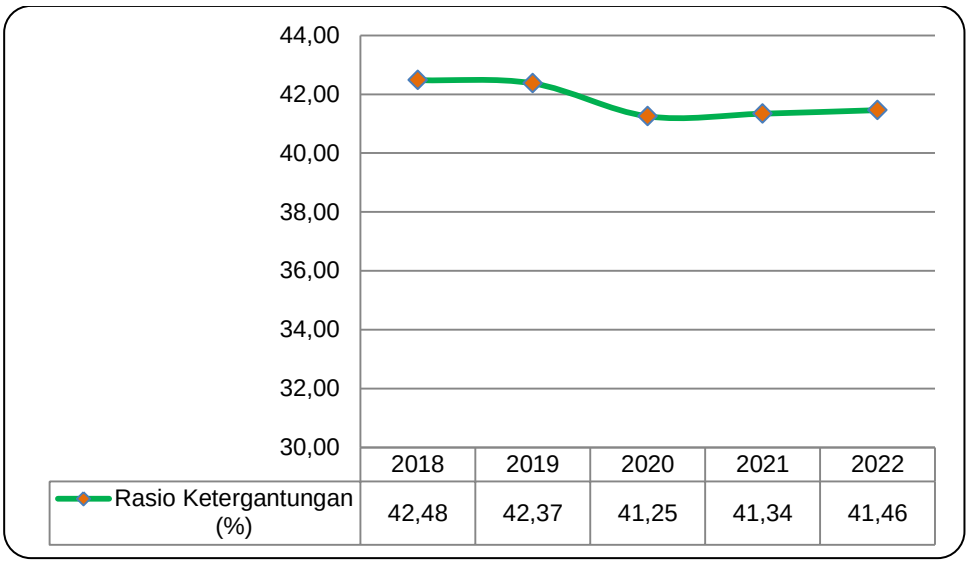
Meskipun demikian, kondusivitas di Kota Pekalongan masih terkendali sehingga masih menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2017 – 2020, rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 42,64 dan pada tahun 2020 menjadi 41,25. Namun meningkat di tahun 2021 dan 2022 menjadi 41,34 dan 41,46.

Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci disajikan dalam Gambar 2.58 berikut.



Gambar 2.58 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023 (diolah), 2023

2.1.4.5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Yang kemudian menjadi dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong Sistem Inovasi Daerah yang ada di daerahnya, sehingga terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan pemetaan ekosistem inovasi melalui pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) ini bertujuan menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas nilai tambah dan persaingan, demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berdasarkan capaian Tahun 2022, Kota Pekalongan dengan nilai indeks sebesar 3,14 menunjukkan bahwa Kota Pekalongan merupakan pembangkit daya saing bagi dari Kabupaten yang berbatasan, yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

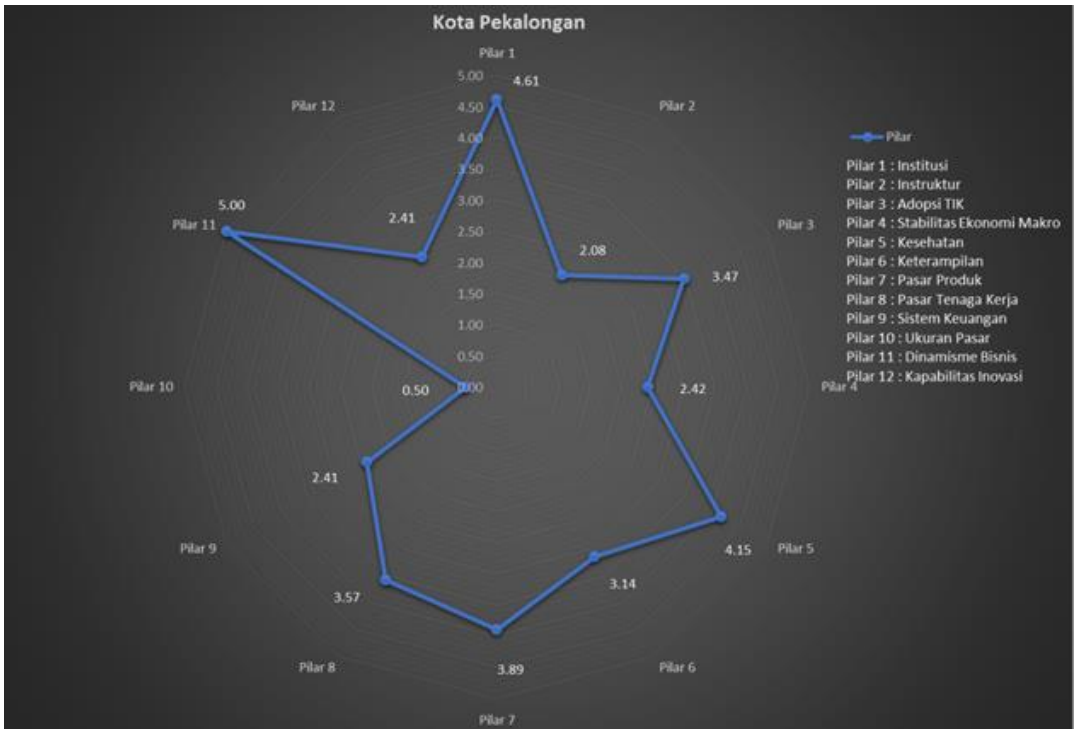
Tabel 2.185 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2018 - 2022

No	Kab/Kota	Nilai Indeks				
		2018*	2019*	2020*	2021*	2022
1	Kota Pekalongan	4,460	6,345	3,676	3,418	3,14
Persandingan dengan Kabupaten sekitar						
2	Kab. Pekalongan	4,557	5,821	3,613	3,395	2.91
3	Kab. Batang	3,765	6,091	3,368	3,403	2.97
4	Kab. Pemalang	3,978	4,642	3,063	2,848	2,93
Persandingan dengan Kota di Jawa Tengah						
5	Kota Tegal	3,992	6,789	3,755	3,298	3,30
6	Kota Salatiga	3,912	6,448	3,568	3,430	3,40
7	Kota Magelang	4,442	4,833	3,259	3,130	3,50

* Terdapat perubahan metode pengukuran IDSD antara tahun 2018-2021 dan Tahun 2022. Tahun 2018-2021 menggunakan kuesioner yang diisi oleh Pemerintah Provinsi/Kab/Kota sedangkan pada Tahun 2022, pengukuran dilakukan mandiri oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sumber: idsd.jateng.id (diolah), 2023

Secara lebih rinci, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur melalui 4 aspek, yang meliputi 12 pilar (Institusi, Instruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Porduk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis, Kapabilitas Inovasi). Capaian Kota Pekalongan berdasarkan skor pilar dalam ekosistem inovasi dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar 2.59 Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi

Sumber: diolah dari hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) BRIN

Berdasarkan capaian diatas, masih terdapat beberapa skor pilar yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan capaian Indeks Daya Saing Daerah, antara lain infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, system keuangan, kapasitas inovasi. Hal ini disebabkan karena capaian pilar masih di bawah angka 3 (tiga). Adapun pada pilar ukuran pasar, nilai yang masih rendah sangat dipengaruhi rasio nilai impor terhadap PDRB, yang hanya diukur di tingkat provinsi.

Disamping itu, berdasarkan tolak ukur kondisi Inovasi Daerah melalui penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kemendagri, Kota Pekalongan termasuk kategori Inovatif untuk kategori Kota (Peringkat 38 dari 93 Kota se Indonesia) dengan nilai 53,96 di Tahun 2022. Indeks inovasi tersebut meningkat cukup signifikan dibanding capaian tahun 2021 (44,72).

Dalam rangka mengembangan inovasi lebih lanjut, Kota Pekalongan menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah yang menetapkan Inovasi Daerah Tahun 2022, menetapkan pemenang inovasi tahun 2022 dan inisiasi inovasi tahun 2023, serta inisiasi inovasi yang mendapatkan pembiayaan APBD tahun 2023. Berikut ini gambaran inovasi yang telah dilakukan Kota Pekalongan tahun 2020-2022, yang meliputi:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*. Infrastruktur jaringan (disebut Batiknet) serta berbagai aplikasi telah dibangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Hampir semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkoneksi jaringan Batiknet, baik menggunakan serat optik maupun radio *wireless*. Lebih dari 50 SIM (Sistem Informasi Manajemen)/aplikasi telah dibangun guna mendukung tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2022, telah disusun inovasi yang terkait tata kelola pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut:

a. Sistem Informasi Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis E-Presensi dan E-Kinerja atau SIMANTAP BISA bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. SIMANTAP BISA adalah bentuk pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi melalui implementasi transformasi SDM Aparatur dan transformasi digital, merupakan inovasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan yang diinisiasi sejak Bulan Januari 2020 dan dilaunching pada tanggal 26 Juni 2021.

   Pada Tahun 2022 dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan regulasi terbaru sehingga aplikasi menjadi SIMANTAP BISA REBORN 23, dengan pembaharuan berupa Penyesuaian proses bisnis penyusunan SKP, Penerapan dialog kinerja, Pemberlakuan verifikasi dan evaluasi kinerja bulanan, dan Penilaian perilaku kerja.

b. Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) di Sekolah Negeri Melalui Aplikasi Kepegawaian Pendidik Tenaga Kependidikan (ASIK-PTK) pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. ASIK-PTK merupakan aplikasi yang dapat menggabungkan data kepegawaian di saruan pendidikan baik yang berstatus PNS, PPPK maupun PTK Pengganti sehingga pendataan dan penataan Pegawai di satuan pendidikan dapat terintegrasi.

c. Aplikasi e-UMK (e-Uang Muka Kegiatan) (2022) adalah sebuah inisiatif Bappeda Kota Pekalongan dalam upaya untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing – masing rekening belanja. Aplikasi ini

memudahkan bendahara dan bendahara pembantu dalam hal pengadministrasian kegiatan, dan memudahkan PPTK dan PA dalam monitoring capaian anggaran kegiatan.

d. Tools Cascading Kinerja (2022) , merupakan aplikasi yang disusun Bappeda untuk membantu merumuskan hierarki kinerja, dari visi, misi, program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja dilakukan dengan menginput data ke dalam aplikasi. Tools ini digunakan oleh Bappeda dan OPD dalam penyusunan Renstra OPD dengan mengkaitkan dengan struktur kinerja dalam RPMD Kota Pekalongan 2021-2026.
e. Klinik SPIP (2022) adalah layanan konsultasi dari Inspektorat kepada OPD di Kota Pekalongan yang membutuhkan informasi terkait Sistem Pengendalian Internal

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

a. SINOREG, saat ini penomoran produk hukum menggunakan database excel, data diinput ke excel, kemudian ditulis pada surat kendali. Dengan dibuatnya aplikasi SINOREG data yang diinput dapat langsung dicetak sehingga mempercepat pelayanan serta pengolahan data dan laporan lebih mudah.
b. SiMANTAN (Sistem Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan) Sistem Informasi tata ruang menampilkan peta administrasi,peta tematik, peta dasar, peta struktur ruang, peta pola ruang. Selain peta, terdapat menu layanan untuk permohonan pengurusan KRK, Siteplan dan Dokumen Kajian KKPR Berusaha. Serta dilengkapi menu Pengaduan, sehingga masyarakat yang mengetahui ada pelanggaran pemanfaatan ruang bisa dapat memberikan informasi dengan cepat dan mudah.
c. iPekalongankota adalah perpustakaan digital berbasis media sosial untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat dalam mengakses perpustakaan dan koleksi bahan bacaan karena dapat diakses 24 jam dimana saja dan kapan saja serta gratis.
d. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa (SIM-PBJ) merupakan inovasi aplikasi pengadaan yang mempunyai peran cukup penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan regulasi/peraturan/ketentuan yang berlaku dimana dokumen pengadaan barang/jasa (kontrak) yang masuk akan diverifikasi dan divalidasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan data/dokumen
e. Pengembangan RA KESEL MLAKU. Ra Kesel M'laku (ApaRAt KEcamatan SELatan Memberikan LAyanan Antar DoKUmen) (sejak 2021), merupakan layanan dari kecamatan Pekalongan Selatan dalam mengantar jemput dokumen administrasi bagi masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan. Pada tahun 2022 dikembangkan dengan menggunakan call center yang dapat dicakup seluruh elemen masyarakat
f. PUSDALU (Puskesmas Buka Sampai Dalu) Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan telah membuka beberapa Puskesmas sampai jam 21.00 atau jam 9 malam, diantaranya Puskesmas Tirto, Puskesmas Noyontaan, Puskesmas Jenggot dan Puskesmas Dukuh. Layanan ini sudah dimulai tahun 2017 dan masih berlangsung hingga sekarang. Hal ini dilakukan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada malam hari. Pada

Tahun 2022 ada Penambahan pelayanan PUSDALU yaitu Pelayanan KIA/KB, Imunisasi dan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.

g. New Sistem ApliKasi Perizinan Online Ringkas & Ekonomis (NEW SAKPORE). SAKPORE yang dibangun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan sejak tahun 2019 merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah kota untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada warganya dan juga untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pekalongan, DPMPTSP Kota Pekalongan mengembangkan inovasi SAKPORE menjadi NEW SAKPORE dengan fitur-fitur baru yang bermanfaat seperti: Peta Tata Ruang, Peta Reklame, Survey Online, Notifikasi Whatsapp gateway, terintegrasi dengan SisDMK Kementerian Kesehatan RI, Pengaduan Online danTanda Tangan Elektronik.
h. Oops Mami (Omah Olah Pilah Sampah MAndiri dan berekonoMi) (2022), inovasi pengolahan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, dimana proses *Reuse, Reduce*, dan *Recycle* dilakukan dengan mesin pemilah sampah untuk memilah sampah yang berasal dari masyarakat, dimana sampah plastik bisa terpisah sendiri untuk dihancurkan menjadi bubur sampah.
i. Pengembangan e-Rekam Medis. Pada tahun 2021 RSUD Bendan mulai mengembangkan Rekam Medik Elektronik yang dimulai dari pelayanan Rawat Jalan dan terus berkembang untuk semua pelayanan seperti IGD/PONEK, Hemodialisa, Rawat Inap dan Bedah Sentral. Penerapan e-Rekam Medis untuk mempercepat pelayanan, keakuratan data, efisiensi waktu dan kemudahan pelaporan administrasi.
j. Aplikasi Siulan Mas (Sistem Informasi Usulan dan Pengaduan Masyarakat) merupakan aplikasi pengaduan dan usulan bantuan sosial, yang mempermudah masyarakat untuk mengadu terkait penerimaan atau tidak diterimanya bantuan sosial dari tingkat kelurahan. Dengan system ini, akan meringkas birokrasi penanganan pengaduan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Sosial
k. E-SENDOK CEPAT (Setwan Dokumen Cepat) merupakan Sistem informasi (aplikasi) untuk mendokumentasikan surat Permohonan Kunjungan Kerja Luar Daerah dan Permohonan audiensi (rapat dengar pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama) ke DPRD Kota Pekalongan.
l. Aplikasi Pengendalian Penanaman Modal (SIAPPEM) Kota Pekalongan. SIAPPEM merupakan aplikasi yang dibangun untuk memudahkan pekerjaan di bidang penanaman modal. dalam sistem ini terdapat fitur yang menunjang antara lain profil investasi Pemerintah Kota Pekalongan dan pelaku usaha
m. Silancar (SI AAP Lacak & Antar) (2022) merupakan inovasi pelayanan oleh kecamatan Pekalongan Utara untuk mempermudah layanan adminduk dan non adminduk bagi warga di kecamatan Pekalongan Utara dan memantau progress layanan secara online.
n. Inovasi Progam Penurunan Angka Stunting (Pak Canting) di Kecamatan Pekalongan Timur merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam membantu Progam Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam Gerak Penurunan Angka Stunting khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur.

3. Inovasi Daerah Lainnya

Inovasi daerah lainnya merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi dalam

konteks ini adalah inovasi selain tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kurun waktu 2020-2022 (sedang berjalan), inovasi daerah lainnya antara lain meliputi:

a. Inovasi pada urusan pendidikan

1) Kurikulum Muatan Lokal Kebencanaan Jenjang Sekolah Dasar.

Inovasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam menyusun buku muatan lokal kebencanaan (banjir rob, banjir hujan, sampah, limbah, penurunan muka tanah dan wabah penyakit) sebagai pegangan guru dalam memberikan materi kebencanaan. Inovasi dilakukan dalam bentuk membuat capaian pembelajaran, petunjuk penggunaan, materi dan strategi pembelajarannya. Materi muatan lokal dapat diberikan secara terintegrasi dengan materi pelajaran yang sudah ada, melalui ekstrakurikuer, maupun menjadi mata pelajaran tersendiri.

2) MOLIKA SPENSE merupakan akronim dari mobile learning matematika SMPN 11 Pekalongan berbasis aplikasi android yang digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran matematika.

3) TUNTAS (Totalitas Upaya Nyata Tamatkan Anak Tidak Sekolah)

TUNTAS merupakan program mengentaskan ATS di Kota Pekalongan per kelurahan-kelurahan untuk merangkul ATS di tiap-tiap daerah tujuannya agar ATS di Kota Pekalongan bisa nihil atau setidaknya mereka mau bersekolah kembali dengan berbagai metode yakni: tatap muka, daring maupun penugasan memudahkan berbagai hal agar anak didik mau bersekolah kembali.

b. Inovasi pada urusan kesehatan

1) Saber AKI-AKB (Sapu Bersih Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi) (2020), merupakan inovasi dari Dinas Kesehatan dengan melakukan integrasi kegiatan pengurangan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, yang melibatkan stakeholder yang cukup luas, antara lain dokter anak, dokter kandungan, kader puskesmas, PKK, dll, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat.

2) Inovasi kebijakan kesehatan di puskesmas sebagai faskes tingkat pertama di tahun 2022.

Tabel 2.186 Inovasi Daerah Bidang Kesehatan

No.	Nama Inovasi	Puskesmas
1	GERBEG CHINTA (Gerakan Bersama Cegah Hipertensi Kita)	Puskesmas Kramatsari
2	JAGA SIKON	Puskesmas Kusuma Bangsa
3	Jaga Aurat	Puskesmas Kusuma Bangsa
4	JAGA IMUN BRO	Puskesmas Kusuma Bangsa
5	Ber-KB Yok	Puskesmas Noyontaan
6	Jaring si TB (Jaring Pasien TBC)	Puskesmas Noyontaan
7	Suling Mas Darseh	Puskesmas Pekalongan Selatan
8	Lopis (SIM Kesehatan Terintegrasi)	Puskesmas Pekalongan Selatan

No.	Nama Inovasi	Puskesmas
9	MINUM JUS (Monitoring INformasi pertUMbuhan Janin melalui USg	Puskesmas Sokorejo
10	ADU TIKUS (pelayanan terpADU TIbi dan KUSta)	Puskesmas Sokorejo
11	AJIB RESTI (Th 2022)	Puskesmas Tirto
12	GEMESI (th 2022)	Puskesmas Tirto
13	PUSDALU (Penambahan pelayanan KIA/KB, Imunisasi dan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut) th 2022	Puskesmas Tirto
14	Deteksi Pasien TB	Puskesmas Tondano
15	Ber-KB Yok	Puskesmas Noyontaan
16	Jaring si TB	Puskesmas Noyontaan
17	Pasung Jiwa	Puskesmas Dukuh
18	Grup WA ibu hamil Permata Hati	Puskesmas Buaran
19	Si Bawal Hati (Siaga Banjir Kawal Ibu Hamil Resti)	Puskesmas Kramatsari
20	Remaja STAR (Remaja Sehat Tanpa Asap Rokok)	Puskesmas Kramatsari
21	Permata Hati	Puskesmas Buaran
22	PJ RW Satu Hati (PJ RW Bersama Pantau Bumil Resti)	Puskesmas Bendan
23	Si Jempolan Bendan (Siap MEndaftarkan Kartu BPJS Bati Ibu yang Melahirkan di Peskesmas Bendan)	Puskesmas Bendan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

c. Inovasi pada urusan perumahan dan permukiman

1) REPARASI (RElokasi tanPA ReAkSI penolakan) (2021) merupakan inovasi kebijakan atau non digital dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman, yakni merelokasi tanpa reaksi penolakan karena ada keterlibatan dan dukungan kuat dari stakeholder terkait, masyarakat yang tidak kehilangan mata pencahariannya walaupun terelokasi.

2) Omahe Ndewe (Sistem Informasi Pengelolaan Identifikasi Data Rumah Kota Pekalongan) (2022), dikembangkan berdasarkan hasil forum Data di tahun 2021. Aplikasi ini dikembangkan untuk penyediaan database infrastruktur pemukiman, namun kemudian berkembang menjadi aplikasi yang mencakup berbagai macam variabel data yaitu data layanan air minum, layanan sanitasi, layanan bencana, rumah tidak layak huni, dan sebagainya Aplikasi ini dibangun dengan mengintegrasikan data PBB yang sudah berbasis spasial dan data SIMPERUM Provinsi Jawa Tengah. “OMAHE NDEWE” akan menyajikan data titik koordinat rumah, memberikan nomor induk rumah, status keterhunian rumah, identitas penghuni rumah, kepemilikan rumah, profil rumah tidak layak huni, data rawan bencana banjir, rob, longsor, puting beliung, layanan air bersih, akses sanitasi, dan pengelolaan sampah rumah tangga.

d. Inovasi pada urusan kelautan dan perikanan

1) **Granit** (Program Nila Gratis) (2021) inovasi dari inovasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Granit merupakan salah satu inovasi adaptasi pemanfaatan

lahan tergenang rob dengan Nila Salina, yakni ikan Nila yang dapat hidup pada air payau. Dengan adanya inovasi Granit, lahan tergenang rob tetap dapat dimanfaatkan sebagai lahan budidaya oleh masyarakat.

2) **Jajan Ikan** (Jajal Olahan Perikanan) (2021). Jajan Ikan merupakan inovasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal pembinaan dan pelatihan pengolah ikan pemula pada teknopark perikanan. Selain itu inovasi ini memfasilitasi pengolah ikan dalam hal perizinan berusaha seperti SKP, BPOM, SNI, Halal, PIRT, NIB.

3) **Olik** (Aneka Olahan Ikan) (2021) inovasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal peningkatan nilai tambah olahan ikan melalui penambahan sarana prasarana pemasaran.

4) Rekom BBM (2022) merupakan inovasi yang mempermudah dan mempercepat nelayan untuk mendapat pelayanan mendapatkan surat Rekom Pembelian Jenis BBM Tertentu dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku tanpa dipungut biaya (gratis).

5) **TPI LUNAS** (2022) merupakan inovasi dalam manajemen pembayaran lelang ikan yang selesai pada hari yang sama, sehingga penerimaan pendapatan nelayan tidak tertunda. Inovasi TPI Lunas belum terdapat di daerah sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi kapal-kapal nelayan untuk melaksanakan transaksinya di TPI Kota Pekalongan. TPI Lunas inovasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

6) **JALABU (**Adaptasi Pemanfaatan Jaring Jala Bubu) pada Laut Baru merupakan inisiatif dari Dinas Kelautan dan Perikanan (2022). Inovasi JALABU mengadaptasi kebutuhan resiliensi masyarakat yang terdampak banjir dan rob melalui pemberian bantuan Jaring, Jala dan Bubu. Melalui adaptasi profesi, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) beralih menjadi nelayan Perairan Umum Daratan (PUD).

7) **PELITA** (Pekalongan Lelang Ikan Transparan dan Amanah)(2022). PELITA merupakan inovasi dalam pelaksanaan lelang ikan di TPI Kota Pekalongan, dimana pelelangan ikan dilaksanakan dengan system lelang terbuka, lelang terbuka dengan sampel, dan lelang tertutup yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan PELITA diharapkan ikan yang dilelang dapat dipertahankan rantai dinginnya (*cold chain system).*

8) **APUNGKU** (Jaring Apung untuk pembudidaya Kreatif dan Unggul)(2022) merupakan inovasi Adaptasi pemanfaatan Jaring Apung untuk budidaya ikan pada kawasan terdampak banjir dan rob. Inovasi APUNGKU merupakan solusi bagi budidaya ikan tetap berlangsung tanpa rasa khawatir ikan terbawa air rob ketika pasang.

9) **Budi Mantap** (Budidaya Karamba Jaring Tancap) (2022) inovasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan . Budi Mantap merupakan inovasi dalam bentuk pemberian bantuan jaring tancap pada petambak yang terdampak banjir dan rob dengan kondisi belum terlalu tinggi sehingga budidaya ikan tetap dapat berjalan dan masyarakat tidak kehilangan sumber mata pencaharian.

10) **KOBILTU** (Kolam Bundar Ikan Lele Terpadu) (2022). KOBILTU merupakan budidaya lele pada kolam dengan bentuk bundar sebagai upaya perbaikan sirkulasi air dan ketahanan terhadap banjir rob di perkarangan. KOBILTU salah satu upaya adaptasi untuk masyarakat yang perkarangannya

terdampak banjir dan rob yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Inovasi pada urusan pertanian

Esa Pertama Kuljar (2020) merupakan inovasi kebijakan untuk penerapan kultur jaringan di Kota Pekalongan untuk mendapatkan bibit unggul dan berkualitas. Inovasi ini dikembangkan di Dinas Pertanian dan Pangan.

Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga harus bisa mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang diadakan setiap tahun. Pada tahun 2022, terdapat 5 (lima) pemenang Krenova sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.187 berikut.

Tabel 2.187 Inovasi Daerah Lainnya

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
1.	Dalook Minyak Pijat Aromaterapi sebagai Rehabilitasi Medik bagi Penyintas Covid-19 atas Keluhan Kesehatan Pasca Covid-19	Muhammad Bachtiar Rifai	Dalam rangka membantu proses rehabilitasi *long covid*, inventor mengembangkan obat tradisional yakni minyak balur, pijat, gosok, atau minyak urut. Inventor berhasil meramu bahan alam Indonesia menjadi satu produk alami yang menunjang terapi komplementer dalam rangka rehabilitasi medik penyintas Covid-19. Produk ini diberi nama Dalook yakni minyak pijat aromaterapi yang cocok dan bisa menjadi pilihan bagi para penyintas Covid-19 untuk digunakan dalam terapi medik pasca Covid-19.
2.	Aplikasi Edu Game Android atau PC dan Edu Box berbasis Kearifan Lokal Kota Pekalongan; Game Edukasi dan Kotak Edukasi "Petualangan Asik Kiko"	Fauziyah, S.Pd	Aplikasi Edu Game Android atau PC dan Edu Box berbasis kearifan lokal Kota Pekalongan merupakan inovasi pendidikan yang dapat digunakan untuk pembelajaran kepada anak tanpa harus bertatap muka. Aplikasi tersebut juga dapat disampaikan secara tatap muka disekolah dan dipadukan dengan praktik langsung kegiatan kunjungan puncak tema sesuai konten pembelajaran pada aplikasi.
3.	Spray Ekstrak Daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) sebagai Pencegahan FIlariasi di Kota Pekalongan	Nada Safira Salsabilla, dkk.	Penyakit filariasis juga dapat dicegah menggunakan sistem pengendalian nyamuk *Culex sp* menggunakan insektisida. Namun dampak Insektisida dapat meracuni tubuh dengan berbagai cara antara lain, yaitu tertelan, terhirup, terkena kulit atau mata. Oleh karena itu innovator membuat alternatif pencegahan filariasis dengan inovasi spray dari ekstrak daun jeruk nipis. Spray ini dapat mencegah dengan melindungi tubuh dari serangan nyamuk filariasis. Daun jeruk nipis merupakan bahan alami yang diketahui mengandung senyawa flavonoid sebesar 34,43%. Flavonoid dalam daun jeruk nipis

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
			dapat mengakibatkan denaturasi protein sehingga transport nutrisi pada sel terganggu yang berakibat larva nyamuk akan mati.
4.	Pembangkit Listrik Alternatif Kincir Angin Mudikal	Sutantiyo K., S.Pd., dkk.	Peningkatan kebutuhan energi listrik terjadi akibat pertambahan penduduk yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan tenaga listrik. Saat ini masyarakat Indonesia masih sangat tergantung pada pasokan listrik PLN. Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat inilah yang menuntut kita untuk membangun suatu alternatif pembangkit energi listrik yang efisien, murah, dan mudah diterapkan dalam skala rumah tangga. Secara geografis, Kota Pekalongan sebagai kota pesisir mempunyai potensi sumber daya angin yang tinggi. Hal ini melatarbelakangi inventor untuk membangun alat pembangkit listrik kincir ingin sebagai sebuah alternatif pembangkit listrik tenaga angin.
5.	Lampu Hias dari Paralon dan Bola Plastik Bekas	Moch. Apriyanto Akbar	Pembuatan Lampu Hias dengan bahan dasar Paralon dan Bola Plastik Bekas diharapkan dapat menjadi alternatif upaya pengelolaan sampah dengan cara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di samping sebagai sumber penerangan dan hiasan ruangan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan sedikit modal yang dibutuhkan.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Dalam mengembangkan inovasi daerah, tidak hanya Pemerintah yang berperan, tetapi juga dibutuhkan *stakeholder* lain untuk mendorong percepatan inovasi. Salah satu hal yang paling mendasar lahirnya inovasi daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itulah dibutuhkan peran perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan sekaligus pengembang inovasi.

Di Kota Pekalongan, terdapat perguruan tinggi antara lain Universitas Pekalongan (Unikal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Program Studi Diluar Kampus Utama Politeknik Negeri Jakarta (PSDKU PNJ) dengan total lebih dari 1.000 (seribu) orang yang lulus setiap tahunnya, baik lulusan Diploma, Sarjana maupun Magister.

Tabel 2.188 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No.	Nama Perguruan Tinggi	Periode Wisuda	Jumlah Lulusan (orang)			Jumlah
			D3	S1	S2	
1.	Universitas Pekalongan	Tahun 2022	98	1204	-	1302
2.	STMIK Widya Pratama	Tahun 2022	27	215	-	242
3.	Akbid Harapan Ibu	Tahun 2022	6	-	-	6
4.	PSDKU PNJ	Oktober 2022	-	-	-	-
5.	IAIN Pekalongan	Desember 2022				

Sumber: Berbagai sumber (diolah), 2023

Selain berperan menciptakan SDM yang berdaya saing, perguruan tinggi juga didorong untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi di Kota Pekalongan membangun pusat inovasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.189 berikut.

Tabel 2.189 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No	Perguruan Tinggi	Nama Pusat Inovasi
1.	Universitas Pekalongan	Pusat Inovasi dan Teknologi (PIT)
2.	STIMIK Widya Pratama	Tidak Ada
3.	IAIN Pekalongan	Tidak Ada
4.	Poltekkes Semarang Prodi Keperawatan	Tidak Ada
5.	AKBID Harapan Ibu	Tidak Ada

Sumber: Berbagai sumber (diolah), 2022

2.2 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan RKPD Tahun 2024 memperhatikan hasil evaluasi RKPD triwulan IV tahun 2022.

2.2.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2022

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan RKPD Tahun 2024 memperhatikan hasil evaluasi RKPD triwulan IV tahun 2022. Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD tahun 2022 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari 3 kategori, yaitu tercapai, tidak tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 di tahun 2022 dari 101 indikator, sebanyak:

- 52 indikator tercapai (51,49 persen),
- 47 indikator tidak tercapai (46,53 persen), dan

- 2 indikator belum tersedia data (1,98 persen).

Tabel 2.190 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2022	Realisasi TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,66	74,44	74,44	74,47	74,51	74,51	100,09	Tercapai
2	Angka Kemiskinan	Persen	5,89	7,59	7,59	6,71	7,00	7,00	84,14	Tidak Tercapai
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,03	75,40	75,40	75,32	75,90	75,90	99,83	Tidak Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,99	6,89	6,89	6,66	4,98	4,98	120,28	Tercapai
5	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Persen	100,00	55,56	55,56	62,96	85,19	85,19	85,19	Tidak Tercapai
6	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	Persen	12,17	37,27	37,27	26,50	21,11	21,11	57,65	Tidak Tercapai
7	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Persen	91,04	n/a	n/a	88,77	79,02	79,02	86,80	Tidak Tercapai
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa/ Tahun	40,65	n/a	37,17	35,97 - 36,21	40,68	40,68	100,07	Tercapai
9	Jumlah konflik sosial	Kasus	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
10	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,50	n/a	0,18	0,25	0,28	0,28	56,00	Tidak Tercapai
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	80,01	188,23	188,23	128,28	124,53	124,53	64,25	Tidak Tercapai
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7,00	8,90	8,90	8,21	9,96	9,96	70,28	Tidak Tercapai
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9,00	10,27	10,27	10,23	12,28	12,28	73,29	Tidak Tercapai
14	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	11,89	n/a	1,00	1,00	1,42	1,42	11,94	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2022	Realisasi TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,00	57,87	57,87	58,78	61,37	61,37	100,61	Tercapai
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,34	75,77	75,77	70,28	70,35	70,35	98,61	Tidak Tercapai
17	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	100,00	n/a	n/a	90,96	93,97	93,97	93,97	Tidak Tercapai
18	Luas Genangan Banjir dan Rob	Hektar	565,00	1730,00	1730,00	1230,00	980,14	980,14	57,65	Tidak Tercapai
19	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
20	Persentase pelayanan sampah	Persen	73,12	73,75	73,75	69,12	72,36	72,36	98,96	Tidak Tercapai
21	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,55	3,59	3,59	2,28 - 2,84	5,76	5,76	126,59	Tercapai
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Aspek Pelayanan Umum										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Urusan Pendidikan										
1	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100,00	59,51	59,51	100,00	90,94	90,94	90,94	Tidak Tercapai
2	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Urusan Kesehatan										
3	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100,00	n/a	n/a	88,00	85,98	85,98	61,95	Tidak Tercapai
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Persen	99,40	n/a	n/a	98,60	99,69	99,69	100,29	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2022	Realisasi TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	87,83	n/a	n/a	73,50	33,93	33,93	38,63	Tidak Tercapai
6	persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	92,115	n/a	n/a	87,092	86,07	86,07	93,44	Tidak Tercapai
7	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1,09	n/a	n/a	1,09	4,72	4,72	433,03	Tercapai
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Regulasi	96,251	n/a	n/a	96,203	99,95	99,95	103,84	Tercapai
9	Pengembangan Sarana Persampahan	Persen	100,00	n/a	n/a	20,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman										
10	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	95,58	97,93	97,93	93,12	97,47	97,47	101,98	Tercapai
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas										
11	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	100,00	n/a	n/a	60,00	111,57	111,57	111,57	Tercapai
12	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100,00	11,77	11,77	100,00	95,79	95,79	95,79	Tidak Tercapai
13	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Urusan Sosial										
14	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3,82	n/a	n/a	3,32	18,39	18,39	481,41	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Urusan Tenaga Kerja										
15	Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan	Persen	52,36	68,00	68,00	52,22	61,50	61,50	117,46	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2022	Realisasi TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak										
16	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,53	n/a	n/a	28,51	28,04	28,04	98,28	Tidak Tercapai
17	Skor Kota Layak Anak	Skor	636,00	602,00	602,00	628,00	637,6	637,6	100,25	Tercapai
Urusan Pangan										
18	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Urusan Pertanahan										
19	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Urusan Lingkungan Hidup										
20	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	n/a	n/a	62.86	62,86	62,86	104,77	Tercapai
21	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,34	0,00	0,00	0,35	0,39	0,39	114,71	Tercapai
22	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	69,91	n/a	n/a	71,48	89,40	89,40	127,88	Tercapai
23	Tertib Hukum Lingkungan	Persen	60,10	20,00	20,00	25,30	25,81	25,81	42,95	Tidak Tercapai
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil										
24	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	91,38	82,37	82,37	87,59	81,84	81,84	89,56	Tidak Tercapai
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa										
25	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10,00	n/a	n/a	8,08	17,09	17,09	170,90	Tercapai
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2022	Realisasi TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,65	n/a	n/a	67,45	64,27	64,27	95,00	Tidak Tercapai
Urusan Perhubungan										
27	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	28,00	n/a	n/a	28,00	21,51	21,51	76,82	Tidak Tercapai
Urusan Komunikasi Dan Informatika										
28	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3,25	n/a	n/a	2,85	2,1	2,1	64,62	Tidak Tercapai
29	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88,31 - 100)	n/a	n/a	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	90,02	90,02	Predikat Sangat Baik	Tercapai
Urusan Koperasi dan UKM										
30	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	9,02	n/a	n/a	7,82	5,90	5,90	65,41	Tidak Tercapai
Urusan Penanaman Modal										
31	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	216,78	410,60	410,60	200,28	570,79	570,79	263,30	Tercapai
Urusan Kebudayaan										
32	Persentase Peningkatan Kelompok Budaya	Persen	1,46	47,20	47,20	1,57	0,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai
Urusan Perpustakaan										
33	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	Indeks	20,73	n/a	n/a	19,92	33,46	33,46	161,41	Tercapai
Urusan Kearsipan										
34	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	Indeks	74,40	87,59	87,59	72,80	80,67	80,67	108,43	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2022	Realisasi TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga										
35	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,37	n/a	n/a	1,15	1,43	1,43	104,38	Tercapai
36	Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15,00	4,00	4,00	13,00	13,00	13,00	86,67	Tidak Tercapai
Urusan Statistik										
37	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80,00	n/a	n/a	68,00	90,22	90,22	112,77	Tercapai
Urusan Persandian										
38	Indeks Tata Kelola KAMI	Indeks	II	n/a	n/a	I	I+	I+	Belum mencapai target RPJMD	Tidak Tercapai
URUSAN PILIHAN										
Urusan Kelautan dan Perikanan										
39	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15.600,00	n/a	n/a	14.991,00	10.535,05	10.535,05	67,53	Tidak Tercapai
Urusan Pariwisata										
40	Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	625.000	316.440	316.440	565.000	1.038.424	1.038.424	166,15	Tercapai
Urusan Pertanian										
41	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	259.492,90	n/a	n/a	243.762,11	694.861,638	694.861,638	267,78	Tercapai
Urusan Perindustrian										
42	Pertumbuhan Industri	Persen	0,07	2,38	2,38	0,10	4,26	4,26	6.085,71	Tercapai
Urusan Perdagangan										
43	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	27,51	n/a	n/a	26,44	18,15	18,15	65,98	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2022	Realisasi TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Sekretariat Daerah										
44	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	94,00	n/a	n/a	93,00	89,48	89,48	95,19	Tidak Tercapai
Sekretariat DPRD										
45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Perencanaan										
46	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100,00	97,33	97,33	100,00	99,19	99,19	99,19	Tidak Tercapai
Keuangan										
47	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
48	Rasio PAD	Persen	2,06	n/a	n/a	1,95	2,31	2,31	112,14	Tercapai
Kepegawaian										
49	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90,00	n/a	n/a	86,00	68,06	68,06	75,62	Tidak Tercapai
Pendidikan dan Pelatihan										
50	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Persen	40,00	n/a	n/a	40,00	113,25	113,25	283,13	Tercapai
Penelitian dan Pengembangan										
51	Persentase Laporan Hasil Litbang	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
Inspektorat Daerah										
52	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	100,00	n/a	n/a	58,06	56,67	56,67	56,67	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2022	Realisasi TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	16,00	n/a	n/a	12,00	3,00	3,00	18,75	Tidak Tercapai
URUSAN KEWILAYAHAN										
Kecamatan										
54	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec.Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	99,91	99,91	99,91	Tidak Tercapai
55	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	99,74	99,74	99,74	Tidak Tercapai
56	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,06	100,06	100,06	Tercapai
57	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
Kesatuan Bangsa dan Politik										
58	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2022	Realisasi TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Aspek Daya Saing										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50,90	54,31	54,31	50,86	54,36	54,36	106,80	Tercapai
2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,69	69,66	69,66	71,69	71,04	71,04	93,86	Tidak Tercapai
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,92	9,18	9,18	9,27	9,20	9,20	92,74	Tidak Tercapai
5	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	100,00	Tercapai
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	35,39	13,29	13,29	35,35	45,33	45,33	128,09	Tercapai
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	23,61	5,17	5,17	23,60	23,77	23,77	100,68	Tercapai
9	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Regulasi	7	4	4	6	4	4	57,14	Tidak Tercapai
10	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	C	C	B	B	B	100,00	Tercapai
11	Persentase keterhubungan jalan	Persen	100,00	n/a	n/a	97,20	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persen	100,00	n/a	n/a	88,89	42,22	42,22	42,22	Tidak Tercapai
13	Indeks SPBE	Indeks	3,25	n/a	2,82	2,85	n/a	2,82	86,77	Tidak Tercapai
14	IKM Kota	Persen	84,09	80,83	80,83	83,49	90,44	90,44	107,55	Tercapai
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97,50	n/a	n/a	95,00	90,01	90,01	92,32	Tidak Tercapai
16	Indeks Merit System	Indeks	260,00	215,00	215,00	225,00	264,50	264,50	101,73	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2022	Realisasi TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Nilai SAKIP Kota	Skor	76,07	73,16	73,16	74,07	73,31	73,31	96,37	Tidak Tercapai
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	WTP	100,00	Tercapai
19	Maturitas SPIP	Nilai	4,00	3,00	3,00	3,20	3,022	3,022	75,55	Tidak Tercapai
20	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	8,00	n/a	n/a	4,00	0,00	2,00	25,00	Tidak Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2.2.2 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2022

2.2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel 2.191 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
Program Pengelolaan Pendidikan										
1	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	100,00	64,56	64,56	80,17	90,94	90,94	90,94	Tidak Tercapai
Program Pengembangan Kurikulum										
1	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
1	Persentase ketercukupan pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen	100,00	54,46	54,46	100,00	56,04	56,04	56,04	Tidak Tercapai

1. Capaian indikator Persentase capaian SPM Pendidikan tidak tercapai jika dibandingkan dengan target akhir akhir RPJMD, namun jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2022 capaiannya telah melampaui target
2. Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SPM terkendala banyaknya pendidik yang telah bersertifikasi pendidik yang memasuki masa pensiun maupun telah meninggal dunia.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel 2.192 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan										
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
1	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persen	92,00	n/a	n/a	89,00	66,19	66,19	71,95	Tidak Tercapai
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Persen	90,00	n/a	n/a	75,00	70,43	70,43	78,25	Tidak Tercapai
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	Persen	72,50	n/a	n/a	62,50	100,00	100,00	137,93	Tercapai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan										
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95,50	n/a	n/a	93,50	88,05	88,05	92,20	Tidak Tercapai
2	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	Persen	60,00	n/a	n/a	40,00	100,00	100,00	166,67	Tercapai
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman										
1	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	97,00	n/a	n/a	95,00	100,00	100,00	103,09	Tercapai
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
1	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95,00	95,75	95,75	91,00	98,04	98,04	103,20	Tercapai

1. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota tidak tercapai karena terdapat beberapa sub kegiatan yang belum optimal dalam pelaksanaanya, antara lain Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pengelolaan pelayanan kesehatan balita, Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
2. Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar tidak tercapai karena prasarana dan ketersediaan alat kesehatan di puskesmas belum memenuhi kebutuhan sesuai standar di ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan).
3. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek tidak tercapai karena tidak semua tenaga kesehatan harus membuat Surat Ijin Praktek (SIP). Tenaga kesehatan yang diwajibkan membuat SIP adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang menduduki jabatan struktural di rumah sakit tidak perlu memiliki SIP karena tidak memberikan pelayanan.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel 2.193 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)										
1	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	Persen	93,10	n/a	n/a	93,10	94,92	94,92	101,95	Tercapai
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum										
1	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Persen	92,11	n/a	n/a	87,09	60,53	60,53	65,71	Tidak Tercapai
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional										
1	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	Persen	100,00	n/a	n/a	20,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah										
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	Persen	12,87	n/a	n/a	10,47	9,27	9,27	88,54	Tidak Tercapai
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase										
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	71,49	n/a	n/a	67,46	68,39	68,39	95,66	Tidak Tercapai
Program Penataan Bangunan Gedung										
1	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	Persen	18,74	n/a	n/a	17,54	16,95	16,95	90,45	Tidak Tercapai
Program Penyelenggaraan Jalan										
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	Persen	86,57	n/a	n/a	82,21	84,28	84,28	97,35	Tidak Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengembangan Jasa Konstruksi										
1	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	21,20	n/a	n/a	10,53	7,15	7,15	33,73	Tidak Tercapai
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
1	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	66,67	66,67	66,67	Tidak Tercapai

1. Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah tidak tercapai karena pada tahun 2022 penambahan Jaringan Sambungan Rumah (SR) hanya 741 dan pembangunan perluasan perpipaan di Perkotaan 10.245 m sehingga penambahan jaringan belum maksimal
2. Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional tidak tercapai karena anggaran di drop, karena menunggu pekerjaan BBWS selesai terlebih dahulu.
3. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome) tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2022 sebagian difokuskan pada rehabilitasi MCK komunal, sehingga belum dapat mengoptimalkan penambahan jumlah layanan.
4. Persentase drainase dalam kondisi baik tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2022 Panjang Draianse yang sudah diperbaiki atau di pelihara sampi dengan saat ini sejumlah 178004.65 m sedangan jumlah keseluruhan Panjang Drainase 260277.98 m . sehingga target sampai dengan 2026 masih belum maksimal
5. Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota tidak tercapai dikarenakan prosesnya membutuhkan waktu yang lama , kuranya SDM atau konsultan jasa gambar, dan sistemnya langsung dari pusat yang terkadang mengalami kendala teknis jadi hasilnya belum maksimal
6. Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) tidak tercapai dikarenakan adanya Perubahan SK Jalan sesuai Keputusan Walikota No. 620/0031 Tahun 2022 sehingga target sampai dengan 2026 masih belum maksimal
7. Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada pelatihan yang diadakan, dan anggaran digantikan dengan kegiatan sosialisasi PP no 14 th 2021 ttng penyelenggaraan jasa konstruksi. sehingga target sampai dengan tahun 2026 masih belum maksimal
8. Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota tidak tercapai dikarenakan masih ada bebera Peraturan yang belum selesai ditetapkan diantaranya Perwal RDTR, Perda PBG dan Perwal PBG. sehingga target sampai dengan 2026 masih belum maksimal

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.194 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
Program Pengembangan Perumahan										
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	92,35	n/a	n/a	91,02	99,13	99,13	107,34	Tercapai
Program Kawasan Permukiman										
1	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Hektar	0,00	366,90	366,90	419,47	280,10	280,10	< dari target	Tidak Tercapai
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh										
1	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	Hektar	2.147,88	n/a	n/a	1.728,41	1.348,81	1.348,81	62,80	Tidak Tercapai
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)										
1	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	Persen	14,55	n/a	n/a	14,46	46,73	46,73	321,17	Tercapai

1. Capaian indikator Luas Kawasan permukiman kumuh tidak tercapai jikan dibandingkan dengan target akhir RPJMD, namun jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2022 capaian telah melampaui target (149,76%)
2. Pada saat menetapkan Target masih menggunakan SK Kumuh 2014 untuk mengisi target tahun 2022 dan diakhir tahun 2021 menyisakan 6,89 ha,sedangkan SK Kumuh 2014 di akhir tahun 2022 sebesar 0 ha kemudian muncul SK Kumuh 2020 ddiakhir tahun 2021 menyisakan 360,01 ha. Pada saat penyusunan Target 2022 belum menggunakan SK Kumuh Tahun 2020 yang menyisakan 360,01 Ha sedangkan tingkat capaian 280,10 Ha,maka tingkat capaian tidak maksimal, sehingga berpengaruh pada capaian indikator luas Kawasan permukiman tidak kumuh.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Tabel 2.195 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Linmas										
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum										
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Persen	70,00	n/a	n/a	60,00	65,00	65,00	92,86	Tidak Tercapai
Program Penanggulangan Bencana										
1	Persentase korban bencana alam yang ditangani	Persen	100,00	11,77	11,77	100,00	95,79	95,79	95,79	Tidak Tercapai
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran										
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

1. Indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome): dari 20 Perda yang ada, ada 13 Perda yang ditegakkan. Hal ini disesuaikan dengan laporan pelanggaran perda dari masyarakat.
2. Tidak semua Korban terdampak bencana alam butuh penanganan, karena beberapa mampu survive mandiri (misal: mengungsi ke tempat saudara) atau hanya terkena dampak ringan, sehingga tidak membutuhkan penanganan khusus

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Tabel 2.196 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
Program Pemberdayaan Sosial										
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75,00	n/a	n/a	50,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Rehabilitasi Sosial										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	25,16	25,16	25,16	Tidak Tercapai
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial										
1	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	52,49	n/a	n/a	58,46	10,32	10,32	19,66	Tidak Tercapai
Program Penanganan Bencana										
1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan										

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

1. Indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome) belum tercapai dikarenkan belum semua PPKS terfasilitasi kebutuhan dasarnya. Jumlah PPKS di Kota Pekalongan yaitu 24.291 orang sedangkan yang terlayani 6.112 orang.
2. Indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial belum tercapai dikarenakan jumlah DTKS tiap tahun mengalami kenaikan. Jumlah KPM BPNT tahun 2021 = 18.981; Jumlah DTKS tahun 2021 = 183.841 dan Jumlah DTKS tahun 2022 = 186.870

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.197 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja										
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	Persen	0,55	n/a	n/a	0,37	0,37	0,37	67,27	Tidak Tercapai
Program Penempatan Tenaga Kerja										
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar	Persen	29,93	n/a	n/a	21,93	36,07	36,07	120,51	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)									
Program Hubungan Industrial										
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	Persen	49,02	n/a	n/a	46,05	84,06	84,06	171,48	Tercapai
1. Capaian indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome) tidak tercapai jikan dibandingkan dengan target akhir RPJMD, namun jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2022 capaian telah mencapai target										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.198 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan										
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	11,09	96,77	96,77	3,70	5,55	5,55	50,05	Tidak Tercapai
Program Perlindungan Perempuan										

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	23,99	n/a	n/a	23,99	29,88	29,88	80,29	Tidak Tercapai
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)										
1	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55,56	n/a	n/a	29,63	29,63	29,63	53,33	Tidak Tercapai
Program Perlindungan Khusus Anak										
1	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

1. Indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2022 telah tercapai.
2. Indikator Rasio Kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) tidak tercapai. Kekerasan terhadap perempuan adalah fenomena gunung es karena data kasus yang diketahui hanya terbatas pada kasus yang dilaporkan saja. Meskipun capaian kinerjanya rendah atau kasus kekerasan masih tinggi, ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan yang telah dilakukan cukup efektif, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesadaran/keberanian untuk melapor, peningkatan kepedulian masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan di lingkungan sekitarnya, adanya PATBM tingkat kecamatan dan kelurahan. Meskipun demikian penanganan pengaduan kasus perempuan telah terlayani 100,00%
3. Pada Tahun 2022 baru ada 8 Kelurahan yang memenuhi syarat DEKELA (Desa/Kelurahan Layak Anak)

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel 2.199 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat										
1	Persentase cadangan pangan daerah	Persen	4,80	n/a	n/a	4,30	2,92	2,92	60,83	Tidak Tercapai
Program Penanganan Kerawanan Pangan										
1	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengawasan Keamanan Pangan										
1	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	Persen	88,00	n/a	n/a	81,60	100,00	100,00	113,64	Tercapai
1. Penyediaan Cadangan pangan daerah disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, dan pada tahun 2022 tidak terjadi bencana yang menyebabkan kerawanan pangan.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel 2.200 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan										
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan										
1	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.201 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
Program Perencanaan Lingkungan Hidup										
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100,00	n/a	n/a	80,00	80,00	80,00	80,00	Tidak Tercapai
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
1	Persentase limbah yang diolah	Persen	49,01	n/a	n/a	39,29	100,00	100,00	204,04	Tercapai
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)										
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	2,949	n/a	n/a	2,889	2,900	2,900	98,34	Tidak Tercapai
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)										

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	Persen	100,00	n/a	n/a	13,33	13,33	13,33	13,33	Tidak Tercapai
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)										
1	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	Persen	100,00	n/a	n/a	16,67	20,17	20,17	20,17	Tidak Tercapai
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	Persen	50,00	n/a	n/a	50,00	100,00	100,00	200,00	Tercapai
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	Persen	75,00	n/a	n/a	75,00	100,00	100,00	133,33	Tercapai
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										
1	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengelolaan Persampahan										
1	Persentase pengelolaan sampah	Persen	0,31	n/a	n/a	0,27	92,72	92,72	> target	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup									
	Capaian indikator program Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup pada tahun 2022 mencapai target, akan tetapi apabila dibandingkan dengan target RPJMD belum memenuhi target karena dari 5 dokumen perencanaan lingkungan hidup yang ditargetkan, yaitu Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2021-2026, Penyusunan Dokumen KLHS RDTR, Penyusunan Naskah Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penyusunan Dokumen RPPLH dan Penyusunan KLHS RPJMD 2024-2029, terdapat 1 dokumen yang belum disusun yaitu Dokumen KLHS RPJMD 2024-2029 yang baru akan disusun pada tahun 2023 ini.									
2.	Persentase Ruang Terbuka Hijau									
	Capaian indikator Program Persentase Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2022 sebesar 98,34% atau 2,900% dari target sebesar 2,909%. Luasan RTH Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 108,53 Hektar atau 2,900% jika dibandingkan dengan luas Kota Pekalongan dikurangi dikurangi sawah, tambak dan badan air yaitu seluas 3.742 Hektar. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 2,949% maka luas RTH pada Tahun 2026 sebesar 110, 35 Hektar atau kurang 1,83 Hektar dari luas RTH saat ini. Upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi target RPJMD tersebut diantaranya penyusunan database RTH untuk memvalidasi luasan RTH, penambahan luasan RTH dengan penanaman pohon, pembangunan taman dan pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah untuk kegiatan penghijauan									
3.	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH									
	Capaian indikator Program Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH pada tahun 2022 sebesar 120,99% atau 20,17% dari target sebesar 16,67%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 100% belum tercapai, karena akan dicapai secara bertahap di tahun 2023 s.d tahun 2026. Upaya-upaya untuk mencapai target tersebut adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH. Selain itu juga melaksanakan sosialisasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kota Pekalongan									
4.	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan									
	Capaian Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan pada tahun 2022 tercapai sebesar 100% atau 13,33% dari target 13,33%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 100% belum tercapai, karena akan dicapai secara bertahap di tahun 2023 s.d tahun 2026. Upaya-upaya untuk mencapai target tersebut adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3.									

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.202 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
Program Pendaftaran Penduduk										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	Persen	88,75	n/a	n/a	81,77	84,29	84,29	94,98	Tidak Tercapai
Program Pencatatan Sipil										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	Persen	94,00	n/a	n/a	93,40	79,38	79,38	84,45	Tidak Tercapai
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14,00	n/a	n/a	7,00	7,00	7,00	50,00	Tidak Tercapai

1. Indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk, jika dibanding dengan target akhir RPJMD tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2022 telah tercapai melebihi target. disebabkan adanya kerjasama terkait penerbitan Kartu Indonesia Anak (KIA) dengan Dinas Pendidikan dan PKK Kota Pekalongan.
2. Tingkat capaian indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil tidak tercapai jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD disebabkan oleh kasus perceraian dan kematian di masyarakat berkurang, hal ini mengakibatkan ketercapaian kepemilikan akta kematian dan akta perceraian masih dibawah target yang telah ditentukan, meskipun targetnya belum tercapai, kondisi demikian menunjukan kondisi yang positif dikarenakan angkat kematian dan angka perceraian rendah.
3. Target OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sampai akhir RPJMD adalah 14 OPD, namun sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sudah 7 OPD yang memanfaatkan data kependudukan, jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sudah tercapai.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel 2.203 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
Program Peningkatan Kerjasama Desa										
1	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	Persen	100,00	n/a	n/a	33,33	33,33	33,33	33,33	Tidak Tercapai
Program Administrasi Pemerintahan Desa										
1	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	Persen	70,37	n/a	n/a	55,56	74,07	74,07	105,26	Tercapai
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat										
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	96,92	n/a	n/a	96,16	96,79	96,79	99,87	Tidak Tercapai

1. Target Kelurahan yang difasilitasi kerjasama dengan TNI sampai akhir tahun RPJMD adalah 18 kelurahan, untuk tahun 2022 ditargetkan 6 kelurahan, dan sudah 6 kelurahan yang difasilitasi.
2. Indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat, jika dibanding dengan target akhir RPJMD tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2022 telah tercapai melebihi target.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 2.204 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
Program Pengendalian Penduduk										
1	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	99,68	99,68	99,68	Tidak Tercapai
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)										
1	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7,20	n/a	n/a	8,00	9,02	9,02	125,28	Tercapai
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)										
1	Unmeet need KB	Persen	12,00	n/a	n/a	16,00	13,08	13,08	91,74	Tidak Tercapai

1. Sudah dilakukan pendataan pada seluruh Rumah Tangga di Kota Pekalongan. Jumlah rumah tangga yang dilakukan pendataan = 77.940 sedangkan Jumlah seluruh rumah tangga sekota = 78.190. Hal ini dikarenakan pada saat pendataan ada beberapa rumah tangga yang sudah tidak menempati/berdomisili di Kota Pekalongan.
2. Tingginya unmeet need KB disebabkan oleh kurangnya informasi, pertentangan di keluarga dan masyarakat, kurangnya informasi, hambatan dari suami, keluarga dan komunitas serta rendahnya persepsi terhadap resiko kehamilan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 2.205 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	Persen	100,00	n/a	n/a	89,00	124,73	124,73	124,73	Tercapai
2	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0,44	0,49	0,49	0,40	0,39	0,39	112,82	Tercapai
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	Persen	0,74	n/a	n/a	0,76	-4,90	-4,90	-662,16	Tidak Tercapai

1. Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala dengan rumus Jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tahun (N) dikurangi Tahun (N-1) dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tahun (N-1)*100% yaitu pada tahun 2022 Jumlah KBWU total sebanyak 4.626 kendaraan dan Jumlah KBWU yang melaksanakan uji berkala tahun 2021 sebanyak 4.862 kendaraan dan didapatkan hasil -4,9. Indikator ini merupakan indikator persentase peningkatan dan mendapatkan hasil negatif disebabkan angka kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya karena belum pulihnya perekonomian masyarakat terutama masyarakat yg memiliki kendaraan barang sehingga belum melakukan uji berkala kendaraannya.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.206 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
Program Informasi Dan Komunikasi Publik										
1	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Aplikasi Informatika										
1	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3,30	n/a	n/a	2,90	2,75	2,75	83,33	Tidak Tercapai
1. Capaian indeks Aspek teknologi informasi dan komunikasi memang belum mencapai target, untuk itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aspek TIK: • melakukan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE pada unit kerja/OPD sebelum melakukan pembangunan aplikasi • memperkuat pelayanan pusat data pemerintah daerah										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 2.207 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UrusanPemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi										
1	Persentase koperasi yang	Persen	33,23	n/a	n/a	29,41	31,21	31,21	93,92	Tidak Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	berkualitas (IKK Outcome)									
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian										
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Persen	59,68	n/a	n/a	57,84	15,96	15,96	26,74	Tidak Tercapai
Program Pengembangan UMKM										
1	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	Persen	12,37	n/a	n/a	11,95	11,71	11,71	94,66	Tidak Tercapai

1. Capaian Indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD memang tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2022 capaiannya sudah melampaui target. jumlah koperasi tidak aktif bertambah karena adanya ketentuan 1 data menggunakan data ODS. Dimana ketentuan untuk koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan atau tidak melaporkan laporan keuangan minimal PHU dan neraca selama 3 tahun berturut-turut, makan akan langsung dikategorikan koperasi tidak aktif.
2. Pelatihan Koperasi baru dilaksanakan kepada 45 koperasi dari target 76 koperasi, karena pelatihan yang diadakan oleh Dindagkop UKM sesuai dengan Juknis Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non - Fisik) PK2UMK adalah pengurus koperasi yang mewakili koperasi aktif. Sedangkan prosentase koperasi aktif di Kota Pekalongan sebesar 52,48 % dari jumlah seluruh koperasi.
3. Capaian Indikator Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dan target RKPD tahun 2022 dikarenakan belum optimalnya akses permodalan yang dapat dimanfaatkan usaha mikro untuk meningkatkan skala usahanya, dikarenakan belum terdapat sinergi antara penyedia permodalan dengan usaha mikro.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.208 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal										
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal										
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	n/a	n/a	1,00	1,00	1,00	16,67	Tidak Tercapai
Program Promosi Penanaman Modal										
1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pelayanan Penanaman Modal										
1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dokumen	2.500,00	n/a	n/a	2.500,00	3.847	3.847	153,88	Tercapai
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal										
1	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40,53	n/a	n/a	6,55	101,52	101,52	250,48	Tercapai
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal										
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Capaian Indikator Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak tercapai jika dibandingkan target akhir RPJMD, namun jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2022 telah mencapai target.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	95,24	n/a	n/a	92,93	83,97	83,97	88,17	Tidak Tercapai
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										
1	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	Persen	42,86	60,98	60,98	28,57	68,89	68,89	160,73	Tercapai
1. Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina adalah 90,36% (tidak tercapai). Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian anggaran pada perubahan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu pengiriman kemah bakti pemuda serta pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel 2.210 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral										
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel 2.211 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi										
1	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	3,74	n/a	n/a	1,87	1,87	1,87	50,00	Tidak Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- Pengujian kerentanan dilakukan secara mandiri (self asessment); atau - pihak ketiga (kerjasama dengan BSSN atau penyedia). Hasil pengujian dalam bentuk dokumen yang berisi daftar kerentanan sistem elektronik yang diuji dan rekomendasi perbaikan
- Sistem elektronik: serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik
- Bentuk riil sistem elektronik: SIM, website, web application Sistem elektronik s.d. 2020: 107 terdiri dari web application: 71; website: 36 (semua OPD)
- Data dasar: 107 sistem elektronik
  - Tahun 2021: 0,93% (1 sistem elektronik)
  - Tahun 2022: 1,87% (2 sistem elektronik)
  - Tahun 2023: 2,80% (3 sistem elektronik)
  - Tahun 2024: 2,80% (3 sistem elektronik)
  - Tahun 2025: 3,73% (4 sistem elektronik)
  - Tahun 2026: 3,73% (4 sistem elektronik)
  - Kondisi awal: 0 sistem elektronik Kondisi akhir (akumulasi): 17 sistem elektronik
- Tahun 2022 telah dilakukan pengujian kerentanan terhadap 2 (dua) sistem elektronik bekerja sama dengan BSSN dalam bentuk kegiatan Information Technology Security Assessment (ITSA)
- Sampai tahun 2022, capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sudah sesuai dengan target
- Untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai Target Akhir RPJMD atau bahkan percepatan pencapaian, Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah, sedang, dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Tahun 2021)
  - Menerapkan ISO/IEC 27001:2022 (Tahun 2023 menyusun dokumen persyaratan SMKI dan kontrol, operasional SMKI, audit internal SMKI, dan reviu manajemen)
  - Membentuk CSIRT

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel 2.212 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan										
Program Pengembangan Kebudayaan										
1	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengembangan Kesenian Tradisional										
1	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Persen	100,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya										
1	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	Persen	97,52	n/a	n/a	90,43	87,50	87,50	89,73	Tidak Tercapai
Program Pengelolaan Permuseuman										
1	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4,80	13,10	13,10	4,60	5,36	5,36	111,66	Tercapai
1. Dari target akhir RPJMD 20 cagar budaya yang akan dilestarikan, sampai dengan triwulan IV tahun 2022 ada 8 cagar budaya yang ditetapkan, dan baru 7 cagar budaya yang dilestarikan/dimanfaatkan.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 2.213 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan										
Program Pembinaan Perpustakaan										
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 – 60 tahun)	Indeks	16,58	18,27	18,27	15,93	24,97	24,97	150,60	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel 2.214 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan										
Program Pengelolaan Arsip										
1	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	Persen	66,67	n/a	n/a	40,00	80,00	80,00	119,99	Tercapai
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	52,50	n/a	n/a	42,50	80,23	80,23	152,82	Tercapai
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip										

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Perizinan Penggunaan Arsip										
1	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai
1. Capaian Indikator Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK tidak tercapai dikarenakan selama tahun 2022 tidak ada peminjaman arsip yang bersifat tertutup										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.215 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan										
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap										

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	Persen	6,15	n/a	n/a	1,00	1,10	1,10	17,89	Tidak Tercapai
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	Persen	6,15	4,35	4,35	1,00	1,88	1,88	30,57	Tidak Tercapai
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	6,15	n/a	n/a	1,00	-17,99	-17,99	-34,19	Tidak Tercapai
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan										
1	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	Pelaku Usaha	12,00	n/a	n/a	2,00	2,00	2,00	16,67	Tidak Tercapai

1. Capaian Indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI tidak tercapai jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, namun jika dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2022 sudah melampaui target.
2. Capaian Indikator Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI tidak tercapai jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, namun jika dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2022 sudah melampaui target
3. Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tidak tercapai jika dibandingkan target akhir RPJMD maupun target RKPD Tahun 2022, Akibat dibangunnya tanggul pantai menyebabkan tambak di luar tanggul tdk operasional krn genangan tambak semakin tinggi, sehingga produksi udang vaname turun 43% dan berdampak pada penurunan produksi budidaya 18%
4. Capaian Indikator Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) tidak tercapai jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, namun jika dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2022 sudah memenuhi target

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel 2.216 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen	12,50	n/a	n/a	10,50	12,67	12,67	101,36	Tercapai
Program Pemasaran Pariwisata										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	Persen	46,98	n/a	n/a	26,98	228,16	228,16	48.565,35	Tercapai
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	Persen	59,52	n/a	n/a	16,67	13,20	13,20	22,18	Tidak Tercapai
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Persen	100,00	n/a	n/a	20,00	40,70	40,70	40,70	Tidak Tercapai

1. Indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi tidak tercapai baik jika dibandingkan target RKPD 2022 maupun target akhir RPJMD, karena masa pandemi masih dilakukan pembatasan masyarakat untuk berkumpul dan berinteraksi secara langsung. usaha yang dilakukan untuk mencapai target sampai akhir RPJMD adalah setelah adanya kebijakan kelonggaran kerumunan masyarakat, maka dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga akan lebih sering mengadakan event-event fasilitasi pelaku ekraf untuk berekspresi, dan berpromosi.
2. Indikator persentase pelaku ekraf yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar, jika dibanding dengan target akhir RPJMD tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2022 telah tercapai melebihi target. usaha yang dilakukan untuk mencapai target sampai akhir RPJMD adalah memperbanyak pola pelatihan pengembangan kompetensi tingkat dasar sampai dengan akhir tahun RPJMD.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel 2.217 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian										
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian										
1	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55,84	n/a	n/a	55,62	50,82	50,82	91,01	Tidak Tercapai
2	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	188,15	n/a	n/a	203,65	644,18	644,18	342,38	Tercapai
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	5,00	n/a	n/a	5,00	-63,46	-63,46	-1.269,20	Tidak Tercapai
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Perizinan Usaha Pertanian										
1	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	Persen	20,00	n/a	n/a	20,00	36,36	36,36	181,80	Tercapai
Program Penyuluhan Pertanian										

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	Persen	5,00	-14,29	-14,29	5,00	8,70	8,70	174,00	Tercapai

1. Indikator nilai produksi pertanian per tahun tidak tercapai jika dibandingkan target RKPD 2022 maupun target akhir RPJMD. Hal ini dikarenakan luas lahan pertanian berkurang, terutama di wilayah Pekalongan Utara yang terkena rob, lahan pertanian sudah tidak bisa ditanami kembali, luas tanam yang berkurang mempengaruhi luas panen dan hasil produksi.
2. Indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tidak tercapai, dikarenakan tahapan vaksinasi untuk PMK belum selesai dilaksanakan, sehingga belum optimal dalam menangani kasus PMK.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel 2.218 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan										
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	100,00	n/a	n/a	75,00	73,33	73,33	73,33	Tidak Tercapai
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting										
1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	100,00	n/a	n/a	84,00	101,06	101,06	101,06	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengembangan Ekspor										
1	Persentase peningkatan volume ekspor	Persen	8,19	n/a	n/a	7,42	-43,07	-43,07	-19,02	Tidak Tercapai
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen										
1	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	83,99	n/a	n/a	75,99	111,16	111,16	132,35	Tercapai
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										
1	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	Persen	7,50	n/a	n/a	3,17	1,18	1,18	15,73	Tidak Tercapai

1. Capaian Indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya tidak tercapai jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maupun target RKPD tahun 2022, dikarenakan pembangunan sarana distribusi perdagangan masih dalam tahapan perencanaan (Mechanical Electrical Plumbing, Konsultansi Tenaga Ahli Sipil Bangunan Gedung dan Konsultansi Tenaga ahli Landscape) dan untuk pembangunan fisik akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
2. Capaian indikator Persentase peningkatan volume ekspor tidak tercapai jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maupun target RKPD tahun 2022, dikarenakan salah satunya oleh ancaman terjadinya resesi global di tahun 2023 dimana berdampak salah satunya yaitu, permintaan ekspor untuk produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan akan menurun terutama dari Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok. Dimana komoditas utama yang dihasilkan oleh Kota Pekalongan untuk di ekspor adalah tekstil dan kerajinan serta negara tujuan yang di tuju adalah Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok dan negara lainnya. Dengan demikian, adanya perkiraan resesi global ini ternyata sudah mulai terjadi dan berdampak nyata pada nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan yang mulai mengalami penurunan.
3. Capaian indikator Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) tidak tercapai jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maupun target RKPD tahun 2022. Salah satu bentuk fasilitasi pemarasan yaitu pemasaran secara online melalui aplikasi Brayan Market. Namun aplikasi tersebut belum menyediakan menu transaksi antara penjual dan pembeli sehingga antusiasme pelaku usaha mikro masih kurang.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel 2.219 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri										
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	Persen	21,04	n/a	n/a	20,41	66,60	66,60	316,54	Tercapai
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota										
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	Persen	26,00	n/a	n/a	24,00	100,00	100,00	384,62	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Tabel 2.220 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah										
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat										
1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	100,00	122,22	122,22	100,00	111,11	111,11	111,11	Tercapai
3	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Perekonomian Dan Pembangunan										
1	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	6,00	n/a	n/a	7,00	-10,52	-10,52	452,00	Tercapai
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	87,50	87,50	87,50	Tidak Tercapai
1. Pengadaan Barang/Jasa: ada 6 pekerjaan yang tidak terlaksana, dikarenakan waktu tidak mencukupi untuk dilaksanakan penayangan pengumuman tender kembali dan waktu pelaksanaan fisiknya, serta ada beberapa pekerjaan yang tidak ada penawar yang lulus evaluasi penawaran										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2. Sekretariat DPRD

Tabel 2.221 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD										
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd										
1	Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	76,47	76,47	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2.2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Tabel 2.222 Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perencanaan										
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2. Keuangan

Tabel 2.223 Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keuangan										
Program Pengelolaan Keuangan Daerah										
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7,26	n/a	n/a	8,33	5,79	5,79	125,39	Tercapai
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5,00	n/a	n/a	5,00	2,99	2,99	167,22	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

3. Kepegawaian

Tabel 2.224 Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kepegawaian										
Program Kepegawaian Daerah										
1	Persentase PNS berkembang karier	Persen	50,00	15,82	15,82	50,00	49,00	49,00	98,00	Tidak Tercapai
2	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	68,06	68,06	68,06	Tidak Tercapai
3	Persentase Keterisian Jabatan	Persen	90,00	n/a	n/a	90,00	98,96	98,96	109,95	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80,00	n/a	n/a	80,00	97,33	97,33	121,66	Tercapai
1. Persentase PNS berkembang karier target 50% realisasi 49% hal ini disebabkan karena untuk memenuhi semua kebutuhan pengembangan kompetensi terutama pengiriman diklat belum semua usulan diklat dari OPD diakomodir. 2. Tingkat Pelaporan Kinerja ASN target 100% capaian 68,06% hal ini disebabkan karena terdapat perubahan peraturan tentang penyusunan laporan kinerja sehingga masih terdapat ASN yang belum tepat dalam menyusun laporan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

4. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.225 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendidikan dan Pelatihan										
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
1	Persentase PNS berkembang kompetensinya	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

5. Penelitian Dan Pengembangan

Tabel 2.226 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penelitian dan Pengembangan										
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah										
1	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	Skor	76,00	n/a	n/a	72,00	76,60	76,60	76,60	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2.2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Tabel 2.227 Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inspektorat										
Program Penyelenggaraan Pengawasan										
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	85,00	n/a	n/a	85,00	57,14	57,14	67,22	Tidak Tercapai
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi										

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Level Kapabilitas APIP	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	Tercapai
Pemeriksaan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan reguler. Dari hasil temuan sejumlah 28 temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 16 temuan. Sisanya belum ditindaklanjuti oleh OPD ybs karena kendala teknis & administrasi.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2.2.3.7 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Tabel 2.228 Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kecamatan										
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan										
1	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kandang Panjang)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Panjang Wetan)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Degayu)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Bandengan)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	99,50	99,50	99,50	Tidak Tercapai
6	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Krapyak)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	99,53	99,53	99,53	Tidak Tercapai
7	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Padukuhan Kraton)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Panjang Baru)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
9	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
10	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Jenggot)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
11	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Buaran Kradenan)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kuripan Kertoharjo)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
13	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kuripan Yosorejo)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
14	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Sokoduwet)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
15	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Banyurip)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	92,31	92,31	92,31	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,30	100,30	100,30	Tercapai
17	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Medono)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
18	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Podosugih)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
19	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Tirto)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
20	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Sapuro Kebulen)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	102,27	102,27	102,27	Tercapai
21	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Bendan Kergon)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
22	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Pasirkratonkramat)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
23	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Pringrejo)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	97,92	97,92	97,92	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
25	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kauman)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
26	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Poncol)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Klego)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
28	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Gamer)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
29	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Noyontaansari)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Setono)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
31	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kalibaros)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum										

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Barat	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2.2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.229 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kesatuan Bangsa dan Politik										
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan										
1	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik										
1	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16,00	n/a	n/a	16,00	16,00	16,00	100,00	Tercapai
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
1	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	95,65	95,65	95,65	Tidak Tercapai
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya										
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial										

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
1. Capaian indicator Kinerja pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tidak Mencapai Target 100% dan hanya tercapai 95,65%, hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi hibah kepada organisasi masyarakat yang targetnya sejumlah 23 Lembaga/ormas namun dalam proses verifikasi terdapat 1 (satu) Lembaga/ormas yang tidak memenuhi persyaratan administrasinya, sehingga hanya 22 Lembaga/ormas yang dapat difasilitasi										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2.2.3.9 Non Urusan

1. Non Urusan

Tabel 2.230 Capaian Indikator Non Urusan Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Non Urusan										
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi (Bag. Organisasi Setda)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	101,61	101,61	101,61	Tercapai
2	Persentase pelayanan keprotokoleran (Bag. Prokompim Setda)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	87,52	87,52	87,52	Tidak Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	99,56	99,56	99,56	Tidak Tercapai
4.1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Bappeda)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.3	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (BPKAD)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (BKPSDM)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.5	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (BPBD)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.6	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinarpus)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dindagkop UKM)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.8	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dindukcapil)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.9	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinhub)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinkes)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.11	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinkominfo)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.12	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinparbudpora)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.13	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinperinaker)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.14	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinperkim)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	94,17	94,17	94,17	Tidak Tercapai
4.15	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinperpa)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	98,67	98,67	98,67	Tidak Tercapai
4.16	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinsos P2KB)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.17	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DKP)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.18	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DLH)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.19	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DPMPPA)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.20	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DPMPTSP)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.21	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DPUPR)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.22	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Inspektorat)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	93,34	93,34	93,34	Tidak Tercapai
4.23	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.24	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.25	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.26	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.27	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kesbangpol)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.28	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dindik)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,60	100,60	100,60	Tercapai
4.29	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Satpol P3KP)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4.30	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	93,17	93,17	93,17	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	84,71	84,71	84,71	Tidak Tercapai
5.2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Bappeda)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	102,73	102,73	102,73	Tercapai
5.3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (BPKAD)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	102,76	102,76	102,76	Tercapai
5.4	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (BKPSDM)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	105,35	105,35	105,35	Tercapai
5.5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (BPBD)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	77,78	77,78	77,78	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.6	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinarpus)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	66,08	66,08	66,08	Tidak Tercapai
5.7	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dindagkop UKM)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	105,97	105,97	105,97	Tercapai
5.8	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dindukcapil)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	89,33	89,33	89,33	Tidak Tercapai
5.9	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinhub)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,35	100,35	100,35	Tercapai
5.10	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinkominfo)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	91,56	91,56	91,56	Tidak Tercapai
5.12	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinparbudpora)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.13	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinperinaker)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	102,97	102,97	102,97	Tercapai
5.14	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinperkim)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	70,40	70,40	70,40	Tidak Tercapai
5.15	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinperpa)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	64,67	64,67	64,67	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.16	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinsos P2KB)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	98,67	98,67	98,67	Tidak Tercapai
5.17	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DKP)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	102,83	102,83	102,83	Tercapai
5.18	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DLH)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	105,88	105,88	105,88	Tercapai
5.19	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPMPPA)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	101,82	101,82	101,82	Tercapai
5.20	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPMPTSP)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	98,96	98,96	98,96	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.21	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPUPR)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,56	100,56	100,56	Tercapai
5.22	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Inspektorat)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	99,33	99,33	99,33	Tidak Tercapai
5.23	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	66,96	66,96	66,96	Tidak Tercapai
5.24	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5.25	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	91,58	91,58	91,58	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.26	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,20	100,20	100,20	Tercapai
5.27	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kesbangpol)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	101,68	101,68	101,68	Tercapai
5.28	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dindik)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,60	100,60	100,60	Tercapai
5.29	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol P3KP)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	83,84	83,84	83,84	Tidak Tercapai
5.30	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	77,46	77,46	77,46	Tidak Tercapai
6	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	102,50	102,50	102,50	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.2	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Bappeda)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.3	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (BPKAD)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.4	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (BKPSDM)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	95,84	95,84	95,84	Tidak Tercapai
6.5	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (BPBD)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.6	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinarpus)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.7	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dindagkop UKM)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	135,19	135,19	135,19	Tercapai
6.8	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dindukcapil)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.9	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinhub)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.10	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinkes)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.11	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinkominfo)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.12	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (dinprabudpora)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.13	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinperinaker)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	108,34	108,34	108,34	Tercapai
6.14	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinperkim)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,26	100,26	100,26	Tercapai
6.15	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinperpa)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	96,08	96,08	96,08	Tidak Tercapai
6.16	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinsos P2KB)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.17	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DKP)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.18	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DLH)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.19	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DPMPPA)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.20	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DPMPTSP)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.21	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DPUPR)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	125,00	125,00	125,00	Tercapai
6.22	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Inspektorat)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	99,44	99,44	99,44	Tidak Tercapai
6.23	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	102,08	102,08	102,08	Tercapai
6.24	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.25	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.26	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	97,20	97,20	97,20	Tidak Tercapai
6.27	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kesbangpol)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.28	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dindik)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.29	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Satpol P3KP)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6.30	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	102,10	102,10	102,10	Tercapai
7	Persentase ketersediaan layanan BLUD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.1	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Puks. Bendan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.2	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Buaran)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.3	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Dukuh)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.4	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Jenggot)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.5	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Klego)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.6	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Kramatsari)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.7	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Krapyak Kidul)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd 2022	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2022	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.8	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Kusuma Bangsa)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.9	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Medono)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.10	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Noyontaan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.11	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.12	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Sokorejo)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.13	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Tirto)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.14	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Tondano)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.15	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Dinkes)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.16	Persentase ketersediaan layanan BLUD (RSUD Bendan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.17	Persentase ketersediaan layanan BLUD (BPSJ)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2023

2.2.3 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan
2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Penghitungan kebutuhan pmenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non pemerintah, masyaakat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.
4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negera yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan:
   - miskin atau tidak mampu;
   - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
   - kondisi bencana; dan/atau
   - kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD,
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan dasar diimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
   - membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negera secara minimal, dengan memperioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
   - memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya

Pada tahun 2022 Kota Pekalongan telah menerapkan seluruh tahapan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan anggaran atas penerapan Standar Pelayanan Minimal sejak proses perencanaan, yang dimulai dari RPJMD sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2022.

2.2.4.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Pada tahun 2022 Capaian SPM Pendidikan secara keseluruhan adalah 90,94% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar usia dini dengan capaian sebesar 86,04%;
2. Pendidikan dasar dengan capaian sebesar 94,96%;
3. Pendidikan kesetaraan dengan capaian sebesar 91,82%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.231 berikut.

Tabel 2.231 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**Pengumpulan Data**	
	Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat	Proses update pada aplikasi Dapodik sekolah dilaksanakan di awal waktu sehingga terhindar dari permasalahan system akibat over kapasitas pengakses aplikasi menjelang cut off
	Beberapa indikator data capaian belum dapat terisi dikarenakan terkendala pada rapor pendidikan yang isiannya belum lengkap dan belum mencantumkan nilai capaian pada tahun N (tahun pelaporan)	Selalu mengikuti update infromasi seputar releaserapor Pendidikan dari Kemendikbud.
	Kota Pekalongan tidak termasuk sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga indikator "Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal" tidak dapat terisi	-
2.	**Penghitungan Kebutuhan**	
	Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar maupun biaya personil	Mneingkatkan koordinasi dengan tim verifikator dari sekolah terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi siswa miskin sehingga dapat berjalan dengan lancer dan selesai tepat waktu.
	Indikator "Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" tidak dapat terisi dengan lengkap, dikarenakan alokasi anggaran berada di OPD lain	Koordinasi dengan OPD terkait (BKPSDM, Bappeda, BPKAD)
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	
	Pengurangan target indikator SPM disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia	Alokasi anggaran yang tersedia lebih diprioritaskan untuk pencapaian / pemenuhan SPM
	Pemetaan sub kegiatan penunjang pencapaian SPM di DPA Dinas Pendidikan belum sesuai dengan Permendagri No.84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023	Melakukan mapping sub kegiatan tahun 2022 beserta indikatornya disesuaikan dengan Permendagri No.84 Tahun 2022.
4.	**Pelaksanaan**	
	Jumlah calon penerima bantuan yang lebih banyak dibandingkan jumlah anggaran yang tersedia, sehingga tidak semua siswa miskin dapat menerima bantuan	Calon penerima bantuan lebih diprioritaskan bagi siswa miskin yang belum mendapatkan bantuan dari sumber yang lain seperti PIP dan PKH.
5,	**Lain-lain**	
	Masih terdapat beberapa indikator sub kegiatan ataupun target satuan SPM yang kurang dapat dipahami	Melakukan konsultasi kepada Tim pengelola SPM tingkat Pusat sehingga diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif.

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiancy Virus*).

Pada tahun 2022 Capaian SPM Kesehatan secara keseluruhan adalah 93,14% atau kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 97,68%;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,50%;
4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 96,66%;
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan capaian 100%;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 81,10%;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 89,45%;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 53,31%;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetis melitus dengan capaian 100,00%;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguam jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 100%;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan capaian 100%;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) dengan capaian 100%

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.232 berikut.

Tabel 2.232 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Internal	Sarana dan prasarana untuk pemriksaan usia lanjut belum tersedia	Akan dilakukan perencanaan untuk pengadaan sarpras tersebut
2.	Eksternal	Rumus perhitungan sasaran untuk penderita hipertensi menurut permenkes 4 tahun 2019 terlalu tinggi	Untuk sasaran sebaiknya menggunakan data rill yang di temukan di Kota Pekalongan

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ajenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Pada tahun 2022 Capaian SPM Pekerjaan Umum secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 100%;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.233 berikut.

Tabel 2.233 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**Pengumpulan Data**	
	Data yang dibutuhkan lebih rigid sampai ke identitas pribadi yang menurut wali data dari kominfo ada konsekuensi dari penyebaran data pribadi	Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengka dan andal
2.	**Penghitungan Kebutuhan**	
	Penghitungan kebutuhan masih memerlukan koordinasi dengan OPD terkait	Rapat koordinasi denganpihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengka dan andal
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	
	Perlu kerjasama yang aktif untuk CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM.	Komunikasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk menjadi CSR
4.	**Pelaksanaan**	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALD-T dan SPALD-S	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga
	lokasi untuk pembuatan instalasi pembuangan tinja yang sudah tidak layak, sedangkan untuk mencari lokasi baru ada keterbatasan lahan pemerintah kota	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022 Capaian SPM urusan Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

Kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.234 berikut.

Tabel 2.234 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PENGUMPULAN DATA**	
	Data TW 1 Belum ada	Belum ada kegiatan pelaksanaan SPM
	Pengumpulan Data masih tergantung dari Data OPD Lain	Melakukan kerjasama dan memuat satgas bersama tentang kebencanaan
	Kota Pekalongan tidak mempunyai lahan yang potensial untuk relokasi korban bencana/program pemerintah	Menempatkan korban bencana pada hunian sementara di rumah susun dan berkoordinasi dengan BPN atas tanah yang bisa dijadikan lahan perumahan
	Pembuatan site plan berada di DPUPR sedangkan dokumen bencan belum diterbitkan, sehingga bisa terajdi perumahn termasuk dalam daerah rawan bencana. sudah terverifikasi.	Syarat syarat pembangunan perumahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
	Data base /data sumber kegiatan kebencanaan belum terbuat sehingga penentuan lokasi kebencanaan belum bisa di buat	Pembuatan dokumen kebencanaan tahun 2023 serta penganggarannya
2.	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**	
	Penghitungan Kebutuhan Masih global	Akan dibuatkan dokumen kebencanaan tahun 2023
	Belum menghitung kebutuhan	Akan dibuatkan dokumen kebencanaan tahun 2023
	Jenis kebencanaan yang ada di Kota Pekalongan berupa Banjir Rob dan tidak termasuk dalam Jenis Kebencanaan	Akan kita konsultaiskan ke Perkim provinsi sebagai bahan diskusi dan aturan yang lebih detail
3.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	

No.	Permasalahan	Solusi
	Perencanaan Anggaran masih belum maksimal	Perencanaan akan kita sesuaiakan dengan dokumenkebencanaan
	Perencanaan dan Penganggaran belum dapat berjalan dengan maksimal	Perencanaan akan dibuat berdasarkan prioritas kebencanaan
4.	**PELAKSANAAN**	
	Pelaksanaan Belum optimal	Akan dilaksanakan bersama oleh satgas
	Pelaksanaan masih menggunakan data dari Bansos dan BPBD	Akan dibuat dokumen perencaaan tersendiri
	Peraturan kebencanaan secara nasional tidak memfasilitasi kebencanaan lokal seperti banjir ROB	Perlunya aturan khusus mengenai kebencanaan lokal seperti banjir rob
5.	**LAIN – LAIN**	
	Sumber daya manusia masih kurang jumlah untuk pelaksanaannya	Akan merekruit Tenaga fasilitator lapangan
	SDM yang masih kurang	Akan merekruit Tenaga fasilitator lapangan
	Kurangnya Peningkatan kompetensi SDM/personil	Perlunya penambahan tenaga fasilitator pendamping yang berkompetensi

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pada tahun 2022 Capaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Urusan Ketertiban Umum dengan capaian 100%
2. Sub Urusan Bencana dengan capaian 100%
3. Sub Urusan Kebakaran dengan capaian 100%

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.235 berikut.

Tabel 2.235 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PENGUMPULAN DATA**	
	Belum adanya dokumen KRB sehingga pengumpulan data yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal	Melakukan penyusunan dokumen KRB pada tahun 2023 dan menggunakan data historis kebencanaan untuk melakukan pengumpulan data.
	Berdasarkan UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri 57 tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data penduduk by name by adrress merupakan merupakan aset informasi yang dijamin kerahasiaan dan keutuhannya, sehingga dalam pemenuhan data tersebut belum dapat dipenuhi.	Memberikan data kependudukan secara agregat dalam pelaporan dan melakukan pendataan langsung di wilayah terdampak bencana apabila memungkinkan.
2.	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**	
	Belum memiliki dokumen KRB yang sah dan legal sehingga belum bisa melakukan penghitungan secara rinci	Melakukan penyusunan dokumen KRB di tahun 2023, namun untuk sementara penghitungan kebutuhan dilakukan dengan mengandalkan data historis kebencanaan
	Ketersediaan data yang terbatas,sehingga perhitungan kebutuhan tidak dapat dilakukan secara rinci	Dilakukan pendataan secara lebih terinci
	Pemetaan kebencanaan sudah dilakukan, namun dokumen KRB masih dalam proses penyusunan.	Pemetaan kebencanaan yang sudah dilakukan dimasukkan kedalam dokumen KRB untuk memperkuat analisis dan penghitungan kebutuhan penanganan bencana.
	Terkait penyediaan Alat untuk layanan response time pada tahun 2022 sudah tersedia dan kondisi baik. terkait sarana pusdalops damkar di Kota Pekalongan sudah ada fasilitas berupa command center kegawatdaruratan di nomor 112.	Perlunya dibentuk pusdalops untuk mengatur koordinasi serta respon cepat terhadap laporan yang diterima.
3.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	
	Perlunya penganggaran tambahan untuk peralatan pendukung bencana, Dokumen KRB, RPB, Rencana Kontijensi (untuk mendukung perencanaan kegiatan, penghitunga kebutuhan, resiko, dan Daya dukung wialyah dan masyarakat), dan JITUPASNA (untuk penghitungan kebutuhan rekonstruksi pasca bencana).	Akan dilakukan penyusunan dokumen KRB, JITUPASNA pada tahun 2023 dan merencanakan penyusunan Dokumen RPB pada tahun 2024.
	Pada tahun 2022 kegiatan untuk penggantian ganti rugi bagi warga yang terdampak akibat penegakan PERDA dibiayai dari alokasi anggaran belanja tidak terduga.	Adanya anggaran belanja khusus bagi warga yang terdampak Penegakan Perda sehingga ganti rugi yang diberikan dapat tersalurkan secara efektif.

No.	Permasalahan	Solusi
	Jumlah anggaran yang dianggarkan tidak sebanding dengan frekuensi kejadian bencana dan luasan dampak bencana namun pembiayaan anggaran tersebut dapat tercukupi dari sumber pendanaan yang lain seperti CSR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Partisipasi Masyarakat, dll	Melakukan optimalisasi fungsi pentahelix pada saat penanganan bencana agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
4.	**PELAKSANAAN**	
	Terbatasnya jumlah perlatan pendukung kebencanaan sehingga penanganan kebencanaan tidak dapat dilakukan dengan optimal	Berkoordinasi dengan instansi terkait agar dapat digunakan untuk melakukan penanganan bencana.
	Kejadian kebencanaan yang meluas sehingga dibutuhkan pemetaan ulang secara detail	Melakukan pembaruan pemetaan kebencanaan sekaligus Menyusun dokumen KRB di tahun 2023
	Perlunya peningkatan kompetensi SDM/personil Penegakan Perda.	Diselenggarakannya Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM/personil Penegakan Perda
	Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten di bidang kebencanaan sehingga pelaksanaan perencanaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal	Memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada personil penanganan kebencanaan untuk meningkatkan jumlah SDM yang berkompeten.
	Pada tahun 2022 tidak terjadi kondisi tanggap darurat bencana	-
5.	**LAIN – LAIN**	
	Frekuensi dan luasan area terdampak bencana semakin meluas	Pengkajian dan pemetaan ulang mengenai luasan wilayah yang terdampak bencana dan yang berpoten terdampak bencana di kemudian hari.

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4.6 Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Pada tahun 2022 Capaian SPM urusan Sosial secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.236 berikut.

Tabel 2.236 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dnegan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
2.	**PELAKSANAAN**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4 Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2022

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

2.2.4.1 Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 30 target dan 106 indikator. Pada tahun 2022 terdapat 34 indikator yang telah tercapai, 13 indikator tidak tercapai dan sebanyak 15 indikator yang datanya tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.237 berikut.

Tabel 2.237 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN								
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	persen	6,71	7,00	Tidak Tercapai
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	DINKES	persen	95,00	86,35	Tidak Tercapai
1.3.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	DINPERINAKER	persen	PM	0,7974	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas miskin	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINSOS P2KB	persen	PM	0,19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	DINSOS P2KB	KPM	PM	11354	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	fasilitas kesehatan	fasilitas kesehatan						
1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	DINKES	persen	100	97,41	Tidak Tercapai
1.4.1. (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINSOS P2KB	persen	67,45	95,00768665	Tercapai
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	DINPERKIM	persen	100	100	Tercapai
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	DINPERKIM	persen	100	100	Tercapai
1.4.1. (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	DINPERKIM	persen	NA	11,78	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	DINDIK	persen	PM	99,11	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	DINDIK	persen	PM	75,97	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	BPS	persen	PM	55,28	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DINDUKCAPIL	persen	93,1	98,52	Tercapai
1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber	BPS	persen	NA	99,94	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	listrik baik dari PLN dan bukan PLN	utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN					
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	PM	8,55	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD		0	NA	Data tidak tersedia
1.5.1. (b)	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	DINSOS P2KB		0	NA	Data tidak tersedia
1.5.1. (c)	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	DINSOS P2KB/DPMPPA		834	834	Tercapai
1.5.1. (d)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	BPBD		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD	%	PM	0,703703704	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rupiah	PM	309.891.396.400	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	BPBD	Dokumen	PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPEDA, BPKAD		78,1	78,2	Tercapai
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA, BPKAD		PM	6,101126029	Tidak ada target, tetapi data tersedia
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN								
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishmen)*	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	DINPERPA	skor	78,1	78,2	Tercapai
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES		PM	6,101126029	Tidak ada target, tetapi data tersedia
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	DINPERPA	persen	100	100	Tercapai
2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	DINKES	persen	2,1	2,05	Tidak tercapai
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	DINKES	persen	< 12%	6,8	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pada anak di bawah lima tahun/balita	pada anak di bawah lima tahun/balita					
2.2.1. (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINKES	persen	PM	5,61	Tidak ada target, tetapi data tersedia
2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	DINKES	persen	<0,5	0,28	Tercapai
2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	DINKES	kasus	0	10,06	Tidak tercapai
2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	DINKES	persen	0	60	Tercapai
2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	80,05	81,2	Tercapai
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.								
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS		NA	NA	Data tidak tersedia
TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA								
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	Per 100.000 KH	128,28	124.87	Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kesehatan terlatih					
3.1.2. (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	10,23	12,21	Tidak Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	0,00	1,77	Tidak tercapai
3.2.2. (a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	8,21	9,91	Tidak tercapai
3.2.2. (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Cakupan UCI desa	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	DINKES	persen	100	100	Tercapai
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV-AIDS	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINKES	orang	PM	0,84	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jumlah Insiden TB	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	kasus	PM	109,12	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINKES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.3. (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria.	Angka Kesakitan Malaria	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria.	DINKES	per 1.000 penduduk beresiko	PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.4. (a)	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	DINKES	kasus	PM	70	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan	Angka penemuan kasus baru kusta	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap	DINKES	per 100.000 penduduk	<10	1,36	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(Filiariasis dan Kusta)		Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)					
3.3.5. (a)			Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	DINKES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.5. (b)	Jumlah kab/kota dengan eliminasi filarissis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	Angka kasus filaria yang ditangani	DINKES	per 100.000 penduduk	<1	0	Tercapai
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	BPS	persen	0	NA	Data tidak tersedia
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	DINKES	persen	100	47,29	Tidak tercapai
3.4.1. (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	DINKES	persen	NA	NA	Data tidak tersedia
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	POLRES		0	0	Tercapai
3.4.2. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINKES		100	100	Tercapai
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1. (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	KESBANGPOL	orang	PM	4	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.5.1. (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	KESBANGPOL	orang	PM	6	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.5.1. (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan	KESBANGPOL	orang	PM	4	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan					
3.5.1. (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	KESBANGPOL	Rumah sakit	PM	2	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN/ Kesbangpol		-	-	Data tidak tersedia
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	BPS		0	NA	Data tidak tersedia
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DINSOS P2KB		PM	69,17	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.7.1. (a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINSOS P2KB		67,45	64,27270002	Tidak Tercapai
3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DINSOS P2KB		20	12,15	Tidak tercapai
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DINSOS P2KB		9,22	8,21	Tercapai
3.7.2.	Total Fertility Rate	Total Fertility Rate	Total Fertility	DINSOS	persen	2,16	2,18	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(a)	(TFR)	(TFR)	Rate (TFR)	P2KB				
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1(a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	BPS	persen	NA	NA	Data tidak tersedia
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINKES		PM	99,45	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINKES	persen	95	88,32	Tidak tercapai
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
3.9.3. (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Proporsi kematian akibat keracunan.	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINKES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	persen	PM	0,24	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINKES/BPS	persen	0	NA	Data tidak tersedia
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES	persen	PM	9,18	Tidak ada target, tetapi data tersedia
TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT								
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINDIK		NA	NA	Data tidak tersedia
4.1.1. (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi A (2020) **2021:**	DINDIK	persen	PM	97,96	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase SD/MI berakreditasi B					
4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi B	DINDIK	persen	0	95	Tercapai
4.1.1. (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	DINDIK/CABANG DINAS 13 KENDAL		NA	100	Tercapai
4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	DINDIK	persen	0	99,8	Tercapai
4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	DINDIK	persen	0	100,23	Tercapai
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	persen	PM	74,59	Tidak ada target, tetapi data tersedia
4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINDIK		0	9,2	Tercapai
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINDIK	persen	PM	62,8	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1. (a)	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	persen	PM	74,59	Tidak ada target, tetapi data tersedia
4.3.1. (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	persen	PM	NA	Data tidak tersedia
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DINKOMINFO	persen	0	NA	Data tidak tersedia
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli,								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	1) APM SD/MI/sederajat 2) APM SMP/MTs/Sederajat (2018-2020) **2021:** Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	DINDIK		PM PM	(1) 0,961 (2) 1,036	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1. (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	PM	97,74	Tidak ada target, tetapi data tersedia
4.6.1. (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	BPS	persen	PM	100	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	% Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	Persentase Ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan	DINDIK	persen	PM	94,79	Tercapai
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat	Persentase pendidik SMA/SMALB/MA/SMK bersertifikat	Persentase pendidik TK-SD-SMP bersertifikat	Dindik	persen	PM	53,16	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pendidik	pendidik	pendidik					
TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN								
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPMPPA		PM	5	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DPMPPA	persen	PM	8/110.146* 100= 0.007263	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	DPMPPA	persen	PM	1/12.134*100 = 0.008241	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPMPPA		0	0	Tercapai
5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	DPMPPA	persen	100	100	Tercapai
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	DINSOS P2KB	Kasus	31	33	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.3.1. (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BPS/DINSOS P2KB		0	NA	Data tidak tersedia
5.3.1. (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINSOS P2KB		9,22	8,21	Tercapai
5.3.1. (c)	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	BPS	persen	0	NA	Data tidak tersedia
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Setwan	persen	PM	11,11	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	BKPSDM	Persen	PM	56,51	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut.								
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DINSOS P2KB		PM	64,27	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB	DINSOS P2KB	persen	0	13	Tidak Tercapai
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	DINSOS P2KB		PM	NA	Tidak ada target, dan data tidak tersedia
5.b.1*			Proporsi individu yang	BPS	orang	NA	NA	Data tidak

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			menguasai/memiliki telepon genggam.					tersedia

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.4.2 Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 *goals* 54 target dan 72 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 18 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.238 berikut.

Tabel 2.238 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 7: MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA								
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	PLN	persen	100	100	Tercapai
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	PLN-ESDM-BPS	Kwh/ Kapita	0	NA	Data Tidak tersedia
7.1.2. (a)	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
7.1.2. (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.								
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer.	BPS, BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak tersedia
TUJUAN 8: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Laju pertumbuhan PDRB	BPS, BAPPEDA	persen	0	5,76	Tercapai
8.1.1. (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	0	40,68	Tercapai
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per	BPS	persen	0	NA	Data Tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		orang bekerja per tahun	orang bekerja per tahun					
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.3.1. (a)	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Persentase Tenaga kerja formal	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.3.1. (c)	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah	0	NA	Data Tidak tersedia
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	persen	PM	4,98	Tidak ada target, tetapi data tersedia
8.5.2. (a)	Tingkat setengah pengguran	Tingkat setengah pengguran	Tingkat setengah pengguran	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	DINPERINAKER/BPS	orang	PM	504	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	Dinparbudpora		0	16,68	Tercapai
8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinparbudpora	orang	600	72	Tidak Tercapai
8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinparbudpora	orang	565.000	984.518	Tercapai
8.9.1. (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinparbudpora		0	13,3	Tercapai
8.9.2*			Jumlah pekerja pada industri	Dinparbudp		PM	1,1611760	Tidak ada target, tetapi

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	ora			46	data tersedia
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestic untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.10.1. (b)			Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINDAGKOP UKM		0	0	Data Tidak tersedia
TUJUAN 9: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI								
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi jalan baik	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	DPU PR	%	82,21	84,28	Tercapai
9.1.1. (b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Panjang pembangunan jalan tol.	Panjang pembangunan jalan tol.	DPU PR		NA	NA	Data Tidak tersedia
9.1.1. (c)	Panjang jalur kereta api.	Panjang jalur kereta api.	Panjang jalur kereta api.	DPU PR		NA	NA	Data Tidak tersedia
9.1.2. (b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	DINHUB		0,00	NA	Data Tidak tersedia
9.1.2. (c)	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	DINHUB		0,00	NA	Data Tidak tersedia
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industry dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	persen	PM	4,26	Tidak ada target, tetapi data tersedia
9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	persen	PM	4,46	Tidak ada target, tetapi data tersedia
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS		PM	NA	Data Tidak tersedia
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	nilai tambah industri.	total nilai tambah industri.	total nilai tambah industri.					
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	DLH		NA	NA	Data Tidak tersedia
9.4.1. (a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	DLH		NA	NA	Data Tidak tersedia
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BAPPEDA, BPS		PM	6,9	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	DINKOMINFO	Persen	0	NA	Data Tidak tersedia
9.C.1. (a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS	Persen	0	NA	Data Tidak tersedia
9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	DINKOMINFO/BPS	Persen	0	NA	Data Tidak tersedia
TUJUAN 10: MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA								
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1*	Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS, BAPPEDA	-	0	0,337	Tidak tercapai
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	BPS, BAPPEDA	persen	6,71	7,00	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	DPMPPA		0	NA	Data Tidak tersedia
10.2.1*			Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	DINSOS P2KB		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	DPMPPA/POLRES		PM	61 orang	Tidak ada target, tetapi data tersedia
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		PM	53 orang	Tidak ada target, tetapi data tersedia
10.3.1. (d)			Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	BAGIAN HUKUM		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								
10.4.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DINPERINAKER		PM	79,9	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik								
10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	DINPERINAKER	kegiatan	PM	50 orang	Tidak ada target, tetapi data tersedia
TUJUAN 17: MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.								
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada Negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDM menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BPKAD, BPS		984.981.114.000	989.013.074.926	Tercapai
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPKAD		94.600.000.000	101.303.223.640	Tercapai
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD		NA	NA	Data Tidak tersedia
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	BPS/DINKOMINFO		0	NA	Data Tidak tersedia
17.6.2. (c)	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	DINKOMINFO		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	DINKOMINFO/BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi Negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020								
17.11.1. (a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Jumlah ekspor non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS		NA	NA	Data Tidak tersedia
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama								
17.17.1 (a)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	BAPPEDA		NA	NA	Data Tidak tersedia
17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	BAPPEDA		NA	NA	Data Tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		(KPBU)						
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional								
17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	BPS	persen	0	NA	Data Tidak tersedia
17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS		0	75	Tercapai
17.18.1. (c)			Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS		0	19	Tercapai
17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	BPS	indikator	0	NA	Data Tidak tersedia
17.19.2. (b)			Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DINDUKCAPIL		0	0	Tercapai
17.19.2. (c)			Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS		19.600	36.331	Tercapai
17.19.2. (d)			Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS		0	97,22	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.4.3 Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 6 *goals* 29 target dan 64 indikator. Terdapat 25 indaktor yang telah tercapai, 25 data tidak tersedia, 8 indikator provinsi serta 3 indikator nasional sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.239 berikut.

Tabel 2.239 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 6: MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA								
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKIM	Persen	100	100	Tercapai
6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Kapasitas Prasarana air baku	DINPERKIM	m3	PM	12.196.014	Tidak ada target, tetapi data tersedia
6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DINKES		0	100	Tercapai
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1. (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINKES		0	NA	Data tidak tersedia
6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Cakupan pelayanan sanitasi	DINPERKIM	Persen	100	100	Tercapai
6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINPERKIM	Kelurahan	27	27	Tercapai
6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai
6.2.1. (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Persen	PM	4	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.2.1. (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DLH		0	0	Tercapai
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1. (a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH		PM	1	Tidak ada target, tetapi data tersedia
6.3.1. (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH		0,3	0,3	Tercapai
6.3.2. (a)	Kualitas air danau.	Kualitas air danau.	Kualitas air danau.	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.3.2. (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1. (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH	Perusahaan	40	42	Tercapai
6.4.1. (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DLH/DINPERPA		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.5.1. (C)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	BAPPEDA PSDAIW, DPU-PR		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1. (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.6.1. (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN								
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memilki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	DINPERKIM	Persen	93,122	97,470	Tercapai
11.1.1. (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.1.1. (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1. (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DINHUB		PM	425,01	Tidak ada target, tetapi data tersedia
11.2.1. (b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Indikator Nasional
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1. (a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.3.1. (b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.3.2. (a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.3.2. (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
Taregt 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.4.1. (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	PM	26.469	Tidak ada target, tetapi data tersedia
11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD		PM	NA	Tidak ada target dan data tidak tersedia
11.5.1. (b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD		PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD		2	2	Tercapai
11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD		PM	309.891.396.400	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	71,48	92,72	Tercapai
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah bank sampah skala kota dan kelurahan	DLH		PM	24	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Persen	2,909	2,900	Tidak tercapai
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD		PM	NA	Data Tidak Tersedia
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	dokumen	PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKENAJUTAN								
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1. (a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLH	buah	PM	1	Tidak ada target, tetapi data tersedia
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Ton/tahun	PM	304,27	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	%	17,23	18,93	Tercapai
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Targer 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.								
12.7.1. (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
12.8.1. (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	BAGIAN ORGANISASI	OPD	15	31	Tercapai
TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA								
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	orang	PM	26.469	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1. (a)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLH		3 lokasi	3 lokasi	Tercapai
TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN								
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1*	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)								
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DINDAGKOP UKM		0	0	Data Tidak Tersedia
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi)	DKP		240	240	Tercapai
TUJUAN 15: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN								
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DLH		108,86 Ha	108,17 Ha	Tidak tercapai
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1. (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
15.2.1. (b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.								
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.4.4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 *goals* 8 target dan 32 indikator. Terdapat 13 indikator yang tercapai, 2 indikator yang tidak tercapai serta 17 indikator yang datanya tidak tersedia sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.240 berikut.

Tabel 2.240 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 16: PERDAMIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH								
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun								
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES		0	0	Tercapai
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	POLRES		0	0	Tercapai
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di	Proporsi penduduk yang merasa aman	Proporsi penduduk yang merasa aman	BPS		0	NA	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	area tempat tinggalnya	berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	berjalan sendirian di area tempat tinggalnya					
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DPMPPA	Anak	0	0	Tercapai
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DPMPPA		0	0	Tercapai
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLRES		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Bagian Hukum	Perkara	6	6	Tercapai
16.3.1. (c)	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1*	Proporsi	Proporsi	Proporsi	BPKAD		100%	94,58%	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.			APBD: Rp.1.090.187.786.000,- Realisasi: Rp.1.090.187.786.000,-	APBD: Rp.1.090.187.786.000,- Realisasi: Rp.1.031.090.188.444,02	
16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD	Persen	100	100	Tercapai
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kota Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI	Indeks	BB	BB	Tercapai
16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	%	100	80	Tidak Tercapai
16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI	Indeks	71.69 (BB)	(BB)	Tercapai
16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik	BAGIAN ORGANISASI	Indeks (Zona Merah/ Kuning/ Hijau)	Zona Hijau	94.62 (Zona Hijau)	Tercapai
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SETWAN	Persen	PM	11,11	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(DPRD) Provinsi	(DPRD) Provinsi	(DPRD) Kota					
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II	BKPSDM	Persen	PM	10,71	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.7.2. (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	INDIKATOR PROVINSI		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.7.2. (b)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	INDIKATOR PROVINSI		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.7.2. (c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	INDIKATOR PROVINSI		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1.*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DINDUKCAPIL	persen	PM	99,91	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	DINDUKCAPIL DAN DINSOS		PM	35,50	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKCAPIL	Persen	93,10	98,52	Tercapai
Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional								
16.10.1. (a)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
16.10.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		PM	53 pengaduan	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stautori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	DINKOMINFO	Persen	100	107	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	DINKOMINFO	Persen	50	50	Tercapai
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.241 berikut.

Tabel 2.241 Permasalahan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Indeks Keluarga Sehat	Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Ibu (AKI)	
Angka Kematian Bayi (AKB)	
Angka Kematian Balita (AKABA)	
Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Masih tingginya angka kemiskinan
Rata-Rata Lama Sekolah	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)
Kategori Kota Layak Anak	Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja
Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh
Luas Genangan Banjir dan Rob	Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Lahan	
Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Belum opimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan
Persentase pelayanan sampah	
Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	
Persentase keterhubungan jalan	
Pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya
Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Masih adanya konflik sosial
Indeks SPBE	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
IKM Kota	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	
Indeks Merit System	
Nilai SAKIP Kota	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Maturitas SPIP	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Selanjutnya, permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.242 berikut.

Tabel 2.242 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Masih rendahnya capaian SPM pendidikan
	Belum optimalnya kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas
	Masih rendahnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Masih rendahnya jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Belum optimalnya RS Rujukan tingkat kota yang terakreditasi
	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar
	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
	Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek
	Belum optimalnya tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
	Belum optimalnya sarana farmasi yang memenuhi standar
	Masih rendahnya jumlah produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran
	Masih rendahnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat
	Masih rendahnya jumlah rumah tangga sehat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum optimalnya sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik
	Masih rendahnya cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah
	Masih rendahnya ketersediaan sarana persampahan regional
	Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik
	Masih rendahnya rasio kepatuhan PBG Kab/Kota
	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan

URUSAN	PERMASALAHAN
	Masih rendahnya rasio tenaga bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Masih rendahnya ketersediaan rumah layak huni
	Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh
	Masih rendahnya kawasan permukiman tidak kumuh
	Masih rendahnya jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masih rendahnya persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	Masih rendahnya persentase korban bencana alam yang ditangani
	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Masih rendahnya persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan
	Masih rendahnya persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
	Masih rendahnya persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial
	Belum optimalnya korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
	Belum optimalnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Masih rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
	Masih rendahnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota
	Belum optimalnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Masih rendahnya persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Masih tingginya rasio kekerasan terhadap perempuan
	Masih rendahnya persentase kelurahan layak anak
	Belum optimalnya pengaduan kasus anak yang terlayani
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Masih rendahnya persentase cadangan pangan daerah
	Belum optimalnya kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan
	Belum optimalnya pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan
URUSAN PEMERINTAHAN	Belum optimalnya permasalahan pertanahan yang tertangani

URUSAN	PERMASALAHAN
BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya pengolahan limbah
	Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau
	Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundangan
	Masih tingginya jumlah usaha/kegiatan yang belum memenuhi syarat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH
	Belum optimalnya masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup
	Belum adanya perolehan penghargaan bidang LH
	Belum optimalnya tindaklanjut atas pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat
	Belum optimalnya pengelolaan sampah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk
	Masih rendahnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil
	Masih rendahnya jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Masih rendahnya ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan
	Belum optimalnya kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"
	Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga
	Masih tingginya angka perkawinan di bawah 21 tahun
	Masih tingginya unmeet need KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Masih rendahnya ketersediaan fasilitas LLAJ
	Belum optimalnya kinerja lalu lintas Kab/Kota
	Masih rendahnya jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya penyelesaian permohonan informasi publik
	Belum tercapainya Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas
	Masih rendahnya persentase koperasi yang mengikuti pelatihan
	Masih rendahnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN	Berlum tersedianya peraturan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
MODAL	Belum optmlanya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
	Masih rendahnya penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
	Masih rendahnya nilai investasi baru pertahun
	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Masih rendahnya pembinaan organisasi kepemudaan
	Masih rendahnya ketersediaan sarpras olahraga sesuai jenis cabor
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Masih rendahnya Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum adanya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum adanya event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan
	Masih rendahnya persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Belum optimalnya pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya
	Masih rendahnya pelestarian cagar budaya
	Masih rendahnya jumlah pengunjung museum batik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya pengunjung perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Belum optimalnya nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik
	Belum tersedianya arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
	Masih rendahnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Masih rendahnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Masih rendahnya peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI
	Masih rendahnya peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI
	Masih rendahnya peningkatan produksi perikanan budidaya
	Masih rendahnya peningkatan jumlah pengusaha perikanan
	Masih rendahnya jumlah pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Belum optimalnya pertumbuhan jumlah wisatawan domestik

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
	Masih rendahnya persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih rendahnya nilai produksi pertanian pertahun
	Masih rendahnya nilai produksi peternakan pertahun
	Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
	Masih tingginya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Masih rendahnya persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
	Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko
	Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya pemantauan terhadap obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Masih rendahnya persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
	Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	Belum optimalnya penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu
	Masih rendahnya persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif
	Masih rendahnya capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat
	Belum optimalnya kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan
	Masih tingginya deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

URUSAN	PERMASALAHAN
	Masih rendahnya persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa
SEKRETARIAT DPRD	Masih rendahnya persentase Perda yang ditetapkan
	Belum tercapainya pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	Belum optimalnya dokumen perencanaan tepat waktu
	Belum tercapainya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu
	Berlum tersedianya dokumen perencanaan bidang Pemsosbud
	Belum tercapainya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian
	Belum tercapainya dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah
KEUANGAN	Masih tingginya rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
	Belum optimalnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)
	Belum optimalnya realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya PNS yang berkembang karier
	Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN
	Belum optimalnya keterisian jabatan
	Belum optimalnya keterpenuhan formasi ASN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Masih rendahnya PNS yang berkembang kompetensinya
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Masih rendahnya hasil litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD
	Masih rendahnya tingkat pemberdayaan stakeholder kelitbangan
	Belum optimalnya Skor Capaian Nilai RiDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Masih rendahnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya level kapabilitas APIP
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Masih rendahnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah utara
	Masih rendahnya tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan
	Masih rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat di kelurahan
	Masih rendahnya tingkat kinerja trantibum

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belum optimalnya persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan
	Belum optimalnya parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik
	Masih rendahnya persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
	Masih rendahnya persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
	Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial
Non Urusan	Masih rendahnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD
	Masih rendahnya ketersediaan laporan capaian kinerja
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Masih rendahnya persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.4 Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.5, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.243 berikut.

Tabel 2.243 Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan
Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	
Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan	Isu Strategis
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum opimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)	Peningkatan Derajat Kesehatan
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan	
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2022

Selanjutnya isu strategis dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Tata Kelola Pemerintahan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih *(Good Governance and Clean Government)* adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu: transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif.

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 71,4. Upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Beberapa aspek terkait yang masih menjadi permasalahan

dan harus segera dioptimalkan, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 2,82. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat, serta peningkatan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE dan perkuatan pelayanan pusat data Pemerintah Daerah; b) Layanan publik telah dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan, berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022, Kota Pekalongan mendapat nilai 90,44 dengan kategori Sangat Baik, persentase OPD dengan IKM Sangat Baik sebesar 62 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 48,88; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 73,31 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun masih perlu ditingkatkan untuk mendaptkan hasil yang optimal; e) Akuntabilitas keuangan tetap perlu ditingkatkan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3,022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya *merit system* secara penuh, walaupun dari tahun ketahun terdapat peningkatan nilai dan pada tahun 2022 nilai merit system Kota Pekalongan sebesar 264,5; h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3,00; i) Belum optimalnya nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu sebesar 90,01, masih perlu ditingkatkan; dan j) Masih minimnya jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM, sehingga perlu didorong lagi agar bertambah.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan tiap tahunnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Beberapa upaya perubahan yang dilakukan yaitu: Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD; Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO; Penataan sistem manajemen SDM aparatur; Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD; Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penataan peraturan perundang-undangan dan Perubahan Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan).

Dalam aspek Pengawasan, yang dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih maka pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala. Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan bertujuan untuk Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota; Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; dan Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Selain itu, peran perguruan tinggi juga diperlukan. Perguruan tinggi di Kota Pekalongan lebih menguasai permasalahan dan isu strategis tetapi belum optimal dalam memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2.4.2 Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan maupun pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas lingkungan yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (*land subsidence*). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Sampai dengan tahun 2022, luas genangan di Kota Pekalongan seluas 980,13hektar atau 21,11 persen dari luas wilayah kota. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, dimana persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 69,41 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), sekitar 8-13 cm per tahun; c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 6,89 persen; d)Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa; e) Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan

sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga; dan f) Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa kawasan justeru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun *water storage* guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman.

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi ekploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu Kualitas Lingkungan Hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 54,36, yang walaupun sedikit secara angka mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu 54,31. IKLH yang belum baik tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Salah satu komponen dalam IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Kondisi RTH di Kota Pekalongan masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi persyaratan pemenuhan RTH sesuai dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sehingga Pemerintah Kota Pekalongan berupaya untuk pengembangan RTH untuk dapat memenuhi kebutuhan RTH yang disyaratkan, yaitu 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% untuk RTH public dan 10% untuk RTH privat. Namun upaya ini masih belum dapat dilaksanakan secara kontinyu dan kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air, belum terbangun. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi,

penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Selain itu penanganan terhadap pengelolaan limbah B3 juga perlu mendapat perhatian, terutama dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan. Perlu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, antara lain: Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).

2.4.3 Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (*built up area*), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (*resilience city*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Pekalongan tahun 2022 adalah sebesar 66,90 persen, mengalami penurunan dari tahun 2021 (cakupan tahun 2021 sebesar 84,77 persen). Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Cakupan pelayanan persampahan pun juga belum optimal, dimana pada tahun 2021 sebesar 73,75 persen dan tahun 2022 menurun menjadi 72,36 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2022, jalan kota kondisi mantap sebesar 84,28 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Memasuki era *new normal* dimana PPKM sudah mulai longgar dan pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali dan bermunculan yang baru, menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung sehingga mobilitas di perkotaan cenderung ramai kembali. Pada tahun 2022 VC Ratio menjadi 0,39 menurun disbanding tahun 2021 (VCR tahun 2021 0,49). Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin merata pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio menurun, dimana artinya tidak terdapat kemacetan kendaraan pada ruas jalan-jalan kota. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,39), namun

untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan. Penyediaan titik dan kantong-kantong parkir juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Isu Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastruktur lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2021, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru , luas kawasan kumuh mencapai 6,89 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Luasan ini mengalami pengurangan dari tahun 2020 sebesar 10,74 persen. Persentase tersebut merupakan luasan yang masih cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 204,11 hektar. Sehingga masih tersisa luasan sebanyak 294,66hektar dari total luasan kumus seluas 498,77 hektar.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

2.4.4 Peningkatan Derajat Kesehatan

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Di sisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif

serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan di berbagai tempat, derajat kesehatan memiliki korelasi yang signifikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan salah satu komponen yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator makro atau indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, derajat kesehatan masyarakat memiliki korelasi dengan pencapaian kinerja pembangunan lainnya, sehingga derajat kesehatan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan Kota Pekalongan. Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat berdampak sistemik terhadap aspek-aspek pembangunan lainnya.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan: a) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2022 AKI masih bernilai 124,53 per 100.000 kelahiran hidup; b) Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2022 AKB masih bernilai 9,96 per 1.000 kelahiran hidup; c). Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2022 AKABA masih bernilai 12,28 per 1.000 KH; d). Tingginya angka kesakitan dan nilainya masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan nilai 8,38 persen di tahun 2021; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,28 persen dan Balita Stunting sebanyak 6,80 persen pada tahun 2022; f) masih rendahnya sistem ketahanan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang cenderung mengecil dan pada tahun 2022 memiliki skor sebesar 81,2 persen; serta g) Tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 mencapai sebesar 35,73 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2020 sebesar 74,38, pada tahun 2021 meningkat menjadi 74,44 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 74,51. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah maupun UHH Provinsi Jawa Tengah, capaian UHH Kota Pekalongan masih berada pada posisi terbawah. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana terus meningkatkan UHH secara optimal sehingga tidak tertinggal dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun kota-kota setara lainnya di Jawa Tengah. Upaya tersebut adalah melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus

ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Selain hal tersebut, perlu dilakukan penguatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perurnusan rencana intervensi, sinkronisasi program penurunan AKI, AKB dan AKABA antara RSUD dan Puskesmas, pemberdayaan kader dan optimalisasi kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

Selain permasalahan AKI, AKB dan AKABA, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah stunting, dimana masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting bisa terjadi dan terus meningkat, bahkan pada saat teknologi dan ketersediaan fasilitas kesehatan sudah “dekat” dan “mudah” diakses masyarakat. Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi beresiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Penyebabnya multidimensi, tidak hanya faktor kesehatan, melainkan juga faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya asupan gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, faktor keluarga, mulai dari ketidaktauan praktik pemberian makan, praktik pemberian ASI, infeksi penyakit serta pola pengasuhan anak. Faktor eksternal yang turut berpengaruh yaitu akses air bersih dan sanitasi lingkungan.

Pemerintah Pusat terus mendorong penurunan stunting melalui strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervesi Percepatan Penurunan Stunting Terintegerasi Tahun 2023, Kota Pekalongan menjadi salah satu kota yang perlu mendapat penanganan dengan skema percepatan khusus. Hal ini ditunjukkan dengan angka prevalensi stunting tahun 2021 berdasarkan SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) sebesar 20,6 persen dan berdasarkan E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 7,82 persen. Target prevalensi stunting Kota Pekalongan ditargetkan turun setiap tahun, sehingga diperlukan upaya percepatan diantaranya: penguatan cakupan intervensi spesifik kunci, pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko stunting, pendampingan bagi pemerintah daerah, pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk air minum dan sanitasi, penguatan intervensi dukungan, terutama cakupan surveilans, koordinasi tim percepatan penurunan stunting daerah, dan pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah.

Masih rendahnya skor PPH menunjukkan bahwa konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan skor PPH melalui pelatihan olahan pangan dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat. Pembangunan pertanian serta kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan juga harus diarahkan untuk diversifikasi produk-produk bahan makanan maupun kerjasama dengan daerah lain, sehingga tersedia beragam pilihan bahan makanan di wilayah Kota Pekalongan.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.4.5 Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Beberapa indikator perkembangan kesejahteraan tersebut adalah dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita maupun semakin menurunnya angka kemiskinan Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.

Dari data tahun jamak, angka kemiskinan Kota Pekalongan hingga tahun 2019, menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Namun demikian, sebagai dampak pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,17 persen pada tahun 2020 dan semakin meningkat menjadi 7,59 persen pada tahun 2021. Upaya pemulihan kondisi sosia dan ekonomi, sebagai dampak pandemi Covid-19 menunjukkan hasil, yaitu dengan capaian angka kemiskinan tahun 2022 adalah 7,00 persen, sehingga sudah menunjukkan pola kembali menurun.

Dengan perkembangan indikator tersebut, maka masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan belum optimal. Penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah maupun secara nasional bahwa ketika angka kemiskinan semakin rendah maka akan dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi pandemi *COVID-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan DTKS tahun 2021 sebanyak 184.247 jiwa dari semula 108.436 jiwa pada tahun 2020, atau kenaikan sebanyak 75.811 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) kembali meningkat yaitu menjadi 188.445 jiwa. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen dalam penanganan upaya pengentasan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan,

menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Oleh karena itu penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2020 yang menginstruksikan kemiskinan ekstrem agar diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Terdapat tiga strategi kebijakan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong - kantong kemiskinan. Secara khusus kepada Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk: melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kab/Kota; menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan Berita Acara; menyusun rencana program/kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kab/Kota termasuk pemutakhiran data penerima by name by address; fasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap tiga 3) bulan sekali.

Tantangan pembangunan Kota Pekalongan lainnya adalah bagaimana menurunkan angka pengangguran secara optimal. Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berfluktuasi. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan analisis korelasi, dengan menggunakan data tahun jamak, antara pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan angka pengangguran, ketiga indikator tersebut tidak memiliki korelasi yang signifikan antar indikator. Temuan ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan belum berimplikasi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan maupun penurunan angka pengangguran. Angka kemiskinan dan angka pengangguran pun juga tidak memiliki korelasi yang signifikan. Jika angka kemiskinan menurun, juga tidak ditandai dengan penurunan angka pengangguran.

Angka pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 sebesar 6,89 persen dan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,98 persen. Meskipun angkanya menurun, tetap perlu adanya upaya dengan berbagai kebijakan yang tepat sasaran dan terarah. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, *link and match* dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehinga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus diintegrasikan dengan pembangunan perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi yang didorong harus pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga

kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan target-target pembangunan tersebut.

2.4.6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumberdaya manusia yang tidak optimal. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 75,40 dan tahun 2022 meningkat menjadi 75,90. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah sebesar 12,86 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,86 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah sampai semester 1 atau 10 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.

b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 adalah 9,20 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 9,20 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP, dan masuk kelas 10 SMA namun tidak sampai lulus. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.

c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 sebesar 57,87. Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga dapat lebih optimal.

Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan, salah satunya pada tahun 2022 disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan IPM. RAD ini akan menjadi dasar rencana aksi pada tahun berikutnya. Urgensi RAD Peningkatan IPM tersebut adalah sebagai upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi

agar IPM Kota Pekalongan dapat meningkat secara optimal. Selama in, IPM Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, bahan dengan beberapa kabupaten pun, IPM Kota Pekalongan capaiannya masih tertinggal.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Upaya peningkatan sumber daya manusia juga harus didukung dengan peningkatan *soft skill* masyarakat. *Soft skill* adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan semacamnya. Dalam hal ini, *soft skill* adalah karakter *bawaan* individu. *Soft skill* bisa saja dipelajari, akan tetapi tidak dengan cara belajar formal layaknya di bangku sekolahan atau perkuliahan. Hal itu dapat dipelajari dengan lebih banyak melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, serta dengan melatih kepekaan sosial. Dengan begitu, individu itu dapat menerapkannya pada perilaku yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan *soft skill.* Seiring berkembangnya zaman, di samping individu memiliki kemampuan *hard skill*, ia juga dituntut untuk harus memiliki *soft skill.* Hal itu karena dalam suatu organisasi dan lingkungan sosial lainnya, banyak dijumpai kasus kekerasan yang disebabkan ketidakmampuan individu dalam mengendalikan emosi, pikiran, tindakan, juga tuntutan organisasi atau lingkungan sosial yang semakin pelik. Maka dari itu, kemampuan *soft skill* dinilai sangat penting karena bisa dikatakan seorang individu itu akan terlihat lebih menonjol dan kompeten dibandingkan dengan individu lain.

Penanganan anak tidak sekolah (ATS) Kota Pekalongan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran lintas sektor dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan ATS sangat diperlukan karena penyebab dan penanganan ATS memerlukan sinergitas semua pihak baik pemerintah kota, masyarakat maupun lembaga non pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS antara lain pembangunan Sanggar Kelompok Belajar (SKB). SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal. Sampai tahun 2021 ada tiga belas PKBM di Kota Pekalongan yang memberikan layanan pendidikan non formal. Keberadaan SKB diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan non formal.

2.4.7 Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen, pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,59 persen dan pada tahun 2022 menjadi 5,76 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal,

dimana PDRB perkapita tahun 2021 sebesar Rp.37,07 juta per tahun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.40,68 juta per tahun, namun belum menunjukkan peningkatan dan pemeraataan kesejahteraan masyarakat yang optimal; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisata pada tahun 2021 sebanyak 316.440 orang, dan meningkat menjadi 1.038.424 orang. Walaupun meningkat tajam, namun masih perlu dioptimalkan; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp.390,348 Milyar dan meningkat menjadi Rp 3.188,411 Milyar pada tahun 2022; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2021 dan 2022 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2021 sebesar 2,38 persen dan tahun 2022 sebesar 4,26 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2021 sebesar 5,46 dan menurun menjadi 3,29 persen pada tahun 2022; dan f) Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan *event* budaya tahun 2021 dan tahun 2022 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru sebagai bagian dari TOD (*Transit Oriented Development*). Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan disisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahanya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan

ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Pekalongan, dari ke-14 sub sektor dalam ekonomi kreatif, hanya 8 (delapan) sub sektor yang masuk dalam *roadmap* Kota Pekalongan, yaitu: 1) Kerajinan; 2) Desain; 3) Fashion; 4) Film, video dan fotografi; 5) Musik; 6) Seni pertunjukan; 7) Radio dan televisi; dan 8) Kuliner. Dari kedelapan sub sektor yang ada maka dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) kluster yaitu: Kuliner, Seni Kriya dan Seni Pertunjukan. Kondisi Ekraf saat ini secara umum masih sangat minim, dapat dilihat dengan tidak dimilikinya daftar kebutuhan, pasar yang tidak terpetakan, permodalan yang tidak tersalurkan dengan baik. Dengan kata lain dapat dikatakan kondisi ekraf di Kota Pekalongan masih belum didukung data yang baik. Dalam ekosistem lama ekraf dilaksanakan dengan model '*single fighter*' atau perorangan, masih terlalu terikat dengan tradisi/tradisional, masih berupa pelayanan dasar dan merupakan sambilan. Sehingga perlu adanya perubahan cara pandang atau 'Re-Branding' dengan mulai menjalankan Ekraf melalui/berbasis komunitas, memberikan nilai tambah pada karyanya, ada pelayanan tambahan dan bersifat profesional.

Selain perubahan dengan me-re-branding ekosistem Ekraf juga perlu adanya pembuatan Database Dinamis yang dapat menjawab kebutuhan pengembangan, pemetaaan dan akses pasar serta penyaluran modal. Dalam kebutuhan pengembangan perlu didasari oleh regulasi/peraturan, adanya kelembagaan dan didukung infrastruktur. Sedangkan pemetaan dan akses pasar dibedakan menjadi even dan segmentasi. Untuk permodalan dapat dibagi menjadi profit, non profit dan stimulan.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Dalam Pariwisata terdapat 5 (lima) hal penting yang saling terkait, yang biasa dikenal dengan 3A dan 2P, yaitu: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Promosi dan Pelaku Usaha. Kelima hal tersebut harus ada dan mendukung satu dengan lainnya untuk menciptakan pariwisata yang unggul. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Tahun 2017-2027, Kota Pekalongan termasuk dalam salah satu

Destinasi Pariwisata Provinsi / DPP yaitu DPP Tegal – Pekalongan dan sekitarnya. DPP ini merupakan destinasi pariwisata berskala Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 DPP. DPP dibagi lagi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi / KSPP dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi/ KPPP. Untuk DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya, terdiri dari 2 KSPP dan 4 KPPP yaitu: a) KSPP Tegal dan sekitarnya; b) KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya; c) KPPP Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya; d) KPPP Batang dan sekitarnya; e) KPPP Pemalang dan sekitarnya; dan f) KPPP Kaligua-Malahayu dan sekitarnya. Sedangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPP) Kota Pekalongan Tahun 2013-2028, telah ditentukan 4 DPD dan 9 KSPP serta 14 KPPP, dengan kriteria: a) Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah daerah yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata seperti KSPD dan KPPD; b) Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas serta membentuk jejaring produk dan pola kunjungan wisata; c) Memiliki tema yang mendukung penguatan daya saing; d) Memiliki dukungan aksesibilitas dan infrastruktur mendukung pariwisata; dan e) Keterpaduan rencana sektor terkait.

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023). Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, pengembangan atraksi wisata, peningkatan kualitas amenitas, perkuatan promosi wisata, dan penyusunan standar prosedur manajemen pariwisata, termasuk dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan sektor pariwisata di Kota Pekalongan.

2.4.8 Pelestarian Budaya Lokal

Pemerintah Kota Pekolongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting, harus diintegrasikan dengan pembangunan kepariwisataan, sehingga dapat berkembang pariwisata budaya. Pengembangan pariwisata budaya dapat menjadi potensi tersendiri bagi pariwisata tersebut karena masing-masing daerah pasti memiliki kearifan budaya lokal yang khas dan unik bagi wisatawan. Strategi pengembangan pariwisata budaya dapat dilakukan antara lain dengan cara pengembangan atraksi budaya yang tetap mempertahankan jati diri kawasan, pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah menjadi bangunan cagar budaya, peningkatan infrastruktur, peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya

serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4.9 Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondisivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah akan sangat tergantung kondisi kondusivitas wilayah ini.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2020 berjumlah satu kasus, tahun 2021 bertambah menjadi tiga kasus dan pada tahun 2022 tidak terjadi kasus konflik sosial. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dimana pada tahun 2021 sebesar 3,60 (per 10.000 penduduk) dan menurun menjadi 1,47 (per 10.000 penduduk) di tahun 2022, namun angka tersebut harus terus dioptimalkan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tahun 2021 sebesar 46 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 39 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupatan/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat, menjadi tanggung jawab bersama, seluruh pemangku kepentingan, bukan menjadi kewenangan pemerintah semata. Dengan kondusivitas wilayah yang baik maka akan menjamin perwujudan penanaman modal yang semakin meningkat sehingga perekonomian akan semakin berkembang, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih lagi, pada tahun 2024 akan diselengarakan Pemilu dan Pilkada serentak, sehingga diperlukan kondusivitas wilayah yang sangat baik. Guna mewujudkan Pilkada serentak yang aman dan damai, Pemerintah Kota Pekalongan bersinergi dengan TNI, POLRI dan Linmas dengan menyiapkan personil pengamanan pada semua tahapan Pilkada, yaitu tahapan masa kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pilkada dan pengucapan sumpah/janji, pengamanan pada kantor penyelenggara Pilkada yaitu pengamanan Kantor dan Gudang Logistik KPU Kota Pekalongan serta pengamanan Kantor Bawaslu. Dukungan pembiayaan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan alokasi pendanaan sebesar 40% pada tahun anggaran 2023 dan 60% pada tahun anggaran 2024 dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi secara global masih dalam tren pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pentingnya upaya global yang terkoordinasi dengan baik untuk dapat terus mendorong pemulihan ekonomi, serta mendorong inklusivitas dalam pengembangan ekonomi dan sektor keuangan yang berwawasan lingkungan. Indonesia diprakirakan mampu melanjutkan pemulihan ekonomi, di tengah risiko stagflasi global yang dipicu oleh tekanan inflasi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara.

Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.

Senada dengan kondisi ekonomi nasional, perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 tumbuh 5,31 persen secara kumulatif dari Januari sampai dengan Desember 2022. ada beberapa hal yang menyokong pertumbuhan ekonomi di Jateng. Di antaranya, sektor jasa yang tumbuh kuat di periode ini. Sebagai contoh tingkat pengisian kamar hotel, baik berbintang maupun nonbintang, yang meningkat 9,35 persen dibanding triwulan sebelumnya. Selain itu, penumpang moda transportasi yang mengalami peningkatan. Di sektor kereta api, penumpang naik 107,77 dibanding Triwulan IV 2021. Selain itu, lalu lalang penggunaan mobil pribadi melewati tol meningkat 4,5 persen dibanding Triwulan III 2022. Selan sektor jasa, pertumbuhan ekonomi Jateng juga disokong permintaan pasar domestik dan internasional. Data ekspor produk pengolahan di Jawa Tengah menunjukan peningkatan 2,48 persen. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.

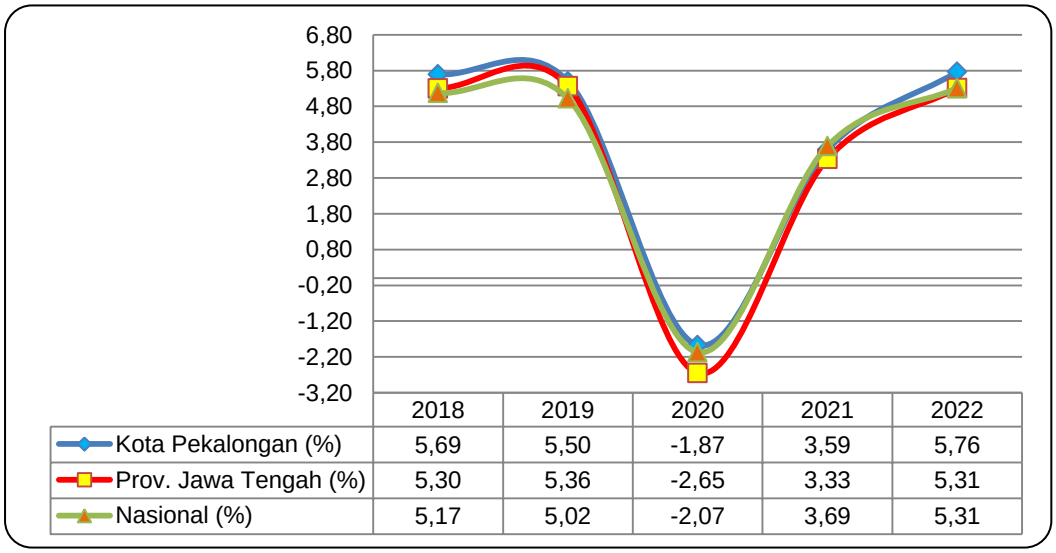
Di Kota Pekalongan, ekonomi tahun 2022 tumbuh 5,76 persen, dimana penyumbang tertinggi pada sektor transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 48,53 persen, dan penopang urutan kedua adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 12,43 persen. Kondisi ini menandakan geliat ekonomi di Kota Pekalongan terus membaik.

Dibutuhkan inovasi dalam mendorong investasi, pengembangan sektor-sektor unggulan di Kota Pekolangan seperti industri pengolahan, batik, pariwisata, aktivitas religi, perdagangan dan jasa serta. Pemerintah telah mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin berkembang dan berdaya saing, karena terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sinergis dengan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia sejak awal 2021 dan berlanjut hingga sekarang. Selain itu, pelibatan dunia usaha dan pengkoordinasian secara intens melalui forum CSR menjadi penting dalam akselerasi pencapaian target pembangunan di tahun 2024.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, tetapi masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respons kebijakan yang ditempuh.

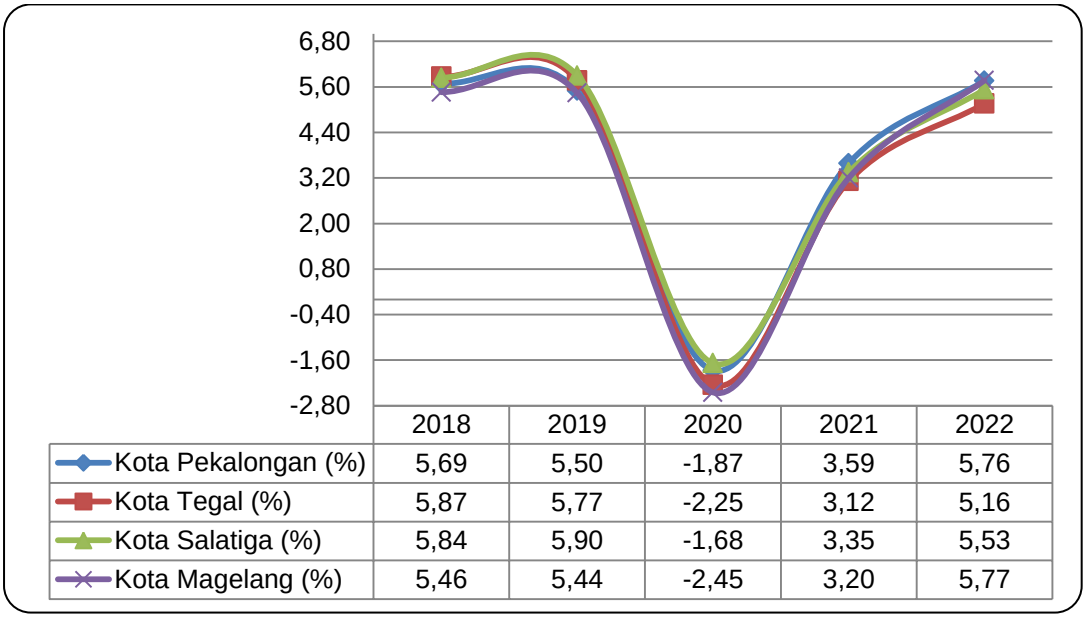


	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	5,69	5,50	-1,87	3,59	5,76
Prov. Jawa Tengah (%)	5,30	5,36	-2,65	3,33	5,31
Nasional (%)	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 (diolah), 2023

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Sementara pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 3.2 berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	5,69	5,50	-1,87	3,59	5,76
Kota Tegal (%)	5,87	5,77	-2,25	3,12	5,16
Kota Salatiga (%)	5,84	5,90	-1,68	3,35	5,53
Kota Magelang (%)	5,46	5,44	-2,45	3,20	5,77

Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2018-2022. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2022, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,08 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,79 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,10 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,67	4,66	5,09	4,79	4,71
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,94	20,85	21,34	21,15	20,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,12	0,12	0,11

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
F	Konstruksi	14,60	14,64	14,54	15,46	15,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,76	21,80	21,38	21,59	21,08
H	Transportasi dan Pergudangan	6,28	6,40	5,02	5,06	7,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,44	5,31	5,36	5,67
J	Informasi dan Komunikasi	4,21	4,36	5,13	5,07	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,27	6,13	6,21	6,22	6,14
L	Real Estat	2,71	2,71	2,73	2,66	2,58
M,N	Jasa Perusahaan	0,42	0,44	0,43	0,42	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,58	4,47	4,49	4,17	3,93
P	Jasa Pendidikan	4,75	4,65	4,72	4,54	4,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,29	1,44	1,40	1,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,87	1,90	1,90	1,83	1,82
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2018 hingga 2022 cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 33,14 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 40,68 juta rupiah. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah, dan meningkat sebesar 5,25 persen menjadi sebesar 37,07 juta rupiah pada tahun 2021. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.089,25	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.599,93
- ADHK (Miliar Rp)	7.087,92	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	33,14	35,41	35,32	37,17	40,68
- ADHK (Juta Rp)	23,28	24,35	23,89	24,66	25,96
Pertumbuhan PDRB per Kapita					

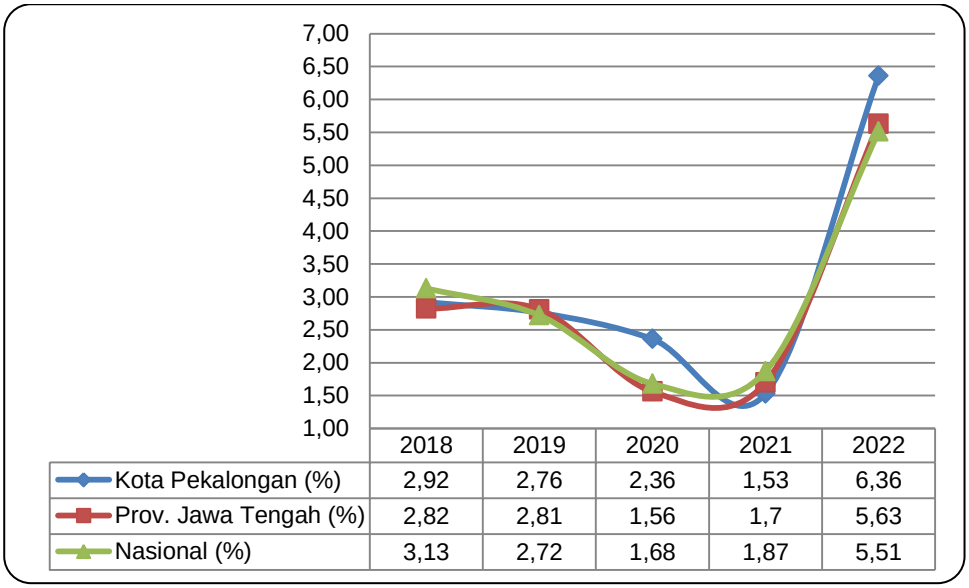
Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHB (persen)	7,86	6,86	-0,25	5,24	9,43
- ADHK (persen)	4,79	4,60	-1,88	3,20	5,27

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2023

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2018 – 2022, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 3.3 berikut.

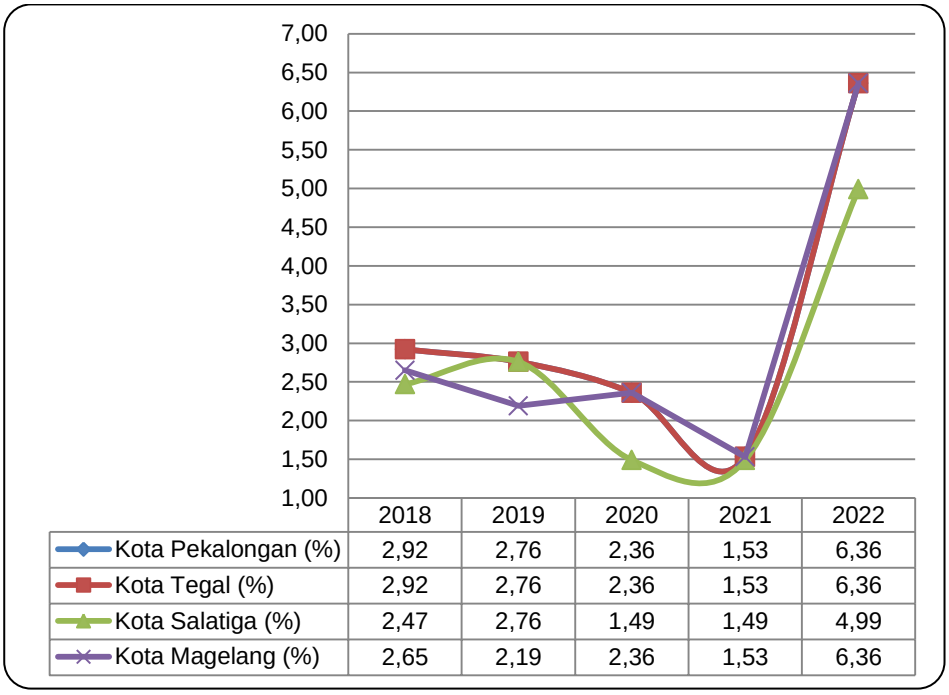


	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	2,92	2,76	2,36	1,53	6,36
Prov. Jawa Tengah (%)	2,82	2,81	1,56	1,7	5,63
Nasional (%)	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Sumber: www.bps.go.id, 2023

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	2,92	2,76	2,36	1,53	6,36
Kota Tegal (%)	2,92	2,76	2,36	1,53	6,36
Kota Salatiga (%)	2,47	2,76	1,49	1,49	4,99
Kota Magelang (%)	2,65	2,19	2,36	1,53	6,36

Gambar 3.4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2023

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun tahun 2018 sama dengan Kota Tegal, berada di urutan tertinggi yaitu 2,92%. Urutan selanjutnya yaitu Kota Magelang dengan laju inflasi sebesar 2,65%, dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 2,47%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%.

Kenaikan inflasi yang sangat signifikan pada tahun 2022 tersebut, bukan merupakan permasalahan Kota Pekalongan saja, tetapi merupakan permasalahan dunia, permasalahan nasional, maupun Provinsi Jawa Tengah. Kondisi laju inflasi menunjukkan tren meningkat tajam disebabkan karena sisi penawaran seiring dengan keanikan harga-harga komoditas dunia dan juga ada gangguan pasokan di domestik. Dapat disimpulkan bahwa gangguan rantai pasok hingga kenaikan harga komoditas global menyebabkan tren inflasi merangkak naik tajam.

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan pada tahun 2022 adalah kelompok Transportasi, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Makanan, Minuman dan Tembakau. Transportasi merupakan penyumbang inflasi terbesar karena mulai aktifnya pergerakan orang dan barang/jasa pasca pandemi Covid-19 sehingga memicu terjadinya inflasi. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya merupakan penyumbang inflasi terbesar kedua juga sangat dipengaruhi pasca Covid-19 yang menyebabkan sebagian masyarakat menganggap perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan bagian dari kebutuhan hidup sehingga memicu terjadinya inflasi. Makanan, Minuman dan Tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar ketiga karena secara umum terjadinya peningkatan inflasi disebabkan terganggunya rantai pasokan barang/jasa sebagai dampak permasalahan dunia. Di samping itu, Kota Pekalongan merupakan kawasan perkotaan, dimana pasokan bahan makanan didominasi pasokan dari luar daerah, sehingga jika terjadi gangguan pada rantai pasokan, maka akan berdampak terhadap terjadinya inflasi makanan, minuman dan

tembakau. Upaya yang dilakukan untuk menekan laju inflasi antara lain dengan melakukan pemantauan harga bahan pokok secara berkala dan dipublikasikan melalui SIPOKMAS (Sistem Informasi Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat), operasi pasar dan rapat koordinasi secara rutin oleh TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).

Mulai tahun 2020 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi, sehingga tabel inflasi menurut kelompok pengeluaran dijadikan dua, yaitu tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2022. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Umum	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,66	8,00
Makanan Jadi	3,05	1,60
Perumahan	3,47	0,40
Sandang	2,51	3,31
Kesehatan	0,54	4,75
Pendidikan	1,33	3,74
Transport	2,43	0,31
Perlengkapan	-	-
Infokom	-	-
Rekreasi	-	-
Restoran	-	-
Perawatan Pribadi	-	-

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah 2023

Tabel 3.4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2022

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89
Kesehatan	2,87	0,55	2,50
Transportasi	1,36	1,01	16,42
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64
Umum	2,32	1,53	6,31

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah 2023

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan tumbuh tinggi.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

1) Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan vaksinasi *COVID-19* untuk menekan penyebaran *COVID-19* guna meningkatkan kegiatan ekonomi di Kota Pekalongan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
2) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.
3) Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah *COVID-19*.
4) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, antara lain rencana pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD), pembangunan *fly over* dan penanganan banjir/rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.
5) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

a. Respon atas kebijakan Pusat yaitu penuntasan vaksinasi *COVID-19* bagi usia di atas 12 tahun dan percepatan vaksinasi *COVID-19* bagi usia dibawah 12 tahun dalam rangka menekan penyebaran *COVID-19* dan mengakhiri pandemi.
b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.
c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *COVID-19*, antara lain: (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
f. Percepatan pemulihan ekonomi akan dihadapkan pada kondisi dunia usaha yang memerlukan daya ungkit lebih untuk kembali normal pasca pandemi *COVID-19*.
g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan

perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum sepenuhnya stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada.

h. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
i. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan batik yang masih berupa bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan sendiri belum memiliki *brand* produk yang original dan kuat di pasaran dan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
j. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan melalui optimalisasi technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik.
k. Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

a. Upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* diarahkan untuk mengoptimalkan industri, investasi pariwisata, dan ekspor melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program *CSR*) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut:

a. Pertumbuhuan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Upaya peningkatan ekonomi terus didorong dengan menggerakkan berbagai sektor usaha dan melibatkan berbagai pihak termasuk investor.

Di tahun 2022, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen.

Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target RKPD 2023	Target RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,59	5,76	3,70 - 4,20	5,4 – 5,8	4,55

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2022 bergerak naik dari 75,40 di tahun 2021, menjadi 75,90 di tahun 2022. Capaian di tahun 2022 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 75,60. Dengan upaya optimalisasi vaksinasi *COVID-19* dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2021	Relisasi 2022	Target RKPD 2023	Target RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,40	75,90	75,60	76,70	75,88

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 57,87 di tahun 2021. Angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan yaitu 58,43. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2021	Realisasi 2022	Target RPKD 2023	Target RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,87	61,37	59,14	59,59	60,28

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

d. Tingkat Kemiskinan

Pandemi *COVID-19* yang terjadi sejak tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat pembatasan kegiatan dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri. Tingkat kemiskinan tahun 2021 mencapai 7,59 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,94 persen. Begitu juga di tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai 7,00 persen, masih di atas angka yang

diharapkan yaitu 6,71 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2021	Realisasi 2022	Target RPKD 2023	Target RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Tingkat kemiskinan (persen)	7,59	7,00	6,50 – 6,45	6,3 - 5,93	6,09

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi di Kota Pekalongan, penyerapan tenaga kerja juga turut membaik. Hal ini terlihat dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 6,89 persen di tahun 2021 menjadi 4,98 persen di tahun 2022 atau menurun 1,91 persen. Capaian ini juga telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 6,66 persen di tahun 2022. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target RPKD 2023	Target RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,89	4,98	6,48 – 6,10	4,5 – 4,7	6,15

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3±1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi pada tahun 2022 berada diatas range tersebut yaitu 6,36 persen, turun 4,83 persen dari capaian tahun 2021 yaitu 1,53 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Target RKPD 2022	Target RPKD 2023	Target RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Inflasi (persen)	6,36	3±1	3±1	3±1	3±1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Resposibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk belanja daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Belanja operasi sebagaimana dimaksud, dirinci atas jenis: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja bunga; d) belanja subsidi; e) belanja hibah; dan f) belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal meliputi: a) belanja modal tanah; b) belanja modal peralatan dan mesin; c) belanja modal bangunan dan Gedung; d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; e) belanja modal aset tetap lainnya; dan f) belanja modal aset lainnya. Untuk belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Dan untuk belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mengacu pada pagu indikatif tahun 2024 pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Tahun 2024 merupakan tahun perdana implementasi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diimplementasikannya dua regulasi tersebut Pemerintah Kota Pekalongan perlu melakukan beberapa persiapan yang antara lain:

1. Penyiapan Peraturan Daerah PDRD;
2. Penyiapan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemungutan;
3. Persiapan teknis pemungutan, termasuk system dan teknologi informasi;
4. Sosialisasi pada masyarakat dan pelaku usaha.

Selain persiapan implementasi tersebut dan konsekuensi atas diimplementasikannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan juga perlu menentukan arah kebijakan pendapatan daerahnya.

Kebijakan umum TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD. Pengalokasian TKD juga mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Sedangkan kebijakan pendapatan daerah Kota Pekalongan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1. Implementasi dan Sosialisasi Perda dan Perwal tindaklanjut atas Undang-Undang No 1 Tahun 2022 HKPD.
2. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025.
3. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya).
4. Pemberian Stimulus PBB.
5. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD.
6. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran)
7. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
8. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah.
9. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
10. Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah.
11. Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru.

12. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
13. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
14. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito.
15. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.
16. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
17. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID.
18. Menyusun Rencana Aksi Peningkatan Dana Insentif.
19. Peningkatan kordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), proyeksi kenaikan PAD diasumsikan sebagai berikut:

a. Perkiraan kenaikan potensi pajak dan retribusi dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
b. Kemungkinan realisasi penagihan piutang;
c. Perkiraan investasi di Kota Pekalongan tahun 2024 berupa pembangunan beberapa hotel dan restoran baru.
d. Mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 2 tahun terakhir;
e. Perkiraan suku bunga BI (Bank Indonesia);
f. Potensi aset yang disewakan;
g. Estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
h. Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.

Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan dasar estimasi perolehan laba dari BUMD di tahun 2024.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2020-2025 disajikan dalam Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2025

URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2021	P-APBD 2022	APBD 2023	RKPD 2024	Proyeksi 2025
PENDAPATAN	**953.155.394.615**	**966.372.557.051**	984.981.114.000	**967.818.978.000**	**971.139.215.000**	**985.829.532.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**229.867.935.361**	**252.037.004.472**	255.833.693.000	**240.805.592.000**	**249.510.605.000**	**257.346.578.000**
Pajak Daerah	76.255.221.742	87.382.426.252	94.600.000.000	99.450.000.000	105.000.000.000	104.760.000.000
Retribusi Daerah	14.870.124.919	14.748.214.704	21.394.190.000	21.674.202.000	22.274.360.000	19.854.558.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.821.083.050	5.805.514.149	6.434.053.000	6.473.378.000	6.365.300.000	7.179.472.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	132.921.505.650	144.100.849.367	133.405.450.000	113.208.012.000	115.870.945.000	125.552.548.000
PENDAPATAN TRANSFER	**700.838.013.854**	**686.765.223.608**	**729.147.421.000**	**724.763.386.000**	**719.378.610.000**	**706.104.314.000**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**625.666.101.409**	**607.835.271.117**	**621.244.069.000**	**652.383.034.000**	**637.314.059.000**	**616.144.097.000**
Bagi Hasil Pajak	27.182.869.066	34.377.457.237	26.567.504.000	28.174.327.000	28.174.327.000	23.583.183.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.780.895.008	0	2.593.549.000	1.669.797.000	1.669.797.000	1.504.841.000
Dana Alokasi Umum	433.354.907.000	426.399.738.000	424.436.748.000	447.688.903.000	447.688.903.000	426.399.738.000
Dana Alokasi Khusus	104.991.517.335	125.528.550.880	162.950.008.000	164.905.768.000	149.836.793.000	134.656.335.000
Dana Insentif Daerah	58.355.913.000	21.529.525.000	4.696.260.000	9.944.239.000	9.944.239.000	30.000.000.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**75.171.912.445**	**78.929.952.491**	**107.903.352.000**	**72.380.352.000**	**82.064.551.000**	**89.960.217.000**
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	63.377.912.445	76.876.982.891	72.380.352.000	72.380.352.000	82.064.551.000	78.202.217.000
Bantuan Keuangan Provinsi	11.794.000.000	2.052.969.600	35.523.000.000	0	0	11.758.000.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**22.449.445.400**	**27.570.328.971**	**0**	**2.250.000.000**	**2.250.000.000**	**22.378.640.000**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.449.445.400	24.852.062.887	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	2.718.266.084	0	2.250.000.000	2.250.000.000	22.378.640.000

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Pekalongan (diolah), 2023

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2024 mengacu pada pagu indikatif tahun 2024 pada RPJMD Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi serta percepatan pencapaian target pembangunan, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sinergitas lintas sektor, Pusat dan Daerah menuju konvergensi dalam intervensi sasaran dan program prioritas bidang kesehatan.
2. Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha, perluasan kesempatan bekerja dan berusaha, serta penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
3. Peningkatan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan, peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter, peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak.
4. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman, serta mendorong peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat.
5. Percepatan pembangunan sistem pengendali banjir dan rob yang mengedepankan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta upaya untuk menekan pencemaran guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
6. Peningkatan kolaborasi antara seni budaya, pariwisata dan potensi unggulan daerah dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif.
7. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelibatan berbagai pihak dalam mewujudkan kondusivitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN serta mengoptimalkan sistem pengendalian intern pemerintah.

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2020-2025 disajikan dalam Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2025

URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2021	P-APBD 2022	APBD 2023	RKPD 2024	Proyeksi 2025
BELANJA	**863.280.127.422**	**962.091.792.004**	**98.875.257.000**	**1.008.395.478.000**	**1.008.539.215.000**	**1.071.183.855.000**
BELANJA OPERASI	**678.982.771.474**	**792.174.652.718**	**825.236.232.000**	**853.904.211.000**	**889.781.384.900**	
Belanja Pegawai	312.861.230.596	391.695.115.554	410.055.530.000	402.374.077.000	435.505.100.360	
Belanja Barang dan Jasa	327.664.407.878	367.573.741.625	384.028.070.000	419.190.116.000	387.645.670.540	
Belanja Hibah	36.250.151.000	32.149.226.539	28.381.802.000	29.205.077.000	64.949.926.000	
Belanja Bantuan Sosial	2.206.982.000	756.569.000	2.770.830.000	3.134.941.000	1.680.688.000	
BELANJA MODAL	**126.926.093.953**	160.513.725.170	167.702.025.000	**150.661.267.000**	**114.781.230.100**	
Belanja Modal Tanah	13.144.232.065	11.302.754.180	951.500.000	3.205.785.000	80.000.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.045.998.699	37.536.785.604	45.801.097.000	40.259.231.000	23.101.164.100	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.911.226.174	48.754.919.045	35.564.935.000	57.851.865.000	42.313.330.000	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.106.236.575	59.561.969.736	78.207.441.000	46.413.735.000	49.161.776.000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	644.610.440	3.357.296.605	7.177.052.000	2.930.651.000	90.600.000	
Belanja Aset Lainnya	73.790.000,00	0	0	0	34.360.000	
BELANJA TAK TERDUGA	**57.371.261.995**	**9.403.414.116**	**5.937.000.000**	**3.780.000.000**	**3.976.600.000**	
Belanja Tak Terduga	57.371.261.995	9.403.414.116	5.937.000.000	3.780.000.000	3.976.600.000	
BELANJA TRANSFER	0	0	0	**50.000.000**	**0**	
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	50.000.000	0	

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Pekalongan, 2023

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 di Kota Pekalongan antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian.

Rincian pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2025

URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2021	P-APBD 2022	APBD 2023	RKPD 2024	Proyeksi 2025
PEMBIAYAAN	**104.227.367.651**	**111.045.906.136**	**54.000.000.000**	**40.576.500.000**	**37.400.000.000**	**85.354.323.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**108.747.997.651**	**112.545.906.136**	**48.000.000.000**	**51.826.500.000**	**42.650.000.000**	**91.354.323.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	95.101.710.312	112.542.301.590	48.000.000.000	51.826.500.000	28.000.000.000	91.354.323.000
Pencairan Dana Cadangan	12.704.351.488	0	0	0	14.650.000.000	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	941.935.851	3.604.546	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.520.630.000**	**1.500.000.000**	**6.000.000.000**	**11.250.000.000**	**5.250.000.000**	**6.000.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	0	1.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	0	0
Penyertaan Modal Daerah	4.518.000.000	500.000.000	3.000.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000	6.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	2.630.000	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Pekalongan, 2023

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan ***Tahta Untuk Rakyat*** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

4.1.1 Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *brand image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk mengekploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang

ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan terkurangi secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi *Transit Oriented Development* (TOD). Dengan selesainya konstruksi Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana di akhir tahun 2021, Kota Pekalongan mempunyai wahana wisata baru yang menjadi magnet bagi wisatawan. Hal ini menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota

Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya – upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi kedelapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan ruh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, makna sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka

Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJPD yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlaqul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang

sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu "***Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius***", uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian ibu, bayi dan balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan active dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya pengarusutamaan hak anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayan Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadahi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan luas genangan banjir dan rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan

penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya kualitas lahan, dan terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, dengan sasaran meliputi: optimalnya layanan air minum, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi perkotaan.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya’banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi sedekah laut (nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujud melalui upaya mendorong peningkatan intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

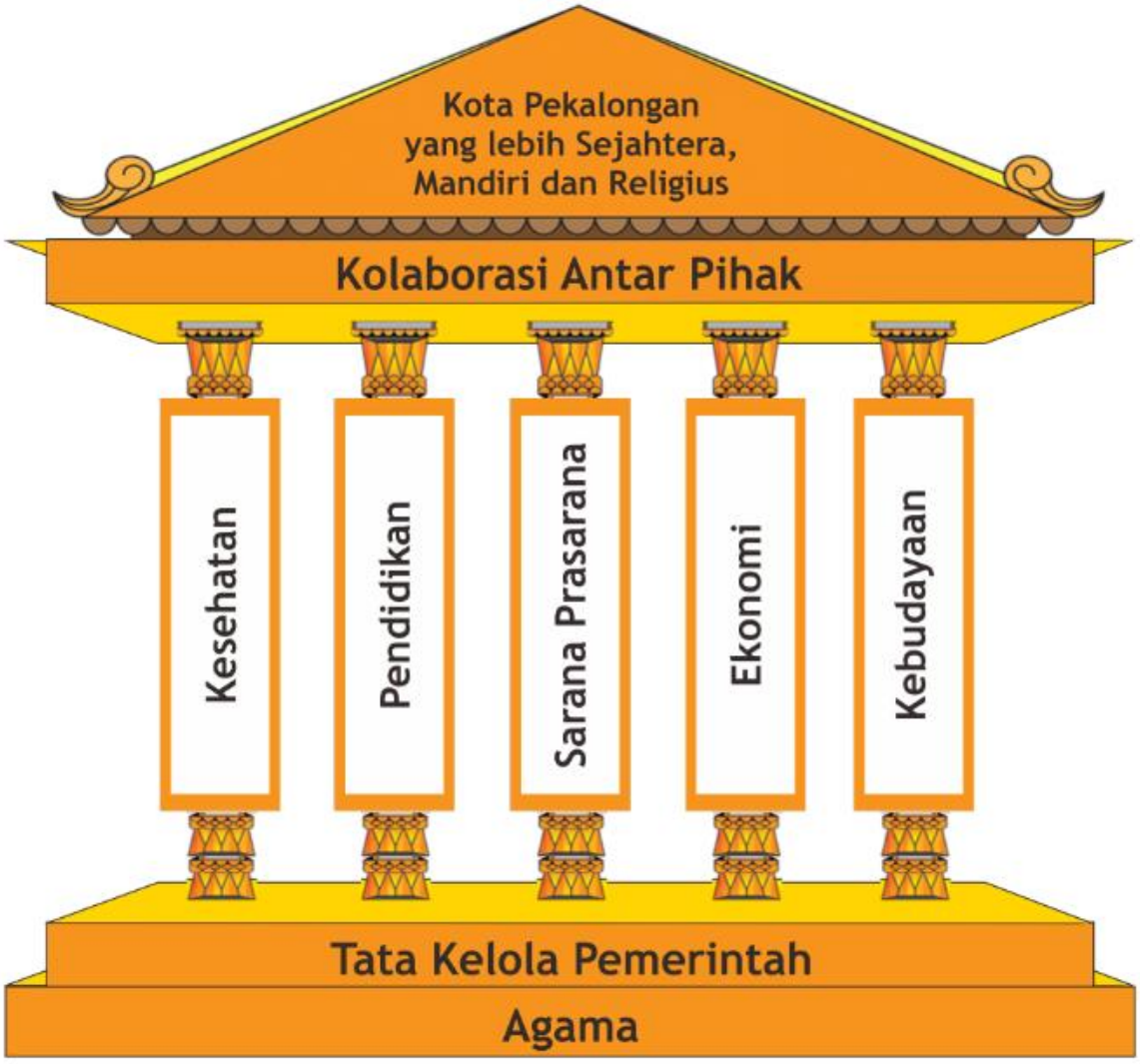
Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan

kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2022

4.1.3 Tujuan Dan Sasaran

4.1.3.1 Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya indeks keluarga sehat
b. Meningkatnya penanganan kemiskinan

4.1.3.2 Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

TUJUAN

a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif

SASARAN

a. Meningkatnya akses pendidikan
b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
c. Optimalnya pengarusutamaan gender
d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

4.1.3.3 Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

TUJUAN

a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

SASARAN

a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

4.1.3.4 Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TUJUAN

a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

SASARAN

a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
b. Menurunnya tingkat pencemaran air
c. Optimalnya kualitas lahan
d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang
e. Optimalnya layanan air minum
f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

4.1.3.5 Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN

a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

4.1.3.6 Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

TUJUAN

a. Melestarikan Seni Budaya
b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

SASARAN

a. Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan
b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

4.1.3.7 Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

TUJUAN

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

SASARAN

a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)
b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)
c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026
Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat												
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
			Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan			persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan												
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
		2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	Tingkat Pengangguran Terbuka			persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman												
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen			persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00
		1. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan												
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob			persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
		3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar			persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04
		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
			Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal												
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita			Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,22	35,47 - 35,51	35,97 - 36,21	36,56 - 36,92	37,16 - 37,82	39,21	40,65	40,65
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah												
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial			kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government												
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69
		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
		3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
			Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja '*impac*t' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2026. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat					
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan
				Skor PPH konsumsi	Pangan
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan					
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Pendidikan
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
		Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman					
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase jumlah rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan					
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Perhubungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
		perkotaan	Persentase keterhubungan jalan	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UKM
				Nilai produksi tanaman pangan, holtikultura dan peternakan	Pertanian
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK *Outcome*)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah					
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government					
Meningkatkan Tata Kelola	Indeks Reformasi	Optimalnya Implementasi	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Pemerintahan yang efektif dan efisien	Birokrasi	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
				Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2023

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	
Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualtas jalan lingkungan
Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan	
	Terwujudnya rumusan dan pelasanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
	optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	
Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan *event* budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan toko masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2024 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2024 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci, 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0-1 persen

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 14 persen;
   b. Insidensi tuberkulosis sebesar 190 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 kab/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kab/kota; dan
   e. Nilai rata-rata PISA, yaitu: Membaca sebesar 396; Matematika sebesar 388; Sains sebesar 402.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP reformasi sistem kesehatan nasional;
   - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0); dan
   - MP percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 5,4-5,8 persen; dan
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 19,5-20,6 persen.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP kawasan industri prioritas dan smelter;
   - MP pengelolaan terpadu UMKM;
   - MP 10 destinasi pariwisata prioritas;
   - MP *food estate* (kawasan sentra produksi pangan); dan
   - Transformasi Digital.
4. Penguatan daya saing usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 6,2-7 persen; dan
   b. Nilai devisa pariwisata sebesar USD 7,38-13,0 miliar.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 27,27 persen;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional sebesar 17 persen.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3;
   - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional sebesar 95 persen, provinsi sebesar 75 persen, dan kabupaten-kota sebesar 65 persen;

b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman sebesar 92,76 persen akses layak dan 15 persen akses aman;
c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan sebesar 25,53 persen;
d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 86 persen akses layak termasuk 12 persen akses aman;
e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif) sebanyak 11 lokasi; dan
f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik sebesar 1.300 kwh/kapita.

7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden sebesar 100 persen;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator sebesar 100 persen; dan
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM sebesar 100 persen.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP Ibu Kota Nusantara; dan
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian yaitu Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal sebanyak 553 satker, dengan dukungan proyek-proyek prioritas.

Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,0-5,7 persen;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02;
6. Perununan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 27,27 persen;
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110; dan
8. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

   b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery* industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

   a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
      2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
      3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
      4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
      5) Pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
   b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
      2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
      3) Penyediaan air untuk pertanian;
      4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
      5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
      6) Pengembangan waduk multiguna.

c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
   2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
   3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
   4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
   5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
   2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
   3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
   4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
   5) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
   2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
   3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
   4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
   2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
   3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
   4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
   5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
   6) Pengembangan industri halal.
g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
   2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;

3) Pengelolaan Impor;
4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
7) Peningkatan efektivitas *Prefrential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
d) Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
e) Meningkatkan Indeks Pembanguanan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f) Pengentasan kemiskinan; dan
g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
   1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
   2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
   3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
   4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Sistem jaminan sosial nasional;
   2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
   3) Kesejahteraan Sosial.
c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
   2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
   3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
   4) Penguatan Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat;
   5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, mencakup:
      - Penguatan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
      - Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan;
      - Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
      - Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan;
      - Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan.
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
   2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
   3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
   5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
   2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
   3) Kualitas Pemuda.
f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
   2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
   3) Reforma Agraria; dan

4) Perhutanan Sosial.

g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
   2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
   3) Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Penciptaan Inovasi; dan
   4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
d) meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
   2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
   3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
   4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
   5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
   6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
   2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
   3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
   4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan

5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Budaya Literasi;
2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
3) Pengembangan budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Konektivitas Jalan;
2) Konektivitas Kereta Api;
3) Konektivitas Laut;
4) Konektivitas Udara; dan

5) Konektivitas Darat.

c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Transportasi Perkotaan; dan
   2) Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perkotaan.

d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
   2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
   3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penuntasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
   2) Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
   3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

   Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan Nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

   a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
   c) Pembangunan Rendah Karbon.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

   a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
      2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
      3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
      4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
   b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Penanggulangan Bencana; dan
      2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
   c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
      2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
      3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas;
b) Meningkatkan pengembangan SDM aparatur sebagai pelaksana kebijakan public, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa;
c) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
d) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
e) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
f) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
    2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
    3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Penguatan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, dan;
    2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
    2) Transformasi pelayanan publik;
    3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
    4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
    2) Penguatan Keamanan Laut; dan
    3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 diselaraskan dengan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Namun demikian, dikarenakan periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah berakhir pada tahun 2023, maka prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema **"Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas"**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
    a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memberbesar

rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:

1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
3) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
4) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
5) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
6) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;

b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:

1) Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
3) Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas Puskesos;
4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.

c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.

d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;

e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:

   a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas *stakeholder*, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;

   b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

   c. Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;

   d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;

   e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;

   f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;

   g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;

   h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelengaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kepen-dudukan dan pencatatan sipil.

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, dengan fokus pada:

    a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

    b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;

    c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;

    d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

    a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT;

    b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga non-pemerintah.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

1. PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,06-8,96 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,364;
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;
13. Persentase Penurunan Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 ditujukan untuk "***Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian***", dengan arah kebijakan meliputi:

1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program, dengan fokus pada:
    a. Mendorong upaya konvergensi dan sinergitas lintas sektor yang disertai peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, percepatan penurunan angka stunting serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
    b. Mendorong peran berbagai pihak/stakeholder dalam meningkatkan percepatan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC);
    c. Penggerakan masyarakat melalui posyandu dan pemberdayaan Germas di berbagai tatanan masyarakat;
    d. Peningkatan efektivitas jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan, dengan fokus pada perluasan kesempatan pelatihan keterampilan bagi warga miskin dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan partisipasi pendidikan guna menurunkan angka ATS (anak tidak sekolah), disertai upaya perluasan akses, peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan secara bertahap;
    b. Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.

4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, dengan fokus pada peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan tenaga kerja dan penghapusan pekerja anak.
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan guna meningkatkan kesetaraan gender;
    b. Peningkatan dan optimalisasi kelurahan layak anak serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak, difabel dan lansia.
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:
    a. Penguatan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan peran masyarakat dalam rangka percepatan penanganan banjir/rob;
    b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang menghasilkan limbah, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup;
    c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:
    a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
    b. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
    c. Lanjutan pengembangan kawasan Pekalongan Baru dan mendorong penambahan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif, dengan fokus pada pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dengan sektor industri, jasa, perdagangan dan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui:
    a. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata disertai dengan promosi, penguatan pelaku industri pariwisata serta kemudahan akses;
    b. Pengembangan destinasi wisata baru dengan menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka penguatan ekonomi lokal.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, dengan fokus pada pengembangkan kesenian dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan masyarakat dalam rangka memperkaya substansi penyelenggaraan event budaya.
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN, dengan fokus pada:

a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan domain SPBE;
b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;
c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;
d. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta implementasi roadmap merit system;
e. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2024 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 5,8 persen;
b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,3 - 5,93 persen;
d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,70;
e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5 – 4,7 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2024. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2024	
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan	12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN
Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah			
Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Belum opimalnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan			

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2024	
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)	Peningkatan Derajat Kesehatan	1	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan			
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)			
Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal	10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program, dengan fokus pada:					
a. Mendorong upaya konvergensi dan sinergitas lintas sektor yang disertai peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, percepatan penurunan angka stunting serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; b. Mendorong peran berbagai pihak/stakeholder dalam meningkatkan percepatan pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*; c. Penggerakan masyarakat melalui posyandu dan pemberdayaan Germas di berbagai tatanan masyarakat; d. Peningkatan efektivitas jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat.	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,61 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,60 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 104,14 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,35	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan, dengan fokus pada:					
Perluasan kesempatan pelatihan keterampilan bagi warga miskin dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2,50%	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
				Program Pemberdayaan Sosial	
				Program Rehabilitasi Sosial	
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan, dengan fokus pada:					
a. Peningkatan partisipasi pendidikan guna menurunkan angka ATS (anak tidak sekolah), disertai upaya perluasan akses, peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan secara bertahap; b. Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.	Rata-Rata Lama Sekolah	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,59 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, dengan fokus pada:					
Peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan tenaga kerja dan penghapusan pekerja anak.	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,81%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
				Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Program Hubungan Industrial	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak, dengan fokus pada:					
a. Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan guna meningkatkan kesetaraan gender; b. Peningkatan dan optimalisasi kelurahan layak anak serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak, difabel dan lansia.	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,59	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
				Program Perlindungan Perempuan	
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
				Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada:					
Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	96,24%	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
				Program Kawasan Permukiman	
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:					
a. Penguatan sinergitas dengan pemerintah pusat, provinsi dan peran masyarakat dalam rangka percepatan penanganan banjir/rob; b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	909,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	Menurunnya tingkat	2. Indeks Kualitas Air	35,37	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
menghasilkan limbah, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup; c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.	pencemaran air			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	Optimalnya kualitas lahan	3. Indeks Kualitas Lahan	23,60	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
				Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
				Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:					
a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum; b. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan	Optimalnya layanan air minum	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	2. Persentase pelayanan sampah	71,12%	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
persampahan kepada masyarakat; c. Lanjutan pengembangan kawasan Pekalongan Baru dan mendorong penambahan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	3. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		4. Persentase keterhubungan jalan	100%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif, dengan fokus pada:					
Pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dengan sektor industri, jasa, perdagangan dan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui: a. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata disertai dengan promosi, penguatan pelaku industri pariwisata serta kemudahan akses; b. Pengembangan destinasi wisata baru dengan menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka penguatan ekonomi lokal.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	5,4 - 5,8 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
				Program Pengembangan Ekspor	
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				Program Pengembangan UMKM	
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
				Program Pemasaran Pariwisata	
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, dengan fokus pada:					
Pengembangkan kesenian dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan masyarakat dalam rangka memperkaya substansi penyelenggaraan event budaya.	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan *Event* Budaya	93,33%	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Program Pembinaan Sejarah	
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024					
	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN, dengan fokus pada:					
a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan domain SPBE; b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	1. Indeks SPBE	3,05	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; d. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta implementasi roadmap merit system; e. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	2. IKM Kota	83,79	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
				Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
				Program Pencatatan Sipil	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		3. Nilai KIP Tingkat Kota	97,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	4. Nilai SAKIP Kota	75,07	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
				Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	6. Indeks Merit System	250,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7. Maturitas SPIP	3,60	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

4.2.4 Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan nasional dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.3. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas nasional sebagaimana disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 dokumen	77.882.000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	46.930.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500,00 dokumen	846.700.000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	6,82 Miliar Rupiah	412.043.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	101.588.000	DPMPTSP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	20,75 persen	455.853.000	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	10.221.000	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	94.380.000	Dinperinaker

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	8.121.372.000	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	92,00 persen	119.405.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	135.017.000	Dindagkop UKM
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	308.296.000	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	676.705.000	Dindagkop UKM
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,17 persen	16.800.000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	108.219.000	Dindagkop UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen	631.070.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen	687.998.000	Dindagkop UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen	2.696.675.000	DKP
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen		

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,00 persen	294.382.000	DKP
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha	458.298.000	DKP
			Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 persen	3.909.090.000	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	36,98 persen	675.000.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	278.262.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	822.000.000	Dinparbudpora
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,73 Miliar Rupiah	284.730.000	Dinperpa
			Nilai produksi peternakan pertahun	195,75 Miliar Rupiah		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen	313.518.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	434.053.000	Dinperpa
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen	48.290.000	Dinperpa

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	75,00 persen	30.968.000	Dinperpa
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	145.500.000	Dinperpa
				Sub Total	**23.241.245.000**	
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	927.783.000	DPU-PR
	8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	24 persen	10.555.706.000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	860.000.000	DPU-PR
				Sub Total	**12.343.489.000**	
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	85,00 persen	72.075.128.000	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 persen		Dinas Kesehatan
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100,00 persen		Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	94,50 persen	1.036.287.000	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	96,00 persen	629.013.000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	98,00 persen		Dinas Kesehatan
			Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 persen		Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	93,00 persen	968.213.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	383.342.000	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen	30.500.000	Dinperpa
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80 persen	54.500.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	60.095.000	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7,60 persen	5.610.387.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	14,00 persen	165.162.000	Dinsos P2KB
	2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	868.351.000	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	343.926.000	Dinsos P2KB

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	dan kemudahan akses permodalan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen	473.774.000	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.670.466.000	Dinsos P2KB
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 persen	1.502.324.000	Dinsos P2KB
	3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	89,50 persen	63.780.887.000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen	16.012.838.000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,25 indeks	830.911.000	Dinarpus
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen	272.429.000	Dinas Pendidikan
	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46 persen	3.312.225.000	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	693.181.000	Dinperinaker

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	47,51 persen	450.369.000	Dinperinaker
	5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 persen	264.850.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 persen	94.012.000	DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	40,74 persen	224.753.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	146.347.000	DPMPPA
				Sub Total	**171.954.270.000**	
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	1.567.098.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	202.540.000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 persen	40.000.000	Dinparbudpora
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 persen	27.500.000	Dinparbudpora
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,71 persen	1.389.007.000	Dinparbudpora
				Sub Total	**3.226.145.000**	
5. Memperkuat Infrastruktur untuk	6. Pelaksanaan pencegahan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68 persen	1.603.761.000	Dinperkim

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 Hektar	16.614.300.000	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1973,41 hektar	5.478.688.000	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	14,51 persen	1.410.521.000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50,00 persen	9.086.000	Dinperkim
	8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 persen	428.000.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 ratio	5.698.695.000	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	95,00 persen		
			Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,75 persen		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	21.595.513.000	DPU-PR
				Sub Total	**52.838.564.000**	
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 persen	11.757.760.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	3.689.840.000	DPU-PR

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45.02 persen	1.660.793.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	2.271.000	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,929 persen	4.509.357.000	DLH
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	468.032.000	Dinperkim
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	1.097.910.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	102.900.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen	555.200.000	DPU-PR
				Sub Total	**23.844.063.000**	
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen	1.646.035.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	17.235.294.000	Kesbangpol
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen	301.772.000	Kesbangpol

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen	209.694.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen	105.700.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	66,00 persen	6.416.736.000	Satpol P3KP
	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 indeks	2.709.635.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 persen	115.500.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	2,80 persen	152.680.000	Dinkominfo
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen	1.721.346.000	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	53,33 persen	319.504.000	Dinarpus
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	162.176.000	Dinarpus
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1 regulasi	10.000.000	Dinarpus

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 persen	354.829.000	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	328.970.000	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	95.088.000	Dindukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	18.120.390.000	Sekretariat DPRD
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100,00 persen		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 persen	910.520.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	7.880.369.000	Dinparbudpora
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 persen	610.284.000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	62,96 persen	48.520.000	DPMPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,54 persen	784.425.000	DPMPPA
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	40.500.000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	283.393.000	DLH

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen	63.750.000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	14.625.000	DLH
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen	1.046.631.000	Satpol P3KP
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	77.259.000	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	13.577.791.000	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara,Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	1.080.309.000	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	22.350.000	Kecamatan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	5.232.036.000	Dinkominfo
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen	734.855.000	Bappeda
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100,00 persen		
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74,00		

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100,00 persen	581.954.000	Bappeda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100,00 persen	586.389.000	Bappeda
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100,00 persen		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	606.024.300.000	Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen		
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen	18.558.300.000	Setda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen	968.171.000	Setda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,66 persen	5.710.413.000	BPKAD

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100,00 persen	1.120.650.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 persen	1.457.719.000	BPKAD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90,00 persen	1.317.075.000	BKPSDM
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 persen		
			Persentase PNS berkembang karier	50,00 persen		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen	1.969.650.000	BKPSDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	251.061.000	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	132.791.000	Inspektorat
				Sub Total	**721.091.439.000**	
				GRAND TOTAL	**1.008.539.215.000**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

4.2.5 Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.2. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	868.351.000	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	343.926.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen	473.774.000	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.670.466.000	Dinsos P2KB
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 persen	1.502.324.000	Dinsos P2KB
	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46 persen	3.312.225.000	Dinperinaker

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	pekerja anak					
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	693.181.000	Dinperinaker
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	47,51 persen	450.369.000	Dinperinaker
	8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	24 persen	10.555.706.000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	860.000.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 persen	428.000.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 ratio	5.698.695.000	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	95,00 persen		
			Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,75 persen		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	21.595.513.000	DPU-PR

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 dokumen	77.882.000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	46.930.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500,00 dokumen	846.700.000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	6,82 Miliar Rupiah	412.043.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	101.588.000	DPMPTSP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	20,75 persen	455.853.000	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	10.221.000	Dinperinaker

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	94.380.000	Dinperinaker
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	8.121.372.000	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	92,00 persen	119.405.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	135.017.000	Dindagkop UKM
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	308.296.000	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	676.705.000	Dindagkop UKM
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,17 persen	16.800.000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	108.219.000	Dindagkop UKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk	58,77 persen	631.070.000	Dindagkop UKM

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
			koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota			
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen	687.998.000	Dindagkop UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen	2.696.675.000	DKP
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,00 persen	294.382.000	DKP
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha	458.298.000	DKP
			Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 persen	3.909.090.000	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	36,98 persen	675.000.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	278.262.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	822.000.000	Dinparbudpora

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,73 Miliar Rupiah	284.730.000	Dinperpa
			Nilai produksi peternakan pertahun	195,75 Miliar Rupiah		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen	313.518.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	434.053.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen	48.290.000	Dinperpa
		Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	75,00 persen	30.968.000	Dinperpa
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	145.500.000	Dinperpa
				Sub Total	**71.693.775.000**	
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan,	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	85,00 persen	72.075.128.000	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 persen		Dinas Kesehatan
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang	100,00 persen		Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	termasuk integrasi lintas program		terakreditasi (IKK Outcome)			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	94,50 persen	1.036.287.000	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	96,00 persen	629.013.000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	98,00 persen		Dinas Kesehatan
			Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 persen		Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	93,00 persen	968.213.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	383.342.000	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen	30.500.000	Dinperpa
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80 persen	54.500.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	60.095.000	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7,60 persen	5.610.387.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan	Unmeet need KB	14,00 persen	165.162.000	Dinsos P2KB

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
	3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	89,50 persen	63.780.887.000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen	16.012.838.000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,25 indeks	830.911.000	Dinarpus
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen	272.429.000	Dinas Pendidikan
	5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 persen	264.850.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 persen	94.012.000	DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	40,74 persen	224.753.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	146.347.000	DPMPPA
	10. Peningkatan	Program Pengembangan	Persentase Event kesenian dan	100 persen	1.567.098.000	Dinparbudpora

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Kebudayaan	kebudayaan yang disiapkan			
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	202.540.000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 persen	40.000.000	Dinparbudpora
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 persen	27.500.000	Dinparbudpora
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,71 persen	1.389.007.000	Dinparbudpora
				Sub Total	**165.865.799.000**	
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	927.783.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68 persen	1.603.761.000	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 Hektar	16.614.300.000	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1973,41 hektar	5.478.688.000	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	14,51 persen	1.410.521.000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50,00 persen	9.086.000	Dinperkim

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 persen	11.757.760.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	3.689.840.000	DPU-PR
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45.02 persen	1.660.793.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	2.271.000	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,929 persen	4.509.357.000	DLH
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	468.032.000	Dinperkim
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	1.097.910.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	102.900.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen	555.200.000	DPU-PR
				Sub Total	**49.888.202.000**	
4. Perbaikan tata kelola	11. Optimalisasi peran serta stakeholder	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan	100,00 persen	1.646.035.000	Kesbangpol

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Karakter Kebangsaan	LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan			
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	17.235.294.000	Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen	301.772.000	Kesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen	209.694.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen	105.700.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	66,00 persen	6.416.736.000	Satpol P3KP
	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 indeks	2.709.635.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 persen	115.500.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan	Persentase sistem elektronik	2,80 persen	152.680.000	Dinkominfo

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Persandian Untuk Pengamanan Informasi	yang telah dilakukan pengujian kerentanan			
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen	1.721.346.000	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	53,33 persen	319.504.000	Dinarpus
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	162.176.000	Dinarpus
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1 regulasi	10.000.000	Dinarpus
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 persen	354.829.000	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	328.970.000	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	95.088.000	Dindukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	18.120.390.000	Sekretariat DPRD

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Fungsi DPRD	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100,00 persen		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 persen	910.520.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	7.880.369.000	Dinparbudpora
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 persen	610.284.000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	62,96 persen	48.520.000	DPMPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,54 persen	784.425.000	DPMPPA
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	40.500.000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	283.393.000	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen	63.750.000	DLH

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	14.625.000	DLH
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen	1.046.631.000	Satpol P3KP
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	77.259.000	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	13.577.791.000	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara,Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	1.080.309.000	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	22.350.000	Kecamatan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	5.232.036.000	Dinkominfo
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen	734.855.000	Bappeda
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100,00 persen		

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74,00		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100,00 persen	581.954.000	Bappeda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100,00 persen	586.389.000	Bappeda
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100,00 persen		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	606.024.300.000	Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen		
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen	18.558.300.000	Setda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan	100,00 persen	968.171.000	Setda

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
			yang dikoordinasikan			
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,66 persen	5.710.413.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100,00 persen	1.120.650.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 persen	1.457.719.000	BPKAD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90,00 persen	1.317.075.000	BKPSDM
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 persen		
			Persentase PNS berkembang karier	50,00 persen		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen	1.969.650.000	BKPSDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	251.061.000	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	132.791.000	Inspektorat
				Sub Total	**721.091.439.000**	
				GRAND TOTAL	**1.008.539.215.000**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Keterkaitan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pekalongan juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung dan Kawasan Bregasmalang, dimana terdapat 6 Program/Proyek di Kota Pekalongan yaitu:

a. Pengendalian Banjir Sistem S. Loji/ Pekalongan/Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
b. Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
c. Pengendalian Banjir dan Rob, Kota Pekalongan dan Kab. Batang;
d. Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
e. Pengembangan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan, Kota Pekalongan;
f. Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak.

4.2.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanan reses, selanjutnya ditelaah dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam aspek politis. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pekalongan untuk RKPD Tahun 2024, yaitu:

1. Bidang Pendidikan, meliputi:
    a. Peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik.
    b. Pengembangan Pendidikan hingga taraf menengah ke atas.
    c. Peningkatan sarana prasarana sekolah dampak banjir (rob).
2. Bidang Kesehatan, meliputi:
    a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
    b. Penanggulangan dan pencegahan Kawasan kumuh.
    c. Peningkatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat.
    d. Menekan jumlah bayi gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/balita.
    e. Kewaspadaan penyakit menular.
3. Bidang Ekonomi Sosial, meliputi:
    a. Pembekalan dan pelatihan berbasis IT.
    b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial.
    c. Pengembangan sektor ekonomi kreatif lokal.
    d. Menyediakan kesempatan kerja.
    e. Penanggulangan bahaya narkoba.
    f. Penegakan peraturan perundang-undangan.
    g. Tanggap dan paska bencana.
4. Bidang Infrastruktur, meliputi:
    a. Peningkatan keamanan akses jalan.
    b. Pembangunan/perbaikan drainase, normalisasi sungai.
    c. Fungsi infrastruktur lingkungan permukiman.
    d. Pelayanan pengolahan sampah dan air limbah domestik.
5. Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum, meliputi:
    a. Penertiban pengamen.

b. Pelayanan pencegahan banjir.
c. Penataan kawasan parkir.
d. Penataan kawasan kuliner dan pedagang K5.
e. Penertiban praktik judi.

6. Bidang Permukiman, meliputi:
   a. Program pembersihan permukiman.
   b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah.
   c. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi relokasi.
   d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.
7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi:
   a. Penyusunan APBD dilakukan sesuai dan tepat waktu.
   b. Peningkatan kapasitas ASN.

4.3 Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Perencanaan, Kelembagaan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Sanksi Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Peraturan Wali Kota tersebut akan mendorong inovasi kebijakan Pembangunan dengan merumuskan ruang lingkup Sistem Inovasi Daerah yang lebih terarah. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Kota Pekalongan telah merumuskan Road Map SIDa yan melingkupi Kondisi SIDa saat ini, tantangan dan peluang SIDa, Kondisi SIDa yang akan dicapai, Strategi dan Arah Kebijakan SIDa dan Rencana aksi penguatan SIDa.

Selanjutnya, telah dirumuskan juga kelembagaan SIDa yang mengatur pembentukan Tim Penguatan SIDa, dengan ruang lingkup tugas antara lain, mengintegrasikan program inovatif SIDa dengan RPJMD, melakukan sinkroniasi, harmonisasi dan sinergi SIDa, mempersiapkan rumusaan kebijakan penyelenggaraan SIDa, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan SIDa,melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan SIDa.

Dalam hal penyelenggaraan SIDa, Peraturan Wali Kota memperkuat munculnya inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Adanya kebijakan tersebut akan mendorong munculnya inovasi kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah dan keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat.

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan) dan pengelolaan fungsi manajemen (sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja).

Pemerintah akan terus mendorong inovasi baik yang bersifat digital dan non digital dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintahan Daerah. Inovasi yang bersifat digital akan didorong untuk penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi non digital direncanakan untuk memperkuat kebijakan Pemerintah sesuai dengan visi misi Kepala Daerah. Inovasi digital diharapkan mendukung penguatan potensi unggulan Kota Pekalongan baik Batik-Perikanan, transparansi dan akuntabilitas, tata kelola pemerintah, pelayanan public serta perwujudan satu data untuk Kota Pekalongan. Adapun Inovasi Non Digital atau inovasi yang berupa kebijakan atau langkah strategis untuk membantu penyelesaian permasalahan atau isu strategis di Kota Pekalongan, seperti halnya penanganan banjir dan rob, peningkatan kualitas dan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan lain-lain yang tidak dapat dilakukan secara digital. Selain itu, secara khusus, saat ini Pemerintah juga mendorong usaha kolaboratif dan sinegis untuk mengembalikan kejayaan perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan, yang sangat terdampak kondisi banjir dan rob. Dorongan untuk memunculkan inovasi pemerintah daerah ini dilakukan melalui Kebijakan Wali Kota bahwa Satu OPD minimal Satu Inovasi, Penyelenggaraan Penilaian Inovasi Perangkat Daerah yang menjaring ide inovasi serta adanya reward bagi Inovasi dan Inisiator Terbaik.

Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi. Inovasi ini dimaksud untuk mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Lebih lanjut, seluruh rangkaian inovasi ini akan dilakukan proses evaluasi penyelenggaraan SIDa secara rutin. Evaluasi Penyelenggaran SIDa dilakukan melalui penilaian kapasitas inovatif daerah. Penilaian kapasitas inovatif dilaksanakan guna mengetahui capaian implementasi program inovatif SIDa dan sebagai tolak ukur kemajuan SIDa. Pelaksanaan penilaian kapasitas inovatif daerah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, industri/UMKM, dan masyarakat.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga fokus menyelenggarakan fungsi kelitbangan pada tema-tema strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan kota. Penyelenggaraan fungsi litbang ini dilakukan melalui tema yang dikompetisikan dalam Riset Unggulan Daerah dengan mengambil isu strategis pada tahun perencanaan N+1.

Inovasi Kebijakan Pembangunan juga sedang dirintis melalui kegiatan riset bersama, yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Tidak hanya melalui riset unggulan dan riset bersama, dorongan inovasi kebijakan pembangunan juga dilakukan dalam perwujudan program unggulan atau program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026.

4.4 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Sebagai bagian dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 menerapkan konsep teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Konsep tersebut merupakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yang diuraikan sebagai berikut.

4.4.1 Teknokratik

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses awal dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan teknokratik oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Hasil dari proses ini yaitu Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 secara teknokratik mempedomani arah kebijakan dan sasaran tahun 2024 pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang selaras dengan program perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 4.8 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Pendekatan Teknokratik

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
1. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,61 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,60 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 104,14 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,35	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2,50%	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Pemberdayaan Sosial	
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Pemerataan peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,59 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,81%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,59	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
			Program Perlindungan Perempuan	
	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	96,24%	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	909,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	2. Indeks Kualitas Air	35,37	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	3. Indeks Kualitas Lahan	23,60	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
			Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	2. Persentase pelayanan sampah	71,12%	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
	3. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
	4. Persentase keterhubungan jalan	100%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pertumbuhan ekonomi	2,53 - 3,32 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Persentase Penyelenggaraan *Event* Budaya	93,33%	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	1. Indeks SPBE	3,05	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	2. IKM Kota	83,79	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	97,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	75,07	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	6. Indeks Merit System	250,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	7. Maturitas SPIP	3,60	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

4.4.2 Partisipatif

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melalui tahapan dari tingkat basis sampai dengan tingkat kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.9 Penyusun RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif

No.	Tahapan Penyusunan RKPD	Keterlibatan Stakeholder
1	Konsultasi publik rancangan awal RKPD	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.
2	Pra musrenbang (penjaringan usulan masyarakat di tingkat RT)	Warga masyarakat
3	Musrenbang kelurahan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unsur Pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kelurahan
4	Musrenbang tingkat kecamatan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, unsur kesehatan dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kecamatan
5	Forum Perangkat Daerah	OPD dan stakeholder yang terkait dengan tema forum perangkat daerah

No.	Tahapan Penyusunan RKPD	Keterlibatan Stakeholder
6	Musrenbang tingkat kota	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

4.4.3 Politis

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Visi dan misi Wali Kota Pekalongan pada RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD melalui penyelarasan program sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.10 Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD

Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Unmeet need KB	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	OPD Pengampu Urusan Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan		
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	OPD Pengampu Urusan PU-PR

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah		
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Satpol PP
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government		
Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	OPD Pengampu Urusan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	OPD Pengampu Urusan Persandian
Program Penanggulangan Bencana	persentase korban bencana alam yang ditangani	BPBD
Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Perda yang ditetapkan	Set DPRD
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Satpol PP
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS berkembang karier	OPD Pengampu Kepegawaian
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	OPD Pendidikan dan Pelatihan
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	OPD Pengampu Litbang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	Bag. Organisasi
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	OPD Pengampu Perencanaan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	OPD Pengampu Perencanaan
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Bag. Pemerintahan
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Bag. Perekonomian dan SDA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Pendekatan secara politis juga dilakukan melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 4.11 Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	No.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan
1	Bidang Pendidikan, meliputi: a. Peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik. b. Pengembangan Pendidikan hingga taraf menengah ke atas. c. Peningkatan sarana prasarana sekolah dampak banjir (rob).	3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
2	Bidang Kesehatan, meliputi: a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. b. Penanggulangan dan pencegahan Kawasan kumuh. c. Peningkatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat. d. Menekan jumlah bayi gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/balita. e. Kewaspadaan penyakit menular.	1	Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
3	Bidang Ekonomi Sosial, meliputi: a. Pembekalan dan pelatihan berbasis IT. b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. c. Pengembangan sektor ekonomi kreatif lokal. d. Menyediakan kesempatan kerja. e. Penanggulangan bahaya narkoba. f. Penegakan peraturan perundang-undangan. g. Tanggap dan paska bencana.	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
		9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
		10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
		11	Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
4	Bidang Infrastruktur, meliputi:	7	Peningkatan pembangunan sistem

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	No.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan
	a. Peningkatan keamanan akses jalan. b. Pembangunan/perbaikan drainase, normalisasi sungai. c. Fungsi infrastruktur lingkungan permukiman. d. Pelayanan pengolahan sampah dan air limbah domestik.		penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
5	Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum, meliputi: a. Penertiban pengamen. b. Pelayanan pencegahan banjir. c. Penataan kawasan parkir. d. Penataan kawasan kuliner dan pedagang K5. e. Penertiban praktik judi.	11	Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
6	Bidang Permukiman, meliputi: a. Program pembersihan permukiman. b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah. c. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi relokasi. d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi: a. Penyusunan APBD dilakukan sesuai dan tepat waktu. b. Peningkatan kapasitas ASN.	12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

4.4.4 Atas-bawah dan bawah-atas

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Bentuk penyelarasan dalam proses perencanaan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi usulan rencana pembangunan pada tahapan forum perangkat daerah, yaitu menyelaraskan antara usulan musrenbang kelurahan/kecamatan, rencana kerja perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan berpedoman pada prioritas dan fokus pembangunan Kota Pekalongan.
2. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.
3. Penyelarasan kebijakan Pusat dengan kondisi Kota Pekalongan dalam rapat TAPD.

4.5 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Pendekatan lain sebagai satu kesatuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 yaitu berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

4.5.1. Holistik-tematik

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Konsep tematik yang diterapkan dalam kebijakan pembangunan Kota Pekalongan dapat dilihat melalui tema pembangunan setiap tahunnya sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.2 Konsep Tematik
Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Selanjutnya, tema kebijakan pembangunan dijabarkan ke dalam prioritas dan fokus pembangunan sebagaimana diuraikan pada sub bab 4.2.3, yang secara holistik telah mencakup aspek pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.12 Konsep Holistik
Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Prioritas Kota 2024	Aspek Pembangunan
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Kesehatan
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Kesejahteraan sosial

Prioritas Kota 2024	Aspek Pembangunan
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Sumber daya manusia
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perlindungan perempuan dan anak
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Pengarusutamaan gender
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Infrastruktur perumahan dan permukiman
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Lingkungan hidup
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Infrastruktur perkotaan
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Ekonomi
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Kebudayaan
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Kondusivitas wilayah
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Tata kelola pemerintahan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

4.5.2. Integratif

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini diterapkan melalui pencapaian sasaran kinerja pembangunan tingkat kota yang didukung oleh kinerja lintas OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13 Konsep Integratif
Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program, dengan fokus pada:			

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
a. Mendorong upaya konvergensi dan sinergitas lintas sektor yang disertai peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, percepatan penurunan angka stunting serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; b. Mendorong peran berbagai pihak/stakeholder dalam meningkatkan percepatan pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*; c. Penggerakan masyarakat melalui posyandu dan pemberdayaan Germas di berbagai tatanan masyarakat; d. Peningkatan efektivitas jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat.	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan, dengan fokus pada:			
Perluasan kesempatan pelatihan keterampilan bagi warga miskin dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
		Program Pemberdayaan Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan, dengan fokus pada:			
a. Peningkatan partisipasi pendidikan guna menurunkan angka ATS (anak tidak sekolah), disertai	Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
upaya perluasan akses, peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan secara bertahap; b. Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, dengan fokus pada:			
Peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan tenaga kerja dan penghapusan pekerja anak.	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak, dengan fokus pada:			
a. Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan guna meningkatkan kesetaraan gender; b. Peningkatan dan optimalisasi kelurahan layak anak serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak, difabel dan lansia.	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada:			
Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:			
a. Penguatan sinergitas dengan pemerintah pusat, provinsi dan peran masyarakat dalam rangka percepatan penanganan banjir/rob; b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang menghasilkan limbah, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup; c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	Menurunnya tingkat pencemaran air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	Optimalnya kualitas lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:			
a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum; b. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi	Optimalnya layanan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
pengelolaan persampahan kepada masyarakat; c. Lanjutan pengembangan kawasan Pekalongan Baru dan mendorong penambahan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif, dengan fokus pada:			
Pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dengan sektor industri, jasa, perdagangan dan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui: a. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata disertai dengan promosi, penguatan pelaku industri pariwisata serta kemudahan akses; b. Pengembangan destinasi wisata baru dengan menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka penguatan ekonomi lokal.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		Program Pengembangan Ekspor	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pengembangan UMKM	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, dengan fokus pada:			
Pengembangkan kesenian dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan masyarakat	Meningkatnya intensitas event budaya yang	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
dalam rangka memperkaya substansi penyelenggaraan event budaya.	diselenggarakan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Program Pembinaan Sejarah	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			
	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN, dengan fokus pada:			
a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan domain SPBE; b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik; c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
d. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta implementasi roadmap merit system; e. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.		Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
		Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

4.5.3. Spasial

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Konsep ini diterapkan dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan. Penerapan konsep spasial ini ditunjukkan dengan rencana pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

a. Penataan alun-alun dan lapangan Sorogenen sebagai ruang terbuka publik.
b. Pembangunan jalan akses menuju kawasan wisata Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana.
c. Penataan eks pasar Grorolan dalam rangka penataan kawasan perdagangan barang dan jasa
d. Lanjutan Penataan Trotoar Jalan HOS Cokroaminoto dalam rangka mendukung pengembangan perdagangan dan jasa di pasar kuripan
e. Lanjutan Penataan Pasar Sugihwaras dalam rangka mendukung pengembangan perdagangan dan jasa
f. Patiunus sebagai ruang terbuka public dan mendukung kawasan cagar budaya Jetayu
g. Pembangunan bangunan pengendali banjir dan rob pada area topografi rendah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran

Indikasi rencana program tahun 2024 didasarkan pada prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024, RPJMD Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan. Konsistensi antara prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan pagu anggaran disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2024

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	85,00 persen	72.075.128.000	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 persen		Dinas Kesehatan
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100,00 persen		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	94,50 persen	1.036.287.000	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan	Persentase	96,00 persen	629.013.000	Dinas

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat			Kesehatan
		Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	98,00 persen		Dinas Kesehatan
		Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 persen		Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	93,00 persen	968.213.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	383.342.000	Dinperpa
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen	30.500.000	Dinperpa
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80 persen	54.500.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	60.095.000	Dinsos P2KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7,60 persen	5.610.387.000	Dinsos P2KB
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan	Unmeet need KB	14,00 persen	165.162.000	Dinsos P2KB

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Keluarga Sejahtera (KS)				
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	868.351.000	Dinsos P2KB
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	343.926.000	Dinsos P2KB
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen	473.774.000	Dinsos P2KB
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.670.466.000	Dinsos P2KB
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 persen	1.502.324.000	Dinsos P2KB
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	89,50 persen	63.780.887.000	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen	16.012.838.000	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan	Rasio Pengunjung	16,25 indeks	830.911.000	Dinarpus

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Perpustakaan	Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)			
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen	272.429.000	Dinas Pendidikan
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46 persen	3.312.225.000	Dinperinaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	693.181.000	Dinperinaker
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	47,51 persen	450.369.000	Dinperinaker
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 persen	264.850.000	DPMPPA
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 persen	94.012.000	DPMPPA
	Program	Persentase	40,74 persen	224.753.000	DPMPPA

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dekela (desa/kelurahan layak anak)			
	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	146.347.000	DPMPPA
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	927.783.000	DPU-PR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68 persen	1.603.761.000	Dinperkim
	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 Hektar	16.614.300.000	Dinperkim
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1973,41 hektar	5.478.688.000	Dinperkim
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	14,51 persen	1.410.521.000	Dinperkim
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50,00 persen	9.086.000	Dinperkim
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 persen	11.757.760.000	DPU-PR
	Program Pengelolaan dan	Persentase drainase dalam	69,48 persen	3.689.840.000	DPU-PR

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pengembangan Sistem Drainase	kondisi baik			
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45.02 persen	1.660.793.000	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	2.271.000	DLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,929 persen	4.509.357.000	DLH
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	468.032.000	Dinperkim
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	1.097.910.000	DPU-PR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	102.900.000	DPU-PR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen	555.200.000	DPU-PR
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	24 persen	10.555.706.000	DLH
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	860.000.000	DPU-PR
	Program Pengelolaan dan	Cakupan layanan air	89,66 persen	428.000.000	DPU-PR

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	minum yang dikelola oleh pemerintah			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 ratio	5.698.695.000	Dinas Perhubungan
		Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	95,00 persen		
		Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,75 persen		
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	21.595.513.000	DPU-PR
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 dokumen	77.882.000	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	46.930.000	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500,00 dokumen	846.700.000	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	6,82 Miliar Rupiah	412.043.000	DPMPTSP
	Program	Persentase	100,00	101.588.000	DPMPTSP

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen		
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	20,75 persen	455.853.000	Dinperinaker
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	10.221.000	Dinperinaker
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	94.380.000	Dinperinaker
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	8.121.372.000	Dindagkop UKM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar	92,00 persen	119.405.000	Dindagkop UKM

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Dan Barang Penting	dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya			
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	135.017.000	Dindagkop UKM
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapanny a (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	308.296.000	Dindagkop UKM
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	676.705.000	Dindagkop UKM
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIU P Toko (IKK Outcome)	76,17 persen	16.800.000	Dindagkop UKM
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	108.219.000	Dindagkop UKM
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen	631.070.000	Dindagkop UKM
	Program	Meningkatnya	12,16 persen	687.998.000	Dindagkop

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Pengembangan UMKM	usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)			UKM
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen	2.696.675.000	DKP
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,00 persen	294.382.000	DKP
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha	458.298.000	DKP
		Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen		
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 persen	3.909.090.000	Dinparbudpora
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	36,98 persen	675.000.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	278.262.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk	60,00 persen	822.000.000	Dinparbudpora

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Ekonomi Kreatif	pengembangan kompetensi tingkat dasar			
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,73 Miliar Rupiah	284.730.000	Dinperpa
		Nilai produksi peternakan pertahun	195,75 Miliar Rupiah		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen	313.518.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	434.053.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen	48.290.000	Dinperpa
	Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	75,00 persen	30.968.000	Dinperpa
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	145.500.000	Dinperpa
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	1.567.098.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	202.540.000	Dinparbudpora
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan	100,00 persen	40.000.000	Dinparbudpora

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Obyek Wisata Budaya			
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 persen	27.500.000	Dinparbudpora
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,71 persen	1.389.007.000	Dinparbudpora
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen	1.646.035.000	Kesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	17.235.294.000	Kesbangpol
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen	301.772.000	Kesbangpol
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen	209.694.000	Kesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen	105.700.000	Kesbangpol

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Konflik Sosial				
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	66,00 persen	6.416.736.000	Satpol P3KP
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 indeks	2.709.635.000	Dinkominfo
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 persen	115.500.000	Dinkominfo
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	2,80 persen	152.680.000	Dinkominfo
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen	1.721.346.000	BPBD
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	53,33 persen	319.504.000	Dinarpus
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	162.176.000	Dinarpus
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno	1 regulasi	10.000.000	Dinarpus

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		yang ditetapkan			
	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 persen	354.829.000	Dindukcapil
	Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	328.970.000	Dindukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	95.088.000	Dindukcapil
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	18.120.390.000	Sekretariat DPRD
		Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100,00 persen		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 persen	910.520.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	7.880.369.000	Dinparbudpora
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 persen	610.284.000	DPMPPA
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	62,96 persen	48.520.000	DPMPPA
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan	96,54 persen	784.425.000	DPMPPA

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Dan Masyarakat Hukum Adat	masyarakat			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	40.500.000	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	283.393.000	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen	63.750.000	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	14.625.000	DLH
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen	1.046.631.000	Satpol P3KP
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	77.259.000	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Selatan, Barat,	100,00 persen	13.577.791.000	Kecamatan

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		Timur			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara,Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	1.080.309.000	Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	22.350.000	Kecamatan
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	5.232.036.000	Dinkominfo
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen	734.855.000	Bappeda
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100,00 persen		
		Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74,00		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100,00 persen	581.954.000	Bappeda
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100,00 persen	586.389.000	Bappeda
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 persen		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100,00 persen		

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		pembangunan bidang Perekonomian			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	606.024.300.000	Semua OPD
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen		
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen		
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen	18.558.300.000	Setda
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen	968.171.000	Setda
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,66 persen	5.710.413.000	BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset	100,00 persen	1.120.650.000	BPKAD

Prioritas Kota 2024	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
		tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 persen	1.457.719.000	BPKAD
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90,00 persen	1.317.075.000	BKPSDM
		Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 persen		
		Persentase PNS berkembang karier	50,00 persen		
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen	1.969.650.000	BKPSDM
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	251.061.000	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	132.791.000	Inspektorat
			TOTAL	**1.008.539.215.000**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase capaian SPM pendidikan sebesar 89,5 persen.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100 persen.

5.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 91 Persen, Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar sebesar 85 Persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 67,50 Persen, Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 91 persen.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 94,5 Persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 50 persen.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah Pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 Persen, Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran sebesar 98 Persen, dan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 96 Persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Rumah Tangga Sehat sebesar 93 Persen.

5.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam rangka pengendalian banjir dan rob, serta pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 93,10 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah penguatan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 89,66 Persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah Penyediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota, dan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional sebesar 60 persen.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*) sebesar 11,67 persen.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 69,48 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota sebesar 18,14 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK *Outcome*) sebesar 84,39 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota, serta penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 15,87 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota dan pembangunan aplikasi sistem informasi penataan ruang. Indikator yang akan dicapai yaitu yaitu Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota sebesar 100 persen.

5.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagai warga, pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 91,68 persen.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas rtlh dan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman kumuh sebesar 174,47 hektar.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 1973,41 hektar.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah Penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 14,51 persen.

5.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK *Outcome*) sebesar 64,00 persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

5.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 67 Persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah Peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial sebesar 55,12 Persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100 Persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100 Persen.

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan penganggur dan perawatan alat-alat pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 0,46 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 25,93 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 47,51 persen.

5.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 7,39 Persen.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 23,99 Persen.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) sebesar 40,74 Persen.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 Persen.

5.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,60 Persen.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 84,80 persen.

5.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

   Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 Persen.

2. **Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**

   Fokus program adalah koordinasi dan tindaklanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebesar 50 persen.

5.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

   Fokus program adalah peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah limbah yang diolah sebesar 45,02 persen.

2. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

   Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,929 persen.

3. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

   Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 13,33 persen.

4. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

   Fokus program adalah Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 16,67 persen.

5. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

   Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup sebesar 50 persen.

6. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

   Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 75 persen.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

8. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengelolaan sampah sebesar 0,29 persen.

5.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 85,30 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 93,70 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebanyak 10 OPD.

5.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 66,67 Persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang) sebesar 62,96 Persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96,54 Persen.

5.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100 Persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai yaitu Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 7,60 Persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai yaitu *Unmeet Need* KB sebesar 14 Persen.

5.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan fasilitas LLAJ, pelaksanaan kegiatan managemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin), pelaksanaan pelayanan uji berkala, pengelolaan terminal penumpang tipe c, dan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 95 persen, Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,44, Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 0,75 persen.

5.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 Persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerinatah, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indeks sebesar 3,10.

5.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 31,49 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 58,77 persen.

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan umkm yang naik kelas dengan cara kemudahan izin, fasilitasi penguatan modal, pengembangan rantai pasokan usaha mikro serta skema jaringan pemasaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 12,16 persen.

5.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 Dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 2500 dokumen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai Invetasi Baru pertahun sebesar Rp. 6.818.240.182.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

5.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina sebesar 94,31 Persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor sebesar 34,29 persen.

5.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 Persen.

5.2.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (*penetration testing*) sebesar 2,80 Persen.

5.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase *event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya sebesar 100 Persen.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK *Outcome*) sebesar 93,97 Persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfataan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengunjung museum batik sebesar 4,71 Persen.

5.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 16,25.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Fokus program adalah Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara. Indikator yang akan dicapai yaitu Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan sebesar 1 regulasi.

5.2.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 53,33 Persen dan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 47,5.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Fokus program adalah Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK sebesar 100 Persen.

5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

5.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pemberdayaan Nelayan Kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 1 persen dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar 1 persen.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 1 persen.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan sebesar 12,2 persen dan Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2 pelaku usaha.

5.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah pengelolaan destinasi, serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 11,5 Persen.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 36,98 Persen.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 41,67 persen.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 60 persen.

5.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55.727.390.000 dan Nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 195.747.000.000.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5 persen.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 75 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

5.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 76,17 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 93,75 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya sebesar 92 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan volume ekspor sebesar 7,79 persen.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 79,99 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) sebesar 5,34 persen.

5.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 20,75 persen.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 25 persen.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.2.4.1 Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengeloaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai yaitu Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100 persen, Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100 persen, dan Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100 Persen, Deviasi realisasi belanja terhadap

belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 6 persen, dan Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100 persen.

5.2.4.2 Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitasi anggota legislative dan fasilitasi penjaringan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda yang ditetapkan sebesar 100 persen dan Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen.

5.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.2.5.1 Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 Persen, Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud sebesar 100 Persen, Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian sebesar 100 persen, dan Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah sebesar 100 persen.

5.2.5.2 Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan skpd, blud dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan apbd provinsi, Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 7,66 Persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengeloaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks pengelolaan aset baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 5 Persen.

5.2.5.3 Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan *Assesment Center*, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang karier sebesar 50 persen, Tingkat Pelaporan Kinerja ASN sebesar 100 persen, Persentase Keterisian Jabatan sebesar 90 persen, dan Persentase Keterpenuhan Formasi ASN sebesar 80 Persen.

5.2.5.4 Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100 persen.

5.2.5.5 Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbangan, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD sebesar 100 persen, Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan sebesar 100 persen, dan Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) sebesar 74 persen.

5.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.2.6.1 Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu Level Kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 3.

5.2.7 Unsur Kewilayahan

5.2.7.1 Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Timur sebesar 100 Persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur sebesar 100 Persen, serta Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur sebesar 100 Persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan). Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Utara sebesar 100 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Selatan sebesar 100 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Barat sebesar 100 persen, dan Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Timur sebesar 100 persen.

5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

5.2.8.1 Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16 lembaga.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar 100 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100 persen.

5.2.9 Non Urusan

5.1.9.1 Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD. indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 persen, persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100

persen, persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan sekretariat daerah sebesar 100 persen dan persentase pelayanan keprotokoleran sebesar 100 persen.

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Dinas Pendidikan						**243.815.044.000**							**265.646.986.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**243.815.044.000**							**265.646.986.000**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**243.815.044.000**							**265.646.986.000**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**163.748.890.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**168.386.468.000**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**93.500.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan	100 persen	**147.579.000**	
1.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		2.579.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	85.750.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Dinas Pendidikan		142.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**162.136.501.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan	100 persen	**166.855.026.000**	
1.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1380 Orang/bulan	161.598.801.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		166.322.276.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	533.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		529.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		3.750.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen			100 persen 100 persen	**102.735.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan	100 persen	**85.099.000**	
1.01.01.2.03.0005	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**														
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan				93 Laporan	102.735.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Dinas Pendidikan		85.099.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan	100 persen	**8.510.000**	
1.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		8.510.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**527.184.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan	100 persen	**551.263.000**	
1.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	123.322.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		110.263.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.117.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		11.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa							
1.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	82.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		72.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		13.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				588 Dokumen	2.550.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145 Laporan	160.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0011	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**														
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	125.695.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		182.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa	100 persen			100 persen	**686.897.000**			Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Dinas Pendidikan	100 persen	**550.233.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Pemerintahan Daerah	penujang urusan pemerintahan daerah								Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
1.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	320.997.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		270.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	358.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		273.233.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen			100 persen	**197.073.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan	100 persen	**188.758.000**	
1.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				40 Unit	72.073.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		50.758.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor				4 Unit	75.000.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Dinas		90.000.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pendidikan			PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	50.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		48.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase capaian SPM pendidikan	100,00 persen			89,50 persen	**63.780.887.000**						100,00 persen	**81.730.417.000**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	100.00 persen			99.00 persen	**28.053.034.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	100.00 persen	**33.663.919.000**	
1.01.02.2.01.0003	**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**														
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	250.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		750.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.0	**Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.2.01.0004															
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	150.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		470.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0005	**Pembangunan Perpustakaan Sekolah**														
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	750.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	1.619.494.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana	Dinas Pendidikan		1.373.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											pendidikan				
1.01.02.2.01.0009	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**														
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	142.566.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		1.660.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0011	**Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**														
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	75.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0015	**Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah**														
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				71 Paket	88.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga	Dinas Pendidikan		177.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0016	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**														
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				71 Paket	143.650.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		355.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0019	**Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	50.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		106.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0022	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**														
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Paket	375.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap	Dinas Pendidikan		2.156.305.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0025	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**														
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				11680 Peserta Didik	375.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0026	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**														
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1091 Orang	2.324.940.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		2.684.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**														
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				103 Satuan Pendidikan	206.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan	Dinas Pendidikan		303.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0029	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**														
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				103 Satuan Pendidikan	18.212.100.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		12.922.744.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030	**Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**														
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				309 Orang	37.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		58.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0037	**Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan**														
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				309 Orang	67.230.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran	Dinas Pendidikan		142.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa			keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0047	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**														
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	350.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		-	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0048	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	383.740.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		555.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0050	**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**														
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan				103 Satuan Pendidikan	131.814.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan	Dinas Pendidikan		306.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Proses Belajar						Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Berdaya Saing	merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0051	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**														
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				91 Ruang	2.320.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		5.563.570.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	100.00 persen			95.00 persen	**20.729.737.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	100.00 persen	**23.913.833.000**	
1.01.02.2.02.0012	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	1.581.950.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Dinas Pendidikan		1.565.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa	BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0014	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**														
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	1.449.472.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		5.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0017	**Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**														
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0018	**Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium**														
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	470.200.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan	Dinas Pendidikan		900.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Sedang/Berat						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Berkualitas Dan Berdaya Saing	adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0022	**Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir**														
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	200.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0024	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Unit	1.742.075.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0026	**Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				17 Paket	34.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		170.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0027	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**														
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				34 Paket	212.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		425.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0030	**Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				3 Unit	132.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		170.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.0	**Perlengkapan Belajar Peserta Didik**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.2.02.0034															
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1325 Paket	210.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		625.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0035	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**														
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	125.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		1.346.586.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**														
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1035 Peserta Didik	371.310.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana	Dinas Pendidikan		580.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											pendidikan				
1.01.02.2.02.0039	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**														
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				105 Orang	292.186.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		332.200.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0041	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**														
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				29 Satuan Pendidikan	309.656.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		496.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0042	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**														
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				29 Satuan Pendidikan	13.271.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga	Dinas Pendidikan		10.127.372.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0043	**Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**														
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				28 Orang	20.920.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		23.175.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0050	**Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan**														
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				87 Orang	38.830.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		51.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**														
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				11559 Satuan Pendidikan	117.338.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap	Dinas Pendidikan		172.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	100.00 persen			99.00 persen	**10.010.951.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	100.00 persen	**17.237.190.000**	
1.01.02.2.03.0002	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	574.088.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		555.123.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0003	**Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD**														
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	1.590.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi	Dinas Pendidikan		900.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	95.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		340.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				4 Paket	35.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD														
		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				4 Paket	10.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-	Dinas Pendidikan		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03.0009	**Pengadaan Perlengkapan PAUD**														
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				8 Paket	80.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0012	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD**														
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				7 Paket	230.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0013	**Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD**														
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				10159 Peserta Didik	231.119.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat	Dinas Pendidikan		5.979.567.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03.0015	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD**														
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				2 Orang	52.872.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		48.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0017	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**														
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				268 Satuan Pendidikan	450.217.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		780.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0018	**Pengelolaan Dana BOP PAUD**														
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				268 Satuan Pendidikan	6.183.600.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Dinas Pendidikan		7.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03.0019	**Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD**														
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				804 Orang	82.055.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		129.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0028	**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**														
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	250.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0041	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**														
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang				800 Paket	127.000.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan	Dinas Pendidikan		135.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Tersedia						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Berkualitas Dan Berdaya Saing	adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03.0042	**Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				4 Unit	20.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)	100.00 persen			65.00 persen	**4.987.165.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	100.00 persen	**6.915.475.000**	
1.01.02.2.04.0001	**Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan**														
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				3 Unit	1.350.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan	Dinas Pendidikan		400.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	Berdaya Saing	merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.04.0011	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan**														
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				400 Paket	40.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0014	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**														
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				13 Orang	318.556.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		248.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0016	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**														
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan				15 Satuan	104.194.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	Dinas		400.500.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				Pendidikan		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Pendidikan			PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0017	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**														
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				15 Satuan Pendidikan	1.879.200.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		2.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0018	**Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**														
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				45 Orang	20.203.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		20.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0040	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				400 Paket	100.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0045	**Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah**														
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	20.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0046	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**														
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1554 Peserta Didik	185.012.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		1.961.575.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.0	**Pembangunan Ruang Laboratorium**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.2.04.0047															
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	380.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0048	**Pengadaan Mebel Sekolah**														
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	100.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		205.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0049	**Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				3 Unit	150.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana	Dinas Pendidikan		200.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											pendidikan				
1.01.02.2.04.0050	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**														
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	340.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		340.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen			100,00 persen	**272.429.000**						100,00 persen	**295.105.000**	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100 persen			100 persen	**191.129.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	100 persen	**142.822.000**	
1.01.03.2.01.0002	**Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar**														
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	8.350.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi	Dinas Pendidikan		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.03.2.01.0003	**Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar**														
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				1000 Buku	150.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0004	**Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**														
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				10 Orang	21.246.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		42.822.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0007	**Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar**														
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	11.533.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-	Dinas Pendidikan		25.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	100 persen			100 persen	**81.300.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	100 persen	**152.283.000**	
1.01.03.2.02.0002	**Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**														
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	10.600.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0003	**Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**														
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				1000 Buku	60.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap	Dinas Pendidikan		122.283.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.03.2.02.0006	**Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**														
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	10.700.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen			100,00 persen	**16.012.838.000**						100,00 persen	**15.234.996.000**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	100 persen			86.75 persen	**16.012.838.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	100 persen	**15.234.996.000**	
1.01.04.2.01.0001	**Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan				20 Dokumen	893.293.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat	Dinas Pendidikan		941.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Nonformal/Kesetaraan									dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.04.2.01.0002	**Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				24 Laporan	15.119.545.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		14.293.996.000	DINAS PENDIDIKAN
	Dinas Kesehatan						**108.183.227.000**							**106.719.018.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**108.183.227.000**							**106.719.018.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**108.183.227.000**							**106.719.018.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**66.980.920.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**59.215.862.000**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**21.985.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan	100 persen	**32.850.000**	
1.02.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat				2 Dokumen	3.500.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Dinas		10.750.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Daerah						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kesehatan			KESEHATAN
1.02.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3.485.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		1.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	15.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		20.450.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**64.264.562.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan	100 persen	**57.173.180.000**	
1.02.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				492 Orang/bulan	64.177.937.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		57.091.130.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	83.395.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		80.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.230.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		1.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan	100 persen	**9.500.000**	
1.02.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		9.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**401.626.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan	100 persen	**325.000.000**	
1.02.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		5.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	132.067.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		100.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang				12 Paket	7.500.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Dinas Kesehatan		7.500.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Disediakan						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
1.02.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	96.559.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		70.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		20.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	138.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		120.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**1.111.811.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan	100 persen	**1.088.375.000**	
1.02.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan				12 Laporan	600.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Dinas		600.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kesehatan			KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	625.383.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		732.233.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	485.828.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		355.542.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**1.175.936.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan	100 persen	**586.957.000**	
1.02.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	360.936.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		414.607.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	750.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		93.075.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		79.275.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			91,00 persen	**38.632.360.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**44.945.715.000**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	100 persen 100 persen			100 persen	**8.632.645.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan	100 persen 100 persen	**9.306.796.000**	
1.02.02.2.01.0007	**Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya**														
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	100.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		200.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas**														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	451.444.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah,	Dinas Kesehatan		3.356.439.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.01.0010	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya**														
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	225.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**														
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				51 Unit	1.200.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		2.512.040.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	**Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**														
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				190 Unit	222.496.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		475.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.0	**Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.2.01.0023															
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	6.364.905.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		2.708.317.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026	**Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan**														
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	68.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		55.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**29.907.540.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan	100 persen 100 persen 100 persen	**35.426.627.000**	
1.02.02.2.02.0001	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6600 Orang	125.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi	Dinas Kesehatan		127.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0003	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**														
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5972 Orang	46.070.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		26.070.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**														
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31662 Orang	156.413.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		202.487.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28386 Orang	99.142.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		140.238.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0006															
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				207789 Orang	163.173.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		44.950.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**														
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36516 Orang	27.053.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		38.267.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**														
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				76872 Orang	6.576.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		8.830.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**														
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6446 Orang	6.291.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Dinas Kesehatan		8.550.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa			01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				785 Orang	11.520.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		15.380.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**														
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5391 Orang	62.734.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		41.305.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**														
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12563 Orang	73.286.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk	Dinas Kesehatan		33.105.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0015	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	1.970.563.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		598.739.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	49.125.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		81.150.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	171.150.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		225.564.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**														
		Jumlah Dokumen Hasil				1 Dokumen	1.416.948.000	- Kota	DANA	Meningkatkan	2. Peningkatan kualitas sumber	Dinas		1.347.035.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Kesehatan			KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	357.789.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		1.084.823.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	23.516.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		29.882.107.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029	**Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	47.237.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi	Dinas Kesehatan		85.120.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0034	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	1.568.982.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		1.357.387.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037	**Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	31.988.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		78.520.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi	100 persen			100 persen	**22.500.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan	100 persen	**76.280.000**	
1.02.02.2.03.0002	**Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem				1 Dokumen	22.500.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	Dinas Kesehatan		76.280.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Informasi Kesehatan						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	100 persen 100 persen			100 persen	**69.675.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan	100 persen 100 persen	**136.012.000**	
1.02.02.2.04.0003	**Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**														
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				52 Unit	69.675.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		136.012.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	60,00 persen 95,5 persen			50,00 persen 94,50 persen	**972.721.000**						60,00 persen 95,50 persen	**104.457.000**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu	100 persen 100 persen			100 persen	**972.721.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi	Masyarakat	100 persen 100 persen	**104.457.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.03.2.02.0003	**Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	972.721.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		104.457.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	100,00 persen 97,00 persen 100,00 persen			98,00 persen 100,00 persen 96,00 persen	**629.013.000**						100,00 persen 97,00 persen 100,00 persen	**662.166.000**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan	100 persen			100 persen	**46.991.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	100 persen	**106.077.000**	
1.02.04.2.01.0001	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko				2 Dokumen	46.991.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas	Masyarakat		106.077.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Kel/Desa	KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	100 persen			100 persen	**533.272.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	100 persen	**481.023.000**	
1.02.04.2.03.0001	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				5 Dokumen	533.272.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		481.023.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan	95 persen			95 persen	**48.750.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	95 persen	**75.066.000**	
1.02.04.2.04.0001	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta				2 Dokumen	48.750.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan	Masyarakat		75.066.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Berkualitas Dan Berdaya Saing	adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Rumah Tangga Sehat	95,00 persen			93,00 persen	**968.213.000**						95,00 persen	**1.790.818.000**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri	35 persen			33 persen	**906.518.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	35 persen	**1.665.588.000**	
1.02.05.2.01.0001	**Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**														
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	906.518.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		1.665.588.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan	100 persen			100 persen	**61.695.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk	Masyarakat	100 persen	**125.230.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											integrasi lintas program				
1.02.05.2.02.0001	**Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				6 Dokumen	61.695.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		125.230.000	DINAS KESEHATAN
	RSUD Bendan						**109.162.934.000**							**96.078.439.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**109.162.934.000**							**96.078.439.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**109.162.934.000**							**96.078.439.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**87.089.655.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**95.860.580.000**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**8.485.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan	100 persen	**12.000.000**	
1.02.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	870.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan		2.500.000	RSUD BENDAN
1.02.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-				2 Dokumen	615.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	RSUD		1.500.000	RSUD BENDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bendan			
1.02.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	7.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan		8.000.000	RSUD BENDAN
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**53.170.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan	100 persen	**49.095.000**	
1.02.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.600.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan		47.595.000	RSUD BENDAN
1.02.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	570.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan		1.500.000	RSUD BENDAN
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**28.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan	100 persen	**799.485.000**	
1.02.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	28.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	RSUD Bendan		799.485.000	RSUD BENDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Semua Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**87.000.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	100 persen	**95.000.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	87.000.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		95.000.000.000	RSUD BENDAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			67,50 persen	**22.009.713.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**155.000.000**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100 persen 100 persen			100 persen	**21.894.400.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	100 persen 100 persen	**-**	
1.02.02.2.01.0014	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**														
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	21.894.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		-	RSUD BENDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**32.813.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen	**45.000.000**	
1.02.02.2.02.0002	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**														
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	32.813.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		45.000.000	RSUD BENDAN
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan	100 persen 100 persen			100 persen	**82.500.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	100 persen 100 persen	**110.000.000**	
1.02.02.2.04.0003	**Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**														
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				27 Unit	82.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas	Masyarakat		110.000.000	RSUD BENDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	60,00 persen 95,5 persen			50,00 persen 94,50 persen	**63.566.000**						60,00 persen 95,50 persen	**62.859.000**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase perawat dan bidan yang terkredensial	100 persen 100 persen			100 persen	**47.441.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Tenaga Kesehatan di RSUD Bendan	100 persen 100 persen	**49.525.000**	
1.02.03.2.02.0002	**Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar**														
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	36.191.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Tenaga Kesehatan di RSUD Bendan		36.191.000	RSUD BENDAN
1.02.03.2.02.0003	**Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				42 Dokumen	11.250.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Tenaga Kesehatan di RSUD Bendan		13.334.000	RSUD BENDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	20 persen			20 persen	**16.125.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Tenaga Kesehatan di RSUD Bendan	20 persen	**13.334.000**	
1.02.03.2.03.0001	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				70 Orang	16.125.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Tenaga Kesehatan di RSUD Bendan		13.334.000	RSUD BENDAN
	Puskesmas Bendan						**3.416.807.000**							**3.797.043.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.416.807.000**							**3.797.043.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.416.807.000**							**3.797.043.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**2.525.000.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**2.905.236.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**2.525.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Bendan	100 persen	**2.905.236.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.525.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Bendan		2.905.236.000	PUSKESMAS BENDAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			91,00 persen 67,50 persen 100,00 persen 85,00 persen	**891.807.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**891.807.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**891.807.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen	**891.807.000**	
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	891.807.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Masyarakat		891.807.000	PUSKESMAS BENDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kergon - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
	Puskesmas Kramatsari						**1.805.682.000**							**1.805.682.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.805.682.000**							**1.805.682.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.805.682.000**							**1.805.682.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan BLUD	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.050.000.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.050.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**1.050.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Kramatsari	100 persen	**1.050.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.050.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Kramatsari		1.050.000.000	PUSKESMAS KRAMATSARI
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			100,00 persen 67,50 persen 85,00 persen	**755.682.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**755.682.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	**755.682.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen	**755.682.000**	
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	755.682.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		755.682.000	PUSKESMAS KRAMATSARI
	Puskesmas Tirto						**2.220.718.000**							**1.847.890.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.220.718.000**							**1.847.890.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.220.718.000**							**1.847.890.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.250.000.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.250.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**1.250.000.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Tirto	100 persen	**1.250.000.000**	
1.02.01.2.10	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0001															
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.250.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Tirto		1.250.000.000	PUSKESMAS TIRTO
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			85,00 persen 67,50 persen 91,00 persen 100,00 persen	**970.718.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**597.890.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen 100 persen 100 persen			100 Persen	**970.718.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Tirto	100 persen 100 persen 100 persen	**597.890.000**	
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	970.718.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran	Masyarakat, Puskesmas Tirto		597.890.000	PUSKESMAS TIRTO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Barat, Pringrejo			prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
	Puskesmas Medono						**1.873.894.000**							**1.517.568.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.873.894.000**							**1.517.568.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.873.894.000**							**1.517.568.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**950.000.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**950.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 Persen	**950.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	100 persen	**950.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	950.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		950.000.000	PUSKESMAS MEDONO
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			91,00 persen	**923.894.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**567.568.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat**	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen 100 persen			100 persen	**923.894.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan	Masyarakat, Puskesmas Medono	100 persen 100 persen 100 persen	**567.568.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Daerah Kabupaten/Kota		100 persen							Berdaya Saing	merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	923.894.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Medono		567.568.000	PUSKESMAS MEDONO
	Puskesmas Noyontaan						**1.754.951.000**							**1.754.951.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.754.951.000**							**1.754.951.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.754.951.000**							**1.754.951.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan layanan BLUD	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.113.430.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.113.430.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**1.113.430.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Noyontaan	100 persen	**1.113.430.000**	
1.02.01.2.10	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0001															
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.113.430.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Noyontaan		1.113.430.000	PUSKESMAS NOYONTAAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			100,00 persen 67,50 persen 91,00 persen 85,00 persen	**641.521.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**641.521.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**641.521.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen	**641.521.000**	
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	641.521.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		641.521.000	PUSKESMAS NOYONTAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Puskesmas Tondano						**1.679.195.000**							**1.632.983.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.679.195.000**							**1.632.983.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.679.195.000**							**1.632.983.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan BLUD	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**969.000.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**922.788.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**969.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Tondano	100 persen	**922.788.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	969.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Tondano		922.788.000	PUSKESMAS TONDANO
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			85,00 persen 91,00 persen 100,00 persen 67,50 persen	**710.195.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**710.195.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar													
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**710.195.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Tondano	100 persen 100 persen 100 persen	**710.195.000**	
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	710.195.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer - Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Tondano		710.195.000	PUSKESMAS TONDANO
	Puskesmas Klego						**1.725.757.000**							**1.725.757.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.725.757.000**							**1.725.757.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.725.757.000**							**1.725.757.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**993.800.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**993.800.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**993.800.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Klego	100 persen	**993.800.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	993.800.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego - Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Klego		993.800.000	PUSKESMAS KLEGO
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			91,00 persen	**731.957.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**731.957.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**731.957.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Klego	100 persen 100 persen 100 persen	**731.957.000**	
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	731.957.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego - Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Klego		731.957.000	PUSKESMAS KLEGO
	Puskesmas Sokorejo						**2.248.457.000**							**2.248.457.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.248.457.000**							**2.248.457.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.248.457.000**							**2.248.457.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase	100,00 persen 100,00			100,00 persen 100,00	**1.460.880.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.460.880.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00			persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00							100,00 persen		
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**1.460.880.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	100 persen	**1.460.880.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	1.460.880.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono - Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		1.460.880.000	PUSKESMAS SOKOREJO
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			100,00 persen 67,50 persen 91,00 persen 85,00 persen	**787.577.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**787.577.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**787.577.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah,	Masyarakat, Puskesmas Sokorejo	100 persen 100 persen 100 persen	**787.577.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	787.577.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono - Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Sokorejo		787.577.000	PUSKESMAS SOKOREJO
	Puskesmas Dukuh						**1.824.612.000**							**1.824.612.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.824.612.000**							**1.824.612.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.824.612.000**							**1.824.612.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.095.000.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.095.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**1.095.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Dukuh	100 persen	**1.095.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.095.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Dukuh		1.095.000.000	PUSKESMAS DUKUH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton - Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan							
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			91,00 persen	**729.612.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**729.612.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**729.612.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen	**729.612.000**	
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	729.612.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton - Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		729.612.000	PUSKESMAS DUKUH
	Puskesmas Krapyak Kidul						**2.216.045.000**							**1.740.460.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.216.045.000**							**1.740.460.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.216.045.000**							**1.740.460.000**	
1.02.0	**PROGRAM**	Persentase ketersediaan	100,00			100,00	**1.480.000.000**						100,00 persen	**1.198.741.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	layanan BLUD Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen							100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen		
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**1.480.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Krapyak Kidul	100 persen	**1.198.741.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.480.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu - Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Krapyak Kidul		1.198.741.000	PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			91,00 persen	**736.045.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**541.719.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**736.045.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran	Masyarakat, Puskesmas Krapyak Kidul	100 persen 100 persen 100 persen	**541.719.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	736.045.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu - Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Krapyak Kidul		541.719.000	PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL
	Puskesmas Kusuma Bangsa						**3.116.685.000**							**3.116.685.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.116.685.000**							**3.116.685.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.116.685.000**							**3.116.685.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**2.176.805.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**2.176.805.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 Persen	**2.176.805.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Warga Kota Pekalongan dan sekitarnya	100 persen	**2.176.805.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.176.805.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan - Kota Pekalongan,	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Warga Kota Pekalongan dan sekitarnya		2.176.805.000	PUSKESMAS KUSUMA BANGSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Pekalongan Utara, Panjang Baru - Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang							
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			91,00 persen	**939.880.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**939.880.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**939.880.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen	**939.880.000**	
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	939.880.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan - Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru - Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	masyarakat		939.880.000	PUSKESMAS KUSUMA BANGSA
	Puskesmas Jenggot						**1.949.033.000**							**1.708.597.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.949.033.000**							**1.708.597.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.949.033.000**							**1.708.597.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.335.700.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.335.700.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 Persen	**1.335.700.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Jenggot	100 persen	**1.335.700.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	1.335.700.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Jenggot		1.335.700.000	PUSKESMAS JENGGOT
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			85,00 persen 67,50 persen 91,00 persen 100,00 persen	**613.333.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**372.897.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan	100 persen 100 persen 100			100 persen 100 persen 100 persen	**613.333.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Masyarakat, Puskesmas Jenggot	100 persen 100 persen 100 persen	**372.897.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Kabupaten/Kota	kesehatan RS tipe C	persen								01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	613.333.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Jenggot		372.897.000	PUSKESMAS JENGGOT
	Puskesmas Pekalongan Selatan						**3.389.405.000**							**2.374.335.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.389.405.000**							**2.374.335.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.389.405.000**							**2.374.335.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**2.374.335.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**2.374.335.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**2.374.335.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Pekalongan Selatan	100 persen	**2.374.335.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang				1 Unit Kerja	2.374.335.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan,	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Masyarakat, Puskesmas Pekalongan		2.374.335.000	PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pelayanan						Kuripan Kertoharjo		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN	Selatan			
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			67,50 persen 100,00 persen 85,00 persen	**1.015.070.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	**1.015.070.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Pekalongan Selatan	100 persen 100 persen 100 persen	**-**	
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	1.015.070.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Pekalongan Selatan		-	PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
	Puskesmas Buaran						**1.760.744.000**							**1.760.744.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.760.744.000**							**1.760.744.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.760.744.000**							**1.760.744.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100,00 persen 100,00 persen 100,00			100,00 persen	**985.000.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**985.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	KABUPATEN/KOTA		persen 100,00 persen												
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 persen	**985.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat,Puskesmas Buaran	100 persen	**985.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	985.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip - Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat,Puskesmas Buaran		985.000.000	PUSKESMAS BUARAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			91,00 persen	**775.744.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**775.744.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**775.744.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen	**775.744.000**	
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	775.744.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip - Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas	masyarakat		775.744.000	PUSKESMAS BUARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa			lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
	Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu						**510.020.000**							**1.251.609.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**510.020.000**							**1.251.609.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**510.020.000**							**1.251.609.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**300.000.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**351.384.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen			100 Persen	**300.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPSJ	100 persen	**351.384.000**	
1.02.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	300.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPSJ		351.384.000	BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen			85,00 persen 67,50 persen 91,00 persen 100,00 persen	**210.020.000**						92,00 persen 90,00 persen 100,00 persen 72,50 persen	**900.225.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)													
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**210.020.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	BPSJ	100 persen 100 persen 100 persen	**900.225.000**	
1.02.02.2.02.0019	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	210.020.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	BPSJ		900.225.000	BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						**54.262.596.000**							**122.899.261.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**54.262.596.000**							**122.899.261.000**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**54.262.596.000**							**122.899.261.000**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**13.247.690.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**11.776.356.000**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**16.950.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR	100 persen	**25.650.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.03.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		9.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.050.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		14.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**6.950.774.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR	100 persen	**7.602.325.000**	
1.03.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	6.849.074.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		7.505.825.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	99.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	DPUPR		95.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				RUANG
1.03.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**35.578.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR	100 persen	**34.387.000**	
1.03.01.2.03.0005	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**														
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	35.578.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		34.387.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**17.800.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR	100 persen	**21.978.000**	
1.03.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		9.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0010	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				180 Orang	12.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		12.478.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0	**Administrasi Umum**	Persentase ketercapaian	100			100 persen	**588.000.000**			Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	DPUPR	100 persen	**415.450.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.06	**Perangkat Daerah**	administrasi umum perangkat daerah	persen							Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
1.03.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		3.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	230.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	6.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		6.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	114.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.03.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	3.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	200.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		112.950.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**4.853.135.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR	100 persen	**2.919.728.000**	
1.03.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.423.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		2.516.728.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	426.885.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	DPUPR		400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				RUANG
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**785.453.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR	100 persen	**756.838.000**	
1.03.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				48 Unit	599.453.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		497.027.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0003	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**														
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	86.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		59.811.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				70 Unit	50.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 persen			93,10 persen	**11.757.760.000**						93,10 persen	**22.682.373.000**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai**	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	27unit			35 unit	**10.320.260.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka	Masyarakat Kota Pekalongan	27unit	**20.442.920.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng				
1.03.02.2.01.0013	**Pembangunan Stasiun Pompa Banjir**														
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun				1 Unit	3.080.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		8.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0028	**Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir**														
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi				5 Unit	1.500.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0085	**Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				35 Unit	3.534.110.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0109	**Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing**														
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,24 KM	600.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		3.442.920.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0110	**Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing**														
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,6775 KM	1.606.150.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0	**Pengembangan dan**	Persentase panjang	85.03			83,39	**1.437.500.000**			Membangun	3. Peningkatan pengelolaan	Masyarakat	85 persen	**2.239.453.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.2.02	**Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	persen			persen				Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Kota Pekalongan			
1.03.02.2.02.0014	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**														
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,731 KM	1.437.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		2.239.453.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	92,11 persen			89,66 persen	**428.000.000**						92,11 persen	**1.374.248.000**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan	100 persen			100 Persen	**428.000.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	jaringan perpipaan	100 persen	**1.374.248.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.03.03.2.01.0032	**Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**														
		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				120 SR	428.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	jaringan perpipaan		1.374.248.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	100,00 persen			60,00 persen	**860.000.000**						100,00 persen	**2.390.970.000**	
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	100 persen			60 Persen	**860.000.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Kota Pekalongan	100 persen	**2.390.970.000**	
1.03.04.2.01.0010	**Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**														
		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	860.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air	Kota Pekalongan		2.390.970.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,87 persen			11,67 persen	**927.783.000**						12,87 persen	**537.468.000**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	60051unit			59851 unit	**927.783.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	sarpras sanitasi	60051unit	**537.468.000**	
1.03.05.2.01.0032	**Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman**														
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan				2 M³/Hari	927.783.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	sarpras sanitasi		537.468.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam kondisi baik	71,49 persen			69,48 persen	**3.689.840.000**						71,49 persen	**4.858.000.000**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	177142.18 meter			180841 meter	**3.689.840.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan	177142.18meter	**4.858.000.000**	
1.03.06.2.01.0028	**Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				8 Sistem Drainase Perkotaan	3.200.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		4.158.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0031	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan**														
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				8 Sistem Drainase Perkotaan	489.840.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,74 persen			18,14 persen	**1.097.910.000**						18,74 persen	**2.191.408.000**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	1950dokumen			330 dokumen	**1.097.910.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Warga Kota Pekalongan	350dokumen	**2.191.408.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.03.08.2.01.0018	**Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				3 Bangunan Gedung	801.960.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Warga Kota Pekalongan		2.031.408.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0019	**Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung**														
		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	100.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Warga Kota Pekalongan		10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0023	**Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG**														
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan				130 Dokumen	195.950.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat	Warga Kota Pekalongan		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Bangunan Gedung melalui SIMBG									dan/atau pemerintah Prov Jateng				
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	86,57 persen			84,39 persen	**21.595.513.000**						86,57 persen	**76.374.296.000**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	132.809 KM			129,628 KM	**21.595.513.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Masyarakat Kota Pekalongan	132.809KM	**76.374.296.000**	
1.03.10.2.01.0029	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**														
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	64.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Masyarakat Kota Pekalongan		94.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0032	**Pembangunan Jalan**														
		Panjang Jalan yang Dibangun				0,5 KM	800.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan	Masyarakat Kota Pekalongan		41.493.996.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											transportasi perkotaan				
1.03.10.2.01.0033	**Rekonstruksi Jalan**														
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4 KM	13.275.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Masyarakat Kota Pekalongan		20.083.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0038	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**														
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	300.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Masyarakat Kota Pekalongan		799.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0043	**Survey Kondisi Jalan/Jembatan**														
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				153,607 KM	141.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan	Masyarakat Kota Pekalongan		94.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											transportasi perkotaan				
1.03.10.2.01.0044	**Rehabilitasi Jalan**														
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0,8 KM	2.500.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Masyarakat Kota Pekalongan		4.225.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0046	**Pemeliharaan Rutin Jalan**														
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2,5 KM	4.514.613.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Masyarakat Kota Pekalongan		9.584.200.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	21,20 persen			15,87 persen	**102.900.000**						21,20 persen	**110.000.000**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	6kali			1 kali	**62.900.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov	lembaga / tenaga konstruksi	1kali	**60.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											Jateng				
1.03.11.2.01.0016	**Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis**														
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				40 Orang	62.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	lembaga / tenaga konstruksi		60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 persen			100 Persen	**40.000.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	DPUPR	100 persen	**50.000.000**	
1.03.11.2.02.0013	**Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				4 Dokumen	40.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	DPUPR		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen			100,00 persen	**555.200.000**						100,00 persen	**604.142.000**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR	100 persen			100 persen	**155.000.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Kota Pekalongan	100 persen	**125.000.000**	
1.03.12.2.01.0009	**Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota**														
		dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	120.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Kota Pekalongan		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0012	**Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang**														
		Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				1 Orang	34.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd	Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng				
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	72kali			12 kali	**361.440.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Pemerintah Kota Pekalongan	12kali	**445.915.000**	
1.03.12.2.03.0003	**Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang**														
		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				10 Dokumen	361.440.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Pemerintah Kota Pekalongan		445.915.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	72kali			12 kali	**38.760.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Penataan Ruang	12kali	**33.227.000**	
1.03.1	**Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.2.04.0004															
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	38.760.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Penataan Ruang		33.227.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						**30.011.392.000**							**13.365.458.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.534.274.000**							**12.281.563.000**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**29.534.274.000**							**12.281.563.000**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**4.427.004.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**4.882.894.000**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**15.861.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperkim	100 persen	**25.350.000**	
1.04.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.262.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperkim		10.750.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.599.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperkim		1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperkim		12.950.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**2.838.448.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	**3.402.891.000**	
1.04.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.782.066.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		3.350.541.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	54.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		50.700.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.482.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	**9.500.000**	
1.04.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		9.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**221.686.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	**192.414.000**	
1.04.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	48.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		44.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.04.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	49.186.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		40.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.414.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				73 Laporan	110.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		94.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**1.018.478.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	**970.407.000**	
1.04.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		1.800.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN	Permukiman			PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	812.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		758.200.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	204.278.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		210.407.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**327.531.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 persen	**282.332.000**	
1.04.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	126.361.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		90.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		72.332.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				1 Unit	151.170.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Dinas Perumahan Rakyat dan		120.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kawasan Permukiman			KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	92,35 persen			91,68 persen	**1.603.761.000**						92,35 persen	**1.638.690.000**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen data rumah pada kawasan rawan bencana yang disusun	6dokumen			1 dokumen	**60.000.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Dinperkim Kota Pekalongan	1dokumen	**50.000.000**	
1.04.02.2.01.0009	**Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Dinperkim Kota Pekalongan		50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	15kegiatan			3 kegiatan	**44.280.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	3kegiatan	**50.000.000**	
1.04.02.2.02.0001	**Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana**														
		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				60 Orang	10.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0004	**Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator**														
		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan				6 Orang	25.000.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka	Masyarakat/Sukarelawan Tanggap		30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Bencana			KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0008	**Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**														
		Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				2 Orang	9.280.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase rumah layak huni bagi warga korban bencana dan relokasi program pemerintah (SPM/IKK Outcome)	100 persen			100 persen	**232.061.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Korban Bencana	100 persen	**264.461.000**	
1.04.02.2.03.0001	**Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana**														
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				6 Unit Rumah	132.061.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Korban Bencana		164.461.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0004	**Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana**														
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Korban Bencana		100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 persen			100 Persen	**1.197.050.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100 persen	**1.200.000.000**	
1.04.02.2.05.0001	**Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun**														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				3 Laporan	1.197.050.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		1.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Persentase pelaksanaan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 persen			100 persen	**70.370.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Pengembang Perumahan	100 persen	**74.229.000**	
1.04.02.2.06.0003	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**														
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				20 Laporan	70.370.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Pengembang Perumahan		74.229.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Luas kawasan permukiman kumuh	0hektar			174,47 Hektar	**16.614.300.000**						0hektar	**630.400.000**	
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Presentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	100 persen			100 Persen	**233.500.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kota Pekalongan	100 persen	**250.000.000**	
1.04.0	**Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.2.02.0008															
		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	150.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kota Pekalongan		150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02.0014	**Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh**														
		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				4 Dokumen	83.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kota Pekalongan		100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	508,47hektar			117 Hektar	**16.380.800.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan	72,47hektar	**380.400.000**	
1.04.03.2.03.0004	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh**														
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				4 Laporan	246.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		306.400.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0009	**Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh**														
		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				1 Ha	16.134.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan	Masyarakat Kota Pekalongan		74.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											permukiman kumuh				
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2147,88 hektar			1973,41 hektar	**5.478.688.000**						2147,88hektar	**4.523.695.000**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pencegahan rumah tidak layak huni	1.31 persen			0,78 persen	**5.478.688.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Warga Penghuni RTLH	1.31 persen	**4.523.695.000**	
1.04.04.2.01.0001	**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**														
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				401 Unit Rumah	5.478.688.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Warga Penghuni RTLH		4.523.695.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	14,55 persen			14,51 persen	**1.410.521.000**						14,55 persen	**605.884.000**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	persentase perumahan yang sudah menyerahkan PSU	79.35 persen			57,61 persen	**1.410.521.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan	79.35 persen	**605.884.000**	
1.04.05.2.01.0001	**Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	230.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	PSU Perumahan		230.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh				
1.04.05.2.01.0002	**Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**														
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10 Lokasi	1.080.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan		280.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0003	**Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**														
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	100.521.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan		95.884.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**477.118.000**							**1.083.895.000**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**477.118.000**							**1.083.895.000**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani	100 persen			100 persen	**468.032.000**						-	**1.074.937.000**	
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Luasan Bidang Tanah yang Terselesaikan Ganti Ruginya	73,35 persen			73,35 persen	**468.032.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Warga terdampak	-	**1.074.937.000**	
2.10.05.2.01.0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan				1 Dokumen	468.032.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	Warga terdampak		1.074.937.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Kel/Desa		Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh				
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Presentase Tindaklanjut Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Tanah Absentee	50 persen			50 persen	**9.086.000**						-	**8.958.000**	
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen			50 persen	**9.086.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pekalongan	-	**8.958.000**	
2.10.06.2.01.0003	**Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				2 Dokumen	9.086.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pekalongan		8.958.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						**12.866.127.000**							**12.600.672.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.866.127.000**							**12.600.672.000**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**12.866.127.000**							**12.600.672.000**	
1.05.0	**PROGRAM**	Persentase ketersediaan	100,00			100,00	**5.402.760.000**						100,00 persen	**5.390.341.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00			persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00							100,00 persen 100,00 persen		
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**15.960.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	100 persen	**62.450.000**	
1.05.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.320.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		10.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.640.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		50.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih							KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**4.560.704.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	100 persen	**4.418.425.000**	
1.05.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	4.502.384.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		4.364.775.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	56.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		52.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.520.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Barat, Podosugih							
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	100 persen	**9.500.000**	
1.05.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		9.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**236.720.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	100 persen	**217.754.000**	
1.05.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.625.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	29.195.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		28.254.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih							PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	96.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		97.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan				12	2.500.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Satpol PP,		2.500.000	SATUAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen		Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Damkar dan Penyelamatan			POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	88.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		65.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**127.651.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	100 persen	**130.858.000**	
1.05.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		2.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	125.651.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		128.858.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih							KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**456.725.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	100 persen	**551.354.000**	
1.05.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	389.230.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	37.495.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		111.354.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				66 Unit	30.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Barat, Podosugih							
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	70,00 persen			66,00 persen	**6.416.736.000**						70,00 persen	**6.041.523.000**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	100 persen			95 persen	**2.386.435.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat	100 persen	**1.822.410.000**	
1.05.02.2.01.0003	**Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				40 Dokumen	1.938.365.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat		1.020.410.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0004	**Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**														
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	18.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam	Masyarakat		25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
1.05.02.2.01.0005	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**														
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				148 Orang	33.600.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat		48.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0006	**Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	111.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat		148.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0015	**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**														
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				300 laporan	77.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung	Masyarakat		106.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
1.05.02.2.01.0016	**Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**														
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				2000 Laporan	194.480.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat		450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0017	**Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				4 Laporan	13.240.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat		25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	120perda			20 perda	**4.015.650.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat	20perda	**4.199.854.000**	
1.05.02.2.02	**Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0010															
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	59.069.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat		133.873.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0011	**Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah**														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	3.941.581.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat		4.045.981.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0012	**Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				48 Laporan	15.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai	21 persen			16 persen	**14.651.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	PPNS Polisi Pamong Praja	21 persen	**19.259.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Kabupaten/Kota	PPNS								Transformasi Pelayanan Publik	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
1.05.02.2.03.0006	**Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				3 Laporan	14.651.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	PPNS Polisi Pamong Praja		19.259.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen			100,00 persen	**1.046.631.000**						100,00 persen	**1.168.808.000**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen			100 persen	**896.719.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	-	**971.737.000**	
1.05.04.2.01.0001	**Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	39.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Masyarakat		53.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Setiap Tahunnya						Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0002	**Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				250 Laporan	789.419.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		833.737.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0007	**Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran**														
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				38 Orang	15.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0008	**Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)**														
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				2 Desa/Kelurahan	7.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0017	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				3 Unit	11.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0018	**Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				3 Dokumen	33.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen			100 Persen	**34.071.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	-	**44.789.000**	
1.05.04.2.02.0001	**Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**														
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	34.071.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		44.789.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen			100 persen	**61.328.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	-	**80.620.000**	
1.05.04.2.04.0001	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				320 Orang	37.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04.0002	**Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran**														
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				21 Desa/Kelurahan	23.828.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		30.620.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen			100 persen	**54.513.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	-	**71.662.000**	
1.05.04.2.05.0001	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia**														
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				24 Laporan	54.513.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		71.662.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**3.932.050.000**							**3.164.491.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.932.050.000**							**3.164.491.000**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.932.050.000**							**3.164.491.000**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**2.210.704.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.867.937.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**14.970.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan	-	**24.625.000**	
1.05.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.740.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		9.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.230.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		13.625.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**1.733.688.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan	-	**1.457.402.000**	
1.05.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.695.648.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		1.424.352.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0003															
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	36.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		31.550.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.140.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**54.165.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan	-	**19.797.000**	
1.05.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	45.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		9.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0009	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	8.265.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		10.297.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**160.076.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan	-	**133.516.000**	
1.05.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen				1 Paket	1.875.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	BPBD Kota		2.500.000	BADAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pekalongan			PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	63.541.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		58.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	902.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	27.258.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		29.700.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		9.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa							
1.05.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	55.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		26.416.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**107.337.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan	-	**98.804.000**	
1.05.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		1.800.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58.313.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		56.904.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	47.524.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		40.100.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**140.468.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan	-	**133.793.000**	
1.05.0	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.09 .0001															
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	82.877.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		79.859.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09 .0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				57 Unit	11.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		9.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09 .0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				57 Unit	46.341.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		44.434.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen			100,00 persen	**1.721.346.000**						100,00 persen	**1.296.554.000**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	100 persen			100 Persen	**131.528.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana	100 persen	**64.945.000**	
1.05.03.2.01 .0003	**Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota**														
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	72.263.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01 .0004	**Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)**														
		Jumlah warga negara				2 Orang	59.265.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Masyarakat		64.945.000	BADAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun						Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan yang terdampak bencana			PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100 persen			100 Persen	**154.215.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana	100 persen	**95.475.000**	
1.05.03.2.02.0014	**Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**														
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	57.004.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	**Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota**														
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1 Unit	33.911.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		33.075.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0016	**Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**														
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				200 Kawasan	63.300.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		62.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.0	**Pelayanan**	Persentase Warga	100			100 Persen	**1.357.978.000**			Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Masyarakat	100 persen	**996.556.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.2.03	**Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	persen							Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan yang terdampak bencana			
1.05.03.2.03.0002	**Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	899.228.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		846.556.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	**Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2500 Orang	458.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	100 persen			100 Persen	**77.625.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	100 persen	**139.578.000**	
1.05.03.2.04.0002	**Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	40.125.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana		89.578.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010	**Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota**														
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi				1 Kegiatan	37.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap		50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan						Kel/Desa				bencana			
	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**14.312.873.000**							**10.496.692.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.477.229.000**							**7.708.842.000**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**8.477.229.000**							**7.708.842.000**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**3.618.388.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**4.033.653.000**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**16.356.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100 persen	**24.363.000**	
1.06.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.552.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		10.750.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.804.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		11.963.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**2.739.063.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100 persen	**3.236.187.000**	
1.06.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.690.291.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.186.237.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	47.100.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		48.300.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.672.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.0	**Administrasi**	Persentase ketercapaian	100			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	DINAS	100 persen	**8.510.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.05	**Kepegawaian Perangkat Daerah**	administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen							Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.06.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		8.510.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**244.718.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100 persen	**308.192.000**	
1.06.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.867.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		96.105.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0003															
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.625.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		7.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	69.226.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		75.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	99.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK		107.087.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN	DAN KELUARGA BERENCANA			BERENCANA
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**267.434.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100 persen	**193.131.000**	
1.06.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.400.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	162.561.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		128.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102.473.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		62.731.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**345.817.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	100 persen	**263.270.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
												KELUARGA BERENCANA			
1.06.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				57 Unit	229.417.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		219.370.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	97.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	18.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		18.900.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen 75,00 persen			67 persen 67,00 persen	**473.774.000**						75 persen 75,00 persen	**431.956.000**	
1.06.02.2.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen			10 persen	**175.669.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	10 persen	**151.532.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan				
1.06.02.2.01.0002	**Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT**														
		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				800 Keluarga	175.669.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		151.532.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen			75 persen	**298.105.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	75 persen	**280.424.000**	
1.06.02.2.03.0001	**Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	74.336.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		104.541.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan				
1.06.02.2.03.0002	**Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	155.019.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		150.883.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0004	**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	68.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen 100,00 persen			100 persen	**1.670.466.000**						100 persen 100,00 persen	**1.344.865.000**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta**	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat	100 persen			100 Persen	**1.205.925.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**1.198.295.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	pelayanan sosial									infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan				
1.06.04.2.01.0001	**Penyediaan Permakanan**														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				122 Orang	365.520.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.01.0005	**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**														
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	840.405.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.198.295.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.98 persen			3.68 Persen	**464.541.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob,	Masyarakat Kota Pekalongan	3.98 persen	**146.570.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng				
1.06.04.2.02.0003	**Penyediaan Permakanan**														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				900 Orang	272.578.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0005	**Penyediaan Alat Bantu**														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	31.913.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02	**Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0008															
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	51.161.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		23.865.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	56.986.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		62.705.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				83 Orang	51.903.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov	Masyarakat Kota Pekalongan		60.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											Jateng				
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	52,49 persen 52,49 persen			55,12 persen	**1.502.324.000**						52,49 persen 52,49 persen	**972.056.000**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase graduasi KPM PKH	10 persen			10 Persen	**1.502.324.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan	10 persen	**972.056.000**	
1.06.05.2.02.0001	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				1000 Orang	601.630.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		636.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.05.2.02.0003	**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**														
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				950 Keluarga	900.694.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan	Masyarakat Kota Pekalongan		335.406.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											kemudahan akses permodalan				
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen 100,00 persen			100 persen	**868.351.000**						100 persen 100,00 persen	**491.859.000**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen			100 persen	**868.351.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**491.859.000**	
1.06.06.2.01.0001	**Penyediaan Makanan**														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				2000 Orang	423.561.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		450.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06.2.01.0004	**Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan**														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				2000 Orang	427.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui	Masyarakat Kota Pekalongan		30.139.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan				
1.06.06.2.01.0005	**Pelayanan Dukungan Psikososial**														
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				2000 Orang	17.790.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		11.720.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen 100,00 persen			100 persen	**343.926.000**						100 persen 100,00 persen	**434.453.000**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen			100 persen	**343.926.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan	100 persen	**434.453.000**	
1.06.07.2.01.0001	**Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	289.236.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui	Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan		379.453.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan				
1.06.07.2.01.0002	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	54.690.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan		55.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.835.644.000**							**2.787.850.000**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**5.835.644.000**							**2.787.850.000**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen			100,00 persen	**60.095.000**						100,00 persen	**70.767.000**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen			100 persen	**60.095.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100 persen	**70.767.000**	
2.14.02.2.02.0011	**Penyediaan Data dan Informasi Keluarga**														
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	60.095.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		70.767.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,20 persen			7,60 persen	**5.610.387.000**						7,20 persen	**2.559.918.000**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	7.74perseribu			8.73 perseribu	**3.496.408.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan	7.74perseribu	**1.843.530.000**	
2.14.03.2.01.0010	**Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	3.380.182.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan		1.733.530.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	**Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang**														
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	116.226.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan		110.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.0	**Pengendalian dan**	Persentase kepesertaan	20.8			20.4	**2.113.979.000**			Meningkatkan	2. Peningkatan kualitas sumber	Masyarakat	20.8 persen	**716.388.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.2.03	**Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	persen			persen				Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan			
2.14.03.2.03.0006	**Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB**														
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Unit	1.901.738.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan		429.913.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	**Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak**														
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	212.241.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan		286.475.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Unmeet need KB	12,00 persen			14,00 persen	**165.162.000**						12,00 persen	**157.165.000**	
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan	100 persen			100 persen	**165.162.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	100 persen	**157.165.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	KELUARGA BERENCANA			
2.14.04.2.02.0001	**Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**														
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Organisasi	165.162.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		157.165.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Dinas Lingkungan Hidup						**31.985.114.000**							**34.308.699.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31.985.114.000**							**34.308.699.000**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**31.985.114.000**							**34.308.699.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**14.854.719.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**15.583.905.000**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**15.960.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH	-	**29.874.000**	
2.11.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.320.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		10.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.0	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.01.0002															
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.640.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		17.474.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**10.716.917.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH	-	**12.581.275.000**	
2.11.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	10.606.397.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		12.473.625.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	109.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		106.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.520.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**16.880.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH	-	**28.105.000**	
2.11.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				210 Paket	16.880.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		28.105.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**327.105.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH	-	**247.235.000**	
2.11.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.275.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		5.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	53.380.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		57.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	750.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		8.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0004															
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	131.700.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		82.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	24.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		24.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		2.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	110.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		66.335.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**553.993.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH	-	**537.479.000**	
2.11.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.400.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		2.400.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.11.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	267.960.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		263.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	283.633.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		272.079.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**3.223.864.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH	-	**2.159.937.000**	
2.11.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	208.787.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		162.982.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0003	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**														
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				12 Unit	2.885.077.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		1.866.655.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	105.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	DLH		105.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Panjang		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
2.11.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	25.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase limbah yang diolah	49.01 persen			45.02 persen	**1.660.793.000**						49.01 persen	**1.419.546.000**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	53.57 persen			51.09 persen	**852.526.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan	53.57 persen	**979.717.000**	
2.11.03.2.01.0001	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**														
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	542.730.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		541.017.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.0	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.2.01.0002															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	18.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0015	**Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota**														
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	291.046.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		413.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen			76.47 persen	**808.267.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan	76.47 persen	**439.829.000**	
2.11.03.2.02	**Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0001															
		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				3 Laporan	89.368.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		66.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0003	**Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**														
		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				73 Titik	718.899.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		373.829.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,949 persen			2,929 persen	**4.509.357.000**						2,949 persen	**4.402.381.000**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Luas RTH Publik	110.355 Ha			109.607 Ha	**4.509.357.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov	Masyarakat Kota Pekalongan	110.355Ha	**4.402.381.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											Jateng				
2.11.04.2.01.0004	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**														
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				108,53 Ha	3.639.497.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		3.731.936.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0008	**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**														
		Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				34,1 Unit	869.860.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		670.445.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	100,00 persen			13,33 persen	**2.271.000**						15,56 persen	**2.239.000**	
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara	44 persen			6 persen	**2.271.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan	Masyarakat Kota Pekalongan	7 persen	**2.239.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		limbah B3								Iklim	sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng				
2.11.05.2.01.0002	**Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3**														
		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	2.271.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		2.239.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	100,00 persen			16,67 persen	**40.500.000**						16,67 persen	**68.150.000**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	60kegiatan			10 kegiatan	**40.500.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan	10kegiatan	**68.150.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.11.06.2.01.0001	**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**														
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	14.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0005	**Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**														
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				67 Badan Usaha	26.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		38.150.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen			50,00 persen	**283.393.000**						50,00 persen	**455.000.000**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	5komunitas			5 komunitas	**283.393.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan	5komunitas	**455.000.000**	
2.11.08.2.01.0002	**Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup**														
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang				1 Dokumen	52.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Masyarakat Kota Pekalongan		80.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Dilaksanakan						Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
2.11.08.2.01.0003	**Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup**														
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				700 Orang	158.893.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		275.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0005	**Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat**														
		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				9 Lembaga	72.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen			75,00 persen	**63.750.000**						75,00 persen	**95.000.000**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	18penghargaan			3 penghargaan	**63.750.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan	3penghargaan	**95.000.000**	
2.11.09.2.01.0001	**Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**														
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	63.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		95.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen			100,00 persen	**14.625.000**						100,00 persen	**25.000.000**	
2.11.1	**Penyelesaian**	Jumlah kasus lingkungan	36kasu			6 kasus	**14.625.000**			Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Masyarakat	6kasus	**25.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
0.2.01	**Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	yang ditangani	s							Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan			
2.11.10.2.01.0004	**Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota**														
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				18 Pengaduan	12.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0006	**Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**														
		Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Perkara	1.875.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase sampah terkelola di TPS 3R Persentase sampah terangkut ke TPA	0,31 persen			24 persen 76 Persen	**10.555.706.000**						0,31 persen	**12.257.478.000**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengurangan sampah	18.19 persen			17.69 persen	**10.555.706.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Masyarakat Kota Pekalongan	18.19 persen	**12.257.478.000**	
2.11.11.2.01.0004	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				35 Kelompok	551.645.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Masyarakat Kota Pekalongan		422.478.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0005	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	2.472.316.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Masyarakat Kota Pekalongan		4.285.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0020	**Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional**														
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				56324807 Ton	7.531.745.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Masyarakat Kota Pekalongan		7.550.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**5.780.009.000**							**5.833.147.598**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.780.009.000**							**5.833.147.598**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.780.009.000**							**5.833.147.598**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100,00 persen 100,00 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**5.001.122.000**						100,00 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100,00 persen 100,00 persen	**5.093.941.598**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**15.564.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	**37.919.000**	
2.12.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.088.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		10.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.476.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		25.519.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**3.636.751.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Disdukcapil	-	**3.319.890.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
										Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
2.12.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.574.083.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		3.255.240.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	61.300.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		63.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.368.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**10.313.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	**20.487.000**	
2.12.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		9.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0009	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				51 Orang	5.313.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		10.987.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**904.297.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	**1.275.267.598**	
2.12.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	736.437.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		1.085.767.598	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		4.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	36.360.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		39.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0006															
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	83.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**269.447.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	**291.304.000**	
2.12.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	136.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		110.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	129.947.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		178.204.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**164.750.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil	-	**149.074.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.12.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	73.195.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		56.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	25.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		23.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	66.555.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		70.074.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,75 persen			85,30 persen	**354.829.000**						88,75 persen	**336.070.000**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	425259 dokumen			404772 dokumen	**354.829.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan	425259dokumen	**336.070.000**	
2.12.02.2.01.0002	**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				46000 Dokumen	311.208.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		268.570.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	**Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**														
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	17.471.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Masyarakat Kota Pekalongan		31.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Podosugih		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				SIPIL
2.12.02.2.01.0007	**Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan**														
		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2 Laporan	26.150.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		36.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	94,00 persen			93,70 persen	**328.970.000**						94,00 persen	**279.699.000**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	41886dokumen			6981 dokumen	**328.970.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan	6981dokumen	**279.699.000**	
2.12.03.2.01.0001	**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				9285 Dokumen	311.350.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		267.699.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	**Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil**														
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	17.620.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	14,00OPD			10,00 OPD	**95.088.000**						14,00OPD	**123.437.000**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2kali			2 kali	**95.088.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan	2kali	**123.437.000**	
2.12.04.2.03.0003	**Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	27.230.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		26.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005	**Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**														
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	26.350.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		75.437.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0008	**Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan**														
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	41.508.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak						**5.611.035.000**							**5.716.039.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.611.035.000**							**5.716.039.000**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**729.962.000**							**344.788.000**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	11,09 persen			7,39 persen	**264.850.000**						11,09 persen	**77.844.000**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16.67 persen			16.67 persen	**35.000.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	OPD se Kota Pekalongan, Masyarakat/Pegiat Pengarusutamaan Gender (PUG)	16.67 persen	**28.576.000**	
2.08.02.2.01.0003	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG**														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat				30 Perangkat	35.000.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	OPD se Kota Pekalongan,		28.576.000	DINAS PEMBERDAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				Daerah		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Masyarakat/Pegiat Pengarusutamaan Gender (PUG)			AN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	40.00 persen			26.67 persen	**220.000.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Forkom Puspa (Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)	40.00 persen	**35.831.000**	
2.08.02.2.02.0001	**Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**														
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	220.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Forkom Puspa (Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)		35.831.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100.00 persen			100.00 persen	**9.850.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan	100.00 persen	**13.437.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Kabupaten/Kota										pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak				
2.08.02.2.03.0001	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	9.850.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan		13.437.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 persen			23,99 persen	**94.012.000**						23,99 persen	**63.515.000**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen			100 persen	**20.000.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Masyarakat, Tim LPPAR, Tim PPKBM PUSPAGA ELPePar, Tim HIMPSI	100 persen	**27.678.000**	
2.08.03.2.01.0001	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Dokumen	20.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses	Masyarakat, Tim LPPAR, Tim PPKBM PUSPAGA ELPePar, Tim HIMPSI		27.678.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak				
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100.00 persen			100.00 persen	**74.012.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Masyarakat/Korban Tindak Kekerasan	100.00 persen	**35.837.000**	
2.08.03.2.02.0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				88 Layanan	74.012.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Masyarakat/Korban Tindak Kekerasan		35.837.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	55,56 persen			40,74 persen	**224.753.000**						55,56 persen	**154.972.000**	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase forum anak yang aktif	40.63 persen			28.13 persen	**224.753.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat	40.63 persen	**154.972.000**	
2.08.06.2.02	**Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0001															
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	45.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat		39.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Dokumen	137.160.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat		54.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	42.593.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat		61.472.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen			100,00 persen	**146.347.000**						100,00 persen	**48.457.000**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100.00 persen			100,00 persen	**12.300.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Sekolah dan Siswa	100.00 persen	**14.308.000**	
2.08.07.2.01.0003	**Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA**														
		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				1 Kegiatan	12.300.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Sekolah dan Siswa		14.308.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)	100 persen			100 persen	**95.725.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Anak Korban Kekerasan, Keluarga dan Masyarakat	-	**22.729.000**	
2.08.07.2.02.0006	**Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK**														
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				65 Orang	95.725.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan	Anak Korban Kekerasan, Keluarga dan		22.729.000	DINAS PEMBERDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Berkualitas Dan Berdaya Saing	adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Masyarakat			MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen 100 persen			100 persen	**38.322.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	PATBM Kelurahan, Dinas/Instansi /Lembaga terkait	100 persen 100 persen	**11.420.000**	
2.08.07.2.03.0006	**Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/**														
		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				80 Orang	38.322.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	PATBM Kelurahan, Dinas/Instansi /Lembaga terkait		11.420.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**4.881.073.000**							**5.371.251.000**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**3.437.844.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**3.299.595.000**	
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100.00 Persen	**15.762.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan	-	**17.372.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.13.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.204.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		3.522.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.558.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		12.350.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100.00 Persen	**2.768.231.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan	-	**2.725.477.000**	
2.13.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.727.037.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		2.677.327.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.13.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	39.750.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		46.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.444.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		1.650.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100.00 Persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan	-	**8.631.000**	
2.13.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		8.631.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100.00 Persen	**276.751.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan	-	**195.266.000**	
2.13.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				2 Paket	1.730.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	DPMPPA Kota Pekalongan		750.000	DINAS PEMBERDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Bangunan Kantor yang Disediakan						Barat, Medono	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	48.305.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		23.766.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2.800.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	30.636.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		22.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.13.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	184.780.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100.00 Persen	**261.100.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan	-	**177.455.000**	
2.13.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.400.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		2.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	106.200.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		71.355.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.13.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	152.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		103.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100.00 Persen	**111.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan	-	**175.394.000**	
2.13.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	71.960.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		99.594.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	14.040.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		10.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	100,00 persen			66,67 persen	**610.284.000**						100,00 persen	**1.233.952.000**	
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	66.67 persen			11.11 persen	**610.284.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	11.11 persen	**1.233.952.000**	
2.13.03.2.01.0002	**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				4 Dokumen	610.284.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		1.233.952.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	70,37 persen			62,96 persen	**48.520.000**						70,37 persen	**50.164.000**	
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100.00 persen			100.00 persen	**48.520.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan	100.00 persen	**50.164.000**	
2.13.04.2.01.0018	**Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	48.520.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan		50.164.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,92 persen			96,54 persen	**784.425.000**						96,92 persen	**787.540.000**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam	100.00 persen			100.00 persen	**784.425.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	100.00 persen	**787.540.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan kapasitas dan diberdayakan								Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	(LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat			
2.13.05.2.01.0002	**Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	173.963.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat		199.015.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0003	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	75.828.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat		172.875.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0006	**Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	75.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat,		102.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
												Masyarakat			N ANAK
2.13.05.2.01.0007	**Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	52.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat		71.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0009	**Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	407.134.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat		242.650.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Dinas Perhubungan						**27.127.294.000**							**26.757.276.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**27.127.294.000**							**26.757.276.000**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**27.127.294.000**							**26.757.276.000**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**21.428.599.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**19.254.424.000**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**16.257.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan	100 persen	**29.500.000**	
2.15.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.494.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Dinas Perhubungan		11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
2.15.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.763.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		16.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**4.754.264.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan	100 persen	**5.315.588.000**	
2.15.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	4.659.645.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		5.227.588.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	92.985.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		86.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.0	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.02 .0005															
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.634.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	**32.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan	100 persen	**41.000.000**	
2.15.01.2.03 .0004	**Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**														
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	32.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		41.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**145.500.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan	100 persen	**10.000.000**	
2.15.01.2.05 .0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	145.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**652.581.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan	100 persen	**672.500.000**	
2.15.01.2.06 .0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol							
2.15.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	70.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12.881.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	315.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		325.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	153.200.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0009															
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	94.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		87.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**15.335.006.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan	100 persen	**12.375.836.000**	
2.15.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.000.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		12.052.836.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	333.206.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		321.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**492.991.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan	100 persen	**810.000.000**	
2.15.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau				15 Unit	349.066.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Dinas Perhubungan		270.000.000	DINAS PERHUBUNGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				N
2.15.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	85.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				77 Unit	58.925.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,74 persen 0,44ratio 100,00 persen			0,75 persen 95,00 persen 0,44 ratio	**5.698.695.000**						0,74 persen 0,44ratio 100,00 persen	**7.502.852.000**	
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 persen			100 persen	**2.710.948.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan	100 persen	**2.508.451.000**	
2.15.02.2.01.0001	**Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana				1 Dokumen	31.800.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya	Pengguna Jalan		62.000.000	DINAS PERHUBUNGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				N
2.15.02.2.01.0002	**Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				38 Dokumen	2.679.148.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		2.446.451.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	4jenis			4 jenis	**1.710.675.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan	4jenis	**3.246.735.000**	
2.15.02.2.02.0001	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				67 Unit	430.735.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan	Pengguna Jalan		430.735.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.02.0002	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	270.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		1.302.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0003	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan**														
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				41 Unit	735.940.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		1.214.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**														
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				60 Unit	274.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan	Pengguna Jalan		300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1kali			1 kali	**45.000.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan	1kali	**30.000.000**	
2.15.02.2.03.0011	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)**														
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	45.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Jumlah pembinaan dan pengawasan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir dilaksanakan	1080kali			180 kali	**325.850.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan	180kali	**410.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.15.02.2.04.0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	325.850.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		410.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	65.06 persen			65.19 persen	**244.400.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan	65.06 persen	**728.271.000**	
2.15.02.2.05.0001	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				3 Unit	20.880.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		439.271.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0004	**Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4967 Dokumen	113.700.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	99.820.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		104.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0008	**Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**														
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	10.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk**	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	92 persen			92 persen	**593.172.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung	Pengguna Jalan	92 persen	**484.395.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.06.0014	**Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	117.253.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		32.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0015	**Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	25.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0017	**Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan				9 Laporan	450.919.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi	Pengguna Jalan		427.395.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Kabupaten/Provinsi						Kel/Desa		Pelayanan Dasar	yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	83 persen			83 persen	**15.750.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan	83 persen	**15.000.000**	
2.15.02.2.07.0003	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin**														
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				4 Laporan	15.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	12kegiatan			2 kegiatan	**27.900.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan	Pengguna Jalan	2kegiatan	**30.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											transportasi perkotaan				
2.15.02.2.08.0004	**Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	18.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0007	**Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum**														
		Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	9.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jenis Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah Kab/Kota yang difasilitasi	3jenis			3 jenis	**25.000.000**			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan	3jenis	**50.000.000**	
2.15.02.2.09	**Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0002															
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	10.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	15.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Dinas Komunikasi dan Informatika						**13.772.932.000**							**12.755.586.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.772.932.000**							**12.755.586.000**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**13.504.752.000**							**12.476.818.000**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**5.563.081.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**4.862.377.000**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 persen			100 persen	**16.257.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Dinas Kominfo	100 persen	**35.750.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		perangkat daerah								Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
2.16.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.494.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		10.750.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.763.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		23.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**3.948.449.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo	100 persen	**3.330.860.000**	
2.16.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.897.775.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		3.269.360.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49.040.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.16.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.634.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**67.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo	100 persen	**10.700.000**	
2.16.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		10.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0010	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	62.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**434.989.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo	100 persen	**465.937.000**	
2.16.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.087.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		5.600.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan				15 Paket	149.176.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Dinas		118.000.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kominfo			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	3.750.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	111.176.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		120.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		46.800.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	16.800.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		15.690.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	110.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		149.347.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 persen			100 persen	**662.576.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Dinas Kominfo	100 persen	**564.700.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Daerah	Pemerintahan Daerah								Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
2.16.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.400.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		2.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	526.560.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		455.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	133.616.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		107.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**433.810.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas kominfo	100 persen	**454.430.000**	
2.16.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	189.600.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas kominfo		210.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	75.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas kominfo		112.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.16.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				75 Unit	169.210.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas kominfo		132.430.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100,00 persen 1dokumen			100 persen	**5.232.036.000**						100,00 persen 0dokumen	**4.971.618.000**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	92,50 persen			87 persen	**5.232.036.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN	92 persen	**4.971.618.000**	
2.16.02.2.01.0001	**Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**														
		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	55.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		75.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0002	**Monitoring Opini dan Aspirasi Publik**														
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12 Dokumen	145.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0004	**Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	122.884.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		126.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0005	**Pengelolaan Media Komunikasi Publik**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media				8 Dokumen	2.991.014.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Masyarakat dan ASN		3.002.568.000	DINAS KOMUNIKASI DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Komunikasi Publik						Barat, Podosugih	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0006	**Pelayanan Informasi Publik**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				6 Dokumen	204.697.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		387.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0007	**Layanan Hubungan Media**														
		Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	1.112.854.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		930.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0008	**Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**														
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				2 Dokumen	45.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		33.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0009	**Manajemen Komunikasi Krisis**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				12 Dokumen	439.928.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		366.250.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0012	**Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**														
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				12 Dokumen	115.159.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		26.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,30indeks			3,10 indeks	**2.709.635.000**						3,30indeks	**2.642.823.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	66.06 persen			62.42 persen	**1.579.749.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dan Masyarakat	66.06 persen	**1.681.598.000**	
2.16.03.2.01.0002	**Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	5.250.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dan Masyarakat		10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.01.0003	**Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**														
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				3 Unit	1.574.499.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dan Masyarakat		1.671.598.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	51,40 persen			9.35 persen	**1.129.886.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah Kota Pekalongan	9.35 persen	**961.225.000**	
2.16.03.2.02.0002	**Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik**														
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				3 Dokumen	250.020.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah Kota Pekalongan		100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0003	**Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**														
		Jumlah Pusat Data				2 Unit	154.420.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Pemerintah		144.000.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pemerintahan Daerah yang Dikelola						Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0007	**Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**														
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	368.682.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah Kota Pekalongan		449.725.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0009	**Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas**														
		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	297.214.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah Kota Pekalongan		185.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0010	**Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**														
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				8 Dokumen	32.066.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah Kota Pekalongan		45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0012	**Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE**														
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	27.484.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah Kota Pekalongan		37.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**115.500.000**							**107.494.000**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 persen			100,00 persen	**115.500.000**						100,00 persen	**107.494.000**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun	100 persen			2 dokumen	**115.500.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	ASN dan Masyarakat	100 persen	**107.494.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
										Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
2.20.02.2.01.0001	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**														
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				8 Dokumen	115.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dan Masyarakat		107.494.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**152.680.000**							**171.274.000**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen			2,80 persen	**152.680.000**						3,74 persen	**171.274.000**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	56.07 persen			9.35 persen	**113.365.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN	9.35 persen	**141.274.000**	
2.21.02.2.01.0001	**Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	11.250.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN		15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0003	**Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	72.870.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN		30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0004	**Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan				30 Perangkat Daerah	29.245.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	ASN		96.274.000	DINAS KOMUNIKASI DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Keamanan Informasi						Barat, Podosugih	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				INFORMATIKA
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100 persen			100 persen	**39.315.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo	100 persen	**30.000.000**	
2.21.02.2.02.0001	**Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				30 Perangkat Daerah	39.315.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**6.146.648.000**							**3.319.410.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.146.648.000**							**3.319.410.000**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**6.146.648.000**							**3.319.410.000**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**4.661.505.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.480.777.000**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**15.069.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP	100 persen	**30.450.000**	
2.18.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.798.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		10.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.271.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		18.450.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**3.736.657.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP	100 persen	**423.011.000**	
2.18.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.682.079.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		372.911.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	53.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		48.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.178.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.0	**Administrasi Kepegawaian**	Persentase ketercapaian administrasi	100			100 Persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	DPMPTSP	100 persen	**35.447.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.05	**Perangkat Daerah**	kepegawaian perangkat daerah	persen							Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
2.18.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		35.447.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**278.747.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP	100 persen	**318.888.000**	
2.18.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.147.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		76.388.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan				2 Paket	45.000.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	DPMPTSP		45.000.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Logistik Kantor yang Disediakan						Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	59.100.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				712 Dokumen	2.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	110.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		130.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**504.156.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP	100 persen	**502.981.000**	
2.18.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	7.127.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		5.952.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	300.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	197.029.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		197.029.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**121.876.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP	100 persen	**170.000.000**	
2.18.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	86.737.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				92 Unit	20.139.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.0	**PROGRAM PENGEMBANGAN**	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di	6,00dok			1,00	**77.882.000**						1,00dokumen	**143.325.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2	**IKLIM PENANAMAN MODAL**	Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	umen			dokumen									
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah audit ISO yang dilaksanakan Jumlah peraturan penanaman modal yang disusun Jumlah sosialisasi peraturan yang dilaksanakan	6dokumen			1 kali 1 peraturan 1 kali	**37.057.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT	1dokumen	**68.325.000**	
2.18.02.2.01.0001	**Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**														
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				3 Dokumen	37.057.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		68.325.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal yang disusun	5dokumen			1 dokumen	**40.825.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT	1dokumen	**75.000.000**	
2.18.02.2.02.0004	**Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40.825.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan	MASYARAKAT		75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa			infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				SATU PINTU
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen			100,00 persen	**46.930.000**						100,00 persen	**80.620.000**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	11Kegiatan			2 Kegiatan	**46.930.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT	2Kegiatan	**80.620.000**	
2.18.03.2.01.0002	**Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	46.930.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		80.620.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500,00 dokumen			2500,00 dokumen	**846.700.000**						2500,00dokumen	**928.433.000**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	72bulan			12 bulan	**846.700.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi	MASYARAKAT	12bulan	**928.433.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
2.18.04.2.01.0005	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah**														
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	**Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**														
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2500 Pelaku Usaha	515.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		557.820.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	**Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko**														
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				120 Pelaku Usaha	91.700.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		113.413.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0008	**Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				60 Kegiatan Usaha	225.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		237.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Investasi Baru pertahun	40,53Miliar Rupiah			6,82 Miliar Rupiah	**412.043.000**						7,09Miliar Rupiah	**572.043.000**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	848Perusahaan			100 Perusahaan	**412.043.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT	177Perusahaan	**572.043.000**	
2.18.05.2.01.0004	**Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya**														
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				3 Kegiatan Usaha.	70.711.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		80.711.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	**Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**														
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi				360 Pelaku Usaha	260.342.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung	MASYARAKAT		360.342.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	dan Berkeadilan	dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	**Pengawasan Penanaman Modal**														
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				120 Kegiatan Usaha	80.990.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		130.990.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen			100,00 persen	**101.588.000**						100,00 persen	**114.212.000**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota yang disajikan	34aplikasi			6 aplikasi	**101.588.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT	6aplikasi	**114.212.000**	
2.18.06.2.01.0002	**Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**														
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan				12 Dokumen	101.588.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan	MASYARAKAT		114.212.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Dimanfaatkan									berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						**4.868.436.000**							**4.150.825.270**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.868.436.000**							**4.150.825.270**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**840.911.000**							**521.126.000**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,58indeks			16,25 indeks	**830.911.000**						16,58indeks	**521.126.000**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	3.33 persen			2 persen	**410.231.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus	3.33 persen	**276.252.250**	
2.23.02.2.01.0001	**Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik**														
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)				800 Layanan	106.626.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		101.737.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0004	**Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan**														
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan				64 Perpustaka	70.339.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	Dinarpus		35.054.750	DINAS KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				an		Pekalongan Utara, Panjang Wetan	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0006	**Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				130 Orang	44.140.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		54.254.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0007	**Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	139.126.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		20.650.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0009	**Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				300 Eksemplar	50.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		64.554.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kenaikan Nilai Budaya Baca	34.45 persen			33.77 persen	**420.680.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus	34.45 persen	**244.873.750**	
2.23.02.2.02.0001	**Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat**														
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				1 Lokus	30.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		41.795.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0002	**Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Perpustakaan				2	45.000.000	- Kota	DANA	Meningkatkan	2. Peningkatan kualitas sumber	Dinarpus		68.693.750	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Perpustakaan		Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0003	**Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca**														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				1 Orang	27.680.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		43.695.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0004	**Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial**														
		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				3 Perpustakaan	300.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		90.690.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02	**Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0005															
		Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				1 Orang	18.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1regulasi			1 regulasi	**10.000.000**						0regulasi	**-**	
2.23.03.2.02	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) (IKK Output)	5koleksi			5 koleksi	**10.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus	0koleksi	**-**	
2.23.03.2.02.0002	**Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara**														
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				4 Eksemplar	10.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**4.027.525.000**							**3.629.699.270**	
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**3.545.845.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**3.130.576.270**	
2.24.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan**	Persentase ketercapaian perencanaan,	100 persen			100 persen	**29.882.000**			Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Dinarpus	-	**18.600.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah								Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
2.24.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.863.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		10.250.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3.009.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		1.350.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	23.010.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		7.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**2.600.819.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus	-	**2.326.126.000**	
2.24.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.555.575.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		2.277.326.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen				12	43.800.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Dinarpus		47.500.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Dokumen		Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.444.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		1.300.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus	-	**9.500.000**	
2.24.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		9.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**162.892.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus	-	**217.470.970**	
2.24.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.690.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		4.686.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	47.285.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Dinarpus		109.655.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Panjang Wetan		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				N
2.24.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1.686.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		1.686.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	42.831.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		53.281.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.900.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		5.706.450	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		2.141.290	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	55.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		40.314.830	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.0	**Penyediaan Jasa**	Persentase ketercapaian	100			100 persen	**515.652.000**			Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Dinarpus	-	**388.370.300**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.08	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen							Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
2.24.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.200.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		1.800.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	364.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		303.858.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	149.952.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		82.712.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**231.600.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus	-	**170.509.000**	
2.24.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	85.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		76.889.550	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	119.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		67.119.450	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				61 Unit	27.600.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		26.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	52,50indeks 66,67 persen			53,33 persen 47,50 indeks	**319.504.000**						52,50indeks 66,67 persen	**341.306.000**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	32.26 persen			32.26 persen	**251.325.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus	32.26 persen	**253.518.000**	
2.24.02.2.01.0002	**Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis**														
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				3 Berkas	179.782.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		169.769.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.01.0003	**Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Laporan	71.543.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		83.748.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.0	**Pengelolaan Arsip**	Persentase Jumlah Arsip	20			16 persen	**41.600.000**			Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Dinarpus	20 persen	**42.727.330**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.2.02	**Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	persen							Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
2.24.02.2.02.0002	**Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis**														
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				3 Arsip	41.600.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		42.727.330	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	90 persen			80 persen	**26.579.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus	90 persen	**45.060.670**	
2.24.02.2.03.0002	**Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	26.579.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		45.060.670	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen			100 persen	**162.176.000**						100 persen	**157.817.000**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	100 persen			100 persen	**105.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus	100 persen	**93.980.750**	
2.24.03.2.01.0001	**Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**														
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan				2500 Arsip	80.000.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Dinarpus		75.838.250	DINAS KEARSIPAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.01.0002	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**														
		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				2500 Berkas	25.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		18.142.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen			100 persen	**57.176.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus	100 persen	**63.836.250**	
2.24.03.2.04.0002	**Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip**														
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				900 Arsip	57.176.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		63.836.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Dinas Kelautan dan Perikanan						**9.271.875.000**							**9.066.514.000**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.271.875.000**							**9.066.514.000**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**9.271.875.000**							**9.066.514.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**5.822.520.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**5.167.991.000**	
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**15.564.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP	100 persen	**30.500.000**	
3.25.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat				2 Dokumen	2.088.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	DKP		10.750.000	DINAS KELAUTAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Daerah						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				PERIKANAN
3.25.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.476.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		1.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		18.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**3.814.503.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kelautan dan Perikanan	100 persen	**4.099.349.000**	
3.25.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.754.515.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kelautan dan Perikanan		4.037.849.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.620.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kelautan dan Perikanan		60.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan				1 Laporan	1.368.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Dinas		1.500.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelautan dan Perikanan			KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen			100 Persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP	100 persen	**9.500.000**	
3.25.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		9.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**257.324.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP	100 persen	**243.250.000**	
3.25.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7.348.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	71.910.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		41.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	DKP		4.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Panjang Wetan		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
3.25.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	53.566.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		68.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		2.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	110.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		112.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**535.022.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP	100 persen	**253.622.000**	
3.25.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat				12 Laporan	1.700.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	DKP		1.800.000	DINAS KELAUTAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Menyurat						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	179.475.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		145.022.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	353.847.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		106.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**1.195.107.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP	100 persen	**531.770.000**	
3.25.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	153.919.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		120.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.011.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		389.270.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	30.188.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		22.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	6,15 persen 6,15 persen			1,00 persen 1,00 persen	**2.696.675.000**						1,00 persen 1,00 persen	**2.531.536.000**	
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 persen			5 persen	**210.955.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DKP, Masyarakat Kota Pekalongan.	5 persen	**147.716.000**	
3.25.03.2.01.0001	**Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**														
		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	41.175.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DKP, Masyarakat Kota Pekalongan.		29.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01.0002	**Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap**														
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Unit	69.780.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi	DKP, Masyarakat Kota Pekalongan.		67.916.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Utara, Degayu			dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.25.03.2.01.0003	**Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**														
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				1 Unit	100.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DKP, Masyarakat Kota Pekalongan.		50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	10 persen			100 persen	**58.268.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Nelayan dan masyarakat Kota Pekalongan	10 persen	**80.050.000**	
3.25.03.2.02.0001	**Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil**														
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	34.013.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Nelayan dan masyarakat Kota Pekalongan		35.050.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02.0002	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil**														
		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan				19 Kelompok	24.255.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	Nelayan dan masyarakat Kota		45.000.000	DINAS KELAUTAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		dan Pengembangan Kelembagaannya						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pekalongan			PERIKANAN
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	6,15 persen			1 persen	**2.427.452.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DKP,masyarakat dan nelayan Kota Pekalongan	1 persen	**2.303.770.000**	
3.25.03.2.03.0002	**Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**														
		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	2.427.452.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DKP,masyarakat dan nelayan Kota Pekalongan		2.303.770.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	6,15 persen			1,00 persen	**294.382.000**						1,00 persen	**309.993.000**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen			100 persen	**294.382.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**309.993.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.25.04.2.04.0001	**Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	13.998.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002	**Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	13.801.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		118.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0003	**Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	208.880.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0004	**Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah				4 Dokumen	20.400.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	Masyarakat Kota		25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan						Utara, Panjang Wetan	ALOKASI UMUM	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pekalongan			PERIKANAN
3.25.04.2.04.0005	**Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat**														
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				30 Orang	37.303.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		101.993.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,00pelaku usaha 12,20 persen			2,00 pelaku usaha 12,20 persen	**458.298.000**						2,00pelaku usaha 12,20 persen	**1.056.994.000**	
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	16.67 persen			16.67 persen	**33.939.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan	16.67 persen	**42.705.000**	
3.25.06.2.02.0001	**Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**														
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada				344 Unit Usaha	33.939.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	Masyarakat Kota Pekalongan		42.705.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko									09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen			70 persen	**424.359.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan	70 persen	**1.014.289.000**	
3.25.06.2.03.0002	**Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				30 Pelaku Usaha	424.359.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		1.014.289.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga						**24.006.153.000**							**23.556.574.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.322.034.000**							**7.777.224.000**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**9.095.889.000**							**4.071.229.000**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**305.000.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**309.500.000**	
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**305.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinparbudpora	-	**309.500.000**	
2.19.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian				3 Paket	5.000.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Dinparbudpor		9.500.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Dinas beserta Atribut Kelengkapan						Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	a			PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.05.0010	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	300.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinparbudpora		300.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	95,24 persen			94,31 persen	**910.520.000**						95,24 persen	**381.760.000**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)	0.99 persen			0.76 Persen	**300.520.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemuda	0.99 persen	**300.700.000**	
2.19.02.2.01.0002	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula**														
		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemuda		-	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0003	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				48 Orang	100.520.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemuda		150.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.19.02.2.01.0008	**Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda**														
		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				300 Orang	150.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemuda		150.700.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)	0.621 persen			0.505 Persen	**610.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Organisasi Kepemudaan	0.621 persen	**81.060.000**	
2.19.02.2.02.0002	**Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	610.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Organisasi Kepemudaan		81.060.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	42,86 persen			34,29 persen	**7.880.369.000**						42,86 persen	**3.379.969.000**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan	80.95 persen			76.19 Persen	**1.691.493.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet	80.95 persen	**1.802.172.000**	
2.19.03.2.01.0003	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1.691.493.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		1.802.172.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.0	**Penyelenggaraan**	Peningkatan prestasi	47.62			38.1	**4.028.500.000**			Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Atlet	47.62 persen	**955.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.2.02	**Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	olahraga tingkat kota	persen			Persen				Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
2.19.03.2.02.0002	**Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				21 Dokumen	3.772.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		735.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0003	**Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan**														
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				71 Orang	256.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		220.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	205orang			39 orang	**2.057.469.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet	43orang	**519.890.000**	
2.19.03.2.03.0001	**Seleksi Atlet Daerah**														
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				200 Orang	206.020.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		215.800.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0002	**Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)**														
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	100.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		120.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0003	**Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				5 Orang	1.751.449.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		184.090.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	24Event			4 Event	**102.907.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet	4Event	**102.907.000**	
2.19.03.2.05.0001	**Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Dokumen	102.907.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		102.907.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.226.145.000**							**3.705.995.000**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen			100 persen	**1.567.098.000**						100 persen	**1.722.149.000**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	32Event			6 Event	**1.107.598.000**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas Seni	6Event	**982.000.000**	
2.22.02.2.01.0001	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**														
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				41 Objek	1.107.598.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas Seni		982.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam**	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	52Event			10 Event	**459.500.000**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Komunitas	10Event	**740.149.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Daerah Kabupaten/Kota										10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya				
2.22.02.02.0001	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya**														
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	459.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas		740.149.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen			100,00 persen	**202.540.000**						100,00 persen	**487.615.000**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	135komunitas			26 komunitas	**202.540.000**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas	26komunitas	**487.615.000**	
2.22.03.2.01.0003	**Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional**														
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	202.540.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas		487.615.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 persen			100,00 persen	**40.000.000**						100,00 persen	**67.184.000**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi	100 persen			100 Persen	**40.000.000**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Sejarawan	100 persen	**67.184.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.22.04.2.01.0003	**Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah**														
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	40.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Sejarawan		67.184.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	97,52 persen			93,97 persen	**27.500.000**						97,52 persen	**49.900.000**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Obyek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pemberian tanda bukti kepemilikan dan keaslian cagar budaya Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.19 persen			3 obyek 3 Buah 2.48 Persen	**27.500.000**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Cagar Budaya	3.19 persen	**49.900.000**	
2.22.05.2.01.0001	**Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya**														
		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				3 Objek	27.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Cagar Budaya		49.900.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase pengunjung museum batik	4,80 persen			4,71 persen	**1.389.007.000**						4,80 persen	**1.379.147.000**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah pengunjung museum batik	139000 Orang			28000 Orang	**1.389.007.000**			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Masyarakat	30000Orang	**1.379.147.000**	
2.22.06.2.01	**Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0001															
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				1310 Unit	240.597.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Masyarakat		240.597.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2.01.0003	**Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum**														
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				4 Unit	1.016.289.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Masyarakat		1.017.339.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2.01.0004	**Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				9 Unit	132.121.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Masyarakat		121.211.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.684.119.000**							**15.779.350.000**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**11.684.119.000**							**15.779.350.000**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**5.999.767.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**6.311.726.000**	
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan	100 persen			100 Persen	**18.121.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Pelayanan Publik	-	**33.310.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Perangkat Daerah	evaluasi kinerja perangkat daerah								Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
3.26.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.538.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		10.750.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.583.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		4.110.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		18.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**4.844.418.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik	-	**4.754.630.000**	
3.26.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4.772.124.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		4.675.820.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan				12 Dokumen	69.900.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Pelayanan Publik		74.700.000	DINAS PARIWISATA,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Pekalongan Utara, Panjang Wetan	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.394.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		4.110.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**377.988.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik	-	**402.250.000**	
3.26.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		7.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	117.688.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	55.300.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		58.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	19.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		2.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230 Laporan	168.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		203.750.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**559.200.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik	-	**559.200.000**	
3.26.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.400.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		2.400.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0002															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	324.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		324.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	232.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		232.800.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**200.040.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik	-	**562.336.000**	
3.26.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	111.640.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		108.156.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	68.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		434.180.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12,50 persen			11,50 persen	**3.909.090.000**						12,50 persen	**7.743.472.000**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi	100 persen			100 Persen	**226.000.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Wisman/Wisnus	100 persen	**2.946.649.000**	
3.26.02.2.01.0005	**Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	217.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Wisman/Wisnus		2.926.649.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.01.0007	**Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	9.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Wisman/Wisnus		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100 persen			100 Persen	**3.673.090.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung	Wisman/Wisnus	100 persen	**4.776.823.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
										dan Berkeadilan	dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.26.02.2.03.0003	**Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	220.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Wisman/Wisnus		400.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03.0004	**Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	600.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Wisman/Wisnus		474.223.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03.0007	**Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	2.853.090.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif	Wisman/Wisnus		3.902.600.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											yang kondusif				
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi	100 persen			100 Persen	**10.000.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Usaha	100 persen	**20.000.000**	
3.26.02.2.04.0009	**Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota**														
		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				5 Dokumen	10.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Usaha		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	46,98 persen			36,98 persen	**675.000.000**						46,98 persen	**1.037.528.000**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	25 persen			25 Persen	**675.000.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Usaha Pariwisata dan Wisatawan	25 persen	**1.037.528.000**	
3.26.03.2.01.0003	**Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan				2 Dokumen	350.000.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	Pelaku Usaha Pariwisata dan		265.028.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Wisatawan			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0004	**Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri**														
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	200.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Usaha Pariwisata dan Wisatawan		495.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0006	**Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	100.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Usaha Pariwisata dan Wisatawan		224.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0007	**Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	25.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Pelaku Usaha Pariwisata dan Wisatawan		53.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	59,52 persen			41,67 persen	**278.262.000**						59,52 persen	**447.890.000**	
3.26.04.2.01	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Penyelenggaraan EKRAF EXPO	6event			1 event	**253.262.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif	1event	**447.890.000**	
3.26.04.2.01.0001	**Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	253.262.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		447.890.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Persentase ketercapaian pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	100 persen			100 Persen	**25.000.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif	100 persen	**-**	
3.26.04.2.02	**Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0022															
		Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				25 Produk	25.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		-	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100 persen			60,00 persen	**822.000.000**						100,00 persen	**238.734.000**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	14.29 persen			16.67 Persen	**792.000.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif	14.29 persen	**208.734.000**	
3.26.05.2.01.0005	**Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif**														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	400.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0006	**Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif**														
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan				50 Orang	30.000.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	Pelaku Ekonomi Kreatif		28.734.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0009	**Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata**														
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				100 Orang	300.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0010	**Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				30 Orang	50.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		50.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0011	**Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**														
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Pelaku Ekonomi Kreatif		10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Persentase Ketercapaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 persen			100 Persen	**30.000.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif	100 persen	**30.000.000**	
3.26.05.2.02.0001	**Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				60 Orang	30.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Dinas Pertanian dan Pangan						**7.764.241.000**							**8.282.162.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**468.342.000**							**784.975.000**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**468.342.000**							**784.975.000**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase cadangan pangan daerah	4,80 persen			4,60 persen	**383.342.000**						4,80 persen	**724.955.000**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen			100 persen	**137.316.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**69.400.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.09.03.2.01.0002	**Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**														
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	108.816.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		32.600.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0015	**Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan**														
		Informasi Harga dan Pasokan Pangan				12 Dokumen	13.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		16.800.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0016	**Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)**														
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	15.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah cadangan pangan daerah	5625Kg			5300 Kg	**197.553.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas	Masyarakat Kota Pekalongan	5625Kg	**125.555.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.09.03.2.02.0002	**Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal**														
		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	11.250.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.02.0003	**Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	186.303.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		100.555.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan	20kegiatan			3 kegiatan	**48.473.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DINPERPA	3kegiatan	**530.000.000**	
2.09.03.2.04.0002	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	48.473.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DINPERPA		530.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen			100,00 persen	**30.500.000**						100,00 persen	**17.918.000**	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	4kecamatan			4 kecamatan	**30.500.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan	4kecamatan	**17.918.000**	
2.09.04.2.01.0001	**Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**														
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	30.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		17.918.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	88,00 persen			84,80 persen	**54.500.000**						88,00 persen	**42.102.000**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan**	Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan	174sample			25 sample	**54.500.000**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan	Masyarakat Kota Pekalongan	26sample	**42.102.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Segar Daerah Kabupaten/Kota	keamanan pangan								Berkualitas Dan Berdaya Saing	adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.09.05.2.01.0007	**Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	54.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		42.102.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.295.899.000**							**7.497.187.000**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**7.295.899.000**							**7.497.187.000**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**6.038.840.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**6.578.373.000**	
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**16.554.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA	100 persen	**31.350.000**	
3.27.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.668.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		12.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kertoharjo							
3.27.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.886.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		1.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		17.700.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.352.384.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA	100 persen	**6.067.694.000**	
3.27.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	5.263.365.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		5.984.873.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	87.271.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		81.171.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil				1 Laporan	1.748.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	DINPERPA		1.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Selatan, Kuripan Kertoharjo	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA	100 persen	**9.500.000**	
3.27.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		9.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**250.944.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA	100 persen	**142.955.000**	
3.27.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	1.250.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		1.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	84.694.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		36.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.27.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	40.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	110.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		50.205.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen			100 persen	**285.668.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperpa	100 persen	**270.174.000**	
3.27.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Dinperpa		2.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kertoharjo		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
3.27.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperpa		120.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	163.668.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperpa		148.174.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen			100 persen	**128.290.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA	100 persen	**56.700.000**	
3.27.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	68.290.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		38.200.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		8.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				30 Unit	10.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	DINPERPA		10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Selatan, Kuripan Kertoharjo	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Nilai produksi pertanian pertahun Nilai produksi peternakan pertahun	203,65 Miliar Rupiah 55,84Miliar Rupiah			55,73 Miliar Rupiah 195,75 Miliar Rupiah	**284.730.000**						203,65Miliar Rupiah 55,84Miliar Rupiah	**220.275.000**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen			100 persen	**95.711.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**105.515.000**	
3.27.02.2.01.0002	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**														
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	95.711.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		105.515.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota	100 persen			100 persen	**62.905.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**77.260.000**	
3.27.02.2.02.0002	**Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	17.300.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.02.0004	**Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman**														
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				3 Varietas Unggul Baru (VUB)	45.605.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		52.260.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29kali			5 kali	**59.114.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan	5kali	**20.500.000**	
3.27.02.2.03.0002	**Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak**														
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				6 Laporan	59.114.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Masyarakat Kota Pekalongan		20.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kenaikan pelayanan ULIB	34,01 persen			5 persen	**67.000.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan	5 persen	**17.000.000**	
3.27.02.2.05.0008	**Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak**														
		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				200 Laporan	67.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		17.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen			100,00 persen	**313.518.000**						100,00 persen	**318.907.000**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)	100 persen			100 persen	**313.518.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**318.907.000**	
3.27.03.2.02.0009	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**														
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang				1 Unit	51.500.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya	Masyarakat Kota		54.500.000	DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara						Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pekalongan			DAN PANGAN
3.27.03.2.02.0010	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**														
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	174.518.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/ RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		244.407.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03.2.02.0015	**Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan**														
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	87.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen			5,00 persen	**434.053.000**						5,00 persen	**227.350.000**	
3.27.0	**Penjaminan Kesehatan Hewan,**	Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang	800kas			800 kasus	**43.478.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya	Masyarakat Kota	800kasus	**56.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
4.2.01	**Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	tertangani	us							Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pekalongan			
3.27.04.2.01.0008	**Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	43.478.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		56.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak	100 persen			100 persen	**11.250.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DINPERPA	100 persen	**15.000.000**	
3.27.04.2.02.0004	**Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)**														
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				6 laporan	11.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DINPERPA		15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN	3.000ekor			500 ekor	**176.825.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan	500ekor	**35.000.000**	
3.27.04.2.03.0002	**Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner**														
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	176.825.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen			100 persen	**202.500.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**121.350.000**	
3.27.04.2.04.0002	**Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan**														
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	37.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Masyarakat Kota Pekalongan		37.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.04.2.04.0010	**Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan**														
		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				12 Unit Usaha	165.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		83.850.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen			100,00 persen	**48.290.000**						100,00 persen	**53.746.000**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	20kali			4 kali	**48.290.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DINPERPA	4kali	**53.746.000**	
3.27.05.2.01.0001	**Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**														
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1 Ha	18.750.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DINPERPA		25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.0	**Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
5.2.01.0007															
		Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				2 laporan	29.540.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DINPERPA		28.746.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100,00 persen			75,00 persen	**30.968.000**						100,00 persen	**31.352.000**	
3.27.06.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin	26,49 persen			5 persen	**30.968.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DINPERPA	5 persen	**31.352.000**	
3.27.06.2.02.0005	**Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan**														
		Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi				1 Laporan	30.968.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DINPERPA		31.352.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen			5,00 persen	**145.500.000**						5,00 persen	**67.184.000**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen			100 persen	**145.500.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**67.184.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
										dan Berkeadilan	dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.07.2.01.0001	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**														
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	35.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07.2.01.0002	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**														
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	110.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		42.184.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						**19.973.875.000**							**19.973.075.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.427.287.000**							**1.980.315.000**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**1.427.287.000**							**1.980.315.000**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	33,23 persen			31,49 persen	**108.219.000**						33,23 persen	**116.452.000**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam**	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah	65.29 persen			63.64 persen	**108.219.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi	Koperasi	65.29 persen	**116.452.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota								dan Berkeadilan	yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
2.17.03.2.01.0004	**Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				100 Unit Usaha	108.219.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Koperasi		116.452.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	59,68 persen			58,77 persen	**631.070.000**						59,68 persen	**645.601.000**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1.39 persen			0.98 persen	**631.070.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Koperasi dan anggota koperasi	1.39 persen	**645.601.000**	
2.17.05.2.01.0001	**Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**														
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				300 Orang	631.070.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Koperasi dan anggota koperasi		645.601.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Semua Kel/Desa	FISIK		pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,37 persen			12,16 persen	**687.998.000**						12,37 persen	**1.218.262.000**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	7.26UMKM			4.85 UMKM	**687.998.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	7.26UMKM	**1.218.262.000**	
2.17.08.2.01.0002	**Pengembangan Usaha Mikro**														
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				300 Unit Usaha	687.998.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Usaha Mikro Kecil dan Menengah		1.218.262.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**18.546.588.000**							**17.992.760.000**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**18.546.588.000**							**17.992.760.000**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**9.168.993.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**8.912.794.000**	
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**15.663.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan	100 persen	**30.800.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.30.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.146.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan		10.700.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.517.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan		1.650.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan		18.450.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**7.447.045.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	100 persen	**7.678.274.000**	
3.30.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	7.377.839.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		7.603.424.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	67.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		73.200.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				MENENGAH
3.30.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.406.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		1.650.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pegawai Dindagkop dan UKM	100 persen	**14.500.000**	
3.30.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pegawai Dindagkop dan UKM		14.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**335.403.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	100 persen	**317.450.000**	
3.30.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		2.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	75.053.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		47.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.0	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.06 .0003															
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		2.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06 .0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	82.850.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		64.950.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06 .0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		60.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06 .0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		2.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06 .0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	110.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		137.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**831.307.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	100 persen	**517.330.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.30.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		2.400.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	337.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		414.517.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	491.907.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100.413.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**534.575.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	100 persen	**354.440.000**	
3.30.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				36 Unit	478.075.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		304.440.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	30.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		30.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				MENENGAH
3.30.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	26.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		20.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	77,70 persen			76,17 persen	**16.800.000**						77,70 persen	**2.688.000**	
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen			100 persen	**8.400.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan	100 persen	**1.688.000**	
3.30.02.2.01.0001	**Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**														
		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				8 Dokumen	8.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan		1.688.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.0	**Penerbitan Tanda**	Persentase Tanda Daftar	100			100 persen	**8.400.000**			Memperkuat	1. Peningkatan kapasitas	Gudang	100 persen	**1.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.2.02	**Daftar Gudang**	Gudang yang diterbitkan	persen							Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.30.02.02.0001	**Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang**														
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	8.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Gudang		1.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100,00 persen			93,75 persen	**8.121.372.000**						100,00 persen	**7.986.463.000**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18.75 persen			12.5 persen	**8.053.772.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)	18.75 persen	**7.864.463.000**	
3.30.03.2.01.0001	**Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan**														
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2.000.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan	Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)		2.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa			infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				MENENGAH
3.30.03.2.01.0002	**Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**														
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	6.053.772.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)		5.864.463.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	68.97 persen			45.98 Persen	**67.600.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pedagang pasar dan PK5	68.97 persen	**122.000.000**	
3.30.03.2.02.0001	**Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	67.600.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pedagang pasar dan PK5		122.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN**	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang	100,00 persen			92,00 persen	**119.405.000**						100,00 persen	**135.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	POKOK DAN BARANG PENTING	terlaksana pemantauanya													
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	100 persen			72.73 persen	**110.890.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat	100 persen	**130.000.000**	
3.30.04.2.02.0001	**Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				18 Laporan	110.890.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat		130.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome) Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen			100 persen undefined undefined	**8.515.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pupuk dan pestisida bersubsidi	100 persen	**5.000.000**	
3.30.04.2.03.0003	**Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**														
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				3 Laporan	8.515.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	Pupuk dan pestisida bersubsidi		5.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase peningkatan volume ekspor	8,19 persen			7,79 persen	**135.017.000**						8,19 persen	**116.093.000**	
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir	27pelaku usaha			25 pelaku usaha	**135.017.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pengusaha potensi ekspor	27pelaku usaha	**116.093.000**	
3.30.05.2.01.0005	**Peningkatan Citra Produk Ekspor**														
		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				30 Produk	135.017.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pengusaha potensi ekspor		116.093.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	83,99 persen			79,99 persen	**308.296.000**						83,99 persen	**425.707.000**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	83.99 persen			79.99 persen	**308.296.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pedagang	83.99 persen	**425.707.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.30.06.2.01.0001	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**														
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				5038 Unit	274.186.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pedagang		380.707.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06.2.01.0002	**Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal**														
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				30 Orang	34.110.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pedagang		45.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	7,50 persen			5,34 persen	**676.705.000**						7,50 persen	**414.015.000**	
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen			100 persen	**676.705.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Usaha Mikro	100 persen	**414.015.000**	
3.30.07.2.01.0005	**Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				128 UMKM	566.535.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Usaha Mikro		370.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07.2.01.0006	**Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota**														
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				30 UMKM	110.170.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Usaha Mikro		44.015.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						**12.566.722.000**							**12.030.887.100**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.455.775.000**							**4.732.546.000**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4.455.775.000**							**4.732.546.000**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,55 persen			0,46 persen	**3.312.225.000**						0,55 persen	**3.445.141.000**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen			100 persen	**3.123.200.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Pencari Kerja	100 persen	**3.123.200.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
2.07.03.2.01.0001	**Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**														
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				1972 Orang	2.645.146.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Pencari Kerja		2.645.146.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0002	**Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja**														
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	242.593.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Pencari Kerja		242.593.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0003	**Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				39 Unit	235.461.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja	Pencari Kerja		235.461.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 persen			80 persen	**67.214.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	LPKS Kota Pekalongan	100 persen	**136.326.000**	
2.07.03.2.02.0001	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**														
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				20 Lembaga	67.214.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	LPKS Kota Pekalongan		136.326.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	6tenant			6 tenant	**76.510.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Tenant Kota Pekalongan	6tenant	**97.884.000**	
2.07.03.2.04	**Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0001															
		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				6 Perusahaan	76.510.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Tenant Kota Pekalongan		97.884.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	53.33 persen			40.00 persen	**45.301.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan	53.33 persen	**87.731.000**	
2.07.03.2.05.0001	**Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				2 Dokumen	45.301.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan		87.731.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	29,93 persen			25,93 persen	**693.181.000**						29,93 persen	**1.011.696.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)													
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	14.08 persen			11.86 persen	**425.947.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	1. Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB	14.08 persen	**454.878.000**	
2.07.04.2.01.0001	**Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja**														
		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				120 Orang	18.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	1. Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB		90.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0003	**Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**														
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				210 Orang	32.072.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja,	1. Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja		45.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Transmigrasi, WUB			
2.07.04.2.01.0004	**Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan**														
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				20 Orang	8.625.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	1. Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB		20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0005	**Perluasan Kesempatan Kerja**														
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				83 Orang	366.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	1. Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB		299.878.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	72buku			12 buku	**163.124.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leafleat, 3. Perusahaan	12buku	**191.076.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.04.2.03.0001	**Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online**														
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	56.244.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leafleat, 3. Perusahaan		56.244.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0002	**Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online**														
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				700 Orang	10.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leafleat, 3. Perusahaan		17.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0003	**Job Fair/Bursa Kerja**														
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	96.380.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leafleat, 3. Perusahaan		117.832.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	249orang			44 orang	**104.110.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	CPMI Kota Pekalongan	54orang	**365.742.000**	
2.07.04.2.04.0001	**Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)**														
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				60 Orang	75.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	CPMI Kota Pekalongan		335.742.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.04.0002	**Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran**														
		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				102 Orang	29.110.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja,	CPMI Kota Pekalongan		30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	49,02 persen			47,51 persen	**450.369.000**						49,02 persen	**275.709.000**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	42.28 persen			40.17 persen	**328.864.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perusahaan di Kota Pekalongan	42.28 persen	**114.661.000**	
2.07.05.2.01.0001	**Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan**														
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				40 Perusahaan	19.150.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perusahaan di Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0002	**Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan**														
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				30 Perusahaan	13.614.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi	Perusahaan di Kota Pekalongan		18.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		dan Berkeadilan	yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.05.2.01.0003	**Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**														
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				13 Laporan	296.100.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perusahaan di Kota Pekalongan		71.661.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	80.06 persen			72.45 persen	**121.505.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh	80.06 persen	**161.048.000**	
2.07.05.2.02.0001	**Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah				25 Perkara	11.534.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat		15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Pekerja/Serikat Buruh			
2.07.05.2.02.0002	**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	7.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh		12.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0003	**Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi**														
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				80 Asosiasi dan Serikat Pekerja	16.758.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh		22.048.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0004	**Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	74.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi		97.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	dan Berkeadilan	dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh			KERJA
2.07.05.2.02.0005	**Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja**														
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				40 Orang	11.463.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh		15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.110.947.000**							**7.298.341.100**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**8.110.947.000**							**7.298.341.100**	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**7.550.493.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**6.653.916.000**	
3.31.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**17.148.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperinaker	100 persen	**27.656.000**	
3.31.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.016.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperinaker		10.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.132.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperinaker		250.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperinaker		16.906.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**6.644.072.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER	100 persen	**5.807.631.000**	
3.31.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	6.590.696.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		5.743.131.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan				12 Dokumen	51.400.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	DINPERINAKER		62.000.000	DINAS PERINDUSTRIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				N DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.976.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		2.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER	100 persen	**9.500.000**	
3.31.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		9.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**234.873.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER	100 persen	**229.678.000**	
3.31.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		3.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	95.873.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		56.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa							
3.31.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	3.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	39.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		44.678.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		7.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.600.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		3.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	83.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		111.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa	100 persen			100 persen	**501.100.000**			Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	DINPERINAKER	100 persen	**482.477.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
3.31.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		2.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	255.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		228.867.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	243.700.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		251.210.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**148.300.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER	100 persen	**96.974.000**	
3.31.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	98.300.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		35.556.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor				2 Unit	30.000.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	DINPERINAK		41.418.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ER			PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	20.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	21,04 persen			20,75 persen	**455.853.000**						21,04 persen	**491.010.300**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.5 persen			3.5 persen	**455.853.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan	4.5 persen	**491.010.300**	
3.31.02.2.01.0002	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	13.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		22.880.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0003	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	203.030.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		117.562.500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0004	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	135.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		198.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0005	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	66.523.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		97.567.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0006	**Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri**														
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	37.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota		55.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pekalongan			
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	26,00 persen			25,00 persen	**10.221.000**						26,00 persen	**14.990.800**	
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	33 persen			28 persen	**10.221.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	IKM Kota Pekalongan, Pemkot Pekalongan	33 persen	**14.990.800**	
3.31.03.2.01.0003	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota**														
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	10.221.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	IKM Kota Pekalongan, Pemkot Pekalongan		14.990.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**94.380.000**						100,00 persen 100,00 persen	**138.424.000**	
3.31.0	**Penyediaan Informasi Industri**	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi	35			30 persen	**94.380.000**			Memperkuat Ketahanan Ekonomi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya	Industri, Sentra IKM,	35 persen	**138.424.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
4.2.01	**untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	persen							Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	IKM Kota Pekalongan			
3.31.04.2.01.0001	**Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	90.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan		132.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04.2.01.0002	**Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas**														
		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	4.380.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan		6.424.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Sekretariat Daerah						**15.133.669.000**							**14.177.010.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.133.669.000**							**14.177.010.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**15.133.669.000**							**14.177.010.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen 100			100 persen	**15.133.669.000**						100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	**14.177.010.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
			persen 100 persen 100 persen												
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**15.133.669.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah	100 persen	**14.177.010.000**	
4.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	15.133.669.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah		14.177.010.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Bagian Pemerintahan						**772.859.000**							**858.996.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**772.859.000**							**858.996.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**772.859.000**							**858.996.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**772.859.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**858.996.000**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	100 persen			100 persen	**684.565.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para ASN dan Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**788.996.000**	
4.01.02.2.01.0001	**Penataan Administrasi Pemerintahan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	88.261.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para ASN dan Masyarakat Kota Pekalongan		349.417.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002	**Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	458.653.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para ASN dan Masyarakat Kota Pekalongan		247.509.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0003	**Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	137.651.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para ASN dan Masyarakat Kota Pekalongan		192.070.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase efektivitas kerja sama daerah	100 persen			100 persen	**88.294.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para ASN dan Instansi Vertikal	100 persen	**70.000.000**	
4.01.02.2.04.0001	**Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri**														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				70 Dokumen	88.294.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para ASN dan Instansi Vertikal		70.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	Bagian Hukum						**793.832.000**							**793.832.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**793.832.000**							**793.832.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**793.832.000**							**793.832.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**793.832.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**793.832.000**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	100 persen			100 persen	**793.832.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	100 persen	**793.832.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Hukum													
4.01.02.2.03.0001	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**														
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				9 Dokumen	110.345.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		110.345.000	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0002	**Fasilitasi Bantuan Hukum**														
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				21 Kasus	579.727.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		579.727.000	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0003	**Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**														
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1000 Dokumen	103.760.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		103.760.000	BAGIAN HUKUM
	Bagian Organisasi						**331.736.000**							**440.994.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**331.736.000**							**440.994.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**331.736.000**							**440.994.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**331.736.000**						100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	**440.994.000**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	Indeks Kelembagaan Kota	81indeks			79 Indeks	**331.736.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	81indeks	**440.994.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
4.01.01.2.13.0001	**Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**														
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	100.783.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		108.994.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0002	**Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	123.504.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		154.000.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0003	**Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**														
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				36 Dokumen	107.449.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		178.000.000	BAGIAN ORGANISASI
	Bagian Perekonomian Dan SDA						**345.533.000**							**961.708.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**345.533.000**							**961.708.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**345.533.000**							**961.708.000**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen 6,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**345.533.000**						100,00 persen 6,00 persen 100,00 persen	**961.708.000**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	100 persen			100 persen	**275.033.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID,	100 persen	**306.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Mikro Kecil										Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan			
4.01.03.2.01.0001	**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	57.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan		85.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
4.01.03.2.01.0002	**Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	117.360.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA		116.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
												Kota Pekalongan			
4.01.03.2.01.0003	**Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil**														
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	100.673.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan		105.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT	12bulan			12 bulan	**70.500.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD Penerima DBHCHT, Bagian Perekonomian dan SDA	12bulan	**655.708.000**	
4.01.03.2.04.0001	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	70.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD Penerima DBHCHT, Bagian Perekonomian dan SDA		655.708.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan						**622.638.000**							**611.156.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**622.638.000**							**611.156.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**622.638.000**							**611.156.000**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN**	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK	100,00 persen 6,00 persen			6,00 persen	**622.638.000**						100,00 persen 6,00 persen 100,00 persen	**611.156.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	PEMBANGUNAN	Outcome)	100,00 persen												
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100 persen			100 persen	**79.626.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	**108.389.000**	
4.01.03.2.02.0002	**Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	44.900.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		41.389.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0003	**Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	34.726.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		67.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100 persen			100 persen 100 persen	**543.012.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	**502.767.000**	
4.01.03.2.03.0001	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	228.932.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		214.913.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03.0002	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**														
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	314.080.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	OPD di Lingkungan Pemerintah		287.854.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan			DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Bagian Kesejahteraan Rakyat						**16.991.609.000**							**15.800.175.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.991.609.000**							**15.800.175.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**16.991.609.000**							**15.800.175.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**16.991.609.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**15.800.175.000**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen			100 persen	**16.991.609.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat di Kota Pekalongan	100 persen	**15.800.175.000**	
4.01.02.2.02.0001	**Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				30 Dokumen	15.502.480.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat di Kota Pekalongan		14.197.605.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0002	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial**														
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2181 Dokumen	608.381.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat di Kota Pekalongan		660.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0003															
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	880.748.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat di Kota Pekalongan		942.570.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Bagian Umum						**16.821.589.000**							**15.433.648.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.821.589.000**							**15.433.648.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**16.821.589.000**							**15.433.648.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**16.821.589.000**						100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	**15.433.648.000**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**56.851.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	**93.250.000**	
4.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.842.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		21.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				2 Dokumen	2.009.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		12.000.000	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Dokumen RKA-SKPD						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
4.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	52.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		59.750.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**242.312.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	**231.100.000**	
4.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				96 Dokumen	240.450.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		211.600.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8 Laporan	1.862.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		19.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**82.337.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan	100 persen	**252.950.000**	
4.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	82.337.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		252.950.000	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**7.623.598.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	**6.225.727.000**	
4.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		80.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	966.108.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		970.725.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	144.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		170.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.406.401.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		1.591.721.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	66.831.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		257.500.000	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
4.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6216 Dokumen	77.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		77.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0008	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	1.085.258.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		1.083.867.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1800 Laporan	3.807.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		1.994.414.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**2.678.084.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	**2.376.180.000**	
4.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	27.600.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		26.600.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				12 Laporan	1.179.000.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		969.000.000	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
4.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.471.484.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		1.380.580.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen			100 persen	**3.814.440.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	**4.764.606.000**	
4.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				70 Unit	1.647.172.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		1.456.080.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	1.766.568.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		2.908.026.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				190 Unit	400.700.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		400.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100 persen			100 persen	**883.967.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota	100 persen	**679.835.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Kepala Daerah									Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN	Pekalongan			
4.01.01.2.11.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	843.967.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		649.835.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.0003	**Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	40.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		30.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 persen			100 persen	**1.440.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan	100 persen	**810.000.000**	
4.01.01.2.12.0001	**Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah**														
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	840.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		480.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.12.0002	**Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah**														
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	600.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		330.000.000	BAGIAN UMUM
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						**1.258.074.000**							**1.220.736.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.258.074.000**							**1.220.736.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.258.074.000**							**1.220.736.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG**	Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen			100 persen	**1.258.074.000**						100 persen 100 persen	**1.220.736.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen										100 persen 100 persen 100 persen 100 persen		
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	100 persen			100 persen	**1.258.074.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	**1.220.736.000**	
4.01.01.2.14.0001	**Fasilitasi Keprotokolan**														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	256.952.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		270.359.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0002	**Fasilitasi Komunikasi Pimpinan**														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				191 Laporan	677.186.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		600.377.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0003	**Pendokumentasian Tugas Pimpinan**														
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	323.936.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		350.000.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Sekretariat DPRD						**52.401.727.000**							**45.793.791.963**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**52.401.727.000**							**45.793.791.963**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**52.401.727.000**							**45.793.791.963**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**34.281.337.000**						100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	**28.016.677.000**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**15.861.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat	-	**20.000.000**	
4.02.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.262.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		10.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.599.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		8.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**3.301.199.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD	-	**3.212.271.000**	
4.02.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				14 Orang/bula	3.237.117.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	sekretariat DPRD		3.140.371.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Tunjangan ASN				n		Pekalongan Barat, Podosugih	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
4.02.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	62.600.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		70.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.482.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	**9.500.000**	
4.02.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		9.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**2.868.182.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	**2.707.615.000**	
4.02.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.450.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0002															
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	259.125.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		255.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.200.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	643.182.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		625.115.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	141.225.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		142.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	35.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		35.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	300.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0009															
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450 Laporan	1.458.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		1.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**941.189.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	**867.389.000**	
4.02.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.800.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		1.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	198.625.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	740.764.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		665.589.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen			100 persen	**1.339.630.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	**1.409.479.000**	
4.02.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	1.070.530.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		889.479.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
4.02.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	150.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	119.100.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen			100 persen	**24.812.026.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat	-	**18.790.423.000**	
4.02.01.2.15.0001	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**														
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	23.781.211.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		17.860.423.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	**Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				175 Paket	498.625.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	**Pelaksanaan Medical Check Up DPRD**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	532.190.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		530.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 persen			100 persen	**998.250.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Sekretariat	-	**1.000.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
										Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
4.02.01.2.16.0003	**Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD**														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	398.250.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0004	**Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD**														
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	600.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**18.120.390.000**						100,00 persen 100,00 persen	**17.777.114.963**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen			100 persen	**6.828.720.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**7.300.000.000**	
4.02.02.2.01.0002	**Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	2.783.720.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		3.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0003	**Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan**														
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	4.045.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		4.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	30dokumen			100 persen	**412.360.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Sekretariat DPRD	5dokumen	**403.101.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
										Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
4.02.02.02.0001	**Pembahasan KUA dan PPAS**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.02.0003	**Pembahasan APBD**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	150.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.02.0006	**Pembahasan Pertanggungjawaban APBD**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	112.360.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		103.101.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Ketercapaian peningkatan kapasitas DPRD	100 persen			100 persen	**3.314.310.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat	100 persen	**3.150.000.000**	
4.02.02.04.0001	**Orientasi DPRD**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	400.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.04.0002	**Pendalaman Tugas DPRD**														
		Jumlah Dokumen Hasil				4 Dokumen	1.815.010.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Sekretariat		2.000.000.000	SEKRETARIAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pendalaman Tugas DPRD						Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				DPRD
4.02.02.2.04.0006	**Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				20 Dokumen	249.550.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0007	**Penyusunan Program Kerja DPRD**														
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	50.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	**Publikasi dan Dokumentasi DPRD**														
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				60 Dokumen	799.750.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		800.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100 persen			100 persen	**1.700.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**1.700.000.000**	
4.02.02.2.05.0001	**Kunjungan Kerja dalam Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				96 Laporan	300.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	**Pelaksanaan Reses**														
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1.400.000.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Kota Pekalongan		1.400.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase Ketercapaian pelaksanaan tugas DPRD	100 persen			100,00 persen	**5.865.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	100 persen	**5.224.013.963**	
4.02.02.2.08.0001	**Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	5.865.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		5.224.013.963	SEKRETARIAT DPRD
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						**7.667.714.000**							**9.257.312.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.667.714.000**							**9.257.312.000**	
5.01	**PERENCANAAN**						**6.932.859.000**							**8.049.867.000**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**5.764.516.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**6.517.344.000**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**15.366.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	**326.142.000**	
5.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.972.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		10.576.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				2 Dokumen	1.394.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Bappeda Kota Pekalongan		1.623.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Dokumen RKA-SKPD						Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				N, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		313.943.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.031.088.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	**5.624.180.000**	
5.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	4.984.196.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		5.580.844.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	45.600.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		41.860.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir				1 Laporan	1.292.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Bappeda Kota Pekalongan		1.476.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Tahun SKPD						Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	**8.510.000**	
5.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		8.510.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	**436.756.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	**327.303.000**	
5.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.700.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		1.338.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	85.512.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		58.370.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2.914.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		2.677.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	55.473.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		48.191.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	13.577.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		13.387.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.580.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		2.544.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115 Laporan	275.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		200.796.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
															PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**166.406.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	**153.334.000**	
5.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.362.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		1.343.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		66.002.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90.044.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		85.989.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen			100 persen	**109.900.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan	100 persen	**77.875.000**	
5.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan				12 Unit	84.700.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Bappeda Kota		57.720.000	BADAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pekalongan			PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	25.200.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		20.155.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**581.954.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**769.719.000**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen			100 persen	**489.424.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**651.184.000**	
5.01.02.2.01.0007	**Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				5 Dokumen	489.424.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		651.184.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen			100 persen	**17.200.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**106.532.000**	
5.01.02.2.02.0001	**Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	17.200.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		106.532.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen			100 persen	**75.330.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**12.003.000**	
5.01.02.2.03.0003	**Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	75.330.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		12.003.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**586.389.000**						100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**762.804.000**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen			100 persen	**187.172.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**196.592.000**	
5.01.03.2.01.0003	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**														
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	11.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		8.567.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0004															
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	45.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		68.541.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0007	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	30.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		25.701.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0008	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**														
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	101.172.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		93.783.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen			100 persen	**52.657.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**163.110.000**	
5.01.03.2.02.0004	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**														
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	52.657.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		163.110.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen			100 persen	**346.560.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**403.102.000**	
5.01.03.2.03.0004	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**														
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	167.550.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		197.072.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0008	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan**														
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	179.010.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		206.030.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**734.855.000**							**1.207.445.000**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	76,00 persen 100,00 persen 100,00 persen			100,00 persen	**734.855.000**						76,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	**1.207.445.000**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen			100 persen	**267.940.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**252.582.000**	
5.05.02.2.01.0001	**Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang				5 Laporan	173.720.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		175.573.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Penyelenggaraan Otonomi Daerah						Kel/Desa							DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01.0012	**Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan**														
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	94.220.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		77.009.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen			100 persen	**313.725.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**295.859.000**	
5.05.02.2.02.0001	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	313.725.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		295.859.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen			100 persen	**153.190.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**659.004.000**	
5.05.02.2.04.0001	**Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**														
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	141.690.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		659.004.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0005	**Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	11.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah						**25.028.276.000**							**23.382.469.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.028.276.000**							**23.382.469.000**	
5.02	**KEUANGAN**						**25.028.276.000**							**23.382.469.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**16.739.494.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**14.446.386.000**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**17.742.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	**25.150.000**	
5.02.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.364.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		11.700.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.378.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	BPKAD Kota Pekalongan		11.200.000	BADAN PENDAPATAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Daerah						Pekalongan Barat, Podosugih	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**13.379.165.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	**12.708.216.000**	
5.02.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	13.256.361.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		12.570.966.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	120.600.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		135.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.204.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	**9.500.000**	
5.02.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		9.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum	100 persen			100 Persen	**942.386.000**			Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	**732.981.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		perangkat daerah								Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
5.02.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		7.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	359.386.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		219.981.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	18.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		18.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	120.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		110.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		50.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan				24	2.500.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	BPKAD Kota		2.500.000	BADAN PENDAPATAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen		Pekalongan Barat, Podosugih	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pekalongan			KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	385.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		325.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen			100 Persen	**735.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	0 persen	**-**	
5.02.01.2.07.0001	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	444.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah		-	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0002	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	291.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah		-	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**765.252.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	**723.155.000**	
5.02.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		3.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0002															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	514.116.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		506.400.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	248.136.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		213.755.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**894.949.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	**247.384.000**	
5.02.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	152.426.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		132.384.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	700.523.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		75.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				70 Unit	42.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		40.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK	7,26 persen			7,66 persen	**5.710.413.000**						7,26 persen	**6.080.990.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Outcome)													
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen			100 persen	**993.805.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	**924.853.600**	
5.02.02.2.01.0001	**Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS**														
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	18.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**														
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	16.875.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	**Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD**														
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	27.260.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		62.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**														
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	789.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		628.699.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD**														
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan				2 Dokumen	79.450.000	- Kota Pekalongan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	BPKAD Kota Pekalongan		138.154.600	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	**Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran**														
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				12 Dokumen	62.220.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		26.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen			100 persen	**373.183.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	**262.900.000**	
5.02.02.2.02.0001	**Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				8500 Dokumen	230.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		87.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	**Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				24 Dokumen	17.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		23.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0006	**Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	18.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
5.02.02.2.02.0007	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**														
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	50.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		70.900.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	**Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan**														
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	18.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	**Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				300 Orang	38.433.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		32.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen			100 persen	**343.425.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kemenkeu, Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah, DPRD, BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota	100 persen	**393.236.400**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
												Pekalongan, dan Masyarakat			
5.02.02.2.03.0002	**Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban**														
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	36.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kemenkeu, Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah, DPRD, BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan, dan Masyarakat		59.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	**Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran**														
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				13 Laporan	5.625.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kemenkeu, Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah, DPRD, BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan, dan Masyarakat		8.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	**Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**														
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	89.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kemenkeu, Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah, DPRD, BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan, dan Masyarakat		95.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	69.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kemenkeu, Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah, DPRD, BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan, dan Masyarakat		90.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	6.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kemenkeu, Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah, DPRD, BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan, dan Masyarakat		10.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009	**Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah**														
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	11.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kemenkeu, Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah, DPRD, BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan, dan Masyarakat		20.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011	**Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah				120 Orang	124.800.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kemenkeu, Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah, DPRD, BPKAD Kota		111.236.400	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Kabupaten/Kota										Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan, dan Masyarakat			
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen			100 persen	**4.000.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	**4.500.000.000**	
5.02.02.2.04.0009	**Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	4.000.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		4.500.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100,00 persen			100,00 persen	**1.120.650.000**						100,00 persen	**1.181.351.000**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen			100 persen	**1.120.650.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	100 persen	**1.181.351.000**	
5.02.03.2.01.0001	**Penyusunan Standar Harga**														
		Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	59.650.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan		55.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**														
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	18.750.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota		30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN	Pekalongan			DAERAH
5.02.03.2.01.0007	**Pengamanan Barang Milik Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	227.250.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan		155.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0008	**Penilaian Barang Milik Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	96.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan		65.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**														
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	233.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan		325.480.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0011	**Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				81 Laporan	486.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan		550.871.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 persen			5,00 persen	**1.457.719.000**						5,00 persen	**1.673.742.000**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola	5.0 persen 100 persen			4.8 persen 100 persen	**1.457.719.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	5.0 persen 100 persen	**1.673.742.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		BKD													
5.02.04.2.01.0002	**Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**														
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	3.750.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		75.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0003	**Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	174.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		135.882.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0005	**Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	37.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0006	**Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	91.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		58.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0007	**Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**														
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				4 Obyek Pajak	122.950.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		176.550.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0008	**Penetapan Wajib Pajak Daerah**														
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				19000 Dokumen	283.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib		300.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Podosugih	ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN	Retribusi			DAERAH
5.02.04.2.01.0009	**Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**														
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				14400 Layanan	367.600.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		392.768.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0010	**Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**														
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2500 Dokumen	35.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		66.861.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0011	**Penagihan Pajak Daerah**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				3060 Dokumen	216.685.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		227.681.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0013	**Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				50 Dokumen	97.484.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		159.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0015	**Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah**														
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	27.750.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		51.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**8.252.471.000**							**9.967.349.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.252.471.000**							**9.967.349.000**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**						**6.282.821.000**							**6.544.172.000**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen			100 persen 100 persen	**4.965.746.000**						100 persen 100 persen	**5.006.473.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen			100 persen							100 persen		
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Ketercapaian perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen 100 persen	**12.014.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	**12.850.000**	
5.03.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.088.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		2.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.476.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	8.450.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		8.450.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat**	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan	100 persen			100 persen 100 Persen	**4.187.981.000**			Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	BKPSDM	100 persen	**4.275.219.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Daerah	perangkat daerah Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
5.03.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4.131.813.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM		4.223.569.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1100 Dokumen	54.800.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM		50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.368.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM		1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen			100 persen 100 Persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN BKPSDM	100 persen	**9.500.000**	
5.03.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	ASN BKPSDM		9.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Podosugih		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen			100 persen 100 Persen	**304.095.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	**199.500.000**	
5.03.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	78.190.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		32.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		1.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	45.905.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		52.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.0	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.06 .0005															
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06 .0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		2.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06 .0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76 Laporan	165.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen 100 Persen	**325.100.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	**325.400.000**	
5.03.01.2.08 .0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.400.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		2.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0002															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	122.700.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		123.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen 100 persen	**131.556.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Aset BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	**184.004.000**	
5.03.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	48.906.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Aset BKPSDM Kota Pekalongan		48.906.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	70.650.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Aset BKPSDM Kota Pekalongan		123.098.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0010															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	12.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Aset BKPSDM Kota Pekalongan		12.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	50,00 persen 100,00 persen 80,00 persen 90,00 persen			80,00 persen	**1.317.075.000**						50,00 persen 100,00 persen 80,00 persen 90,00 persen	**1.537.699.000**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase ketersediaan data PNS	100 persen			100 persen	**593.799.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	**776.899.000**	
5.03.02.2.01.0003	**Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**														
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				170 Dokumen	457.969.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		641.899.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	**Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				16 Dokumen	135.830.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		135.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	110 persen			110 persen 110 Persen	**235.512.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	110 persen	**101.223.000**	
5.03.02.2.02	**Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0002															
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	33.345.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		19.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	**Pengelolaan Promosi ASN**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	202.167.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		81.623.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	42 persen			42 persen	**320.166.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	42 persen	**491.680.000**	
5.03.02.2.03.0002	**Pengelolaan Assessment Center**														
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				6 Dokumen	100.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		350.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004	**Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN**														
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				17 Orang	165.166.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		86.680.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0009	**Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional**														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan				10 Dokumen	36.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	ASN Di Lingkungan Pemerintah		36.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Diklat Jabatan Fungsional						Barat, Podosugih	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0012	**Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN**														
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	19.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		19.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Tingkat Disiplin ASN Tingkat Disiplin ASN	100 persen			100 persen 100 Persen	**167.598.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	**167.897.000**	
5.03.02.2.04.0004	**Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai**														
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	43.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		43.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	**Pembinaan Disiplin ASN**														
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1 Orang	118.598.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		118.897.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	**Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				5 Laporan	6.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		6.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1.969.650.000**							**3.423.177.000**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase PNS berkembang kompetensinya Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen			100,00 persen 100 Persen	**1.969.650.000**						100,00 persen	**3.423.177.000**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen			100 persen 100 Persen	**1.848.650.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	**628.177.000**	
5.04.02.2.01.0003	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum**														
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				240 Orang	1.533.650.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		539.677.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0004	**Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum**														
		Jumlah Dokumen Hasil				3 Dokumen	315.000.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	ASN		88.500.000	BADAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan			KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250orang			200 orang	**121.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	250orang	**2.795.000.000**	
5.04.02.2.02.0003	**Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota**														
		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				30 Orang	50.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0007	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**														
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	65.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		2.743.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0008	**Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan**														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan				2 Dokumen	6.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama													MANUSIA
	Inspektorat Daerah						**6.669.971.000**							**5.768.200.000**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.669.971.000**							**5.768.200.000**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**6.669.971.000**							**5.768.200.000**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	**6.286.119.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**5.318.150.000**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**15.465.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT	100 persen	**14.000.000**	
6.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.030.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.435.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		1.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		9.500.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**5.657.457.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT	100 persen	**4.897.805.000**	
6.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	5.614.127.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		4.863.305.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	42.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.330.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		1.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**90.300.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT	100 persen	**8.510.000**	
6.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0003	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**														
		Jumlah Dokumen				2 Dokumen	6.000.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	INSPEKTOR		1.000.000	INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	AT			DAERAH
6.01.01.2.05.0011	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				38 Orang	79.300.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		6.510.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**268.710.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT	100 persen	**203.370.000**	
6.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		2.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	61.166.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	3.362.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	44.807.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	INSPEKTORAT		40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Podosugih		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
6.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.875.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		8.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	2.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		2.700.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	139.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		103.170.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**93.400.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT	100 persen	**60.913.000**	
6.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	47.400.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		34.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0004															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		21.913.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**160.787.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT	100 persen	**133.552.000**	
6.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	117.037.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	18.750.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		33.552.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	25.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen			85,00 persen	**132.791.000**						85,00 persen	**116.736.000**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	100 persen			100 persen	**118.863.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	100 persen	**101.508.000**	
6.01.02.2.01.0001	**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja				70 Laporan	23.375.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	PEMERINTAH KOTA		10.000.000	INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pemerintah Daerah						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEKALONGAN			DAERAH
6.01.02.2.01.0002	**Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				40 Laporan	9.600.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0003	**Reviu Laporan Kinerja**														
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				70 Laporan	10.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0004	**Reviu Laporan Keuangan**														
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				30 Laporan	10.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0006	**Kerja Sama Pengawasan Internal**														
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	31.388.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0007	**Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**														
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	34.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		51.508.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	100 persen			100 persen	**13.928.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	100 persen	**15.228.000**	
6.01.02.2.02.0001	**Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**														
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	6.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.0002	**Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				3 Laporan	7.928.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		8.228.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Level Kapabilitas APIP	3,00nilai			3,00 nilai	**251.061.000**						3,00nilai	**333.314.000**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100 persen			100 persen	**30.848.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	100 persen	**33.235.000**	
6.01.03.2.01.0001	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**														
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				7 Rekomendasi	27.848.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		30.235.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0002	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan**														
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang				1 Rekomendasi	3.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	PEMERINTAH KOTA PEKALONGA		3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Disusun						Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN	N			
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	98 persen			96 persen	**220.213.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	98 persen	**300.079.000**	
6.01.03.2.02.0001	**Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				31 perangkat daerah	17.462.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0002	**Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi**														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	23.400.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0003	**Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**														
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				8 Kegiatan	78.261.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		130.079.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0004	**Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas**														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				4 perangkat daerah	101.090.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		125.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	Kecamatan Pekalongan Utara						**11.082.040.000**							**9.468.082.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**11.082.040.000**							**9.468.082.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**11.082.040.000**							**9.468.082.000**	
7.01.0	**PROGRAM**	Persentase ketersediaan	100			100 persen	**10.588.671.000**						100 persen	**9.056.761.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	laporan capaian kinerja	persen 100 persen 100 persen										100 persen 100 persen		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	**121.554.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara	-	**132.000.000**	
7.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.668.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		13.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.886.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	117.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		116.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	**8.179.278.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	-	**7.537.353.000**	
7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	7.943.230.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		7.336.353.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.0	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.02.0003															
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				96 Dokumen	234.300.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		198.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.748.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	**10.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara	-	**16.500.000**	
7.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		16.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	**414.635.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara	-	**440.890.000**	
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.450.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		8.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				117 Paket	128.248.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Kecamatan Pekalongan Utara		152.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Utara, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
7.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				96 Paket	7.875.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		12.750.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				88 Paket	201.062.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		195.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				96 Paket	40.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	12.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		20.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		12.540.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**834.243.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara	-	**694.108.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				96 Laporan	10.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	125.884.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		125.884.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96 Laporan	697.859.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		557.724.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**1.028.961.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara	-	**235.910.000**	
7.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	133.161.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		112.410.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	850.800.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		78.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				120 Unit	45.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100,00 persen			100,00 persen	**19.625.000**						100,00 persen	**66.112.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen			100 Persen	**12.500.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	100 persen	**15.500.000**	
7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**														
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	12.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan		15.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen			100 Persen	**7.125.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	100 persen	**50.612.000**	
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	7.125.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara		50.612.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen 100 persen			100 persen	**115.311.000**						100 persen 100 persen	**83.927.000**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen			100 persen	**48.261.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan	100 persen	**19.600.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
												Utara			
7.01.03.2.03.0001	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	48.261.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara		19.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen			100 Persen	**67.050.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	100 persen	**64.327.000**	
7.01.03.2.06.0006	**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				2400 Keluarga	67.050.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		64.327.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen 100 persen			100 persen	**352.808.000**						100 persen 100 persen	**255.119.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen			100 persen	**352.808.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	-	**255.119.000**	
7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah				75 Laporan	352.808.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		255.119.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Kecamatan													
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100,00 persen			100,00 persen	**5.625.000**						100,00 persen	**6.163.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen			100 persen	**5.625.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	100 persen	**6.163.000**	
7.01.05.2.01.0008	**Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**														
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.625.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara		6.163.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	Kelurahan Kandang Panjang						**505.605.000**							**406.130.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**505.605.000**							**406.130.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**505.605.000**							**406.130.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**505.605.000**						100 persen 100 persen	**406.130.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**505.605.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**406.130.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN KANDANG PANJANG
7.01.03.2.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0002															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	189.446.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		70.000.000	KELURAHAN KANDANG PANJANG
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	306.784.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		323.630.000	KELURAHAN KANDANG PANJANG
	Kelurahan Panjang Wetan						**524.181.000**							**510.357.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**524.181.000**							**510.357.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**524.181.000**							**510.357.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**524.181.000**						100 persen 100 persen	**510.357.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**524.181.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**510.357.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN PANJANG WETAN
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				131 Unit	179.108.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		70.000.000	KELURAHAN PANJANG WETAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Wetan							
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	335.698.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		427.857.000	KELURAHAN PANJANG WETAN
	Kelurahan Degayu						**406.069.000**							**380.194.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**406.069.000**							**380.194.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**406.069.000**							**380.194.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**406.069.000**						100 persen 100 persen	**380.194.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**406.069.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK	100 persen	**380.194.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN DEGAYU
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	145.808.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		121.808.000	KELURAHAN DEGAYU
7.01.03.2.02	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0003															
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	250.886.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		245.886.000	KELURAHAN DEGAYU
	Kelurahan Bandengan						**347.681.000**							**330.297.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**347.681.000**							**330.297.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**347.681.000**							**330.297.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**347.681.000**						100 persen 100 persen	**330.297.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**347.681.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**330.297.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		25.000.000	KELURAHAN BANDENGAN
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	131.108.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		70.000.000	KELURAHAN BANDENGAN
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	207.198.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		235.297.000	KELURAHAN BANDENGAN
	Kelurahan Krapyak						**800.757.000**							**600.882.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**800.757.000**							**600.882.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**800.757.000**							**600.882.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**800.757.000**						100 persen 100 persen	**600.882.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**800.757.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**600.882.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN KRAPYAK
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				27 Unit	319.808.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		121.808.000	KELURAHAN KRAPYAK
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	471.574.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		466.574.000	KELURAHAN KRAPYAK
	Kelurahan Padukuhan Kraton						**704.300.000**							**882.254.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**704.300.000**							**882.254.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**704.300.000**							**882.254.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**704.300.000**						100 persen 100 persen	**882.254.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**704.300.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**882.254.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	359.830.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		137.714.000	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	335.095.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		732.040.000	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
	Kelurahan Panjang Baru						**443.855.000**							**386.322.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**443.855.000**							**386.322.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**443.855.000**							**386.322.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen 100 persen			100 persen	**443.855.000**						100 persen 100 persen	**386.322.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen			100 persen	**443.855.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen	**386.322.000**	
7.01.0	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.2.02.0001															
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN PANJANG BARU
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	145.808.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		70.000.000	KELURAHAN PANJANG BARU
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	288.672.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		303.822.000	KELURAHAN PANJANG BARU
	Kecamatan Pekalongan Selatan						**9.206.551.000**							**8.465.345.001**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**9.206.551.000**							**8.465.345.001**	
7.01	**KECAMATAN**						**9.206.551.000**							**8.465.345.001**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**8.768.527.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**8.125.723.001**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**110.455.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan	-	**100.391.000**	
7.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.610.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Kecamatan Pekalongan Selatan		5.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
7.01.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.845.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	106.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		92.391.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**7.191.278.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan	-	**6.786.390.001**	
7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	6.983.468.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		6.608.790.001	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	206.100.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		174.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil				1 Laporan	1.710.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Kecamatan Pekalongan Selatan		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Selatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**10.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan	-	**18.229.000**	
7.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	10.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen			100 Persen	**386.946.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan	-	**340.965.000**	
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.850.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		7.800.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	157.728.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		136.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	8.709.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		9.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	143.159.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		122.665.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	35.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		35.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				14 Dokumen	17.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		17.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	19.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**836.740.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan	-	**694.644.000**	
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.300.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Kecamatan Pekalongan Selatan		9.300.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	98.720.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		86.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	728.720.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		599.344.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**233.108.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan	-	**185.104.000**	
7.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	131.108.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		83.104.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	62.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		62.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				12 Unit	40.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Kecamatan Pekalongan Selatan		40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Selatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100,00 persen			100,00 persen	**18.524.000**						100,00 persen	**19.674.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	100 persen			100 Persen 100 Persen	**12.500.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	**10.000.000**	
7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**														
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	12.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 persen			100 persen	**6.024.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	**9.674.000**	
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	6.024.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		9.674.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen 100 persen			100 persen	**110.991.000**						100 persen 100 persen	**84.375.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100 persen			100 persen	**47.425.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	**25.000.000**	
7.01.03.2.03.0001	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	47.425.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		25.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan	100 persen			100 persen	**63.566.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	**59.375.000**	
7.01.03.2.06.0006	**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				410 Keluarga	63.566.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		59.375.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100,00 persen			100 persen	**303.034.000**						100,00 persen	**224.465.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen			100 persen	**303.034.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	**224.465.000**	
7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				73 Laporan	303.034.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		224.465.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100,00 persen			100 persen	**5.475.000**						100,00 persen	**11.108.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 persen			100 Persen	**5.475.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	**11.108.000**	
7.01.05.2.01.0008	**Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**														
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.475.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		11.108.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	Kelurahan Jenggot						**448.216.000**							**451.341.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**448.216.000**							**451.341.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**448.216.000**							**451.341.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**448.216.000**						100 persen 100 persen	**451.341.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**448.216.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**451.341.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang				7 Lembaga Kemasyara	9.375.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN JENGGOT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				katan		Pekalongan Selatan, Jenggot	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	145.808.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		145.808.000	KELURAHAN JENGGOT
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	293.033.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		293.033.000	KELURAHAN JENGGOT
	Kelurahan Buaran Kradenan						**443.081.000**							**385.601.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**443.081.000**							**385.601.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**443.081.000**							**385.601.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**443.081.000**						100 persen 100 persen	**385.601.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**443.081.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**385.601.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN BUARAN KRADENAN
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	149.108.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		88.697.000	KELURAHAN BUARAN KRADENAN
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	284.598.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		284.404.000	KELURAHAN BUARAN KRADENAN
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo						**362.405.000**							**341.930.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**362.405.000**							**341.930.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**362.405.000**							**341.930.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**362.405.000**						100 persen 100 persen	**341.930.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**362.405.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**341.930.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	142.908.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		121.608.000	KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	210.122.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		207.822.000	KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
	Kelurahan Kuripan Yosorejo						**428.186.000**							**384.806.666**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**428.186.000**							**384.806.666**	
7.01	**KECAMATAN**						**428.186.000**							**384.806.666**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**428.186.000**						100 persen 100 persen	**384.806.666**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**428.186.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**384.806.666**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	153.753.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		142.466.666	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan				1 Pokmas / Ormas	265.058.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Masyarakat dan LKK		229.840.000	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Selatan, Kuripan Yosorejo	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
	Kelurahan Soko Duwet						**408.005.000**							**383.495.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**408.005.000**							**383.495.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**408.005.000**							**383.495.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**408.005.000**						100 persen 100 persen	**383.495.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**408.005.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK	100 persen	**383.495.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN SOKO DUWET
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	159.446.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		129.446.000	KELURAHAN SOKO DUWET
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	239.184.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		241.549.000	KELURAHAN SOKO DUWET
	Kelurahan Banyurip						**442.830.000**							**416.955.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**442.830.000**							**416.955.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**442.830.000**							**416.955.000**	
7.01.0	**PROGRAM**	Persentase ketercapaian	100			100 persen	**442.830.000**						100 persen	**416.955.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen 100 persen										100 persen		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**442.830.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**416.955.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN BANYURIP
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	150.746.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		126.746.000	KELURAHAN BANYURIP
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	282.709.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		277.709.000	KELURAHAN BANYURIP
	Kecamatan Pekalongan Barat						**10.528.587.000**							**9.337.536.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.528.587.000**							**9.337.536.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**10.528.587.000**							**9.337.536.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**10.155.522.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**9.078.247.000**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 persen			100 Persen	**121.653.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Kecamatan Pekalongan Barat Kota	-	**130.500.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Perangkat Daerah	perangkat daerah								Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN	Pekalongan			
7.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.726.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan		13.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.927.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	117.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan		114.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**8.381.464.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat	-	**7.505.717.000**	
7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	8.145.378.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		7.307.717.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen				12	234.300.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Kecamatan		195.000.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Dokumen		Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pekalongan Barat			PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.786.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**10.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat	-	**18.229.000**	
7.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	10.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 Persen	**390.418.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat	-	**432.426.000**	
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8.600.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		8.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan				16 Paket	97.887.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Kecamatan		149.500.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pekalongan Barat			PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	202.431.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		191.326.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	12.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		20.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	19.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**943.999.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan dan Kec. Pekalongan Barat	-	**778.501.000**	
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan dan Kec. Pekalongan Barat		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	116.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan dan Kec. Pekalongan Barat		105.250.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	817.499.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan dan Kec. Pekalongan Barat		662.751.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	**307.988.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat	-	**212.874.000**	
7.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				12 Unit	115.988.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Kecamatan Pekalongan Barat		101.374.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Barat, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
7.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	147.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		66.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				66 Unit	45.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100,00 persen			100,00 persen	**19.485.000**						100,00 persen	**22.000.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 persen			100 Persen	**12.500.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat	100 persen	**10.000.000**	
7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**														
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	12.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat		10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Presentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintaha yang dilimpahkan kepada Camat	100 persen			100 persen	**6.985.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	**12.000.000**	
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	6.985.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat		12.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Barat	100 persen 100 persen			100 persen	**123.917.000**						100 persen 100 persen	**40.930.000**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100 persen			100 Persen	**53.742.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat	100 persen	**22.600.000**	
7.01.03.2.03.0001	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	53.742.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat		22.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Presentase Ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan	100 persen			100 persen	**70.175.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	**18.330.000**	
7.01.03.2.06.0006	**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				1518 Keluarga	70.175.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat		18.330.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100,00 persen			100,00 persen	**224.038.000**						100,00 persen	**186.505.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan Trantibum	100 persen			100 Persen	**224.038.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	LKK dan Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat	100 persen	**186.505.000**	
7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				67 Laporan	224.038.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	LKK dan Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat		186.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100,00 persen			100,00 persen	**5.625.000**						100,00 persen	**9.854.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 persen			100 Persen	**5.625.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di wilayah Kec. Pekalongan Barat	100 persen	**9.854.000**	
7.01.05.2.01.0008	**Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**														
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.625.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di wilayah Kec. Pekalongan Barat		9.854.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	Kelurahan Medono						**554.774.000**							**421.650.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**554.774.000**							**421.650.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**554.774.000**							**421.650.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Barat	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	**554.774.000**						100 persen 100 persen	**421.650.000**	
7.01.0	**Kegiatan**	Persentase ketercapaian	100			100 Persen	**554.774.000**			Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Masyarakat	100 persen	**421.650.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
3.2.02	**Pemberdayaan Kelurahan**	pemberdayaan kelurahan	persen							Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	dan LKK			
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN MEDONO
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	229.746.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		106.495.000	KELURAHAN MEDONO
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	315.653.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		302.655.000	KELURAHAN MEDONO
	Kelurahan Podosugih						**396.431.000**							**339.480.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**396.431.000**							**339.480.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**396.431.000**							**339.480.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**396.431.000**						100 persen 100 persen	**339.480.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 Persen	**396.431.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat	100 persen	**339.480.000**	
7.01.03.2.02	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0001															
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		12.500.000	KELURAHAN PODOSUGIH
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	150.746.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		99.295.000	KELURAHAN PODOSUGIH
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	236.310.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		227.685.000	KELURAHAN PODOSUGIH
	Kelurahan Tirto						**415.245.000**							**389.370.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**415.245.000**							**389.370.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**415.245.000**							**389.370.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**415.245.000**						100 persen 100 persen	**389.370.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 Persen	**415.245.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**389.370.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN TIRTO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Pekalongan Barat, Tirto							
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	153.446.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		129.446.000	KELURAHAN TIRTO
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	252.424.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		247.424.000	KELURAHAN TIRTO
	Kelurahan Sapuro Kebulen						**472.983.000**							**416.017.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**472.983.000**							**416.017.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**472.983.000**							**416.017.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Barat	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	**472.983.000**						100 persen 100 persen	**416.017.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 Persen	**472.983.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**416.017.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga				7 Lembaga	9.375.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Masyarakat		12.500.000	KELURAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Kemasyarakatan		Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	dan LKK			SAPURO KEBULEN
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	147.808.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		98.697.000	KELURAHAN SAPURO KEBULEN
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	315.800.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		304.820.000	KELURAHAN SAPURO KEBULEN
	Kelurahan Bendan Kergon						**561.733.000**							**490.677.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**561.733.000**							**490.677.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**561.733.000**							**490.677.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**561.733.000**						100 persen 100 persen	**490.677.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 Persen	**561.733.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**490.677.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN BENDAN KERGON
7.01.03.2.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0002															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	163.808.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		98.697.000	KELURAHAN BENDAN KERGON
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	388.550.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		379.480.000	KELURAHAN BENDAN KERGON
	Kelurahan Pasirkratonkramat						**574.195.000**							**530.320.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**574.195.000**							**530.320.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**574.195.000**							**530.320.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**574.195.000**						100 persen 100 persen	**530.320.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 Persen	**574.195.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK	100 persen	**530.320.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	171.753.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkr	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		129.753.000	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								amat							
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	393.067.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		388.067.000	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT
	Kelurahan Pringrejo						**570.169.000**							**521.947.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**570.169.000**							**521.947.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**570.169.000**							**521.947.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**570.169.000**						100 persen 100 persen	**521.947.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 Persen	**570.169.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK	100 persen	**521.947.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN PRINGREJO
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	167.108.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		122.708.000	KELURAHAN PRINGREJO
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang				9 Pokmas / Ormas	393.686.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	masyarakat dan LKK		386.739.000	KELURAHAN PRINGREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Pekalongan Barat, Pringrejo	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				
	Kecamatan Pekalongan Timur						**12.628.227.000**							**9.809.467.100**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**12.628.227.000**							**9.809.467.100**	
7.01	**KECAMATAN**						**12.628.227.000**							**9.809.467.100**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**12.292.737.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**9.479.959.100**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	**121.752.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan	-	**118.156.000**	
7.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.784.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.968.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		7.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	117.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		101.156.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**8.680.729.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur	-	**7.851.437.000**	
7.01.0	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
1.2.02.0001															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	8.444.605.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur		7.814.437.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	234.300.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur		34.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.824.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**10.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	kelurahan, Kecamatan Timur	-	**18.229.000**	
7.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	kelurahan, Kecamatan Timur		18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**411.179.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, Kecamatan Timur	-	**392.536.000**	
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi				12 Paket	6.450.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Kelurahan, Kecamatan		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Timur			TIMUR
7.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	130.640.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, Kecamatan Timur		126.036.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.875.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, Kecamatan Timur		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	187.214.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, Kecamatan Timur		185.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, Kecamatan Timur		32.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	20.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, Kecamatan Timur		16.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				7 Laporan	19.000.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Kelurahan, Kecamatan		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Timur			TIMUR
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapain penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen			100 persen	**1.185.334.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan	-	**886.638.100**	
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	163.200.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		76.091.100	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.011.634.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		800.047.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen			100 persen	**1.883.743.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan	-	**212.963.000**	
7.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	169.743.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		137.963.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.669.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	45.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		30.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100,00 persen			100,00 persen	**19.625.000**						100,00 persen	**46.136.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen			100 Persen	**12.500.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan	100 persen	**15.500.000**	
7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**														
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	12.500.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan		15.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	100 persen			100 persen	**7.125.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	**30.636.000**	
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	7.125.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur		30.636.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan di wilayah Timur	100 persen 100 persen			100 persen	**109.811.000**						100 persen 100 persen	**76.536.000**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen			100 persen 100 persen	**42.761.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat, LKK dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Timur	100 persen	**35.536.000**	
7.01.03.2.03.0001	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	42.761.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat, LKK dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Timur		35.536.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen			100 persen	**67.050.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	**41.000.000**	
7.01.03.2.06.0006	**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				4 Keluarga	67.050.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur		41.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100,00 persen			100,00 persen 100 persen	**200.429.000**						100,00 persen	**200.566.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan	100 persen			100 persen 100 persen	**200.429.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	LKK dan Masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	**200.566.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		ketertiban umum Persetase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN	Pekalongan Timur			
7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48 Laporan	200.429.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	LKK dan Masyarakat di wilayah kecamatan Pekalongan Timur		200.566.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100,00 persen			100 persen 100,00 persen	**5.625.000**						100,00 persen	**6.270.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen			100 persen	**5.625.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	**6.270.000**	
7.01.05.2.01.0008	**Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**														
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.625.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur		6.270.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	Kelurahan Kauman						**584.911.000**							**505.352.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**584.911.000**							**505.352.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**584.911.000**							**505.352.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**584.911.000**						100 persen 100 persen	**505.352.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	KELURAHAN														
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**584.911.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, LKK	100 persen	**505.352.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, LKK		12.500.000	KELURAHAN KAUMAN
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	153.808.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, LKK		92.057.000	KELURAHAN KAUMAN
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	421.728.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, LKK		400.795.000	KELURAHAN KAUMAN
	Kelurahan Poncol						**506.447.000**							**-**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**506.447.000**							**-**	
7.01	**KECAMATAN**						**506.447.000**							**-**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen	**506.447.000**						100 persen 100 persen	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**506.447.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**-**	
7.01.03.2.02	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0001															
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		-	KELURAHAN PONCOL
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	152.446.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		-	KELURAHAN PONCOL
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2583 Pokmas / Ormas	344.626.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		-	KELURAHAN PONCOL
	Kelurahan Klego						**432.836.000**							**373.754.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**432.836.000**							**373.754.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**432.836.000**							**373.754.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	**432.836.000**						100 persen 100 persen	**373.754.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**432.836.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**373.754.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN KLEGO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Pembangunan di Kelurahan						Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	139.808.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		82.000.000	KELURAHAN KLEGO
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	283.653.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		279.254.000	KELURAHAN KLEGO
	Kelurahan Gamer						**368.261.000**							**285.578.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**368.261.000**							**285.578.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**368.261.000**							**285.578.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	**368.261.000**						100 persen 100 persen	**285.578.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**368.261.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**285.578.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN GAMER
7.01.03.2.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
.0002															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	145.808.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		65.000.000	KELURAHAN GAMER
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	213.078.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		208.078.000	KELURAHAN GAMER
	Kelurahan Noyontaansari						**483.851.000**							**404.302.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**483.851.000**							**404.302.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**483.851.000**							**404.302.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	**483.851.000**						100 persen 100 persen	**404.302.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 Persen	**483.851.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat , LKK	100 persen	**404.302.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat , LKK		12.500.000	KELURAHAN NOYONTAANSARI
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	172.808.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	Masyarakat , LKK		97.515.000	KELURAHAN NOYONTAANSARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								i	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN				
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	301.668.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat , LKK		294.287.000	KELURAHAN NOYONTAANSARI
	Kelurahan Setono						**513.588.000**							**445.227.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**513.588.000**							**445.227.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**513.588.000**							**445.227.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	**513.588.000**						100 persen 100 persen	**445.227.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**513.588.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	100 persen	**445.227.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN SETONO
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	160.226.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		77.638.000	KELURAHAN SETONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	343.987.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		355.089.000	KELURAHAN SETONO
	Kelurahan Kalibaros						**417.166.000**							**625.000.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**417.166.000**							**625.000.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**417.166.000**							**625.000.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	**417.166.000**						100 persen 100 persen	**625.000.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen			100 persen	**417.166.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK	100 persen	**625.000.000**	
7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		15.000.000	KELURAHAN KALIBAROS
7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	143.815.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		300.000.000	KELURAHAN KALIBAROS
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**														
		Jumlah Pokmas dan				2 Pokmas /	263.976.000	- Kota	DANA	Memperkuat	4. Perbaikan tata kelola	Masyarakat		310.000.000	KELURAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Ormas		Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	dan LKK			KALIBAROS
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**21.971.769.000**							**4.601.203.300**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**21.971.769.000**							**4.601.203.300**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**21.971.769.000**							**4.601.203.300**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	**2.473.274.000**						100 persen 100 persen 100 persen	**2.462.161.300**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen 100 persen	**14.772.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan	100 persen	**17.916.000**	
8.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.624.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.148.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	12.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan		6.416.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Semua Kel/Desa		Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN	Politik Kota Pekalongan			
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 persen	**2.006.021.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan	100 persen	**2.194.320.300**	
8.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.966.257.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		2.159.820.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	38.700.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.064.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 persen	**5.000.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan	100 persen	**9.500.000**	
8.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota		9.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
								Kel/Desa				Pekalongan			
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	**135.730.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan	100 persen	**92.418.000**	
8.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		3.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	30.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2.250.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	18.000.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		18.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan				12 Paket	8.300.000	- Kota Pekalongan,	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	ASN pada Badan		8.300.000	BADAN KESATUAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Penggandaan yang Disediakan						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan			BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.400.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	71.280.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		25.618.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**247.971.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan	100 persen	**80.507.000**	
8.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48.900.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	198.071.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		29.507.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	**63.780.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan	100 persen	**67.500.000**	
8.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	44.530.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		45.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.250.000	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	8.000.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		7.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen			100,00 persen	**1.646.035.000**						100,00 persen	**860.950.000**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang**	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara	100 persen			100 persen	**1.646.035.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung	Masyarakat, Ormas dan Pelajar	100 persen	**860.950.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	bendera dan korp musik								Pelayanan Publik	dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
8.01.02.2.01.0003	**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				268 Orang	26.792.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, Ormas dan Pelajar		30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1024 Orang	255.243.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, Ormas dan Pelajar		140.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0006	**Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara**														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan				566 Keluarga	872.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi	Masyarakat, Ormas dan Pelajar		150.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						Kel/Desa		Pelayanan Publik	yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
8.01.02.2.01.0007	**Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka**														
		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	491.500.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, Ormas dan Pelajar		540.650.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00lembaga			16 lembaga	**17.235.294.000**						16,00lembaga	**845.618.000**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala**	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen			100 persen	**17.235.294.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, parpol dan pemilih pemula (lembaga pendidikan)	100 persen	**845.618.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik														
8.01.03.2.01.0003	**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				5016 Orang	16.978.221.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, parpol dan pemilih pemula (lembaga pendidikan)		774.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				420 Orang	257.073.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, parpol dan pemilih pemula (lembaga pendidikan)		70.918.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen			100,00 persen	**301.772.000**						100,00 persen	**134.367.000**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat	7kali			2 kali	**301.772.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga	Organisasi kemasyarakatan	7kali	**134.367.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
											kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
8.01.04.2.01.0003	**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				8 Orang	301.772.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Organisasi kemasyarakatan		134.367.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen			100,00 persen	**209.694.000**						100,00 persen	**207.821.000**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	jumlah pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya Jumlah Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Jumlah Sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan	6kali			1 kali 8 kali 8 kali	**209.694.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, Ormas dan pelajar	1kali	**207.821.000**	
8.01.05.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi				511 Orang	209.694.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	Masyarakat, Ormas dan pelajar		207.821.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen			100,00 persen	**105.700.000**						100,00 persen	**90.286.000**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah laporan rencana penanganan konflik sosial yang disusun	6laporan			1 laporan	**105.700.000**			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat dan Ormas	1laporan	**90.286.000**	
8.01.06.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				420 Orang	105.700.000	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat dan Ormas		90.286.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						J U M L A H	**1.008.539.215.000**							**1.024.586.833.998**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

5.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan dan pagu indikatif Belanja Daerah untuk tahun 2024 disajikan dalam Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif
Kota Pekalongan Tahun 2024

URAIAN	PROYEKSI2024
PENDAPATAN	**971.139.215.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**249.510.605.000**
Pajak Daerah	105.000.000.000
Retribusi Daerah	22.274.360.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.365.300.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	115.870.945.000
PENDAPATAN TRANSFER	**719.378.610.000**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637.314.059.000
Bagi Hasil Pajak	28.174.327.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.669.797.000
Dana Alokasi Umum	447.688.903.000
Dana Alokasi Khusus	149.836.793.000
Dana Insentif Daerah	9.944.239.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.064.551.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	82.064.551.000
Bantuan Keuangan Provinsi	0
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**2.250.000.000**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
Pendapatan Hibah	2.250.000.000
BELANJA DAERAH	**1.008.539.215.000**
BELANJA OPERASI	**889.781.384.900**
Belanja Pegawai	435.505.100.360
Belanja Barang dan Jasa	387.645.670.540
Belanja Hibah	64.949.926.000
Belanja Bantuan Sosial	1.680.688.000
BELANJA MODAL	**114.781.230.100**
Belanja Modal Tanah	80.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.101.164.100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.313.330.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.161.776.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.600.000
Belanja Modal Aset Lainnya	34.360.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**3.976.600.000**
Belanja Tidak Terduga	3.976.600.000
PEMBIAYAAN DAERAH	**37.400.000.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**42.650.000.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	28.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	14.650.000.000

URAIAN	PROYEKSI2024
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.250.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	0
Penyertaan Modal Daerah	5.250.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalonggan Tahun 2024

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2024
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,35
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	104,14
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,60
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,61
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,50
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,59
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,59
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,81
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	96,24
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	909,00
13	Indeks Kualitas Air	indeks	35,37
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00
17	Persentase pelayanan sampah	persen	71,12
18	Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	kategori	B
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	100,00
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,4 - 5,8
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	93,33
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00
23	Indeks SPBE	indeks	3,05
24	IKM Kota	persen	83,79

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2024
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97,00
26	Indeks Merit System	indeks	250,00
27	Nilai SAKIP Kota	skor	75,07
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP
29	Maturitas SPIP	nilai	3,60
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	6

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2023

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dalam Tabel 6.2 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kota Pekalongan.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	74,57	Tujuan Kota	Kota
	- Angka Kemiskinan	persen	6,3 - 5,93	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	76,70	Tujuan Kota	Kota
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,5 – 4,7	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	77,78	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	19,58	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	90,37	Tujuan Kota	Kota
	- PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	37,16 - 37,82	Tujuan Kota	Kota
	- Jumlah konflik sosial	kasus	0,00	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,35	IKU Kota	Kota
	- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	104,14	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,60	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,61	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,50	IKU Kota	Kota
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,59	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,81	IKU Kota	Kota
	- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	96,24	IKU Kota	Kota
	- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	909,00	IKU Kota	Kota
	- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	IKU Kota	Kota
	- Persentase pelayanan sampah	persen	71,12	IKU Kota	Kota
	- Pertumbuhan ekonomi	persen	5,4 - 5,8	IKU Kota	Kota
	- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	IKU Kota	Kota
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PENDIDIKAN				
	- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	URUSAN KESEHATAN				
	- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	95,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*)	persen	99,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	80,42	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	89,659	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	1,09	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	96,219	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	60	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
- Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	persen	94,36	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS				
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	80,00	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100,00	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	100,00	IKU Renstra	Satpol PP
URUSAN SOSIAL				
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3,55	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN TENAGA KERJA				
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,29	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,52	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	632,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PANGAN				
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PERTANAHAN				
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,34	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	70,68	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	43	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	89,50	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	9,02	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67,55	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PERHUBUNGAN				
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3,05	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88,31 - 100)	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
URUSAN KOPERASI DAN UKM				
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	8,42	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
URUSAN PENANAMAN MODAL				
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	208,37	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
URUSAN KEBUDAYAAN				
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	1,5	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
URUSAN PERPUSTAKAAN				
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK *Outcome*)	indeks	20,32	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN				
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	73,60	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.26	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	14	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
URUSAN STATISTIK				
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	73,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
URUSAN PERSANDIAN				
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	II	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian
URUSAN PILIHAN				
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	15.293,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA				
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	595.000	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
URUSAN PERTANIAN				
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Miliar	251,474	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
URUSAN PERINDUSTRIAN				
- Pertumbuhan Industri	persen	0,09	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
URUSAN PERDAGANGAN				
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,97	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	94,00	IKU Renstra	Setda
SEKRETARIAT DPRD				
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100,00	IKU Renstra	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PERENCANAAN				
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
KEUANGAN				
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	2,01	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
KEPEGAWAIAN				
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	88,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	40,00	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	- Persentase laporan hasil litbang	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
	INSPEKTORAT DAERAH				
	- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	77,42	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	14,00	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
	- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
C.	**ASPEK DAYA SAING**				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,88	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	Tujuan Kota	Kota
- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	73,69	Tujuan Kota	Kota
- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,59	IKU Kota	Kota
- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	IKU Kota	Kota
- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	IKU Kota	Kota
- Indeks Kualitas Air	indeks	35,37	IKU Kota	Kota
- Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	IKU Kota	Kota
- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	IKU Kota	Kota
- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	IKU Kota	Kota
- Persentase keterhubungan jalan	persen	100,00	IKU Kota	Kota
- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	93,33	IKU Kota	Kota
- Indeks SPBE	indeks	3,05	IKU Kota	Kota
- IKM Kota	persen	83,79	IKU Kota	Kota
- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97,00	IKU Kota	Kota
- Indeks Merit System	indeks	250,00	IKU Kota	Kota
- Nilai SAKIP Kota	skor	75,07	IKU Kota	Kota
- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	IKU Kota	Kota
- Maturitas SPIP	nilai	3,60	IKU Kota	Kota
- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	6,00	IKU Kota	Kota

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2023

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun ketiga atas RPJMD Tahun 2021-2026, disusun dengan memperhatikan RKP Tahun 2024, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang relevan. Tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 ditujukan untuk "***Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian***", dan akan dicapai melalui 12 (dua belas) prioritas pembangunan dengan pendekatan mengikuti prinsip *money follows program* dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), yaitu:

1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program;
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan;
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan;
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak;
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan;
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif;
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya;
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024;
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.

Melalui 12 (dua belas) prioritas pembangunan tersebut, target-target pembangunan diharapkan dapat tercapai secara maksimal, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di angka 5,4-5,8 persen, menurunnya tingkat kemiskinan di angka 6,3-5,93 persen, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 76,70, menurunnya

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di angka 4,5-4,7 persen, dan diikuti pencapaian target-target pada indikator kinerja daerah.

Dengan capaian pembangunan Kota Pekalongan yang maksimal, turut berkontribusi pada keberhasilan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Pekalongan, 11 Juli 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2023.

Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023.

www.bps.go.id, 2023.

https://idsdjateng.id, 2023.

https://indeks-inovasi.brin.go.id, 2023.

BAPPEDA
Membangun
Bersama
Masyarakat

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

City Of Crafts and Folk Art

Kota Pekalongan
Designed UNESCO
Creative City In 2014

Pekalongan
World's City of Batik

Peraturan Wali Kota Pekalongan
Nomor : 22
Tanggal : 9 Juli 2024

PERUBAHAN RKPD

(RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Mataram No.1 Pekalongan Telp. (0285) 421091 Kode Pos 51128
Laman: https://pekalongankota.go.id/ E-mail: pekalongankota.go.id

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
Nomor 22 Tahun 2024

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (Berta Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pekalongan tahun 2023 Nomor 53), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 9 Juli 2024,

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

NUR PRIYANTOMO

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2024

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Juli 2024,

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 3

1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 4

1.3.2. RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 6

1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2024 7

1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 8

1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 8

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 9

1.4.1. Maksud 9

1.4.2. Tujuan 9

1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN 9

1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 10

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 11

2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 11

2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah 11

2.1.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2024 25

2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 77

2.1.4. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2023 86

2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 104

2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 104

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 105

2.3. ISU STRATEGIS 112

2.3.1. Tata Kelola Pemerintahan 113

2.3.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup 115

2.3.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman 117
2.3.4. Peningkatan Derajat Kesehatan 119
2.3.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran 121
2.3.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 123
2.3.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal 125
2.3.8. Pelestarian Budaya Lokal 127
2.3.9. Kondusivitas Wilayah 128
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 131
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 131
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 131
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 137
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 141
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 142
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 143
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 147
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 147
4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026 147
4.1.2. Misi 151
4.1.3. Tujuan Dan Sasaran 154
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024 165
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional 165
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 175
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan 179
4.2.4. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Nasional 219
4.2.5. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah 231
4.2.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD 243
4.3. Inovasi Kebijakan Pembangunan 244
4.4. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas 246
4.4.1. Teknokratik 246
4.4.2. Partisipatif 251
4.4.3. Politis 252
4.4.4. Atas-bawah dan bawah-atas 263
4.5. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial 264
4.5.1. Holistik-tematik 264
4.5.2. Integratif 265
4.5.3. Spasial 273

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 275

5.1. Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Dengan Pagu Anggaran 275

5.2. Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 286

5.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 286

5.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 289

5.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 296

5.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 298

5.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 299

5.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 301

5.2.7. Unsur Kewilayahan 301

5.2.8. Unsur Pemerintahan Umum 302

5.2.9. Non Urusan 302

5.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024 685

BAB VI PENUTUP 687

DAFTAR PUSTAKA 689

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2016-2021 4

Tabel 1.2 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 6

Tabel 1.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional 7

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan sd Triwulan II Tahun 2024 12

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sd Triwulan II Tahun 2024 25

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sd Triwulan II Tahun 2024 26

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sd Triwulan II Tahun 2024 28

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sd Triwulan II Tahun 2024 30

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sd Triwulan II Tahun 2024 32

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sd Triwulan II Tahun 2024 33

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sd Triwulan II Tahun 2024 35

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sd Triwulan II Tahun 2024 36

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sd Triwulan II Tahun 2024 37

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sd Triwulan II Tahun 2024 38

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sd Triwulan II Tahun 2024 39

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sd Triwulan II Tahun 2024 41

Tabel 2.14 Capaian Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sd Triwulan II Tahun 2024 42

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sd Triwulan II Tahun 2024 43
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sd Triwulan II Tahun 2024 44
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sd TriwulanI II Tahun 2024 45
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM sd Triwulan II Tahun 2024 46
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal sd Triwulan II Tahun 2024 47
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sd Triwulan II Tahun 2024 48
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sd Triwulan II Tahun 2024 49
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sd Triwulan II Tahun 2024 50
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sd Triwulan II Tahun 2024 50
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perpustakaan sd Triwulan II Tahun 2024 51
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sd Triwulan II Tahun 2024 52
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan sd Triwulan II Tahun 2024 54
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sd Triwulan II Tahun 2024 55
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sd Triwulan II Tahun 2024 57
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sd Triwulan II Tahun 2024 59
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sd Triwulan II Tahun 2024 61
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Indikator Program Sekretariat Daerah sd Triwulan II Tahun 2024 62
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Indikator Program Sekretariat DPRD sd Triwulan II Tahun 2024 64
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan sd Triwulan II Tahun 2024 65
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Keuangan Daerah sd Triwulan II Tahun 2024 66
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Indikator Program Kepegawaian sd Triwulan II Tahun 2024 68

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan sd Triwulan II Tahun 2024 69
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Indikator Program Penelitian dan Pengembangan sd Triwulan II Tahun 2024 69
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Indikator Program Inspektorat sd Triwulan II Tahun 2024..... 70
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Indikator Program Penelitian dan Pengembangan sd Triwulan II Tahun 2024 71
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Indikator Program Kesatuan Bangsa dan Politik sd Triwulan I Tahun 2024 75
Tabel 2.41 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 79
Tabel 2.42 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023..... 81
Tabel 2.43 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 82
Tabel 2.44 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 83
Tabel 2.45 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023..... 84
Tabel 2.46 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023..... 86
Tabel 2.47 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2023..... 87
Tabel 2.48 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2023..... 96
Tabel 2.49 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2023..... 99
Tabel 2.50 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2023..... 102
Tabel 2.51 Permasalahan Pembangunan Daerah..... 104
Tabel 2.52 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... 106
Tabel 2.53 Isu Strategis..... 112
Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen) 133
Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 – 2023 134
Tabel 3.3 nflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019..... 136
Tabel 3.4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023..... 136

Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan 139
Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan 139
Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan 140
Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan ... 140
Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan 140
Tabel 3.10 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan 141
Tabel 3.11 Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2024 144
Tabel 3.12 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2024 145
Tabel 3.13 Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 146
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026 Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius” 157
Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 161
Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 164
Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 181
Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 183
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 191
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 192
Tabel 4.8 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 199
Tabel 4.9 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional 220
Tabel 4.10 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah 232
Tabel 4.11 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 246
Tabel 4.12 Penyusunan RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif 251
Tabel 4.13 Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD 252
Tabel 4.14 Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 262
Tabel 4.15 Konsep Holistik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan 264
Tabel 4.16 Konsep Integratif Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan 265
Tabel 5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2024 276

Tabel 5.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 304
Tabel 5.3 Perubahan Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 685

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen 4
Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 132
Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023 133
Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023 135
Gambar 3.4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023 135
Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi 154
Gambar 4.2 Visi, Misi dan Tema Pembangunan Kota Pekalongan 264

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024. Seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, perubahan kebijakan juga disebabkan oleh perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan pertimbangan diatas, serta memperhatikan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024, dan kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

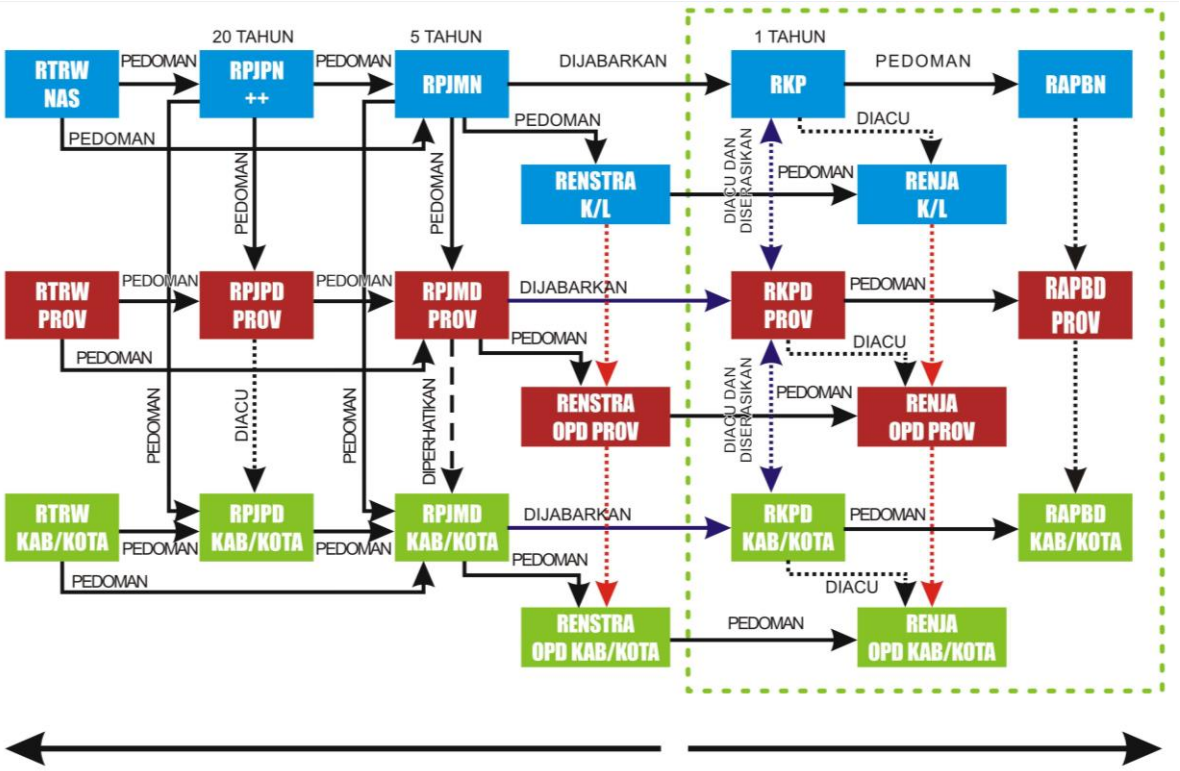
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
32. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Bagan hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun keempat RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 yang dituangkan di dalam RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun 2024.

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024
Tema	*Evaluasi Dan Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian*	*Tema*	*Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian*
1	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	1	Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024
2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.2. RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sinergitas pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan. Sinergitas RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Kota Pekalongan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
		9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
		3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak
		10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
3	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
4	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
		12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2024

Sebagaimana sinergitas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah, sinergitas pembangunan dengan Pemerintah Pusat juga dilakukan. RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RKP tahun 2024, dilakukan dengan penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dan Nasional. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Nasional disajikan dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	**PRIORITAS**	**NO.**	**PRIORITAS**
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
		2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
		3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	**PRIORITAS**	**NO.**	**PRIORITAS**
			pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10	10Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
		12	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2024. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota, menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan tersebut akan dievaluasi dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah dengan memperhatikan:

a. hasil evaluasi indikator kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024;
b. kondisi perekonomian daerah;
c. kebijakan yang bersifat mandatory.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah:

a. Mensinkronkan dan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2024;
b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Wali Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
c. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
d. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
e. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;
f. Sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan, meliputi:

a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer Pusat;
b. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
e. Pergeseran anggaran, penghapusan dan penambahan kegiatan/sub kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi triwulan II RKPD Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
2. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2024 yang menjadi isu permasalahan daerah.
3. Isu Strategis berisi rumusan isu-isu berdasarkan data capaian pembangunan dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2024, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2024, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan tahun 202, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana program dan kegiatan daerah tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan perubahan kerangka pendanaan pada tahun 2024.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 telah dilakukan upaya agar sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017, bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 memperhatikan hasil evaluasi RKPD triwulan II tahun 2024. Evaluasi capaian indikator kinerja ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terdiri atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi terbagi dalam 4 kategori, yaitu tercapai, akan tercapai, tidak tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 di tahun 2024 dari 101 indikator sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap penetapan RKPD tahun 2024
    a. Tercapai : 21 indikator (20,79%)
    b. Akan tercapai : 5 indikator (4,95%)
    c. Belum tercapai : 25 indikator (24,75%)
    d. Belum tersedia data : 50 indikator (49,51%)
2. Evaluasi terhadap target akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
    a. Tercapai : 16 Indikator (15,84%)
    b. Akan tercapai : 2 Indikator (1,98%)
    c. Belum tercapai : 35 Indikator (34,65%)
    d. Belum tersedia data : 48 Indikator (47,53%)

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan sd Triwulan II Tahun 2024

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.66	74.44	74.60	74.57	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
2	Angka Kemiskinan	Persen	5.89	7.59	6.81	6.29	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.03	75.40	76.71	75.71	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.99	6.89	5.02	6.31	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
5	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Persen	100.00	55.56	70.37	77.78	70.37	90.47	Akan Tercapai	70,37	70.37	Belum Tercapai
6	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	Persen	12.17	37.27	18.98	19.58	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	18.98	64.12	Belum Tercapai
7	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Persen	91.04	n/a	90.48	90.37	66.67	71.77	Belum Tercapai	66.67	73.23	Belum Tercapai
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa/ Tahun	40.65	n/a	43.29	37.82	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
9	Jumlah konflik sosial	Kasus	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Tercapai	0.00	100.00	Tercapai
10	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.50	n/a	0.35	0.35	0.35	100.00	Tercapai	0.35	70.00	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	80.01	188.23	122.77	104.14	102.77	101.33	Tercapai	102.77	77.85	Belum Tercapai
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7.00	8.90	13.71	7.60	16.44	46.23	Belum Tercapai	16.44	42.58	Belum Tercapai
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9.00	10.27	18.42	9.61	18.50	51.95	Belum Tercapai	18.50	48.65	Belum Tercapai
14	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	11.89	n/a	4.40	2.50	2.39	95.60	Akan Tercapai	2.39	95.60	Belum Tercapai
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61.00	57.87	n/a	59.59	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.34	75.77	73.95	70.81	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
17	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	100.00	n/a	95.09	96.24	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	95.09	95.09	Belum Tercapai
18	Luas Genangan Banjir dan Rob	Hektar	565.00	1730.00	880.83	909.00	880.83	103.20	Tercapai	880.83	64.14	Belum Tercapai
19	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
20	Persentase pelayanan sampah	Persen	73.12	73.75	71.45	71.12	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
21	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4.55	3.59	5.44	3.32	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Pelayanan Umum												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Pendidikan												
1	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100.00	59.51	99.67	100.00	98.65	98.65	Akan Tercapai	98.65	98.65	Akan Tercapai
2	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Kesehatan												
3	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100.00	n/a	106.85	95.00	35.99	37.88	Belum Tercapai	35.99	35.99	35.99
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang												
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Persen	99.40	n/a	100.00	99.00	100.00	101.01	Tercapai	100.00	100.60	Tercapai
5	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	87.83	n/a	77.88	80.42	77.88	96.84	Akan Tercapai	77.88	88.67	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	92.115	n/a	100.00	89.66	100.00	111.53	Tercapai	100.00	108.56	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1.09	n/a	2.19	1.09	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Regulasi	96.251	n/a	99.89	96.22	99.45	103.36	Tercapai	99.45	103.32	Tercapai
9	Pengembangan Sarana Persampahan	Persen	100.00	n/a	20.00	60.00	60.00	100.00	Tercapai	60.00	60.00	Belum Tercapai
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman												
10	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	95.58	97.93	98.76	94.36	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Linmas												
11	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	100.00	n/a	82.41	80.00	85.10	106.38	Tercapai	85.10	85.10	Belum Tercapai
12	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100.00	11.77	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
13	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Sosial												
14	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3.82	n/a	17.64	3.55	0.01	0.28	Belum Tercapai	0.01	0.26	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Tenaga Kerja												
15	Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan	Persen	52.36	68.00	49.26	52.29	21.02	40.20	Belum Tercapai	21.02	40.15	Belum Tercapai
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												
16	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28.53	n/a	n/a	28.52	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
187	Skor Kota Layak Anak	Skor	636.00	602.00	769.80	632.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Pangan												
18	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Pertanahan												
19	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100.00	n/a	n/a	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Lingkungan Hidup												
20	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	n/a	28.57	60.00	14.29	419.87	Tercapai	14.29	419.87	Tercapai
21	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0.34	0.00	1.31	0.34	0.00	0.00	Belum Tercapai	0.00	0.00	Belum Tercapai
22	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	69.91	n/a	95.20	70.68	23.65	33.46	Belum Tercapai	23.65	33.83	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Tertib Hukum Lingkungan	Persen	60.10	20.00	43.04	43.00	18.83	43.79	Belum Tercapai	18.83	31.33	Belum Tercapai
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												
24	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	91.38	82.37	83.56	89.50	87.90	98.21	Akan Tercapai	87.90	96.19	Akan Tercapai
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												
25	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10.00	n/a	8.45	9.02	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana												
26	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67.65	n/a	61.46	67.55	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Perhubungan												
27	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	28.00	n/a	24.69	28.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Komunikasi Dan Informatika												
28	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.25	n/a	3.29	3.05	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
29	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100)	n/a	96.62	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100.00)	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Koperasi dan UKM												
30	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	9.02	n/a	11.46	8.42	10.23	121.50	Tercapai	10.23	113.41	Tercapai
Urusan Penanaman Modal												
31	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	216.78	410.60	765.82	208.37	18.01	8.64	Belum Tercapai	18.01	8.31	Belum Tercapai
Urusan Kebudayaan												
32	Persentase Peningkatan Kelompok Budaya	Persen	1.46	47.20	1.53	1.50	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Perpustakaan												
33	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	Indeks	20.73	n/a	19.25	20.32	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Kearsipan												
34	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	Indeks	74.40	87.59	91.02	73.60	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga												
35	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.37	n/a	1.39	1.26	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
36	Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15.00	4.00	6.00	14.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Statistik												
37	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80.00	n/a	77.73	73.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Persandian												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Indeks Tata Kelola KAMI	Tingkat	2	n/a	II	II	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
URUSAN PILIHAN												
Urusan Kelautan dan Perikanan												
39	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15,600.00	n/a	10,123.79	15,293.00	5,438.42	35.56	Belum Tercapai	5,438.42	34.86	Belum Tercapai
Urusan Pariwisata												
40	Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	625,000	316,440	1,258,597	595,000	89,595	15.06	Belum Tercapai	89,595	14.36	Belum Tercapai
Urusan Pertanian												
41	Nilai produksi tanaman pangan. hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	259,492,900	n/a	637,811,340	251,474,390	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Perindustrian												
42	Pertumbuhan Industri	Persen	0.07	2.38	2.30	0.09	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Perdagangan												
43	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	27.51	n/a	11.09	26.97	5.96	22.10	Belum Tercapai	5.96	21.66	Belum Tercapai
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Sekretariat Daerah												
44	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	94.00	n/a	96.38	94.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Sekretariat DPRD												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	Belum Tercapai	50.00	50.00	Belum Tercapai
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Perencanaan												
46	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100.00	97.33	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Keuangan												
47	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	33.33	33.33	Belum Tercapai	33.33	33.33	Belum Tercapai
48	Rasio PAD	Persen	2.06	n/a	2.26	2.01	0.93	46.27	Belum Tercapai	0.93	45.15	Belum Tercapai
Kepegawaian												
49	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90.00	n/a	98.90	88.00	99.78	113.39	Tercapai	99.78	110.87	Tercapai
Pendidikan dan Pelatihan												
50	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Persen	40.00	n/a	34.37	40.00	18.72	46.80	Belum Tercapai	18.72	46.80	Belum Tercapai
Penelitian dan Pengembangan												
51	Persentase Laporan Hasil Litbang	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
Inspektorat Daerah												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	100.00	n/a	66.67	77.42	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
53	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	16.00	n/a	14.00	14.00	0.00	0.00	Belum Tercapai	14.00	87.50	Belum Tercapai
URUSAN KEWILAYAHAN												
Kecamatan												
54	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec.Pekalongan Utara)	Persen	100.00	n/a	99.84	100.00	59.49	59.49	Belum Tercapai	59.49	59.49	Belum Tercapai
55	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100.00	n/a	99.87	100.00	42.11	42.11	Belum Tercapai	42.11	42.11	Belum Tercapai
56	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100.00	n/a	99.73	100.00	66.64	66.64	Belum Tercapai	66.64	66.64	Belum Tercapai
57	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	38.13	38.13	Belum Tercapai	38.13	38.13	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Timur)											
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
Kesatuan Bangsa dan Politik												
58	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	35.51	35.51	Belum Tercapai	35.51	35.51	Belum Tercapai
59	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Daya Saing												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50.90	54.31	56.24	50.88	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75.69	69.66	77.12	73.69	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.92	9.18	9.29	9.59	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
5	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Madya	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	35.39	13.29	48.86	35.37	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	23.61	5.17	24.39	23.60	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
9	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Regulasi	7.00	n/a	3.00	7.00	3.00	42.86	Belum Tercapai	3.00	42.86	Belum Tercapai
10	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	C	B	B	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
11	Persentase keterhubungan jalan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
12	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persen	100.00	n/a	111.11	93.33	117.78	126.20	Tercapai	117.78	117.78	Tercapai
13	Indeks SPBE	Indeks	3.25	n/a	3.29	3.05	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
14	IKM Kota	Persen	84.09	80.83	90.69	83.79	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97.50	n/a	96.62	97.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
16	Indeks Merit System	Indeks	260.00	n/a	327.00	250.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
17	Nilai SAKIP Kota	Skor	76.07	73.16	72.83	75.07	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Kategori	WTP	WTP	n/a	WTP	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
19	Maturitas SPIP	Nilai	4.00	3.00	3.002	3.60	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
20	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	8.00	n/a	3.00	6.00	3.00	50.00	Belum Tercapai	3.00	37.50	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah). 2024

2.1.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2024

2.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100.00	100.00	38.55	38.55	38.55	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	103.01	100.00	33.17	33.17	33.17	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100.00	100.00	54.98	54.98	54.98	Belum Tercapai
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan										
1	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	100	76.37	99.67	89.50	98.65	98.65	98.65	Akan Tercapai
1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum										
1	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan										
1	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100	100	56.11	100.00	56.11	56.11	56.11	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan **tidak memenuhi target** dikarenakan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai SPM (2.414) belum sebanding dengan jumlah kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai SPM (4.302), sementara alokasi kuota sertifikasi pendidik yang disediakan Pemerintah Pusat terbatas.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	30.99	30.99	30.99	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	32.23	32.23	32.23	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.34	33.34	33.34	Belum Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
6	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.33	33.33	33.33	Belum Tercapai
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
1	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	Persen	92.00	88.00	18.00	91.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota **belum tersedia data** dikarenakan Belum ada data rilis Jumlah penduduk Tahun 2024.										
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	Persen	90.00	70.00	72.00	85.00	60.22	60.22	66.91	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar tidak memenuhi target dikarenakan Pemenuhan SPA Puskesmas belum sesuai standart . SPA sesuai standart baru akan dilaksanakan pada tahun ini. Pengadaan di Tahun 2025.										
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	72.50	60.00	100.00	67.50	100.00	100.00	100.00	Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar **jauh melebihi target** dikarenakan Pengembangan Pelayanan dan Inovasi di RSUD Bendan dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Tipe C)										
1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan										
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95.50	93.00	90.59	94.50	100.00	100.00	105.82	Tercapai
2	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	60.00	35.00	100.00	50.00	100.00	100.00	166.67	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan jauh melebihi target dikarenakan Capaian jauh melebihi target dikarenakan adanya UU Nomor 17 tahun 2023 dimana diwajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR dan SIP, sehingga pada saat ini semua tenaga kesehatan RSUD yang masuk dan bekerja di RSUD telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.										
1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman										
1	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	62.50	62.50	62.50	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar **tidak memenuhi target** dikarenakan Pengawasan belum dilakukan ke seluruh sarana farmasi yang ada.										
2	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	Persen	100.00	92.00	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tersedia Data
Indikator Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran belum tersedia data dikarenakan Belum dilakukan pengujian sampel PIRT Pengujian akan dilakukan di TW III.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	97.00	95.00	94.22	96.00	64.58	64.58	66.58	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat **tidak memenuhi target** dikarenakan masih terdapat tempat pengelolaan makanan (TPM) dan depot air minum (DAM) yang belum memenuhi syarat, seperti misalnya tidak tersedianya tempat cuci tangan dan sebagainya.										
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
1	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95	90	98.65	93.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase Rumah Tangga Sehat tidak memenuhi target dikarenakan data tahunan (baru bisa dihitung di akhir tahun)										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.14	41.14	41.14	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.28	100.00	43.83	43.83	43.83	Belum Tercapai
3	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	37.68	37.68	37.68	Belum Tercapai
1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	Persen	93.10	82.76	100.00	93.10	100.00	100.00	107.41	Tercapai
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum										
1	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Persen	92.11	85.77	67.42	89.66	67.42	67.42	73.19	Belum Tercapai
Capaian indikator Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah **tidak memenuhi target** dikarenakan pada triwulan II pekerjaan fisik yang mendukung capaian program ini masih dalam tahap perencanaan (perluasan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (lokus nya di daerah : Kel. Panjang Wetan, Bugisan, Kel. Setono dan Kel. Kuripan Kertoharjo)										
1.03.04. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional										
1	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	100.00	0.00	20.00	60.00	20.00	20.00	20.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional **tidak memenuhi target** dikarenakan pada triwulan II pekerjaan fisik yang mendukung capaian program ini masih dalam tahap perencanaan (TPS3R = kampung bugisan kelurahan panjang wetan (DAK PPKT), TPST = kelurahan kuripan kertoharjo (Kemitraan)) dan rencana realisasi pembangunan di triwulan III.										
1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah										
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	12.87	9.87	17.68	11.67	17.82	17.82	138.48	Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan masih terdapat penambahan jumlah terlayani pengolahan air limbah domestik pada tahun berjalan.										
1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase										
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	71.49	66.45	68.58	69.48	68.58	68.58	95.93	Akan Tercapai
1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung										
1	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18.74	17.24	17.34	18.14	17.26	17.26	92.10	Akan Tercapai
1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan										
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	86.57	81.12	83.77	84.39	82.16	82.16	94.91	Akan Tercapai
1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	21.20	7.87	7.61	15.87	8.79	8.79	41.46	Belum Tercapai
Capaian indikator Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi **tidak memenuhi target** dikarenakan Tahun 2024 di rencanakan 40 Peserta, namun hanya 36 peserta yang mendapat Sertifikat (4 orang tidak hadir).										
1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
1	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100.00	0.00	45.24	100.00	45.24	45.24	45.24	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota **tidak memenuhi target** dikarenakan masih dalam proses harmonisasi Perkada di bagian Hukum Provinsi (masih menunggu antrian), dan sampai akhir tahun RPJMD pencapaian target program ini bertahap dengan target (tahun 2024 : Perwal RDTR, Perwal Penataan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; tahun 2025 : Perwal Penyelenggaraan Bangunan Gedung).									

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	99.17	100.00	38.89	38.89	38.89	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.24	33.24	33.24	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	16.67	16.67	16.67	Belum Tercapai
1.04.02. Program Pengembangan Perumahan										
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	92.35	0.00	100.00	91.68	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni **belum tersedia data** dikarenakan Data Tahunan, capaian akan diperhitungkan di akhir tahun (TW. IV)										
1.04.03. Program Kawasan Permukiman										
1	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	0.00	498.47	227.55	174.47	227.55	227.55	< target	Belum Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman kumuh **tidak memenuhi target** dikarenakan Bahwa target akhir tahun RPJMD adalah 0 ha Luas Kawasan permukiman kumuh, Dimana saat awal RPJMD kondisinya masih ada sekitar 498,47 Ha. Dan pada akhir tahun 2023 sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh masih sekitar 227,5 Ha. Terbatasnya anggaran dalam menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh belum lagi selama 2 tahun keadaan negara dilanda covid-19 sehingga menyebabkan banyak anggaran fisik terkena recofusing.										
1.04.04. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh										
1	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	2147.88	1649.41	1,920.55	1,973.41	1.920,55	1.920,55	89.42	Belum Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman tidak kumuh **tidak memenuhi target** dikarenakan Bahwa target akhir tahun RPJMD adalah 2147,88 ha Luas Kawasan permukiman tidak kumuh, Dimana saat awal RPJMD kondisinya masih ada sekitar 1649,41 Ha. Dan pada akhir tahun 2023 sisa Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh masih sekitar 1920,55 Ha. Terbatasnya anggaran dalam menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh belum lagi selama 2 tahun keadaan negara dilanda covid-19 sehingga menyebabkan banyak anggaran fisik terkena recofusing.										
1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)										
1	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14.55	14.44	15.86	14.51	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian Indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) **belum tersedia data** dikarenakan Data Tahunan, capaian akan diperhitungkan di akhir tahun (TW. IV).										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	38.89	38.89	38.89	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.81	33.81	33.81	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	9.51	9.51	9.51	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	37.78	37.78	37.78	Belum Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.81	33.81	33.81	Belum Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.64	50.64	50.64	Belum Tercapai
1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum										
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Persen	70.00	60.00	80.00	66.00	60.00	60.00	85.71	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan dari jumlah 20 Perda pelaksanaan penegakan Perda berdasarkan laporan masyarakat hanya terkait 12 Perda saja.										
1.05.03. Program Penanggulangan Bencana										
1	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran										
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100.00	100.00	42.23	42.23	42.23	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	36.35	36.35	36.35	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	53.65	53.65	53.65	Belum Tercapai
1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial										
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75	42	65.41	67.00	47.17	47.17	62.89	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan **tidak memenuhi target** dikarenakan ada beberapa data yang belum bisa diperoleh, diantara lain : 1. PSM, 2. Tagana 3. LK3 4. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 5. Dunia Usaha 6. Pekerja Sosial Profesional										
1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial										
1	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	52.49	60.45	57.38	55.12	72.06	72.06	137.28	Tercapai
Capaian indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial **jauh melebihi target** dikarenakan adanya pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang diharapkan dapat mengakuratkan kategori masyarakat miskin yang masuk kedalam DTKS										
1.06.06. Program Penanganan Bencana										
1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan										
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100.00	100.00	0.00	00.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan **tidak memenuhi target** dikarenakan Rencana pemeliharaan akan dilaksanakan akhir Juli										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja										
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	persen	0.55	0.33	1.09	0.46	0.87	0.87	158.18	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan Tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Dinperinaker adalah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan di BLK (Dana APBD, APBN) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dari tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Hal ini dikarenakan dukungan anggaran pelatihan dari Sumber DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang cukup besar sehingga paket pelatihan yang ditawarkan juga lebih banyak dan variatif. Banyaknya tenaga kerja bersertifikat kompetensi ini menggambarkan besarnya animo pencari kerja untuk mengikuti pendidikan pelatihan baik yang ada di BLK maupun LPKS. Dengan meningkatnya jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi ini, diharapkan mereka segera memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan									
2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja										
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	29.93	19.93	16.70	25.93	22.66	22.66	75.71	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Berbagai sebab yang mendasari hal ini antara lain, 1)kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, 2)kurangnya minat pencari kerja di Kota Pekalongan untuk bekerja di luar kota, 3)adanya PHK dari beberapa perusahaan.									
2.07.05. Program Hubungan Industrial										
1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	49.02	45.33	49.93	47.51	50.93	50.93	103.90	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan										
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	11.09	1.85	5.98	7.39	9.79	9.79	88.28	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender **tidak memenuhi target** dikarenakan Tahun 2024 = 62 sub kegiatan yang sudah responsif gender dengan perhitungan target berdasarkan jumlah sub kegiatan pada saat penetapan APBD dengan membandingkan jumlah seluruh sub kegiatan s.d. perubahan APBD 2024.										
2.08.03. Program Perlindungan Perempuan										
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	23.99	23.99	15.01	23.99	3.97	3.97	604.28	Tercapai
Capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan jumlah 9 (sembilan) orang dari jumlah penduduk perempuan 113.246 (data Dindukcapil Smt II tahun 2023) . Upaya yang sudah dilakukan oleh DPMPPA sehingga bisa menimimalisasi kejadian kekerasan terhadap perempuan atau usaha penanganan kasus kekerasan thd perempuan, sebagai berikut : (1) sosialisasi dan edukasi terhadap kader-kader PKK; (2) advokasi dan pendampingan sebagai tindak lanjut atas pengaduan kasus kekerasan.										
2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (pha)										
1	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55.56	25.93	33.33	40.74	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) **tidak memenuhi target** dikarenakan Sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian Dekela. Upaya yg dilakukan oleh DPMPPA untuk membuat seluruh kelurahan mjd kelurahan ramah anak atau peningkatan jumlah kelurahan ramah anak, yaitu melakukan evaluasi kelurahan ramah anak triwulanan. Penilaian Dekela direncanakan dilaksanakan di akhir tahun.										
2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak										
1	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat										
1	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4.8	3.8	4.45	4.60	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase cadangan pangan daerah **tidak memenuhi target** dikarenakan penyaluran pangan belum dilaksanakan masih menunggu SK Walikota.										
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan										
1	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan										
1	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	88	80	91.73	84.80	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan **tidak memenuhi target** dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan di triwulan III.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan										
1	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100	0	100.00	100.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian Indikator Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani **belum tersedia data** dikarenakan belum ada permasalahan pertanahan yang perlu ditangani sampai dengan triwulan II.										
2.10.06. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee										
1	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50	0	0.00	50.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian Indikator Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee **belum tersedia data** dikarenakan belum ada penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	103.06	100.00	34.26	34.26	34.26	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	84.85	84.85	84.85	Belum Tercapai
2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
1	Persentase limbah yang diolah	persen	49.01	33.37	92.65	45.02	27.06	27.06	55.21	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase limbah yang diolah **tidak memenuhi target** dikarenakan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tidak ada pembangunan IPAL baru ataupun revitalisasi IPAL sehingga jumlah limbah yang dapat diolah, masih tetap sesuai dengan kemampuan IPAL eksisting.										
2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)										
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2.95	2.89	2.94	2.93	3.13	3.13	106.10	Tercapai
2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)										
1	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	100.00	31.12	57.78	13.33	64.44	64.44	64.44	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan **tidak memenuhi target** dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2021 s.d 2026 dengan target 45 perusahaan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah tercapai 64,44 persen (29 perusahaan).										
2.11.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh)										
1	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	100.00	16.67	40.67	16.67	45.67	45.67	45.67	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH **tidak memenuhi target** dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2022 s.d 2026 dengan target 600 usaha/kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah tercapai 45,67 persen (264 usaha/kegiatan)										
2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	200.00	Tercapai
Capaian indikator Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup **jauh melebihi target** dikarenakan Komunitas selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan DLH dalam rangka memperingati Hari Besar Lingkungan Hidup atau untuk kegiatan penghijauan, pembersihan lingkungan, dan lain-lain.										
2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75.00	75.00	100.00	75.00	25.00	25.00	33.33	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase perolehan penghargaan bidang LH **tidak memenuhi target** dikarenakan Kegiatan di DLH ada 4 penghargaan yang diselenggarakan: CSAP, CSAN/CSAM, CSAK, dan Proper. Namun target ada 3 kegiatan yg mendapat penghargaan. Dikarenakan minat sekolah yang mengikuti seleksi sekolah adiwiyata semakin menurun. Namun Kota Pekalongan sudah mendapatkan penghargaan SCAP sebanyak 3 sekolah. CSAN/CSAM Kota Pekalongan hanya mengirimkan 1 sekolah dan belum ada hasil penilaian. Utuk CSAK dan Proper akan dilaksanakan pada TW IV.										
2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										
1	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan										
1	Persentase pengelolaan sampah	persen	0.31	2.19	0.31	0.29	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pengelolaan sampah **tidak memenuhi target** dikarenakan capaian akhir program baru dapat diperhitungkan di akhir tahun.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.46	100.00	47.94	47.94	47.94	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	77.78	100.00	69.87	69.87	69.87	Belum Tercapai
2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88.75	80.00	86.69	85.30	87.93	87.93	99.08	Akan Tercapai
2.12.03. Program Pencatatan Sipil										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	94.00	93.25	80.43	93.70	87.87	87.87	93.48	Akan Tercapai
2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14.00	5.00	9.00	10.00	9.00	9.00	64.29	Belum Tercapai
Capaian indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan Proses pengajuan terkendala adanya Persyaratan sertifikasi ISO keamanan data yang belum bisa dipenuhi oleh OPD.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel 2.14 Capaian Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II- 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	101.77	100.00	28.83	28.83	28.83	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.19	25.19	25.19	Belum Tercapai
2.13.03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa										
1	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	Persen	100.00	16.67	50.00	66.67	61.11	61.11	61.11	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan **tidak memenuhi target** dikarenakan Kegiatan TMMD dilaksanakan tiap tahun dengan target untuk memfasilitasi 3 Kelurahan tiap tahunnya hingga akhir tahun RPJMD, sampai dengan triwulan II tahun 2024 ada 11 kelurahan dari target 18 kelurahan yang difasilitasi.										
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa										
1	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	Persen	70.37	51.85	81.48	62.96	70.37	70.37	100.00	Tercapai
2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat										
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	96.92	95.97	97.64	96.54	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat **tidak memenuhi target** dikarenakan merupakan data tahunan sehingga capaian akhir baru dapat diperhitungkan di Triwulan IV										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.02. Program Pengendalian Penduduk										
1	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100.00	100.00	70.28	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga **tidak memenuhi target** dikarenakan rencana pendataan baru akan dilakukan di triwulan IV 2024.										
2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)										
1	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7.20	8.20	14.44	7.60	4.82	4.82	149.53	Tercapai
Capaian indikator Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun **jauh melebihi target** dikarenakan seiring berkurang nya jumlah pernikahan.										
2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)										
1	Unmeet need KB	Persen	12.00	17.00	14.95	14.00	11.52	11.52	104.14	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	40.00	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.12	100.00	29.24	29.24	29.24	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	56.46	56.46	56.46	Belum Tercapai
2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj)										
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	100.00	87.00	164.69	95.00	164.69	164.69	164.69	Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ **jauh melebihi target** dikarenakan Jumlah lampu PJU yang bermeterisasi tercapai lebih banyak dari target serta bertambahnya lokasi pembangunan lampu PJU baru.										
2	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0.44	0.35	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan Perhitungan capaian program akan dilaksanakan di triwulan IV										
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0.74	17.94	-9.90	0.75	-56.17	-56.17	-7.590	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala **tidak memenuhi target** dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan telah melakukan upaya mengingatkan uji berkala dengan via SMS Gateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan. Pada tahun 2024 ini pelaksanaan uji berkala juga sudah tidak berbayar, dengan adanya Uji Kir gratis diharapkan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji meningkat dari tahun sebelumnya.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sd TriwulanI II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	42.33	42.33	42.33	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.52	100.00	24.18	24.18	24.18	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	58.61	58.61	58.61	Belum Tercapai
2.16.02. Program Informasi Dan Komunikasi Publik										
1	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	95.65	95.65	95.65	Akan Tercapai
rogram Aplikasi Informatika										
1	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.30	2.80	3.00	3.10	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi **tidak memenuhi target** dikarenakan masih menunggu rilis nilai dari Kemenpan RB berbarengan dengan penilaian indeks SPBE, karena Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu komponen penilaian indeks SPBE.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.03. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi										
1	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	33.23	24.59	29.70	31.49	20.66	20.66	62.17	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan Belum seluruh koperasi melaksanakan RAT. Dindagkop UKM melalui Bidang Koperasi dan UKM melaksanakan himbauan dan layanan konsultasi untuk koperasi yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan.										
2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian										
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	59.68	38.36	97.20	58.77	35.01	35.01	58.66	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota **tidak memenuhi target** dikarenakan Belum seluruh kegiatan pelatihan terlaksana pada Triwulan II. Direncanakan terdapat beberapa pelatihan akan dilaksanakan di Triwulan III.										
2.17.08. Program Pengembangan Umkm										
1	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12.37	11.85	11.38	12.16	23.71	23.71	191.67	Tercapai
Capaian indikator Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan Capaian tersebut merupakan penjumlahan dari capaian pelaksanaan kegiatan APBD dan Non APBD serta Non DAK (bisa saja bersumber dari Kemenkop UKM atau Diskop Prov).										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II – 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	40.00	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	103.58	100.00	35.87	35.87	35.87	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	80.96	80.96	80.96	Belum Tercapai
2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal										
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6.00	1.00	3.00	1.00	1.00	4.00	66.67	Belum Tercapai
Capaian indikator Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **tidak memenuhi target** dikarenakan Penyusunan Peraturan terkait fasilitas/insentif di bidang penanaman modal sampai akhir tahun RPJMD direncanakan ada 6 dokumen. pada Tahun 2024 telah disusun Perda Nomor 2 Tahun 2024 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Tahun 2025 dan 2026 masing-masing direncanakan menyusun Perwal Turunan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perwal RUPM.									
2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal										
1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **tidak memenuhi target** dikarenakan Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV, berupa keikutsertaan dalam pameran promosi penanaman modal.										
2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II – 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2500.00	2500.00	4,878.00	2,500.00	2,554.00	2,554.00	102.16	Tercapai
2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal										
1	Nilai Invetasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40.514.00	6.42.00	229.10	6.82	n/a	92.35	227.95	Tercapai
Capaian indikator Nilai Invetasi Baru pertahun **jauh melebihi target** dikarenakan Indikator ini bertarget tahunan, sehingga capaian nilai investasi pada triwulan I belum dapat menggambarkan capaian akhir (yang ditampilkan dalam tabel merupakan data investasi baru sampai dengan triwulan I, data triwulan II belum ada rilis data dari BKPM).										
2.18.06. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal										
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	95.24	91.95	95.24	94.31	19.05	19.05	20.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina **tidak memenuhi target** dikarenakan Kegiatan pembinaan kepemudaan belum semua terlaksana di triwulan II. Rencana masih akan dilaksanaan kegiatan pembinaan kepemudaan 20 hingga 25 kali lagi hingga akhir tahun anggaran.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										
1	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	42.86	11.43	55.00	34.29	52.38	52.38	122.21	Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor **jauh melebihi target** dikarenakan ketersedian sarpras olahraga telah memenuhi target dari 21 cabor ada 11 cabor yang difasilitasi sarprasnya.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral										
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100.00	66.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral **tidak memenuhi target** dikarenakan merupakan data tahunan, sehingga perhitungan capaian program akan dilakukan di triwulan IV.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi										
1	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	3.74	0.93	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan **tidak memenuhi target** dikarenakan pengujian kerentanan rencana akan dilaksanakan pada semester II.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan										
1	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	30.77	30.77	30.77	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan **tidak memenuhi target** dikarenakan Beberapa event akan dillaksanakan di TW III dan IV, yaitu : PBN (Pekan Batik Nasional), Kauman Art Festival, Sadranan, Pepadi, Bubur Suro, 1 Muharram (Suronan), Lomba Budaya, panjang jimat, wayang hari pahlawan.										
2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional										
1	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi **tidak memenuhi target** dikarenakan Kegiatan fasilitasi pentas seni akan dilaksanakan di Triwulan III.										
2.22.04. Program Pembinaan Sejarah										
1	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya **tidak memenuhi target** dikarenakan Untuk pembinaan Obyek Wisata Budaya direncanakan akan dilaksanakan kegiatannya di Triwulan III (berupa penyusunan buku tentang soto tauto dan ritus dewi lanjar)										
2.22.05. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya										
1	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	Persen	97.52	88.65	91.67	93.97	91.67	91.67	94.00	Akan Tercapai
2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman										
1	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4.80	4.55	8.29	4.71	53.83	53.83	1.121,41	Tercapai
Capaian indikator Persentase pengunjung museum batik **jauh melebihi target** dikarenakan musim liburan sekolah.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perpustakaan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan										
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	16.58	15.77	27.96	16.25	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) tidak memenuhi target dikarenakan jumlah penduduk usia 5-60 tahun (data BPS belum rilis), sehingga capaian belum dapat diperhitungkan..										
2.23.03. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno										
2	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	Regulasi	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan **tidak memenuhi target** dikarenakan masih proses pembahasan Perwal.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2.24.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.35	100.00	32.65	32.65	32.65	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	43.36	43.36	43.36	Belum Tercapai
2.24.02. Program Pengelolaan Arsip										
1	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	Persen	66.67	33.33	96.67	53.33	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik **belum tersedia data** dikarenakan data Tahunan, pelaksanaan pengawasan di Triwulan II.										
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	52.50	40.00	75.00	47.50	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome) **belum tersedia data** dikarenakan menunggu rilis data bulan Oktober dari ANRI melalui dinarpus Provinsi.										
2.24.03. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip										
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	66.67	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan salah satu komponen perhitungan yaitu : arsip yang di unggah SIKN JIKN belum bisa diunggah pada aplikasi tersebut disebabkan aplikasi SIKN JIKN error.										
2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip										
1	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK **tidak memenuhi target** dikarenakan Belum Tercapai dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan penggunaan arsip yang bersifat tertutup										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	BelumTercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.89	100.00	34.88	34.88	34.88	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	48.46	48.46	48.46	Belum Tercapai
3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	6.07	1.00	-0.04	1.00	0.54	0.54	8.84	Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI **tidak memenuhi target** dikarenakan Terdapat 10 hari pada bulan april tidak ada kegiatan lelang ketika menjelang dan setelah Idul fitri (Syawal).										
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	6.15	1.00	-0.15	1.00	0.43	0.43	43.36	Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI **tidak memenuhi target** dikarenakan Perolehan BBM solar bersubsidi mengalami kendala pada ketersediaan, sehingga kapal kapal tertentu beserta kapal pengikutnya memilih beristirahat.										
3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	6.15	1.00	7.53	1.00	42.75	42.75	350.44	Tercapai
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya **jauh melebihi target** dikarenakan yang dijadikan perhitungan adalah jumlah pengusaha perikanan yang dilakukan pembinaan, sedangkan peningkatan jumlah pengusaha perikanan baru terjadi peningkatan di tahun 2023 dari 246 orang menjadi 344 orang (ada penambahan dari kelompok mercy).										
3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12.20	12.20	26.73	12.20	42.75	42.75		Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan **jauh melebihi target** dikarenakan Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran yang dibina : 155 orang; Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran adalah 345 orang. Adanya Pelaksanaan pembinaan oleh penyuluh secara rutin dalam setiap bulannya dan pembinaan ke lapangan langsung oleh petugas.										
2	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	12.00	2.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) **tidak memenuhi target** dikarenakan proses pencapaian target bertahap hingga akhir periode RPJMD. dimana target setiap tahun adalah 2 Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant).										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TWI II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	116.67	100.00	40.01	40.01	40.01	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	49.79	49.79	49.79	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	54.38	54.38	54.38	Belum Tercapai
3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TWI II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen	12.50	10.00	12.82	11.50	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan Menunggu release data dari BPS.										
3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	Persen	46.98	21.98	243.53	36.98	13.01	13.01	27.69	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya target program belum dilaksanakan, diantaranya : untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan juga akan dilakukan : (1) mengunggulkan USP (Uniqe Selling Point) kota pekalongan yaitu Batik dengan memperkenalkan dan melestarikan budaya local yang unik yaitu pertunjukan tradisional, festival budaya, pameran seni, (2) kolaborasi dengan industry, pariwisata (biro perjalanan/travel agen), (3) diversivikasi produk wisata dengan batik produk Utama atau daya Tarik Utama. berkembang dengan produk wisata, kuliner, toru sejarah kota pekalongan, (4) berjejaring dengan kota2 kreatif dunia (UCCN)									
3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	59.52	0.00	71.33	41.67	71.33	71.33	119.85	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi **jauh melebihi target** dikarenakan capaian indikator ditahun 2022 melebihi target akhir RPJMD karena meningkatnya pelaku EKRAF yang mengikuti kegiatan diakhir masa pandemi covid - 19 sebagai upaya meningkatkan perekonomian para pelaku ekraf yang terdampak pandemi, sehingga walaupun pada tahun 2023 Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak terlaksana dikarenakan anggaran di Drop (Refocussing) capaian programnya tetap melebihi target. Pada Tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan beberapa event/fasilitasi bagi para pelaku EKRAF, yaitu : Fasilitasi HAKI (bulan Mei), Revitalisasi showroom kampung tempe (Agustus), pengadaan alat Podcast (Juni).									
3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	100.00	0.00	296.73	60.00	296.73	296.73	296.73	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar **jauh melebihi target** dikarenakan animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan EKRAF besar. Pada Tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan event/fasilitasi bagi para pelaku EKRAF, yaitu : Festival Balon dan Lomba Fotografi (April), Festival Kuliner Pantura dan Pelatihan Ekonomi Kreatif (Juli), Sertifikasi pelaku pariwisata dan EKRAF (Agustus).									

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40.01	40.01	40.01	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.76	29.76	29.76	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	50.00	100.00	34.95	34.95	34.95	Belum Tercapai
3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian										
1	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55.84	55.56	59.29	55.73	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Nilai produksi pertanian pertahun belum tersedia data dikarenakan Belum ada data publish dari BPS.										
2	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	203.65	184.46	259.61	195.75	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Nilai produksi peternakan pertahun belum tersedia data dikarenakan Belum ada data publish dari BPS.										
3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian **tidak memenuhi target** dikarenakan Kegiatan pembangunan irigasi dan rehab RPH saat ini baru proses perencanaan (dokumen perencanaan sedang disusun oleh konsultan perencana). Rencana pembangunan di Bulan September.										
3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5.00	5.00	98.40	5.00	100.00	100.00	2,000.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular **jauh melebihi target** dikarenakan sampai dengan triwulan II tidak ditemukan kejadian penyakit hewan menular strategis.										
3.27.05. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota **tidak memenuhi target** dikarenakan kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di triwulan I sudah dilaksanakan 2 kali dari target tahunan 4 kali, rencana akan dilaksanakan di semester kedua.										
3.27.06. Program Perizinan Usaha Pertanian										
1	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	100.00	0.00	54.32	75.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin **tidak memenuhi target** dikarenakan kegiatan berupa pengawasan perijinan, sampai dengan triwulan I belum dibentuk Tim Pengawas (sedang di susun SK Tim Pengawas), rencana pendataan di semester II.										
3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian										
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5.00	5.00	8.70	5.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun **tidak memenuhi target** dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kelas kelompok tani di semester kedua.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	101.66	100.00	40.07	40.07	40.07	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	28.57	28.57	28.57	Belum Tercapai
3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan										
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	77.70	73.93	81.07	76.17	82.59	82.59	106.29	Tercapai
3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan										
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	100.00	75.00	68.75	93.75	75.00	75.00	75.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya **tidak memenuhi target** dikarenakan Pembangunan Pasar Kecamatan belum bisa dilaksanakan pada tahun 2024.										
3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting										
1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	100.00	80.00	100.00	92.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.30.05. Program Pengembangan Ekspor										
1	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	8.19	7.24	-0.04	7.79	3.47	3.47	42.37	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Persentase peningkatan volume ekspor **tidak memenuhi target** dikarenakan beberapa eksportir belum melaksanakan kegiatan ekspor pada triwulan II 2024 terkendala karena menurunnya permintaan, perubahan harga komoditas dan ketidakstabilan ekonomi global.										
3.30.06. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen										
1	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	83.99	73.99	59.02	79.99	43.51	43.51	51.80	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan Masih dalam proses pelaksanaan tera - tera ulang di Pasar, Kelurahan dan Kantor Metrologi Legal , sehingga capaian kinerja program belum dapat diperhitungkan.										
3.30.07. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										
1	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	7.50	2.09	0.96	5.34	0.63	0.63	8.40	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) **tidak memenuhi target** dikarenakan Dindagkop sebagai peserta Pameran mengikuti pelaksanaan pameran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Direncanakan terdapat keikutsertaan dalam pameran pada Triwulan III (JPKI dan Kriya Nusa).										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	38.89	38.89	38.89	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.30	100.00	29.80	29.80	29.80	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	47.22	47.22	47.22	Belum Tercapai
3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri										
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	21.04	20.59	75.34	20.75	59.11	59.11	280.94	Tercapai
Capaian indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan awal mula penentuan target hanya mempertimbangkan 1 faktor saja (indikator pertumbuhan jumlah industri) dari 5 faktor turunan RPIK, sedangkan saat ini bisa diperhitungkan keseluruhan 5 faktor turunan RPIK.										
3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota										
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	26.00	23.00	9.04	25.00	15.88	15.88	61.08	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan terbatasnya jumlah SDM dan waktu untuk melakukan pengawasan menyeluruh jika dibandingkan dengan jumlah usaha baru yang mengajukan ijin secara online melalui OSS RBA.										
3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	95.00	100.00	70.00	70.00	70.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan untuk informasi energi/bahan bakar sebagian besar blm bisa didapatkan karena sebagian besar merupakan industri kecil/home industri yang pemakaian energinya bercampur dengan rumah tangga, sehingga informasi industri terkait bahan baku dan bahan penolong tidak bisa diperhitungkan.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Indikator Program Sekretariat Daerah sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
4.01. SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	21.74	21.74	21.74	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	99.71	100.00	30.56	30.56	30.56	Belum Tercapai
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum,dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100.00	100.00	103.65	100.00	34.87	34.87	34.87	Belum Tercapai
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	24.01	24.01	24.01	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	persen	100.00	100.00	75.00	100.00	25.00	25.00	25.00	Belum Tercapai
6	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat										
1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100.00	100	90.00	100.00	11.11	11.11	11.11	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif **tidak memenuhi target** dikarenakan Perda perijinan berusaha sedang dalam tahap rencana harmonisasi, dan belum ada pengajuan draft Perda yang berasal dari eksekutif.										
3	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100.00	100	100.00	100.00	56.00	56.00	56.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat **tidak memenuhi target** dikarenakan Proses hibah ke 22 lembaga belum terlaksana disebabkan proses perbaikan kelengkapan berkas administrasi (proposal) dan pengkajian ulang atas proposal usulan masih berlangsung.										
4.01.03. Program Perekonomian Dan Pembangunan										
1	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100.00	100	100.00	100.00	41.67	41.67	41.67	Akan Tercapai
Capaian indikator Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan **tidak memenuhi target** dikarenakan beberapa kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV (seperti monev penyedia LPG dan pupuk subsidi, Rakor Bidang ekonomi).										
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6.00	7	3.62	6.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) **Belum tersedia data** dikarenakan Menunggu data rekonsiliasi belanja dari BPKAD										
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100.00	100	97.50	100.00	55.56	55.56	55.56	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa **tidak memenuhi target** dikarenakan Jumlah pengadaan (tender/seleksi) yang dilaksanakan : 25, Jumlah total pengadaan yang ditenderkan/diseleksikan : 45. 20 pengadaan (tender/seleksi) akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2. Sekretariat DPRD

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Indikator Program Sekretariat DPRD sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
4.02. SEKRETARIAT DPRD										
4.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	40.00	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.02	100.00	36.13	36.13	36.13	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	42.79	42.79	42.79	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.67	41.67	41.67	Belum Tercapai
4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD										
1	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100.00	100.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan **tidak memenuhi target** dikarenakan Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan Pembahasan Raperda telah selesai, dan sedang masuk ke Bagian Hukum untuk diajukan proses harmonisasi ke provinsi 1. Raperda ttg perubahan ke 3 atas perda no. 5/2016 tentang SOTK 2. Raperda ttg perizinan berusaha 3. Raperda ttg Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.										
2	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu **tidak memenuhi target** dikarenakan Pembahasan dokumen KUA PPAS (Penetapan dan Perubahan) serta dokumen APBD (Penetapan dan Perubahan) rencana dilaksanakan di triwulan III										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5.01. PERENCANAAN										
5.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.08	100.00	33.24	33.24	33.24	Belum Tercapai
3	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	45.82	45.82	45.82	Belum Tercapai
5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu **tidak memenuhi target** dikarenakan penyusunan dokumen per triwulan										
2	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu **tidak memenuhi target** dikarenakan secara penjadwalan rencana dokumen perencanaan daerah adalah sebagai berikut : RKPD 2025: Juli Perubahan RKPD 2024: Juli RPJPD 2025 - 2045: Agustus Ranwal RKPD 2026: Desember Rancangan Teknokratis RPJMD 2025 - 2029: Desember.										
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud **tidak memenuhi target** dikarenakan penyusunan laporan dilaksanakan di triwulan IV										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian **tidak memenuhi target** dikarenakan penyusunan laporan dilaksanakan di triwulan IV										
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah **tidak memenuhi target** dikarenakan penyusunan laporan dilaksanakan di triwulan IV										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2. Keuangan

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Keuangan Daerah sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5.02. KEUANGAN										
5.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.46	100.00	39.62	39.62	39.62	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	98.65	98.65	98.65	Akan Tercapai
5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7.26	11.91	5.79	7.66	5.06	5.06	143.44	Tercapai
Capaian indikator Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan pencapaian ini dikarenakan adanya pelampauan pendapatan sebesar 20,256M dan efisiensi belanja sebesar 33,599M										
5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										
1	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	66.67	66.67	Belum Tercapai
Capaian indikator Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan saat ini masih dilaksanakan inventarisasi aset yang ditargetkan selesai pada triwulan IV										
5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5.00	5.00	4.80	5.00	-48.80	-48.80	< dari target	Belum Tercapai
Capaian indikator Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan terdapat beberapa pendapatan yang penetapannya pada bulan maret, sehingga realisasi pada bulan berikutnya transaksi BPHTB akan mulai banyak di triwulan III dan IV										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3. Kepegawaian

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Indikator Program Kepegawaian sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5.03. KEPEGAWAIAN										
5.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	38.89	38.89	38.89	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	35.53	35.53	35.53	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen		100.00	100.00	100.00	57.84	57.84	57.84	Belum Tercapai
5.03.02. Program Kepegawaian Daerah										
1	Persentase PNS berkembang karier	persen	50.00	50.00	66.67	50.00	46.67	46.67	93.34	Akan Tercapai
2	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100.00	100.00	98.90	100.00	99.78	99.78	99.78	Akan Tercapai
3	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90.00	90.00	97.41	90.00	98.97	98.97	109.97	Tercapai
4	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80.00	80.00	64.35	80.00	49.37	49.37	61.71	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Keterpenuhan Formasi ASN **tidak memenuhi target** dikarenakan Jumlah ASN hanya 3131 orang sedangkan formasi yang tersedia sekota Pekalongan sejumlah 6520. Dikarenakan adanya moratorium pengadaan PNS selama beberapa tahun, disertai dengan adanya pengurangan jumlah ASN yang disebabkan proses pensiun, mutasi luar kota, meninggal, sehingga menimbulkan selisih yang cukup signifikan antara bezeting dengan formasi.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

4. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
1	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100.00	100.00	149.29	100.00	31.96	31.96	31.96	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase PNS berkembang kompetensinya **tidak memenuhi target** dikarenakan Waktu dan jumlah peserta penyelenggaraan Diklat tergantung dari pihak penyelenggara. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 baru 132 orang ASN yang ikut serta dalam kegiatan diklat dari target tahunan sebanyak 260 orang.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

5. Penelitian Dan Pengembangan

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Indikator Program Penelitian dan Pengembangan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah										
1	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD **tidak memenuhi target** dikarenakan dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, capaian baru dapat diperhitungkan di akhir tahun										
2	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	76.00	70.93	0.00	74.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) **tidak memenuhi target** dikarenakan Indikator kinerja skor capaian nilai RIDA (SIDA) data tidak tersedia, dikarenakan tidak dilakukan pengukuran RIDA Kota Pekalongan oleh BRIN. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengukuran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) saat ini telah bertransformasi menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fasilitasi Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah Tahun 2023-2025 (R-SIDA) akan dilakukan dengan penyelarasan pengukuran IDSD.										
3	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan **tidak memenuhi target** dikarenakan dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, capaian baru dapat diperhitungkan di akhir tahun										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Indikator Program Inspektorat sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
6.01. INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	54.75	54.75	54.75	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	43.09	43.09	43.09	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan										
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85.00	85.00	52.94	85.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tidak memenuhi target dikarenakan belum ada data tindak lanjut dari OPD terperiksa										
6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi										
1	Level Kapabilitas APIP	Persen	3.00	3.00	3.09	3.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia data
Capaian indikator Level Kapabilitas APIP tidak memenuhi target dikarenakan menunggu rilis data nilai kapabilitas APIP dari BPKP pada triwulan IV										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Indikator Program Penelitian dan Pengembangan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
7.01. KECAMATAN										
7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.24	100.00	30.16	30.16	30.16	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	96.67	100.00	23.58	23.58	23.58	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.59	29.59	29.59	Belum Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	17.55	17.55	17.55	Belum Tercapai
7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
8	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	97.84	100.00	34.13	34.13	34.13	Belum Tercapai
9	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40.09	40.09	40.09	Belum Tercapai
10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	42.23	42.23	42.23	Belum Tercapai
11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	31.63	31.63	31.63	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
12	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	61.93	61.93	61.93	Belum Tercapai
7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	58.34	58.34	58.34	Belum Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00	Belum Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	Belum Tercapai
7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan										
1	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
2	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
3	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100.00	100	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
4	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum										
1	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
3	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
4	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Indikator Program Kesatuan Bangsa dan Politik sd Triwulan I Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW I - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW I 2024			
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.33	100.00	33.71	33.71	33.71	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	90.20	90.20	90.20	Akan Tercapai
8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan										
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100.00	100.00	100.74	100.00	59.81	59.81	59.81	Belum Tercapai
Capaian indikator persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan **tidak memenuhi target** dikarenakan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sepanjang tahun, sehingga capaian akhir baru dapat diperoleh pada akhir tahun										
8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik										
1	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16.00	0.00	16.00	16.00	13.00	13.00	81.25	Belum Tercapai
Capaian indikator Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik **tidak memenuhi target** dikarenakan dari 16 parpol maupun lembaga pendidikan yang diikutsertakan dalam pendidikan, sampai dengan triwulan II baru 9 partai politik dan 4 lembaga pendidikan yang mengikuti. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya.										
8.01.04. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
1	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100.00	100.00	90.48	100.00	90.00	90.00	90.00	Akan Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW I - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW I 2024			
8.01.05. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya										
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial										
1	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan
2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Penghitungan kebutuhan pmenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non pemerintah, masyaakat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.
4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negera yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan:
   - miskin atau tidak mampu;
   - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
   - kondisi bencana; dan/atau
   - kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD,
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan dasar diimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
    - membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negera secara minimal, dengan memperioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
    - memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya

Pada tahun 2022 Kota Pekalongan telah menerapkan seluruh tahapan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan anggaran atas penerapan Standar Pelayanan Minimal sejak proses perencanaan, yang dimulai dari RPJMD sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2022.

2.2.4.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan kedua aturan tersebut, capaian atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan rapot Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa rapot Pendidikan tahun 2023 sampai dengan saat ini belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah rapot Pendidikan tahun 2022 yang terbit pada bulan Juli 2023. Sehingga secara penganggaran mengikuti tahun rapot pendidikan yaitu anggaran tahun 2022. Pada tahun 2023 Capaian SPM Pendidikan secara keseluruhan adalah 99,67% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar usia dini dengan capaian sebesar 94,22%;
2. Pendidikan dasar dengan capaian sebesar 97,00%;
3. Pendidikan kesetaraan dengan capaian sebesar 100%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**Pengumpulan Data**	
	Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat	1. Mengintensifkan penguatan kelembagaan di satuan Pendidikan terutama disiplin dalam menjalankan administrasi sekolah. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Operator Sistem Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota Lain dan Kantor Kemenag sehingga mempermudah penyelesaian jika ditemukan kendala data maupun kendala sistem.
2.	**Penghitungan Kebutuhan**	
	Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar maupun biaya personil	Menggunakan basis data penduduk miskin dari kemensos sebagai dasar penentuan siswa penerima bantuan agar lebih akuntabel
	Tidak tersedianya data BNBA pada data penduduk, sehingga kesulitan dalam menentukan kebutuhan jumlah penerima layanan SPM berdasarkan asal siswa.	Melakukan koordinasi dengan Dindukcapil agar mendapatkan solusatas permasalahan tersebut.
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	
	Keterbatasan anggaran yang tersedia menghambat pemenuhan kebutuhan dalam rangka pencapaian SPM	1. Membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan agar hasilnya lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Melakukan advokasi penganggaran pemenuhan SPM di Badan Anggaran agar penetapannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
4.	**Pelaksanaan**	
	Tidak ada	-
5,	**Lain-lain**	
	Rapor pendidikan yang dirilis terlambat sehingga menyulitkan dalam Menyusun pelaporan tahun N karena data yang disandingkan tidak padan	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.
	Rapor pendidikan hanya menyajikan hasil akhir tanpa menyertakan nilai variable perhitungannya, sehingga menyulitkan pada saat pengisian form tahapan penerapan SPM	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiancy Virus*).

Pada tahun 2023 Capaian SPM Kesehatan secara keseluruhan adalah 95,56% atau kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 97,62%;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,22%;
4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 99,87%;
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan capaian 100%;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 81,10%;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 91,37%;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 70,49%;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetis melitus dengan capaian 100,00%;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguam jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 100%;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan capaian 100%;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) dengan capaian 100%

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**Pengumpulan Data**	
	Laporan SPM dari Puskesmas masuk ke Dinas Kesehatan melebihi dari batas akhir waktu penginputan triwulan pada aplikasi SPM Bangda Kemendagri	1. Mengupayakan dan memberi pengarahan kepada petugas puskesmas agar pelaporan dikirim ke Dinas Kesehatan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan 2. Menkoordinasikan pelaporan agar tepat waktu 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Laporan SPM dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan.
2.	**Perhitungan Kebutuhan**	
	Perhitungan sasaran menggunakan estimasi/proyeksi dari jumlah penduduk sedangkan untuk capaian seharusnya menggunakan data rill yang ada di lapangan	Pada laporan akhir (TW IV) agar dapat menggunakan data rill.
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	
	Kurangnya anggaran yang diberikan terutama pada hipertensi dan diabetes militus	Akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam hal perencanaan penganggaran
4.	**Pelaksanaan**	
	Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya lansia untuk datang ke posyandu lansia yang ada di wilayah sekitar tempat tinggal	1. Mengoptimalisasikan petugas promkes dan kader kesehatan yang ada disekitar untuk dapat mengedukasi kepada masyarakat khususnya Lansia 2. Memperluas layanan jemput bola di Dinas Kesehatan yang semula berupa layanan menjemput para pengguna layanan karena kondisi rob diperluas ke masyarakat khususnya lansia.
5.	**Lain-lain**	
	Adanya perbedaan persepsi antara kemenkes dan kemendagri dalam pelaporan sasaran dan capaian akhir	Perlu adanya koordinasi lebih lanjut antara Kemendagri dan Kemenkes dalam menyusun kebijakan/regulasi terkait SPM bidang kesehatan

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ajenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Pada tahun 2023 Capaian SPM Pekerjaan Umum secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 100%;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**Pengumpulan Data**	
	Data yang dibutuhkan lebih rigid sampai ke identitas pribadi yang menurut wali data dari kominfo ada konsekuensi dari penyebaran data pribadi	Dipertimbangkan kembali terhadap pencatuman data pribadi
2.	**Penghitungan Kebutuhan**	
	Penghitungan kebutuhan masih memerlukan koordinasi dengan OPD terkait	Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengka dan andal
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	
	Perlu kerjasama yang aktif untuk CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM.	Koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk menjadi CSR
4.	**Pelaksanaan**	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALD-T, SPALD-S dan IPLT	Koordinasi dengan provinsi terkait rencana pembangunan insfrastruktur secara regional
	lokasi untuk pembuatan instalasi pembuangan tinja yang sudah tidak layak, sedangkan untuk mencari lokasi baru ada keterbatasan lahan pemerintah kota	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga
5.	**Lain-lain**	
	Tidak ada	-

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

Kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PENGUMPULAN DATA**	
	Kesulitan dalam melengkapi BNBA secara detail sesuai dengan isian form, baik itu RT/RW, NIK, jumlah anggota keluarga, luas bangunan, luas tanah dll.	Melakukan verifikasi ulang dengan tenaga fasilitator lapangan dan tenaga kegiatan.
2.	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**	
	Belum bisa memprediksi kegiatan kebencanaan dan lokasi yang terjadi bencana, karena sifatnya insidentil.	Melakukan mitigasi daearah rawanbencana se-kota Pekalongan.
3.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	
	Anggaran kebencanaan selalu ada meskipun peningkatan dan penurunan kebencanaan tidak bisa diprediksi.	Melakukan pengusulan anggaran di n1 dan berkoordinasi dengan TAPD.
4.	**PELAKSANAAN**	
	Proses pemindahan / relokasi daerah sepadan sungai sudah selesai dan diberikan kerohiman.	Melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah Kelurahan dan Kecamatan.
	Proses realisasi kegiatan relokasi membutuhkan waktu dan proses dalam pemindahan dan pembangunan secara bertahap.	Pembangunan rumah relokasi membutuhkan koordinasi antar bidang, dinas dan stakeholder terkait karena penerima bantuan tidak mampu secara ekonomi.
5.	**LAIN – LAIN**	
	Tidak ada	-

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan capaian 100,00%;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 100,00%;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 100,00%;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 100,00%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.45 berikut.

Tabel 2.45 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PENGUMPULAN DATA**	
	Tidak ada permasalahan	-
2.	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**	
	Tidak ada permasalahan	-
3.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
4.	**PELAKSANAAN**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses kelayanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM denganmenyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja

No.	Permasalahan	Solusi
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
5.	**LAIN – LAIN**	
	Tidak ada permasalahan	-

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Sosial secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan capaian 100,00%;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota dengan capaian 100,00%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PENGUMPULAN DATA**	
	Tidak ada permasalahan	-
2.	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**	
	Tidak ada permasalahan	-
3.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dnegan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
4.	**PELAKSANAAN**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
5.	**LAIN – LAIN**	
	Tidak ada permasalahan	-

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.1.4. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2023

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (The 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial,

ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Sejak tahun 2023, dokumen capaian TPB/SDGs mengacu pada metadata edisi II.

2.2.4.1. Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 23 target dan 40 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 1.Mengurangi Kemiskinan							
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari)	BPS	%	1.13	PM	PM	PM
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	6,81	6,29	6,09	5,89
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	BPS	%	6,81	6,29	6,09	5,89
	(a) Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan	BPS	%	59,93	PM	PM	PM
	(b) Indikator Morbiditas: Angka kesakitan	Dinkes	%	NA	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(c) Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP	BPS	%	9,29	9,59	9,75	9,92
	(d) Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	BPS	%	0,01	PM	PM	PM
	(e) Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	BPS	%	0,0072	PM	PM	PM
	(f) Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	DPU PR	%	0	PM	PM	PM
	(g) 8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai jamban (tidak ada fasilitas)	DPU PR	%	90,69	PM	PM	PM
	(h) Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah	BPS	%	0,33	PM	PM	PM
	(i) Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji	BPS	%	98,18	PM	PM	PM
	(j) 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif	BPS	%	2,9	PM	PM	PM
	(k) Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	Dindukcapil	%	0,01	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(l) 13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet	BPS		NA	PM	PM	PM
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima **program perlindungan sosial:** a. PKH b. PBI c. Sembako	Dinsos P2KB, BPJS Kesehatan; Dinkes	Jiwa	a. 10.932 KK b. 120.203 c. 23.839 KK (BPNT)	55,12	53,73	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan; Dinkes	%	34,52	PM	PM	PM
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan ; BPS	%	0,62			
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan							
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	BPS	%				
	(a) Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum layak			98,88	PM	PM	PM
	(b) Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi layak			86,82	PM	PM	PM
	(c) Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar (fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air)			-			

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan:	BPS	%	NA	PM	PM	PM
	(a) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri			67,23	PM	PM	PM
	(b) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak			3,39	PM	PM	PM
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat kab/kota	BPBD	Dokumen	21	1	1	1
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan							
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil							
2.2.1*	Prevalensi stunting	DINKES	%	7,43	<12 %	<12 %	<12 %
2.2.2*	Prevalensi wasting	DINKES	%	7,46	PM	PM	PM
Target 2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca							
2.4.1(a)	a) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan b) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DINPERPA	Hektar	521	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produk							
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	DINPERPA	Indeks	NA	NA	NA	NA
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1*	Jumlah kasus kematian ibu	DINKES	Kasus	6	5	4	3
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	BPS	%	100	PM	PM	PM
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi heaptitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	DINKES	Kasus baru per 100.000 penduduk	0,0031	PM	PM	PM
3.3.3*	Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu	DINKES	Orang	2	PM	PM	PM
3.3.4*	Jumlah kasus infeksi baru Hepatitis B pada periode waktu tertentu	DINKES	Orang	58	45	45	45
3.3.5*	Jumlah kasus baru penyakit tropis yang diobati: a) filariasis dan b) kusta	DINKES	Orang	a. 0 kasus b. 69 orang	a. 0 b. 54	a. 0 b. 55	a. 0 b. 56
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.4.1 (a)	Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	BPS	%	19,75	PM	PM	PM
3.4.1.(b)	Jumlah kasus hipertensi	DINKES	Kasus	50187	PM	PM	PM
3.4.1.(c)	Jumlah kasus obesitas	DINKES	Kasus	2633	PM	PM	PM
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS	%	4,31	PM	PM	PM
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS/BPS	%	98,10	100	100	100
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat							
3.a.1*	Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	BPS	%	19,75 persen	PM	PM	PM
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.c.1*	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di Puskesmas):a. Dokterb. Dokter gigic. Tenaga kefarmasiand. Perawate. Bidanf. Nutrisionisg. Sanitarianh. Promosi Kesehatani. Ahli Teknik Laboratorium MedikKepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.a. Apotekerb. Bidanc. Dokter Gigid. Dokter Spesialise. Dokter Umumf. Perawatg. Tenaga Gizih. Tenaga Kesehatan Lingkungani. Tenaga Kesehatan Masyarakatj. Tenaga Keteknisian Medisk. Tenaga Keterapian Fisikl. Tenaga Psikolog Klinikm. Tenaga Teknik Biomedika	DINKES	Orang	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di Puskesmas):a. 379b. 44c. 354d. 876e. 391f. 36g. 26h. 24i. 133Kepadatan dan distribusi tenaga kesh:a. 0,44b. 1,23c. 0,14d. 0,42e. 0,77f. 2,76g. 0,11h. 0,08i. 0,14j. 0,36k. 0,14l. 0,01m. 0,58	PM	PM	PM
Tujuan 4. Pendidikan yang Berkualitas							
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif							
4.1.1 (a)	Persentase siswa SD/Sederajat dan SMP/Sederajat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi	DINDIK	%	79,06	PM	PM	PM
4.1.2*	Angka melanjutkan SD/sederajat Angka melanjutkan SMP/sederajat	DINDIK; KEMENAG	Angka	100	PM	PM	PM
4.1.2 (a)	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang pendidikan usia 7-13 th, 13-15 th dan 16-18 th	DINDIK; BAPPEDA	Orang	909	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
4.2.2*	Persentase anak usia 5-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah	DINDIK	%	93,56	99	99	99
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas							
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal.	DINDIK; DINPERINAKER; KEMENAG; BPS	%	100	1621	1625	1625
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS	%	NA	PM	PM	PM
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan							
4.4.1 (a)	Persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan komputer (PC atau dekstop, laptop atau notebook, tablet) dalam 3 bulan terakhir.	BPS	%	14,01	PM	PM	PM
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan ,	BPS	%		PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
4.6.1.(a)	Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf	BPS	%	97,74	PM	PM	PM
Tujuan 5. Kesetaraan Gender							
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintahan daerah	SETWAN	%	14,29	30	30	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial: (a) Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Kepala Daerah/wakil) b) Proporsi perempuan yang menempati jabatan eselon II	BKPSDM	%	7,41	PM	PM	PM
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta							
5.6.2*	Jumlah regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DPMPPA	Dokumen	2	PM	PM	PM
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.b.1*	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir	BPS	%	67,22	PM	PM	PM

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2.4.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 tujuan 11 target dan 16 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau							
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	BPS	%	100	PM	PM	PM
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	BPS	%	98,18	PM	PM	PM
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	%	4,22	PM	PM	PM
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Rupiah	43,29 juta rupiah	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	NA	PM	PM	PM
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur							
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata							
9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan KabKota	DPU-PR	km	83,77	84,39	85,48	86,57
9.1.2*	Jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang	DISHUB	Orang	1.941.952	PM	PM	PM
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat produksi							
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	BPS	%	2,3	PM	PM	PM
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan							
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	6,81	PM	PM	PM
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DPMPPA; BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan	NA	PM	PM	PM
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS KETENAGAKERJAAN; BPS/DINPERINAKER	%	0,62	PM	PM	PM
Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan							
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
17.1.1*	Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB ADHB	BPKAD	%	0,0075	0,0072	0,0071	0,0072
17.1.1.(a)	Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB ADHB	BPKAD	%	0,00084	0,00077	0,00101	PM
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah	BPKAD	%	23,51	24,23	26,30	26,65
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi							
17.8.1*	Persentase penduduk umur 5 tahun keatas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	BPS	%	99,09 persen	PM	PM	PM
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	BAG. PBJ & MINBANG	Dokumen	0	0	0	0

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2.4.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 5 tujuan 11 target dan 13 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.549 berikut.

Tabel 2.49 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak							
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum layak.	BPS	%	98,88	PM	PM	PM
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, membetikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	BPS	%	95,41	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		%	95,41	PM	PM	PM
	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak		%	86,82	PM	PM	PM
	(c) Persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar		%	2 persen	PM	PM	PM
	(d) Proporsi rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (SPLT)/instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)		%	NA	PM	PM	PM
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkat							
6.3.1	Proporsi limbah cair industri cair yang diolah secara aman	DLH	m3/Tahun	27,06	28,63%	30,06%	35,76%
Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan							
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	BPBD; BPS	%	1,164334078	PM	PM	PM
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota							
11.6.1.(b)	Persentase sampah yang terkelola	DLH	%	1,207740879	0,29	0,3	0,31
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	DLH	Indeks	82,44	82,84	82,94	83,04

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas							
11.7.1.(a)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau	DLH	%	2,94	2,92	2,93	2,94
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab							
Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen							
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK http://sipsn.menlhk.go.id/	%	58%	PM	PM	PM
Target 12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah							
12.4.2*	Jumlah Limbah B3 yang dilaporkan	DLH		57,78%	71,11%	84,44%	100,00%
	(a) Jumlah limbah B3 yang dilaporkan (ton)	DLH	ton	57,78%	71,11%	84,44%	100,00%
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali							
12.5.1.(a)	Jumlah sampah yang dikelola	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK http://sipsn.menlhk.go.id/	Ton	95,20176248	PM	PM	PM
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1.(a)	Jumlah satuan unit pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLH	Unit	29	33	36	40

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim							
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2.4.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 tujuan 8 target dan 16 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh							
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES; BAKESBANGPOL	Kasus	0	0	0	0
16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES; BAKESBANGPOL; SATPOL PP	Kematian/ 100.000 Penduduk	0	PM	PM	PM
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES; BAKESBANGPOL	%	NA	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	BAG. HUKUM SETDA	%	12	12	12	PM
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya							
16.5.1.(a)	Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)	INSPEKTORAT	Nilai	80,79	PM	PM	PM
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
16.6.1.(a)	Nilai Opini BPK	BPKAD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	BAG.ORGANISASI SETDA	%	72,83	75,07	75,57	76,07
16.6.1.(c)	Nilai RB Kabupaten/Kota	BAG.ORGANISASI SETDA	Nilai	77,12	73,69	74,69	75,69
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); BAG. ORGANISASI SETDA	Instansi	90,69	83,79	83,94	84,09
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representif di setiap tingkatan							
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	SETWAN	%	14,29	30	30	30
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).	BKPSDM	%	8%	PM	PM	PM
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINDUKCAPIL	%	99,82	93,3	93,4	93,5

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	BPS	%	99,44	93,3	93,4	93,5
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS	%	99,04	93,3	93,4	93,5
Target 16.10 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.10.2.(a)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	KIP; DISKOMINFO	Nilai	96,62	97,00	97,20	97,50
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DPMPPA; BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan	NA	PM	PM	PM

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51 Permasalahan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Indeks Keluarga Sehat	Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Ibu (AKI)	
Angka Kematian Bayi (AKB)	
Angka Kematian Balita (AKABA)	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Masih tingginya angka kemiskinan
Rata-Rata Lama Sekolah	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)
Kategori Kota Layak Anak	Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja
Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh
Luas Genangan Banjir dan Rob	Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Lahan	
Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Belum opimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan
Persentase pelayanan sampah	
Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	
Persentase keterhubungan jalan	
Pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya
Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Masih adanya konflik sosial
Indeks SPBE	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
IKM Kota	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	
Indeks Merit System	
Nilai SAKIP Kota	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	
Maturitas SPIP	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan

penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Masih rendahnya capaian SPM pendidikan
	Belum optimalnya kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas
	Masih rendahnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Masih rendahnya jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Belum optimalnya RS Rujukan tingkat kota yang terakreditasi
	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar
	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
	Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek
	Belum optimalnya tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
	Belum optimalnya sarana farmasi yang memenuhi standar
	Masih rendahnya jumlah produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran
	Masih rendahnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat
	Masih rendahnya jumlah rumah tangga sehat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum optimalnya sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik
	Masih rendahnya cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah
	Masih rendahnya ketersediaan sarana persampahan regional
	Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik
	Masih rendahnya rasio kepatuhan PBG Kab/Kota
	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan
	Masih rendahnya rasio tenaga bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Masih rendahnya ketersediaan rumah layak huni
	Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh
	Masih rendahnya kawasan permukiman tidak kumuh
	Masih rendahnya jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masih rendahnya persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	Masih rendahnya persentase korban bencana alam yang ditangani
	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Masih rendahnya persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan
	Masih rendahnya persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
	Masih rendahnya persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial
	Belum optimalnya korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
	Belum optimalnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Masih rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
	Masih rendahnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota
	Belum optimalnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Masih rendahnya persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Masih tingginya rasio kekerasan terhadap perempuan
	Masih rendahnya persentase kelurahan layak anak
	Belum optimalnya pengaduan kasus anak yang terlayani
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Masih rendahnya persentase cadangan pangan daerah
	Belum optimalnya kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan
	Belum optimalnya pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya permasalahan pertanahan yang tertangani
	Belum optimalnya tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya pengolahan limbah
	Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau
	Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundangan

URUSAN	PERMASALAHAN
	Masih tingginya jumlah usaha/kegiatan yang belum memenuhi syarat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH
	Belum optimalnya masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup
	Belum adanya perolehan penghargaan bidang LH
	Belum optimalnya tindaklanjut atas pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat
	Belum optimalnya pengelolaan sampah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk
	Masih rendahnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil
	Masih rendahnya jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Masih rendahnya ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan
	Belum optimalnya kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"
	Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga
	Masih tingginya angka perkawinan di bawah 21 tahun
	Masih tingginya unmeet need KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Masih rendahnya ketersediaan fasilitas LLAJ
	Belum optimalnya kinerja lalu lintas Kab/Kota
	Masih rendahnya jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya penyelesaian permohonan informasi publik
	Belum tercapainya Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas
	Masih rendahnya persentase koperasi yang mengikuti pelatihan
	Masih rendahnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Berlum tersedianya peraturan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
	Belum optmlanya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
	Masih rendahnya penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
	Masih rendahnya nilai investasi baru pertahun
	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah
	Masih rendahnya pembinaan organisasi kepemudaan

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Masih rendahnya ketersediaan sarpras olahraga sesuai jenis cabor
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Masih rendahnya Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum adanya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum adanya event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan
	Masih rendahnya persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Belum optimalnya pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya
	Masih rendahnya pelestarian cagar budaya
	Masih rendahnya jumlah pengunjung museum batik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya pengunjung perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Belum optimalnya nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik
	Belum tersedianya arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
	Masih rendahnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Masih rendahnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Masih rendahnya peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI
	Masih rendahnya peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI
	Masih rendahnya peningkatan produksi perikanan budidaya
	Masih rendahnya peningkatan jumlah pengusaha perikanan
	Masih rendahnya jumlah pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Belum optimalnya pertumbuhan jumlah wisatawan domestik
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
	Masih rendahnya persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih rendahnya nilai produksi pertanian pertahun
	Masih rendahnya nilai produksi peternakan pertahun
	Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian

URUSAN	PERMASALAHAN
	Masih tingginya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Masih rendahnya persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
	Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko
	Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya pemantauan terhadap obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Masih rendahnya persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
	Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	Belum optimalnya penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu
	Masih rendahnya persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif
	Masih rendahnya capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat
	Belum optimalnya kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan
	Masih tingginya deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
	Masih rendahnya persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa
SEKRETARIAT DPRD	Masih rendahnya persentase Perda yang ditetapkan
	Belum tercapainya pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	Belum optimalnya dokumen perencanaan tepat waktu
	Belum tercapainya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu
	Berlum tersedianya dokumen perencanaan bidang Pemsosbud
	Belum tercapainya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian
	Belum tercapainya dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah
KEUANGAN	Masih tingginya rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
	Belum optimalnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)
	Belum optimalnya realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya PNS yang berkembang karier
	Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN
	Belum optimalnya keterisian jabatan
	Belum optimalnya keterpenuhan formasi ASN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Masih rendahnya PNS yang berkembang kompetensinya
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Masih rendahnya hasil litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD
	Masih rendahnya tingkat pemberdayaan stakeholder kelitbangan
	Belum optimalnya Skor Capaian Nilai RiDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Masih rendahnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya level kapabilitas APIP
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Masih rendahnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah utara
	Masih rendahnya tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan
	Masih rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat di kelurahan
	Masih rendahnya tingkat kinerja trantibum
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belum optimalnya persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan
	Belum optimalnya parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik
	Masih rendahnya persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan

URUSAN	PERMASALAHAN
	Masih rendahnya persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
	Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial
Non Urusan	Masih rendahnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD
	Masih rendahnya ketersediaan laporan capaian kinerja
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Masih rendahnya persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

2.3. ISU STRATEGIS

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.5, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53 Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan
Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	
Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum opimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)	Peningkatan Derajat Kesehatan

Permasalahan	Isu Strategis
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan	
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Selanjutnya, isu strategis dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Tata Kelola Pemerintahan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pentingnya isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu: transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif.

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 77,12 . Upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Beberapa aspek terkait yang masih menjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,29. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat, serta peningkatan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE dan perkuatan pelayanan pusat data Pemerintah Daerah; b) Layanan publik telah dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan, berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023, Kota Pekalongan mendapat nilai 90,69 dengan kategori Sangat Baik, persentase OPD dengan IKM Sangat Baik sebesar 62,03 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 86,97; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 72,83 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun, namun masih perlu ditingkatkan untuk mendaptkan hasil yang optimal; e)

Akuntabilitas keuangan tetap perlu ditingkatkan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3,022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya merit system secara penuh, walaupun dari tahun ketahun terdapat peningkatan nilai dan pada tahun 2023 nilai merit system Kota Pekalongan sebesar 327; h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3,09; i) Belum optimalnya nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu sebesar 96,62, masih perlu ditingkatkan; dan j) Masih minimnya jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM, sehingga perlu didorong lagi agar terus bertambah.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan tiap tahunnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Beberapa upaya perubahan yang dilakukan yaitu: Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD; Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO; Penataan sistem manajemen SDM aparatur; Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD; Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penataan peraturan perundang-undangan dan Perubahan Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan).

Dalam aspek pengawasan, yang dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih maka pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala. Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan bertujuan untuk menyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota; Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; dan Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Selain itu, peran perguruan tinggi juga diperlukan. Perguruan tinggi di Kota Pekalongan lebih menguasai permasalahan dan isu strategis tetapi belum optimal dalam memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2.3.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan hidup yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan atau pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (land subsidence). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Sampai dengan tahun 2023, luas genangan di Kota Pekalongan seluas 880,83 hektar atau 18,97 persen dari luas wilayah kota, kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2022. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, dimana persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 68,58 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (land subsidence), sekitar 8-13 cm per tahun; c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 4,90 persen; d)Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa; e) Berkurangnya kawasan tangkapan air (catchment area) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (run off) yang semakin membesar juga; dan f) Pendangkalan sungai di wilayah hilir.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa kawasan justru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun water storage guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman.

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi ekploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu kualitas lingkungan hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik, dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 56,24, kondisi ini sudah lebih baik dibandingkan tahun 2022. IKLH yang belum optimal tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Salah satu komponen dalam IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau dan tutupan lahan/vegetasi tutupan lahan. Kondisi RTH di Kota Pekalongan masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi persyaratan pemenuhan RTH sesuai dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dalam pengembangan RTH untuk dapat memenuhi kebutuhan RTH yang disyaratkan, yaitu 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Namun upaya ini masih belum dapat dilaksanakan secara kontinyu dan kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air, belum terbangun. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Selain itu, penanganan terhadap pengelolaan limbah B3 juga perlu mendapat perhatian, terutama dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan. Perlu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan

keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, antara lain: Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).

2.3.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (built up area), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (resilience city), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persentase penduduk yang terlayani jaringan perpipaan tahun 2023 sebesar 67,42 persen. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan

kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Persentase pelayanan sampah pun juga belum optimal, dimana pada tahun 2022 sebesar 72,36 persen dan tahun 2023 menurun menjadi 71,45 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2023, jalan kota kondisi mantap sebesar 82,16 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Pada tahun 2023 VC Ratio adalah 0,40 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 0,39. Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin meningkat pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio meningkat. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,40), namun untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan. Penyediaan titik dan kantong-kantong parkir juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi

masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastruktur lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2023, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru, luas kawasan kumuh mencapai 4,90 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Luasan ini mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya. Persentase tersebut merupakan luasan yang masih cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat memengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

2.3.4. Peningkatan Derajat Kesehatan

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Di sisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan di berbagai tempat, derajat kesehatan memiliki korelasi yang signifikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan salah satu komponen yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator makro atau indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, derajat kesehatan masyarakat memiliki korelasi dengan pencapaian kinerja pembangunan lainnya, sehingga derajat kesehatan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan Kota Pekalongan. Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat berdampak sistemik terhadap aspek-aspek pembangunan lainnya.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan: a) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2023 AKI masih bernilai 122,77 per 100.000 kelahiran hidup; b) Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2023 AKB masih bernilai 13,71 per 1.000 kelahiran hidup; c). Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2023 AKABA masih bernilai 18,42 per 1.000 KH; d). Tingginya angka kesakitan dan nilainya masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan nilai 12,20 persen di tahun 2023; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,30 persen dan Balita Stunting sebanyak 7,43 persen pada tahun 2023; f) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang meningkat dan pada tahun 2023 memiliki skor sebesar 93,70 persen; serta g) Tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 mencapai sebesar 14,95 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2023 sebesar 74,60, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 74,51. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah maupun UHH Provinsi Jawa Tengah, capaian UHH Kota Pekalongan masih berada pada posisi terbawah. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana terus meningkatkan UHH secara optimal sehingga tidak tertinggal dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun kota-kota setara lainnya di Jawa Tengah. Upaya tersebut adalah melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Selain hal tersebut, perlu dilakukan penguatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perurnusan rencana intervensi, sinkronisasi program penurunan AKI, AKB dan AKABA antara RSUD dan Puskesmas, pemberdayaan kader dan optimalisasi kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

Selain permasalahan AKI, AKB dan AKABA, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah stunting, dimana masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting bisa terjadi dan terus meningkat, bahkan pada saat teknologi dan ketersediaan fasilitas kesehatan sudah “dekat” dan “mudah” diakses masyarakat. Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi beresiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Penyebabnya multidimensi, tidak hanya faktor kesehatan, melainkan juga faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya asupan gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, faktor keluarga, mulai dari ketidaktauan praktik pemberian makan, praktik pemberian ASI, infeksi penyakit serta pola pengasuhan anak. Faktor eksternal yang turut berpengaruh yaitu akses air bersih dan sanitasi lingkungan.

Pemerintah terus mendorong penurunan stunting melalui strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervesi Percepatan Penurunan Stunting Terintegerasi Tahun 2023, Kota Pekalongan menjadi salah satu kota yang perlu mendapat penanganan dengan skema percepatan khusus. Hal ini ditunjukkan dengan angka prevalensi

stunting tahun 2023 berdasarkan SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) sebesar 20,6 persen dan berdasarkan E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 7,43 persen. Target prevalensi stunting Kota Pekalongan ditargetkan turun setiap tahun, sehingga diperlukan upaya percepatan diantaranya: penguatan cakupan intervensi spesifik kunci, pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko stunting, pendampingan bagi pemerintah daerah, pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk air minum dan sanitasi, penguatan intervensi dukungan, terutama cakupan surveilans, koordinasi tim percepatan penurunan stunting daerah, dan pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah.

Masih berfluktuasinya skor PPH menunjukkan bahwa konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan skor PPH melalui pelatihan olahan pangan dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat. Pembangunan pertanian serta kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan juga harus diarahkan untuk diversifikasi produk-produk bahan makanan maupun kerjasama dengan daerah lain, sehingga tersedia beragam pilihan bahan makanan di wilayah Kota Pekalongan.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.3.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Beberapa indikator perkembangan kesejahteraan tersebut adalah dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita maupun semakin menurunnya angka kemiskinan Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.

Dari data tahun jamak, angka kemiskinan Kota Pekalongan hingga tahun 2019, menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Namun demikian, sebagai dampak pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,17 persen pada tahun 2020 dan semakin meningkat menjadi 7,59 persen pada tahun 2021. Upaya pemulihan kondisi sosia dan ekonomi, sebagai dampak pandemi Covid-19 menunjukkan hasil, yaitu dengan capaian angka kemiskinan tahun 2022 adalah 7,00 persen dan tahun 2023 adalah sebesar 6,81 persen, sehingga sudah menunjukkan pola kembali menurun.

Dengan perkembangan indikator tersebut, maka masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan belum optimal. Penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah maupun secara nasional bahwa ketika angka kemiskinan semakin rendah maka akan dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah

anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan DTKS tahun 2021 sebanyak 184.247 jiwa dari semula 108.436 jiwa pada tahun 2020, atau kenaikan sebanyak 75.811 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) kembali meningkat yaitu menjadi 188.445 jiwa dan tahun 2023 jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah 188.355 jiwa, sehingga tidak ada perubahan yang berarti. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen dalam penanganan upaya pengentasan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam Sustainable Development Goals (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Oleh karena itu penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2020 yang menginstruksikan kemiskinan ekstrem agar diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Terdapat tiga strategi kebijakan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong - kantong kemiskinan. Secara khusus kepada Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk: melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kab/Kota; menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan Berita Acara; menyusun rencana program/kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kab/Kota termasuk pemutakhiran data penerima by name by address; fasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap tiga 3) bulan sekali.

Tantangan pembangunan Kota Pekalongan lainnya adalah bagaimana menurunkan angka pengangguran secara optimal. Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berfluktuasi. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan analisis korelasi, dengan menggunakan data tahun jamak, antara pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan angka pengangguran, ketiga indikator tersebut tidak memiliki korelasi yang signifikan antar indikator. Temuan ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan belum berimplikasi langsung terhadap

penurunan angka kemiskinan maupun penurunan angka pengangguran. Angka kemiskinan dan angka pengangguran pun juga tidak memiliki korelasi yang signifikan. Jika angka kemiskinan menurun, juga tidak ditandai dengan penurunan angka pengangguran.

Angka pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 sebesar 6,89 persen dan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,98 persen dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 5,02 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa TPT masih menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, link and match dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehinga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus diintegrasikan dengan pembangunan perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi yang didorong harus pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan target-target pembangunan tersebut.

2.3.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumber daya manusia yang tidak optimal. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 75,40, tahun 2022 meningkat menjadi 75,90 dan tahun 2023 meningkat menjadi 76,71 persen. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah sebesar 12,87 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,87 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah sampai semester 1 atau 10 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.

b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 adalah 9,29 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 9,29 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP, dan masuk kelas 10 SMA namun tidak sampai lulus. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan

kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.

c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 sebesar 65,31. Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga dapat lebih optimalal.

Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan, salah satunya pada tahun 2022 disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan IPM. RAD ini akan menjadi dasar rencana aksi pada tahun berikutnya. Urgensi RAD Peningkatan IPM tersebut adalah sebagai upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi agar IPM Kota Pekalongan dapat meningkat secara optimal. Selama in, IPM Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, bahan dengan beberapa kabupaten pun, IPM Kota Pekalongan capaiannya masih tertinggal.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Upaya peningkatan sumber daya manusia juga harus didukung dengan peningkatan *soft skill* masyarakat. *Soft skill* adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan semacamnya. Dalam hal ini, *soft skill* adalah karakter *bawaan* individu. *Soft skill* bisa saja dipelajari, akan tetapi tidak dengan cara belajar formal layaknya di bangku sekolahan atau perkuliahan. Hal itu dapat dipelajari dengan lebih banyak melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, serta dengan melatih kepekaan sosial. Dengan begitu, individu itu dapat menerapkannya pada perilaku yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan *soft skill.* Seiring berkembangnya zaman, di samping individu memiliki kemampuan *hard skill*, ia juga dituntut untuk harus memiliki *soft skill.* Hal itu karena dalam suatu organisasi dan lingkungan sosial lainnya, banyak dijumpai kasus kekerasan yang disebabkan ketidakmampuan individu dalam mengendalikan emosi, pikiran, tindakan, juga tuntutan organisasi atau lingkungan sosial yang semakin pelik. Maka dari itu, kemampuan *soft skill* dinilai sangat penting karena bisa dikatakan seorang individu itu akan terlihat lebih menonjol dan kompeten dibandingkan dengan individu lain.

Penanganan anak tidak sekolah (ATS) Kota Pekalongan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran lintas sektor dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan ATS sangat diperlukan karena penyebab dan penanganan ATS memerlukan sinergitas semua pihak baik pemerintah kota, masyarakat maupun lembaga non pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS antara lain pembangunan Sanggar Kelompok Belajar (SKB). SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal. Sampai tahun 2023 ada lima belas PKBM di Kota Pekalongan yang memberikan layanan pendidikan non formal. Keberadaan SKB diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan non formal.

2.3.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen, pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,59 persen, pada tahun 2022 menjadi 5,76 persen dan pada tahun 2023 menjadi 5,44 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2021 sebesar Rp.37,07 juta per tahun, pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.40,68 juta per tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 43,29 juta per tahun, namun belum menunjukkan peningkatan dan pemeraataan kesejahteraan masyarakat yang optimal; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisata pada tahun 2022 sebanyak 1.038.424 orang, dan meningkat menjadi 1.258.597 orang. Walaupun meningkat, namun masih perlu dioptimalkan; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp. 3.188,411 Milyar dan meningkat menjadi Rp 1.616,280 Milyar pada tahun 2023; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2022 dan 2023 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2022 sebesar 4,26 persen dan tahun 2023 sebesar 2,30 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2022 sebesar 3,29 dan meningkat menjadi 5,13 persen pada tahun 2023; dan f) Masih terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan event budaya tahun 2022 dan tahun 2023 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru sebagai bagian dari TOD (*Transit Oriented Development*). Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan

Di sisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahanya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Pekalongan, dari ke-14 sub sektor dalam ekonomi kreatif, hanya 8 (delapan) sub sektor yang masuk dalam *roadmap* Kota Pekalongan, yaitu: 1) Kerajinan; 2) Desain; 3) Fashion; 4) Film, video dan fotografi; 5) Musik; 6) Seni pertunjukan; 7) Radio dan televisi; dan 8) Kuliner. Dari kedelapan sub sektor yang ada maka dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) kluster yaitu: Kuliner, Seni Kriya dan Seni Pertunjukan. Kondisi Ekraf saat ini secara umum masih sangat minim, dapat dilihat dengan tidak dimilikinya daftar kebutuhan, pasar yang tidak terpetakan, permodalan yang tidak tersalurkan dengan baik. Dengan kata lain dapat dikatakan kondisi ekraf di Kota Pekalongan masih belum didukung data yang baik. Dalam ekosistem lama ekraf dilaksanakan dengan model '*single fighter*' atau perorangan, masih terlalu terikat dengan tradisi/tradisional, masih berupa pelayanan dasar dan merupakan sambilan. Sehingga perlu adanya perubahan cara pandang atau 'Re-Branding' dengan mulai menjalankan Ekraf melalui/berbasis komunitas, memberikan nilai tambah pada karyanya, ada pelayanan tambahan dan bersifat profesional.

Selain perubahan dengan me-re-branding ekosistem Ekraf juga perlu adanya pembuatan Database Dinamis yang dapat menjawab kebutuhan pengembangan, pemetaaan dan akses pasar serta penyaluran modal. Dalam kebutuhan pengembangan perlu didasari oleh regulasi/peraturan, adanya kelembagaan dan didukung infrastruktur. Sedangkan pemetaan dan akses pasar dibedakan menjadi event dan segmentasi. Untuk permodalan dapat dibagi menjadi profit, non profit dan stimulan.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan

sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Dalam Pariwisata terdapat 5 (lima) hal penting yang saling terkait, yang biasa dikenal dengan 3A dan 2P, yaitu: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Promosi dan Pelaku Usaha. Kelima hal tersebut harus ada dan mendukung satu dengan lainnya untuk menciptakan pariwisata yang unggul. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Tahun 2017-2027, Kota Pekalongan termasuk dalam salah satu Destinasi Pariwisata Provinsi / DPP yaitu DPP Tegal – Pekalongan dan sekitarnya. DPP ini merupakan destinasi pariwisata berskala Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 DPP. DPP dibagi lagi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi / KSPP dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi/ KPPP. Untuk DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya, terdiri dari 2 KSPP dan 4 KPPP yaitu: a) KSPP Tegal dan sekitarnya; b) KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya; c) KPPP Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya; d) KPPP Batang dan sekitarnya; e) KPPP Pemalang dan sekitarnya; dan f) KPPP Kaligua-Malahayu dan sekitarnya. Sedangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPP) Kota Pekalongan Tahun 2013-2028, telah ditentukan 4 DPD dan 9 KSPP serta 14 KPPP, dengan kriteria: a) Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah daerah yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata seperti KSPD dan KPPD; b) Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas serta membentuk jejaring produk dan pola kunjungan wisata; c) Memiliki tema yang mendukung penguatan daya saing; d) Memiliki dukungan aksesibilitas dan infrastruktur mendukung pariwisata; dan e) Keterpaduan rencana sektor terkait.

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023). Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, pengembangan atraksi wisata, peningkatan kualitas amenitas, perkuatan promosi wisata, dan penyusunan standar prosedur manajemen pariwisata, termasuk dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan sektor pariwisata di Kota Pekalongan.

2.3.8. Pelestarian Budaya Lokal

Pemerintah Kota Pekolongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting

bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting, harus diintegrasikan dengan pembangunan kepariwisataan, sehingga dapat berkembang pariwisata budaya. Pengembangan pariwisata budaya dapat menjadi potensi tersendiri bagi pariwisata tersebut karena masing-masing daerah pasti memiliki kearifan budaya lokal yang khas dan unik bagi wisatawan. Strategi pengembangan pariwisata budaya dapat dilakukan antara lain dengan cara pengembangan atraksi budaya yang tetap mempertahankan jati diri kawasan, pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah menjadi bangunan cagar budaya, peningkatan infrastruktur, peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.9. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondisivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah akan sangat tergantung kondisi kondusivitas wilayah ini.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2020 berjumlah satu kasus, tahun 2021 bertambah menjadi tiga kasus, pada tahun 2022 tidak terjadi kasus konflik sosial dan pada tahun 2023 berjumlah lima kasus. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dimana pada tahun 2021 sebesar 3,60 (per 10.000 penduduk) dan menurun menjadi 1,47 (per 10.000 penduduk) di tahun 2022 akan tetapi naik menjadi 4,19 (per 10.000 penduduk) di tahun 2023. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tahun 2021 sebesar 46 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 39 kasus dan tahun 2023 meningkat menjadi 49 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupatan/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat, menjadi tanggung jawab bersama, seluruh pemangku kepentingan, bukan menjadi kewenangan pemerintah semata. Dengan kondusivitas wilayah yang baik maka akan menjamin perwujudan penanaman modal yang semakin meningkat sehingga perekonomian akan semakin berkembang, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih lagi, pada tahun 2024 akan diselengarakan Pemilu dan Pilkada serentak, sehingga diperlukan kondusivitas wilayah yang sangat baik. Guna mewujudkan Pilkada serentak yang aman dan damai, Pemerintah Kota Pekalongan bersinergi dengan TNI, POLRI dan Linmas dengan menyiapkan personil pengamanan pada semua tahapan Pilkada, yaitu tahapan masa kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pilkada dan pengucapan sumpah/janji, pengamanan pada kantor

penyelenggara Pilkada yaitu pengamanan Kantor dan Gudang Logistik KPU Kota Pekalongan serta pengamanan Kantor Bawaslu. Dukungan pembiayaan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan alokasi pendanaan sebesar 40% pada tahun anggaran 2023 dan 60% pada tahun anggaran 2024 dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia diproyeksikan masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun moderat, yakni tercatat pada triwulan I tahun 2024 terhadap triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69 persen.

Situasi ekonomi global juga memengaruhi ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,97 persen. Dibandingkan dengan kinerja pada Triwulan IV-2023, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 1,79 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 13,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 11,86 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 16,50 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 23,53 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 34,99 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,62 persen.

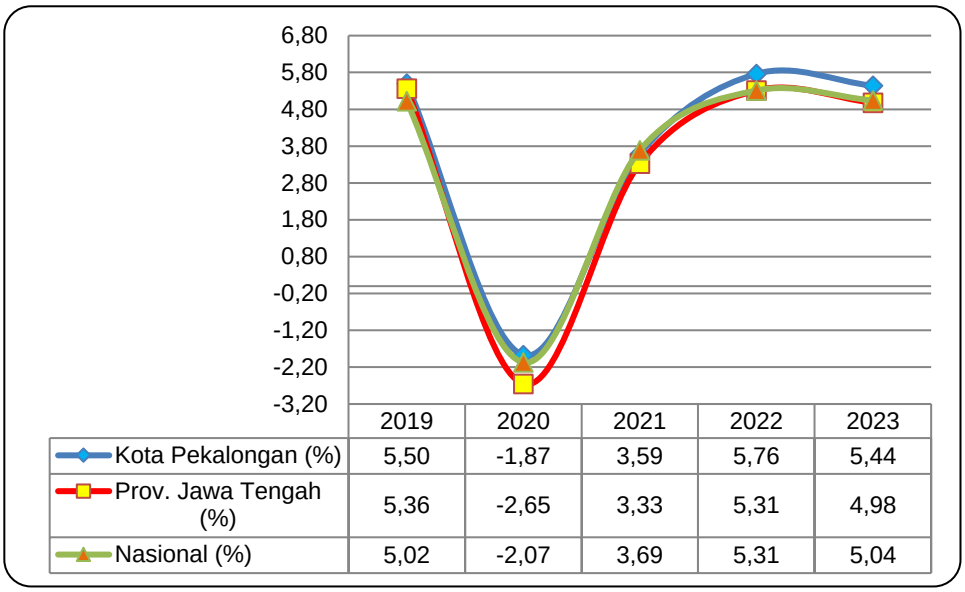
Kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut memengaruhi kondisi ekonomi Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak

sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sehingga menjadi 5,44 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.

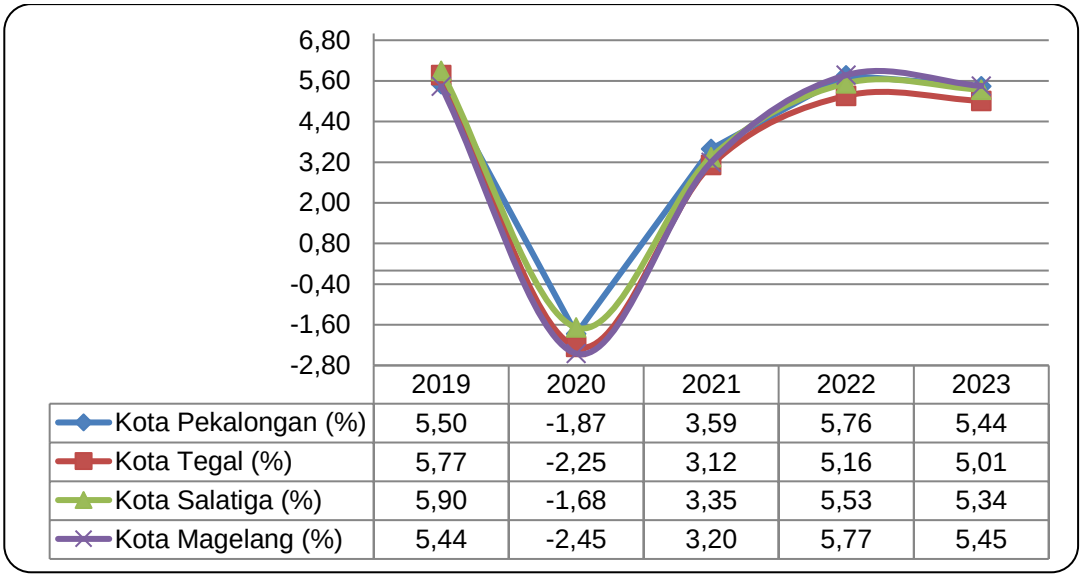


	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	5,50	-1,87	3,59	5,76	5,44
Prov. Jawa Tengah (%)	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,98
Nasional (%)	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Sementara pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 3.2 berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	5,50	-1,87	3,59	5,76	5,44
Kota Tegal (%)	5,77	-2,25	3,12	5,16	5,01
Kota Salatiga (%)	5,90	-1,68	3,35	5,53	5,34
Kota Magelang (%)	5,44	-2,45	3,20	5,77	5,45

Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,44 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,64 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,66	5,09	4,79	4,71	4,48
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,85	21,34	21,15	20,83	20,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,64	14,54	15,46	15,12	15,64

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,80	21,38	21,59	21,10	21,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,40	5,02	5,06	7,28	7,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,44	5,31	5,36	5,57	5,84
J	Informasi dan Komunikasi	4,36	5,13	5,07	4,75	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,13	6,21	6,22	6,15	5,93
L	Real Estat	2,71	2,73	2,66	2,58	2,54
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,42	0,42	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	4,49	4,17	3,94	3,72
P	Jasa Pendidikan	4,65	4,72	4,54	4,16	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,44	1,40	1,33	1,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,90	1,83	1,82	1,80
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2023 berfluktuasi. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,41 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 35,32 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,17 juta rupiah pada tahun 2021, 40,65 juta rupiah pada tahun 2022 dan 43,29 juta rupiah di tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 – 2023

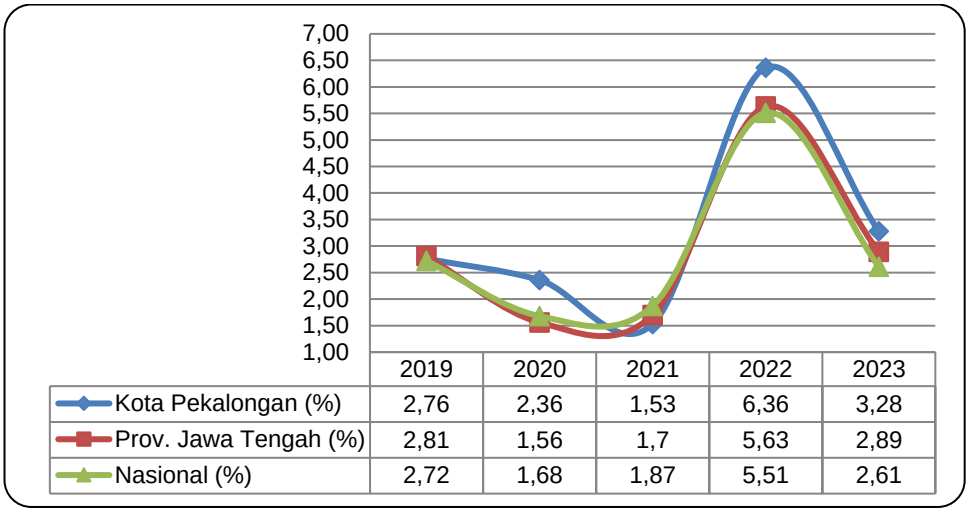
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,05
- ADHK (Miliar Rp)	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,41	35,32	37,17	40,65	43,29
- ADHK (Juta Rp)	24,35	23,89	24,66	25,96	26,70
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	6,86	-0,25	5,24	9,43	6,48
- ADHK (persen)	4,60	-1,88	3,20	5,27	2,85

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2019 – 2023, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 3.3 berikut.

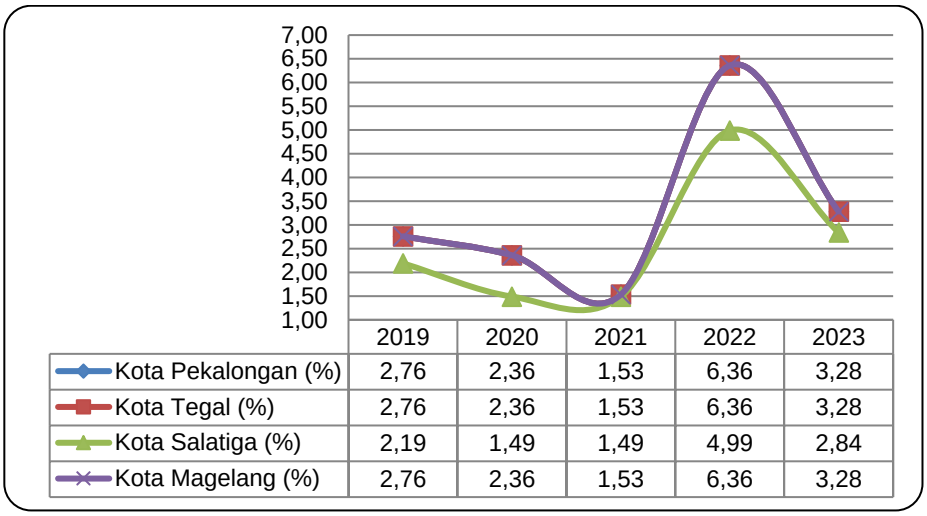


	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28
Prov. Jawa Tengah (%)	2,81	1,56	1,7	5,63	2,89
Nasional (%)	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.bps.go.id, 2024

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28
Kota Tegal (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28
Kota Salatiga (%)	2,19	1,49	1,49	4,99	2,84
Kota Magelang (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28

Gambar 3.4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun tahun 2019 sama dengan Kota Tegal, berada di urutan tertinggi yaitu 2,76%. dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 2,19%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun menjadi 3,28% untuk Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84% untuk Kota Salatiga.

Mulai tahun 2020 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi, sehingga tabel inflasi menurut kelompok pengeluaran dijadikan dua, yaitu tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2023. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Umum	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,66	8,00
Makanan Jadi	3,05	1,60
Perumahan	3,47	0,40
Sandang	2,51	3,31
Kesehatan	0,54	4,75
Pendidikan	1,33	3,74
Transport	2,43	0,31
Perlengkapan	-	-
Infokom	-	-
Rekreasi	-	-
Restoran	-	-
Perawatan Pribadi	-	-

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2022 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka 2024, 2024

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan tumbuh tinggi.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

1) Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan vaksinasi *COVID-19* untuk menekan penyebaran *COVID-19* guna meningkatkan kegiatan ekonomi di Kota Pekalongan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
2) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.
3) Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah *COVID-19*.
4) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, antara lain rencana pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD), pembangunan *fly over* dan penanganan banjir/rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.
5) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

a. Respon atas kebijakan Pusat yaitu penuntasan vaksinasi *COVID-19* bagi usia di atas 12 tahun dan percepatan vaksinasi *COVID-19* bagi usia dibawah 12 tahun dalam rangka menekan penyebaran *COVID-19* dan mengakhiri pandemi.
b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.
c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *COVID-19*, antara lain: (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
f. Percepatan pemulihan ekonomi akan dihadapkan pada kondisi dunia usaha yang memerlukan daya ungkit lebih untuk kembali normal pasca pandemi *COVID-19*.
g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum sepenuhnya stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada.
h. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
i. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan batik yang masih berupa bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan sendiri belum memiliki *brand* produk yang original dan kuat di pasaran dan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
j. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan melalui optimalisasi technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik.
k. Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

a. Upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* diarahkan untuk mengoptimalkan industri, investasi pariwisata, dan ekspor melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program *CSR*) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).

g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut:

a. Pertumbuhuan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Upaya peningkatan ekonomi terus didorong dengan menggerakkan berbagai sektor usaha dan melibatkan berbagai pihak termasuk investor.

Di tahun 2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,44 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,76 persen.

Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,76	5,44	5,4 – 5,8	5,4 – 5,8	4,55

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2023 bergerak naik dari 75,90 di tahun 2022, menjadi 76,71 di tahun 2023. Capaian di tahun 2023 telah melebihi angka yang ditargetkan pada tahun 2024 yaitu 76,70. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2022	Relisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,90	76,71	76,70	76,70	75,88

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 65,31 di tahun 2023. Angka tersebut telah mencapai target yang diharapkan yaitu 59,14. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,14	65,31	59,59	65,31	60,28

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

d. Tingkat Kemiskinan

Pandemi *COVID-19* yang terjadi sejak tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat pembatasan kegiatan dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri. Tingkat kemiskinan tahun 2022 mencapai 7,00 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,71 persen. Begitu juga di tahun 2023, tingkat kemiskinan mencapai 6,81 persen, masih di atas angka yang diharapkan yaitu 6,45 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan

Indikator	2022		2023		2024		Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RKPD	Target Perubahan RKPD	
Tingkat kemiskinan (persen)	6,71	7,00	6,50 - 6,45	6,81	6,3 - 5,93	6,3 - 5,93	6,09

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan meningkat dari 4,98 ditahun 2022 menjadi 5,02 di tahun 2023. Beberapa faktor penyebab naiknya angka pengangguran adalah terjadinya penurunan pada permintaan pekerjaan, pertumbuhan penduduk yang besar dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja serta keterampilan para tenaga kerja tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,98	5,02	4,5 – 4,7	4,5 – 4,7	6,15

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3±1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi pada tahun 2023 berada diatas range tersebut yaitu 3,28 persen, naik 3,08 persen dari capaian tahun 2022 yaitu 6,36 persen.

Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Inflasi (persen)	6,36	3,28	3±1	3±1	3±1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Resposibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk belanja daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Belanja operasi sebagaimana dimaksud, dirinci atas jenis: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja bunga; d) belanja subsidi; e) belanja hibah; dan f) belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal meliputi: a) belanja modal tanah; b) belanja modal peralatan dan mesin; c) belanja modal bangunan dan Gedung; d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; e) belanja modal aset tetap lainnya; dan f) belanja modal aset lainnya. Untuk belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Dan untuk belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dihitung berdasarkan :
   a. perkiraan potensi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. memperhatikan realisasi pendapatan Pajak Daerah pada semester I tahun anggaran 2024;
2. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan :
   a. perkiraan potensi yang berpedoman pada pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. memperhatikan realisasi pendapatan Retribusi Daerah pada semester I tahun anggaran 2024;
3. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dihitung berdasarkan perolehan laba dari BUMD tahun 2023 audited.
4. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan :
   a. dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada semester I tahun anggaran 2024;
   b. perkiraan suku Bungan BI;
   c. potensi aset yang disewakan;
   d. estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
   e. estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
5. Asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat : Dana Perimbangan disesuaikan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 tetapi belum mempertimbangkan kemungkinan diperolehnya Dana Insentif Fiskal atas kinerja tahun berjalan (2024).
6. Dana Bagi Hasi Pajak Provinsi disesuaikan dengan estimasi realisasi yang akan diterima di tahun 2024 dengan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971.1/7 Tahun 2024 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan mempertimbangkan juga realiasi tahun lalu (2023).

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;

4. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota yang merupakan turunannya. (Perda dan Perwal tindaklanjut atas Undang-Undang No 1 Tahun 2022 HKPD).

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota yang merupakan turunannya. (Perda dan Perwal tindaklanjut atas Undang-Undang No 1 Tahun 2022 HKPD).
2. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025.
3. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya).
4. Pemberian Stimulus PBB.
5. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD.
6. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran)
7. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
8. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah.
9. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
10. Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah.
11. Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru.
12. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
13. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
14. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito.
15. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.
16. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
17. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID.
18. Menyusun Rencana Aksi Peningkatan Dana Insentif.
19. Peningkatan kordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun perubahan target pendapatan Kota Pekalongan tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Perubahan Target Pendapatan
Kota Pekalongan Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PENDAPATAN DAERAH	**971.139.215.000**	**973.848.811.000**	1.006.347.876.000	35.208.661.000	32.499.065.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**249.510.605.000**	**248.422.169.000**	264.390.216.000	14.879.611.000	15.968.047.000
Pajak Daerah	105.000.000.000	106.000.000.000	106.700.000.000	1.700.000.000	700.000.000
Retribusi Daerah	22.274.360.000	127.931.569.000	143.104.255.000	120.829.895.000	14.752.686.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.365.300.000	6.365.300.000	7.197.536.000	832.236.000	832.236.000
Lain-lain PAD yang Sah	115.870.945.000	8.125.300.000	7.388.425.000	-108.482.520.000	-316.875.000
PENDAPATAN TRANSFER	**719.378.610.000**	**725.426.642.000**	741.957.660.000	22.579.050.000	16.531.018.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**637.314.059.000**	**643.362.091.000**	639.239.428.000	1.925.369.000	-4.122.663.000
Bagi Hasil	29.844.124.000	27.266.333.000	31.209.351.000	1.365.227.000	3.943.018.000
Dana Alokasi Umum	447.688.903.000	468.978.068.000	468.978.068.000	21.289.165.000	0
Dana Alokasi Khusus	149.836.793.000	147.117.690.000	139.052.009.000	-10.784.784.000	-8.065.681.000
Dana Insentif Fiskal	9.944.239.000	0	0	-9.944.239.000	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**82.064.551.000**	**82.064.551.000**	102.718.232.000	20.653.681.000	20.653.681.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	82.064.551.000	82.064.551.000	82.064.551.000	0	0
Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	20.653.681.000	20.653.681.000	20.653.681.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**2.250.000.000**	**0**	**0**	**-2.250.000.000**	**0**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	2.250.000.000	0	0	-2.250.000.000	0

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.499.065.000 dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2024 yang terdiri dari kenaikan pajak daerah sebesar Rp 700.000.000,- retribusi daerah sebesar Rp.14.752.686.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.832.236.000. Kenaikan tersebut juga diikuti dengan penurunan Lain-lain PAD yang sah sebesar (Rp.316.875.000).

Untuk Pendapatan Transfer, secara total bertambah sebesar Rp.16.531.018.000. kenaikan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.20.653.681.000 dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat Rp.3.943.018.000. Kenaikan tersebut juga diikuti dengan penurunan Dana Alokasi Khusus sebesar (Rp.8.065.681.000).

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2024 mengacu pada pagu indikatif tahun 2024 pada RPJMD Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi

serta percepatan pencapaian target pembangunan, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian belanja pegawai yang terdiri dari:
   a. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN berdasarkan realisasi belanja bulan Juni 2024.
   b. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK
   c. Penyesuaian penggunaan rincian rekening belanja pegawai.
   d. Penyesuaian kebutuhan belanja pegawai BLUD sesuai dengan hasil SiLPA audited.
2. Penyesuaian rekening belanja atas hasil SiLPA audited yang bersifat transitoris (DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, dan BLUD).
3. Penyesuaian belanja atas perubahan pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Penyesuaian belanja atas Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 13 tahun 2024 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.
5. Pemenuhan belanja kebutuhan rutin operasional perangkat daerah yang belum teralokasikan 12 bulan.
6. Rasionalisasi atas belanja yang tidak mendesak dan urgen.
7. Pergeseran anggaran antar organisasi/unit organisasi/program/kegiatan/sub kegiatan/kelompok dan jenis belanja.

Adapun perubahan belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
BELANJA	**1.008.539.215.000**	**1.024.773.811.000**	**1.069.011.991.000**	**60.472.776.000**	**44.238.180.000**
BELANJA OPERASI	**889.781.384.900**	**913.974.138.000**	941.369.814.780	51.588.429.880	27.395.676.780
Belanja Pegawai	435.505.100.360	430.669.816.000	432.842.014.500	-2.663.085.860	2.172.198.500
Belanja Barang dan Jasa	387.645.670.540	440.037.571.000	463.896.876.680	76.251.206.140	23.859.305.680
Belanja Hibah	64.949.926.000	41.316.875.000	42.113.332.000	-22.836.594.000	796.457.000
Belanja Bantuan Sosial	1.680.688.000	1.949.876.000	2.517.591.600	836.903.600	567.715.600
BELANJA MODAL	**114.781.230.100**	**107.299.673.000**	123.542.176.220	8.760.946.120	16.242.503.220
Belanja Modal Tanah	80.000.000	772.160.000	953.730.000	873.730.000	181.570.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.101.164.100	19.855.856.000	26.725.806.220	3.624.642.120	6.869.950.220
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.313.330.000	25.740.369.000	23.131.126.000	-19.182.204.000	-2.609.243.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.161.776.000	60.221.703.000	70.430.761.000	21.268.985.000	10.209.058.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.600.000	641.855.000	2.249.848.000	2.159.248.000	1.607.993.000
Belanja Aset Lainnya	34.360.000	67.730.000	50.905.000	16.545.000	-16.825.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**3.976.600.000**	**3.500.000.000**	4.100.000.000	123.400.000	600.000.000
Belanja Tidak Terduga	3.976.600.000	3.500.000.000	4.100.000.000	123.400.000	600.000.000
BELANJA TRANSFER	**0**	**0**	**0**	0	0
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 di Kota Pekalongan antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian.

Tabel 3.13 Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PEMBIAYAAN	**37.400.000.000**	**50.925.000.000**	**62.664.115.000**	**25.264.115.000**	**11.739.115.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**42.650.000.000**	**53.925.000.000**	**62.664.115.000**	**20.014.115.000**	**8.739.115.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	28.000.000.000	45.200.000.000	53.939.115.000	25.939.115.000	8.739.115.000
Pencairan Dana Cadangan	14.650.000.000	8.725.000.000	8.725.000.000	-5.925.000.000	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.250.000.000**	**3.000.000.000**	**0**	**-5.250.000.000**	**-3.000.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0		
Penyertaan Modal Daerah	5.250.000.000	3.000.000.000	0	-5.250.000.000	-3.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0		

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan ***Tahta Untuk Rakyat*** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *brand image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Di samping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat memengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk mengekploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan

limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan terkurangi secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi *Transit Oriented Development* (TOD). Dengan selesainya konstruksi Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana di akhir tahun 2021, Kota Pekalongan mempunyai wahana wisata baru yang menjadi magnet bagi wisatawan. Hal ini menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya – upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi kedelapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan roh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, makna sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta penargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta penargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJPD yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlaqul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu "***Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius***", uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian ibu, bayi dan balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan active dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya pengarusutamaan hak anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadahi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan/RTH, dan terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, dengan sasaran meliputi: optimalnya layanan air

minum, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi perkotaan.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi sedekah laut (nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujud melalui upaya mendorong peningkatan intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

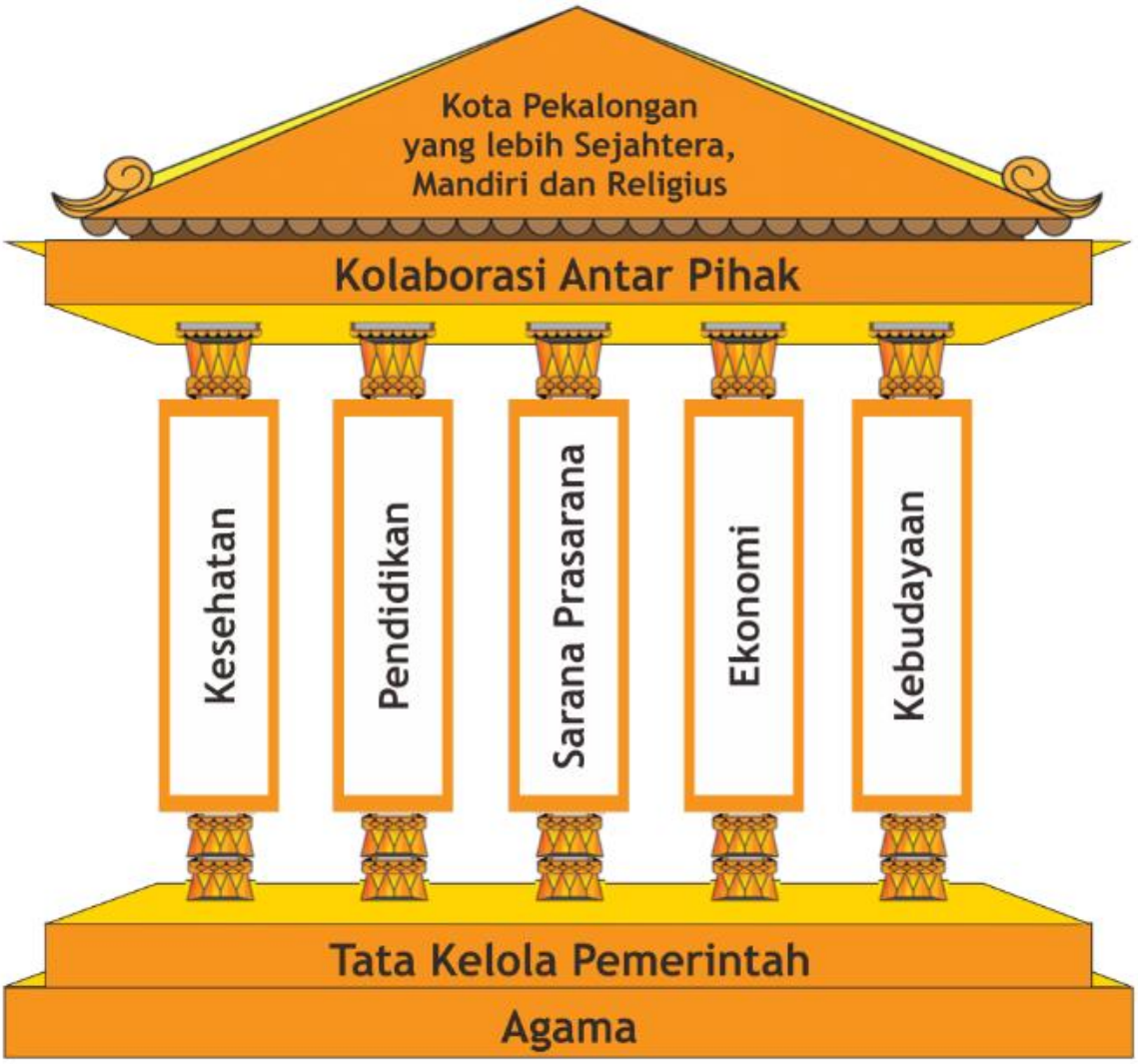
Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN,

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.1.3. Tujuan Dan Sasaran

4.1.3.1. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya indeks keluarga sehat
b. Meningkatnya penanganan kemiskinan

4.1.3.2. Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

TUJUAN

a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif

SASARAN

a. Meningkatnya akses pendidikan
b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
c. Optimalnya pengarusutamaan gender
d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

4.1.3.3. Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

TUJUAN

a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

SASARAN

a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

4.1.3.4. Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TUJUAN

a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

SASARAN

a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
b. Menurunnya tingkat pencemaran air
c. Optimalnya kualitas lahan
d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang
e. Optimalnya layanan air minum
f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

4.1.3.5. Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN

a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

4.1.3.6. Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

TUJUAN

a. Melestarikan Seni Budaya
b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

SASARAN

a. Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan
b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

4.1.3.7. Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

TUJUAN

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

SASARAN

a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)
b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)
c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026
Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat												
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
			Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan			persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan												
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
		2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	Tingkat Pengangguran Terbuka			persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman												
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen			persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00
		1. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan												
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob			persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
		3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar			persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
			Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal												
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita			Rp. Juta/ jiwa/tahun	35,22	35,47 - 35,51	35,97 - 36,21	36,56 - 36,92	37,16 - 37,82	39,21	40,65	40,65
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah												
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial			kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government												
	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
		3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
			Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja '*impac*t' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2026. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat					
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan
				Skor PPH konsumsi	Pangan
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan					
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Pendidikan
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
		Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman					
Meningkatkan perumahan dan	Persentase kelurahan dengan	Meningkatnya kawasan perumahan dan	Persentase kawasan perumahan dan	Persentase jumlah rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
permukiman yang nyaman	kawasan kumuh kurang dari 10 persen	permukiman yang tidak kumuh	permukiman yang tidak kumuh	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan					
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kapasitas Jalan Perkotaan	Perhubungan
			Persentase keterhubungan jalan	Persentase jalan kota dalam keadaan Mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UKM
				Nilai produksi tanaman pangan, holtikultura dan peternakan	Pertanian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK *Outcome*)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah					
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Tingkat kematangan layanan data terbuka pada satu data terpadu daerah	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks Profesionalitas ASN	Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
				Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2024

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	
Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualtas jalan lingkungan
Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan	

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Terwujudnya rumusan dan pelasanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
	optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	
Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan *event* budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan toko masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2024 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2024 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan

pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci, 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0-1 persen

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 14 persen;
   b. Insidensi tuberkulosis sebesar 190 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 kab/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kab/kota; dan
   e. Nilai rata-rata PISA, yaitu: Membaca sebesar 396; Matematika sebesar 388; Sains sebesar 402.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP reformasi sistem kesehatan nasional;
   - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0); dan
   - MP percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 5,4-5,8 persen; dan
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 19,5-20,6 persen.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP kawasan industri prioritas dan smelter;
   - MP pengelolaan terpadu UMKM;
   - MP 10 destinasi pariwisata prioritas;
   - MP *food estate* (kawasan sentra produksi pangan); dan
   - Transformasi Digital.
4. Penguatan daya saing usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 6,2-7 persen; dan

b. Nilai devisa pariwisata sebesar USD 7,38-13,0 miliar.

dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu MP pengelolaan terpadu UMKM.

5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 27,27 persen;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional sebesar 17 persen.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3;
   - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional sebesar 95 persen, provinsi sebesar 75 persen, dan kabupaten-kota sebesar 65 persen;
   b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman sebesar 92,76 persen akses layak dan 15 persen akses aman;
   c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan sebesar 25,53 persen;
   d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 86 persen akses layak termasuk 12 persen akses aman;
   e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif) sebanyak 11 lokasi; dan
   f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik sebesar 1.300 kwh/kapita.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden sebesar 100 persen;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator sebesar 100 persen; dan
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM sebesar 100 persen.

   dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
   - MP Ibu Kota Nusantara; dan
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian yaitu Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal sebanyak 553 satker, dengan dukungan proyek-proyek prioritas.

Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,0-5,7 persen;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02;
6. Perununan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 27,27 persen;
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110; dan
8. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

   b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery* industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

   a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

      1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
      2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
      3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
      4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan

5) Pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).

b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
3) Penyediaan air untuk pertanian;
4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
6) Pengembangan waduk multiguna.

c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;

3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) Pengembangan industri halal.

g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) Pengelolaan Impor;
4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
7) Peningkatan efektivitas *Prefrential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
d) Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
e) Meningkatkan Indeks Pembanguanan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk

meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f) Pengentasan kemiskinan; dan
g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
    1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
    2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
    3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
    4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Sistem jaminan sosial nasional;
    2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
    3) Kesejahteraan Sosial.
c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
    2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
    3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
    4) Penguatan Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat;
    5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, mencakup:
        - Penguatan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
        - Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan;
        - Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
        - Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan;
        - Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan.
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
    2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
    3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
    5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
3) Kualitas Pemuda.

f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
3) Reforma Agraria; dan
4) Perhutanan Sosial.

g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
3) Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Penciptaan Inovasi; dan
4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
d) meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Budaya Literasi;
2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
3) Pengembangan budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Konektivitas Jalan;
   2) Konektivitas Kereta Api;
   3) Konektivitas Laut;
   4) Konektivitas Udara; dan
   5) Konektivitas Darat.

c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Transportasi Perkotaan; dan
   2) Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perkotaan.

d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
   2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
   3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penuntasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
   2) Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
   3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan Nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
   2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
   3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
   4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penanggulangan Bencana; dan
   2) Peningkatan Ketahanan Iklim.

c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
   2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
   3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

   a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas;
   b) Meningkatkan pengembangan SDM aparatur sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa;
   c) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
   d) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   e) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   f) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

   a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
      2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
      3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
   b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Penguatan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, dan;
      2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
   c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
      2) Transformasi pelayanan publik;
      3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
      4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
   d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
      2) Penguatan Keamanan Laut; dan
      3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 diselaraskan dengan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Namun demikian, dikarenakan periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah berakhir pada tahun 2023, maka prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema **"Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas"**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:

a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memberbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
    1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
    2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
    3) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
    4) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
    5) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
    6) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
    1) Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
    2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
    3) Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas Puskesos;
    4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.
d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;

e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:

   a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas *stakeholder*, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;

   b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

   c. Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;

   d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;

   e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;

   f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;

   g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;

   h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelengaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kepen-dudukan dan pencatatan sipil.

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, dengan fokus pada:

    a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

    b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;

    c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;

    d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

    a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT;

    b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga non-pemerintah.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

1. PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,06-8,96 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,364;
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;
13. Persentase Penurunan Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 ditujukan untuk "***Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian***", dengan arah kebijakan meliputi:

1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program, dengan fokus pada:
    a. Mendorong upaya konvergensi dan sinergitas lintas sektor yang disertai peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, percepatan penurunan angka stunting serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
    b. Mendorong peran berbagai pihak/stakeholder dalam meningkatkan percepatan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC);
    c. Penggerakan masyarakat melalui posyandu dan pemberdayaan Germas di berbagai tatanan masyarakat;
    d. Peningkatan efektivitas jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan, dengan fokus pada perluasan kesempatan pelatihan keterampilan bagi warga miskin dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan partisipasi pendidikan guna menurunkan angka ATS (anak tidak sekolah), disertai upaya perluasan akses, peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan secara bertahap;
    b. Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan

penghapusan pekerja anak, dengan fokus pada peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan tenaga kerja dan penghapusan pekerja anak.

5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan guna meningkatkan kesetaraan gender;
   b. Peningkatan dan optimalisasi kelurahan layak anak serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak, difabel dan lansia.
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:
   a. Penguatan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan peran masyarakat dalam rangka percepatan penanganan banjir/rob;
   b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang menghasilkan limbah, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup;
   c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:
   a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
   b. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
   c. Lanjutan pengembangan kawasan Pekalongan Baru dan mendorong penambahan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif, dengan fokus pada pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dengan sektor industri, jasa, perdagangan dan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui:
   a. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata disertai dengan promosi, penguatan pelaku industri pariwisata serta kemudahan akses;
   b. Pengembangan destinasi wisata baru dengan menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka penguatan ekonomi lokal.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, dengan fokus pada pengembangkan kesenian dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan masyarakat dalam rangka memperkaya substansi penyelenggaraan event budaya.
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN, dengan fokus pada:
   a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan domain SPBE;
   b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;

c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;
d. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta implementasi roadmap merit system;
e. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2024 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 5,8 persen;
b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,3 - 5,93 persen;
d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,70;
e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5 – 4,7 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2024. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2024	
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan	12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN
Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah			
Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Belum opimalnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan			
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)	Peningkatan Derajat Kesehatan	1	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2024	
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan			
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)			
Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal	10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program, dengan fokus pada:							
a. Mendorong upaya konvergensi dan sinergitas lintas sektor yang disertai peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, percepatan penurunan angka stunting serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; b. Mendorong peran berbagai pihak/stakeholder dalam meningkatkan percepatan pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*; c. Penggerakan masyarakat melalui posyandu dan pemberdayaan Germas di berbagai tatanan masyarakat; d. Peningkatan efektivitas jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat.	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1.AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,61 per 1.000 KH	9,61 per 1.000 KH	Tetap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		2.AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,60 per 1.000 KH	7,60 per 1.000 KH	Tetap	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		3.AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 104,14 per 100.000 KH	104,14 per 100.000 KH	Tetap	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		4.Indeks Keluarga Sehat	4. 0,35	104,14 per 100.000 KH	Tetap	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	
						Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan, dengan fokus pada:							
Perluasan kesempatan pelatihan keterampilan bagi warga miskin dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2,50%	2.50%	Tetap	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
						Program Pemberdayaan Sosial	
						Program Rehabilitasi Sosial	
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan, dengan fokus pada:							

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Peningkatan partisipasi pendidikan guna menurunkan angka ATS (anak tidak sekolah), disertai upaya perluasan akses, peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan secara bertahap; b. Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.	Rata-Rata Lama Sekolah	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,59 tahun	9,59 tahun	Tetap	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	100,00%	Tetap	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, dengan fokus pada:							
Peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan tenaga kerja dan penghapusan pekerja anak.	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,81%	74,22%	disesuaikan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
						Program Penempatan Tenaga Kerja	
						Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak, dengan fokus pada:							
a. Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan guna meningkatkan kesetaraan gender; b. Peningkatan dan optimalisasi kelurahan layak anak serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak, difabel dan lansia.	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,59	65,31	disesuaikan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
						Program Perlindungan Perempuan	
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Nindya	disesuaikan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
						Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada:							
Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.	Meningkatnya kawasan perumahan dan	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	96,24%	96,24%	Tetap	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
						Program Kawasan Permukiman	
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
	permukiman yang tidak kumuh					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:							
a. Penguatan sinergitas dengan pemerintah pusat, provinsi dan peran masyarakat dalam rangka percepatan penanganan banjir/rob;	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	909,00 Ha	880,83 Ha	disesuaikan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang menghasilkan limbah, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup;	Menurunnya tingkat pencemaran air	2. Indeks Kualitas Air	35,37	59,37	disesuaikan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.	Optimalnya kualitas lahan	3. Indeks Kualitas Lahan	23,60	37,64	disesuaikan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	7 regulasi	Tetap	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
						Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
						Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:							
a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;	Optimalnya layanan air minum	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100%	100%	Tetap	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
b. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	2. Persentase pelayanan sampah	71,12%	71,12%	Tetap	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat; c. Lanjutan pengembangan kawasan Pekalongan Baru dan mendorong penambahan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	3. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	B	B	Tetap	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		4. Persentase keterhubungan jalan	100%	100%	Tetap	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif, dengan fokus pada:							
Pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dengan sektor industri, jasa, perdagangan dan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui: a. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata disertai dengan promosi, penguatan pelaku industri pariwisata serta kemudahan akses; b. Pengembangan destinasi wisata baru dengan menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka penguatan ekonomi lokal.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	5,4 - 5,8 %	5,4 - 5,8 %	Tetap	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
						Program Promosi Penanaman Modal	
						Program Pelayanan Penanaman Modal	
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
						Program Pengembangan Ekspor	
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
						Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
						Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
						Program Pengembangan UMKM	
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
						Program Pemasaran Pariwisata	
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
						Program Perizinan Usaha Pertanian	
						Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, dengan fokus pada:							
Pengembangkan kesenian dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan masyarakat dalam	Meningkatnya intensitas event	Persentase Penyelenggaraan *Event* Budaya	93,33%	122,00%	disesuaikan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
						Program Pembinaan Sejarah	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
rangka memperkaya substansi penyelenggaraan event budaya.	budaya yang diselenggarakan					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
						Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024							
	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	100,00%	Tetap	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
						Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP, Damkar dan Penyelamanan
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN, dengan fokus pada:							
a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan domain SPBE; b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	1. Indeks SPBE	3,05	3,32	disesuaikan	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; d. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta implementasi roadmap merit system;	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	2. IKM Kota	83,79	83,79	Tetap	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
						Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
						Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
						Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
						Program Pencatatan Sipil	
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
e. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Nilai KIP Tingkat Kota	97,00	97,00	Tetap	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	4. Nilai SAKIP Kota	75,07	75,07	Tetap	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
						Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	WTP	WTP	Tetap	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	6. Indeks Merit System	250,00	327,00	disesuaikan	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7. Maturitas SPIP	3,60	3,60	Tetap	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
		8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	6	6	Tetap	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024, maka target indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator program pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.35	0.35	Tetap
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	104.14	104.14	Tetap
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7.60	7.60	Tetap
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9.61	9.61	Tetap
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2.50	2.50	Tetap
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.59	9.59	Tetap
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59.59	65.31	disesuaikan
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	Tetap
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	disesuaikan
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70.81	74.22	disesuaikan
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	96.24	96.24	Tetap
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	909	880.83	disesuaikan
13	Indeks Kualitas Air	indeks	35.37	59.37	disesuaikan
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	37,64	disesuaikan
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	7,00	Tetap
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	Tetap
17	Persentase pelayanan sampah	persen	71.12	71.12	Tetap
18	Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	kategori	B	B	Tetap
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	100.00	100.00	Tetap
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,4 - 5,8	5,4 - 5,8	Tetap
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	93.33	122.00	disesuaikan
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap
23	Indeks SPBE	indeks	3.05	3.32	disesuaikan
24	IKM Kota	persen	83.79	83.79	Tetap
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97,00	97,00	Tetap

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
26	Indeks Merit System	indeks	250.00	327.00	disesuaikan
27	Nilai SAKIP Kota	skor	75.07	75.07	Tetap
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	WTP	Tetap
29	Maturitas SPIP	nilai	3.60	3.60	Tetap
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	6.00	6.00	Tetap

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2024

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	74.57	74.57	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Angka Kemiskinan	persen	6,3 - 5,93	6,3 - 5,93	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	76.70	76.70	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,5 – 4,7	4,5 – 4,7	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	77.78	77.78	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	19.58	19.58	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	90.37	90.48	disesuaikan	Tujuan Kota	Kota
	- PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	37,16-37,82	37,16-37,82	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Jumlah konflik sosial	kasus	0,00	0,00	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.35	0.35	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	104.14	104.14	Tetap	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7.60	7.60	Tetap	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9.61	9.61	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2.50	2.50	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59.59	65.31	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70.81	74.22	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	96.24	96.24	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	909	880,83	disesuaikan	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
	- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase pelayanan sampah	persen	71.12	71.12	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Pertumbuhan ekonomi	persen	5,4 – 5,8	5,4 – 5,8	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PENDIDIKAN						
	- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	URUSAN KESEHATAN						
	- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	95.00	100.00	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*)	persen	99.00	100.00	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	80.42	80.42	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	89.66	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	1.09	2.19	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	96.22	99.89	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	60.00	60.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	- Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	persen	94.36	98.90	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS						
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	80.00	85.00	disesuaikan	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Satpol PP
URUSAN SOSIAL						
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3.55	4.00	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN TENAGA KERJA						
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52.29	52.29	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28.52	28.56	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	632.00	769.80	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PANGAN						
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan
URUSAN PERTANAHAN						
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	51.43	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0.34	0.24	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	70.68	70.68	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	43.00	43.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	89.50	89.50	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	9.02	9.02	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67.55	67.55	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PERHUBUNGAN						
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28.00	28.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.05	3.30	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88,31-100)	Sangat Baik (Nilai 88,31-100)	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
URUSAN KOPERASI DAN UKM						
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	8.42	8.42	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
URUSAN PENANAMAN MODAL						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	208.37	212.54	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
URUSAN KEBUDAYAAN						
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	1.50	1.50	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
URUSAN PERPUSTAKAAN						
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK *Outcome*)	indeks	20.32	20.32	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN						
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	73.60	91.04	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.26	1.39	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	14.00	14.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
URUSAN STATISTIK						
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	73.00	98.50	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
URUSAN PERSANDIAN						
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	2.00	2.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian
URUSAN PILIHAN						
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	15,293.00	15,293.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA						
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	595,000.00	1,000,000.00	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
URUSAN PERTANIAN						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Miliar	251,474.39	251,474.39	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
URUSAN PERINDUSTRIAN						
- Pertumbuhan Industri	persen	0.09	2.30	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
URUSAN PERDAGANGAN						
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26.97	26.97	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	94.00	96.50	disesuaikan	IKU Renstra	Setda
SEKRETARIAT DPRD						
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN						
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
KEUANGAN						
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	2.01	2.01	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
KEPEGAWAIAN						
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	88.00	90.00	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	40.00	40.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
- Persentase laporan hasil litbang	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
INSPEKTORAT DAERAH						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
	- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	77.42	77.42	Tetap	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	14.00	14.00	Tetap	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
	- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
C.	**ASPEK DAYA SAING**						
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50.88	64.11	disesuaikan	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	100,00	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	73.69	73.69	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.59	9.59	Tetap	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
	- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Air	indeks	35.37	59.37	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	37,64	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	7,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase keterhubungan jalan	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	93.33	122.00	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Indeks SPBE	indeks	3.05	3.32	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- IKM Kota	persen	83.79	83.79	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97.00	97.00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Indeks Merit System	indeks	250.00	327.00	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Nilai SAKIP Kota	skor	75.07	75.07	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	WTP	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Maturitas SPIP	nilai	3.60	3.60	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	6.00	6.00	Tetap	IKU Kota	Kota

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2024

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
Dinas Pendidikan					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	89.50	100.00	disesuaikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Kesehatan					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	91.00	91.00	Tetap
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	persen	85.00	85.00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	persen	94.50	94.50	Tetap
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	persen	98.00	100.00	disesuaikan
	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	persen	96.00	96.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	persen	93.00	93.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	Tetap
RSUD					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	67.50	100.00	disesuaikan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	50.00	100.00	disesuaikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	persen	93.10	100.00	disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	persen	89.66	89.66	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	60.00	60.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	11.67	17.23	disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	69.48	69.48	Tetap
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18.14	18.14	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	84.39	84.39	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	15.87	15.87	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50.00	50.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	91.68	100.00	disesuaikan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	174.47	174.47	Tetap
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	1,973.41	1,973.41	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14.51	57.61	disesuaikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja,Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	persen	66.00	82.00	disesuaikan

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	persen	67.00	67.00	Tetap
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	persen	55.12	55.12	Tetap
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	persen	7.60	12.00	disesuaikan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	persen	14.00	14.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Lingkungan Hidup					
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	persen	45.02	45.02	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2.93	2.93	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	13.33	13.33	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	16.67	16.67	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50.00	50.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75,00	75,00	Tetap
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	persen	0.29	0.29	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	85.30	88.00	disesuaikan
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	93.70	93.70	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	10.00	10.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	persen	7.39	7.39	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	persen	23.99	15.01	disesuaikan

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	persen	40.74	40.74	Tetap
	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	persen	66.67	66.67	Tetap
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	persen	62.96	85.51	disesuaikan
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	persen	96.54	97.68	disesuaikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perhubungan					
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	95.00	95.00	Tetap
	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0.44	0.44	Tetap
	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0.75	0.75	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Komunikasi dan Informatika					
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.10	3.10	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	2.80	2.80	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1.00	1.00	Tetap
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2500	2750	disesuaikan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	6.82	7.09	disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	16.25	28,00	disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	persen	53.33	97,00	disesuaikan
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	47.50	75.00	disesuaikan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Kelautan dan Perikanan					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	1.00	1.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	1.00	1.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	1.00	3.00	disesuaikan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12.20	12.20	Tetap
	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	2.00	2.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	persen	94.31	94.31	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	34.29	34.29	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	persen	93.97	93.97	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	persen	4.71	8.29	disesuaikan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	persen	11.50	11.50	Tetap
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	persen	36.98	36.98	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	41.67	41.67	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	60.00	60.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pertanian dan Pangan					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4.60	4.60	Tetap
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100.00	100.00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	84.80	84.80	Tetap
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55.73	55.73	Tetap
	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	195.75	259.61	Tetap
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5.00	5.00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	75.00	75.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5.00	5.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	31.49	31.49	Tetap
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	58.77	58.77	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12.16	12.16	Tetap
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	76.17	76.17	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	93.75	93.75	Tetap
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	92.00	100.00	disesuaikan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	7.79	7.79	Tetap
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	79.99	79.99	Tetap
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	5.34	5.34	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	persen	0.46	1.10	disesuaikan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	25.93	25.93	Tetap
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	47.51	50.00	disesuaikan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	20.75	75.34	disesuaikan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	25.00	25.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6.00	6.00	Tetap
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum,dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100.00	100.00	Tetap
Sekretariat DPRD					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100.00	100.00	Tetap
	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	74.00	74.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	persen	7.66	5.06	disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	persen	5.00	5.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS berkembang karier	persen	50.00	80.00	disesuaikan
	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90.00	90.00	Tetap
	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	80.00	80.00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Inspektorat Daerah					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85.00	85.00	Tetap
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	nilai	3.00	3.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Utara					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Selatan					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Barat					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Timur					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16.00	16.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2024

4.2.4. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Nasional

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan nasional dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.3. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	77.882.000	77.882.000	77.882.000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	46.930.000	46.930.000	39.630.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.500,00 dokumen	2.750,00 dokumen	846.700.000	890.936.000	781.256.000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	6,82 Miliar Rupiah	6,96 Miliar Rupiah	412.043.000	657.656.000	657.656.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	101.588.000	105.044.000	102.344.000	DPMPTSP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	20,75 persen	75,34 persen	455.853.000	359.669.000	338.389.000	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	25,00 persen	10.221.000	10.221.000	10.221.000	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	94.380.000	94.380.000	94.380.000	Dinperinaker
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	93,75 persen	8.121.372.000	9.769.831.000	7.607.730.000	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	92,00 persen	100,00 persen	119.405.000	121.853.000	138.663.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	7,79 persen	135.017.000	136.241.000	125.831.000	Dindagkop UKM

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	79,99 persen	308.296.000	315.984.000	315.984.000	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	5,34 persen	676.705.000	1.012.233.000	1.013.973.000	Dindagkop UKM
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,17 persen	76,17 persen	16.800.000	16.800.000	8.660.000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	31,49 persen	108.219.000	110.667.000	110.667.000	Dindagkop UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen	58,77 persen	631.070.000	606.707.000	606.707.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen	12,16 persen	687.998.000	952.998.000	952.998.000	Dindagkop UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen	2.696.675.000	2.915.533.000	2.471.915.000	DKP
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,00 persen	3,00 persen	294.382.000	246.498.000	257.536.000	DKP
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha	2,00 pelaku usaha	458.298.000	503.282.000	489.278.000	DKP
			Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen	12,20 persen				
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 Persen	11,50 Persen	3.909.090.000	3.892.476.000	3.935.956.000	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	36,98 Persen	36,98 Persen	675.000.000	682.020.000	682.020.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	41,67 persen	278.262.000	453.262.000	453.262.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	60,00 persen	822.000.000	822.000.000	822.000.000	Dinparbudpora

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,73 Miliar Rupiah	55,73 Miliar Rupiah	284.730.000	323.405.000	845.943.000	Dinperpa
			Nilai produksi peternakan pertahun	195,75 Miliar Rupiah	195,75 Miliar Rupiah				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen	100,00 persen	313.518.000	262.018.000	262.018.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	5,00 persen	434.053.000	311.326.000	326.376.000	Dinperpa
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen	100,00 persen	48.290.000	48.290.000	30.752.000	Dinperpa
		Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	75,00 persen	75,00 persen	30.968.000	30.968.000	30.968.000	Dinperpa
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	5,00 persen	145.500.000	506.865.000	46.865.000	Dinperpa
					Sub Total	**23.241.245.000**	**26.283.975.000**	**23.637.860.000**	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	11,67 persen	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000	DPU-PR
	8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,29 persen	0,29 persen	10.557.581.000	10.675.543.000	10.674.643.000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	60,00 persen	860.000.000	925.000.000	952.450.000	DPU-PR
					Sub Total	**12.345.364.000**	**14.930.262.000**	**15.296.234.000**	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	85,00 Persen	85,00 Persen	72.075.128.000	51.413.641.000	59.783.885.000	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 Persen	91,00 Persen				

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen				
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	94,50 Persen	94,50 Persen	1.036.287.000	781.457.000	778.452.000	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	96,00 Persen	96,00 Persen	629.013.000	600.676.000	600.676.000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	98,00 Persen	100,00 Persen				
			Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	93,00 Persen	93,00 Persen	968.213.000	2.189.213.000	2.189.213.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	4,60 persen	383.342.000	384.650.000	388.650.000	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen	100,00 persen	30.500.000	30.500.000	26.500.000	Dinperpa
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80 persen	84,80 persen	54.500.000	54.500.000	54.500.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	100,00 persen	60.095.000	254.523.000	254.523.000	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7,60 Persen	12,00 Persen	5.610.387.000	1.883.987.000	1.883.987.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	14,00 Persen	14,00 Persen	165.162.000	1.992.978.000	1.992.978.000	Dinsos P2KB
	2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 Persen	100,00 Persen	868.351.000	720.967.000	718.467.000	Dinsos P2KB

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00 Persen	100,00 Persen	343.926.000	265.306.000	265.306.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67,00 Persen	67,00 Persen	473.774.000	490.778.000	440.708.000	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.670.466.000	2.060.482.000	2.027.812.000	Dinsos P2KB
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 Persen	55,12 Persen	1.502.324.000	1.526.198.000	1.427.838.000	Dinsos P2KB
	3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	89,00 persen	100,00 persen	63.780.887.000	65.378.897.000	65.798.339.000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen	100,00 persen	16.012.838.000	16.173.622.000	14.720.532.000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,25 Indeks	22,50 Indeks	830.911.000	913.562.000	926.762.000	Dinarpus
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen	100,00 persen	272.429.000	272.429.000	272.429.000	Dinas Pendidikan
	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46 persen	1,10 persen	3.312.225.000	3.507.090.000	3.684.570.000	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	25,93 persen	693.181.000	795.797.000	709.293.000	Dinperinaker
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	47,51 persen	50,00 persen	450.369.000	450.369.000	441.202.000	Dinperinaker
	5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 Persen	7,39 Persen	264.850.000	275.000.000	275.000.000	DPMPPA

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 Persen	14,64 Persen	94.012.000	81.308.000	81.308.000	DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	40,74 Persen	40,74 Persen	224.753.000	277.022.000	277.022.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	100,00 persen	146.347.000	78.090.000	78.090.000	DPMPPA
					Sub Total	**171.954.270.000**	**152.853.042.000**	**160.098.042.000**	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10.Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100,00 persen	100,00 persen	1.567.098.000	1.482.098.000	1.457.098.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	100,00 persen	202.540.000	209.560.000	209.560.000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 Persen	100,00 Persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Dinparbudpora
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 Persen	93,97 Persen	27.500.000	177.500.000	177.500.000	Dinparbudpora
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,71 Persen	8,29 Persen	1.389.007.000	2.159.147.000	2.215.667.000	Dinparbudpora
					Sub Total	**3.226.145.000**	**4.068.305.000**	**4.099.825.000**	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68 persen	91,68 persen	1.603.761.000	2.197.825.000	2.167.825.000	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 hektar	174,47 hektar	16.614.300.000	22.641.270.000	22.677.236.000	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1.973,41 hektar	1.973,41 hektar	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	14,51 persen	57,61 persen	1.410.521.000	1.655.521.000	1.835.521.000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50,00 persen	50,00 persen	9.086.000	9.086.000	59.086.000	Dinperkim
	8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 Persen	89,66 Persen	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 Ratio	0,44 Ratio	5.698.695.000	6.092.743.000	9.191.348.000	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	95,00 persen	95,00 persen				

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	transportasi perkotaan		Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,75 persen	0,75 persen				
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	84,39 persen	21.595.513.000	18.077.303.000	27.850.932.000	DPU-PR
					Sub Total	**52.838.564.000**	**64.875.516.000**	**77.302.386.000**	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 Persen	100,00 Persen	11.757.760.000	16.405.420.000	16.582.011.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	69,48 persen	3.689.840.000	4.270.800.000	4.542.015.000	DPU-PR
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,02 persen	45,02 persen	1.660.793.000	1.716.881.000	1.363.066.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	2.271.000	2.271.000	2.271.000	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,93 persen	2,93 persen	4.509.357.000	4.680.999.000	4.248.163.000	DLH
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100,00 persen	100,00 persen	468.032.000	818.032.000	863.732.000	Dinperkim
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	18,14 persen	1.097.910.000	1.425.190.000	1.537.749.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	15,87 persen	102.900.000	102.900.000	102.358.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen	100,00 persen	555.200.000	563.830.000	546.332.000	DPU-PR
					Sub Total	**23.844.063.000**	**29.986.323.000**	**29.787.697.000**	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen	100,00 persen	1.646.035.000	1.751.061.000	1.794.489.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga	16,00 lembaga	17.235.294.000	11.458.242.000	11.375.314.000	Kesbangpol
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen	100,00 persen	301.772.000	361.772.000	386.772.000	Kesbangpol

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen	100,00 persen	209.694.000	187.207.000	212.207.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen	100,00 persen	105.700.000	315.900.000	325.900.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	66,00 Persen	82,00 Persen	6.416.736.000	6.658.880.000	6.587.360.000	Satpol P3KP
	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 Indeks	3,10 Indeks	2.709.635.000	2.828.649.000	2.853.649.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 Persen	100,00 Persen	115.500.000	115.500.000	115.500.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	2,80 Persen	2,80 Persen	152.680.000	152.680.000	152.680.000	Dinkominfo
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen	100,00 persen	1.721.346.000	1.896.958.000	1.847.191.000	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	53,33 Persen	97,00 Persen	319.504.000	328.156.000	322.924.500	Dinarpus
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	47,50 Indeks	75,00 Indeks				
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	162.176.000	168.296.000	168.437.500	Dinarpus
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1,00 regulasi	1,00 regulasi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinarpus
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 persen	88,00 persen	354.829.000	370.543.000	339.175.000	Dindukcapil

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	93,70 persen	328.970.000	347.840.000	355.308.000	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	10,00 OPD	95.088.000	98.328.000	98.328.000	Dindukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	100,00 persen	18.120.390.000	27.677.934.000	29.654.587.000	Sekretariat DPRD
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 Persen	94,31 Persen	910.520.000	1.260.520.000	1.300.520.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	34,29 persen	7.880.369.000	8.350.789.000	9.395.789.000	Dinparbudpora
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 Persen	66,67 Persen	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	62,96 Persen	85,51 Persen	48.520.000	48.520.000	56.020.000	DPMPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,54 Persen	97,68 Persen	784.425.000	1.102.029.000	1.175.061.000	DPMPPA
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	40.500.000	40.500.000	39.713.000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	50,00 persen	283.393.000	268.393.000	266.393.000	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen	75,00 persen	63.750.000	63.750.000	60.750.000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	100,00 persen	12.750.000	12.750.000	12.000.000	DLH
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.046.631.000	1.110.385.000	1.012.225.000	Satpol P3KP

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	100,00 persen	77.259.000	77.259.000	77.259.000	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	100,00 persen	13.577.791.000	13.997.945.000	13.997.946.000	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara,Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	100,00 persen	1.080.309.000	1.265.809.000	1.235.769.000	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	100,00 persen	22.350.000	22.350.000	22.350.000	Kecamatan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100,00 Persen	100,00 Persen	5.232.036.000	5.432.210.000	5.482.210.000	Dinkominfo
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen	100,00 persen	734.855.000	738.609.000	708.230.000	Bappeda
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100,00 persen	100,00 persen				
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74,00 skor	74,00 skor				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100,00 Persen	100,00 Persen	581.954.000	585.800.000	546.544.000	Bappeda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100,00 persen	100,00 persen	586.389.000	588.885.000	588.670.000	Bappeda
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 Persen	100,00 Persen				
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100,00 persen	606.024.300.000	609.300.314.000	630.534.144.000	Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen	100,00 persen				
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen	100,00 persen	18.558.300.000	19.237.079.000	19.486.359.000	Setda

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen	100,00 persen	968.171.000	1.045.761.000	1.003.449.000	Setda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	5,06 Persen	5,06 Persen	5.710.413.000	5.230.574.000	5.823.272.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.120.650.000	1.453.542.000	1.413.542.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 Persen	5,00 Persen	1.457.719.000	1.655.908.000	1.617.392.000	BPKAD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90,00 persen	90,00 persen	1.317.075.000	1.226.091.000	2.923.687.000	BKPSDM
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 Persen	80,00 Persen				
			Persentase PNS berkembang karier	50,00 persen	80,00 persen				
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen	100,00 persen	1.969.650.000	1.938.534.000	1.579.392.000	BKPSDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	3,00 nilai	251.061.000	251.061.000	251.061.000	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	85,00 persen	132.791.000	132.791.000	131.431.000	Inspektorat
Sub Total						**721.089.564.000**	**731.776.388.000**	**758.789.947.000**	
Total						**1.008.539.215.000**	**1.024.773.811.000**	**1.069.011.991.000**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.2.5. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.2. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 Persen	100,00 Persen	868.351.000	720.967.000	718.467.000	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00 Persen	100,00 Persen	343.926.000	265.306.000	265.306.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67,00 Persen	67,00 Persen	473.774.000	490.778.000	440.708.000	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.670.466.000	2.060.482.000	2.027.812.000	Dinsos P2KB
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 Persen	55,12 Persen	1.502.324.000	1.526.198.000	1.427.838.000	Dinsos P2KB
	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46 persen	1,10 persen	3.312.225.000	3.507.090.000	3.684.570.000	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	25,93 persen	693.181.000	795.797.000	709.293.000	Dinperinaker
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	47,51 persen	50,00 persen	450.369.000	450.369.000	441.202.000	Dinperinaker
	8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,29 persen	0,29 persen	10.557.581.000	10.675.543.000	10.674.643.000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	60,00 persen	860.000.000	925.000.000	952.450.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 Persen	89,66 Persen	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000	DPU-PR

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 Ratio	0,44 Ratio	5.698.695.000	6.092.743.000	9.191.348.000	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	95,00 persen	95,00 persen				
			Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,75 persen	0,75 persen				
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	84,39 persen	21.595.513.000	18.077.303.000	27.850.932.000	DPU-PR
	9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	77.882.000	77.882.000	77.882.000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	46.930.000	46.930.000	39.630.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.500,00 dokumen	2.750,00 dokumen	846.700.000	890.936.000	781.256.000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	6,82 Miliar Rupiah	6,96 Miliar Rupiah	412.043.000	657.656.000	657.656.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	101.588.000	105.044.000	102.344.000	DPMPTSP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	20,75 persen	75,34 persen	455.853.000	359.669.000	338.389.000	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	25,00 persen	10.221.000	10.221.000	10.221.000	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	94.380.000	94.380.000	94.380.000	Dinperinaker

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	93,75 persen	8.121.372.000	9.769.831.000	7.607.730.000	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	92,00 persen	100,00 persen	119.405.000	121.853.000	138.663.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	7,79 persen	135.017.000	136.241.000	125.831.000	Dindagkop UKM
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	79,99 persen	308.296.000	315.984.000	315.984.000	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	5,34 persen	676.705.000	1.012.233.000	1.013.973.000	Dindagkop UKM
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko (IKK Outcome)	76,17 persen	76,17 persen	16.800.000	16.800.000	8.660.000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	31,49 persen	108.219.000	110.667.000	110.667.000	Dindagkop UKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen	58,77 persen	631.070.000	606.707.000	606.707.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen	12,16 persen	687.998.000	952.998.000	952.998.000	Dindagkop UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen	2.696.675.000	2.915.533.000	2.471.915.000	DKP
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,00 persen	3,00 persen	294.382.000	246.498.000	257.536.000	DKP
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha	2,00 pelaku usaha	458.298.000	503.282.000	489.278.000	DKP
			Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen	12,20 persen				
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 Persen	11,50 Persen	3.909.090.000	3.892.476.000	3.935.956.000	Dinparbudpora

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	36,98 Persen	36,98 Persen	675.000.000	682.020.000	682.020.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	41,67 persen	278.262.000	453.262.000	453.262.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	60,00 persen	822.000.000	822.000.000	822.000.000	Dinparbudpora
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,73 Miliar Rupiah	55,73 Miliar Rupiah	284.730.000	323.405.000	845.943.000	Dinperpa
			Nilai produksi peternakan pertahun	195,75 Miliar Rupiah	195,75 Miliar Rupiah				
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen	100,00 persen	313.518.000	262.018.000	262.018.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	5,00 persen	434.053.000	311.326.000	326.376.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen	100,00 persen	48.290.000	48.290.000	30.752.000	Dinperpa
		Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	75,00 persen	75,00 persen	30.968.000	30.968.000	30.968.000	Dinperpa
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	5,00 persen	145.500.000	506.865.000	46.865.000	Dinperpa
					Sub Total	**71.695.650.000**	**73.533.951.000**	**83.603.499.000**	
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	85,00 Persen	85,00 Persen	72.075.128.000	51.413.641.000	59.783.885.000	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 Persen	91,00 Persen				
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen				

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	94,50 Persen	94,50 Persen	1.036.287.000	781.457.000	778.452.000	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	96,00 Persen	96,00 Persen	629.013.000	600.676.000	600.676.000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	98,00 Persen	100,00 Persen				
			Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	93,00 Persen	93,00 Persen	968.213.000	2.189.213.000	2.189.213.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	4,60 persen	383.342.000	384.650.000	388.650.000	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen	100,00 persen	30.500.000	30.500.000	26.500.000	Dinperpa
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80 persen	84,80 persen	54.500.000	54.500.000	54.500.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	100,00 persen	60.095.000	254.523.000	254.523.000	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7,60 Persen	12,00 Persen	5.610.387.000	1.883.987.000	1.883.987.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	14,00 Persen	14,00 Persen	165.162.000	1.992.978.000	1.992.978.000	Dinsos P2KB
	3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	89,50 persen	100,00 persen	63.780.887.000	65.378.897.000	65.798.339.000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen	100,00 persen	16.012.838.000	16.173.622.000	14.720.532.000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,25 Indeks	22,50 Indeks	830.911.000	913.562.000	926.762.000	Dinarpus

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen	100,00 persen	272.429.000	272.429.000	272.429.000	Dinas Pendidikan
	5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 Persen	7,39 Persen	264.850.000	275.000.000	275.000.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 Persen	14,64 Persen	94.012.000	81.308.000	81.308.000	DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	40,74 Persen	40,74 Persen	224.753.000	277.022.000	277.022.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	100,00 persen	146.347.000	78.090.000	78.090.000	DPMPPA
	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100,00 persen	100,00 persen	1.567.098.000	1.482.098.000	1.457.098.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	100,00 persen	202.540.000	209.560.000	209.560.000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 Persen	100,00 Persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Dinparbudpora
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 Persen	93,97 Persen	27.500.000	177.500.000	177.500.000	Dinparbudpora
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,71 Persen	8,29 Persen	1.389.007.000	2.159.147.000	2.215.667.000	Dinparbudpora
					Sub Total	**165.865.799.000**	**147.104.360.000**	**154.482.671.000**	
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	11,67 persen	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68 persen	91,68 persen	1.603.761.000	2.197.825.000	2.167.825.000	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 hektar	174,47 hektar	16.614.300.000	22.641.270.000	22.677.236.000	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1.973,41 hektar	1.973,41 hektar	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	14,51 persen	57,61 persen	1.410.521.000	1.655.521.000	1.835.521.000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek	50,00 persen	50,00 persen	9.086.000	9.086.000	59.086.000	Dinperkim

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						
	7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 Persen	100,00 Persen	11.757.760.000	16.405.420.000	16.582.011.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	69,48 persen	3.689.840.000	4.270.800.000	4.542.015.000	DPU-PR
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,02 persen	45,02 persen	1.660.793.000	1.716.881.000	1.363.066.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	2.271.000	2.271.000	2.271.000	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,93 persen	2,93 persen	4.509.357.000	4.680.999.000	4.248.163.000	DLH
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100,00 persen	100,00 persen	468.032.000	818.032.000	863.732.000	Dinperkim
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	18,14 persen	1.097.910.000	1.425.190.000	1.537.749.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	15,87 persen	102.900.000	102.900.000	102.358.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 persen	100 persen	555.200.000	563.830.000	546.332.000	DPU-PR
					Sub Total	**49.888.202.000**	**72.359.112.000**	**72.135.874.000**	
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen	100,00 persen	1.646.035.000	1.751.061.000	1.794.489.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga	16,00 lembaga	17.235.294.000	11.458.242.000	11.375.314.000	Kesbangpol

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen	100,00 persen	301.772.000	361.772.000	386.772.000	Kesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen	100,00 persen	209.694.000	187.207.000	212.207.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen	100,00 persen	105.700.000	315.900.000	325.900.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	66,00 Persen	82,00 Persen	6.416.736.000	6.658.880.000	6.587.360.000	Satpol P3KP
	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 Indeks	3,10 Indeks	2.709.635.000	2.828.649.000	2.853.649.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 Persen	100,00 Persen	115.500.000	115.500.000	115.500.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	2,80 Persen	2,80 Persen	152.680.000	152.680.000	152.680.000	Dinkominfo
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen	100,00 persen	1.721.346.000	1.896.958.000	1.847.191.000	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	53,33 Persen	97,00 Persen	319.504.000	328.156.000	322.924.500	Dinarpus
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	47,50 Indeks	75,00 Indeks				
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	162.176.000	168.296.000	168.437.500	Dinarpus
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1,00 regulasi	1,00 regulasi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinarpus

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 persen	88,00 persen	354.829.000	370.543.000	339.175.000	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	93,70 persen	328.970.000	347.840.000	355.308.000	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	10,00 OPD	95.088.000	98.328.000	98.328.000	Dindukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	100,00 persen	18.120.390.000	27.677.934.000	29.654.587.000	Sekretariat DPRD
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 Persen	94,31 Persen	910.520.000	1.260.520.000	1.300.520.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	34,29 persen	7.880.369.000	8.350.789.000	9.395.789.000	Dinparbudpora
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 Persen	66,67 Persen	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	62,96 Persen	85,51 Persen	48.520.000	48.520.000	56.020.000	DPMPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,54 Persen	97,68 Persen	784.425.000	1.102.029.000	1.175.061.000	DPMPPA
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	40.500.000	40.500.000	39.713.000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	50,00 persen	283.393.000	268.393.000	266.393.000	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen	75,00 persen	63.750.000	63.750.000	60.750.000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	100,00 persen	12.750.000	12.750.000	12.000.000	DLH

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.046.631.000	1.110.385.000	1.012.225.000	Satpol P3KP
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	77.259.000	77.259.000	77.259.000	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	13.577.791.000	13.997.945.000	13.997.946.000	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara,Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	1.080.309.000	1.265.809.000	1.235.769.000	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	22.350.000	22.350.000	22.350.000	Kecamatan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100,00 Persen	100,00 Persen	5.232.036.000	5.432.210.000	5.482.210.000	Dinkominfo
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen	100,00 persen	734.855.000	738.609.000	708.230.000	Bappeda
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100,00 persen	100,00 persen				
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74,00 skor	74,00 skor				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100,00 Persen	100,00 Persen	581.954.000	585.800.000	546.544.000	Bappeda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100,00 persen	100,00 persen	586.389.000	588.885.000	588.670.000	Bappeda
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 Persen	100,00 Persen				
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 Persen	100,00 Persen	606.024.300.000	609.300.314.000	630.534.144.000	Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa	100,00 persen	100,00 persen				

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			penunjang urusan pemerintah daerah						
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen	100,00 persen	18.558.300.000	19.237.079.000	19.486.359.000	Setda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen	100,00 persen	968.171.000	1.045.761.000	1.003.449.000	Setda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,66 Persen	7,66 Persen	5.710.413.000	5.230.574.000	5.823.272.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.120.650.000	1.453.542.000	1.413.542.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 Persen	5,00 Persen	1.457.719.000	1.655.908.000	1.617.392.000	BPKAD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90,00 persen	90,00 persen	1.317.075.000	1.226.091.000	2.923.687.000	BKPSDM
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 Persen	80,00 Persen				
			Persentase PNS berkembang karier	50,00 persen	80,00 persen				
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen	100,00 persen	1.969.650.000	1.938.534.000	1.579.392.000	BKPSDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	3,00 nilai	251.061.000	251.061.000	251.061.000	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	85,00 persen	132.791.000	132.791.000	131.431.000	Inspektorat
Sub Total						**721.089.564.000**	**731.776.388.000**	**758.789.947.000**	
GRAND TOTAL						**1.008.539.215.000**	**1.024.773.811.000**	**1.069.011.991.000**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.2.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanan reses, selanjutnya ditelaah dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam aspek politis. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pekalongan untuk RKPD Tahun 2024, yaitu:

1. Bidang Pendidikan, meliputi:
   a. Peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik.
   b. Pengembangan Pendidikan hingga taraf menengah ke atas.
   c. Peningkatan sarana prasarana sekolah dampak banjir (rob).
2. Bidang Kesehatan, meliputi:
   a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
   b. Penanggulangan dan pencegahan Kawasan kumuh.
   c. Peningkatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat.
   d. Menekan jumlah bayi gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/balita.
   e. Kewaspadaan penyakit menular.
3. Bidang Ekonomi Sosial, meliputi:
   a. Pembekalan dan pelatihan berbasis IT.
   b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial.
   c. Pengembangan sektor ekonomi kreatif lokal.
   d. Menyediakan kesempatan kerja.
   e. Penanggulangan bahaya narkoba.
   f. Penegakan peraturan perundang-undangan.
   g. Tanggap dan paska bencana.
4. Bidang Infrastruktur, meliputi:
   a. Peningkatan keamanan akses jalan.
   b. Pembangunan/perbaikan drainase, normalisasi sungai.
   c. Fungsi infrastruktur lingkungan permukiman.
   d. Pelayanan pengolahan sampah dan air limbah domestik.
5. Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum, meliputi:
   a. Penertiban pengamen.
   b. Pelayanan pencegahan banjir.
   c. Penataan kawasan parkir.
   d. Penataan kawasan kuliner dan pedagang K5.
   e. Penertiban praktik judi.
6. Bidang Permukiman, meliputi:
   a. Program pembersihan permukiman.
   b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah.
   c. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi relokasi.
   d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.
7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi:
   a. Penyusunan APBD dilakukan sesuai dan tepat waktu.
   b. Peningkatan kapasitas ASN

4.3. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Perencanaan, Kelembagaan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Sanksi Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Peraturan Wali Kota tersebut akan mendorong inovasi kebijakan Pembangunan dengan merumuskan ruang lingkup Sistem Inovasi Daerah yang lebih terarah. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Kota Pekalongan telah merumuskan Road Map SIDa yan melingkupi Kondisi SIDa saat ini, tantangan dan peluang SIDa, Kondisi SIDa yang akan dicapai, Strategi dan Arah Kebijakan SIDa dan Rencana aksi penguatan SIDa.

Selanjutnya, telah dirumuskan juga kelembagaan SIDa yang mengatur pembentukan Tim Penguatan SIDa, dengan ruang lingkup tugas antara lain, mengintegrasikan program inovatif SIDa dengan RPJMD, melakukan sinkroniasi, harmonisasi dan sinergi SIDa, mempersiapkan rumusaan kebijakan penyelenggaraan SIDa, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan SIDa,melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan SIDa.

Dalam hal penyelenggaraan SIDa, Peraturan Wali Kota memperkuat munculnya inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Adanya kebijakan tersebut akan mendorong munculnya inovasi kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah dan keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat.

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan) dan pengelolaan fungsi manajemen (sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja).

Pemerintah akan terus mendorong inovasi baik yang bersifat digital dan non digital dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintahan Daerah. Inovasi yang bersifat digital akan didorong untuk penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi non digital direncanakan untuk memperkuat kebijakan Pemerintah sesuai dengan visi misi Kepala Daerah. Inovasi digital diharapkan mendukung penguatan potensi unggulan Kota Pekalongan baik Batik-Perikanan, transparansi dan akuntabilitas, tata kelola pemerintah, pelayanan publik serta perwujudan satu data untuk Kota Pekalongan. Adapun Inovasi Non Digital atau inovasi yang berupa kebijakan atau langkah strategis untuk membantu penyelesaian permasalahan atau isu strategis di Kota Pekalongan, seperti halnya

penanganan banjir dan rob, peningkatan kualitas dan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan lain-lain yang tidak dapat dilakukan secara digital. Selain itu, secara khusus, saat ini Pemerintah juga mendorong usaha kolaboratif dan sinegis untuk mengembalikan kejayaan perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan, yang sangat terdampak kondisi banjir dan rob. Dorongan untuk memunculkan inovasi pemerintah daerah ini dilakukan melalui Kebijakan Wali Kota bahwa Satu OPD minimal Satu Inovasi, Penyelenggaraan Penilaian Inovasi Perangkat Daerah yang menjaring ide inovasi serta adanya reward bagi Inovasi dan Inisiator Terbaik.

Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi. Inovasi ini dimaksud untuk mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Lebih lanjut, seluruh rangkaian inovasi ini akan dilakukan proses evaluasi penyelenggaraan SIDa secara rutin. Evaluasi Penyelenggaran SIDa dilakukan melalui penilaian kapasitas inovatif daerah. Penilaian kapasitas inovatif dilaksanakan guna mengetahui capaian implementasi program inovatif SIDa dan sebagai tolak ukur kemajuan SIDa. Pelaksanaan penilaian kapasitas inovatif daerah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, industri/UMKM, dan masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga fokus menyelenggarakan fungsi kelitbangan pada tema-tema strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan kota. Penyelenggaraan fungsi litbang ini dilakukan melalui tema yang dikompetisikan dalam Riset Unggulan Daerah dengan mengambil isu strategis pada tahun perencanaan N+1.

Inovasi Kebijakan Pembangunan juga sedang dirintis melalui kegiatan riset bersama, yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Tidak hanya melalui riset unggulan dan riset bersama, dorongan inovasi kebijakan pembangunan juga dilakukan dalam perwujudan program unggulan atau program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026.

Pada tahun 2023 riset unggulan yang telah dilakukan di Kota Pekalongan yang berjudul Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dan Konservasi Air Tanah Di Kota Pekalongan (Dr.Komalawati, SP., M.Phil, dkk) dan Social Responsibility Empowerment Para Pelaku Usaha Batik dalam Pengelolaan Limbah dan Penggunaan Air Bawah Tanah di Kota Pekalongan (Maghfiroh, S.Si., M.Sc, dkk), dari dua penelitian ini, dapat diselaraskan upaya pengelolaan air tanah dan limbah batik di Kota Pekalongan.

Dengan demikian pada tahun 2024, dilakukan riset yang bertujuan untuk menyusun strategi terpadu yang menggabungkan konservasi air tanah dan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, diharapkan dapat diciptakan model berkelanjutan yang tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan daya saing industri batik dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan secara keseluruhan.

4.4. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Sebagai bagian dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 menerapkan konsep teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Konsep tersebut merupakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yang diuraikan sebagai berikut.

4.4.1. Teknokratik

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses awal dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan teknokratik oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Hasil dari proses ini yaitu Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 secara teknokratik mempedomani arah kebijakan dan sasaran tahun 2024 pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang selaras dengan program perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 4.11 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Pendekatan Teknokratik

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
1. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,61 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,60 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 104,14 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,35	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2,50%	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Pemberdayaan Sosial	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Pemerataan peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,59 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,81%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,59	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
			Program Perlindungan Perempuan	
	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	96,24%	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	909,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	2. Indeks Kualitas Air	35,37	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	3. Indeks Kualitas Lahan	23,60	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
			Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	2. Persentase pelayanan sampah	71,12%	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
	3. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
	4. Persentase keterhubungan jalan	100%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pertumbuhan ekonomi	2,53 - 3,32 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Persentase Penyelenggaraan *Event* Budaya	93,33%	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol P3KP
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	1. Indeks SPBE	3,05	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	2. IKM Kota	83,79	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	97,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	75,07	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	6. Indeks Merit System	250,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	7. Maturitas SPIP	3,60	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.4.2. Partisipatif

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melalui tahapan dari tingkat basis sampai dengan tingkat kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.12 Penyusunan RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif

No.	Tahapan Penyusunan RKPD	Keterlibatan Stakeholder
1	Konsultasi publik rancangan awal RKPD	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.
2	Pra musrenbang (penjaringan usulan masyarakat di tingkat RT)	Warga masyarakat

No.	Tahapan Penyusunan RKPD	Keterlibatan Stakeholder
3	Musrenbang kelurahan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unsur Pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kelurahan
4	Musrenbang tingkat kecamatan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, unsur kesehatan dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kecamatan
5	Forum Perangkat Daerah	OPD dan stakeholder yang terkait dengan tema forum perangkat daerah
6	Musrenbang tingkat kota	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.4.3. Politis

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Visi dan misi Wali Kota Pekalongan pada RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD melalui penyelarasan program sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.13 Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD

Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	OPD Pengampu Urusan Pangan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Unmeet need KB	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	OPD Pengampu Urusan Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan		
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	OPD Pengampu Urusan Pendidikan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal		

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	OPD Pengampu Urusan Pertanian

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah		
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Satpol PP
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government		
Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	OPD Pengampu Urusan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	OPD Pengampu Urusan Persandian
Program Penanggulangan Bencana	persentase korban bencana alam yang ditangani	BPBD
Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	OPD Pengampu Urusan Kearsipan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Perda yang ditetapkan	Set DPRD
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Satpol P3KP
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS berkembang karier	OPD Pengampu Kepegawaian
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	OPD Pendidikan dan Pelatihan
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	OPD Pengampu Litbang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	Bag. Organisasi
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	OPD Pengampu Perencanaan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	OPD Pengampu Perencanaan
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Bag. Pemerintahan
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Bag. Perekonomian dan SDA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Pendekatan secara politis juga dilakukan melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 4.14 Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	No.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan
1	Bidang Pendidikan, meliputi: a. Peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik. b. Pengembangan Pendidikan hingga taraf menengah ke atas. c. Peningkatan sarana prasarana sekolah dampak banjir (rob).	3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
2	Bidang Kesehatan, meliputi: a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. b. Penanggulangan dan pencegahan Kawasan kumuh. c. Peningkatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat. d. Menekan jumlah bayi gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/balita. e. Kewaspadaan penyakit menular.	1	Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
3	Bidang Ekonomi Sosial, meliputi: a. Pembekalan dan pelatihan berbasis IT. b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. c. Pengembangan sektor ekonomi kreatif lokal. d. Menyediakan kesempatan kerja. e. Penanggulangan bahaya narkoba. f. Penegakan peraturan perundang-undangan. g. Tanggap dan paska bencana.	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
		9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
		10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
		11	Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
4	Bidang Infrastruktur, meliputi: a. Peningkatan keamanan akses jalan. b. Pembangunan/perbaikan drainase, normalisasi sungai.	7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	No.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan
	c. Fungsi infrastruktur lingkungan permukiman. d. Pelayanan pengolahan sampah dan air limbah domestik.		yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
5	Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum, meliputi: a. Penertiban pengamen. b. Pelayanan pencegahan banjir. c. Penataan kawasan parkir. d. Penataan kawasan kuliner dan pedagang K5. e. Penertiban praktik judi.	11	Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
6	Bidang Permukiman, meliputi: a. Program pembersihan permukiman. b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah. c. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi relokasi. d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi: a. Penyusunan APBD dilakukan sesuai dan tepat waktu. b. Peningkatan kapasitas ASN.	12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.4.4. Atas-bawah dan bawah-atas

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Bentuk penyelarasan dalam proses perencanaan sebagai berikut.

1. Sinkronisasi usulan rencana pembangunan pada tahapan forum perangkat daerah, yaitu menyelaraskan antara usulan musrenbang kelurahan/kecamatan, rencana kerja perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan berpedoman pada prioritas dan fokus pembangunan Kota Pekalongan.
2. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.
3. Penyelarasan kebijakan Pusat dengan kondisi Kota Pekalongan dalam rapat TAPD.

4.5. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Pendekatan lain sebagai satu kesatuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 yaitu berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

4.5.1. Holistik-tematik

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Konsep tematik yang diterapkan dalam kebijakan pembangunan Kota Pekalongan dapat dilihat melalui tema pembangunan setiap tahunnya sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.2 Visi, Misi dan Tema Pembangunan Kota Pekalongan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Selanjutnya, tema kebijakan pembangunan dijabarkan ke dalam prioritas dan fokus pembangunan sebagaimana diuraikan pada sub bab 4.2.3, yang secara holistik telah mencakup aspek pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.15 Konsep Holistik
Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Prioritas Kota 2024	Aspek Pembangunan
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Kesehatan
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Kesejahteraan sosial
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai	Sumber daya manusia

Prioritas Kota 2024	Aspek Pembangunan
religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perlindungan perempuan dan anak
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Pengarusutamaan gender
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Infrastruktur perumahan dan permukiman
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Lingkungan hidup
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Infrastruktur perkotaan
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Ekonomi
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Kebudayaan
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Kondusivitas wilayah
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Tata kelola pemerintahan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.5.2. Integratif

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini diterapkan melalui pencapaian sasaran kinerja pembangunan tingkat kota yang didukung oleh kinerja lintas OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Konsep Integratif
Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program, dengan fokus pada:			
a. Mendorong upaya konvergensi dan sinergitas lintas sektor yang disertai	Meningkatnya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, percepatan penurunan angka stunting serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; b. Mendorong peran berbagai pihak/stakeholder dalam meningkatkan percepatan pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*; c. Penggerakan masyarakat melalui posyandu dan pemberdayaan Germas di berbagai tatanan masyarakat; d. Peningkatan efektivitas jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat.	Indeks Keluarga Sehat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan, dengan fokus pada:			
Perluasan kesempatan pelatihan keterampilan bagi warga miskin dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
		Program Pemberdayaan Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan, dengan fokus pada:			
a. Peningkatan partisipasi pendidikan guna menurunkan angka ATS (anak tidak sekolah), disertai upaya perluasan akses, peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan secara bertahap; b. Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.	Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, dengan fokus pada:			
Peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan tenaga kerja dan penghapusan pekerja anak.	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak, dengan fokus pada:			
a. Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan guna meningkatkan kesetaraan gender; b. Peningkatan dan optimalisasi kelurahan layak anak serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak, difabel dan lansia.	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada:			
Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:			
a. Penguatan sinergitas dengan pemerintah pusat, provinsi dan peran masyarakat dalam rangka percepatan penanganan banjir/rob; b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	Menurunnya tingkat pencemaran air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
menghasilkan limbah, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup; c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	Optimalnya kualitas lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:			
a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum; b. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat; c. Lanjutan pengembangan kawasan Pekalongan Baru dan mendorong penambahan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.	Optimalnya layanan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif, dengan fokus pada:			
Pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dengan sektor industri, jasa, perdagangan dan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui: a. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata disertai dengan promosi, penguatan pelaku industri	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
pariwisata serta kemudahan akses; b. Pengembangan destinasi wisata baru dengan menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka penguatan ekonomi lokal.		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		Program Pengembangan Ekspor	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pengembangan UMKM	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, dengan fokus pada:			
Pengembangkan kesenian dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan masyarakat dalam rangka memperkaya substansi penyelenggaraan event budaya.	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Program Pembinaan Sejarah	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			
	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN, dengan fokus pada:			
a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan domain SPBE; b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik; c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; d. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta implementasi roadmap merit system; e. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
		Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.5.3. Spasial

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Konsep ini diterapkan dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan. Penerapan konsep spasial ini ditunjukkan dengan rencana pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

a. Penataan alun-alun dan lapangan Sorogenen sebagai ruang terbuka publik.
b. Pembangunan jalan akses menuju kawasan wisata Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana.
c. Penataan eks pasar Grogolan dalam rangka penataan kawasan perdagangan barang dan jasa
d. Lanjutan Penataan Trotoar Jalan HOS Cokroaminoto dalam rangka mendukung pengembangan perdagangan dan jasa di pasar kuripan
e. Lanjutan Penataan Pasar Sugihwaras dalam rangka mendukung pengembangan perdagangan dan jasa
f. Patiunus sebagai ruang terbuka publik dan mendukung kawasan cagar budaya Jetayu
g. Pembangunan bangunan pengendali banjir dan rob pada area topografi rendah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Dengan Pagu Anggaran

Indikasi rencana program tahun 2024 didasarkan pada prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024, RPJMD Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan. Konsistensi antara prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan pagu anggaran disajikan pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2024

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	85,00 Persen	85,00 Persen	72.075.128.000	51.413.641.000	59.783.885.000	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 Persen	91,00 Persen				
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	94,50 Persen	94,50 Persen	1.036.287.000	781.457.000	778.452.000	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100,00 Persen	100,00 Persen				
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	96,00 Persen	96,00 Persen	629.013.000	600.676.000	600.676.000	Dinas Kesehatan
		Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	98,00 Persen	100,00 Persen				
		Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	93,00 Persen	93,00 Persen	968.213.000	2.189.213.000	2.189.213.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	4,60 persen	383.342.000	384.650.000	388.650.000	Dinperpa
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen	100,00 persen	30.500.000	30.500.000	26.500.000	Dinperpa
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80 persen	84,80 persen	54.500.000	54.500.000	54.500.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	100,00 persen	60.095.000	254.523.000	254.523.000	Dinsos P2KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7,60 Persen	12,00 Persen	5.610.387.000	1.883.987.000	1.883.987.000	Dinsos P2KB
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	14,00 Persen	14,00 Persen	165.162.000	1.992.978.000	1.992.978.000	Dinsos P2KB

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sub Total	**81.012.627.000**	**59.586.125.000**	**67.953.364.000**	
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 Persen	100,00 Persen	868.351.000	720.967.000	718.467.000	Dinsos P2KB
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00 Persen	100,00 Persen	343.926.000	265.306.000	265.306.000	Dinsos P2KB
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67,00 Persen	67,00 Persen	473.774.000	490.778.000	440.708.000	Dinsos P2KB
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.670.466.000	2.060.482.000	2.027.812.000	Dinsos P2KB
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 Persen	55,12 Persen	1.502.324.000	1.526.198.000	1.427.838.000	Dinsos P2KB
				Sub Total	**4.858.841.000**	**5.063.731.000**	**4.880.131.000**	
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	89,50 persen	100,00 persen	63.780.887.000	65.378.897.000	65.798.339.000	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen	100,00 persen	16.012.838.000	16.173.622.000	14.720.532.000	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,25 Indeks	22,50 Indeks	830.911.000	913.562.000	926.762.000	Dinarpus
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen	100,00 persen	272.429.000	272.429.000	272.429.000	Dinas Pendidikan
				Sub Total	**80.897.065.000**	**82.738.510.000**	**81.718.062.000**	
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46 persen	1,10 persen	3.312.225.000	3.507.090.000	3.684.570.000	Dinperinaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	25,93 persen	693.181.000	795.797.000	709.293.000	Dinperinaker
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	47,51 persen	50,00 persen	450.369.000	450.369.000	441.202.000	Dinperinaker

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sub Total	**4.455.775.000**	**4.753.256.000**	**4.835.065.000**	
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 Persen	7,39 Persen	264.850.000	275.000.000	275.000.000	DPMPPA
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 Persen	14,64 Persen	94.012.000	81.308.000	81.308.000	DPMPPA
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	40,74 Persen	40,74 Persen	224.753.000	277.022.000	277.022.000	DPMPPA
	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	100,00 persen	146.347.000	78.090.000	78.090.000	DPMPPA
				Sub Total	**729.962.000**	**711.420.000**	**711.420.000**	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	11,67 persen	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000	DPU-PR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68 persen	91,68 persen	1.603.761.000	2.197.825.000	2.167.825.000	Dinperkim
	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 hektar	174,47 hektar	16.614.300.000	22.641.270.000	22.677.236.000	Dinperkim
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1.973,41 hektar	1.973,41 hektar	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000	Dinperkim
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	14,51 persen	57,61 persen	1.410.521.000	1.655.521.000	1.835.521.000	Dinperkim
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50,00 persen	50,00 persen	9.086.000	9.086.000	59.086.000	Dinperkim
				Sub Total	**26.044.139.000**	**42.372.789.000**	**42.348.177.000**	
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 Persen	100,00 Persen	11.757.760.000	16.405.420.000	16.582.011.000	DPU-PR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	69,48 persen	3.689.840.000	4.270.800.000	4.542.015.000	DPU-PR
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,02 persen	45,02 persen	1.660.793.000	1.716.881.000	1.363.066.000	DLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	2.271.000	2.271.000	2.271.000	DLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,93 persen	2,93 persen	4.509.357.000	4.680.999.000	4.248.163.000	DLH

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100,00 persen	100,00 persen	468.032.000	818.032.000	863.732.000	Dinperkim
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	18,14 persen	1.097.910.000	1.425.190.000	1.537.749.000	DPU-PR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	15,87 persen	102.900.000	102.900.000	102.358.000	DPU-PR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen	100,00 persen	555.200.000	563.830.000	546.332.000	DPU-PR
				Sub Total	**23.844.063.000**	**29.986.323.000**	**29.787.697.000**	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,29 persen	0,29 persen	10.557.581.000	10.675.543.000	10.674.643.000	DLH
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	60,00 persen	860.000.000	925.000.000	952.450.000	DPU-PR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 Persen	89,66 Persen	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000	DPU-PR
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 Ratio	0,44 Ratio	5.698.695.000	6.092.743.000	9.191.348.000	Dinas Perhubungan
		Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	95,00 persen	95,00 persen				
		Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,75 persen	0,75 persen				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	84,39 persen	21.595.513.000	18.077.303.000	27.850.932.000	DPU-PR
				Sub Total	**39.139.789.000**	**37.432.989.000**	**50.250.443.000**	
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	77.882.000	77.882.000	77.882.000	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	46.930.000	46.930.000	39.630.000	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.500,00 dokumen	2.750,00 dokumen	846.700.000	890.936.000	781.256.000	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	6,82 Miliar Rupiah	6,96 Miliar Rupiah	412.043.000	657.656.000	657.656.000	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	101.588.000	105.044.000	102.344.000	DPMPTSP
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam	20,75 persen	75,34 persen	455.853.000	359.669.000	338.389.000	Dinperinaker

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)						
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	25,00 persen	10.221.000	10.221.000	10.221.000	Dinperinaker
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	94.380.000	94.380.000	94.380.000	Dinperinaker
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	93,75 persen	8.121.372.000	9.769.831.000	7.607.730.000	Dindagkop UKM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	92,00 persen	100,00 persen	119.405.000	121.853.000	138.663.000	Dindagkop UKM
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	7,79 persen	135.017.000	136.241.000	125.831.000	Dindagkop UKM
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	79,99 persen	308.296.000	315.984.000	315.984.000	Dindagkop UKM
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	5,34 persen	676.705.000	1.012.233.000	1.013.973.000	Dindagkop UKM
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,17 persen	76,17 persen	16.800.000	16.800.000	8.660.000	Dindagkop UKM
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	31,49 persen	108.219.000	110.667.000	110.667.000	Dindagkop UKM
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen	58,77 persen	631.070.000	606.707.000	606.707.000	Dindagkop UKM
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen	12,16 persen	687.998.000	952.998.000	952.998.000	Dindagkop UKM
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen	2.696.675.000	2.915.533.000	2.471.915.000	DKP
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen				
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,00 persen	3,00 persen	294.382.000	246.498.000	257.536.000	DKP
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha	2,00 pelaku usaha	458.298.000	503.282.000	489.278.000	DKP
		Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen	12,20 persen				

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 Persen	11,50 Persen	3.909.090.000	3.892.476.000	3.935.956.000	Dinparbudpora
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	36,98 Persen	36,98 Persen	675.000.000	682.020.000	682.020.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	41,67 persen	278.262.000	453.262.000	453.262.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	60,00 persen	822.000.000	822.000.000	822.000.000	Dinparbudpora
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,73 Miliar Rupiah	55,73 Miliar Rupiah	284.730.000	323.405.000	845.943.000	Dinperpa
		Nilai produksi peternakan pertahun	195,75 Miliar Rupiah	195,75 Miliar Rupiah				
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen	100,00 persen	313.518.000	262.018.000	262.018.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	5,00 persen	434.053.000	311.326.000	326.376.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen	100,00 persen	48.290.000	48.290.000	30.752.000	Dinperpa
	Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	75,00 persen	75,00 persen	30.968.000	30.968.000	30.968.000	Dinperpa
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	5,00 persen	145.500.000	506.865.000	46.865.000	Dinperpa
				Sub Total	**23.241.245.000**	**26.283.975.000**	**23.637.860.000**	
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100,00 persen	100,00 persen	1.567.098.000	1.482.098.000	1.457.098.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	100,00 persen	202.540.000	209.560.000	209.560.000	Dinparbudpora
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 Persen	100,00 Persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Dinparbudpora
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 Persen	93,97 Persen	27.500.000	177.500.000	177.500.000	Dinparbudpora
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,71 Persen	8,29 Persen	1.389.007.000	2.159.147.000	2.215.667.000	Dinparbudpora
				Sub Total	**3.226.145.000**	**4.068.305.000**	**4.099.825.000**	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen	100,00 persen	1.646.035.000	1.751.061.000	1.794.489.000	Kesbangpol

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga	16,00 lembaga	17.235.294.000	11.458.242.000	11.375.314.000	Kesbangpol
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen	100,00 persen	301.772.000	361.772.000	386.772.000	Kesbangpol
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen	100,00 persen	209.694.000	187.207.000	212.207.000	Kesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen	100,00 persen	105.700.000	315.900.000	325.900.000	Kesbangpol
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	66,00 Persen	82,00 Persen	6.416.736.000	6.658.880.000	6.587.360.000	Satpol P3KP
				Sub Total	**25.915.231.000**	**20.733.062.000**	**20.682.042.000**	
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 Indeks	3,10 Indeks	2.709.635.000	2.828.649.000	2.853.649.000	Dinkominfo
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 Persen	100,00 Persen	115.500.000	115.500.000	115.500.000	Dinkominfo
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	2,80 Persen	2,80 Persen	152.680.000	152.680.000	152.680.000	Dinkominfo
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen	100,00 persen	1.721.346.000	1.896.958.000	1.847.191.000	BPBD
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	53,33 Persen	97,00 Persen	319.504.000	328.156.000	322.924.500	Dinarpus
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	162.176.000	168.296.000	168.437.500	Dinarpus
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1,00 regulasi	1,00 regulasi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinarpus
	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 persen	88,00 persen	354.829.000	370.543.000	339.175.000	Dindukcapil
	Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	93,70 persen	328.970.000	347.840.000	355.308.000	Dindukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	10,00 OPD	95.088.000	98.328.000	98.328.000	Dindukcapil

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	100,00 persen	18.120.390.000	27.677.934.000	29.654.587.000	Sekretariat DPRD
		Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100,00 persen	100,00 persen				
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 Persen	94,31 Persen	910.520.000	1.260.520.000	1.300.520.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	34,29 persen	7.880.369.000	8.350.789.000	9.395.789.000	Dinparbudpora
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 Persen	66,67 Persen	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000	DPMPPA
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	62,96 Persen	85,51 Persen	48.520.000	48.520.000	56.020.000	DPMPPA
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,54 Persen	97,68 Persen	784.425.000	1.102.029.000	1.175.061.000	DPMPPA
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	40.500.000	40.500.000	39.713.000	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	50,00 persen	283.393.000	268.393.000	266.393.000	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen	75,00 persen	63.750.000	63.750.000	60.750.000	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	100,00 persen	12.750.000	12.750.000	12.000.000	DLH
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.046.631.000	1.110.385.000	1.012.225.000	Satpol P3KP
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	77.259.000	77.259.000	77.259.000	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	13.577.791.000	13.997.945.000	13.997.946.000	Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara,Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	1.080.309.000	1.265.809.000	1.235.769.000	Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	22.350.000	22.350.000	22.350.000	Kecamatan
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100,00 Persen	100,00 Persen	5.232.036.000	5.432.210.000	5.482.210.000	Dinkominfo

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen	100,00 persen	734.855.000	738.609.000	708.230.000	Bappeda
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100,00 persen	100,00 persen				
		Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74,00 skor	74,00 skor				
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100,00 Persen	100,00 Persen	581.954.000	585.800.000	546.544.000	Bappeda
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100,00 persen	100,00 persen	586.389.000	588.885.000	588.670.000	Bappeda
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100,00 persen	100,00 persen				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 Persen	100,00 Persen	606.024.300.000	609.300.314.000	630.534.144.000	Semua OPD
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen	100,00 persen				
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen	100,00 persen				
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen	100,00 persen	18.558.300.000	19.237.079.000	19.486.359.000	Setda
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen	100,00 persen	968.171.000	1.045.761.000	1.003.449.000	Setda
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,66 Persen	7,66 Persen	5.710.413.000	5.230.574.000	5.823.272.000	BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.120.650.000	1.453.542.000	1.413.542.000	BPKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 Persen	5,00 Persen	1.457.719.000	1.655.908.000	1.617.392.000	BPKAD
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90,00 persen	90,00 persen	1.317.075.000	1.226.091.000	2.923.687.000	BKPSDM
		Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 Persen	80,00 Persen				
		Persentase PNS berkembang karier	50,00 persen	80,00 persen				

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen	100,00 persen	1.969.650.000	1.938.534.000	1.579.392.000	BKPSDM
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	3,00 nilai	251.061.000	251.061.000	251.061.000	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	85,00 persen	132.791.000	132.791.000	131.431.000	Inspektorat
Sub Total					**695.174.333.000**	**711.043.326.000**	**738.107.905.000**	
TOTAL					**1.008.539.215.000**	**1.024.773.811.000**	**1.069.011.991.000**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

5.2. Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

5.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase capaian SPM pendidikan sebesar 100,00 persen.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100,00 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100,00 persen.

5.2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 91,00 persen, Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) sebesar 100,00 persen, dan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar sebesar 85,00 persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 100,00 persen, Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 91,00 persen.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 94,50 persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 100,00 persen.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah Pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar sebesar 100,00 persen, Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran sebesar 100,00 persen, dan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 96,00 persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Rumah Tangga Sehat sebesar 93,00 persen.

5.2.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam rangka pengendalian banjir dan rob, serta pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 100,00 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah penguatan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 89,66 persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah Penyediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota, dan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional sebesar 60,00 persen.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) sebesar 17,23 persen.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 69,48 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota sebesar 18,14 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) sebesar 84,39 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota, serta penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 15,87 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota dan pembangunan aplikasi sistem informasi penataan ruang. Indikator yang akan dicapai yaitu yaitu Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota sebesar 100,00 persen.

5.2.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagai warga, pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 100,00 persen.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas rtlh dan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman kumuh sebesar 174,47 hektar.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 1.973,41 hektar.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah Penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 57,61 persen.

5.2.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK *Outcome*) sebesar 82,00 persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100,00 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK *Outcome*) sebesar 100,00 persen.

5.2.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 67,00 persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK *Outcome*) sebesar 100,00 persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah Peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial sebesar 55,12 persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100,00 persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100,00 persen.

5.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.2.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan penganggur dan perawatan alat-alat pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 1,10 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 25,93 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 50,00 persen.

5.2.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 7,39 persen.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 15,01 persen.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) sebesar 40,74 Persen.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100,00 persen.

5.2.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,60 persen.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100,00 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 84,80 persen.

5.2.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100,00 persen.

2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus program adalah koordinasi dan tindaklanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* sebesar 50,00 persen.

5.2.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah limbah yang diolah sebesar 45,02 persen.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,929 persen.

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 13,33 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus program adalah Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 16,67 persen.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup sebesar 50,00 persen.

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 75,00 persen.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100,00 persen.

8. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengelolaan sampah sebesar 0,29 persen.

5.2.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 88,00 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 93,70 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebanyak 10 OPD.

5.2.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 66,67 persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang) sebesar 85,51 persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96,54 persen.

5.2.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100,00 persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai yaitu Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 12,00 persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai yaitu *Unmeet Need* KB sebesar 14,00 persen.

5.2.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan fasilitas LLAJ, pelaksanaan kegiatan managemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin), pelaksanaan pelayanan uji berkala, pengelolaan terminal penumpang tipe C, dan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 95,00 persen, Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,44, Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 0,75 persen.

5.2.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100,00 persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerinatah, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indeks sebesar 3,10.

5.2.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 31,49 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 58,77 persen.

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan UMKM yang naik kelas dengan cara kemudahan izin, fasilitasi penguatan modal, pengembangan rantai pasokan usaha mikro serta skema jaringan pemasaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 12,16 persen.

5.2.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1,00 dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100,00 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 2.750 dokumen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai Invetasi Baru pertahun sebesar 7,09 Milyar Rupiah.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100,00 persen.

5.2.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina sebesar 94,31 persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor sebesar 34,29 persen.

5.2.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100,00 persen.

5.2.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (*penetration testing*) sebesar 2,80 persen.

5.2.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase *event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100,00 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100,00 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya sebesar 100,00 persen.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK *Outcome*) sebesar 93,97 persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfataan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengunjung museum batik sebesar 8,29 persen.

5.2.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 28,00.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Fokus program adalah Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara. Indikator yang akan dicapai yaitu Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan sebesar 1,00 regulasi.

5.2.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 97,00 persen dan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 75,00.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100,00 persen.

5.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.2.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pemberdayaan Nelayan Kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 1,00 persen dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar 1,00 persen.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 3,00 persen.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan sebesar 12,20 persen dan Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2,00 pelaku usaha.

5.2.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah pengelolaan destinasi, serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 11,50 persen.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 36,98 persen.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 41,67 persen.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 60,00 persen.

5.2.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55.727.390.000 dan Nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 195.747.000.000.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100,00 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5,00 persen.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100,00 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 75,00 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5,00 persen.

5.2.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan

ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 76,17 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 93,75 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya sebesar 92,00 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan volume ekspor sebesar 7,79 persen.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 79,99 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) sebesar 5,34 persen.

5.2.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 75,34 persen.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 25,00 persen.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100,00 persen.

5.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.2.4.1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengeloaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai yaitu Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100,00 persen, Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100,00 persen, dan Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100,00 persen.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100,00 Persen, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 6,00 persen, dan Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100,00 persen.

5.2.4.2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitasi anggota legislative dan fasilitasi penjaringan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda yang ditetapkan sebesar 100,00 persen dan Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100,00 persen.

5.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.2.5.1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100,00 persen, Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100,00 persen, dan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100,00 persen.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemsosbud Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud sebesar 100,00 persen, Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian sebesar 100,00 persen, dan Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah sebesar 100,00 persen.

5.2.5.2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan skpd, blud dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 5,06 persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengeloaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks pengelolaan aset baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100,00 persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 5,00 persen.

5.2.5.3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan *Assesment Center*, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang karier sebesar 80,00 persen, Tingkat Pelaporan Kinerja ASN sebesar 100 persen, Persentase Keterisian Jabatan sebesar 90,00 persen, dan Persentase Keterpenuhan Formasi ASN sebesar 80,00 persen.

5.2.5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100,00 persen.

5.2.5.5. Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbangan, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan

bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD sebesar 100,00 persen, Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan sebesar 100,00 persen, dan Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) sebesar 74,00 persen.

5.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.2.6.1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85,00 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu Level Kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 3,00.

5.2.7. Unsur Kewilayahan

5.2.7.1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Utara sebesar 100,00 persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Selatan sebesar 100,00 persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Barat sebesar 100,00 persen, dan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Timur sebesar 100,00 persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan sebesar 100,00 persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat sebesar 100,00 persen, dan Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur sebesar 100,00 persen, serta Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100,00 persen.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara sebesar 100,00 persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan sebesar 100,00 persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat sebesar 100,00 persen, dan Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur sebesar 100,00 persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan). Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Utara sebesar 100,00 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Selatan sebesar 100,00 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Barat sebesar 100,00 persen, dan Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Timur sebesar 100,00 persen.

5.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

5.2.8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100,00 persen.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16,00 lembaga.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100,00 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar 100,00 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100,00 persen.

5.2.9. Non Urusan

5.2.9.1. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD.

indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100,00 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100,00 persen, persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100,00 persen, persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100,00 persen, persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100,00 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100,00 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan sekretariat daerah sebesar 100,00 persen dan persentase pelayanan keprotokoleran sebesar 100,00 persen.

Tabel 5.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DINAS PENDIDIKAN					**243.815.044.000**	**242.875.677.000**	**242.671.101.000**								**265.126.986.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**243.815.044.000**	**242.875.677.000**	**242.671.101.000**								**265.126.986.000**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					**243.815.044.000**	**242.875.677.000**	**242.671.101.000**								**265.126.986.000**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** **Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja** **Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100,00 persen** **100,00 persen** **100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**163.748.890.000**	**161.050.729.000**	**161.879.801.000**								**168.386.468.000**	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	93.500.000	94.784.000	94.784.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		147.579.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	4.250.000	4.250.000	4.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.579.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		12 Laporan	16 Laporan	85.750.000	87.034.000	87.034.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			142.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	162.136.501.000	159.415.204.000	160.227.276.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		166.855.026.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		1380 Orang /bulan	1376 Orang /bulan	161.598.801.000	158.877.504.000	159.689.576.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			166.322.276.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	533.800.000	533.800.000	533.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			529.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	3.900.000	3.900.000	3.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.750.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*		100 persen	100 persen	102.735.000	105.303.000	105.303.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		85.099.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan*		93 Laporan	186 Laporan	102.735.000	105.303.000	105.303.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			85.099.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Barang Milik Daerah pada SKPD	*Barang Milik Daerah pada SKPD*							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		8.510.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.510.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	527.184.000	528.492.000	570.992.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		551.263.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		4 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		22 Paket	4 Paket	123.322.000	123.322.000	123.322.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			110.263.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	11.117.000	11.117.000	13.117.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	82.000.000	82.000.000	89.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			72.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			13.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		588 Dokumen	2 Dokumen	2.550.000	2.550.000	2.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		145 Laporan	176 Laporan	160.000.000	160.000.000	190.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*		12 Dokumen	4 Dokumen	125.695.000	127.003.000	127.003.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			182.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah*		100 persen	100 persen	686.897.000	704.873.000	674.873.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		550.233.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	320.997.000	320.997.000	290.997.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			270.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	358.900.000	376.876.000	376.876.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			273.233.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah*		100 persen	100 persen	197.073.000	197.073.000	201.573.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		188.758.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		penunjang urusan pemerintahan daerah															
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		40 Unit	28 Unit	72.073.000	72.073.000	72.073.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.758.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		4 Unit	4 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			90.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		4 Unit	109 Unit	50.000.000	50.000.000	54.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase capaian SPM pendidikan**	**100,00 persen**	**89,50 persen**	**100,00 persen**	**63.780.887.000**	**65.378.897.000**	**65.798.339.000**								**81.210.417.000**	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)*		99.00 persen	99.00 persen	28.053.034.000	28.747.931.000	29.209.371.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		33.663.919.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*		1 Ruang	1 Ruang	250.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			750.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*		1 Ruang	0 Ruang	150.000.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			470.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*		3 Ruang	1 Ruang	750.000.000	483.821.000	483.821.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*		8 Unit	0 Unit	1.619.494.000	25.908.000	38.777.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			1.373.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		2 Ruang	3 Ruang	142.566.000	248.740.000	255.323.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			1.660.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		-	1 Ruang	0	87.500.000	87.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		1 Ruang	1 Ruang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia*		71 Paket	71 Paket	88.750.000	88.750.000	88.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			177.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*		71 Paket	42 Paket	143.650.000	143.650.000	143.650.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			355.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa		berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*		5 Unit	4 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			106.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*		3 Paket	9 Paket	375.000.000	760.000.000	760.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			2.156.305.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*		11680 Peserta Didik	10882 Peserta Didik	375.000.000	375.000.000	375.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			580.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*		1091 Orang	1091 Orang	2.324.940.000	2.330.076.000	2.768.076.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			2.684.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*		103 Satuan Pendidikan	103 Satuan Pendidikan	206.250.000	208.818.000	183.818.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			303.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*		103 Satuan Pendidikan	103 Satuan Pendidikan	18.212.100.000	18.064.400.000	18.064.401.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOS REGULER	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			12.922.744.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*		309 Orang	309 Orang	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			58.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun*		-	2 Ruang	0	512.190.000	541.177.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*		309 Orang	309 Orang	67.230.000	67.230.000	67.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			142.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*		2 Ruang	2 Ruang	350.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah*		6 Unit	7 Unit	383.740.000	445.000.000	395.000.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			555.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Direhabilitasi Sedang/Berat*							Kecamatan, Semua Kel/Desa		berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*		103 Satuan Pendidikan	103 Satuan Pendidikan	131.814.000	133.098.000	133.098.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			306.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		91 Ruang	41 Ruang	2.320.000.000	4.011.250.000	4.061.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			5.563.570.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)*		95.00 persen	95.00 persen	20.729.737.000	23.258.164.000	23.233.166.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai	Dinas Pendidikan		23.913.833.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*		-	1 Ruang	0	101.000.000	101.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*		3 Unit	3 Unit	1.581.950.000	81.950.000	81.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			1.565.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		7 Ruang	19 Ruang	1.449.472.000	3.424.480.000	3.424.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			5.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		1 Ruang	2 Ruang	150.000.000	461.928.000	461.928.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		2 Ruang	5 Ruang	470.200.000	1.059.314.000	1.059.314.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		1 Unit	2 Unit	200.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		8 Unit	6 Unit	1.742.075.000	829.262.000	829.262.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia*		17 Paket	17 Paket	34.400.000	34.400.000	34.400.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			170.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa		berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*		34 Paket	34 Paket	212.500.000	212.500.000	212.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			425.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*		3 Unit	3 Unit	132.000.000	132.000.000	132.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			170.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*		1325 Paket	1325 Paket	210.000.000	210.000.000	182.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			625.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*		1 Paket	3 Paket	125.000.000	220.450.000	220.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			1.346.586.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*		1035 Peserta Didik	1035 Peserta Didik	371.310.000	371.310.000	373.960.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*		105 Orang	105 Orang	292.186.000	293.470.000	293.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			332.200.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*		29 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	309.656.000	309.656.000	309.656.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			496.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*		29 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	13.271.900.000	13.215.800.000	13.215.802.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOS REGULER	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			10.127.372.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*		28 Orang	90 Orang	20.920.000	20.920.000	20.920.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			23.175.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*		87 Orang	60 Orang	38.830.000	38.830.000	38.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			51.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*		11559 Satuan	30 Satuan	117.338.000	117.338.000	117.338.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			172.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pendidikan	Pendidikan				Kecamatan, Semua Kel/Desa		berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		-	3 Ruang	0	877.657.000	877.657.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)*		99.00 persen	99.00 persen	10.010.951.000	9.122.233.000	9.095.233.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		17.237.190.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*		3 Unit	3 Unit	574.088.000	190.301.000	190.301.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			555.123.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		10 Unit	13 Unit	1.590.000.000	1.128.416.000	1.126.416.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		1 Unit	2 Unit	95.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			340.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia*		4 Paket	4 Paket	35.000.000	20.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	*Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia*		4 Paket	4 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*		8 Paket	1 Paket	80.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia*		7 Paket	13 Paket	230.000.000	344.000.000	329.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*		10159 Peserta Didik	10159 Peserta Didik	231.119.000	231.119.000	231.119.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			5.979.567.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan*		2 Orang	2 Orang	52.872.000	55.440.000	55.440.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			48.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kependidikan bagi Satuan PAUD	*yang Tersedia pada PAUD*							Kecamatan, Semua Kel/Desa	P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*		268 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan	450.217.000	450.217.000	440.217.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			780.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*		268 Satuan Pendidikan	266 Satuan Pendidikan	6.183.600.000	6.021.600.000	6.021.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			7.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*		804 Orang	798 Orang	82.055.000	82.055.000	82.055.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			129.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*		1 Ruang	2 Ruang	250.000.000	424.085.000	424.085.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*		800 Paket	750 Paket	127.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			135.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*		4 Unit	4 Unit	20.000.000	30.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam*		65.00 persen	65.00 persen	4.987.165.000	4.250.569.000	4.260.569.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap	Dinas Pendidikan		6.395.475.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)											meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun*		3 Unit	4 Unit	1.350.000.000	967.000.000	967.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia*		400 Paket	1 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*		13 Orang	13 Orang	318.556.000	323.692.000	328.692.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			248.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan*		15 Satuan	14 Satuan	104.194.000	106.762.000	101.762.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			400.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*		Pendidikan	Pendidikan				Kecamatan, Semua Kel/Desa		berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*		15 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	1.879.200.000	2.467.900.000	2.467.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			2.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*		45 Orang	26 Orang	20.203.000	20.203.000	20.203.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			20.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*		400 Paket	300 Paket	100.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia*		1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*		1554 Peserta Didik	1554 Peserta Didik	185.012.000	185.012.000	185.012.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			1.961.575.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*		1 Ruang	1 Ruang	380.000.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*		1 Paket	60 Paket	100.000.000	50.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			205.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*		3 Unit	2 Unit	150.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		3 Unit	3 Unit	340.000.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**272.429.000**	**272.429.000**	**272.429.000**								**295.105.000**	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar*		100 persen	100 persen	191.129.000	191.129.000	191.129.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga	Dinas Pendidikan		142.822.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*		1 Dokumen	1 Dokumen	8.350.000	8.350.000	8.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia*		1000 Buku	1785 Buku	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya*		10 Orang	10 Orang	21.246.000	21.246.000	21.246.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			42.822.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*		1 Dokumen	1 Dokumen	11.533.000	11.533.000	11.533.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas			25.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF*		100 persen	100 persen	81.300.000	81.300.000	81.300.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		152.283.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun*		1 Dokumen	1 Dokumen	10.600.000	10.600.000	10.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia*		1000 Buku	500 Buku	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			122.283.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun*		1 Dokumen	1 Dokumen	10.700.000	10.700.000	10.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**16.012.838.000**	**16.173.622.000**	**14.720.532.000**								**15.234.996.000**	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF*		86.75 persen	86.75 persen	16.012.838.000	16.173.622.000	14.720.532.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		15.234.996.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*		20 Dokumen	25 Dokumen	893.293.000	1.052.793.000	1.043.393.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			941.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga*		24 Laporan	15 Laporan	15.119.545.000	15.120.829.000	13.677.139.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan			14.293.996.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*							Semua Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN		dan adaptif secara inklusif dan merata	nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
	DINAS KESEHATAN					**108.183.227.000**	**92.648.436.000**	**111.225.673.000**								**107.139.805.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**108.183.227.000**	**92.648.436.000**	**111.225.673.000**								**107.139.805.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**108.183.227.000**	**92.648.436.000**	**111.225.673.000**								**107.139.805.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**66.980.920.000**	**49.753.819.000**	**64.963.817.000**								**59.369.804.000**	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	21.985.000	21.985.000	21.985.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		32.850.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	3.485.000	3.485.000	3.485.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.450.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	64.264.562.000	47.045.580.000	62.319.490.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		57.173.180.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		492 Orang/ bulan	484 Orang/ bulan	64.177.937.000	46.958.955.000	62.232.865.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			57.091.130.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	83.395.000	83.395.000	83.395.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			80.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	3.230.000	3.230.000	3.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		9.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	401.626.000	401.626.000	437.626.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		325.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		3 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	132.067.000	132.067.000	132.067.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	96.559.000	96.559.000	96.559.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	20.000.000	20.000.000	26.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		12 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		12 Laporan	280 Laporan	138.000.000	138.000.000	168.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	1.111.811.000	1.161.987.000	1.161.987.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		1.242.317.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	600.000	600.000	600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	625.383.000	625.383.000	625.383.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			732.233.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	485.828.000	536.004.000	536.004.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			509.484.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	1.175.936.000	1.117.641.000	1.017.729.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		586.957.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		35 Unit	41 Unit	360.936.000	360.936.000	252.024.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			414.607.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	3 Unit	750.000.000	691.705.000	700.705.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			93.075.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang*		1 Unit	91 Unit	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			79.275.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kantor atau Bangunan Lainnya	*Dipelihara/Direhabilitasi*							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**91,00 persen**	**91,00 persen**	**91,00 persen**	**38.632.360.000**	**39.388.317.000**	**42.758.561.000**								**45.270.142.000**	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)*		100 persen	100 persen	8.632.645.000	11.848.039.000	11.685.201.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		9.306.796.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*		1 Unit	6 Unit	100.000.000	3.367.515.000	3.367.515.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			200.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*		4 Unit	3 Unit	451.444.000	451.444.000	536.444.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			3.356.439.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*		2 Unit	1 Unit	225.000.000	283.295.000	283.295.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*		51 Unit	6 Unit	1.200.000.000	1.057.890.000	802.840.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN INTERVENSI STUNTING DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			2.512.040.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*		190 Unit	94 Unit	222.496.000	203.304.000	303.201.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			475.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*		3 Paket	3 Paket	6.364.905.000	6.419.591.000	6.326.906.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			2.708.317.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,*		12 Paket	12 Paket	68.800.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran			55.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Makanan ke Fasilitas Kesehatan*											prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	29.907.540.000	27.448.103.000	30.981.185.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		35.751.054.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		6600 Orang	6006 Orang	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			127.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		5972 Orang	5462 Orang	46.070.000	196.795.000	196.795.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			26.070.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		31662 Orang	18314 Orang	156.413.000	156.413.000	156.413.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			202.487.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan*		28386 Orang	45000 Orang	99.142.000	99.142.000	99.142.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju			140.238.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							Semua Kel/Desa	ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	berkualitas dan berdaya saing	dan adaptif secara inklusif dan merata	konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		207789 Orang	210465 Orang	163.173.000	163.173.000	163.173.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			44.950.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		36516 Orang	36783 Orang	27.053.000	27.053.000	27.053.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			38.267.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		76872 Orang	76872 Orang	6.576.000	6.576.000	6.576.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			8.830.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		6446 Orang	14148 Orang	6.291.000	6.291.000	6.291.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			8.550.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan*		785 Orang	1013 Orang	11.520.000	11.520.000	11.520.000	Kota Pekalongan	DAU YANG DITENTUKAN	3. Meningkatkan sumber daya	02. Peningkatan kualitas sumber daya	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor,			15.380.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*							, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	manusia yang berkualitas dan berdaya saing	manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*		5391 Orang	6836 Orang	62.734.000	62.734.000	62.734.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			41.305.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*		12563 Orang	16169 Orang	73.286.000	73.286.000	73.286.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			33.105.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*		4 Dokumen	2 Dokumen	1.970.563.000	204.488.000	2.178.944.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			598.739.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*		4 Dokumen	2 Dokumen	49.125.000	49.125.000	49.125.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program			81.150.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*		2 Dokumen	2 Dokumen	171.150.000	171.150.000	171.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			225.564.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*		1 Dokumen	1 Dokumen	1.416.948.000	1.089.313.000	1.085.106.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			1.347.035.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*		3 Dokumen	3 Dokumen	357.789.000	357.789.000	357.789.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			1.084.823.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*		1 Dokumen	1 Dokumen	23.516.500.000	22.887.216.000	24.400.049.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			29.882.107.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*		1 Dokumen	1 Dokumen	47.237.000	47.237.000	47.237.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			85.120.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.568.982.000	1.681.814.000	1.731.814.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			1.681.814.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*		2 Dokumen	2 Dokumen	31.988.000	31.988.000	31.988.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			78.520.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi*		100 persen	100 persen	22.500.000	22.500.000	22.500.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		76.280.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*		1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000	22.500.000	22.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang			76.280.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu*		100 persen	100 persen	69.675.000	69.675.000	69.675.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		136.012.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*		52 Unit	52 Unit	69.675.000	69.675.000	69.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			136.012.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek**	**60,00persen 95,5persen**	**94,50 50,00 persen persen**	**50,00 94,50 persen persen**	**972.721.000**	**716.411.000**	**713.406.000**								**104.457.000**	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu*		100 persen	100 persen	972.721.000	716.411.000	713.406.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		104.457.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*		2 Dokumen	2 Dokumen	972.721.000	716.411.000	713.406.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program			104.457.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										YA BIDANG KESEHATAN			prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran**	**100,00persen 100,00persen 97,00persen**	**98,00 100,00 96,00 persen persen persen**	**100,00 96,00 100 persen persen persen**	**629.013.000**	**600.676.000**	**600.676.000**								**604.584.000**	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan*		100 persen	100 persen	46.991.000	48.495.000	48.495.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		48.495.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*		2 Dokumen	2 Dokumen	46.991.000	48.495.000	48.495.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			48.495.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	*Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan*		100 persen	100 persen	533.272.000	503.431.000	503.431.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang	M asyarakat		481.023.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*		5 Dokumen	5 Dokumen	533.272.000	503.431.000	503.431.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			481.023.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan*		95 persen	95 persen	48.750.000	48.750.000	48.750.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		75.066.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*		2 Dokumen	1 Dokumen	48.750.000	48.750.000	48.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			75.066.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Persentase Rumah Tangga Sehat**	**93,00 persen**	**93,00 persen**	**93,00 persen**	**968.213.000**	**2.189.213.000**	**2.189.213.000**								**1.790.818.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BIDANG KESEHATAN																
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri*		33 persen	33 persen	906.518.000	2.127.518.000	2.127.518.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		1.665.588.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*		3 Dokumen	3 Dokumen	906.518.000	2.127.518.000	2.127.518.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			1.665.588.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan*		100 persen	100 persen	61.695.000	61.695.000	61.695.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		125.230.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*		6 Dokumen	2 Dokumen	61.695.000	61.695.000	61.695.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			125.230.000	DINAS KESEHATAN
	RSUD BENDAN					**109.162.934.000**	**105.426.563.000**	**112.048.118.000**								**112.636.288.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN**					**109.162.934.000**	**105.426.563.000**	**112.048.118.000**								**112.636.288.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PELAYANAN DASAR																
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**109.162.934.000**	**105.426.563.000**	**112.048.118.000**								**112.636.288.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**87.089.655.000**	**103.651.704.000**	**105.273.259.000**								**112.418.429.000**	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	8.485.000	8.485.000	8.485.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan		12.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	870.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	615.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		6 Laporan	10 Laporan	7.000.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	53.170.000	16.615.219.000	57.370.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan		16.606.944.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		-	0 Orang/bulan	0	16.557.849.000	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			16.557.849.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	52.600.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	0	570.000	570.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	28.000.000	28.000.000	28.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan		799.485.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		30 Laporan	12 Laporan	0	28.000.000	28.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			799.485.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	87.000.000.000	87.000.000.000	105.179.404.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		95.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	87.000.000.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)**	**92,00persen 90,00persen 100,00persen 72,50persen**	**67,50 persen**	**100,00 85,00 91,00 100,00 persen persen persen persen**	**22.009.713.000**	**1.709.813.000**	**6.709.813.000**								**155.000.000**	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan*		100 persen	100 persen	21.894.400.000	1.594.500.000	6.594.500.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*		4 Unit	22 Unit	21.894.400.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										YA BIDANG KESEHATAN							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP*		100 persen	100 persen	32.813.000	32.813.000	32.813.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		45.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		600 Orang	500 Orang	0	32.813.000	32.813.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			45.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan*		100 persen	100 persen	82.500.000	82.500.000	82.500.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		110.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*		27 Unit	27 Unit	82.500.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS KESEHATAN
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan Persentase tenaga**	**60,00persen 95,5persen**	**94,50 50,00 persen persen**	**50,00 100,00 persen persen**	**63.566.000**	**65.046.000**	**65.046.000**								**62.859.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek															
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase perawat dan bidan yang terkredensial*		100 persen	100 persen	47.441.000	48.921.000	48.921.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Tenaga Kesehatan di RSUD Bendan		49.525.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*		1 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			36.191.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*		42 Dokumen	2 Dokumen	11.250.000	0	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi*		20 persen	100 persen	16.125.000	16.125.000	16.125.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Tenaga Kesehatan di RSUD Bendan		13.334.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang*		70 Orang	92 Orang	16.125.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam			0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*							Semua Kel/Desa			dan adaptif secara inklusif dan merata	intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
	PUSKESMAS BENDAN					**3.416.807.000**	**3.320.725.000**	**3.530.529.000**								**3.797.043.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.416.807.000**	**3.320.725.000**	**3.530.529.000**								**3.797.043.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.416.807.000**	**3.320.725.000**	**3.530.529.000**								**3.797.043.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**2.525.000.000**	**2.525.000.000**	**2.734.804.000**								**2.905.236.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	2.525.000.000	2.525.000.000	2.734.804.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Bendan		2.905.236.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.525.000.000	2.525.000.000	2.734.804.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.905.236.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase**	**92,00persen 90,00persen 100,00persen**	**67,50 85,00 100,00 91,00 persen persen**	**100,00 85,00 91,00 100,00 persen persen**	**891.807.000**	**795.725.000**	**795.725.000**								**891.807.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	**72,50persen**	**persen persen**	**persen persen**												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	891.807.000	795.725.000	795.725.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		891.807.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	891.807.000	795.725.000	795.725.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			891.807.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS KRAMATSARI					**1.805.682.000**	**1.729.560.000**	**1.847.222.000**								**1.805.682.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.805.682.000**	**1.729.560.000**	**1.847.222.000**								**1.805.682.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.805.682.000**	**1.729.560.000**	**1.847.222.000**								**1.805.682.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.050.000.000**	**1.050.000.000**	**1.167.662.000**								**1.050.000.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	1.050.000.000	1.050.000.000	1.167.662.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Kramatsari		1.050.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.050.000.000	1.050.000.000	1.167.662.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.050.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar**	**92,00persen 90,00persen 100,00persen 72,50persen**	**100,00 67,50 85,00 persen persen persen**	**67,50 100,00 85,00 persen persen persen**	**755.682.000**	**679.560.000**	**679.560.000**								**755.682.000**	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	755.682.000	679.560.000	679.560.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		755.682.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	755.682.000	679.560.000	679.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			755.682.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS TIRTO					**2.220.718.000**	**2.135.353.000**	**2.497.654.000**								**1.847.890.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.220.718.000**	**2.135.353.000**	**2.497.654.000**								**1.847.890.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.220.718.000**	**2.135.353.000**	**2.497.654.000**								**1.847.890.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.250.000.000**	**1.280.000.000**	**1.642.301.000**								**1.250.000.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	1.250.000.000	1.280.000.000	1.642.301.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Tirto		1.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.250.000.000	1.280.000.000	1.642.301.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN**	**Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK**	**92,00persen 90,00persen**	**67,50 100,00 91,00 85,00**	**100,00 85,00 67,50 91,00**	**970.718.000**	**855.353.000**	**855.353.000**								**597.890.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**100,00persen 72,50persen**	**persen persen persen persen**	**persen persen persen persen**												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama*		100 Persen	100 Persen	970.718.000	855.353.000	855.353.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Tirto		597.890.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	970.718.000	855.353.000	855.353.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			597.890.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS MEDONO					**1.873.894.000**	**1.815.238.000**	**2.108.729.000**								**1.517.568.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN**					**1.873.894.000**	**1.815.238.000**	**2.108.729.000**								**1.517.568.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PELAYANAN DASAR																
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.873.894.000**	**1.815.238.000**	**2.108.729.000**								**1.517.568.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**950.000.000**	**990.000.000**	**1.283.491.000**								**950.000.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 Persen	100 Persen	950.000.000	990.000.000	1.283.491.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		950.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	950.000.000	990.000.000	1.283.491.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			950.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**91,00 persen**	**91,00 persen**	**923.894.000**	**825.238.000**	**825.238.000**								**567.568.000**	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP*		100 persen	100 persen	923.894.000	825.238.000	825.238.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Medono		567.568.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	923.894.000	825.238.000	825.238.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			567.568.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS NOYONTAAN					**1.754.951.000**	**1.621.032.000**	**1.784.848.000**								**1.754.951.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.754.951.000**	**1.621.032.000**	**1.784.848.000**								**1.754.951.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.754.951.000**	**1.621.032.000**	**1.784.848.000**								**1.754.951.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.113.430.000**	**1.113.430.000**	**1.277.246.000**								**1.113.430.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	1.113.430.000	1.113.430.000	1.277.246.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Noyontaan		1.113.430.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.113.430.000	1.113.430.000	1.277.246.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur,	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.113.430.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Noyontaansari								
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar**	**92,00persen 90,00persen 100,00persen 72,50persen**	**91,00 100,00 67,50 85,00 persen persen persen persen**	**100,00 67,50 100,00 85,00 persen persen persen persen**	**641.521.000**	**507.602.000**	**507.602.000**								**641.521.000**	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	641.521.000	507.602.000	507.602.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		641.521.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	641.521.000	507.602.000	507.602.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			641.521.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS TONDANO					**1.679.195.000**	**1.653.909.000**	**2.000.017.000**								**1.632.983.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN**					**1.679.195.000**	**1.653.909.000**	**2.000.017.000**								**1.632.983.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.679.195.000**	**1.653.909.000**	**2.000.017.000**								**1.632.983.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**969.000.000**	**995.000.000**	**1.341.108.000**								**922.788.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	969.000.000	995.000.000	1.341.108.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Tondano		922.788.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	969.000.000	995.000.000	1.341.108.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			922.788.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK**	**92,00persen 90,00persen 100,00persen 72,50persen**	**100,00 85,00 67,50 91,00 persen persen persen persen**	**91,00 85,00 100,00 67,50 persen persen persen persen**	**710.195.000**	**658.909.000**	**658.909.000**								**710.195.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar															
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	710.195.000	658.909.000	658.909.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Tondano		710.195.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	710.195.000	658.909.000	658.909.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			710.195.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS KLEGO					**1.725.757.000**	**1.841.646.000**	**1.987.034.000**								**1.725.757.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.725.757.000**	**1.841.646.000**	**1.987.034.000**								**1.725.757.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.725.757.000**	**1.841.646.000**	**1.987.034.000**								**1.725.757.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**993.800.000**	**1.070.500.000**	**1.215.888.000**								**993.800.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	993.800.000	1.070.500.000	1.215.888.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Klego		993.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	993.800.000	1.070.500.000	1.215.888.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			993.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**91,00 persen**	**91,00 persen**	**731.957.000**	**771.146.000**	**771.146.000**								**731.957.000**	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	731.957.000	771.146.000	771.146.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Klego		731.957.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	731.957.000	771.146.000	771.146.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			731.957.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS SOKOREJO					**2.248.457.000**	**2.123.266.000**	**2.580.957.000**								**2.248.457.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN**					**2.248.457.000**	**2.123.266.000**	**2.580.957.000**								**2.248.457.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.248.457.000**	**2.123.266.000**	**2.580.957.000**								**2.248.457.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.460.880.000**	**1.460.880.000**	**1.918.571.000**								**1.460.880.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	1.460.880.000	1.460.880.000	1.918.571.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		1.460.880.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		12 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.460.880.000	1.460.880.000	1.918.571.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Kali Baros Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Setono	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.460.880.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00persen 90,00persen 100,00persen 72,50persen**	**100,00 67,50 85,00 91,00 persen persen persen persen**	**85,00 100,00 91,00 67,50 persen persen persen persen**	**787.577.000**	**662.386.000**	**662.386.000**								**787.577.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar															
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	787.577.000	662.386.000	662.386.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Sokorejo		787.577.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	787.577.000	662.386.000	662.386.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			787.577.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS DUKUH					**1.824.612.000**	**1.741.815.000**	**1.994.854.000**								**1.824.612.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.824.612.000**	**1.741.815.000**	**1.994.854.000**								**1.824.612.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.824.612.000**	**1.741.815.000**	**1.994.854.000**								**1.824.612.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.095.000.000**	**1.095.000.000**	**1.348.039.000**								**1.095.000.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian*		100 persen	100 persen	1.095.000.000	1.095.000.000	1.348.039.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Dukuh		1.095.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Peningkatan Pelayanan BLUD									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.095.000.000	1.095.000.000	1.348.039.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.095.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**91,00 persen**	**91,00 persen**	**729.612.000**	**646.815.000**	**646.815.000**								**729.612.000**	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP*		100 persen	100 persen	729.612.000	646.815.000	646.815.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		729.612.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	729.612.000	646.815.000	646.815.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			729.612.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Utara, Bandengan								
	PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL					**2.216.045.000**	**2.125.917.000**	**2.364.201.000**								**1.740.460.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.216.045.000**	**2.125.917.000**	**2.364.201.000**								**1.740.460.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.216.045.000**	**2.125.917.000**	**2.364.201.000**								**1.740.460.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.480.000.000**	**1.550.000.000**	**1.788.284.000**								**1.198.741.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	1.480.000.000	1.550.000.000	1.788.284.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Krapyak Kidul		1.198.741.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.480.000.000	1.550.000.000	1.788.284.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.198.741.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**91,00 persen**	**91,00 persen**	**736.045.000**	**575.917.000**	**575.917.000**								**541.719.000**	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	*Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP*		100 persen	100 persen	736.045.000	575.917.000	575.917.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju	Masyarakat, Puskesmas Krapyak Kidul		541.719.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										berkualitas dan berdaya saing	dan adaptif secara inklusif dan merata	konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	736.045.000	575.917.000	575.917.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			541.719.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS KUSUMA BANGSA					**3.116.685.000**	**3.013.395.000**	**3.138.468.000**								**3.116.685.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.116.685.000**	**3.013.395.000**	**3.138.468.000**								**3.116.685.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.116.685.000**	**3.013.395.000**	**3.138.468.000**								**3.116.685.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**2.176.805.000**	**2.176.810.000**	**2.301.883.000**								**2.176.805.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 Persen	100 Persen	2.176.805.000	2.176.810.000	2.301.883.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Warga Kota Pekalongan dan sekitarnya		2.176.805.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.176.805.000	2.176.810.000	2.301.883.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.176.805.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Wetan Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Baru								
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**91,00 persen**	**91,00 persen**	**939.880.000**	**836.585.000**	**836.585.000**								**939.880.000**	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	939.880.000	836.585.000	836.585.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	m asyarakat		939.880.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	939.880.000	836.585.000	836.585.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			939.880.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS JENGGOT					**1.949.033.000**	**1.987.333.000**	**2.442.802.000**								**1.708.597.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN**					**1.949.033.000**	**1.987.333.000**	**2.442.802.000**								**1.708.597.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.949.033.000**	**1.987.333.000**	**2.442.802.000**								**1.708.597.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.335.700.000**	**1.335.700.000**	**1.791.169.000**								**1.335.700.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 Persen	100 Persen	1.335.700.000	1.335.700.000	1.791.169.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Jenggot		1.335.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		12 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.335.700.000	1.335.700.000	1.791.169.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.335.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)**	**92,00persen 90,00persen 100,00persen 72,50persen**	**85,00 100,00 67,50 91,00 persen persen persen persen**	**91,00 85,00 100,00 100,00 persen persen persen persen**	**613.333.000**	**651.633.000**	**651.633.000**								**372.897.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	613.333.000	651.633.000	651.633.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Jenggot		372.897.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	613.333.000	651.633.000	651.633.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			372.897.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN					**3.389.405.000**	**3.260.381.000**	**3.208.865.000**								**2.374.335.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.389.405.000**	**3.260.381.000**	**3.208.865.000**								**2.374.335.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.389.405.000**	**3.260.381.000**	**3.208.865.000**								**2.374.335.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**2.374.335.000**	**2.374.335.000**	**2.322.819.000**								**2.374.335.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	2.374.335.000	2.374.335.000	2.322.819.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Pekalongan Selatan		2.374.335.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.374.335.000	2.374.335.000	2.322.819.000	Kota Pekalongan,	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.374.335.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar**	**92,00persen 90,00persen 100,00persen 72,50persen**	**100,00 85,00 67,50 persen persen persen**	**85,00 100,00 100,00 persen persen persen**	**1.015.070.000**	**886.046.000**	**886.046.000**								**0**	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	1.015.070.000	886.046.000	886.046.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Pekalongan Selatan		0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	1.015.070.000	886.046.000	886.046.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BUARAN					**1.760.744.000**	**1.749.000.000**	**2.168.845.000**								**1.760.744.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN**					**1.760.744.000**	**1.749.000.000**	**2.168.845.000**								**1.760.744.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PELAYANAN DASAR																
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.760.744.000**	**1.749.000.000**	**2.168.845.000**								**1.760.744.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**985.000.000**	**1.015.000.000**	**1.434.845.000**								**985.000.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 persen	100 persen	985.000.000	1.015.000.000	1.434.845.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat,Puskes mas Buaran		985.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	985.000.000	1.015.000.000	1.434.845.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Banyurip Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			985.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**91,00 persen**	**91,00 persen**	**775.744.000**	**734.000.000**	**734.000.000**								**775.744.000**	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP*		100 persen	100 persen	775.744.000	734.000.000	734.000.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	masyarakat		775.744.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*		4 Dokumen	4 Dokumen	775.744.000	734.000.000	734.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			775.744.000	DINAS KESEHATAN
	BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU					**510.020.000**	**428.596.000**	**443.315.000**								**601.980.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**510.020.000**	**428.596.000**	**443.315.000**								**601.980.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**510.020.000**	**428.596.000**	**443.315.000**								**601.980.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**300.000.000**	**200.000.000**	**214.719.000**								**351.384.000**	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD*		100 Persen	100 Persen	300.000.000	200.000.000	214.719.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPSJ		351.384.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	300.000.000	200.000.000	214.719.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			351.384.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar**	**92,00persen 90,00persen 100,00pe**	**67,50 100,00 91,00 85,00 persen**	**100,00 91,00 85,00 100,00 persen**	**210.020.000**	**228.596.000**	**228.596.000**								**250.596.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)**	**rsen 72,50persen**	**persen persen persen**	**persen persen persen**												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C*		100 persen	100 persen	210.020.000	228.596.000	228.596.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	BPSJ		250.596.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*		1 Dokumen	1 Dokumen	210.020.000	228.596.000	228.596.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			250.596.000	DINAS KESEHATAN
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**54.262.596.000**	**60.126.468.000**	**70.646.869.000**								**122.301.238.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**54.262.596.000**	**60.126.468.000**	**70.646.869.000**								**122.301.238.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**54.262.596.000**	**60.126.468.000**	**70.646.869.000**								**122.301.238.000**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**13.247.690.000**	**13.363.906.000**	**13.282.811.000**								**11.776.356.000**	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	16.950.000	16.950.000	16.950.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		25.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.900.000	2.900.000	2.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.050.000	2.050.000	2.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			14.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	6.950.774.000	7.028.834.000	6.926.651.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		7.602.325.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	6.849.074.000	6.927.134.000	6.824.951.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.505.825.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	99.800.000	99.800.000	99.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			95.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.900.000	1.900.000	1.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	35.578.000	35.578.000	35.578.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		34.387.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*		2 Laporan	2 Laporan	35.578.000	35.578.000	35.578.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			34.387.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	17.800.000	17.800.000	17.800.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		21.978.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*		180 Orang	180 Orang	12.800.000	12.800.000	12.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.478.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	588.000.000	608.000.000	608.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		415.450.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											dan transformasi pelayanan publik						
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	230.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	114.000.000	114.000.000	114.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		24 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		150 Laporan	125 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.950.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa*		100 persen	100 persen	4.853.135.000	4.871.291.000	4.871.291.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		2.919.728.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									dan transformasi pelayanan publik						
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	4.423.250.000	4.423.250.000	4.423.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.516.728.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	426.885.000	445.041.000	445.041.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	785.453.000	785.453.000	806.541.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		756.838.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		48 Unit	48 Unit	599.453.000	599.453.000	620.541.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			497.027.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya*		10 Unit	10 Unit	86.000.000	86.000.000	86.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			59.811.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		70 Unit	70 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik**	**100,00 persen**	**93,10 persen**	**100,00 persen**	**11.757.760.000**	**16.405.420.000**	**16.582.011.000**								**22.682.373.000**	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik*		35 unit	34 unit	10.320.260.000	14.573.100.000	14.892.100.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		20.442.920.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	*Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun*		1 Unit	5 Unit	3.080.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			8.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	*Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi*		5 Unit	7 Unit	1.500.000.000	2.555.000.000	2.555.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas			2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											bencana dan perubahan iklim	dukung dan daya tampung	lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	*Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara*		35 Unit	34 Unit	3.534.110.000	3.611.950.000	3.830.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun*		0,24 KM	0,46 KM	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			3.442.920.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi*		0,6775 KM	2,79 KM	1.606.150.000	2.106.150.000	2.206.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas			2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											bencana dan perubahan iklim	dukung dan daya tampung	lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)*		83,39 persen	83,39 persen	1.437.500.000	1.832.320.000	1.689.911.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		2.239.453.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*		0,731 KM	0,9 KM	1.437.500.000	1.832.320.000	1.689.911.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			2.239.453.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM**	**Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah**	**89,66 persen**	**89,66 persen**	**89,66 persen**	**428.000.000**	**1.662.400.000**	**1.581.070.000**								**1.374.248.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PENYEDIAAN AIR MINUM																
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan*		100 Persen	100 Persen	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	jaringan perpipaan		1.374.248.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*		120 SR	212 SR	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			1.374.248.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional**	**60,00 persen**	**60,00 persen**	**60,00 persen**	**860.000.000**	**925.000.000**	**952.450.000**								**2.390.970.000**	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota*		60 Persen	60 Persen	860.000.000	925.000.000	952.450.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Kota Pekalongan		2.390.970.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	*Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun*		1 Ton/hari	0,112 Ton/hari	860.000.000	925.000.000	952.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk			2.390.970.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)**	**11,67 persen**	**11,67 persen**	**17,23 persen**	**927.783.000**	**3.329.719.000**	**3.669.141.000**								**0**	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)*		59851 unit	59851 unit	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	sarpras sanitasi		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan*		2 M³/Hari	5,44 M³/Hari	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**69,48 persen**	**69,48 persen**	**69,48 persen**	**3.689.840.000**	**4.270.800.000**	**4.542.015.000**								**4.858.000.000**	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik*		180841 meter	180841 meter	3.689.840.000	4.270.800.000	4.542.015.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan	Masyarakat Kota Pekalongan		4.858.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi*		8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	3.200.000.000	3.790.000.000	4.059.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			4.158.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara*		8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	489.840.000	480.800.000	483.015.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota**	**18,14 persen**	**18,14 persen**	**18,14 persen**	**1.097.910.000**	**1.425.190.000**	**1.537.749.000**								**2.191.408.000**	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	*Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)*		330 dokumen	330 dokumen	1.097.910.000	1.425.190.000	1.537.749.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas	Warga Kota Pekalongan		2.191.408.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										bencana dan perubahan iklim	dukung dan daya tampung	lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala*		3 Bangunan Gedung	6 Bangunan Gedung	801.960.000	1.129.240.000	1.226.799.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			2.031.408.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung*		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan*		130 Dokumen	130 Dokumen	195.950.000	195.950.000	210.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*										bencana dan perubahan iklim	dukung dan daya tampung	lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)**	**84,39 persen**	**84,39 persen**	**84,39 persen**	**21.595.513.000**	**18.077.303.000**	**27.850.932.000**								**76.374.296.000**	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang*		129,628 KM	129,628 KM	21.595.513.000	18.077.303.000	27.850.932.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	M asyarakat		76.374.296.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun*		1 Dokumen	1 Dokumen	64.500.000	64.500.000	64.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			94.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun*		0,5 KM	0,14 KM	800.000.000	900.000.000	499.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			41.493.996.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*		4 KM	4,3 KM	13.275.000.000	10.058.790.000	20.191.744.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			20.083.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*		5 Jembatan	5 Jembatan	300.000.000	302.280.000	302.280.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			799.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*		153,607 KM	153,607 KM	141.400.000	141.400.000	141.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			94.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*		0,8 KM	0,65 KM	2.500.000.000	2.116.000.000	2.106.975.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			4.225.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*		2,5 KM	2,5 KM	4.514.613.000	4.494.333.000	4.544.333.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			9.584.200.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi**	**15,87 persen**	**15,87 persen**	**15,87 persen**	**102.900.000**	**102.900.000**	**102.358.000**								**110.000.000**	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota*		1 kali	1 kali	62.900.000	62.900.000	65.278.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	lembaga / tenaga konstruksi		60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih*		40 Orang	36 Orang	62.900.000	62.900.000	65.278.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan			60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia*		100 Persen	100 Persen	40.000.000	40.000.000	37.080.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	DPUPR		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*		4 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	40.000.000	37.080.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**555.200.000**	**563.830.000**	**546.332.000**								**543.587.000**	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR*		100 persen	100 persen	155.000.000	160.210.000	183.862.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan	Kota Pekalongan		145.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	*dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi*		1 Dokumen	1 Dokumen	120.500.000	0	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	*dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi*		-	1 Dokumen	0	120.500.000	117.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			120.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	*Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi*		1 Orang	350 Orang	34.500.000	39.710.000	66.570.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan*		12 kali	12 kali	361.440.000	364.860.000	323.710.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Kota Pekalongan		364.860.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang*		10 Dokumen	2 Dokumen	361.440.000	364.860.000	323.710.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			364.860.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan*		12 kali	12 kali	38.760.000	38.760.000	38.760.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan	Penataan Ruang		33.227.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*		1 Dokumen	2 Dokumen	38.760.000	38.760.000	38.760.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			33.227.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**30.011.392.000**	**44.429.626.000**	**44.178.402.000**								**12.872.466.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**29.534.274.000**	**43.602.508.000**	**43.255.584.000**								**11.788.571.000**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**29.534.274.000**	**43.602.508.000**	**43.255.584.000**								**11.788.571.000**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**4.427.004.000**	**4.568.524.000**	**4.635.634.000**								**4.389.902.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	15.861.000	15.861.000	15.861.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperkim		25.350.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.262.000	2.262.000	2.262.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.599.000	1.599.000	1.599.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.950.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	2.838.448.000	2.918.131.000	2.811.925.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.909.899.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.782.066.000	2.861.749.000	2.755.543.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.857.549.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	54.900.000	54.900.000	54.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.700.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.482.000	1.482.000	1.482.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		9.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	2 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	221.686.000	221.686.000	231.686.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		192.414.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		20 Paket	4 Paket	48.000.000	48.000.000	48.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			44.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	49.186.000	49.186.000	49.186.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.414.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		73 Laporan	73 Laporan	110.000.000	110.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			94.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	1.018.478.000	1.054.024.000	1.209.024.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		970.407.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	1.800.000	1.800.000	6.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	812.400.000	812.400.000	962.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			758.200.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	204.278.000	239.824.000	239.824.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			210.407.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	327.531.000	353.822.000	362.138.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		282.332.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		18 Unit	18 Unit	126.361.000	146.352.000	154.668.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			90.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			72.332.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	1 Unit	151.170.000	157.470.000	157.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni**	**91,68 persen**	**91,68 persen**	**100,00 persen**	**1.603.761.000**	**2.197.825.000**	**2.167.825.000**								**1.638.690.000**	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen data rumah pada kawasan rawan bencana yang disusun*		1 dokumen	1 dokumen	60.000.000	60.000.000	60.000.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Dinperkim Kota Pekalongan		50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah*		3 kegiatan	3 kegiatan	44.280.000	44.280.000	44.280.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat/Sukarela wan Tanggap Bencana		50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan	*Jumlah Orang/Sukarelawan*		60 Orang	60 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan	03. Peningkatan pengelolaan sumber	06. Pelaksanaan pencegahan			10.000.000	DINAS PERUMAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	*yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota*							, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	perumahan kumuh dan permukiman kumuh				RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	*Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih*		6 Orang	6 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota*		2 Orang	2 Orang	9.280.000	9.280.000	9.280.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase rumah layak huni bagi warga korban bencana dan relokasi program pemerintah (SPM/IKK Outcome)*		100 persen	100 persen	232.061.000	232.061.000	232.061.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Korban Bencana		264.461.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi*		6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	132.061.000	132.061.000	132.061.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			164.461.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun*		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa								
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*		100 Persen	100 Persen	1.197.050.000	1.791.114.000	1.831.484.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		1.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun*		3 Laporan	3 Laporan	1.197.050.000	1.791.114.000	1.831.484.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			1.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Persentase pelaksanaan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*		100 persen	100 persen	70.370.000	70.370.000	0			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Pengembang Perumahan		74.229.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*		20 Laporan	0 Laporan	70.370.000	70.370.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			74.229.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas kawasan permukiman kumuh**	**174,47 Hektar**	**174,47 Hektar**	**174,47 Hektar**	**16.614.300.000**	**22.641.270.000**	**22.677.236.000**								**630.400.000**	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Presentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun*		100 Persen	100 Persen	233.500.000	233.500.000	146.500.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kota Pekalongan		250.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi*		2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	33.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh*		4 Dokumen	1 Dokumen	83.500.000	83.500.000	113.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luasan kawasan kumuh yang tertangani*		117 Hektar	117 Hektar	16.380.800.000	22.407.770.000	22.530.736.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		380.400.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh*		4 Laporan	4 Laporan	246.800.000	246.800.000	446.034.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			306.400.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan*		1 Ha	3 Ha	16.134.000.000	22.160.970.000	22.084.702.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-AFIRMASI-PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			74.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Luas kawasan permukiman tidak kumuh**	**1973,41 hektar**	**1973,41 hektar**	**1973,41 hektar**	**5.478.688.000**	**12.539.368.000**	**11.939.368.000**								**4.523.695.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan rumah tidak layak huni*		0,78 persen	0,78 persen	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Warga Penghuni RTLH		4.523.695.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki*		401 Unit Rumah	599 Unit Rumah	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-AFIRMASI-PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			4.523.695.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)**	**57,61 persen**	**14,51 persen**	**57,61 persen**	**1.410.521.000**	**1.655.521.000**	**1.835.521.000**								**605.884.000**	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*persentase perumahan yang sudah menyerahkan PSU*		57,61 persen	57,61 persen	1.410.521.000	1.655.521.000	1.835.521.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan		605.884.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*		1 Dokumen	12 Dokumen	230.000.000	230.000.000	260.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			230.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*		10 Lokasi	12 Lokasi	1.080.000.000	1.325.000.000	1.475.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			280.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dukung dan daya tampung					
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan*		1 Laporan	1 Laporan	100.521.000	100.521.000	100.521.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			95.884.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**477.118.000**	**827.118.000**	**922.818.000**								**1.083.895.000**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**477.118.000**	**827.118.000**	**922.818.000**								**1.083.895.000**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani**	-	**100 persen**	**100 persen**	**468.032.000**	**818.032.000**	**863.732.000**								**1.074.937.000**	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Luasan Bidang Tanah yang Terselesaikan Ganti Ruginya*		73,35 persen	73,35 persen	468.032.000	818.032.000	863.732.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Warga terdampak		1.074.937.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti*		1 Dokumen	1 Dokumen	468.032.000	818.032.000	863.732.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan			1.074.937.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*							Semua Kel/Desa		bencana dan perubahan iklim	mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Presentase Tindaklanjut Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Tanah Absentee**	-	**50 persen**	**50 persen**	**9.086.000**	**9.086.000**	**59.086.000**								**8.958.000**	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee*		50 persen	50 persen	9.086.000	9.086.000	59.086.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pekalongan		8.958.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah*		2 Dokumen	2 Dokumen	9.086.000	9.086.000	59.086.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan			8.958.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					**12.866.127.000**	**13.448.424.000**	**13.157.628.000**								**12.600.672.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**12.866.127.000**	**13.448.424.000**	**13.157.628.000**								**12.600.672.000**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**12.866.127.000**	**13.448.424.000**	**13.157.628.000**								**12.600.672.000**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**5.402.760.000**	**5.679.159.000**	**5.558.043.000**								**5.390.341.000**	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	15.960.000	15.960.000	15.960.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		62.450.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.320.000	2.320.000	2.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.640.000	1.640.000	1.640.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	4.560.704.000	4.837.103.000	4.730.987.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		4.418.425.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		38 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.502.384.000	4.778.783.000	4.669.367.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.364.775.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	56.800.000	56.800.000	60.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			52.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih								
1.05.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.520.000	1.520.000	1.520.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		9.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	236.720.000	236.720.000	248.720.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		217.754.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		2 Paket	4 Paket	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa								
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		2 Paket	4 Paket	29.195.000	29.195.000	29.195.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			28.254.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	96.400.000	96.400.000	96.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			97.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa								
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		12 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		150 Laporan	110 Laporan	88.000.000	88.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			65.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	127.651.000	127.651.000	127.651.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		130.858.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber*		12 Laporan	12 Laporan	125.651.000	125.651.000	125.651.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			128.858.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan							Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	456.725.000	456.725.000	429.725.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		551.354.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		29 Unit	29 Unit	389.230.000	389.230.000	369.230.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	2 Unit	37.495.000	37.495.000	30.495.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			111.354.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		66 Unit	66 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih								
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)**	**82,00 persen**	**66,00 persen**	**82,00 persen**	**6.416.736.000**	**6.658.880.000**	**6.587.360.000**								**6.041.523.000**	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)*		95 persen	95 persen	2.386.435.000	2.526.535.000	2.492.736.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	M asyarakat		1.822.410.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*		40 Dokumen	40 Dokumen	1.938.365.000	2.078.465.000	1.976.146.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			1.020.410.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		2 Dokumen	2 Dokumen	18.750.000	18.750.000	102.270.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang*		148 Orang	155 Orang	33.600.000	33.600.000	21.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka			48.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Ditingkatkan Kapasitasnya*							Podosugih Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa			sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*		2 Dokumen	2 Dokumen	111.000.000	111.000.000	123.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			148.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*		300 laporan	300 laporan	77.000.000	77.000.000	43.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			106.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*		2000 Laporan	2000 Laporan	194.480.000	194.480.000	213.480.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada*		4 Laporan	4 Laporan	13.240.000	13.240.000	13.240.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah			25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perturan kepala daerah	*yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani*							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)*		20 perda	20 perda	4.015.650.000	4.117.694.000	4.092.693.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	M asyarakat		4.199.854.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*		12 Laporan	12 Laporan	59.069.000	59.069.000	51.699.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			133.873.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*		12 Laporan	12 Laporan	3.941.581.000	4.043.625.000	4.025.994.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			4.045.981.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap*		48 Laporan	48 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah			20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Peraturan Kepala Daerah	*Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS*		16 persen	16 persen	14.651.000	14.651.000	1.931.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	PPNS Polisi Pamong Praja		19.259.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*		3 Laporan	1 Laporan	14.651.000	14.651.000	1.931.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			19.259.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.046.631.000**	**1.110.385.000**	**1.012.225.000**								**1.168.808.000**	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran*		100 persen	100 persen	896.719.000	924.473.000	826.313.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		971.737.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya*		4 Dokumen	4 Dokumen	39.750.000	39.750.000	24.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			53.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*		250 Laporan	250 Laporan	789.419.000	817.173.000	734.013.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			833.737.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*		38 Orang	38 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya*		2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan*		3 Unit	3 Unit	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*							Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran*		3 Dokumen	3 Dokumen	33.800.000	33.800.000	33.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya*		100 Persen	100 Persen	34.071.000	34.071.000	34.071.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		44.789.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran*		12 Dokumen	12 Dokumen	34.071.000	34.071.000	34.071.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			44.789.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran*		100 persen	100 persen	61.328.000	97.328.000	97.328.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		80.620.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*		320 Orang	320 Orang	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya*		21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	23.828.000	59.828.000	59.828.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.620.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Persentase penanganan kondisi membahayakan*		100 persen	100 persen	54.513.000	54.513.000	54.513.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		71.662.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia*		24 Laporan	24 Laporan	54.513.000	54.513.000	54.513.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			71.662.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					**3.932.050.000**	**4.119.620.000**	**4.097.465.000**								**3.164.491.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.932.050.000**	**4.119.620.000**	**4.097.465.000**								**3.164.491.000**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**3.932.050.000**	**4.119.620.000**	**4.097.465.000**								**3.164.491.000**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**2.210.704.000**	**2.222.662.000**	**2.250.274.000**								**1.867.937.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	14.970.000	14.970.000	14.970.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		24.625.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.740.000	1.740.000	1.740.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.230.000	1.230.000	1.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		5 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			13.625.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	1.733.688.000	1.676.130.000	1.632.887.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		1.457.402.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		14 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.695.648.000	1.638.090.000	1.594.847.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.424.352.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	36.900.000	36.900.000	36.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			31.550.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan*		1 Laporan	1 Laporan	1.140.000	1.140.000	1.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Keuangan Akhir Tahun SKPD															
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	54.165.000	104.165.000	104.165.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		19.797.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	2 Paket	45.900.000	95.900.000	95.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*		50 Orang	50 Orang	8.265.000	8.265.000	8.265.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.297.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	160.076.000	180.076.000	171.935.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		133.516.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	1.875.000	1.875.000	1.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		7 Paket	4 Paket	63.541.000	63.541.000	58.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			58.400.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	902.000	902.000	902.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	27.258.000	27.258.000	24.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			29.700.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		24 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		100 Laporan	50 Laporan	55.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.416.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	107.337.000	106.853.000	111.994.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		98.804.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	58.313.000	58.313.000	58.313.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			56.904.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	47.524.000	47.040.000	52.181.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.100.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	140.468.000	140.468.000	214.323.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		133.793.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		11 Unit	12 Unit	82.877.000	82.877.000	103.965.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			79.859.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		57 Unit	2 Unit	11.250.000	11.250.000	64.017.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		57 Unit	57 Unit	46.341.000	46.341.000	46.341.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			44.434.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**persentase korban bencana alam yang ditangani**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.721.346.000**	**1.896.958.000**	**1.847.191.000**								**1.296.554.000**	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)*		100 Persen	100 Persen	131.528.000	131.528.000	59.265.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		64.945.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal*		1 Dokumen	0 Dokumen	72.263.000	72.263.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat*		2 Orang	200 Orang	59.265.000	59.265.000	59.265.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			64.945.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		tinggalnya selama 1 (satu) tahun															
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)*		100 Persen	100 Persen	154.215.000	154.215.000	173.711.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		95.475.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal*		1 Dokumen	1 Dokumen	57.004.000	57.004.000	76.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya*		1 Unit	2 Unit	33.911.000	33.911.000	33.911.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.075.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*		200 Kawasan	400 Kawasan	63.300.000	63.300.000	63.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			62.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)*		100 Persen	100 Persen	1.357.978.000	1.533.590.000	1.536.590.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		996.556.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil*		1 Dokumen	1 Dokumen	899.228.000	1.369.840.000	1.369.840.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			846.556.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dokumen Laporan Kaji Cepat															
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*		2500 Orang	2500 Orang	458.750.000	163.750.000	166.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana*		100 Persen	100 Persen	77.625.000	77.625.000	77.625.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana		139.578.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah*		1 Dokumen	1 Dokumen	40.125.000	40.125.000	40.125.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			89.578.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*		1 Kegiatan	4 Kegiatan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**14.312.873.000**	**13.036.773.000**	**12.663.988.000**								**10.496.692.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**8.477.229.000**	**8.905.285.000**	**8.532.500.000**								**7.708.842.000**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					**8.477.229.000**	**8.905.285.000**	**8.532.500.000**								**7.708.842.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**3.618.388.000**	**3.841.554.000**	**3.652.369.000**								**4.033.653.000**	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	16.356.000	21.606.000	21.606.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		24.363.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.552.000	2.552.000	2.552.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.804.000	1.804.000	2.614.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	17.250.000	16.440.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.963.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	2.739.063.000	2.782.843.000	2.593.658.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.236.187.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		20 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.690.291.000	2.739.321.000	2.550.136.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.186.237.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	47.100.000	41.850.000	41.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.300.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.672.000	1.672.000	1.672.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		8.510.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.510.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	244.718.000	249.718.000	249.718.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		308.192.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		8 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		4 Paket	2 Paket	50.867.000	50.867.000	50.867.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			96.105.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	69.226.000	76.726.000	76.726.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	10.000.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		200 Laporan	150 Laporan	99.000.000	99.000.000	99.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			107.087.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	267.434.000	351.026.000	351.026.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		193.131.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	162.561.000	162.561.000	162.561.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			128.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	102.473.000	186.065.000	186.065.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			62.731.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		100 persen	100 persen	345.817.000	431.361.000	431.361.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		263.270.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									dan transformasi pelayanan publik			KELUARGA BERENCANA			KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		57 Unit	67 Unit	229.417.000	230.725.000	230.725.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			219.370.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		8 Unit	8 Unit	97.500.000	181.736.000	181.736.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		12 Unit	25 Unit	18.900.000	18.900.000	18.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.900.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan**	**75persen 75,00persen**	**67 67,00 persen persen**	**67 persen**	**473.774.000**	**490.778.000**	**440.708.000**								**431.956.000**	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan*		10 persen	10 persen	175.669.000	184.825.000	182.395.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		151.532.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	*Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*		800 Keluarga	340 Keluarga	175.669.000	184.825.000	182.395.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			151.532.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												merata dan berkualitas					
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif*		75 persen	75 persen	298.105.000	305.953.000	258.313.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		280.424.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*		10 Orang	30 Orang	74.336.000	74.336.000	56.816.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			104.541.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*		6 Orang	4 Orang	155.019.000	162.867.000	132.747.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			150.883.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*		1 Lembaga	1 Lembaga	68.750.000	68.750.000	68.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												merata dan berkualitas					
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.670.466.000**	**2.060.482.000**	**2.027.812.000**								**1.344.865.000**	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial*		100 Persen	100 Persen	1.205.925.000	1.194.633.000	1.194.058.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.198.295.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*		122 Orang	80 Orang	365.520.000	365.520.000	365.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*		80 Orang	80 Orang	840.405.000	829.113.000	828.538.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			1.198.295.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												merata dan berkualitas					
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial*		3.68 Persen	3.68 Persen	464.541.000	865.849.000	833.754.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		146.570.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*		900 Orang	900 Orang	272.578.000	672.578.000	672.578.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*		7 Orang	7 Orang	31.913.000	31.913.000	29.378.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	*Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA*		10 Orang	10 Orang	51.161.000	51.161.000	37.036.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			23.865.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kewenangan Kabupaten/Kota										merata dan berkualitas					
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	*Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota*		10 Orang	10 Orang	56.986.000	56.986.000	41.551.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			62.705.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*		83 Orang	145 Orang	51.903.000	53.211.000	53.211.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			60.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial**	**55,12 persen**	**55,12 persen**	**55,12 persen**	**1.502.324.000**	**1.526.198.000**	**1.427.838.000**								**972.056.000**	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase graduasi KPM PKH*		10 Persen	10 Persen	1.502.324.000	1.526.198.000	1.427.838.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		972.056.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata*		1000 Orang	2000 Orang	601.630.000	612.094.000	612.094.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			636.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*		950 Keluarga	950 Keluarga	900.694.000	914.104.000	815.744.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			335.406.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**868.351.000**	**720.967.000**	**718.467.000**								**491.859.000**	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial*		100 persen	100 persen	868.351.000	720.967.000	718.467.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		491.859.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat*		2000 Orang	1550 Orang	423.561.000	426.177.000	423.677.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan			450.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota							Semua Kel/Desa		yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan				
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota*		2000 Orang	1666 Orang	427.000.000	277.000.000	277.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			30.139.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota*		2000 Orang	2000 Orang	17.790.000	17.790.000	17.790.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			11.720.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**343.926.000**	**265.306.000**	**265.306.000**								**434.453.000**	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan*		100 persen	100 persen	343.926.000	265.306.000	265.306.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan		434.453.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*		1 Dokumen	1 Dokumen	289.236.000	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			379.453.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*		1 Makam	1 Makam	54.690.000	65.306.000	65.306.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			55.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**5.835.644.000**	**4.131.488.000**	**4.131.488.000**								**2.787.850.000**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**5.835.644.000**	**4.131.488.000**	**4.131.488.000**								**2.787.850.000**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**60.095.000**	**254.523.000**	**254.523.000**								**70.767.000**	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana*		100 persen	100 persen	60.095.000	254.523.000	254.523.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		70.767.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dan Pembangunan Keluarga)										dan adaptif secara inklusif dan merata	intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	KELUARGA BERENCANA			
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya*		1 Dokumen	1 Dokumen	60.095.000	61.403.000	61.403.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			70.767.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*		-	27 Laporan	0	145.120.000	145.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun**	**12,00 persen**	**7,60 persen**	**12,00 persen**	**5.610.387.000**	**1.883.987.000**	**1.883.987.000**								**2.559.918.000**	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)*		8.73 perseribu	8.73 perseribu	3.496.408.000	977.304.000	977.304.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan		1.843.530.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,*		1 Laporan	16 Laporan	3.380.182.000	196.000.000	196.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang			1.733.530.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kependudukan, dan Keluarga Berencana)											kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*		-	48 Laporan	0	111.360.000	111.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*		1 Dokumen	1 Dokumen	116.226.000	389.934.000	389.934.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKB-KB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			110.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*		-	3 Organisasi	0	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia*		20.4 persen	20.4 persen	2.113.979.000	906.683.000	906.683.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan		716.388.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB*		12 Unit	1 Unit	1.901.738.000	199.995.000	199.995.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			429.913.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	*Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak*		1 Laporan	1 Laporan	212.241.000	216.489.000	216.489.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			286.475.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Unmeet need KB**	**14,00 persen**	**14,00 persen**	**14,00 persen**	**165.162.000**	**1.992.978.000**	**1.992.978.000**								**157.165.000**	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*		100 persen	100 persen	165.162.000	1.992.978.000	1.992.978.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		157.165.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan*		5 Organisasi	5 Organisasi	165.162.000	506.178.000	506.178.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKB-KB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang			157.165.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*											kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*		-	11 laporan	0	708.000.000	708.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					**31.985.114.000**	**31.940.108.000**	**32.247.270.000**								**34.308.699.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**31.985.114.000**	**31.940.108.000**	**32.247.270.000**								**34.308.699.000**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**31.985.114.000**	**31.940.108.000**	**32.247.270.000**								**34.308.699.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**14.854.719.000**	**14.479.021.000**	**15.580.271.000**								**15.583.905.000**	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	15.960.000	15.960.000	15.960.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		29.874.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	0 Dokumen	2.320.000	2.320.000	2.320.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.640.000	1.640.000	1.640.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		4 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			17.474.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	10.716.917.000	10.321.603.000	10.275.130.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		12.581.275.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		14 Orang/bulan	101 Orang/bulan	10.606.397.000	10.208.515.000	10.162.042.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.473.625.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	109.000.000	111.568.000	111.568.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			106.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.520.000	1.520.000	1.520.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	16.880.000	16.880.000	23.417.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		28.105.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		210 Paket	1 Paket	16.880.000	16.880.000	23.417.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			28.105.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	327.105.000	327.105.000	374.205.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		247.235.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	4.275.000	4.275.000	4.275.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	53.380.000	53.380.000	55.820.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			57.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	750.000	750.000	750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	131.700.000	131.700.000	131.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			82.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	24.500.000	24.500.000	32.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			24.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Utara, Kandang Panjang		dan transformasi pelayanan publik						
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		12 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.560.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		95 Laporan	95 Laporan	110.000.000	110.000.000	147.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			66.335.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	553.993.000	566.589.000	566.589.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		537.479.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	267.960.000	267.960.000	267.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			263.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	283.633.000	296.229.000	296.229.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			272.079.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		100 persen	100 persen	3.223.864.000	3.230.884.000	4.324.970.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		2.159.937.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		12 Unit	20 Unit	208.787.000	208.787.000	173.149.500	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			162.982.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya*		12 Unit	57 Unit	2.885.077.000	2.885.077.000	4.014.800.500	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.866.655.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	1 Unit	105.000.000	112.020.000	112.020.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			105.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		12 Unit	43 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase limbah yang diolah**	**45.02 persen**	**45.02 persen**	**45.02 persen**	**1.660.793.000**	**1.716.881.000**	**1.363.066.000**								**1.419.546.000**	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya*		51.09 persen	51.09 persen	852.526.000	883.342.000	906.527.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan	Masyarakat Kota Pekalongan		979.717.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											bencana dan perubahan iklim	mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*		1 Dokumen	1 Dokumen	542.730.000	567.126.000	572.126.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			541.017.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*		1 Dokumen	1 Dokumen	18.750.000	18.750.000	35.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*		1 Dokumen	1 Dokumen	291.046.000	297.466.000	299.291.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara,	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan			413.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kandang Panjang		bencana dan perubahan iklim	mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase upaya penanggulangan pencemaran air*		76.47 persen	50 persen	808.267.000	833.539.000	456.539.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		439.829.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*		3 Laporan	3 Laporan	89.368.000	104.368.000	104.368.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			66.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan*		73 Titik	73 Titik	718.899.000	729.171.000	352.171.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan			373.829.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa	YA BIDANG KESEHATAN	bencana dan perubahan iklim	mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**	**2,929 persen**	**2,929 persen**	**2,929 persen**	**4.509.357.000**	**4.680.999.000**	**4.248.163.000**								**4.402.381.000**	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Luas RTH Publik*		109.607 Ha	109.607 Ha	4.509.357.000	4.680.999.000	4.248.163.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		4.402.381.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*		108,53 Ha	109,97 Ha	3.639.497.000	3.772.619.000	3.339.783.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			3.731.936.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	*Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*		34,1 Unit	34,1 Unit	869.860.000	908.380.000	908.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			670.445.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan**	**13,33 persen**	**13,33 persen**	**13,33 persen**	**2.271.000**	**2.271.000**	**2.271.000**								**2.239.000**	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3*		6 persen	6 persen	2.271.000	2.271.000	2.271.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		2.239.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan*		1 Laporan	1 Laporan	2.271.000	2.271.000	2.271.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup,			2.239.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		sementara dan Pengumpulan Limbah B3										dukung dan daya tampung	dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH**	**16,67 persen**	**16,67 persen**	**16,67 persen**	**40.500.000**	**40.500.000**	**39.713.000**								**68.150.000**	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan*		10 kegiatan	10 kegiatan	40.500.000	40.500.000	39.713.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		68.150.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*		1 Dokumen	1 Dokumen	14.250.000	14.250.000	14.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*		67 Badan Usaha	67 Badan Usaha	26.250.000	26.250.000	25.463.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			38.150.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengelolaan Lingkungan Hidup																
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup**	**50,00 persen**	**50,00 persen**	**50,00 persen**	**283.393.000**	**268.393.000**	**266.393.000**								**455.000.000**	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup*		5 komunitas	5 komunitas	283.393.000	268.393.000	266.393.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		455.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*		1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000	52.500.000	52.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			80.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*		700 Orang	700 Orang	158.893.000	143.893.000	143.893.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			275.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*		9 Lembaga	9 Lembaga	72.000.000	72.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase perolehan penghargaan bidang LH**	**75,00 persen**	**75,00 persen**	**75,00 persen**	**63.750.000**	**63.750.000**	**60.750.000**								**95.000.000**	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	*Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat*		3 penghargaan	3 penghargaan	63.750.000	63.750.000	60.750.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		95.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH*		4 Entitas	4 Entitas	63.750.000	63.750.000	60.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			95.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**14.625.000**	**14.625.000**	**13.875.000**								**25.000.000**	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus lingkungan yang ditangani*		6 kasus	6 kasus	14.625.000	14.625.000	13.875.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani*		18 Pengaduan	18 Pengaduan	12.750.000	12.750.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota*		1 Perkara	1 Perkara	1.875.000	1.875.000	1.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah terkelola di TPS 3R Persentase sampah terangkut ke TPA**	**0,31persen**	**24 76 persen Persen**	**24 76 persen Persen**	**10.555.706.000**	**10.673.668.000**	**10.672.768.000**								**12.257.478.000**	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase pengurangan sampah*		17.69 persen	17.69 persen	10.555.706.000	10.673.668.000	10.672.768.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk	Masyarakat Kota Pekalongan		12.257.478.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*		35 Kelompok	35 Kelompok	551.645.000	639.245.000	652.445.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			422.478.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada*		1 Dokumen	1 Dokumen	2.472.316.000	2.172.316.000	2.140.216.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			4.285.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	*jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional*		5632480 7 Ton	5632480 7 Ton	7.531.745.000	7.862.107.000	7.880.107.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			7.550.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**5.780.009.000**	**5.841.708.000**	**5.512.455.000**								**5.833.147.598**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**5.780.009.000**	**5.841.708.000**	**5.512.455.000**								**5.833.147.598**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**5.780.009.000**	**5.841.708.000**	**5.512.455.000**								**5.833.147.598**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**5.001.122.000**	**5.024.997.000**	**4.719.644.000**								**5.093.941.598**	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	15.564.000	15.564.000	15.564.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapil		37.919.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.088.000	2.088.000	2.088.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.476.000	1.476.000	1.476.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.519.000	DINAS KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	3.636.751.000	3.634.437.000	3.526.871.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapil		3.319.890.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		29 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.574.083.000	3.590.169.000	3.486.503.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.255.240.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	61.300.000	42.900.000	39.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			63.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.368.000	1.368.000	1.368.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	10.313.000	10.313.000	10.313.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapil		20.487.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang*		51 Orang	51 Orang	5.313.000	5.313.000	5.313.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.987.000	DINAS KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*							Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	904.297.000	922.697.000	707.097.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapil		1.275.267.598	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		5 Paket	4 Paket	1.500.000	1.500.000	3.525.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		4 Paket	6 Paket	736.437.000	754.837.000	526.312.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.085.767.598	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	36.360.000	36.360.000	36.360.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			39.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		30 Laporan	40 Laporan	83.000.000	83.000.000	93.900.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	269.447.000	277.236.000	287.436.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapil		291.304.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	136.500.000	136.500.000	136.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			110.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	129.947.000	137.736.000	147.936.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			178.204.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	164.750.000	164.750.000	172.363.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapil		149.074.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		13 Unit	14 Unit	73.195.000	73.195.000	94.283.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			56.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		3 Unit	3 Unit	25.000.000	25.000.000	26.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang*		27 Unit	42 Unit	66.555.000	66.555.000	51.580.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.074.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kantor atau Bangunan Lainnya	*Dipelihara/Direhabilitasi*							Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk**	**88,00 persen**	**85,30 persen**	**88,00 persen**	**354.829.000**	**370.543.000**	**339.175.000**								**336.070.000**	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk*		404772 dokumen	404772 dokumen	354.829.000	370.543.000	339.175.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		336.070.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk*		46000 Dokumen	46000 Dokumen	311.208.000	326.412.000	295.044.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			268.570.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*		1 Laporan	1 Laporan	17.471.000	17.981.000	17.981.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			31.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	*Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan*		2 Laporan	2 Laporan	26.150.000	26.150.000	26.150.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			36.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil**	**93,70 persen**	**93,70 persen**	**93,70 persen**	**328.970.000**	**347.840.000**	**355.308.000**								**279.699.000**	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil*		6981 dokumen	6981 dokumen	328.970.000	347.840.000	355.308.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		279.699.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting*		9285 Dokumen	9285 Dokumen	311.350.000	329.470.000	329.470.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			267.699.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan*		1 Layanan	1 Layanan	17.620.000	18.370.000	25.838.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)**	**10,00 OPD**	**10,00 OPD**	**10,00 OPD**	**95.088.000**	**98.328.000**	**98.328.000**								**123.437.000**	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Penyajian data kependudukan (IKK Output)*		2 kali	2 kali	95.088.000	98.328.000	98.328.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		123.437.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*		2 Laporan	2 Laporan	27.230.000	27.230.000	27.230.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*		2 Laporan	2 Laporan	26.350.000	28.600.000	28.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.437.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan*		1 Dokumen	1 Dokumen	41.508.000	42.498.000	42.498.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**5.611.035.000**	**5.864.179.000**	**6.662.868.000**								**5.716.039.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**5.611.035.000**	**5.864.179.000**	**6.662.868.000**								**5.716.039.000**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**					**729.962.000**	**711.420.000**	**711.420.000**								**344.788.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender**	**7,39 persen**	**7,39 persen**	**7,39 persen**	**264.850.000**	**275.000.000**	**275.000.000**								**77.844.000**	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender*		16.67 persen	16.67 persen	35.000.000	35.000.000	35.000.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	OPD se Kota Pekalongan, Masyarakat/Pegiat Pengarusutamaan Gender (PUG)		28.576.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota*		30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			28.576.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan*		26.67 persen	26.67 persen	220.000.000	220.000.000	220.000.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Forkom Puspa (Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan		35.831.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Perempuan dan Anak)			
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*		3 Dokumen	3 Dokumen	220.000.000	220.000.000	220.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			35.831.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita*		100.00 persen	100.00 persen	9.850.000	20.000.000	20.000.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan		13. 437.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan*		1 Lembaga	1 Lembaga	9.850.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			13. 437.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)**	**14,64 persen**	**23,99 persen**	**15,01 persen**	**94.012.000**	**81.308.000**	**81.308.000**								**63. 515.000**	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota*		100 persen	100 persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan	Masyarakat, Tim LPPAR, Tim PPKBM PUSPAGA ELPePar, Tim HIMPSI		27. 678.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak				
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*		9 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			27.678.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)*		100.00 persen	100.00 persen	74.012.000	61.308.000	61.308.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Masyarakat/Korban Tindak Kekerasan		35.837.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*		88 Layanan	30 Layanan	74.012.000	61.308.000	61.308.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			35.837.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)**	**40,74 persen**	**40,74 persen**	**40,74 persen**	**224.753.000**	**277.022.000**	**277.022.000**								**154.972.000**	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	*Persentase forum anak yang aktif*		28.13 persen	28.13 persen	224.753.000	277.022.000	277.022.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama	Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama		154.972.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										berkualitas dan berdaya saing	dan adaptif secara inklusif dan merata	bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat			PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*		300 Orang	350 Orang	45.000.000	124.841.000	124.841.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			39.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*		9 Dokumen	5 Dokumen	137.160.000	113.291.000	113.291.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			54.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*		3 Dokumen	3 Dokumen	42.593.000	38.890.000	38.890.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			61.472.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**persentase pengaduan kasus anak yang terlayani**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**146.347.000**	**78.090.000**	**78.090.000**								**48.457.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota*		100,00 persen	100,00 persen	12.300.000	12.300.000	12.300.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Sekolah dan Siswa		14.308.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	*Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu*		1 Kegiatan	1 Kegiatan	12.300.000	12.300.000	12.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			14.308.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)*		100 persen	100 persen	95.725.000	57.468.000	57.468.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Anak Korban Kekerasan, Keluarga dan Masyarakat		22.729.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan*		65 Orang	15 Orang	95.725.000	57.468.000	57.468.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			22.729.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus*		100 persen	100 persen	38.322.000	8.322.000	8.322.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	PATBM Kelurahan, Dinas/Instansi/Lembag a terkait		11.420.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK*		80 Orang	50 Orang	38.322.000	8.322.000	8.322.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			11.420.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					**4.881.073.000**	**5.152.759.000**	**5.951.448.000**								**5.371.251.000**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**3.437.844.000**	**3.391.926.000**	**3.271.420.000**								**3.299.595.000**	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100.00 Persen	100.00 Persen	15.762.000	15.762.000	15.762.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		17.372.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.204.000	2.204.000	2.204.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.522.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.558.000	1.558.000	1.558.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.350.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100.00 Persen	100.00 Persen	2.768.231.000	2.744.615.000	2.593.541.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		2.725.477.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		20 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.727.037.000	2.703.421.000	2.552.347.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.677.327.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	39.750.000	39.750.000	39.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			46.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.444.000	1.444.000	1.444.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100.00 Persen	100.00 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		8.631.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.631.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Medono		dan transformasi pelayanan publik						PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100.00 Persen	100.00 Persen	276.751.000	246.601.000	252.169.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		195.266.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		2 Paket	4 Paket	1.730.000	1.730.000	1.730.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		7 Paket	4 Paket	48.305.000	68.155.000	73.723.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.766.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	2.800.000	2.800.000	2.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	30.636.000	30.636.000	30.636.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			22.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		25 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		150 Laporan	150 Laporan	184.780.000	134.780.000	134.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Medono		dan transformasi pelayanan publik						PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100.00 Persen	100.00 Persen	261.100.000	268.948.000	268.948.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		177.455.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	106.200.000	106.200.000	106.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			71.355.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	152.500.000	160.348.000	160.348.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			103.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100.00 Persen	100.00 Persen	111.000.000	111.000.000	136.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		175.394.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		13 Unit	13 Unit	71.960.000	71.960.000	71.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	2 Unit	25.000.000	25.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			99.594.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan*		69 Unit	69 Unit	14.040.000	14.040.000	14.040.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kantor atau Bangunan Lainnya	*Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*							Pekalongan Barat, Medono		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan**	**66,67 persen**	**66,67 persen**	**66,67 persen**	**610.284.000**	**610.284.000**	**1.448.947.000**								**1.233.952.000**	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan*		11.11 persen	11.11 persen	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		1.233.952.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota*		4 Dokumen	5 Dokumen	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.233.952.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"**	**85,51 persen**	**62,96 persen**	**85,51 persen**	**48.520.000**	**48.520.000**	**56.020.000**								**50.164.000**	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase kinerja administrasi kelurahan*		100.00 persen	100.00 persen	48.520.000	48.520.000	56.020.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan		50.164.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*		2 Dokumen	2 Dokumen	48.520.000	48.520.000	56.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.164.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**	**97,68 persen**	**96,54 persen**	**97,66 persen**	**784.425.000**	**1.102.029.000**	**1.175.061.000**								**787.540.000**	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan*		100.00 persen	100.00 persen	784.425.000	1.102.029.000	1.175.061.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator		787.540.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota													Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat			PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*		2 Dokumen	2 Dokumen	173.963.000	177.827.000	175.043.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			199.015.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*		6 Lembaga	3 Lembaga	75.828.000	327.136.000	337.136.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			172.875.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	75.000.000	67.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			102.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*		1 Laporan	1 Laporan	52.500.000	52.500.000	49.716.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			71.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*		1 Dokumen	1 Dokumen	407.134.000	469.566.000	545.666.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			242.650.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	DINAS PERHUBUNGAN					**27.127.294.000**	**27.415.380.000**	**30.896.652.000**								**26.757.276.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**27.127.294.000**	**27.415.380.000**	**30.896.652.000**								**26.757.276.000**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					**27.127.294.000**	**27.415.380.000**	**30.896.652.000**								**26.757.276.000**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**21.428.599.000**	**21.322.637.000**	**21.705.304.000**								**19.254.424.000**	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	16.257.000	16.257.000	16.257.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		29.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.494.000	2.494.000	2.494.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.763.000	1.763.000	1.763.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			16.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	4.754.264.000	4.631.280.000	4.446.325.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		5.315.588.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		42 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.659.645.000	4.536.661.000	4.351.706.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.227.588.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	92.985.000	92.985.000	92.985.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			86.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.634.000	1.634.000	1.634.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		100 persen	100 persen	32.000.000	32.000.000	32.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		41.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*		2 Laporan	1 Laporan	32.000.000	32.000.000	32.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			41.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	145.500.000	145.500.000	145.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		3 Paket	2 Paket	145.500.000	145.500.000	145.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	652.581.000	652.581.000	713.481.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		672.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		3 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		20 Paket	4 Paket	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	12.881.000	12.881.000	12.881.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	315.000.000	315.000.000	350.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			325.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	153.200.000	153.200.000	153.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		24 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		100 Laporan	100 Laporan	94.000.000	94.000.000	117.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			87.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	15.335.006.000	15.352.028.000	15.833.598.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		12.375.836.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000.000	15.000.000.000	15.481.570.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.052.836.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	333.206.000	350.228.000	350.228.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			321.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	492.991.000	492.991.000	518.143.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		810.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		15 Unit	34 Unit	349.066.000	349.066.000	374.218.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			270.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		3 Unit	3 Unit	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		77 Unit	77 Unit	58.925.000	58.925.000	58.925.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ**	**0,74persen 0,44ratio 100,00persen**	**95,00 0,75 0,44 persen persen ratio**	**0,75 0,44 95,00 persen ratio persen**	**5.698.695.000**	**6.092.743.000**	**9.191.348.000**								**7.502.852.000**	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ*		100 persen	100 persen	2.710.948.000	3.005.080.000	3.005.080.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		2.508.451.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*		1 Dokumen	1 Dokumen	31.800.000	31.800.000	31.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan			62.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*		38 Dokumen	38 Dokumen	2.679.148.000	2.973.280.000	2.973.280.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			2.446.451.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah penyediaan perlengkapan jalan*		4 jenis	4 jenis	1.710.675.000	1.784.587.000	4.897.512.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		3.246.735.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun*		67 Unit	67 Unit	430.735.000	335.735.000	335.735.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			430.735.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*		1 Unit	2 Unit	270.000.000	270.000.000	270.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan			1.302.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*		41 Unit	847 Unit	735.940.000	904.852.000	4.017.777.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			1.214.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*		60 Unit	60 Unit	274.000.000	274.000.000	274.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*		1 kali	1 kali	45.000.000	45.000.000	45.000.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*		2 Unit	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan			30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah pembinaan dan pengawasan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir dilaksanakan*		180 kali	180 kali	325.850.000	325.850.000	325.850.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		410.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*		3 Laporan	3 Laporan	325.850.000	325.850.000	325.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			410.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)*		65.19 persen	65.19 persen	244.400.000	246.764.000	232.444.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		728.271.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia*		3 Unit	4 Unit	20.880.000	20.880.000	20.880.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan			439.271.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*		4967 Dokumen	3855 Dokumen	113.700.000	113.700.000	99.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*		9 Unit	9 Unit	99.820.000	102.184.000	102.184.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			104.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan*		92 persen	92 persen	593.172.000	616.812.000	616.812.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan	Pengguna Jalan		484.395.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*		2 Dokumen	4 Dokumen	117.253.000	117.253.000	117.253.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			32.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*		3 Laporan	3 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi*		9 Laporan	12 Laporan	450.919.000	474.559.000	474.559.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			427.395.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)*		83 persen	83 persen	15.750.000	15.750.000	15.750.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan	Pengguna Jalan		15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin*		4 Laporan	4 Laporan	15.750.000	15.750.000	15.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan*		2 kegiatan	2 kegiatan	27.900.000	27.900.000	27.900.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota*		1 Laporan	1 Laporan	18.500.000	18.500.000	18.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	*Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan*		1 Laporan	1 Laporan	9.400.000	9.400.000	9.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan			10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perusahaan Angkutan Umum	*Perusahaan Angkutan Umum*							Semua Kel/Desa		ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah Kab/Kota yang difasilitasi*		3 jenis	3 jenis	25.000.000	25.000.000	25.000.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*		1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**13.772.932.000**	**14.198.348.000**	**14.173.704.000**								**12.755.586.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK**					**13.772.932.000**	**14.198.348.000**	**14.173.704.000**								**12.755.586.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**13.504.752.000**	**13.930.168.000**	**13.905.524.000**								**12.476.818.000**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**5.563.081.000**	**5.669.309.000**	**5.569.665.000**								**4.862.377.000**	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	16.257.000	16.257.000	16.257.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		35.750.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.494.000	2.494.000	2.494.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.763.000	1.763.000	1.763.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	3.948.449.000	4.032.647.000	3.933.003.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		3.330.860.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.897.775.000	3.981.973.000	3.882.329.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.269.360.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	49.040.000	49.040.000	49.040.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.634.000	1.634.000	1.634.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	67.000.000	72.000.000	72.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		10.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*		100 Orang	100 Orang	62.000.000	67.000.000	67.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	434.989.000	434.989.000	449.689.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		465.937.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		3 Paket	4 Paket	4.087.000	4.087.000	4.087.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.600.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		15 Paket	4 Paket	149.176.000	149.176.000	142.553.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			118.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	3.750.000	3.750.000	10.373.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	111.176.000	111.176.000	111.176.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			46.800.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		12 Dokumen	2 Dokumen	16.800.000	16.800.000	16.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.690.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		120 Laporan	120 Laporan	110.000.000	110.000.000	124.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			149.347.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	662.576.000	668.396.000	653.696.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		564.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih								
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	526.560.000	526.560.000	511.860.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			455.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	133.616.000	139.436.000	139.436.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			107.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	433.810.000	445.020.000	445.020.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas kominfo		454.430.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		24 Unit	24 Unit	189.600.000	200.810.000	200.810.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			210.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		3 Unit	3 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		75 Unit	75 Unit	169.210.000	169.210.000	169.210.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			132.430.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase penyelesaian permohonan informasi publik**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**5.232.036.000**	**5.432.210.000**	**5.482.210.000**								**4.971.618.000**	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	*Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah*		87 per		5.232.036.000	5.432.210.000	5.482.210.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		4.971.618.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah Kabupaten/Kota										dan transformasi pelayanan publik						
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik*		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	55.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik*		12 Dokumen	14 Dokumen	145.500.000	145.500.000	145.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik*		12 Dokumen	12 Dokumen	122.884.000	127.796.000	127.796.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			126.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik*		8 Dokumen	8 Dokumen	2.991.014.000	3.021.544.000	3.086.544.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.002.568.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik*		6 Dokumen	6 Dokumen	204.697.000	208.189.000	208.189.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			387.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media*		2 Layanan	2 Layanan	1.112.854.000	1.317.510.000	1.317.510.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			930.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan*		2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pemangku Kepentingan							Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis*		12 Dokumen	12 Dokumen	439.928.000	396.512.000	396.512.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			366.250.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan*		12 Dokumen	1 Dokumen	115.159.000	115.159.000	115.159.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**3,10 indeks**	**3,10 indeks**	**3,10 indeks**	**2.709.635.000**	**2.828.649.000**	**2.853.649.000**								**2.642.823.000**	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)*		62.42 persen	62.42 persen	1.579.749.000	1.685.845.000	1.710.845.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dan Masyarakat		1.681.598.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*		12 Dokumen	12 Dokumen	5.250.000	5.250.000	5.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*		3 Unit	181 Unit	1.574.499.000	1.680.595.000	1.705.595.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.671.598.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)*		9.35 persen	9.35 persen	1.129.886.000	1.142.804.000	1.142.804.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah Kota Pekalongan		961.225.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik*		3 Dokumen	3 Dokumen	250.020.000	250.020.000	250.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola*		2 Unit	2 Unit	154.420.000	154.420.000	154.420.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			144.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan*		3 Unit	3 Unit	368.682.000	381.600.000	381.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			449.725.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	*Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City*		1 Dokumen	1 Dokumen	297.214.000	297.214.000	297.214.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			185.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah*		8 Dokumen	8 Dokumen	32.066.000	32.066.000	32.066.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE*		1 Dokumen	1 Dokumen	27.484.000	27.484.000	27.484.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			37.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**115.500.000**	**115.500.000**	**115.500.000**								**107.494.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**115.500.000**	**115.500.000**	**115.500.000**								**107.494.000**	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun*		2 dokumen	2 dokumen	115.500.000	115.500.000	115.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dan Masyarakat		107.494.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*		8 Dokumen	10 Dokumen	115.500.000	115.500.000	115.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			107.494.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**152.680.000**	**152.680.000**	**152.680.000**								**171.274.000**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan**	**2,80 persen**	**2,80 persen**	**2,80 persen**	**152.680.000**	**152.680.000**	**152.680.000**								**171.274.000**	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik*		9.35 persen	9.35 persen	113.365.000	113.365.000	113.365.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN ASN dan Masyarakat		141.274.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*		2 Laporan	2 Laporan	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*		4 Laporan	4 Laporan	72.870.000	72.870.000	72.870.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*		30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	29.245.000	29.245.000	29.245.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			96.274.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi*		100 persen	100 persen	39.315.000	39.315.000	39.315.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi*		30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	39.315.000	39.315.000	39.315.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					**6.146.648.000**	**6.574.861.000**	**6.448.253.000**								**3.515.969.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**6.146.648.000**	**6.574.861.000**	**6.448.253.000**								**3.515.969.000**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					**6.146.648.000**	**6.574.861.000**	**6.448.253.000**								**3.515.969.000**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**4.661.505.000**	**4.796.413.000**	**4.789.485.000**								**1.613.748.000**	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	15.069.000	15.069.000	15.869.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		30.450.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.798.000	1.798.000	2.598.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.271.000	1.271.000	1.271.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		12 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.450.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	3.736.657.000	3.371.845.000	3.156.369.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		423.011.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.682.079.000	3.317.267.000	3.112.291.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			372.911.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		25 Dokumen	12 Dokumen	53.400.000	53.400.000	42.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.178.000	1.178.000	1.178.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi*		100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		35.447.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		kepegawaian perangkat daerah									dan transformasi pelayanan publik						TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.447.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	278.747.000	768.747.000	753.247.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		333.888.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	57.147.000	527.147.000	527.147.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			76.388.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		2 Paket	4 Paket	45.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		2 Paket	2 Paket	59.100.000	59.100.000	33.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-*		712 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Undangan yang Disediakan							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		60 Laporan	60 Laporan	110.000.000	110.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			130.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	504.156.000	512.796.000	685.504.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		605.952.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		4 Laporan	4 Laporan	7.127.000	7.127.000	7.127.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.952.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	300.000.000	435.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	197.029.000	205.669.000	243.377.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	121.876.000	122.956.000	173.496.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		185.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		14 Unit	15 Unit	86.737.000	87.817.000	134.357.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			115.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang*		1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	17.000.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Bangunan Lainnya	*Dipelihara/Direhabilitasi*							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		92 Unit	35 Unit	20.139.000	20.139.000	22.139.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1,00 dokumen**	**1,00 dokumen**	**1,00 dokumen**	**77.882.000**	**77.882.000**	**77.882.000**								**143.325.000**	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah audit ISO yang dilaksanakan Jumlah peraturan penanaman modal yang disusun*		1 kali 1 peraturan	1 kali 1 peraturan	37.057.000	37.057.000	37.057.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		68.325.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*		3 Dokumen	2 Dokumen	37.057.000	37.057.000	37.057.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			68.325.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal yang disusun*		1 dokumen	1 dokumen	40.825.000	40.825.000	40.825.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*		1 Dokumen	1 Dokumen	40.825.000	40.825.000	40.825.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**46.930.000**	**46.930.000**	**39.630.000**								**80.620.000**	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal*		2 Kegiatan	1 Kegiatan	46.930.000	46.930.000	39.630.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		80.620.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*		1 Dokumen	1 Dokumen	46.930.000	46.930.000	39.630.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			80.620.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal**	**2750,00 dokumen**	**2500,00 dokumen**	**2750,00 dokumen**	**846.700.000**	**890.936.000**	**781.256.000**								**991.233.000**	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun*		12 bulan	12 bulan	846.700.000	890.936.000	781.256.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		991.233.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota*		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*		2500 Pelaku Usaha	2750 Pelaku Usaha	515.000.000	555.972.000	446.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			557.820.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*		120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	91.700.000	91.700.000	91.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			113.413.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terintegrasi secara Elektronik										yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*		60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	225.000.000	228.264.000	228.264.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi Baru pertahun**	**6,96 Miliar Rupiah**	**6,82 Miliar Rupiah**	**6,96 Miliar Rupiah**	**412.043.000**	**657.656.000**	**657.656.000**								**572.043.000**	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal*		100 Perusahaan	150 Perusahaan	412.043.000	657.656.000	657.656.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		572.043.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*		3 Kegiatan Usaha.	3 Kegiatan Usaha.	70.711.000	116.789.000	116.789.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			80.711.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/*		360 Pelaku Usaha	360 Pelaku Usaha	260.342.000	358.373.000	358.373.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU DANA TRANSFER	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			360.342.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							Kecamatan, Semua Kel/Desa	KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*		120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	80.990.000	182.494.000	182.494.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			130.990.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**101.588.000**	**105.044.000**	**102.344.000**								**115.000.000**	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota yang disajikan*		6 aplikasi	6 aplikasi	101.588.000	105.044.000	102.344.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		115.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi*		12 Dokumen	12 Dokumen	101.588.000	105.044.000	102.344.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			115.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*							Semua Kel/Desa		yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					TERPADU SATU PINTU
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					**4.868.436.000**	**5.303.143.000**	**5.155.285.000**								**4.150.825.270**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.868.436.000**	**5.303.143.000**	**5.155.285.000**								**4.150.825.270**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					**840.911.000**	**923.562.000**	**936.762.000**								**521.126.000**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)**	**16,25 indeks**	**16,25 indeks**	**28 indeks**	**830.911.000**	**913.562.000**	**926.762.000**								**521.126.000**	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)*		2 persen	1.66 persen	410.231.000	492.882.000	506.082.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		276.252.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)*		800 Layanan	800 Layanan	106.626.000	111.690.000	111.690.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga			101.737.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*		64 Perpustakaan	5 Perpustakaan	70.339.000	72.867.000	86.067.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			35.054.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		130 Orang	130 Orang	44.140.000	44.140.000	44.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			54.254.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi*		1 Layanan	1 Layanan	139.126.000	144.185.000	144.185.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			20.650.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan*		300 Eksemplar	200 Eksemplar	50.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara,	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas			64.554.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Keberagaman Koleksi Perpustakaan							Panjang Wetan				dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kenaikan Nilai Budaya Baca*		33.77 persen	33.77 persen	420.680.000	420.680.000	420.680.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		244.873.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan*		1 Lokus	1 Lokus	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			41.795.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		2 Perpusta kaan	1 Perpusta kaan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			68.693.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*		1 Orang	6 Orang	27.680.000	27.680.000	27.680.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			43.695.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*		3 Perpustaka an	3 Perpustaka an	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			90.690.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya*		1 Orang	1 Orang	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan**	**1 regulasi**	**1 regulasi**	**1 regulasi**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**								**0**	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh	*Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di*		5 koleksi	5 koleksi	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*wilayahnya (item) (IKK Output)*															
2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	*Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan*		4 Eksemplar	1 Eksemplar	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**4.027.525.000**	**4.379.581.000**	**4.218.523.000**								**3.629.699.270**	
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**3.545.845.000**	**3.883.129.000**	**3.727.161.000**								**3.130.576.270**	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	29.882.000	29.882.000	29.882.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		18.600.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	3.863.000	3.863.000	3.863.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.250.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	3.009.000	3.009.000	3.009.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.350.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	23.010.000	23.010.000	23.010.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian*		100 persen	100 persen	2.600.819.000	2.858.591.000	2.621.523.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		2.326.126.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		administrasi keuangan perangkat daerah									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.555.575.000	2.813.347.000	2.576.279.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.277.326.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	43.800.000	43.800.000	43.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			47.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.444.000	1.444.000	1.444.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.300.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		9.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	162.892.000	209.892.000	245.492.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		217.470.970	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		2 Paket	4 Paket	4.690.000	4.690.000	4.690.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.686.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan								
2.24.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		2 Paket	4 Paket	47.285.000	94.285.000	94.285.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			109.655.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	1.686.000	1.686.000	1.686.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.686.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	42.831.000	42.831.000	42.831.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			53.281.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	8.900.000	8.900.000	8.900.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.706.450	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		36 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.141.290	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		35 Laporan	35 Laporan	55.000.000	55.000.000	90.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.314.830	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	515.652.000	522.996.000	572.996.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		388.370.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	364.500.000	364.500.000	414.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			303.858.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	149.952.000	157.296.000	157.296.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			82.712.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	231.600.000	256.768.000	252.268.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		170.509.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		13 Unit	13 Unit	85.000.000	106.496.000	106.496.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			76.889.550	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	2 Unit	119.000.000	122.672.000	118.172.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			67.119.450	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		61 Unit	39 Unit	27.600.000	27.600.000	27.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**53,33 47,50 persen indeks**	**97,00 75,00 persen indeks**	**319.504.000**	**328.156.000**	**322.924.500**								**341.306.000**	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya*		32.26 persen	32.26 persen	251.325.000	259.977.000	255.375.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		253.518.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan*		3 Berkas	6 Berkas	179.782.000	185.962.000	182.165.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			169.769.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota*		30 Laporan	30 Laporan	71.543.000	74.015.000	73.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			83.748.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip*		16 persen	16 persen	41.600.000	41.600.000	41.600.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		42.727.330	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*		3 Arsip	3 Arsip	41.600.000	41.600.000	41.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			42.727.330	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan*		80 persen	80 persen	26.579.000	26.579.000	25.949.500			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		45.060.670	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*		1 Laporan	1 Laporan	26.579.000	26.579.000	25.949.500	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.060.670	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**162.176.000**	**168.296.000**	**168.437.500**								**157.817.000**	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)*		100 persen	100 persen	105.000.000	108.672.000	108.813.500			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		93.980.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan*		2500 Arsip	2500 Arsip	80.000.000	83.672.000	82.913.500	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.838.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	*Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan*		2500 Berkas	2000 Berkas	25.000.000	25.000.000	25.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.142.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota*		100 persen	100 persen	57.176.000	59.624.000	59.624.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		63.836.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip*		900 Arsip	1300 Arsip	57.176.000	59.624.000	59.624.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			63.836.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					**9.271.875.000**	**9.462.184.000**	**9.153.844.000**								**9.066.514.000**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**9.271.875.000**	**9.462.184.000**	**9.153.844.000**								**9.066.514.000**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**9.271.875.000**	**9.462.184.000**	**9.153.844.000**								**9.066.514.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**5.822.520.000**	**5.796.871.000**	**5.935.115.000**								**5.167.991.000**	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	15.564.000	15.564.000	17.640.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		30.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.088.000	2.088.000	2.088.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.476.000	1.476.000	1.476.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	14.076.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	3.814.503.000	3.724.577.000	3.627.149.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kelautan dan Perikanan		4.099.349.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		26 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.754.515.000	3.664.589.000	3.567.161.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.037.849.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	58.620.000	58.620.000	58.620.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.368.000	1.368.000	1.368.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		9.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	257.324.000	302.944.000	508.292.400			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		243.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		3 Paket	4 Paket	7.348.000	7.348.000	13.348.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		8 Paket	4 Paket	71.910.000	97.530.000	235.663.400	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			41.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	4.500.000	4.500.000	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	53.566.000	53.566.000	58.568.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			68.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan*		12 Paket	2 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penggandaan yang Disediakan							Pekalongan Utara, Panjang Wetan		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		1 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		100 Laporan	100 Laporan	110.000.000	130.000.000	181.213.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	535.022.000	553.679.000	559.853.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		253.622.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	179.475.000	179.475.000	181.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			145.022.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	353.847.000	372.504.000	376.778.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			106.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		100 Persen	100 Persen	1.195.107.000	1.195.107.000	1.217.180.600			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		531.770.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		26 Unit	26 Unit	153.919.000	153.919.000	143.251.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	3 Unit	1.011.000.000	1.011.000.000	1.025.816.600	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			389.270.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		5 Unit	56 Unit	30.188.000	30.188.000	48.113.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			22.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI**	**6,15persen 6,15persen**	**1,00 persen**	**1,00 persen**	**2.696.675.000**	**2.915.533.000**	**2.471.915.000**								**2.531.536.000**	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*		5 persen	5 persen	210.955.000	392.263.000	389.863.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DKP, Masyarakat Kota Pekalongan.		147.716.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	*Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia*		1 Dokumen	1 Dokumen	41.175.000	42.483.000	40.083.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			29.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia*		1 Unit	1 Unit	69.780.000	168.430.000	168.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			67.916.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia*		1 Unit	1 Unit	100.000.000	181.350.000	181.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Nelayan Kecil yang dibina*		100 persen	100 persen	58.268.000	59.576.000	56.358.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Nelayan dan masyarakat Kota Pekalongan		80.050.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*		30 Orang	30 Orang	34.013.000	35.321.000	34.503.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			35.050.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya*		19 Kelompok	19 Kelompok	24.255.000	24.255.000	21.855.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			45.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI*		1 persen	1 persen	2.427.452.000	2.463.694.000	2.025.694.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DKP,masyarakat dan nelayan Kota Pekalongan		2.303.770.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*		1 Layanan	351 Layanan	2.427.452.000	2.463.694.000	2.025.694.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			2.303.770.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**3,00 persen**	**1,00 persen**	**3,00 persen**	**294.382.000**	**246.498.000**	**257.536.000**								**309.993.000**	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan*		100 persen	100 persen	294.382.000	246.498.000	257.536.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		309.993.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		1 Dokumen	1 Dokumen	13.998.000	13.998.000	12.998.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		2 Unit	2 Unit	13.801.000	13.801.000	24.861.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			118.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		1 Unit	1 Unit	208.880.000	163.516.000	165.206.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu)	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang*		4 Dokumen	4 Dokumen	20.400.000	20.400.000	19.688.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah Kabupaten/Kota	*Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan*							Panjang Wetan		yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	*Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat*		30 Orang	30 Orang	37.303.000	34.783.000	34.783.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			101.993.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan**	**12,00pelaku usaha 12,20persen**	**12,20 2,00 persen pelaku usaha**	**2,00 12,20 pelaku usaha persen**	**458.298.000**	**503.282.000**	**489.278.000**								**1.056.994.000**	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Persentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*		16.67 persen	16.67 persen	33.939.000	68.939.000	54.935.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		42.705.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil*		344 Unit Usaha	285 Unit Usaha	33.939.000	68.939.000	54.935.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			42.705.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko							Semua Kel/Desa			merata dan berkualitas					
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*		70 persen	70 persen	424.359.000	434.343.000	434.343.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		1.014.289.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*		30 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	424.359.000	434.343.000	434.343.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			1.014.289.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**24.006.153.000**	**26.784.542.000**	**27.835.468.000**								**23.556.574.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**12.322.034.000**	**14.596.690.000**	**14.796.134.000**								**7.467.724.000**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**9.095.889.000**	**10.528.385.000**	**10.696.309.000**								**3.761.729.000**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina**	**94,31 persen**	**94,31 persen**	**94,31 persen**	**910.520.000**	**1.260.520.000**	**1.300.520.000**								**381.760.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)*		0.76 Persen	0.76 Persen	300.520.000	500.520.000	540.520.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemuda		300.700.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	*Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*		30 Orang	30 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*		48 Orang	48 Orang	100.520.000	100.520.000	100.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	*Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan*		300 Orang	300 Orang	150.000.000	350.000.000	390.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.700.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)*		0.505 Persen	0.505 Persen	610.000.000	760.000.000	760.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Organisasi Kepemudaan		81.060.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan*		1 Dokumen	1 Dokumen	610.000.000	760.000.000	760.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			81.060.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor**	**34,29 persen**	**34,29 persen**	**34,29 persen**	**7.880.369.000**	**8.350.789.000**	**9.395.789.000**								**3.379.969.000**	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan*		76.19 Persen	76.19 Persen	1.691.493.000	1.882.553.000	2.007.553.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		1.802.172.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*		1 Unit	3 Unit	1.691.493.000	1.882.553.000	2.007.553.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.802.172.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota*		38.1 Persen	38.1 Persen	4.028.500.000	3.503.500.000	3.843.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		955.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota*		21 Dokumen	6 Dokumen	3.772.000.000	3.247.000.000	3.467.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			735.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	*Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan*		71 Orang	71 Orang	256.500.000	256.500.000	376.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			220.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi*		39 orang	39 orang	2.057.469.000	2.861.829.000	3.261.829.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		519.890.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*		200 Orang	200 Orang	206.020.000	215.380.000	215.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			215.800.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)*		1 Pelatda	1 Pelatda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan*		5 Orang	150 Orang	1.751.449.000	2.546.449.000	2.946.449.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			184.090.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional*		4 Event	4 Event	102.907.000	102.907.000	282.907.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		102.907.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*		2 Dokumen	2 Dokumen	102.907.000	102.907.000	282.907.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			102.907.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**6.304.767.000**	**7.255.170.000**	**7.146.096.000**								**6.621.226.000**	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	305.000.000	917.076.000	987.076.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinparbudpora		309.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		3 Paket	3 Paket	5.000.000	5.000.000	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*		100 Orang	3000 Orang	300.000.000	912.076.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**3.226.145.000**	**4.068.305.000**	**4.099.825.000**								**3.705.995.000**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.567.098.000**	**1.482.098.000**	**1.457.098.000**								**1.722.149.000**	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan*		6 Event	6 Event	1.107.598.000	1.022.598.000	1.022.598.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas Seni		982.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*		41 Objek	1 Objek	1.107.598.000	1.022.598.000	1.022.598.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			982.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan*		10 Event	8 Event	459.500.000	459.500.000	434.500.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas		740.149.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*		1 Objek	2 Objek	459.500.000	459.500.000	434.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			740.149.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**202.540.000**	**209.560.000**	**209.560.000**								**487.615.000**	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	*Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi*		26 komunitas	26 komunitas	202.540.000	209.560.000	209.560.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas		487.615.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah Kabupaten/Kota											dan adaptif secara inklusif dan merata					KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*		1 Lembaga	1 Lembaga	202.540.000	209.560.000	209.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			487.615.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**								**67.184.000**	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi*		100 Persen	100 Persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Sejarawan		67.184.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat*		1 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			67.184.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)**	**93,97 persen**	**93,97 persen**	**93,97 persen**	**27.500.000**	**177.500.000**	**177.500.000**								**49.900.000**	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Obyek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pemberian tanda bukti kepemilikan dan keaslian cagar budaya Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*		2.48 Persen 3 Buah 3 obyek	2.48 Persen 3 Buah 3 obyek	27.500.000	177.500.000	177.500.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Cagar Budaya		49.900.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan*		3 Objek	3 Objek	27.500.000	177.500.000	177.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			49.900.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa			dan adaptif secara inklusif dan merata					
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase pengunjung museum batik**	**4,71 persen**	**4,71 persen**	**8,29 persen**	**1.389.007.000**	**2.159.147.000**	**2.215.667.000**								**1.379.147.000**	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah pengunjung museum batik*		28000 Orang	28000 Orang	1.389.007.000	2.159.147.000	2.215.667.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Masyarakat		1.379.147.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	*Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu*		1310 Unit	1310 Unit	240.597.000	240.597.000	240.597.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			240.597.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum*		4 Unit	4 Unit	1.016.289.000	1.080.374.000	1.106.894.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			1.017.339.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara*		9 Unit	9 Unit	132.121.000	838.176.000	868.176.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			121.211.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**11.684.119.000**	**12.187.852.000**	**13.039.334.000**								**16.088.850.000**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**11.684.119.000**	**12.187.852.000**	**13.039.334.000**								**16.088.850.000**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**6.304.767.000**	**7.255.170.000**	**7.146.096.000**								**6.621.226.000**	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	*Persentase ketercapaian perencanaan,*		100 Persen	100 Persen	18.121.000	18.121.000	18.121.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		33.310.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	3.538.000	3.538.000	3.538.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.583.000	2.583.000	2.583.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.110.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		5 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	4.844.418.000	4.483.581.000	4.279.507.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		4.754.630.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.772.124.000	4.411.287.000	4.207.213.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.675.820.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	69.900.000	63.300.000	63.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			74.700.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan*		1 Laporan	1 Laporan	2.394.000	8.994.000	8.994.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.110.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Keuangan Akhir Tahun SKPD							Panjang Wetan								
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	305.000.000	917.076.000	987.076.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinparbudpora		309.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		3 Paket	3 Paket	0	0	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*		100 Orang	3000 Orang	0	0	982.076.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	377.988.000	1.048.988.000	1.048.988.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		402.250.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		6 Paket	4 Paket	117.688.000	788.688.000	788.688.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	55.300.000	55.300.000	55.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			58.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	19.500.000	19.500.000	19.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		12 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		230 Laporan	230 Laporan	168.000.000	168.000.000	168.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			203.750.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	559.200.000	582.600.000	607.600.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		559.200.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	324.000.000	324.000.000	349.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			324.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum*		12 Laporan	12 Laporan	232.800.000	256.200.000	256.200.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			232.800.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kantor yang Disediakan							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	200.040.000	204.804.000	204.804.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		562.336.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		19 Unit	19 Unit	111.640.000	113.980.000	113.980.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			108.156.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	1 Unit	68.400.000	70.824.000	70.824.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			434.180.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	20 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)**	**11,50 persen**	**11,50 persen**	**11,50 persen**	**3.909.090.000**	**3.892.476.000**	**3.935.956.000**								**7.743.472.000**	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi*		100 Persen	100 Persen	226.000.000	326.000.000	326.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Wisman/Wisnus		2.946.649.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota*		1 Lokasi	1 Lokasi	217.000.000	217.000.000	217.000.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			2.926.649.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*							Kecamatan, Semua Kel/Desa		pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota*		1 Laporan	4 Laporan	9.000.000	109.000.000	109.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase destinasi wisata yang berkembang*		100 Persen	100 Persen	3.673.090.000	3.556.476.000	3.599.956.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Wisman/Wisnus		4.776.823.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*		1 Lokasi	1 Lokasi	220.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			400.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi*		2 Unit	2 Unit	600.000.000	631.056.000	671.056.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			474.223.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*							Kecamatan, Semua Kel/Desa		pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*		1 Lokasi	1 Lokasi	2.853.090.000	2.905.420.000	2.908.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			3.902.600.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi*		100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Usaha		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	*Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota*		5 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik**	**36,98 persen**	**36,98 persen**	**36,98 persen**	**675.000.000**	**682.020.000**	**682.020.000**								**1.037.528.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		per kebangsaan (IKK Outcome)															
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota*		25 Persen	25 Persen	675.000.000	682.020.000	682.020.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Usaha Pariwisata dan Wisatawan		1.037.528.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			265.028.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri*		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	207.020.000	207.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			495.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			224.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												merata dan berkualitas					
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*		2 Promosi	2 Promosi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			53.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi**	**41,67 persen**	**41,67 persen**	**41,67 persen**	**278.262.000**	**453.262.000**	**453.262.000**								**447.890.000**	
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan EKRAF EXPO*		1 event	1 event	253.262.000	428.262.000	428.262.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		447.890.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia*		1 Unit	1 Unit	253.262.000	428.262.000	428.262.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			447.890.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase ketercapaian pengembangan ekosistem ekonomi kreatif*		100 Persen	100 Persen	25.000.000	25.000.000	25.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	*Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*		25 Produk	25 Produk	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar**	**60,00 persen**	**60,00 persen**	**60,00 persen**	**822.000.000**	**822.000.000**	**822.000.000**								**238.734.000**	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar*		16.67 Persen	16.67 Persen	792.000.000	792.000.000	792.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		208.734.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*		50 Orang	50 Orang	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			28.734.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*		100 Orang	100 Orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*		30 Orang	30 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			50.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya*		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif										didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Persentase Ketercapaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif*		100 Persen	100 Persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*		60 Orang	60 Orang	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					**7.764.241.000**	**8.029.047.000**	**7.941.665.000**								**8.282.162.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**468.342.000**	**469.650.000**	**469.650.000**								**784.975.000**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**468.342.000**	**469.650.000**	**469.650.000**								**784.975.000**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase cadangan pangan daerah**	**4,60 persen**	**4,60 persen**	**4,60 persen**	**383.342.000**	**384.650.000**	**388.650.000**								**724.955.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan*		100 persen	100 persen	137.316.000	137.316.000	137.666.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		69.400.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*		1 Laporan	1 Laporan	108.816.000	108.816.000	109.166.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			32.600.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			16.800.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan daerah*		5300 Kg	5300 Kg	197.553.000	198.861.000	198.561.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang	Masyarakat Kota Pekalongan		125.555.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*		1 Dokumen	1 Dokumen	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*		10 Ton	10 Ton	186.303.000	187.611.000	187.311.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			100.555.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan*		3 kegiatan	3 kegiatan	48.473.000	48.473.000	52.423.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DI NPERPA		530.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*		1 Laporan	1 Laporan	48.473.000	48.473.000	52.423.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			530.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**30.500.000**	**30.500.000**	**26.500.000**								**17.918.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan*		4 kecamatan	4 kecamatan	30.500.000	30.500.000	26.500.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		17.918.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*		1 Dokumen	1 Dokumen	30.500.000	30.500.000	26.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			17.918.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan**	**84,80 persen**	**84,80 persen**	**85,80 persen**	**54.500.000**	**54.500.000**	**54.500.000**								**42.102.000**	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan*		25 sample	25 sample	54.500.000	54.500.000	54.500.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		42.102.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*		1 Dokumen	1 Dokumen	54.500.000	54.500.000	54.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			42.102.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**7.295.899.000**	**7.559.397.000**	**7.472.015.000**								**7.497.187.000**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**7.295.899.000**	**7.559.397.000**	**7.472.015.000**								**7.497.187.000**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**6.038.840.000**	**6.076.525.000**	**5.929.093.000**								**6.578.373.000**	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	16.554.000	16.554.000	16.554.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DI NPERPA		31.350.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.668.000	2.668.000	2.668.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.886.000	1.886.000	1.886.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			17.700.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.352.384.000	5.181.742.000	5.017.539.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DI NPERPA		6.067.694.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		39 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.263.365.000	5.128.944.000	4.964.741.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.984.873.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Selatan, Kuripan Kertoharjo		dan transformasi pelayanan publik						
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	87.271.000	51.050.000	51.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			81.171.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.748.000	1.748.000	1.748.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DI NPERPA		9.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	250.944.000	250.944.000	262.715.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DI NPERPA		142.955.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		9 Paket	4 Paket	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		23 Paket	4 Paket	84.694.000	84.694.000	84.694.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			36.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kuripan Kertoharjo								
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	10.000.000	10.000.000	9.771.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		24 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		150 Laporan	200 Laporan	110.000.000	110.000.000	122.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.205.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		100 persen	100 persen	285.668.000	332.495.000	337.495.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperpa		270.174.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kuripan Kertoharjo								
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	120.000.000	125.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	163.668.000	210.495.000	210.495.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			148.174.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*		100 persen	100 persen	128.290.000	289.790.000	289.790.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		56.700.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		19 Unit	19 Unit	68.290.000	68.290.000	68.290.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			38.200.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	3 Unit	50.000.000	211.500.000	211.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		30 Unit	25 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kuripan Kertoharjo								
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Nilai produksi peternakan pertahun Nilai produksi pertanian pertahun**	**203,65Miliar Rupiah 55,84Miliar Rupiah**	**195,7555,73 Miliar Rupiah Miliar Rupiah**	**195,7555,73 Miliar Rupiah Miliar Rupiah**	**284.730.000**	**323.405.000**	**845.943.000**								**220.275.000**	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian*		100 persen	100 persen	95.711.000	121.770.000	627.770.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		105.515.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*		-	7 Laporan	0	0	455.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			0	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*		12 Laporan	12 Laporan	95.711.000	121.770.000	172.770.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			105.515.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan*		100 persen	100 persen	62.905.000	64.213.000	70.213.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Masyarakat Kota Pekalongan		77.260.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kewenangan Kabupaten/Kota	*mikroorganisme wewenang kabupaten/kota*									yang berkualitas dan berkeadilan	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*		1 Dokumen	1 Dokumen	17.300.000	17.300.000	17.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*		3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	45.605.000	46.913.000	52.913.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			52.260.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*		5 kali	5 kali	59.114.000	60.422.000	70.960.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		20.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan,	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan*		6 Laporan	6 Laporan	59.114.000	60.422.000	70.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			20.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Pakan Ternak yang Beredar*							Selatan, Kuripan Kertoharjo		yang berkualitas dan berkeadilan	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kenaikan pelayanan ULIB*		5 persen	5 persen	67.000.000	77.000.000	77.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		17.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak yang beredar*		200 Laporan	200 Laporan	67.000.000	77.000.000	77.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			17.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**313.518.000**	**262.018.000**	**262.018.000**								**318.907.000**	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)*		100 persen	100 persen	313.518.000	262.018.000	262.018.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		318.907.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												merata dan berkualitas					
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*		1 Unit	0 Unit	51.500.000	0	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			54.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*		1 Unit	1 Unit	174.518.000	174.518.000	174.518.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			244.407.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*		1 Unit	1 Unit	87.500.000	87.500.000	87.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**5,00 persen**	**5,00 persen**	**5,00 persen**	**434.053.000**	**311.326.000**	**326.376.000**								**227.350.000**	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan	*Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani*		800 kasus	800 kasus	43.478.000	43.786.000	58.836.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Masyarakat Kota Pekalongan		56.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota										pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*		12 Laporan	12 Laporan	43.478.000	43.786.000	58.836.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			56.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak*		100 persen	100 persen	11.250.000	11.250.000	11.250.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DI NPERPA		15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM*		6 laporan	6 laporan	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan	*Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN*		500 ekor	500 ekor	176.825.000	26.250.000	26.250.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Masyarakat Kota Pekalongan		35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota										pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*		12 Laporan	12 Laporan	176.825.000	26.250.000	26.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha*		100 persen	100 persen	202.500.000	230.040.000	230.040.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		121.350.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*		1 Laporan	1 Laporan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			37.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap*		12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	165.000.000	192.540.000	192.540.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			83.850.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		penerpan cara yang baik							Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo		pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**48.290.000**	**48.290.000**	**30.752.000**								**53.746.000**	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan*		4 kali	4 kali	48.290.000	48.290.000	30.752.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DI NPERPA		53.746.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*		1 Ha	1 Ha	18.750.000	18.750.000	16.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	*Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan*		2 laporan	2 laporan	29.540.000	29.540.000	14.002.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			28.746.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin**	**75,00 persen**	**75,00 persen**	**75,00 persen**	**30.968.000**	**30.968.000**	**30.968.000**								**31.352.000**	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	*Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin*		5 persen	5 persen	30.968.000	30.968.000	30.968.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DINPERPA		31.352.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	*Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi*		1 Laporan	1 Laporan	30.968.000	30.968.000	30.968.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			31.352.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun**	**5,00 persen**	**5,00 persen**	**5,00 persen**	**145.500.000**	**506.865.000**	**46.865.000**								**67.184.000**	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani*		100 persen	100 persen	145.500.000	506.865.000	46.865.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		67.184.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian*		1 Unit	1 Unit	35.500.000	15.865.000	15.865.000	Kota Pekalongan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan	01. Peningkatan kapasitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam			25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*							, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo		ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*		1 Unit	1 Unit	110.000.000	491.000.000	31.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			42.184.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					**19.973.875.000**	**22.238.374.000**	**19.841.510.000**								**19.973.075.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.427.287.000**	**1.670.372.000**	**1.670.372.000**								**1.980.315.000**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					**1.427.287.000**	**1.670.372.000**	**1.670.372.000**								**1.980.315.000**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)**	**31,49 persen**	**31,49 persen**	**31,49 persen**	**108.219.000**	**110.667.000**	**110.667.000**								**116.452.000**	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	*Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan*		63.64 persen	63.64 persen	108.219.000	110.667.000	110.667.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Koperasi		116.452.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota*									yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*		100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	108.219.000	110.667.000	110.667.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			116.452.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota**	**58,77 persen**	**58,77 persen**	**58,77 persen**	**631.070.000**	**606.707.000**	**606.707.000**								**645.601.000**	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota*		0.98 persen	0.98 persen	631.070.000	606.707.000	606.707.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Koperasi dan anggota koperasi		645.601.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*		300 Orang	225 Orang	631.070.000	606.707.000	606.707.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			645.601.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa			merata dan berkualitas					
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)**	**12,16 persen**	**12,16 persen**	**12,16 persen**	**687.998.000**	**952.998.000**	**952.998.000**								**1.218.262.000**	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha*		4.85 UMKM	4.85 UMKM	687.998.000	952.998.000	952.998.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Usaha Mikro Kecil dan Menengah		1.218.262.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*		300 Unit Usaha	209 Unit Usaha	687.998.000	952.998.000	952.998.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			1.218.262.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**18.546.588.000**	**20.568.002.000**	**18.171.138.000**								**17.992.760.000**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					**18.546.588.000**	**20.568.002.000**	**18.171.138.000**								**17.992.760.000**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**9.168.993.000**	**9.195.060.000**	**8.960.297.000**								**8.912.794.000**	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	*Persentase ketercapaian perencanaan,*		100 Persen	100 Persen	15.663.000	15.663.000	15.663.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan		30.800.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif		UKM Kota Pekalongan			USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.146.000	2.146.000	2.146.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.700.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.517.000	1.517.000	1.517.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.450.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	7.447.045.000	7.310.164.000	7.054.313.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		7.678.274.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		65 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.377.839.000	7.240.958.000	6.985.107.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.603.424.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		1 Dokumen	12 Dokumen	67.800.000	67.800.000	67.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			73.200.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.406.000	1.406.000	1.406.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pegawai Dindagkop dan UKM		14.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		31 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			14.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	335.403.000	504.903.000	509.003.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		317.450.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	2.500.000	2.500.000	5.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	75.053.000	82.553.000	79.351.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			47.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		1 Paket	1 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	82.850.000	82.850.000	85.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			64.950.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		1 Paket	2 Paket	60.000.000	60.000.000	61.302.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		1 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		100 Laporan	200 Laporan	110.000.000	272.000.000	272.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			137.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	831.307.000	824.755.000	809.055.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		517.330.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		1 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		1 Laporan	12 Laporan	337.000.000	337.000.000	319.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			414.517.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		1 Laporan	12 Laporan	491.907.000	485.355.000	487.355.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.413.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	534.575.000	534.575.000	567.263.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		354.440.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		36 Unit	44 Unit	478.075.000	478.075.000	496.163.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			304.440.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	2 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	76 Unit	26.500.000	26.500.000	41.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)**	**76,17 persen**	**76,17 persen**	**76,17 persen**	**16.800.000**	**16.800.000**	**8.660.000**								**2.688.000**	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan*		100 persen	100 persen	8.400.000	8.400.000	6.200.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan		1.688.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem	*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan*		8 Dokumen	8 Dokumen	8.400.000	8.400.000	6.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			1.688.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*										pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan*		100 persen	100 persen	8.400.000	8.400.000	2.460.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Gudang		1.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang*		1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000	2.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			1.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**93,75 persen**	**93,75 persen**	**93,75 persen**	**8.121.372.000**	**9.769.831.000**	**7.607.730.000**								**7.986.463.000**	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional*		12.5 persen	12.5 persen	8.053.772.000	9.702.231.000	7.384.980.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)		7.864.463.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*		2 Unit	1 Unit	2.000.000.000	2.050.000.000	587.075.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			2.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*		12 Unit	12 Unit	6.053.772.000	7.652.231.000	6.797.905.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			5.864.463.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5*		45.98 Persen	45.98 Persen	67.600.000	67.600.000	222.750.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pedagang pasar dan PK5		122.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*		2 Dokumen	2 Dokumen	67.600.000	67.600.000	222.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			122.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya**	**100,00 persen**	**92,00 persen**	**100,00 persen**	**119.405.000**	**121.853.000**	**138.663.000**								**135.000.000**	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok*		72.73 persen	72.73 persen	110.890.000	113.338.000	130.148.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat		130.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*		18 Laporan	19 Laporan	110.890.000	113.338.000	130.148.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			130.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)*		100 persen undefined undefined	100 persen	8.515.000	8.515.000	8.515.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pupuk dan pestisida bersubsidi		5.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida*		3 Laporan	3 Laporan	8.515.000	8.515.000	8.515.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			5.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%							Semua Kel/Desa		yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan volume ekspor**	**7,79 persen**	**7,79 persen**	**7,79 persen**	**135.017.000**	**136.241.000**	**125.831.000**								**116.093.000**	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir*		25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	135.017.000	136.241.000	125.831.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pengusaha potensi ekspor		116.093.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	*Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi*		30 Produk	30 Produk	135.017.000	136.241.000	125.831.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			116.093.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)**	**79,99 persen**	**79,99 persen**	**79,99 persen**	**308.296.000**	**315.984.000**	**315.984.000**								**425.707.000**	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)*		79.99 persen	79.99 persen	308.296.000	315.984.000	315.984.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pedagang		425.707.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas					
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*		5038 Unit	5038 Unit	274.186.000	281.874.000	281.874.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			380.707.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*		30 Orang	85 Orang	34.110.000	34.110.000	34.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			45.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)**	**5,34 persen**	**5,34 persen**	**5,34 persen**	**676.705.000**	**1.012.233.000**	**1.013.973.000**								**414.015.000**	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya*		100 persen	100 persen	676.705.000	1.012.233.000	1.013.973.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Usaha Mikro		414.015.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi*		128 UMKM	160 UMKM	566.535.000	899.483.000	902.033.000	Kota Pekalongan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan	01. Peningkatan kapasitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam			370.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*							, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi*		30 UMKM	55 UMKM	110.170.000	112.750.000	111.940.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			44.015.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					**12.566.722.000**	**13.108.713.000**	**12.746.305.000**								**13.014.716.600**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.455.775.000**	**4.753.256.000**	**4.835.065.000**								**4.489.804.000**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**4.455.775.000**	**4.753.256.000**	**4.835.065.000**								**4.489.804.000**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)**	**1,10 persen**	**0,46 persen**	**1,1 persen**	**3.312.225.000**	**3.507.090.000**	**3.684.570.000**								**3.452.547.000**	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan*		100 persen	100 persen	3.123.200.000	3.315.449.000	3.511.399.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja,	Pencari Kerja		3.130.606.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*		1972 Orang	1693 Orang	2.645.146.000	2.827.939.000	3.025.939.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			2.645.146.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n*		1 Lembaga	1 Lembaga	242.593.000	252.049.000	249.999.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			249.999.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja*		39 Unit	29 Unit	235.461.000	235.461.000	235.461.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			235.461.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*		80 persen	80 persen	67.214.000	67.214.000	67.214.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja,	LPKS Kota Pekalongan		136.326.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*		20 Lembaga	20 Lembaga	67.214.000	67.214.000	67.214.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			136.326.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan*		6 tenant	6 tenant	76.510.000	79.126.000	79.126.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Tenant Kota Pekalongan		97.884.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas*		6 Perusahaan	6 Perusahaan	76.510.000	79.126.000	79.126.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			97.884.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan*		40.00 persen	40.00 persen	45.301.000	45.301.000	26.831.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja,	Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan		87.731.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	45.301.000	45.301.000	26.831.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			87.731.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)**	**25,93 persen**	**25,93 persen**	**25,93 persen**	**693.181.000**	**795.797.000**	**709.293.000**								**761.548.000**	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*		11.86 persen	11.86 persen	425.947.000	425.947.000	414.033.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	1. Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB		509.586.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	*Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi*		120 Orang	120 Orang	18.750.000	18.750.000	18.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan			90.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratruktur yang merata dan berkualitas	penghapusan pekerja anak				
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan*		210 Orang	210 Orang	32.072.000	32.072.000	32.072.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			45.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	*Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD*		20 Orang	20 Orang	8.625.000	8.625.000	8.625.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*		83 Orang	162 Orang	366.500.000	366.500.000	354.586.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			354.586.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun*		12 buku	12 buku	163.124.000	265.740.000	238.020.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leafleat, 3. Perusahaan		193.832.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratruktur yang merata dan berkualitas	penghapusan pekerja anak				
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*		1 Dokumen	1 Dokumen	56.244.000	58.860.000	31.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			59.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*		700 Orang	700 Orang	10.500.000	110.500.000	110.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			17.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*		100 Orang	100 Orang	96.380.000	96.380.000	96.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			117.832.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah CPMI yang terlayani secara legal*		44 orang	44 orang	104.110.000	104.110.000	57.240.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan	CPMI Kota Pekalongan		58.130.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratruktur yang merata dan berkualitas	penghapusan pekerja anak				
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya*		60 Orang	25 Orang	75.000.000	75.000.000	28.130.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			28.130.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	*Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani*		102 Orang	102 Orang	29.110.000	29.110.000	29.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)**	**47,51 persen**	**47,51 persen**	**50 persen**	**450.369.000**	**450.369.000**	**441.202.000**								**275.709.000**	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)	*Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)*		40.17 persen	40.17 persen	328.864.000	328.864.000	324.057.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perusahaan di Kota Pekalongan		114.661.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah Kabupaten/Kota	*Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan*										merata dan berkualitas					
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*		40 Perusahaan	40 Perusahaan	19.150.000	19.150.000	19.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama*		30 Perusahaan	30 Perusahaan	13.614.000	13.614.000	11.184.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			18.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*		13 Laporan	11 Laporan	296.100.000	296.100.000	293.723.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			71.661.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah*		72.45 persen	72.45 persen	121.505.000	121.505.000	117.145.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh		161.048.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kabupaten/Kota dilaksanakan										dan infratruktur yang merata dan berkualitas	penghapusan pekerja anak				
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*		25 Perkara	25 Perkara	11.534.000	11.534.000	11.534.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*		10 Perkara	6 Perkara	7.500.000	7.500.000	6.240.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			12.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	*Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi*		80 Asosiasi dan Serikat Pekerja	80 Asosiasi dan Serikat Pekerja	16.758.000	16.758.000	15.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			22.048.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKS Tripartit yang Dibina*		1 Lembaga	1 Lembaga	74.250.000	74.250.000	73.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan			97.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratruktur yang merata dan berkualitas	penghapusan pekerja anak				
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*		40 Orang	40 Orang	11.463.000	11.463.000	10.963.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**8.110.947.000**	**8.355.457.000**	**7.911.240.000**								**8.524.912.600**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**8.110.947.000**	**8.355.457.000**	**7.911.240.000**								**8.524.912.600**	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**7.550.493.000**	**7.891.187.000**	**7.468.250.000**								**7.791.204.000**	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	17.148.000	17.148.000	17.148.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperinaker		27.656.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	3.016.000	3.016.000	3.016.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.132.000	2.132.000	2.132.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			250.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			16.906.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	6.644.072.000	6.699.778.000	6.217.341.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		6.706.702.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		49 Orang/bulan	47 Orang/bulan	6.590.696.000	6.646.402.000	6.163.965.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.642.202.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	51.400.000	51.400.000	51.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			62.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.976.000	1.976.000	1.976.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		9.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	234.873.000	259.873.000	313.873.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		325.523.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		2 Paket	4 Paket	2.250.000	2.250.000	4.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.250.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	95.873.000	120.873.000	135.873.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			135.873.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	39.400.000	39.400.000	59.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			59.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		1 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		120 Laporan	120 Laporan	83.000.000	83.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			111.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	501.100.000	611.088.000	616.588.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		486.267.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	255.000.000	255.000.000	260.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			228.867.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	243.700.000	353.688.000	353.688.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			255.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	148.300.000	298.300.000	298.300.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKER		235.556.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		27 Unit	23 Unit	98.300.000	98.300.000	98.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.556.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	2 Unit	30.000.000	180.000.000	180.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			180.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		36 Unit	36 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)**	**75,34 persen**	**20,75 persen**	**75,34 persen**	**455.853.000**	**359.669.000**	**338.389.000**								**580.293.800**	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan*		3.5 persen	3.5 persen	455.853.000	359.669.000	338.389.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		580.293.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*		1 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000	13.800.000	13.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			22.880.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*		2 Dokumen	1 Dokumen	203.030.000	106.846.000	106.846.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			206.846.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*		1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000	135.000.000	135.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			198.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*		1 Dokumen	1 Dokumen	66.523.000	66.523.000	66.523.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			97.567.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*		1 Dokumen	1 Dokumen	37.500.000	37.500.000	16.220.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			55.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)**	**25,00 persen**	**25,00 persen**	**25,00 persen**	**10.221.000**	**10.221.000**	**10.221.000**								**14.990.800**	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin	*Persentase pelaksanaan kegiatan*		28 persen	28 persen	10.221.000	10.221.000	10.221.000			1. Memperkuat ketahanan	01. Peningkatan kapasitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam	IKM Kota Pekalongan,		14.990.800	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota*									ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pemkot Pekalongan			DAN TENAGA KERJA
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*		1 Dokumen	1 Dokumen	10.221.000	10.221.000	10.221.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			14.990.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**94.380.000**	**94.380.000**	**94.380.000**								**138.424.000**	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan*		30 persen	30 persen	94.380.000	94.380.000	94.380.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan		138.424.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,*		1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			132.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*							Kecamatan, Semua Kel/Desa		pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				DAN TENAGA KERJA
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas*		1 Dokumen	1 Dokumen	4.380.000	4.380.000	4.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			6.424.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	SEKRETARIAT DAERAH					**15.133.669.000**	**15.169.182.000**	**14.773.886.000**								**14.177.010.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**15.133.669.000**	**15.169.182.000**	**14.773.886.000**								**14.177.010.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**15.133.669.000**	**15.169.182.000**	**14.773.886.000**								**14.177.010.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**15.133.669.000**	**15.169.182.000**	**14.773.886.000**								**14.177.010.000**	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	15.133.669.000	15.169.182.000	14.773.886.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah		14.177.010.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		100 Orang/ bulan	110 Orang/ bulan	15.133.669.000	15.169.182.000	14.773.886.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			14.177.010.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN PEMERINTAHAN					**772.859.000**	**746.943.000**	**702.223.000**								**858.996.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**772.859.000**	**746.943.000**	**702.223.000**								**858.996.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**772.859.000**	**746.943.000**	**702.223.000**								**858.996.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**772.859.000**	**746.943.000**	**702.223.000**								**858.996.000**	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah*		100 persen	100 persen	684.565.000	633.649.000	582.549.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para ASN dan Masyarakat Kota Pekalongan		788.996.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*		1 Dokumen	1 Dokumen	88.261.000	88.345.000	74.770.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			349.417.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*		3 Dokumen	3 Dokumen	458.653.000	250.453.000	260.428.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			247.509.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	137.651.000	294.851.000	247.351.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			192.070.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase efektivitas kerja sama daerah*		100 persen	100 persen	88.294.000	113.294.000	119.674.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para ASN dan Instansi Vertikal		70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*		70 Dokumen	20 Dokumen	88.294.000	113.294.000	119.674.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
	BAGIAN HUKUM					**793.832.000**	**851.388.000**	**716.807.000**								**793.832.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**793.832.000**	**851.388.000**	**716.807.000**								**793.832.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**793.832.000**	**851.388.000**	**716.807.000**								**793.832.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**793.832.000**	**851.388.000**	**716.807.000**								**793.832.000**	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum*		100 persen	100 persen	793.832.000	851.388.000	716.807.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		793.832.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*		9 Dokumen	9 Dokumen	110.345.000	165.345.000	183.657.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			110.345.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*		21 Kasus	21 Kasus	579.727.000	579.727.000	416.259.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			579.727.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*		1000 Dokumen	1500 Dokumen	103.760.000	106.316.000	116.891.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			103.760.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN ORGANISASI					**331.736.000**	**358.256.000**	**327.453.000**								**440.994.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**331.736.000**	**358.256.000**	**327.453.000**								**440.994.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**331.736.000**	**358.256.000**	**327.453.000**								**440.994.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**331.736.000**	**358.256.000**	**327.453.000**								**440.994.000**	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Indeks Kelembagaan Kota*		79 Indeks	79 Indeks	331.736.000	358.256.000	327.453.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		440.994.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*		2 Dokumen	2 Dokumen	100.783.000	100.783.000	91.396.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			108.994.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*		2 Laporan	2 Laporan	123.504.000	150.024.000	139.367.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			154.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*		36 Dokumen	46 Dokumen	107.449.000	107.449.000	96.690.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			178.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA					**345.533.000**	**361.263.000**	**356.263.000**								**961.708.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG**					**345.533.000**	**361.263.000**	**356.263.000**								**961.708.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN PEMERINTAHAN																
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**345.533.000**	**361.263.000**	**356.263.000**								**961.708.000**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa**	**100,00persen 6,00persen**	**100,00 persen**	**6,00 100,00 persen persen**	**345.533.000**	**361.263.000**	**356.263.000**								**961.708.000**	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*		100 persen	100 persen	275.033.000	276.263.000	271.263.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan		306.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*		2 Dokumen	2 Dokumen	57.000.000	57.000.000	57.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			85.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*		1 Laporan	1 Laporan	117.360.000	117.360.000	117.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			116.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*		1 Dokumen	1 Dokumen	100.673.000	101.903.000	96.903.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			105.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT*		12 bulan	12 bulan	70.500.000	85.000.000	85.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD Penerima DBHCHT, Bagian Perekonomian dan SDA		655.708.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*		1 Dokumen	1 Dokumen	70.500.000	85.000.000	85.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			655.708.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					**622.638.000**	**684.498.000**	**647.186.000**								**611.156.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**622.638.000**	**684.498.000**	**647.186.000**								**611.156.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**622.638.000**	**684.498.000**	**647.186.000**								**611.156.000**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)**	**100,00 persen**	**6,00 persen**	**6,00 persen**	**622.638.000**	**684.498.000**	**647.186.000**								**611.156.000**	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD*		100 persen	100 persen	79.626.000	79.626.000	76.626.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		108.389.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*		2 Laporan	2 Laporan	44.900.000	44.900.000	37.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			41.389.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*		2 Laporan	2 Laporan	34.726.000	34.726.000	39.176.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			67.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan*		100 persen	100 persen	543.012.000	604.872.000	570.560.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		502.767.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*		4 Dokumen	4 Dokumen	228.932.000	205.520.000	203.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			214.913.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*		4 Dokumen	4 Dokumen	314.080.000	399.352.000	367.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			287.854.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					**16.991.609.000**	**17.638.748.000**	**18.067.329.000**								**15.800.175.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**16.991.609.000**	**17.638.748.000**	**18.067.329.000**								**15.800.175.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**16.991.609.000**	**17.638.748.000**	**18.067.329.000**								**15.800.175.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**16.991.609.000**	**17.638.748.000**	**18.067.329.000**								**15.800.175.000**	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat*		100 persen	100 persen	16.991.609.000	17.638.748.000	18.067.329.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat di Kota Pekalongan		15.800.175.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi*		30 Dokumen	92 Dokumen	15.502.480.000	16.409.013.000	16.784.265.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			14.197.605.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengelolaan Bina Mental Spiritual							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*		2181 Dokumen	22 Dokumen	608.381.000	351.415.000	391.229.800	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			660.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*		2 Dokumen	68 Dokumen	880.748.000	878.320.000	891.834.200	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			942.570.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN UMUM					**16.821.589.000**	**17.878.549.000**	**20.084.716.000**								**15.433.648.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**16.821.589.000**	**17.878.549.000**	**20.084.716.000**								**15.433.648.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**16.821.589.000**	**17.878.549.000**	**20.084.716.000**								**15.433.648.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**16.821.589.000**	**17.878.549.000**	**20.084.716.000**								**15.433.648.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	56.851.000	56.851.000	56.851.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		93.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.842.000	2.842.000	2.842.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			21.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.009.000	2.009.000	2.009.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		25 Laporan	15 Laporan	52.000.000	52.000.000	52.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			59.750.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	242.312.000	242.312.000	242.312.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		231.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		96 Dokumen	96 Dokumen	240.450.000	240.450.000	240.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			211.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		8 Laporan	1 Laporan	1.862.000	1.862.000	1.862.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			19.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	82.337.000	82.337.000	82.337.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		252.950.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		24 Paket	1 Paket	82.337.000	82.337.000	82.337.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			252.950.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	7.623.598.000	8.188.184.000	10.442.239.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		6.225.727.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	966.108.000	1.016.108.000	1.380.258.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			970.725.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	144.500.000	144.500.000	144.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	1.406.401.000	1.420.987.000	1.429.627.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.591.721.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		1 Paket	2 Paket	66.831.000	66.831.000	101.961.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			257.500.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		6216 Dokumen	2 Dokumen	77.500.000	77.500.000	77.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			77.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*		10 Laporan	4 Laporan	1.085.258.000	1.085.258.000	1.685.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.083.867.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		1800 Laporan	3000 Laporan	3.807.000.000	4.307.000.000	5.553.235.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.994.414.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	2.678.084.000	2.759.850.000	2.668.010.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		2.376.180.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	27.600.000	27.600.000	27.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	1.179.000.000	1.179.000.000	1.139.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			969.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	1.471.484.000	1.553.250.000	1.501.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.380.580.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		100 persen	100 persen	3.814.440.000	4.218.296.000	4.261.248.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		4.764.606.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		70 Unit	74 Unit	1.647.172.000	1.665.124.000	1.808.996.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.456.080.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		7 Unit	7 Unit	1.766.568.000	2.152.472.000	2.061.552.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.908.026.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		190 Unit	190 Unit	400.700.000	400.700.000	390.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah*		100 persen	100 persen	883.967.000	890.719.000	891.719.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		679.835.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	843.967.000	850.719.000	851.719.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			649.835.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*		4 Orang	4 Orang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah*		100 persen	100 persen	1.440.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		810.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*		12 Paket	12 Paket	840.000.000	840.000.000	840.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			480.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*		12 Paket	12 Paket	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			330.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					**1.258.074.000**	**1.475.606.000**	**1.482.330.000**								**1.220.736.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**1.258.074.000**	**1.475.606.000**	**1.482.330.000**								**1.220.736.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**1.258.074.000**	**1.475.606.000**	**1.482.330.000**								**1.220.736.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan keprotokoleran**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.258.074.000**	**1.475.606.000**	**1.482.330.000**								**1.220.736.000**	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan*		100 persen	100 persen	1.258.074.000	1.475.606.000	1.482.330.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		1.220.736.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*		12 Laporan	12 Laporan	256.952.000	264.440.000	277.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			270.359.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*		191 Laporan	191 Laporan	677.186.000	877.186.000	877.186.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			600.377.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*		12 Laporan	12 Laporan	323.936.000	333.980.000	327.744.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD					**52.401.727.000**	**64.025.789.000**	**66.951.287.000**								**61.858.299.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**52.401.727.000**	**64.025.789.000**	**66.951.287.000**								**61.858.299.000**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**					**52.401.727.000**	**64.025.789.000**	**66.951.287.000**								**61.858.299.000**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**34.281.337.000**	**36.347.855.000**	**37.296.700.000**								**34.208.540.000**	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 Persen	15.861.000	15.861.000	14.661.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.262.000	2.262.000	2.262.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.599.000	1.599.000	1.599.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		2 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	10.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 Persen	3.301.199.000	3.408.024.000	3.363.522.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		3.212.271.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		14 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.237.117.000	3.343.942.000	3.299.440.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.140.371.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	62.600.000	62.600.000	62.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.482.000	1.482.000	1.482.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		9.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 Persen	2.868.182.000	4.099.910.000	4.813.710.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		2.711.740.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	24.450.000	24.450.000	40.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih								
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		27 Paket	4 Paket	259.125.000	800.109.000	750.109.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			259.125.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	7.200.000	7.200.000	7.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	643.182.000	773.151.000	773.151.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			625.115.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	141.225.000	160.000.000	160.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			142.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		12 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	35.000.000	32.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		450 Laporan	450 Laporan	1.458.000.000	2.000.000.000	2.750.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa*		100 persen	100 Persen	941.189.000	1.313.663.000	1.366.563.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		867.389.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		penunjang urusan pemerintahan daerah									dan transformasi pelayanan publik						
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	198.625.000	293.625.000	347.125.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	740.764.000	1.018.238.000	1.017.638.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			665.589.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 Persen	1.339.630.000	1.435.485.000	1.521.661.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		1.340.530.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		34 Unit	23 Unit	1.070.530.000	704.760.000	690.936.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.070.530.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	2 Unit	150.000.000	500.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		12 Unit	143 Unit	119.100.000	230.725.000	230.725.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase ketercapaian layanan*		100 persen	100 Persen	24.812.026.000	25.019.912.000	24.986.383.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		24.843.110.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		keuangan dan kesejahteraan DPRD									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*		35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	23.781.211.000	23.941.645.000	23.961.645.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.910.920.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*		175 Paket	4 Paket	498.625.000	520.000.000	509.275.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*		35 Orang	35 Orang	532.190.000	558.267.000	515.463.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			532.190.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD*		100 persen	100 Persen	998.250.000	1.050.000.000	1.225.200.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		1.204.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*		12 Laporan	12 Laporan	398.250.000	450.000.000	625.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			604.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*		12 Paket	12 Paket	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Perda yang ditetapkan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**18.120.390.000**	**27.677.934.000**	**29.654.587.000**								**27.649.759.000**	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD*		100 persen	100 Persen	6.828.720.000	6.575.401.000	6.422.631.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		6.361.581.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*		12 Dokumen	9 Dokumen	2.783.720.000	4.996.701.000	4.374.663.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.782.881.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*		10 Dokumen	8 Dokumen	4.045.000.000	1.578.700.000	2.047.968.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.578.700.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah pembahasan dokumen anggaran dan evaluasi*		100 persen	5 dokumen	412.360.000	407.910.000	300.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		412.360.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	148.648.000	148.648.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	146.902.000	146.902.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*		1 Dokumen	1 Dokumen	112.360.000	112.360.000	4.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.360.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD*		100 persen	100 Persen	3.314.310.000	3.163.815.000	3.006.405.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		3.365.010.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD*		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	305.315.000	268.915.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*		4 Dokumen	4 Dokumen	1.815.010.000	1.618.500.000	1.442.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.815.010.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*		20 Dokumen	20 Dokumen	249.550.000	275.000.000	232.390.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*		60 Dokumen	12 Dokumen	799.750.000	900.000.000	998.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			800.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*		100 persen	100 Persen	1.700.000.000	1.720.000.000	1.193.795.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		1.700.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*		96 Laporan	40 Laporan	300.000.000	320.000.000	259.655.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*		3 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000.000	1.400.000.000	934.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD*		100,00 persen	100 Persen	5.865.000.000	15.810.808.000	18.731.756.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		15.810.808.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*		1 Dokumen	12 Dokumen	5.865.000.000	15.810.808.000	18.731.756.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.810.808.000	SEKRETARIAT DPRD
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					**7.667.714.000**	**7.587.778.000**	**7.447.029.000**								**9.257.312.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**7.667.714.000**	**7.587.778.000**	**7.447.029.000**								**9.257.312.000**	
5.01	**PERENCANAAN**					**6.932.859.000**	**6.849.169.000**	**6.738.799.000**								**8.049.867.000**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**5.764.516.000**	**5.674.484.000**	**5.603.585.000**								**6.517.344.000**	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	15.366.000	15.366.000	15.366.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		326.142.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.972.000	1.972.000	1.972.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.576.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.394.000	1.394.000	1.394.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.623.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		4 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			313.943.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.031.088.000	4.935.904.000	4.743.375.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		5.624.180.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		14 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.984.196.000	4.889.012.000	4.706.083.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.580.844.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	45.600.000	45.600.000	36.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			41.860.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.292.000	1.292.000	1.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.476.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		8.510.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.510.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*		100 persen	100 persen	436.756.000	436.756.000	535.698.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		327.303.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.338.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	85.512.000	85.512.000	85.902.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			58.370.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	2.914.000	2.914.000	2.914.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.677.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	55.473.000	55.473.000	55.473.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.191.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	13.577.000	13.577.000	13.577.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			13.387.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		12 Dokumen	2 Dokumen	2.580.000	2.580.000	2.580.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.544.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		115 Laporan	325 Laporan	275.000.000	275.000.000	373.552.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			200.796.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	166.406.000	170.310.000	170.310.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		153.334.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	1.362.000	1.362.000	1.362.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.343.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			66.002.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	90.044.000	93.948.000	93.948.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			85.989.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		100 persen	100 persen	109.900.000	111.148.000	133.836.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		77.875.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		12 Unit	15 Unit	84.700.000	85.948.000	107.036.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			57.720.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		12 Unit	41 Unit	25.200.000	25.200.000	26.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.155.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN**	**Persentase ketersediaan dokumen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**581.954.000**	**585.800.000**	**546.544.000**								**769.719.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**perencanaan tepat waktu**															
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan*		100 persen	100 persen	489.424.000	492.010.000	452.754.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		651.184.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*		5 Dokumen	5 Dokumen	489.424.000	492.010.000	452.754.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			651.184.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data*		100 persen	100 persen	17.200.000	17.200.000	17.200.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		106.532.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*		1 Dokumen	1 Dokumen	17.200.000	17.200.000	17.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			106.532.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah*		100 persen	100 persen	75.330.000	76.590.000	76.590.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		12.003.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*		8 Laporan	8 Laporan	75.330.000	76.590.000	76.590.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.003.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI**	**Persentase ketersediaan dokumen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**586.389.000**	**588.885.000**	**588.670.000**								**762.804.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**perencanaan bidang Pemsosbud**															
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan*		100 persen	100 persen	187.172.000	188.420.000	188.420.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		196.592.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*		1 Laporan	1 Laporan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.567.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			68.541.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.701.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*		1 Laporan	1 Laporan	101.172.000	102.420.000	102.420.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			93.783.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan	*Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan*		100 persen	100 persen	52.657.000	153.905.000	153.690.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		163.110.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SDA (Sumber Daya Alam)	*Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan*									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*		2 Laporan	2 Laporan	52.657.000	153.905.000	153.690.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			163.110.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*		100 persen	100 persen	346.560.000	246.560.000	246.560.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		403.102.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*		2 Laporan	2 Laporan	167.550.000	186.110.000	186.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			197.072.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan*		2 Laporan	1 Laporan	179.010.000	60.450.000	60.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			206.030.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**734.855.000**	**738.609.000**	**708.230.000**								**1.207.445.000**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**734.855.000**	**738.609.000**	**708.230.000**								**1.207.445.000**	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan*		100 persen	100 persen	267.940.000	228.555.000	228.555.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		252.582.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*		5 Laporan	4 Laporan	173.720.000	152.750.000	152.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			175.573.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*		1 Laporan	1 Laporan	94.220.000	75.805.000	75.805.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			77.009.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial*		100 persen	100 persen	313.725.000	199.994.000	145.875.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		295.859.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial*		2 Dokumen	2 Dokumen	313.725.000	199.994.000	145.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			295.859.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*		-	1 dokumen	0	29.100.000	33.200.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah Kota Pekalongan		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*		-	1 Dokumen	0	29.100.000	33.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase pelaksanaan pengembangan*		100 persen	100 persen	153.190.000	280.960.000	300.600.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		659.004.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inovasi dan teknologi (SiDA)									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*		2 Dokumen	2 Dokumen	141.690.000	269.460.000	289.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			659.004.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual*		1 Laporan	1 Laporan	11.500.000	11.500.000	11.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH					**25.028.276.000**	**25.644.386.000**	**26.811.880.000**								**23.382.469.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**25.028.276.000**	**25.644.386.000**	**26.811.880.000**								**23.382.469.000**	
5.02	**KEUANGAN**					**25.028.276.000**	**25.644.386.000**	**26.811.880.000**								**23.382.469.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**16.739.494.000**	**17.304.362.000**	**17.957.674.000**								**14.446.386.000**	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	17.742.000	17.742.000	17.742.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		25.150.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	3.364.000	3.364.000	3.364.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.700.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.378.000	2.378.000	2.378.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.200.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	13.379.165.000	12.292.924.000	13.354.587.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		12.708.216.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		53 Orang/bulan	56 Orang/bulan	13.256.361.000	12.170.120.000	13.231.783.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.570.966.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	120.600.000	120.600.000	120.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			135.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	2.204.000	2.204.000	2.204.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		9.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	942.386.000	1.294.386.000	1.262.479.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		732.981.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		1 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		20 Paket	21 Paket	359.386.000	711.386.000	579.479.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			219.981.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			110.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		24 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		60 Laporan	250 Laporan	385.000.000	385.000.000	485.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			325.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		100 Persen	100 Persen	735.000.000	1.851.000.000	1.818.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah		0	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*		1 Unit	2 Unit	444.000.000	1.219.000.000	1.237.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*		2 Unit	3 Unit	291.000.000	632.000.000	581.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	765.252.000	777.778.000	823.683.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		723.155.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	514.116.000	514.116.000	514.816.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			506.400.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	248.136.000	260.662.000	305.867.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			213.755.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	894.949.000	1.065.532.000	676.183.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		247.384.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		41 Unit	42 Unit	152.426.000	463.009.000	143.660.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			132.384.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	1 Unit	700.523.000	553.544.000	483.544.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		70 Unit	70 Unit	42.000.000	48.979.000	48.979.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)**	**7,66 persen**	**7,66 persen**	**5,06 persen**	**5.710.413.000**	**5.230.574.000**	**5.823.272.000**								**6.080.990.000**	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu*		100 persen	100 persen	993.805.000	984.001.000	945.908.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		924.853.600	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*		2 Dokumen	2 Dokumen	18.750.000	18.750.000	15.615.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*		2 Dokumen	2 Dokumen	16.875.000	16.875.000	8.815.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*		2 Dokumen	2 Dokumen	27.260.000	27.260.000	23.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			62.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*		2 Dokumen	2 Dokumen	789.250.000	763.348.000	752.202.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			628.699.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*		2 Dokumen	2 Dokumen	79.450.000	80.548.000	78.224.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			138.154.600	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*		12 Dokumen	2 Dokumen	62.220.000	77.220.000	68.052.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D*		100 persen	100 persen	373.183.000	377.134.000	397.925.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		262.900.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*		8500 Dokumen	7000 Dokumen	230.000.000	232.686.000	249.717.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			87.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*		24 Dokumen	24 Dokumen	17.250.000	17.250.000	15.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*		12 Dokumen	48 Dokumen	18.750.000	18.750.000	22.510.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	51.265.000	51.265.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.900.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*		1 Dokumen	1 Dokumen	18.750.000	18.750.000	20.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*		300 Orang	200 Orang	38.433.000	38.433.000	38.433.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			32.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu*		100 persen	100 persen	343.425.000	346.039.000	356.039.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kemenkeu, Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah, DPRD, BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota		393.236.400	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Pekalongan, dan Masyarakat			
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*		4 Dokumen	4 Dokumen	36.750.000	36.750.000	36.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			59.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*		13 Laporan	13 Laporan	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*		7 Laporan	7 Laporan	89.750.000	89.750.000	99.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			95.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*		2 Dokumen	2 Dokumen	69.250.000	69.250.000	69.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			90.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan*		1 Dokumen	2 Dokumen	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Akuntansi Pemerintah Daerah	*Akuntansi Pemerintah Daerah*							Semua Kel/Desa								
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*		120 Orang	120 Orang	124.800.000	127.414.000	127.414.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			111.236.400	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos*		100 persen	100 persen	4.000.000.000	3.523.400.000	4.123.400.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		4.500.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000.000	3.523.400.000	4.123.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.500.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.120.650.000**	**1.453.542.000**	**1.413.542.000**								**1.181.351.000**	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan*		100 persen	100 persen	1.120.650.000	1.453.542.000	1.413.542.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan		1.181.351.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*		2 Dokumen	2 Dokumen	59.650.000	59.650.000	59.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			55.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*		4 Dokumen	4 Dokumen	18.750.000	18.750.000	18.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*		12 Laporan	12 Laporan	227.250.000	347.250.000	266.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			155.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*		2 Laporan	2 Laporan	96.000.000	96.000.000	61.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			65.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	233.000.000	437.171.000	487.471.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			325.480.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*		81 Laporan	81 Laporan	486.000.000	494.721.000	519.721.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			550.871.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)**	**5,00 persen**	**5,00 persen**	**5,00 persen**	**1.457.719.000**	**1.655.908.000**	**1.617.392.000**								**1.673.742.000**	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD*		100 persen 4.8 persen	100 persen 4.8 persen	1.457.719.000	1.655.908.000	1.617.392.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		1.673.742.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*		1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan*		12 Laporan	12 Laporan	174.500.000	174.500.000	140.275.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			135.882.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kebijakan Pajak Daerah							Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*		12 Laporan	12 Laporan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*		12 Laporan	12 Laporan	91.000.000	92.322.000	91.622.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			58.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*		4 Obyek Pajak	6000 Obyek Pajak	122.950.000	172.950.000	172.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			176.550.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*		19000 Dokumen	115000 Dokumen	283.500.000	283.500.000	283.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*		14400 Layanan	14400 Layanan	367.600.000	380.226.000	380.226.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			392.768.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*		2500 Dokumen	2500 Dokumen	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			66.861.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*		3060 Dokumen	3500 Dokumen	216.685.000	344.706.000	344.215.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			227.681.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian*		50 Dokumen	200 Dokumen	97.484.000	103.704.000	100.604.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			159.500.000	BADAN PENDAPATAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengawasan Pajak Daerah	*dan Pengawasan Pajak Daerah*							Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*		2 Laporan	2 Laporan	27.750.000	27.750.000	27.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			51.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**8.252.471.000**	**8.123.318.000**	**9.263.259.000**								**9.967.349.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**8.252.471.000**	**8.123.318.000**	**9.263.259.000**								**9.967.349.000**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**6.282.821.000**	**6.184.784.000**	**7.683.867.000**								**6.544.172.000**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**4.965.746.000**	**4.958.693.000**	**4.760.180.000**								**5.006.473.000**	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian perencanaan,pengangaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen 100 Persen	100 persen	12.014.000	18.614.000	18.614.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		12.850.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.088.000	2.088.000	2.088.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.476.000	1.476.000	1.476.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		4 Laporan	15 Laporan	8.450.000	15.050.000	15.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.450.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen 100 Persen	100 persen	4.187.981.000	4.093.488.000	3.788.829.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM		4.275.219.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.131.813.000	4.043.920.000	3.739.261.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.223.569.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		1100 Dokumen	12 Dokumen	54.800.000	48.200.000	48.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.368.000	1.368.000	1.368.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		100 persen 100 Persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN BKPSDM		9.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*		100 persen 100 Persen	100 persen	304.095.000	304.095.000	360.481.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		199.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		2 Paket	4 Paket	1.500.000	1.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		7 Paket	4 Paket	78.190.000	78.190.000	105.511.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			32.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	45.905.000	45.905.000	61.505.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			52.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	10.000.000	10.000.000	11.465.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		76 Laporan	125 Laporan	165.000.000	165.000.000	175.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen 100 Persen	100 persen	325.100.000	361.964.000	361.964.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		325.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	122.700.000	159.564.000	159.564.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			123.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen 100 Persen	100 persen	131.556.000	175.532.000	225.292.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Aset BKPSDM Kota Pekalongan		184.004.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		13 Unit	13 Unit	48.906.000	52.882.000	52.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.906.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	2 Unit	70.650.000	110.650.000	131.310.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			123.098.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih								SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		25 Unit	15 Unit	12.000.000	12.000.000	41.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Keterpenuhan Formasi ASN**	**80,00 persen**	**80,00 persen**	**80,00 persen**	**1.317.075.000**	**1.226.091.000**	**2.923.687.000**								**1.537.699.000**	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase ketersediaan data PNS*		100 persen	100 persen	593.799.000	519.775.000	2.079.121.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		776.899.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*		170 Dokumen	1 Dokumen	457.969.000	357.969.000	1.946.255.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			641.899.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*		16 Dokumen	12 Dokumen	135.830.000	161.806.000	132.866.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			135.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN*		110 persen 110 Persen	90 persen	235.512.000	235.512.000	295.057.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		101.223.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*		1 Dokumen	6 Dokumen	33.345.000	33.345.000	38.095.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			19.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*		2 Dokumen	2 Dokumen	202.167.000	202.167.000	256.962.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			81.623.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)*		42 persen	42 persen	320.166.000	251.706.000	372.911.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		491.680.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*		6 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	31.540.000	293.745.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			350.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*		17 Orang	4 Orang	165.166.000	165.166.000	24.166.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			86.680.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional*		10 Dokumen	10 Dokumen	36.000.000	36.000.000	36.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			36.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN*		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			19.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Tingkat Disiplin ASN*		100 persen 100 Persen	100 persen	167.598.000	219.098.000	176.598.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		167.897.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*		20 Orang	130 Orang	43.000.000	43.000.000	43.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			43.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*		1 Orang	4 Orang	118.598.000	120.098.000	77.598.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			118.897.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*		5 Laporan	5 Laporan	6.000.000	56.000.000	56.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**1.969.650.000**	**1.938.534.000**	**1.579.392.000**								**3.423.177.000**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase PNS berkembang kompetensinya**	**42 persen**	**100,00 100 persen Persen**	**100,00 persen**	**1.969.650.000**	**1.938.534.000**	**1.579.392.000**								**3.423.177.000**	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*		100 persen 100 Persen	100 persen	1.848.650.000	1.817.534.000	1.524.017.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		628.177.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*		240 Orang	210 Orang	1.533.650.000	1.438.174.000	1.200.237.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			539.677.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*		3 Dokumen	3 Dokumen	315.000.000	379.360.000	323.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			88.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional*		200 orang	200 orang	121.000.000	121.000.000	55.375.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		2.795.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota*		30 Orang	55 Orang	50.000.000	50.000.000	25.925.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000	65.000.000	29.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.743.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi,*		2 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000	6.000.000	0	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama*							Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	INSPEKTORAT DAERAH					**6.669.971.000**	**6.783.271.000**	**6.749.707.000**								**5.768.200.000**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**6.669.971.000**	**6.783.271.000**	**6.749.707.000**								**5.768.200.000**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**					**6.669.971.000**	**6.783.271.000**	**6.749.707.000**								**5.768.200.000**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen 100,00 persen**	**100 persen**	**100 100 persen persen**	**6.286.119.000**	**6.399.419.000**	**6.367.215.000**								**5.318.150.000**	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	15.465.000	15.465.000	15.465.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		14.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.030.000	2.030.000	2.030.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.435.000	1.435.000	1.435.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	5.657.457.000	5.668.837.000	5.615.545.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		4.897.805.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.614.127.000	5.625.507.000	5.572.215.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.863.305.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	42.000.000	42.000.000	42.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.330.000	1.330.000	1.330.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	90.300.000	190.300.000	190.300.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		8.510.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan*		2 Dokumen	26 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Administrasi Kepegawaian	*Administrasi Kepegawaian*							Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*		38 Orang	38 Orang	79.300.000	179.300.000	179.300.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.510.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	268.710.000	268.710.000	268.710.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		203.370.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		15 Paket	4 Paket	61.166.000	61.166.000	61.166.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	3.362.000	3.362.000	3.362.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	44.807.000	44.807.000	44.807.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan*		12 Paket	2 Paket	12.875.000	12.875.000	12.875.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penggandaan yang Disediakan							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		24 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.700.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		30 Laporan	90 Laporan	139.000.000	139.000.000	139.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			103.170.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	93.400.000	94.360.000	94.360.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		60.913.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	47.400.000	47.400.000	47.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			34.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	42.500.000	43.460.000	43.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			21.913.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	160.787.000	161.747.000	182.835.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		133.552.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang*		15 Unit	16 Unit	117.037.000	117.997.000	139.085.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	1 Unit	18.750.000	18.750.000	14.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.552.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		46 Unit	50 Unit	25.000.000	25.000.000	28.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan**	**85,00 persen**	**85,00 persen**	**85,00 persen**	**132.791.000**	**132.791.000**	**131.431.000**								**116.736.000**	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu*		100 persen	100 persen	118.863.000	118.863.000	116.503.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		101.508.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*		70 Laporan	17 Laporan	23.375.000	23.375.000	23.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*		40 Laporan	118 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*		70 Laporan	98 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*		30 Laporan	110 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*		2 Kesepakatan	3 Kesepakatan	31.388.000	31.388.000	31.388.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*		6 Dokumen	6 Dokumen	34.500.000	34.500.000	32.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			51.508.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu*		100 persen	100 persen	13.928.000	13.928.000	14.928.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		15.228.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		yang Terbit Tepat Waktu									dan transformasi pelayanan publik						
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*		2 Laporan	2 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*		3 Laporan	6 Laporan	7.928.000	7.928.000	8.928.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.228.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Level Kapabilitas APIP**	**3,00 nilai**	**3,00 nilai**	**3,00 nilai**	**251.061.000**	**251.061.000**	**251.061.000**								**333.314.000**	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*		100 persen	100 persen	30.848.000	30.848.000	30.848.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		33.235.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*		7 Rekomen dasi	5 Rekomen dasi	27.848.000	27.848.000	27.848.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.235.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*		1 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan*		96 persen	96 persen	220.213.000	220.213.000	220.213.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		300.079.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*		31 perangkat daerah	30 perangkat daerah	17.462.000	17.462.000	17.462.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*		10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	23.400.000	23.400.000	23.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*		8 Kegiatan	15 Kegiatan	78.261.000	78.261.000	78.261.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			130.079.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*		4 perangkat daerah	3 perangkat daerah	101.090.000	101.090.000	101.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			125.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA					**11.082.040.000**	**10.795.840.000**	**10.802.728.000**								**9.468.082.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**11.082.040.000**	**10.795.840.000**	**10.802.728.000**								**9.468.082.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**11.082.040.000**	**10.795.840.000**	**10.802.728.000**								**9.468.082.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**10.588.671.000**	**10.250.649.000**	**10.277.267.000**								**9.056.761.000**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		100 persen	100 persen	121.554.000	121.554.000	121.554.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		132.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.668.000	2.668.000	2.668.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			13.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Utara, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.886.000	1.886.000	1.886.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	117.000.000	117.000.000	117.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			116.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		100 persen	100 persen	8.179.278.000	7.826.732.000	7.671.599.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		7.537.353.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		63 Orang/bulan	62 Orang/bulan	7.943.230.000	7.590.684.000	7.435.551.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.336.353.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		96 Dokumen	12 Dokumen	234.300.000	234.300.000	234.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			198.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.748.000	1.748.000	1.748.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi*		100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		16.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kepegawaian Perangkat Daerah									dan transformasi pelayanan publik						
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			16.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*		100 persen	100 persen	414.635.000	414.635.000	414.635.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		440.890.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	6.450.000	6.450.000	6.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		117 Paket	4 Paket	128.248.000	128.248.000	128.248.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			152.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		96 Paket	4 Paket	7.875.000	7.875.000	7.875.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.750.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		88 Paket	4 Paket	201.062.000	201.062.000	201.062.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			195.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		96 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		96 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		12 Laporan	12 Laporan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.540.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	834.243.000	878.767.000	893.067.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		694.108.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		96 Laporan	4 Laporan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	125.884.000	125.884.000	140.184.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			125.884.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		96 Laporan	12 Laporan	697.859.000	742.383.000	742.383.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			557.724.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	1.028.961.000	998.961.000	1.166.412.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		235.910.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		31 Unit	37 Unit	133.161.000	133.161.000	175.612.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.410.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	15 Unit	850.800.000	820.800.000	945.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			78.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		120 Unit	119 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**19.625.000**	**19.625.000**	**19.625.000**								**66.112.000**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		100 Persen	100 Persen	12.500.000	12.500.000	12.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan		15.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*		3 Laporan	4 Laporan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 Persen	100 Persen	7.125.000	7.125.000	7.125.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara		50.612.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*		4 Laporan	4 Laporan	7.125.000	7.125.000	7.125.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.612.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**115.311.000**	**115.311.000**	**115.311.000**								**83.927.000**	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan*		100 persen	100 persen	48.261.000	48.261.000	48.261.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara		19.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*		5 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	48.261.000	48.261.000	48.261.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			19.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan*		100 Persen	100 Persen	67.050.000	67.050.000	67.050.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		64.327.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan*		2400 Keluarga	2400 Keluarga	67.050.000	67.050.000	67.050.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			64.327.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*							Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**352.808.000**	**404.630.000**	**384.900.000**								**255.119.000**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		100 persen	100 persen	352.808.000	404.630.000	384.900.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		255.119.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		75 Laporan	12 Laporan	352.808.000	404.630.000	384.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			255.119.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**5.625.000**	**5.625.000**	**5.625.000**								**6.163.000**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*		100 persen	100 persen	5.625.000	5.625.000	5.625.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara		6.163.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*		1 Dokumen	1 Dokumen	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.163.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN KANDANG PANJANG					**505.605.000**	**513.041.000**	**513.041.000**								**406.130.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**505.605.000**	**513.041.000**	**513.041.000**								**406.130.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**505.605.000**	**513.041.000**	**513.041.000**								**406.130.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**505.605.000**	**513.041.000**	**513.041.000**								**406.130.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	505.605.000	513.041.000	513.041.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		406.130.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		25 Unit	16 Unit	189.446.000	196.882.000	196.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		10 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	306.784.000	306.784.000	306.784.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			323.630.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN PANJANG WETAN					**524.181.000**	**496.617.000**	**496.617.000**								**510.357.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**524.181.000**	**496.617.000**	**496.617.000**								**510.357.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**524.181.000**	**496.617.000**	**496.617.000**								**510.357.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**524.181.000**	**496.617.000**	**496.617.000**								**510.357.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DESA DAN KELURAHAN	**masyarakat kelurahan**															
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	524.181.000	496.617.000	496.617.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		510.357.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		131 Unit	82 Unit	179.108.000	151.544.000	151.544.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	335.698.000	335.698.000	335.698.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			427.857.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN DEGAYU					**406.069.000**	**408.505.000**	**408.505.000**								**380.194.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**406.069.000**	**408.505.000**	**408.505.000**								**380.194.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**406.069.000**	**408.505.000**	**408.505.000**								**380.194.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**406.069.000**	**408.505.000**	**408.505.000**								**380.194.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	406.069.000	408.505.000	408.505.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		380.194.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*		7 Lembaga Kemasy	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan di Kelurahan	*Pembangunan di Kelurahan*		ara katan					Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Degayu								
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		6 Unit	7 Unit	145.808.000	148.244.000	148.244.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Degayu	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			121.808.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	250.886.000	250.886.000	250.886.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Degayu	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			245.886.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN BANDENGAN					**347.681.000**	**350.117.000**	**352.247.000**								**330.297.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**347.681.000**	**350.117.000**	**352.247.000**								**330.297.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**347.681.000**	**350.117.000**	**352.247.000**								**330.297.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**347.681.000**	**350.117.000**	**352.247.000**								**330.297.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	347.681.000	350.117.000	352.247.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		330.297.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Bandengan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		4 Unit	5 Unit	131.108.000	133.544.000	133.544.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Bandengan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		14 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	207.198.000	207.198.000	209.328.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			235.297.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN KRAPYAK					**800.757.000**	**761.293.000**	**761.293.000**								**600.882.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**800.757.000**	**761.293.000**	**761.293.000**								**600.882.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**800.757.000**	**761.293.000**	**761.293.000**								**600.882.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**800.757.000**	**761.293.000**	**761.293.000**								**600.882.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	800.757.000	761.293.000	761.293.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		600.882.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		27 Unit	23 Unit	319.808.000	273.144.000	273.144.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			121.808.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	471.574.000	478.774.000	478.774.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			466.574.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON					**704.300.000**	**518.868.000**	**521.599.000**								**488.039.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**704.300.000**	**518.868.000**	**521.599.000**								**488.039.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**704.300.000**	**518.868.000**	**521.599.000**								**488.039.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase ketercapaian**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**704.300.000**	**518.868.000**	**521.599.000**								**488.039.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**pemberdayaan masyarakat kelurahan**															
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	704.300.000	518.868.000	521.599.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		488.039.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		10 Unit	12 Unit	359.830.000	174.398.000	174.399.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			137.714.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	335.095.000	335.095.000	337.825.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			337.825.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN PANJANG BARU					**443.855.000**	**546.291.000**	**546.291.000**								**386.322.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**443.855.000**	**546.291.000**	**546.291.000**								**386.322.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**443.855.000**	**546.291.000**	**546.291.000**								**386.322.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**443.855.000**	**546.291.000**	**546.291.000**								**386.322.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara*		100 persen	100 persen	443.855.000	546.291.000	546.291.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		386.322.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		6 Unit	13 Unit	145.808.000	248.244.000	248.244.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	288.672.000	288.672.000	288.672.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			303.822.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN					**9.206.551.000**	**9.214.315.000**	**9.093.363.000**								**8.465.345.001**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**9.206.551.000**	**9.214.315.000**	**9.093.363.000**								**8.465.345.001**	
7.01	**KECAMATAN**					**9.206.551.000**	**9.214.315.000**	**9.093.363.000**								**8.465.345.001**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**8.768.527.000**	**8.730.353.000**	**8.614.711.000**								**8.125.723.001**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	110.455.000	110.455.000	103.690.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		100.391.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.610.000	2.610.000	2.610.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.845.000	1.845.000	1.845.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	106.000.000	106.000.000	99.235.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			92.391.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	7.191.278.000	6.893.600.000	6.772.648.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		6.786.390.001	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		56 Orang/bulan	57 Orang/bulan	6.983.468.000	6.685.790.000	6.564.838.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.608.790.001	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	206.100.000	206.100.000	206.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			174.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.710.000	1.710.000	1.710.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*		100 Persen	100 Persen	386.946.000	386.946.000	427.021.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		340.965.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	5.850.000	5.850.000	7.891.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.800.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	157.728.000	157.728.000	197.853.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			136.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	8.709.000	8.709.000	9.109.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	143.159.000	143.159.000	140.668.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			122.665.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		14 Dokumen	2 Dokumen	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			17.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		4 Laporan	7 Laporan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	836.740.000	885.404.000	856.654.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		694.644.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	9.300.000	9.300.000	9.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.300.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	98.720.000	98.720.000	98.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			86.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	728.720.000	777.384.000	748.634.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			599.344.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	233.108.000	443.948.000	444.698.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		185.104.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*		12 Unit	38 Unit	131.108.000	161.948.000	133.948.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			83.104.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*							Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	9 Unit	62.000.000	242.000.000	270.750.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			62.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		12 Unit	111 Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**18.524.000**	**18.524.000**	**18.524.000**								**19.674.000**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan*		100 Persen	100 Persen	12.500.000	12.500.000	12.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*		2 Laporan	2 Laporan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat*		100 persen	100 persen	6.024.000	6.024.000	6.024.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		9.674.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*		4 Laporan	4 Laporan	6.024.000	6.024.000	6.024.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.674.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**110.991.000**	**110.991.000**	**110.991.000**								**84.375.000**	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan*		100 persen	100 persen	47.425.000	47.425.000	47.425.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		25.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyara katan	47.425.000	47.425.000	47.425.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan*		100 persen	100 persen	63.566.000	63.566.000	63.566.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		59.375.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*		410 Keluarga	410 Keluarga	63.566.000	63.566.000	63.566.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			59.375.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**303.034.000**	**348.972.000**	**343.662.000**								**224.465.000**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*		100 persen	100 persen	303.034.000	348.972.000	343.662.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		224.465.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		73 Laporan	9 Laporan	303.034.000	348.972.000	343.662.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			224.465.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**5.475.000**	**5.475.000**	**5.475.000**								**11.108.000**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*		100 Persen	100 Persen	5.475.000	5.475.000	5.475.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		11.108.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*		1 Dokumen	1 Dokumen	5.475.000	5.475.000	5.475.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.108.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN JENGGOT					**448.216.000**	**480.652.000**	**473.932.000**								**451.341.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**448.216.000**	**480.652.000**	**473.932.000**								**451.341.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**448.216.000**	**480.652.000**	**473.932.000**								**451.341.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**448.216.000**	**480.652.000**	**473.932.000**								**451.341.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	448.216.000	480.652.000	473.932.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		451.341.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		20 Unit	27 Unit	145.808.000	178.244.000	178.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			145.808.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	293.033.000	293.033.000	286.313.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			293.033.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN BUARAN KRADENAN					**443.081.000**	**445.517.000**	**445.517.000**								**385.601.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**443.081.000**	**445.517.000**	**445.517.000**								**385.601.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**443.081.000**	**445.517.000**	**445.517.000**								**385.601.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**443.081.000**	**445.517.000**	**445.517.000**								**385.601.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	443.081.000	445.517.000	445.517.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		385.601.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		8 Unit	9 Unit	149.108.000	151.544.000	151.544.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			88.697.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	284.598.000	284.598.000	284.598.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			284.404.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO					**362.405.000**	**366.739.000**	**366.739.000**								**341.930.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**362.405.000**	**366.739.000**	**366.739.000**								**341.930.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**362.405.000**	**366.739.000**	**366.739.000**								**341.930.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**362.405.000**	**366.739.000**	**366.739.000**								**341.930.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	362.405.000	366.739.000	366.739.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		341.930.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		9 Unit	10 Unit	142.908.000	145.344.000	145.344.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			121.608.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kuripan Kertoharjo								
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	210.122.000	212.020.000	212.020.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			207.822.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO					**428.186.000**	**470.742.000**	**470.742.000**								**384.806.666**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**428.186.000**	**470.742.000**	**470.742.000**								**384.806.666**	
7.01	**KECAMATAN**					**428.186.000**	**470.742.000**	**470.742.000**								**384.806.666**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**428.186.000**	**470.742.000**	**470.742.000**								**384.806.666**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	428.186.000	470.742.000	470.742.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		384.806.666	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		12 Unit	15 Unit	153.753.000	196.309.000	196.309.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			142.466.666	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		1 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	265.058.000	265.058.000	265.058.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			229.840.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN SOKO DUWET					**408.005.000**	**410.441.000**	**410.441.000**								**383.495.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**408.005.000**	**410.441.000**	**410.441.000**								**383.495.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**408.005.000**	**410.441.000**	**410.441.000**								**383.495.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**408.005.000**	**410.441.000**	**410.441.000**								**383.495.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	408.005.000	410.441.000	410.441.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		383.495.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		8 Unit	13 Unit	159.446.000	161.882.000	161.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			129.446.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		12 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	239.184.000	239.184.000	239.184.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			241.549.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN BANYURIP					**442.830.000**	**445.266.000**	**445.266.000**								**416.955.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**442.830.000**	**445.266.000**	**445.266.000**								**416.955.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**442.830.000**	**445.266.000**	**445.266.000**								**416.955.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**442.830.000**	**445.266.000**	**445.266.000**								**416.955.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	442.830.000	445.266.000	445.266.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		416.955.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		9 Unit	9 Unit	150.746.000	153.182.000	153.182.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			126.746.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	282.709.000	282.709.000	282.709.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			277.709.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT					**10.528.587.000**	**10.021.450.000**	**9.854.556.000**								**9.337.536.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**10.528.587.000**	**10.021.450.000**	**9.854.556.000**								**9.337.536.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**10.528.587.000**	**10.021.450.000**	**9.854.556.000**								**9.337.536.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**10.155.522.000**	**9.603.731.000**	**9.441.837.000**								**9.078.247.000**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	121.653.000	121.653.000	120.603.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan		130.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.726.000	2.726.000	2.726.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			13.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.927.000	1.927.000	1.927.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		11 Laporan	15 Laporan	117.000.000	117.000.000	115.950.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			114.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	8.381.464.000	7.792.373.000	7.625.479.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		7.505.717.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		61 Orang/bulan	62 Orang/bulan	8.145.378.000	7.556.287.000	7.389.393.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.307.717.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	234.300.000	234.300.000	234.300.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			195.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.786.000	1.786.000	1.786.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		2 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 Persen	100 Persen	390.418.000	390.418.000	398.518.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		432.426.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		8 Paket	4 Paket	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		16 Paket	4 Paket	97.887.000	97.887.000	97.887.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			149.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	10.500.000	10.500.000	13.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Semua Kel/Desa								
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	202.431.000	202.431.000	202.431.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			191.326.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		96 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		5 Laporan	9 Laporan	19.000.000	19.000.000	24.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	943.999.000	1.031.299.000	1.029.249.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan dan Kec. Pekalongan Barat		778.501.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	116.000.000	121.000.000	117.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			105.250.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	817.499.000	899.799.000	900.849.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			662.751.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 Persen	100 Persen	307.988.000	257.988.000	257.988.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		212.874.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		12 Unit	33 Unit	115.988.000	115.988.000	115.988.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			101.374.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		15 Unit	15 Unit	147.000.000	97.000.000	97.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			66.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		66 Unit	126 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**19.485.000**	**19.485.000**	**19.485.000**								**22.000.000**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*		100 Persen	100 Persen	12.500.000	12.500.000	12.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat		10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*		1 Laporan	1 Laporan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Presentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintaha yang dilimpahkan kepada Camat*		100 persen	100 persen	6.985.000	6.985.000	6.985.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat		12.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*		2 Laporan	4 Laporan	6.985.000	6.985.000	6.985.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Barat**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**123.917.000**	**123.917.000**	**123.917.000**								**40.930.000**	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan*		100 Persen	100 Persen	53.742.000	53.742.000	53.742.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat		22.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*		4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	53.742.000	53.742.000	53.742.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			22.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Presentase Ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan*		100 persen	100 persen	70.175.000	70.175.000	70.175.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat		18.330.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*		1518 Keluarga	1550 Keluarga	70.175.000	70.175.000	70.175.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.330.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**224.038.000**	**268.692.000**	**263.692.000**								**186.505.000**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan Trantibum*		100 Persen	100 Persen	224.038.000	268.692.000	263.692.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	LKK dan Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat		186.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		67 Laporan	11 Laporan	224.038.000	268.692.000	263.692.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			186.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**5.625.000**	**5.625.000**	**5.625.000**								**9.854.000**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*		100 Persen	100 Persen	5.625.000	5.625.000	5.625.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di wilayah Kec. Pekalongan Barat		9.854.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*		1 Dokumen	1 Dokumen	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.854.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
	KELURAHAN MEDONO					**554.774.000**	**572.210.000**	**572.210.000**								**421.650.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**554.774.000**	**572.210.000**	**572.210.000**								**421.650.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**554.774.000**	**572.210.000**	**572.210.000**								**421.650.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**554.774.000**	**572.210.000**	**572.210.000**								**421.650.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 Persen	100 Persen	554.774.000	572.210.000	572.210.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		421.650.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		11 Unit	199 Unit	229.746.000	247.182.000	247.182.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			106.495.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	315.653.000	315.653.000	315.653.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			302.655.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KELURAHAN PODOSUGIH					**396.431.000**	**426.867.000**	**426.867.000**								**339.480.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**396.431.000**	**426.867.000**	**426.867.000**								**339.480.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**396.431.000**	**426.867.000**	**426.867.000**								**339.480.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**396.431.000**	**426.867.000**	**426.867.000**								**339.480.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 Persen	100 Persen	396.431.000	426.867.000	426.867.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		339.480.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		5 Unit	22 Unit	150.746.000	171.182.000	171.182.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			99.295.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	236.310.000	246.310.000	246.310.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			227.685.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KELURAHAN TIRTO					**415.245.000**	**452.681.000**	**452.681.000**								**389.370.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**415.245.000**	**452.681.000**	**452.681.000**								**389.370.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**415.245.000**	**452.681.000**	**452.681.000**								**389.370.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**415.245.000**	**452.681.000**	**452.681.000**								**389.370.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 Persen	100 Persen	415.245.000	452.681.000	452.681.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		389.370.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*		7 Lembaga Kemasy	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan di Kelurahan	*Pembangunan di Kelurahan*		ara katan					Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Tirto								
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		7 Unit	39 Unit	153.446.000	190.882.000	190.882.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Tirto	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			129.446.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		12 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	252.424.000	252.424.000	252.424.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Tirto Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			247.424.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KELURAHAN SAPURO KEBULEN					**472.983.000**	**490.419.000**	**490.749.000**								**416.017.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**472.983.000**	**490.419.000**	**490.749.000**								**416.017.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**472.983.000**	**490.419.000**	**490.749.000**								**416.017.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**472.983.000**	**490.419.000**	**490.749.000**								**416.017.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 Persen	100 Persen	472.983.000	490.419.000	490.749.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		416.017.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*		7 Lembaga Kemasy	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan di Kelurahan	*Pembangunan di Kelurahan*		ara katan					Sapuro Kebulen								
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		4 Unit	308 Unit	147.808.000	165.244.000	165.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			98.697.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	315.800.000	315.800.000	316.130.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			304.820.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KELURAHAN BENDAN KERGON					**561.733.000**	**633.169.000**	**633.169.000**								**490.677.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**561.733.000**	**633.169.000**	**633.169.000**								**490.677.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**561.733.000**	**633.169.000**	**633.169.000**								**490.677.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**561.733.000**	**633.169.000**	**633.169.000**								**490.677.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 Persen	100 Persen	561.733.000	633.169.000	633.169.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		490.677.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		3 Unit	15 Unit	163.808.000	235.244.000	235.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			98.697.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan*		10 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	388.550.000	388.550.000	388.550.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			379.480.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Pekalongan Barat, Bendan Kergon		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT					**574.195.000**	**636.631.000**	**636.631.000**								**530.320.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**574.195.000**	**636.631.000**	**636.631.000**								**530.320.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**574.195.000**	**636.631.000**	**636.631.000**								**530.320.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**574.195.000**	**636.631.000**	**636.631.000**								**530.320.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 Persen	100 Persen	574.195.000	636.631.000	636.631.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		530.320.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		19 Unit	122 Unit	171.753.000	234.189.000	234.189.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			129.753.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		8 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	393.067.000	393.067.000	393.067.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			388.067.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KELURAHAN PRINGREJO					**570.169.000**	**607.605.000**	**607.605.000**								**521.947.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**570.169.000**	**607.605.000**	**607.605.000**								**521.947.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**570.169.000**	**607.605.000**	**607.605.000**								**521.947.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase ketercapaian**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**570.169.000**	**607.605.000**	**607.605.000**								**521.947.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**pemberdayaan masyarakat kelurahan**															
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 Persen	100 Persen	570.169.000	607.605.000	607.605.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		521.947.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		3 Unit	132 Unit	167.108.000	204.544.000	203.734.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			122.708.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	393.686.000	393.686.000	394.496.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			386.739.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR					**12.628.227.000**	**12.126.461.000**	**11.084.321.000**								**9.809.467.100**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**12.628.227.000**	**12.126.461.000**	**11.084.321.000**								**9.809.467.100**	
7.01	**KECAMATAN**					**12.628.227.000**	**12.126.461.000**	**11.084.321.000**								**9.809.467.100**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**12.292.737.000**	**11.747.885.000**	**10.705.745.000**								**9.479.959.100**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	121.752.000	121.752.000	121.752.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		118.156.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	2.784.000	2.784.000	2.784.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perencanaan Perangkat Daerah								Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.968.000	1.968.000	1.968.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		4 Laporan	15 Laporan	117.000.000	117.000.000	117.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			101.156.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	100 persen	8.680.729.000	7.929.637.000	7.814.238.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur		7.851.437.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		14 Orang/bulan	68 Orang/bulan	8.444.605.000	7.693.513.000	7.578.114.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.814.437.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	234.300.000	234.300.000	234.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			34.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.824.000	1.824.000	1.824.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi*		100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	kelurahan, Kecamatan Timur		18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		kepegawaian perangkat daerah									dan transformasi pelayanan publik						
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	411.179.000	411.179.000	411.179.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, Kecamatan Timur		392.536.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	6.450.000	6.450.000	6.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		5 Paket	4 Paket	130.640.000	130.640.000	130.640.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			126.036.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	7.875.000	7.875.000	7.875.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	187.214.000	187.214.000	187.214.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			185.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			32.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		12 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			16.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		7 Laporan	7 Laporan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapain penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*		100 persen	100 persen	1.185.334.000	1.376.574.000	1.376.574.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		886.638.100	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	163.200.000	200.700.000	200.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			76.091.100	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	1.011.634.000	1.165.374.000	1.165.374.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			800.047.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*		100 persen	100 persen	1.883.743.000	1.898.743.000	972.002.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		212.963.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		12 Unit	39 Unit	169.743.000	169.743.000	169.743.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			137.963.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	9 Unit	1.669.000.000	1.684.000.000	757.259.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		12 Unit	120 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**19.625.000**	**19.625.000**	**19.625.000**								**46.136.000**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		100 Persen	100 Persen	12.500.000	12.500.000	12.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan		15.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*		1 Laporan	1 Laporan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat*		100 persen	100 persen	7.125.000	7.125.000	7.125.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur		30.636.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan*		4 Laporan	4 Laporan	7.125.000	7.125.000	7.125.000	Kota Pekalongan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.636.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan di wilayah Timur**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**109.811.000**	**109.811.000**	**109.811.000**								**76.536.000**	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*		100 persen	100 persen	42.761.000	42.761.000	42.761.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat, LKK dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Timur		35.536.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*		4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	42.761.000	42.761.000	42.761.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.536.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan*		100 persen	100 persen	67.050.000	67.050.000	67.050.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur		41.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*		4 Keluarga	710 Keluarga	67.050.000	67.050.000	67.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			41.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur**	**100,00 persen**	**100,00 100 persen persen**	**100,00 100 persen persen**	**200.429.000**	**243.515.000**	**243.515.000**								**200.566.000**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan*		100 persen	100 persen	200.429.000	243.515.000	243.515.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	LKK dan Masyarakat di wilayah kecamatan		200.566.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ketentraman dan ketertiban umum Persetase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum									dan transformasi pelayanan publik			Pekalongan Timur			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		48 Laporan	11 Laporan	200.429.000	243.515.000	243.515.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			200.566.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur**	**100,00 persen**	**100 100,00 persen persen**	**100,00 100 persen persen**	**5.625.000**	**5.625.000**	**5.625.000**								**6.270.000**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*		100 persen	100 persen	5.625.000	5.625.000	5.625.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur		6.270.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*		1 Dokumen	1 Dokumen	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.270.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN KAUMAN					**584.911.000**	**587.347.000**	**587.347.000**								**505.352.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**584.911.000**	**587.347.000**	**587.347.000**								**505.352.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**584.911.000**	**587.347.000**	**587.347.000**								**505.352.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**584.911.000**	**587.347.000**	**587.347.000**								**505.352.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	584.911.000	587.347.000	587.347.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, LKK		505.352.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		2 Unit	9 Unit	153.808.000	156.244.000	156.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			92.057.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	421.728.000	421.728.000	421.728.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.795.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN PONCOL					**506.447.000**	**631.383.000**	**631.383.000**								**0**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**506.447.000**	**631.383.000**	**631.383.000**								**0**	
7.01	**KECAMATAN**					**506.447.000**	**631.383.000**	**631.383.000**								**0**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**506.447.000**	**631.383.000**	**631.383.000**								**0**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	506.447.000	631.383.000	631.383.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		0	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		1 Unit	6 Unit	152.446.000	302.382.000	302.382.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		2583 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	344.626.000	319.626.000	319.626.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN KLEGO					**432.836.000**	**460.272.000**	**460.272.000**								**373.754.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**432.836.000**	**460.272.000**	**460.272.000**								**373.754.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**432.836.000**	**460.272.000**	**460.272.000**								**373.754.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**432.836.000**	**460.272.000**	**460.272.000**								**373.754.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	432.836.000	460.272.000	460.272.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		373.754.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		3 Unit	6 Unit	139.808.000	167.244.000	167.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			82.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan*		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	283.653.000	283.653.000	283.653.000	Kota Pekalongan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			279.254.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Pekalongan Timur, Klego		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
	KELURAHAN GAMER					**368.261.000**	**370.697.000**	**372.227.000**								**285.578.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**368.261.000**	**370.697.000**	**372.227.000**								**285.578.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**368.261.000**	**370.697.000**	**372.227.000**								**285.578.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**368.261.000**	**370.697.000**	**372.227.000**								**285.578.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	368.261.000	370.697.000	372.227.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		285.578.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		4 Unit	7 Unit	145.808.000	148.244.000	148.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			65.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	213.078.000	213.078.000	214.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			208.078.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN NOYONTAANSARI					**483.851.000**	**518.787.000**	**518.787.000**								**404.302.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**483.851.000**	**518.787.000**	**518.787.000**								**404.302.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**483.851.000**	**518.787.000**	**518.787.000**								**404.302.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**483.851.000**	**518.787.000**	**518.787.000**								**404.302.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 Persen	100 Persen	483.851.000	518.787.000	518.787.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat , LKK		404.302.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		1 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Noyontaansari	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		12 Unit	14 Unit	172.808.000	222.744.000	222.744.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Noyontaansari	DTU-DAU DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			97.515.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		1 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	301.668.000	286.668.000	286.668.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Noyontaansari	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			294.287.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN SETONO					**513.588.000**	**516.024.000**	**516.024.000**								**445.227.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**513.588.000**	**516.024.000**	**516.024.000**								**445.227.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**513.588.000**	**516.024.000**	**516.024.000**								**445.227.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**513.588.000**	**516.024.000**	**516.024.000**								**445.227.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	513.588.000	516.024.000	516.024.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		445.227.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*		1 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan di Kelurahan	*Pembangunan di Kelurahan*															
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		3 Unit	3 Unit	160.226.000	162.662.000	162.662.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			77.638.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	343.987.000	343.987.000	343.987.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			355.089.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN KALIBAROS					**417.166.000**	**419.734.000**	**419.734.000**								**625.000.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**417.166.000**	**419.734.000**	**419.734.000**								**625.000.000**	
7.01	**KECAMATAN**					**417.166.000**	**419.734.000**	**419.734.000**								**625.000.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**417.166.000**	**419.734.000**	**419.734.000**								**625.000.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*		100 persen	100 persen	417.166.000	419.734.000	419.734.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		625.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*		2 Unit	6 Unit	143.815.000	146.383.000	146.383.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		2 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	263.976.000	263.976.000	263.976.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			310.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**21.971.769.000**	**18.329.515.000**	**16.854.889.000**								**4.601.203.300**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**21.971.769.000**	**18.329.515.000**	**16.854.889.000**								**4.601.203.300**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**21.971.769.000**	**18.329.515.000**	**16.854.889.000**								**4.601.203.300**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100,00 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.473.274.000**	**4.255.333.000**	**2.760.207.000**								**2.462.161.300**	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	100 persen	14.772.000	14.772.000	14.772.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		17.916.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.624.000	1.624.000	1.624.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2 Dokumen	2 Dokumen	1.148.000	1.148.000	1.148.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		4 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.416.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian*		100 persen	100 persen	2.006.021.000	3.529.884.000	2.030.258.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan		2.194.320.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		administrasi keuangan perangkat daerah									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif		Bangsa dan Politik Kota Pekalongan			
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.966.257.000	3.490.120.000	1.990.494.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.159.820.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		12 Dokumen	12 Dokumen	38.700.000	38.700.000	38.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	1 Laporan	1.064.000	1.064.000	1.064.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		9.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	100 persen	135.730.000	182.370.000	182.370.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		92.418.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		2 Paket	4 Paket	30.000.000	66.640.000	66.640.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		12 Paket	4 Paket	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		11 Paket	4 Paket	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		12 Paket	2 Paket	8.300.000	8.300.000	8.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		12 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		36 Laporan	50 Laporan	71.280.000	81.280.000	81.280.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.618.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	247.971.000	259.527.000	264.027.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		80.507.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		12 Laporan	4 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	48.900.000	48.900.000	53.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	12 Laporan	198.071.000	209.627.000	209.627.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			29.507.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100 persen	100 persen	63.780.000	263.780.000	263.780.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		67.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		9 Unit	10 Unit	44.530.000	44.530.000	44.530.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	1 Unit	11.250.000	211.250.000	211.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		12 Unit	17 Unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.646.035.000**	**1.751.061.000**	**1.794.489.000**								**860.950.000**	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	*Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan,*		100 persen	100 persen	1.646.035.000	1.751.061.000	1.794.489.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah	Masyarakat, Ormas dan Pelajar		860.950.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*pelaksanaan upacara bendera dan korp musik*									dan transformasi pelayanan publik	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*		268 Orang	244 Orang	26.792.000	26.792.000	26.792.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*		1024 Orang	1341 Orang	255.243.000	257.756.000	252.956.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			140.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,*		566 Keluarga	953 Keluarga	872.500.000	975.013.000	1.023.241.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			150.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Berbangsa, dan Bernegara															
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	*Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka*		1 Dokumen	1 Dokumen	491.500.000	491.500.000	491.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			540.650.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik**	**16 lembaga**	**16 lembaga**	**16 lembaga**	**17.235.294.000**	**11.458.242.000**	**11.375.314.000**								**845.618.000**	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik*		100 persen	100 persen	17.235.294.000	11.458.242.000	11.375.314.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, parpol dan pemilih pemula (lembaga pendidikan)		845.618.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,*		5016 Orang	854 Orang	16.978.221.000	11.289.861.000	11.231.952.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka			774.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*							Semua Kel/Desa			sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*		420 Orang	680 Orang	257.073.000	168.381.000	143.362.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			70.918.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**301.772.000**	**361.772.000**	**386.772.000**								**134.367.000**	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat*		2 kali	7 kali	301.772.000	361.772.000	386.772.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Organisasi kemasyarakatan		134.367.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang*		8 Orang	11 Orang	301.772.000	361.772.000	386.772.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah			134.367.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**209.694.000**	**187.207.000**	**212.207.000**								**207.821.000**	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*jumlah pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya* *Jumlah Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama* *Jumlah Sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan*		1 kali 8 kali 8 kali	1 kali 7 kali 8 kali	209.694.000	187.207.000	212.207.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, Ormas dan pelajar		207.821.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*		511 Orang	401 Orang	209.694.000	187.207.000	212.207.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			207.821.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**105.700.000**	**315.900.000**	**325.900.000**								**90.286.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah laporan rencana penanganan konflik sosial yang disusun*		1 laporan	1 laporan	105.700.000	315.900.000	325.900.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat dan Ormas		90.286.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*		420 Orang	270 Orang	105.700.000	315.900.000	325.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			90.286.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H						**1.008.539.215.000**	**1.024.773.811.000**	**1.069.011.991.000**								**1.056.155.506.535**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

5.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Pekalongan bertambah sebesar Rp. 44.238.180.000 dari semula Rp. 1.024.773.811.000 (APBD Penetapan) menjadi Rp. 1.069.011.991.000 (Perubahan RKPD). Kerangka pendanaan untuk tahun 2024 secara lengkap disajikan dalam Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Perubahan Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PENDAPATAN DAERAH	**971.139.215.000**	**973.848.811.000**	**1.006.347.876.000**	**35.208.661.000**	**32.499.065.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**249.510.605.000**	**248.422.169.000**	**264.390.216.000**	**14.879.611.000**	**15.968.047.000**
Pajak Daerah	105.000.000.000	106.000.000.000	106.700.000.000	1.700.000.000	700.000.000
Retribusi Daerah	22.274.360.000	127.931.569.000	143.104.255.000	120.829.895.000	14.752.686.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.365.300.000	6.365.300.000	7.197.536.000	832.236.000	832.236.000
Lain-lain PAD yang Sah	115.870.945.000	8.125.300.000	7.388.425.000	-108.482.520.000	-316.875.000
PENDAPATAN TRANSFER	**719.378.610.000**	**725.426.642.000**	**741.957.660.000**	**22.579.050.000**	**16.531.018.000**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**637.314.059.000**	**643.362.091.000**	**639.239.428.000**	**1.925.369.000**	**-4.122.663.000**
Bagi Hasil	29.844.124.000	27.266.333.000	31.209.351.000	1.365.227.000	3.943.018.000
Dana Alokasi Umum	447.688.903.000	468.978.068.000	468.978.068.000	21.289.165.000	0
Dana Alokasi Khusus	149.836.793.000	147.117.690.000	139.052.009.000	-10.784.784.000	-8.065.681.000
Dana Insentif Fiskal	9.944.239.000	0	0	-9.944.239.000	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**82.064.551.000**	**82.064.551.000**	**102.718.232.000**	**20.653.681.000**	**20.653.681.000**
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	82.064.551.000	82.064.551.000	82.064.551.000	0	0
Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	20.653.681.000	20.653.681.000	20.653.681.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**2.250.000.000**	**0**	**0**	**-2.250.000.000**	**0**
Pendapatan Hibah	2.250.000.000	0	0	-2.250.000.000	0
BELANJA	**1.008.539.215.000**	**1.024.773.811.000**	**1.069.011.991.000**	**60.472.776.000**	**44.238.180.000**
BELANJA OPERASI	**889.781.384.900**	**913.974.138.000**	**941.369.814.780**	**51.588.429.880**	**27.395.676.780**
Belanja Pegawai	435.505.100.360	430.669.816.000	432.842.014.500	-2.663.085.860	2.172.198.500
Belanja Barang dan Jasa	387.645.670.540	440.037.571.000	463.896.876.680	76.251.206.140	23.859.305.680
Belanja Hibah	64.949.926.000	41.316.875.000	42.113.332.000	-22.836.594.000	796.457.000
Belanja Bantuan Sosial	1.680.688.000	1.949.876.000	2.517.591.600	836.903.600	567.715.600
BELANJA MODAL	**114.781.230.100**	**107.299.673.000**	**123.542.176.220**	**8.760.946.120**	**16.242.503.220**
Belanja Modal Tanah	80.000.000	772.160.000	953.730.000	873.730.000	181.570.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.101.164.100	19.855.856.000	26.725.806.220	3.624.642.120	6.869.950.220
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.313.330.000	25.740.369.000	23.131.126.000	-19.182.204.000	-2.609.243.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.161.776.000	60.221.703.000	70.430.761.000	21.268.985.000	10.209.058.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.600.000	641.855.000	2.249.848.000	2.159.248.000	1.607.993.000
Belanja Aset Lainnya	34.360.000	67.730.000	50.905.000	16.545.000	-16.825.000

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
BELANJA TIDAK TERDUGA	**3.976.600.000**	**3.500.000.000**	**4.100.000.000**	**123.400.000**	**600.000.000**
Belanja Tidak Terduga	3.976.600.000	3.500.000.000	4.100.000.000	123.400.000	600.000.000
BELANJA TRANSFER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN	**37.400.000.000**	**50.925.000.000**	**62.664.115.000**	**25.264.115.000**	**11.739.115.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**42.650.000.000**	**53.925.000.000**	**62.664.115.000**	**20.014.115.000**	**8.739.115.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	28.000.000.000	45.200.000.000	53.939.115.000	25.939.115.000	8.739.115.000
Pencairan Dana Cadangan	14.650.000.000	8.725.000.000	8.725.000.000	-5.925.000.000	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0	0		0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.250.000.000**	**3.000.000.000**	**0**	**-5.250.000.000**	**-3.000.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0		
Penyertaan Modal Daerah	5.250.000.000	3.000.000.000	0	-5.250.000.000	-3.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0		
SILPA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Bappeda, BPKAD Kota Pekalongan, 2024

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun guna mengakomodir dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, perubahan kebijakan Pusat maupun Provinsi, perkembangan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Penyesuaian dilakukan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kota Pekalongan. Selanjutnya, Perubahan RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Akhirnya, Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 9 Juli 2024

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024.

www.pekalongankota.bps.go.id, 2024.

www.bps.go.id, 2024.

BAPPEDA
Kota Pekalongan

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

City Of Crafts
and Folk Art
Kota Pekalongan
Designed UNESCO
Creative City In 2014

Pekalongan
World's City of Batik

BAPPEDA
Membangun
Bersama
Masyarakat